



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang berimplikasi kepada kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik dalam skala makro maupun mikro, serta perubahan kebijakan nasional terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

- Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Lampiran Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Mei 2022

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 10 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)

NIP. 19800507 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:
(5/49/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Sehubungan dengan terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang berimplikasi kepada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam skala makro maupun mikro, serta perubahan kebijakan nasional terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maka perlu perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana pembangunan daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi saat ini beserta dinamika permasalahannya dan mimpi serta cita-cita di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (UU 25/2004) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan tersebut berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Meskipun terbagi berdasarkan jangka waktu, pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang harmonis yang mana RPJPD menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD kemudian RPJMD menjadi acuan untuk dokumen lainnya. Kesatuan tersebut tidak hanya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah saja, tetapi juga satu kesatuan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan provinsi maupun nasional. Kesatuan ini akan membuat target pembangunan nasional, target pembangunan provinsi, dan target pembangunan kabupaten/kota dapat dicapai secara sinergis.

Pada tanggal 27 Juni 2018, kota Bogor melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota periode 2019-2024. Berdasarkan hasil pilkada maka ditetapkan pasangan Bima Arya dan Dedie A. Rachim sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bogor periode 2019-2024 serta telah dilantik pada tanggal 20 April 2019. Walikota dan Wakil Walikota terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019-2024. Seiring dengan dinamika permasalahan yang terjadi pada tahun 2020, dimana pada triwulan pertama tahun 2020 telah terjadi pandemi Covid-19 yang sangat



berdampak secara global dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian rencana program pembangunan di kota Bogor di tahun 2020 maupun tahun-tahun berikutnya, maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Bogor Tahun 2019-2024, baik dalam hal kebijakan, strategi maupun prioritas pembangunan daerah kota Bogor di sisa masa berlaku RPJMD kota Bogor Tahun 2019-2024.

Selain itu, dinamika perubahan kebijakan nasional yang ada setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, juga berkonsekuensi terhadap perlunya penyesuaian-penyesuaian, baik dari sisi regulasi maupun arah kebijakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam pasal 342 mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) diatas berkaitan dengan terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Lebih lanjut dipersyaratkan dalam PMDN Nomor 86 tahun 2017 pasal 342 ayat (2) bahwa dalam rangka efektivitas, RPJMD tidak dapat dilakukan perubahan jika sisa masa berlakunya

kurang dari 3 (tiga) tahun.

Penyusunan Perubahan RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pasal 344, berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJMD. Penyusunan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud, diawali dengan penyusunan rancangan awal RPJMD yang mencakup :

- a. Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 sampai dengan Tahun 2020;
- b. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis yang diakibatkan oleh adanya perubahan mendasar;
- c. Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- d. Perumusan tujuan dan sasaran;
- e. Perumusan perubahan strategi dan arah kebijakan;
- f. Perumusan perubahan program pembangunan daerah; dan
- g. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dilakukan mulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan peraturan daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024 dilakukan dengan memperhatikan Perpres Nomor 18 Tahun 2019 tentang RPJMN dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 sampai dengan Tahun 2020. Selain itu Perubahan RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024 disusun dengan memperhatikan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024 menggunakan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, dan *top-down* serta *bottom-up*. Pendekatan proses perencanaan sebagaimana dimaksud diatas yaitu :

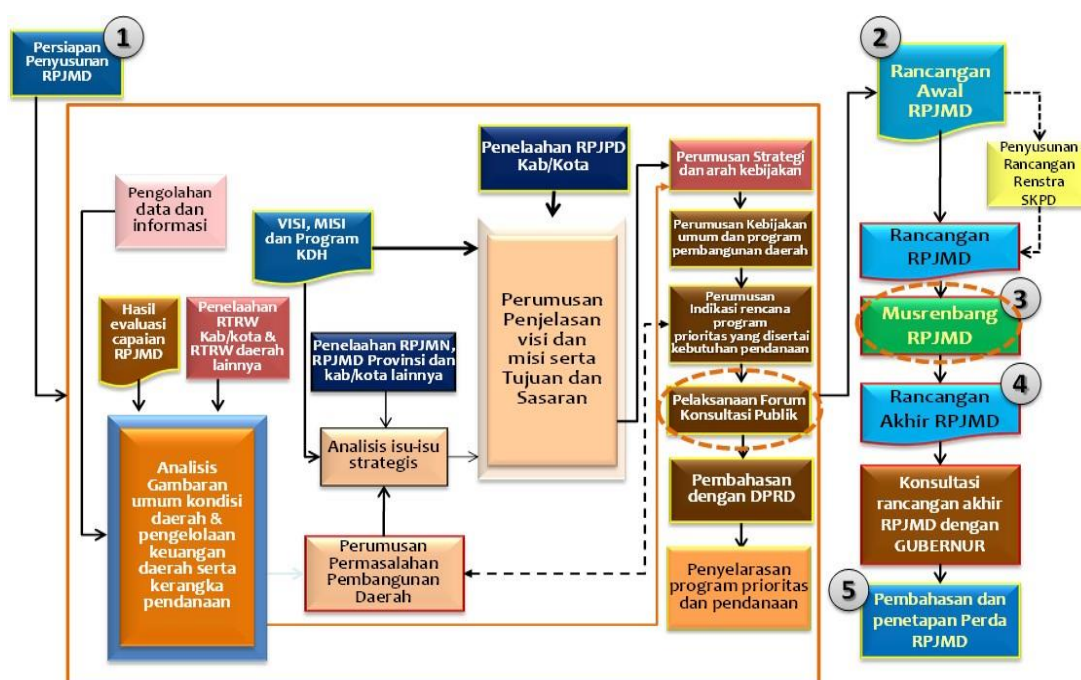
1. **Pendekatan Politik**, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana program karena rakyat pemilih menentukan pilihannya

berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Dalam hal ini, pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Pendekatan politis juga dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Bogor, yang mengacu pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilantik.

2. **Pendekatan Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. **Pendekatan Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan, para pakar/narasumber yang kompeten di bidangnya. Penjaringan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dilaksanakan melalui proses konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan, pembahasan dengan perangkat daerah sebagai pelaksana pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. **Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up)**, pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Tahapan Penyusunan Perubahan RPJMD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Tahapan Penyusunan Perubahan RPJMD sesuai dengan
amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017



Sumber : Bappeda Kota Bogor, 2019

Lingkup Perubahan RPJMD kota Bogor tahun 2019-2024, adalah :

1. Penyesuaian dasar hukum terkait adanya perubahan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 dan kebijakan lain di ranah perencanaan dan penganggaran.
2. Pemutakhiran capaian kinerja setiap urusan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019-2020
3. Pemutakhiran capaian pengelolaan keuangan daerah, dan Penyesuaian proyeksi keuangan daerah
4. Reformulasi Identifikasi Permasalahan dan Isu strategis terkait adanya pandemi Covid-19 dan permasalahan lainnya di kota Bogor.
5. Penyesuaian strategi, arah kebijakan dan sasaran terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi
6. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Kepmendagri 050 tahun 2020
7. Penyesuaian indikator sasaran, indikator program dan target kinerja
8. Penyesuaian target proyeksi indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta targetnya
9. Penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, dan



pemerintah provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMN dan RPJMD provinsi Jawa Barat

10. Penyesuaian dengan revisi RTRW kota Bogor

Penyusunan Perubahan RPJMD kota Bogor Tahun 2019-2024, menjadi dokumen yang sangat strategis karena dokumen ini menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah kota Bogor dalam melaksanakan program pembangunan daerah selama kurun waktu 2019-2024 yang merupakan :

1. Penjabaran pelaksanaan RPJPD kota Bogor Tahun 2005-2025;
2. Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011-2031;
3. Pedoman arah kebijakan dan strategi untuk percepatan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 di Kota Bogor;
4. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah khususnya untuk perencanaan dan penganggaran tahun 2022-2024;
5. Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala daerah dan kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bogor 2019-2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6478);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur.
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja



- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 35. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 36. Keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021

tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 25.
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 Nomor 1 Seri D)



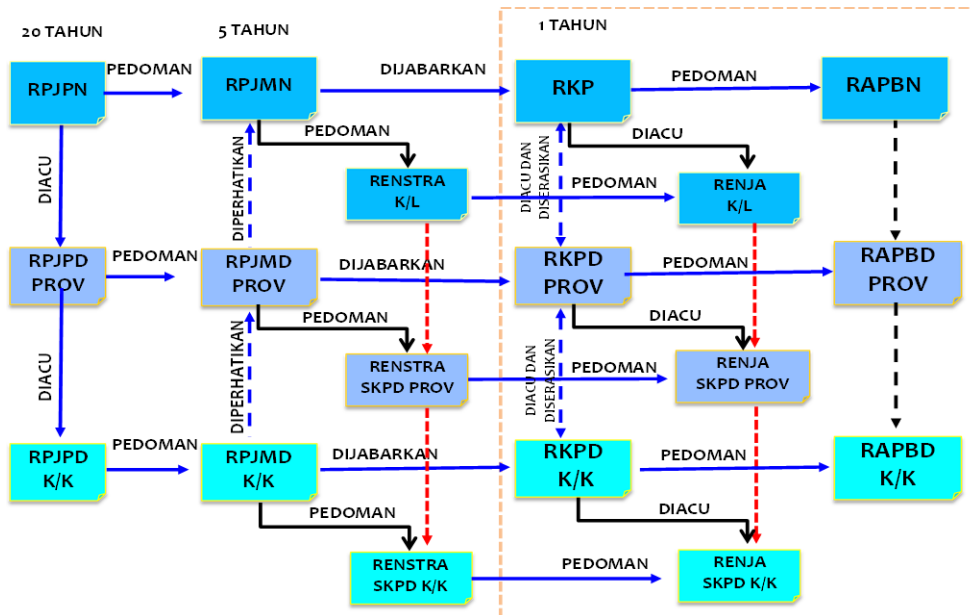
- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
 46. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
 47. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 33 Seri E);
 48. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Di Kota Bogor.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat 2019-2024, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009- 2029, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011- 2031. Selanjutnya agar RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari

gambar dibawah ini.

Gambar 1.2.
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



Sumber : Bappeda kota Bogor, 2019

Secara lebih terperinci, hubungan antara RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025

RPJMD kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD kota Bogor Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD kota Bogor Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam

RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Gambar 1.3.
Tahapan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025



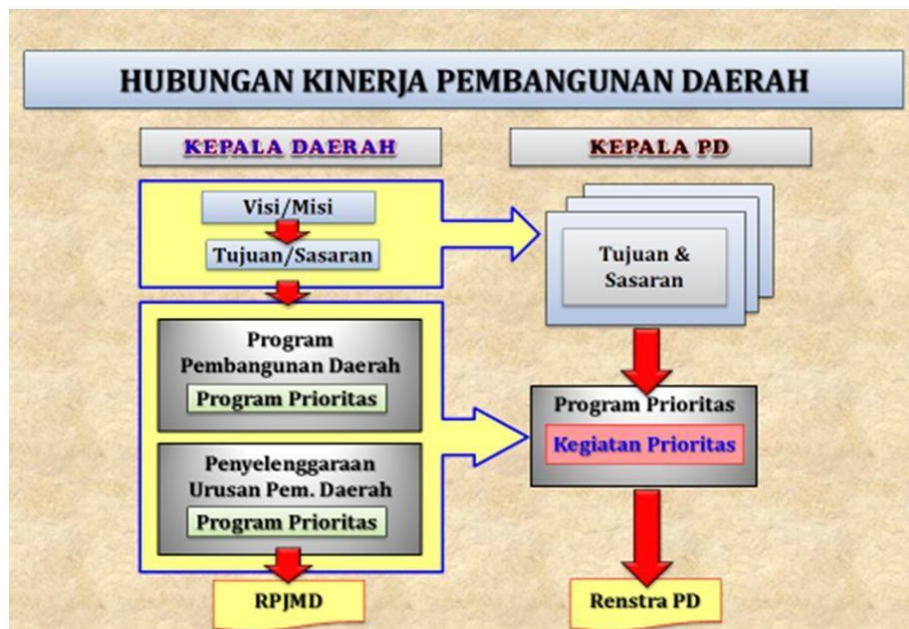
Sumber : Bappeda kota Bogor, 2019

2. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat Daerah mengacu pada visi dan misi kota.

Gambar 1.4
Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah



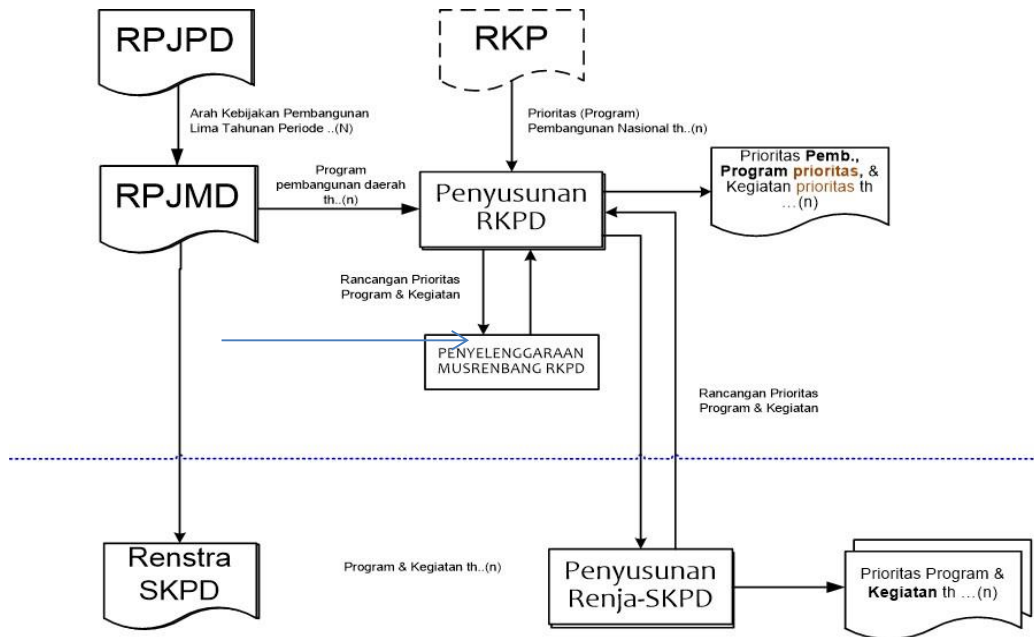
Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor, 2019

3. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bogor yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bogor yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Bogor, RPJMD Provinsi Jawa Barat, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Gambar 1.5.
Bagan Alur Hubungan antara Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah



Sumber : Bappeda kota Bogor, 2019

Keterkaitan Tema dan Prioritas antara RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan penjabarannya ke setiap tahapan RKP tahun 2019-2024 juga dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut :

Gambar 1.6.
Fokus/Tema Tahapan RKP Kota Bogor Periode 2019-2024



Prioritas Pembangunan Daerah adalah tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

4. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan Perencanaan Lainnya

Sebagai *subsistem*, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 juga perlu ditelaah, baik dokumen pada level nasional, Provinsi Jawa Barat, maupun Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kota Bogor. Adapun dokumen yang ditelaah yaitu :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD Kabupaten/Kota yang berbatasan;
5. Dokumen terkait lainnya (dokumen perencanaan sektoral).

Penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 berpedoman pada RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031 menyelaraskan dengan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah serta penyelarasan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi : 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.



Dalam menyusun RPJMD ini, selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis dalam proses pembangunan kota Bogor lima tahun kedepan, yaitu bahwa :

1. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda;
5. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
6. RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat;

Untuk menjaga nilai-nilai strategis dan politis sebagaimana dimaksud diatas, maka maksud dan tujuan ditetapkannya RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1.4.1 Maksud

Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 disusun

dan ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bogor sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Bogor dan sebagai pedoman untuk menetapkan arah kebijakan dan strategi yang lebih fokus dan terarah dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

1.4.2 Tujuan

Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 disusun dan ditetapkan dengan tujuan untuk :

1. Memberikan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah khususnya berkaitan dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi sebagai dampak kejadian bencana alam/non alam, krisis ekonomi, dan perubahan kebijakan nasional selama tahun 2020. Selanjutnya gambaran umum kondisi daerah dimaksud menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2019-2024;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan sampai tahun 2024;
3. Menerjemahkan Visi dan Misi Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019-2024, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan penyesuaian terhadap isu strategis Kota Bogor tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, dengan mempertimbangkan adanya perubahan mendasar yang terjadi karena faktor bencana alam/non alam, krisis ekonomi, dan perubahan kebijakan nasional selama tahun 2020;



5. Menetapkan beberapa penyesuaian/perubahan terhadap arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah pada tahun 2019- 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, dengan mempertimbangkan adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi/perubahan mendasar yang terjadi karena faktor bencana alam/non alam, krisis ekonomi, dan perubahan kebijakan nasional selama Tahun 2020;
6. Menetapkan beberapa penyesuaian/perubahan terhadap program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, dengan mempertimbangkan adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi/perubahan mendasar yang terjadi karena faktor bencana alam/non alam, krisis ekonomi, dan perubahan kebijakan nasional.
7. Menetapkan beberapa penyesuaian terhadap indikator kinerja Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Bogor periode 2019-2024.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMD KOTA BOGOR 2019-2024

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dokumen RPJMD Kota Bogor 2019-2024 yang terdiri dari 9 (sembilan) Bab disajikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kota Bogor.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Bogor secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) geografi dan demografi, (2) kesejahteraan masyarakat, (3) pelayanan umum, serta (4) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) Kinerja Keuangan Masa Lalu, (2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, serta (3) Kerangka Pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasaran.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bogor untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kota Bogor dalam jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

2.1.1.1 LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.138 hektar yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Tanah Sareal. Kecamatan Bogor Selatan mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 3.050 hektar dan terdiri dari 16 kelurahan, sedangkan Kecamatan Bogor Tengah mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 837 hektar dan terdiri dari 11 kelurahan. Untuk luas wilayah menurut kecamatan tersaji pada Tabel 2.1.

Secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut :

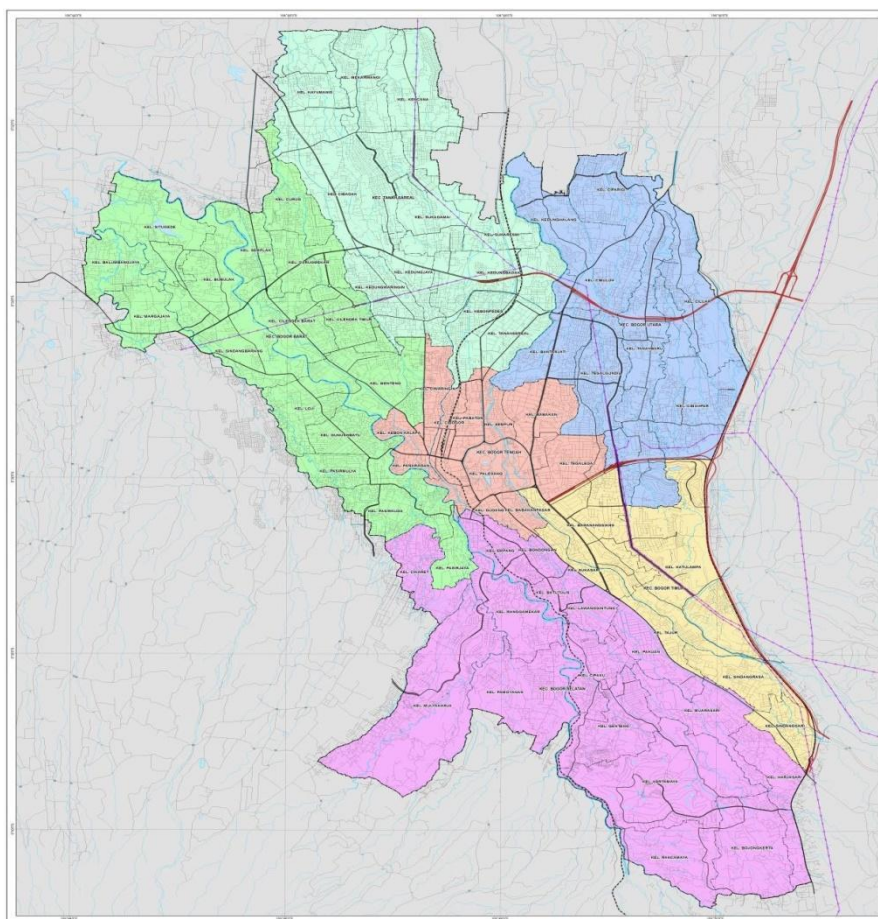
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cijeruk, dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
1	Bogor Selatan	3.050
2	Bogor Timur	1.048
3	Bogor Utara	1.812
4	Bogor Tengah	837
5	Bogor Barat	2.331
6	Tanah Sareal	2.060
Jumlah		11.138

Sumber : Perda No. 6 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Bogor



Sumber : Kota Bogor Dalam Angka 2018

2.1.1.2 LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara $106^{\circ}43'30''\text{BT}$ – $106^{\circ}51'00''\text{BT}$ dan $6^{\circ}30'30''\text{LS}$ – $6^{\circ}41'00''\text{LS}$. Kedudukan geografi Kota Bogor berada di tengah-tengah wilayah kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan DKI Jakarta. Jarak Kota Bogor dengan kota Jakarta kurang lebih 60 kilometer dan dengan kota Bandung sekitar 120 kilometer. Hal ini menjadi potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Berdasarkan hasil foto udara diketahui sebagian dari total wilayah Kota Bogor merupakan kawasan yang sudah terbangun, kecuali di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Area terbangun paling luas berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah.

A. Topografi

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi, ketinggian minimum 190 meter dan ketinggian maksimum 330 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0-2 persen, untuk luasan lahan datar seluas



1.763,94 hektar dan tersebar di enam kecamatan. Seluas 8.091,19 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2–15 persen, seluas 1.109,92 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15–25 persen, seluas 765,21 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 25–40 persen dan lahan sangat curam seluas 119,74 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen.

Kecamatan Bogor Selatan merupakan daerah di Kota Bogor yang tergolong sangat rawan terhadap bahaya longsor, karena mempunyai kemiringan lebih dari 40 persen atau sangat curam sehingga daerah tersebut sangat rawan terhadap bahaya longsor.

B. Geologi

Jenis tanah hampir diseluruh wilayah Kota Bogor adalah latosol coklat kemerahan dengan luasan 8.496,35 hektar, kedalaman efektif tanah lebih dari 90 centimeter dengan tekstur tanah yang halus serta bersifat agak peka terhadap erosi. Kemudian jenis tanah lain yang juga menyebar di enam Kecamatan yaitu aluvial kelabu dengan luasan 1.157,9 hektar.

Kondisi geologi di Kota Bogor yaitu tufa dengan luasan 3.395,17 hektar yang tersebar di enam kecamatan dengan Kecamatan Bogor Selatan menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi tufa terbesar. Sedangkan kipas aluvial dengan luasan 3.249,98 hektar dan Kecamatan Bogor Utara menjadi kecamatan dengan penyebaran kondisi geologi kipas aluvial.

C. Hidrologi

Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air tanah dangkal yang biasa digunakan untuk air minum non perpipaan. Kapasitas sumber mata air dan air tanah dalam mengalami penurunan dibanding tahun 2011. Demikian pula kapasitas air tanah dalam, dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan. Berkurangnya resapan air disebabkan karena bertambahnya daerah permukiman di wilayah Kota Bogor.

Lahan di Kota Bogor hingga tahun 2012 masih banyak lahan tidak kritisnya yaitu sekitar 81,45 persen (9.651,98 ha). Sementara lahan kritisnya mencapai 1,82 persen (215,47 ha). Sisanya agak kritis 2,49 persen (295,07 ha) dan potensial kritis 14,24 persen (1.687,48 ha). Lahan kritis banyak terdapat di wilayah Kecamatan

Bogor Selatan. Semua kelurahan di daerah tersebut mengandung lahan kritis kecuali Kelurahan Cikaret. Lahan potensial kritis selain di Kecamatan Bogor Selatan juga banyak terdapat di Kecamatan Bogor Barat.

Beberapa danau, situ dan kolam di Kota Bogor ada yang berfungsi untuk irigasi, retensi dan rekreasi. Situ Leutik dan Situ Panjang difungsikan sebagai irigasi. Situ Gede dan Situ Curug difungsikan sebagai irigasi dan retensi. Situ Danau Bogor Raya, dan Situ Anggalena selain difungsikan sebagai Retensi juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Danau atau situ terluas di Kota Bogor adalah Situ Gede dengan Luas Layanan 4 Ha dan Situ Danau Bogor Raya dengan Luas Layanan 7,5 Ha.

Di wilayah Kota Bogor dilalui oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Sungai Cisadane mempunyai luas pengaliran 185 kilometer persegi dan Sungai Ciliwung mempunyai luas pengaliran 211 kilometer persegi. Menurut hasil pengukuran debit tahun 2004, setiap satu kilometer persegi Sungai Cisadane memiliki debit 75,8 liter per detik dan setiap satu kilometer persegi Sungai Ciliwung memiliki debit 74,1 liter per detik.

Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total koliform dalam air sungai, melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri *e-coli* sedikit di atas kriteria yang disyaratkan.

D. Klimatologi

Udara di Kota Bogor cukup sejuk dengan suhu udara rata-rata tiap bulannya mencapai 33,90C, dengan suhu terendah 18,80 C dan suhu tertinggi 36,10 C. Suhu seperti itu antara lain dipengaruhi guyuran hujan dengan intensitas rata-rata 3.654 mm per tahun, dan curah hujan bulanan berkisar antara 79,0 – 652,0 mm dengan rata-rata hujan 14 hari per bulan dan kelembaban udara 70%. Sedangkan kecepatan angin rata-rata per tahun 2 km/jam dengan arah Timur Laut.



Kualitas udara Kota Bogor secara keseluruhan dapat dikatakan baik atau sehat. Beberapa parameter kualitas udara Kota Bogor relatif tidak membahayakan lingkungan, karena gas-gas dan partikulat tersuspensi yang dihasilkan, pada umumnya masih di bawah ambang batas baku mutu udara ambien. Namun kadar debu dan tingkat kebisingan pada beberapa lokasi masih berada di atas persyaratan ambang batas yang ditentukan.

E. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan tertinggi di Kota Bogor Sebesar 5.023,59 Hektar atau 45,10 Persen, merupakan kawasan perumahan dan permukiman. sedangkan untuk lahan pertanian seluas 2.910,97 hektar (26,13%), industri seluas 112,07 hektar (1,006%), perdagangan dan jasa seluas 138,79 hektar (1,24%). Lahan lainnya masih berupa hutan kota seluas 141,13 hektar (1,26%), kebun raya seluas 72,12 hektar (0,61%), serta tempat pemakaman umum seluas 137,87 hektar (1,23%), Sungai/Situ seluas 171,69 hektar (1,54%).

Luas kawasan lahan pertanian tanaman pangan di enam kecamatan pada tahun 2021 yaitu 127,42 hektar. Kecamatan Bogor Barat mempunyai luasan kawasan lahan pertanian tanaman pangan terbesar yaitu 77,99 hektar.

Tabel 2.2
Luas Perubahan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
Per Kelurahan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan	Luas Kawasan Pertanian (ha)
1	Bogor Barat	Bubulak	Kawasan Pertanian Non LP2B	6,64
2	Bogor Barat	Margajaya	Kawasan Pertanian Non LP2B	11,53
3	Bogor Barat	Balumbangjaya	Kawasan Pertanian Non LP2B	0,35
4	Bogor Barat	Pasirjaya	Kawasan Pertanian LP2B	21,64
5	Bogor Barat	Sindangbarang	Kawasan Pertanian Non LP2B	9,63
6	Bogor Barat	Situgede	Kawasan Pertanian Non LP2B	28,20
7	Bogor Timur	Katulampa	Kawasan Pertanian LP2B	11,63
8	Bogor Selatan	Cikaret	Kawasan Pertanian LP2B	6,70
9	Bogor Selatan	Pakuan	Kawasan Pertanian LP2B	3,90
10	Bogor Selatan	Rancamaya	Kawasan Pertanian Non LP2B	11,17
11	Bogor Selatan	Mulyaharja	Kawasan Pertanian LP2B	14,79
12	Bogor Selatan	Mulyaharja	Kawasan Pertanian Non LP2B	1,24
Jumlah				127,42

Sumber : Perda No. 6 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031

F. Kemampuan Lahan

1. Lahan yang Tidak Dapat Dikembangkan (*Restricted Area*)

Lahan yang tidak dapat dikembangkan adalah lahan yang sudah ditetapkan mempunyai fungsi perlindungan dan lahan yang

ditetapkan tidak dapat dialihfungsikan ke penggunaan lain yang tidak sesuai. Secara umum lahan ini adalah lahan perlindungan setempat, kawasan perlindungan plasma nutfah dan hutan kota. Lahan ini terbagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan perlindungan plasma nutfah dan hutan kota, serta kawasan perlindungan setempat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung pada Pasal 60, bahwa kawasan perlindungan plasma nutfah adalah Kebun Raya Bogor. Wilayah Hutan Kota yang dapat dijadikan potensi RTH Kota Bogor kedepan adalah hutan-hutan penelitian yang notabene adalah milik departemen/kantor pusat yang sewaktu-waktu bisa dialihkan fungsinya menjadi fungsi komersial diantaranya : Hutan Penelitian Biotrop dan Kebun Penelitian IPB.

2. Lahan yang Dapat Dikembangkan dengan Persyaratan (*Limited Area*)

Lahan yang dapat dikembangkan dengan persyaratan adalah lahan belum terbangun yang dapat dialihfungsikan untuk kegiatan perkotaan dengan persyaratan tertentu seperti pengaturan bangunan atau penggunaan teknologi tertentu. Di Kota Bogor lahan ini terdiri dari lahan resapan air dimana pembangunannya memerlukan pengaturan KDH dan/atau pemberlakukan aturan penyediaan sumur resapan.

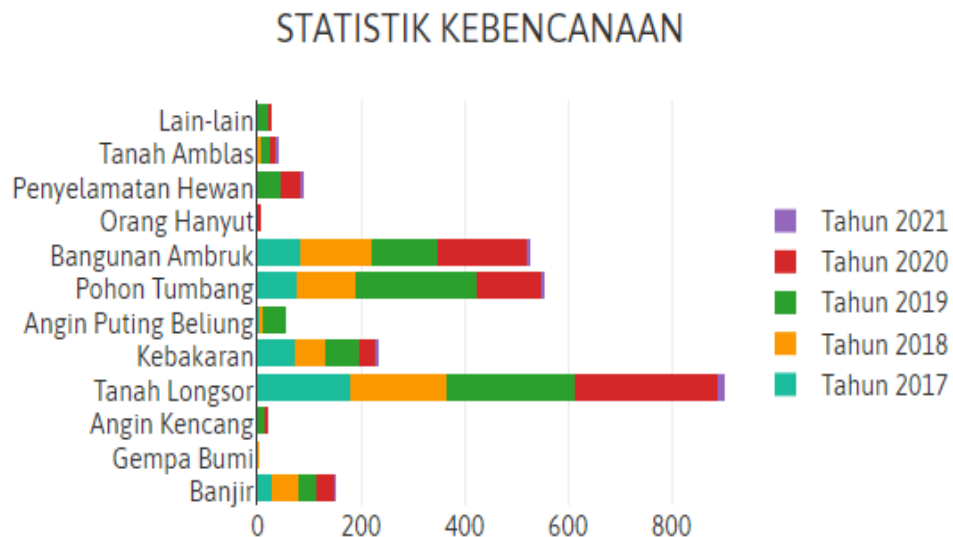
3. Lahan yang Dapat Dikembangkan (*Developed Area*)

Lahan yang dapat dikembangkan adalah lahan terbangun atau lahan tidak terbangun yang dapat dialihfungsikan penggunaannya untuk keperluan aktivitas budidaya perkotaan, seperti perumahan dan prasarananya, industri, perdagangan dan jasa. Dalam kecenderungannya lahan tidak terbangun cenderung beralih fungsi menjadi lahan perumahan dan prasarananya atau industri. Sedangkan kegiatan komersial perkotaan berupa perdagangan dan jasa cenderung berubah dari penggunaan lahan perumahan atau lahan terbangun lainnya.

G. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan hasil pemutakhiran data daerah rawan bencana yang dilaksanakan di wilayah Kota Bogor telah terdeteksi daerah rawan bencana sebagai berikut

Grafik 2.1
Statistik Kebencanaan Di Wilayah Kota Bogor Tahun 2017-2021



Sumber : BPBD Kota Bogor Tahun 2021

Berdasarkan grafik 2.1 dapat dilihat bahwa hampir setiap tahun kebencanaan yang paling banyak terjadi adalah tanah longsor, namun pada tahun 2021 kebencanaan tanah amblas dan penyelamatan hewan pun juga cukup sering terjadi. Kejadian bencana Tahun 2020 tersebar di setiap kecamatan sebagaimana tergambar dalam infografis berikut:

Gambar 2.2
Infografis Kebencanaan Kota Bogor Tahun 2020



Sumber : Pusdalop – PB BPBD Kota Bogor 2020

2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor

Tahun 2011 - 2031, wilayah Kota Bogor terbagi ke dalam lima Wilayah Pengembangan (WP) yaitu:

1. WP Samida meliputi seluruh Kecamatan Bogor Tengah (Kelurahan Babakan, Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Cibogor, Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Gudang, Kelurahan Kebon Kalapa, Kelurahan Pabaton, Kelurahan Paledang, Kelurahan Panaragan, Kelurahan Sempur, dan Kelurahan Tegalega), sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Menteng), sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Empang, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Batutulis, dan Kelurahan Lawanggintung), dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Baranangsiang dan Kelurahan Sukasari);
2. WP Pasima meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Balungbangjaya, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Gunungbatu, Kelurahan Loji, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Pasirjaya, Kelurahan Pasirkuda, Kelurahan Pasirmulya, Kelurahan Sindangbarang, dan Kelurahan Situgede);
3. WP Utara meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Cilendek Barat, Kelurahan Cilendek Timur, Kelurahan Curug, Kelurahan Curugmekar, dan Kelurahan Semplak) dan seluruh Kecamatan Tanah Sareal (Kelurahan Cibadak, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Kebonpedes, Kelurahan Kedungbadak, Kelurahan Kedungjaya, Kelurahan Kedungwaringin, Kelurahan Kencana, Kelurahan Mekarwangi, Kelurahan Sukadamai, Kelurahan Sukaresmi, dan Kelurahan Tanahsareal);
4. WP Purwa meliputi seluruh Kecamatan Bogor Utara (Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciluar, Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Ciparigi, Kelurahan Kedunghalang, Kelurahan Tanahbaru, dan Kelurahan Tegalgundil);
5. WP Daksina meliputi sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Cikaret, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Genteng, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Muarasari, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pakuan, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Rancamaya, dan Kelurahan Ranggamekar) dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Katulampa, Kelurahan Sindangrasa, Kelurahan Sindangsari, dan Kelurahan Tajur).



Dengan memperhatikan pertimbangan di atas maka pembagian wilayah pelayanan (WP) Kota Bogor direncanakan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor

No	Wilayah Pelayanan (WP)	Lokasi Pusat	Fungsi Pusat	Skala Pelayanan	Rencana Jumlah Penduduk (jiwa)	Keterangan
1	WP Samida (WP A)	Kawasan Pemerintahan & Perkantoran & Komersil di sekitar Kebun Raya (Pusat Kota Lama)	Pusat Kota Sub-Pusat Kota	Seluruh Kota WP	273.811	
2	WP Pasima (WP B)	Daerah Bubulak - Sindang barang	Subpusat Kota	WP	186.424	Melayani penduduk perbatasan
3	WP Utara (WP C)	Daerah Jasmin – Pasar TU Kemang	Subpusat Kota	WP	456.499	
4	WP Purwa (WP D)	Daerah Warung Jambu-Jl. Adnawijaya	Subpusat Kota	WP	295.188	
5	WP Daksina (WP E)	Daerah Tajur & sekitar rencana akses toll Ciawi- Sukabumi-Inner Ring Road	Subpusat Kota	WP	324.509	Melayani penduduk perbatasan

Sumber : RTRW Kota Bogor 2011-2031 dan hasil analisis 2018

Tabel 2.4
Arahan Pengembangan Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
A	Pengendalian, revitalisasi (pembangunan kembali) dan peremajaan kota (Urban Renewal)	Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional sepanjang koridor jalan utama	Jalan Pajajaran, Jalan Juanda, Jalan Suryakencana, Jalan Sudirman, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Merdeka, Jalan MA Salmun, Jalan Dewi Sartika, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Mayor Oking, dan Jalan Pahlawan
		Revitalisasi kawasan	Stasiun Kereta Api, Taman Topi dan Taman Ade Irma Suryani, Pasar Kebon Kembang, Kawasan Jembatan Merah, serta Kawasan Pasar Bogor dan sekitarnya
		Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur yang berlokasi pada	Bantaran Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Cipakancilan
	Bantaran sungai dengan mengembangkan perumahan vertikal KDB rendah		
	Menjaga dan melindungi dari gangguan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi dan nilai Kawasan	Kawasan Kebun Raya dan Istana Bogor	
	Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan	Menyebarkan	
	Pengendalian perubahan fungsi dan bentuk bangunan	Kawasan cagar budaya permukiman Taman Kencana dan sekitarnya	

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
B	Pengembangan yang terkendali	Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional	Jalan Gunung Batu (Jl. Mayjen Ishak Djuarsa), Jalan Sindangbarang (Jl. Ibrahim Adjie), Jalan RE Abdullah, Jalan Aria Surialaga, Jalan Ciomas Raya dan Jalan Abdullah BinM. Nuh serta rencana jalan inner ring road
		Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan Prasarana dan Sarana Umum	Pusat WP B
		Perlindungan kawasan lindung dari gangguan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi lindung kawasan	Situ gede dan hutan kota Cifor
		Mempertahankan luasan lahan pertanian kota	Menyebarkan
		Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan agar tetap berkepadatan sedang dan Rendah	Menyebarkan
		Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical ber Koefisien Dasar Bangun (KDB) Rendah	Perumahan kepadatan tinggi (areal eksisting)
		Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki Pelayanan	Menyebarkan
		Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pusat penelitian dan kebun percobaan	Kawasan pusat penelitian dan kebun percobaan
		Meremajakan TPU yang ada dengan konsep rumputisasi agar dapat berfungsi RTH	TPU eksisting dan rencana
C	Pengembangan baru yang terarah	Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	terutama di sepanjang Jalan Kemang-Kedunghalang (Jl. Sholeh Iskandar) dan Jalan Abdullah Bin M. Nuh
		Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan PSU	Pusat WP C
		Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan kepadatan sedang serta mengupayakan pepaduserasian perencanaan pembangunan perumahan dengan wilayah sekitarnya	Menyebarkan
		Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki Pelayanan	Menyebarkan
		Pembangunan infrastruktur kota baru disertai jalur hijau di sekitarnya	TPPAS dan TPU Kayu manis
		Mengembangkan kawasan stoplet Sukaresmi sebagai terminal multimoda yang terkait dengan pengembangan kegiatan komersial, fasilitas pelayanan dan hunian vertical (konsep TOD)	Kawasan stoplet Sukaresmi
		Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah	Perumahan kepadatan tinggi Kebon Pedes
		Mempertahankan RTH privat di lingkungan pabrik dengan pemberian insentif yang sesuai.	Kawasan industri Pabrik ban Good year

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
		Menjaga dan melindungi dari gangguan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi sarana olahraga (SOR).	Kawasan sarana olah raga stadium Pajajaran RTH Sarana Olah raga
		Meremajakan TPU yang ada dengan konsep rumputisasi agar dapat berfungsi RTH	TPU eksisting dan rencana
D	Pengembangan baru terarah	Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	Jalan Pajajaran, Jalan Kedunghalang (Jalan KS. Tubun), Jalan Adnawijaya, Jalan Achmad Sobana, Jalan Raya Pemda, Jalan Pangeran Sogiri serta rencana jalan-jalan kolektor baru
		Mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan PSU	Pusat WP D
		Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan kepadatan sedang serta mengupayakan pepaduserasian perencanaan pembangunan perumahan dengan wilayah sekitarnya	Menyebar
		Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah	Menyebar, daerah eksisting
		Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan	Menyebar
		Membatasi penambahan lokasi industri yang baru serta menata kawasan sekitarnya	Jalan Raya Pemda
		Meremajakan TPU yang ada dengan konsep rumputisasi agar dapat berfungsi RTH	TPU eksisting dan rencana
E	Pengembangan terbatas	Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	terutama di sepanjang Jalan Bogor-Ciawi (Jl.Raya Tajur), rencana jalan R3, rencana jalan inner ring road , Jalan Katulampa, dan Jalan Cikaret
		Membatasi perkembangan perumahan melalui penetapan kawasan perumahan berKDB Rendah	Menyebar
		Melindungi kawasan resapan Air	Menyebar
		Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai dengan hirarki pelayanan	Menyebar
		Mengembangkan ekowisata	Kelurahan Rancamaya, Kertamaya, Bojongkerta, Pamoyanan, Mulyaharja, Cipaku
		Mengembangkan sarana umum skala kota (Stadion skala Kota)	Sub WP E3
		Membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB Rendah	Perumahan kepadatan tinggi di kelurahan Tajur dan Sukasari, Muarasari (di area eksisting)
		Membatasi penambahan lokasi industri yang baru serta menata kawasan sekitarnya	Kawasan industri yang ada
		Meremajakan TPU yang ada dengan konsep rumputisasi agar dapat berfungsi RTH	TPU eksisting dan rencana
		Mempertahankan lahan pertanian yang ada sebagai RTH kota	Menyebar
		Membatasi meluasnya	Menyebar , daerah eksisting

WP	Tema WP	Arahan Penanganan	Arahan Lokasi
		perkembangan perumahan kepadatan tinggi horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertical berKDB rendah	
		Mengembangkan ruang terbuka hijau sesuai hirarki pelayanan	Menyebarkan
		Membatasi penambahan lokasi industri yang baru serta menata kawasan sekitarnya	Jalan Raya Pemda
		Meremajakan TPU yang ada dengan konsep rumputisasi agar dapat berfungsi RTH	TPU eksisting dan rencana
		Mempertahankan lahan pertanian yang ada sebagai RTH kota	Menyebarkan

Sumber : RTRW Kota Bogor 2011-2031

1. Penataan Wilayah Pelayanan Samida (WP A):

- a. Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan sekitar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor;
- b. Mempertahakan bentuk karakteristik, serta kondisi situs-situs serta bangunan dan/atau struktur sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan;
- c. Penataan Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) Skala Kota untuk TOD Stasiun Bogor, dan TOD Baranang Siang;
- d. Pengembangan RTH Skala Kota dan RTNH Skala Kota;
- e. Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur, di Kelurahan Panaragan, Kelurahan Paledang, Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Gudang, Kelurahan Empang, Kelurahan Tegalega dan Kelurahan Sempur;
- f. Penataan Fasilitas Minimum Pusat Kota yang telah ada;
- g. Penataan Pusat Lingkungan di Kelurahan Kebon Kalapa, Sukasari;
- h. Penataan sektor informal (PKL).

2. Penataan Wilayah Pelayanan Pasima (WP B):

- a. Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan sekitar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor;
- b. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta kawasan wisata pada WP Pasima sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang serta keberadaan Hutan Penelitian Dramaga dan kawasan lindung lainnya;
- c. Pengembangan kawasan dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Pasima (WP B) (perencanaan,

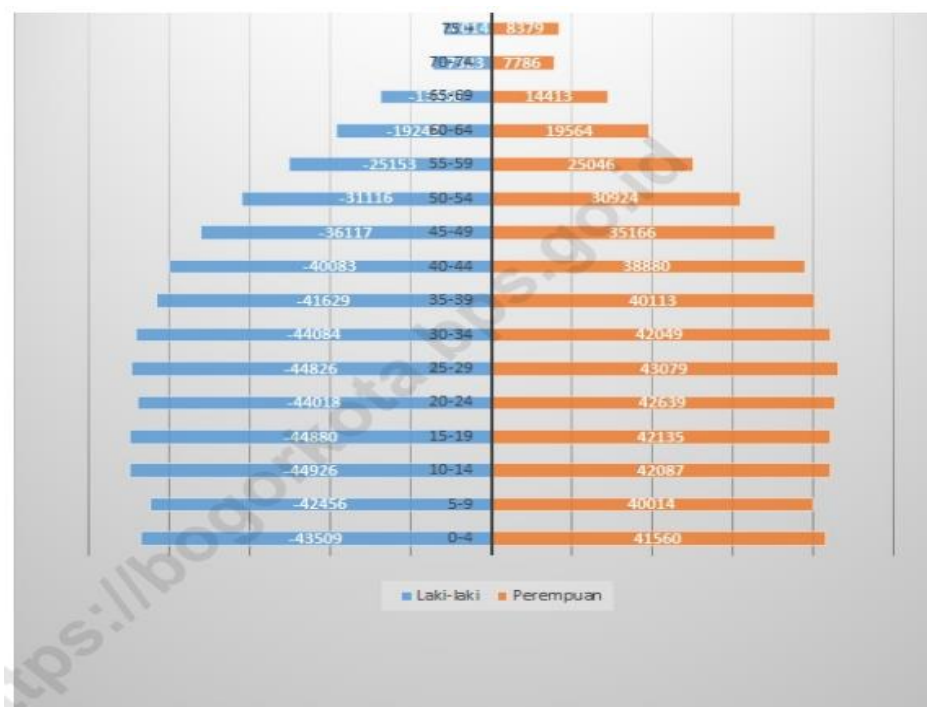
- penyiapan lahan dan pembangunan) Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang;
- d. Pembangunan RTH skala WP di Lokasi Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang;
 - e. Pembagunan RTNH skala WP Tersebar di WP Pasima (WP B);
 - f. Pembangunan Pusat Lingkungan Kelurahan Balungbang Jaya, Gunungbatu.
3. Penataan Wilayah Pelayanan Utara (WP C) :
- a. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang;
 - b. Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan TOD Skala Sub Kota;
 - c. Pengembangan kawasan dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Utara (WP C) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan) di Lokasi Sub PPK Utara 9WP C) : Yasmin – Pasar TU Kemang;
 - d. Pembangunan RTH skala WP di Lokasi WP Utara;
 - e. Pembagunan RTNH skala WP Tersebar di WP Utara;
 - f. Pembangunan Pusat Lingkungan Kelurahan Mekarwangi, Sukadamai, Kebonpedes, Cilendek Barat.
4. Penataan Wilayah Pelayanan Purwa (WP D) :
- a. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang;
 - b. Penyusunan Rencana Rinci/Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota;
 - c. Penyusunan RTBL / Panduan Rancang Kota (PRK) koridor Jalan Raya Bogor-Jakarta;
 - d. Penataan kawasan Simpang Pomad-perbatasan kota di lokasi Simpang Pomad-Perbatasan kota;
 - e. Pengembangan kawasan dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Purwa (WP D) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan) di lokasi Sub PPK D, Warung Jambu – Jalan Adnawijaya;
 - f. Pembangunan RTH skala WP di Lokasi WP Purwa;
 - g. Pembagunan RTNH skala WP Tersebar di WP Purwa;
 - h. Pembangunan Pusat Lingkungan di lokasi Kelurahan Kedunghalang, Ciluar, Cimahpar, Tegalgundil.

5. Penataan Wilayah Pelayanan Daksina (WP E) :
 - a. Mengembangkan kegiatan agribisnis, perumahan, serta kegiatan jasa sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang;
 - b. Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) Skala Sub Kota;
 - c. Penataan kawasan perbatasan Simpang Jalan Tajur – Jalan Raya Ciawi Sukabumi;
 - d. Penyusunan RTBL / Panduan Rancang Kota (PRK) Koridor *Inner Ring Road* ;
 - e. Pengembangan kawasan dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Daksina (WP E) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan) di lokasi Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – *Inner Ring Road*;
 - f. Pembangunan RTH skala WP di Lokasi WP Daksina;
 - g. Pembangunan RTNH skala WP Tersebar di WP Daksina;
 - h. Pembangunan Pusat Lingkungan di lokasi Kelurahan Katulampa, Cipaku, Kertamaya, Mulyaharja;
 - i. Pembangunan Pusat Agro Eduwisata Organik di Kelurahan Mulyaharja.

2.1.3 ASPEK DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kota Bogor menurut BPS Kota Bogor pada tahun 2020 sebanyak 1.043.070 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki sebesar 529.236 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 513.834 jiwa.

Grafik 2.2
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kota Bogor Tahun 2020



Sumber : Bogor Dalam Angka 2021

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tahun 2020 berdasarkan rentang umur hampir sama, artinya rasio jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak berbeda secara signifikan.

Tabel 2.5
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bogor 2020

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Bogor Selatan	19.56	6,622
Bogor Timur	10.00	10,278
Bogor Utara	17.90	10,537
Bogor Tengah	9.23	11,840
Bogor Barat	22.40	7,112
Tanah Sereal	20.91	11,576
Kota Bogor ^{a)}	100.00	8,802

Sumber : Bogor Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bogor Barat yaitu sebesar 22,40 persen sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Bogor Tengah yaitu sebesar 9,23 persen. Kepadatan Penduduk tertinggi berada di Kecamatan Bogor Tengah yaitu sebesar 11.840 per km² dan yang terendah berada di Kecamatan Bogor Selatan yaitu sebesar 6.622 per km² .

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2020

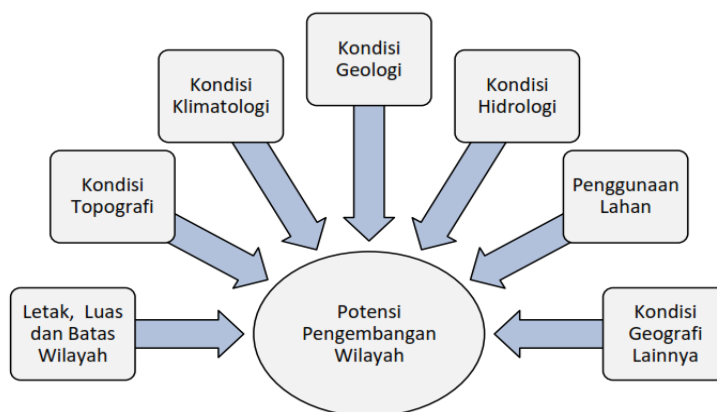
Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020
Bogor Selatan	204,030	1.25
Bogor Timur	104,327	0.97
Bogor Utara	186,724	0.96
Bogor Tengah	96,258	-0.51
Bogor Barat	233,637	1.06
Tanah Sareal	218,094	1.42
Kota Bogor ^{a)}	1,043,070	0.98

Sumber : Bogor Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bogor Barat yaitu sebesar 233.637 sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Bogor Tengah yaitu sebesar 96.258. Laju Pertumbuhan Penduduk Per tahun 2020 berkisar antara -0,51 sampai 1,42.

Berdasarkan uraian berbagai aspek Geografi dan Demografi beserta unsur unsur sebagaimana gambar dibawah ini ;

Gambar 2.3
Aspek yang mempengaruhi Potensi Pengembangan Wilayah



Maka Kota Bogor memiliki potensi dalam pengembangan kawasan budi daya sebagai kawasan:

- Perumahan dan Permukiman
- Perdagangan dan Jasa
- Pendidikan, dan Penelitian pengembangan
- Wisata alam dan non alam
- Aktivitas ekonomi kreatif
- Pertanian *off farm* dengan penerapan Teknologi pendukung pertanian



2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 PERTUMBUHAN PDRB

Penyusunan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ini sudah dilakukan selama lebih dari 30 tahun, dan selalu mengalami penyempurnaan mengikuti perkembangan yang terjadi, baik perkembangan tatanan ekonomi, teknologi, dan informasi maupun teknik penyusunannya. Sementara, mulai dilakukan oleh BPS secara teratur sejak tahun 1960. Menghitung PDRB bagi Penyelenggara Pemerintahan adalah untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Karenanya dipandang perlu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan PDRB.

Domestik dan Regional secara umum dapat diartikan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Produk Domestik adalah semua barang dan jasa dari sumber daya yang dimiliki sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah Propinsi atau Daerah, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan (Sumber: BPS). Pendapatan dari selisih faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri tersebut menjadi nilai tambah sektor atau lapangan usaha dimana terjadi transaksi. Sehingga angka PDRB menggambarkan naik-turunnya atau cepat dan lambatnya perubahan kondisi perekonomian suatu daerah. Kondisi perubahan PDRB Kota Bogor mulai Tahun 2014 - 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.7
PDRB Kota Bogor Atas Tahun 2014-2020 (Miliar Rupiah)

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Atas Dasar Harga Konstan
1	2014	29.147,2	23.835,31
2	2015	32.364,9	25.298,60
3	2016	35.400,8	27.002,25
4	2017	38.478,4	28.654,97
5	2018	42.261,02	30.413,57
6	2019	46.223,36	32.253,51
7	2020	45.940,25	32.083,51

Sumber : BPS Kota Bogor

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bogor tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 32,08 triliun rupiah. Angka tersebut turun sebesar 169 miliar dari 32,25 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.53 persen, menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 6,05 persen.

Wabah Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menjadi faktor paling signifikan atas menurunnya kondisi perekonomian di Kota Bogor. Peningkatan jumlah kasus positif terpapar Covid-19 memaksa Pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan aktivitas di luar rumah untuk memutus rantai penyebaran wabah tersebut. Pembatasan ini berdampak pada turunnya permintaan akan barang konsumsi dan menurunnya volume produksi sebagai faktor yang mempengaruhi kondisi pasar.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, menghitung harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran setiap tahunnya. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dan dimaksudkan untuk melihat pertumbuhan. Tabel berikut memperlihatkan Pertumbuhan PDRB Kota Bogor berdasarkan Harga Konstan.

Tabel 2.8
PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha 2014-2020 (Miliar Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	220,69	225,14	230,15	233,03	238,03	239,71	245,16
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0	0
Industri Pengolahan	4.564,57	4.843,79	5.109,36	5.351,64	5.737,43	5.986,82	5.945,30
Pengadaan Listrik dan Gas	1.025,05	898,23	903,13	831,95	808,24	804,77	730,83
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan	25,94	27,36	28,52	29,5	30,70	32,73	33,59

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Daur Ulang							
Konstruksi	2.696,29	2.646,75	3.011,15	3.237,68	3.493,78	3.829,21	3.578,70
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.367,11	5.650,09	5.972,86	6.306,05	6.494,42	6.744,72	6.220,45
Transportasi dan Pergudangan	2.367,72	2.893,36	3.133,22	3.366,50	3.622,76	3.935,10	3.861,86
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.059,40	1.119,75	1.209,84	1.304,03	1.422,34	1.503,11	1.530,33
Informasi dan Komunikasi	1.270,61	1.506,67	1.692,96	1.919,82	2.095,54	2.253,82	3.039,81
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.606,76	1.676,55	1.847,07	1.951,35	2.083,32	2.187,59	2.225,26
Real Estate	525,98	555,98	601,02	639,84	684,19	736,54	725,17
Jasa Perusahaan	477,36	516,83	560,21	590,80	632,73	691,04	599,78
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	643,23	660,73	675,93	683,61	697,66	726,85	718,13
Jasa Pendidikan	656,81	718,86	772,60	826,60	887,11	979,83	1.036,70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	279,82	313,14	341,27	381,41	434,27	479,73	485,70
Jasa Lainnya	777,95	843,36	912,98	1.001,43	1.050,80	1.121,80	1.097,74
PDRB TOTAL	23.835,31	25.298,60	27.002,25	28.654,97	30.413,57	32.250,50	32.083,51

Sumber : BPS Kota Bogor

Berdasarkan Tabel 2.8, selama 7 (tujuh) tahun terakhir struktur perekonomian Kota Bogor didominasi oleh 6 (enam) lapangan usaha yaitu perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi. Secara umum, semua sektor mengalami pelambatan bahkan hingga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Adapun kategori lapangan usaha yang meningkat secara tajam adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 34,87 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, penurunan pertumbuhan lapangan usaha pada sektor dengan *share* tertinggi terhadap perekonomian Kota Bogor. Bahkan ada yang

menurun sebesar 13,21 persen. Penurunan tersebut menjadikan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor mengalami penurunan, seperti yang ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor 2014-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor kurun waktu tahun 2014-2020 mengalami penurunan dimana pertumbuhan perekonomian Kota Bogor pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,57 persen dari tahun 2019, yaitu -0,53 persen pada tahun 2020 dan 6,04 persen dari tahun 2019. Penurunan ini secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global khususnya kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Penurunan tidak terlalu signifikan dalam kurun tahun 2016-2019 tetapi di tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 hingga akhirnya pertumbuhan ekonomi Kota Bogor turun drastis hingga mencapai -0,53 persen.

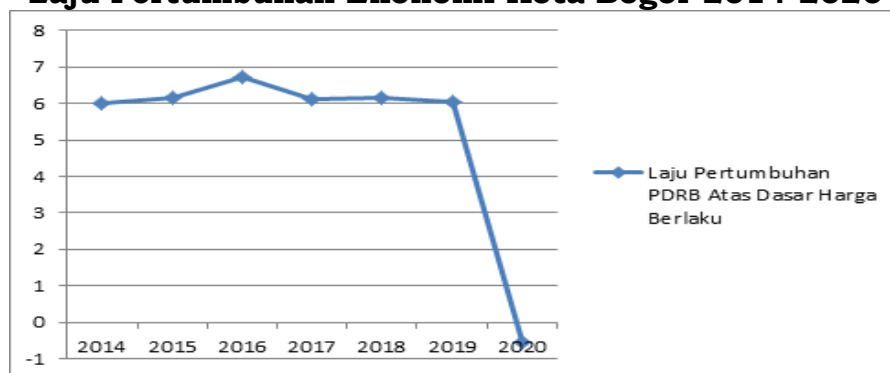
LPE yang terkontraksi hingga -0,53 tersebut disebabkan oleh : di sisi *supply* oleh efek turunya berbagai produksi selama pandemi, yang diikuti oleh adanya pengurangan tenaga kerja dan meningkatnya pengangguran. Sementara disisi *demmand* terjadi penurunan permintaan yang disebabkan adanya pembatasan aktivitas dan penurunan daya beli masyarakat.

Secara umum bila dilihat dari tahun 2014 LPE Kota Bogor menagalami *trend* penurunan, walaupun pada tahun 2016 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut memang pada masa itu kondisi ekonomi Kota Bogor provinsi dan nasional sedang dalam kondisi bagus. Adanya *trend* yang sedikit menurun dipengaruhi oleh berbagai hal, perekonomian Kota Bogor di motori oleh sektor tersier (jasa). Bila dilihat 6 sektor yang memberi kontribusi terbesar adalah berturut-turut: (1) Perdagangan besar & eceran reparasi mobil dan



sepeda motor; (2) Industri pengolahan; (3) Transportasi & Pergudangan; (4) Kontruksi; (5) Informasi komunikasi; (6) Jasa keuangan dan asuransi. Dari 6 sektor tersebut idealnya harus memiliki pertumbuhan yang besar dan memiliki daya saing yang baik dibanding dengan daerah sekitar. Dari hasil analisis *shift share*, didapat sektor yang memiliki pertumbuhan bagus adalah hanya sektor transportasi & pergudangan dan sektor jasa keuangan dan asuransi, namun kedua sektor tersebut daya saing tidak terlalu bagus, sedangkan 4 sektor sisanya memiliki daya saing yang baik, namun pertumbuhannya tidak begitu tinggi.

Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor 2014-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 34,87 persen. Dari 17 lapangan usaha yang ada, sebanyak 7 lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Sedangkan terdapat 9 lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan negatif tertinggi hingga 13,21 persen. Sedangkan 7 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 2,14 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,77 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 1,2 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 0,54 persen. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,19 persen. Lapangan usaha Kontruksi sebesar 6,54 persen, dan Lapangan Usaha Transportasi sebesar 1,86 persen. Kondisi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2014-
2020 (Persen)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,02	2,02	2,22	1,26	2,25	0,63	2,25
Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0	0
Industri Pengolahan	5,53	6,12	5,48	4,74	7,21	4,35	-0,54
Pengadaan Listrik dan Gas	4,54	-12,37	0,55	-7,88	-2,85	-0,43	-9,19
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang	8,44	5,48	4,23	2,40	5,14	6,58	2,65
Konstruksi	5,49	5,65	5,70	7,52	7,91	9,60	-6,54
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,94	5,27	5,71	5,58	2,99	3,85	-7,77
Transportasi dan Pergudangan	5,64	9,69	8,29	7,45	7,61	8,62	-1,86
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,64	5,70	8,05	7,78	9,07	5,68	1,81
Informasi dan Komunikasi	18,69	18,58	12,36	13,40	9,15	7,55	34,87
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,71	4,34	10,17	5,65	6,76	5,00	1,72
Real Estate	7,15	5,70	8,10	6,46	6,93	7,65	-1,54
Jasa Perusahaan	4,50	8,27	8,39	5,46	7,10	9,21	-13,21
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,61	2,72	2,30	1,14	2,06	4,18	-1,20
Jasa Pendidikan	11,82	9,45	7,48	6,99	7,32	10,45	5,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,30	11,91	8,98	11,77	13,85	10,47	1,24
Jasa Lainnya	5,20	8,41	8,25	9,69	4,93	6,76	-2,14
PDRB TOTAL	6,01	6,14	6,73	6,12	6,14	6,05	-0,53

Sumber : BPS Kota Bogor

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terbesar untuk tahun 2014-2020 adalah dari Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran. Peringkat kedua Lapangan Usaha Industri Pengolahan, dan diikuti Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan. Hal ini menggambarkan bahwa perdagangan dan jalur distribusinya menjadi penggerak utama perekonomian di Kota Bogor. Bahkan saat mengalami penurunan di Tahun 2020, ketiga lapangan usaha tersebut tetap mendominasi distribusi PDRB.

Tabel 2.10
Distribusi PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku (2010)
Menurut Lapangan Usaha 2014-2020 (Persen)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,83	0,78	0,76	0,73	0,69	0,66	0,69
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	18,50	18,53	18,47	18,36	18,55	18,07	18,04
Pengadaan Listrik dan Gas	6,73	5,95	5,57	5,07	4,54	4,26	3,95
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12
Konstruksi	11,25	11,27	11,12	11,39	11,68	12,15	11,50
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,22	21,90	21,59	21,23	20,58	20,31	19,52
Transportasi dan Pergudangan	10,81	11,67	11,89	12,05	12,43	12,96	12,55
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,44	4,39	4,48	4,55	4,75	4,76	4,94
Informasi dan Komunikasi	4,41	4,70	4,83	5,11	4,88	4,70	6,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,78	6,63	6,99	7,14	7,28	7,24	7,24
Real Estate	2,24	2,21	2,21	2,20	2,18	2,19	2,14
Jasa Perusahaan	2,04	2,09	2,11	2,08	2,11	2,26	2,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,02	2,95	2,88	2,81	2,78	2,68	2,62
Jasa Pendidikan	2,74	2,80	2,82	2,79	3,00	3,11	3,48

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	1,16	1,20	1,27	1,32	1,39	1,44
Jasa Lainnya	2,80	2,86	2,97	3,12	3,12	3,17	3,13
PDRB TOTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bogor

Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi naik sangat signifikan di tahun 2020. Namun karena andil dalam PDRB tidak terlalu besar, maka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Bogor. Beberapa Lapangan Usaha terkait dengan ketahanan keluarga meningkat distribusi PDRB-nya di masa pandemi Tahun 2020. Lapangan Usaha Jasa Pendidikan meningkat dari 3,11 Miliar di tahun 2019 menjadi 3,48 Miliar di tahun 2020. Adanya kebijakan belajar secara daring bagi siswa memunculkan usaha-usaha baru dalam bentuk pelayanan jasa pendukung pembelajaran *online*. Lapangan Usaha Jasa Kesehatan ikut mengalami kenaikan dari 1,39 Miliar di tahun 2019 menjadi 1,44 Miliar di tahun 2020. Tingginya tingkat penyebaran Covid-19 mendorong masyarakat untuk berupaya tetap sehat dan menjaga daya tahan tubuh. Hal ini menumbuhkan jasa konsultasi dan pemeriksaan kesehatan baik *offline* maupun *online* dengan pelayanan sistem jemput bola.

2.2.2 LAJU INFLASI

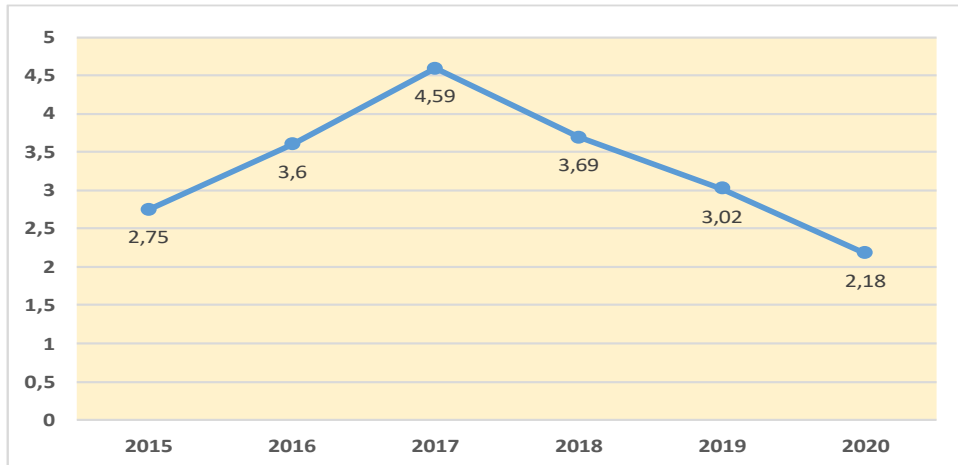
Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Perkembangan laju inflasi Kota Bogor dari tahun 2015-2020 terlihat pada grafik di bawah, dimana, dari tahun 2015 kecenderungan inflasi adalah meningkat dan inflasi tertinggi di tahun 2017 mencapai 4,59 % sedangkan mulai tahun 2017 terus menurun hingga di tahun 2020 mencapai 2,18. Menurunnya laju inflasi di tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa Kota Bogor dapat berperan dalam mengendalikan laju inflasi, sedangkan menurunnya laju inflasi



di tahun 2020 lebih disebabkan karena efek dari pandemi Covid-19, dimana perekonomian belum sepenuhnya pulih.

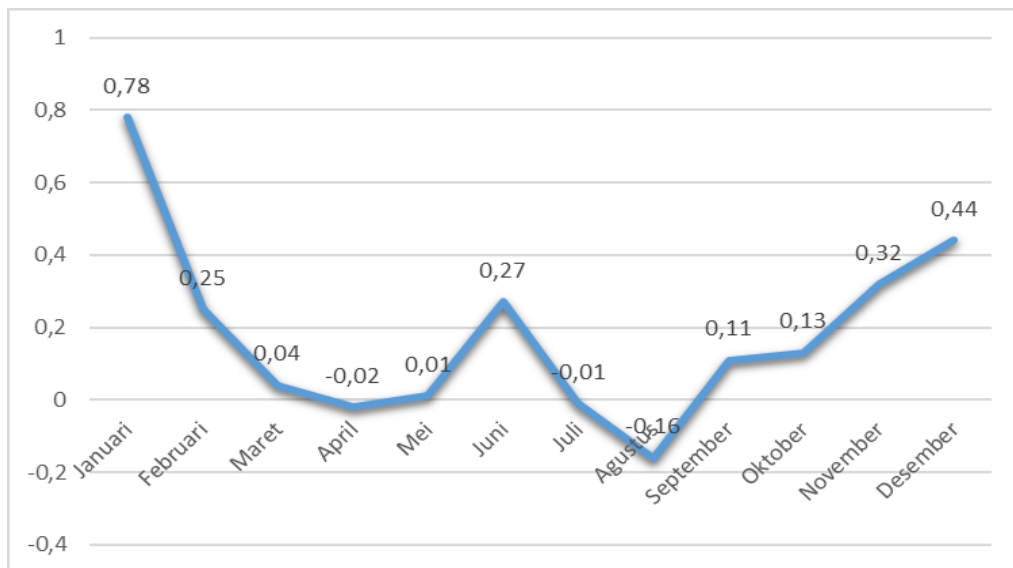
Grafik 2.5
Laju Inflasi Kota Bogor 2015-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Perkembangan laju inflasi Kota Bogor tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di atas. Selama periode 2020, Kota Bogor mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Laju inflasi tertinggi terjadi di bulan Januari yaitu sebesar 0,78 persen dan laju inflasi terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar -0,16 persen.

Grafik 2.6
Laju Inflasi Kota Bogor 2020



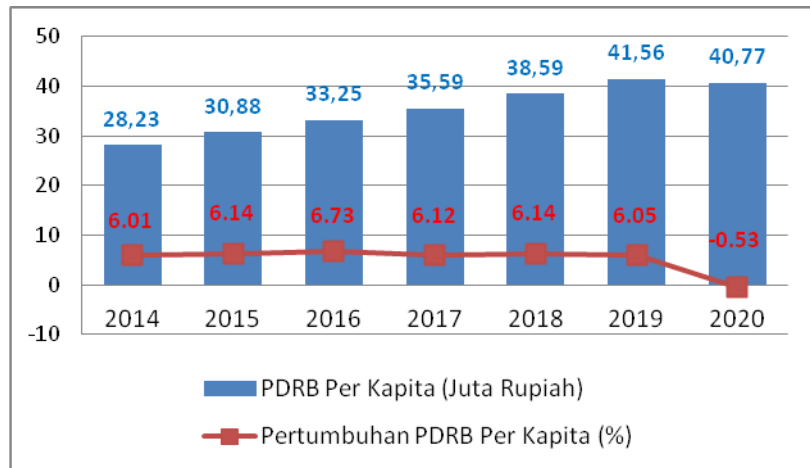
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bogor

2.2.3 PDRB PER KAPITA

Peningkatan di bidang Ekonomi juga terlihat dari pencapaian PDRB per kapita. Dilihat dari angka PDRB per kapita Kota Bogor dalam kurun waktu 2014-2019 terjadi peningkatan tiap tahunnya namun pada tahun 2020 terjadi penurunan. Kenaikan angka PDRB

per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Penurunan pada Tahun 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19

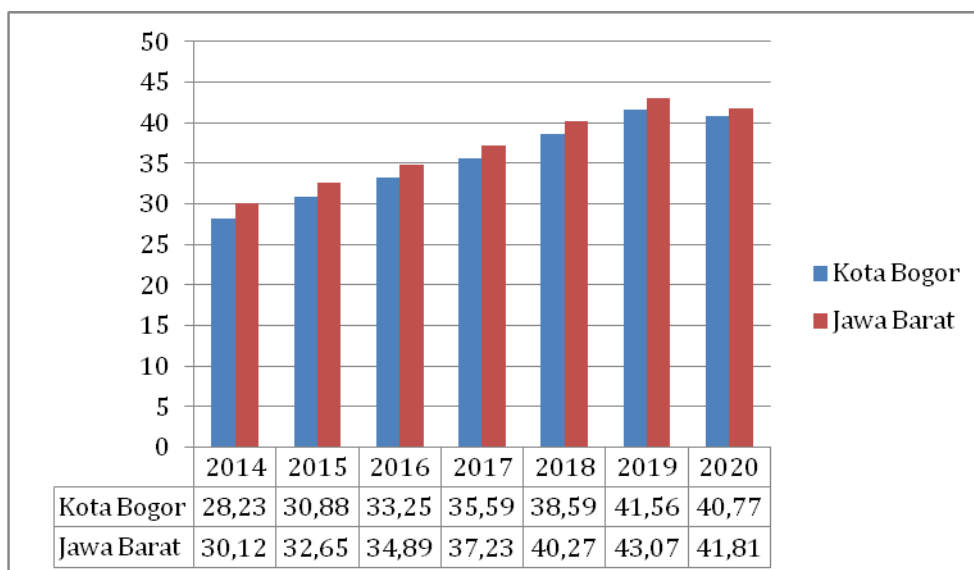
Grafik 2.7
PDRB Per Kapita Kota Bogor Tahun 2014 - 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019; Data Diolah Dari SIPD

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2018 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 38,59 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 6,14 persen. Pada Tahun 2019 kembali naik di angka 41,78 juta dengan pertumbuhan sebesar 6,04 persen. Kemudian pada Tahun 2020 PDRB per kapita Kota Bogor turun kembali menjadi 40,77.

Grafik 2.8
PDRB per kapita Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat 2014-2020



Sumber : BPS Kota Bogor, 2020



Apabila dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor berada di posisi di bawah angka Provinsi. Terlihat pada tahun 2020 PDRB per kapita Kota Bogor sebesar 40,77 juta lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jawa Barat.

2.2.4 INDEKS GINI

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pada variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *Uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

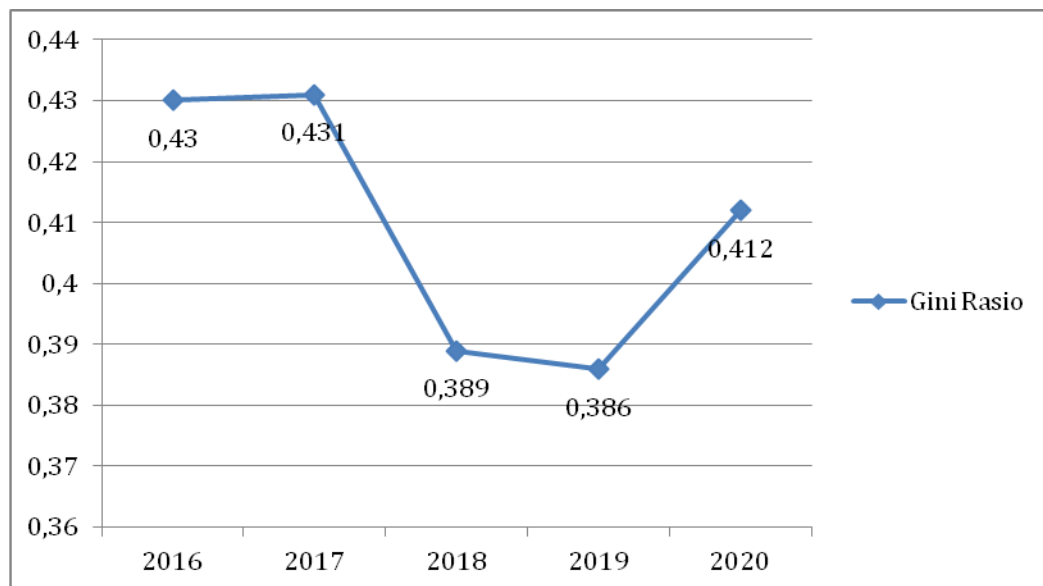
Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM- FEUI, 1995) :

- $GR < 0.4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0.4 < GR < 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- $GR > 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam distribusi pendapatan yang ditentukan dengan Koefisien Gini Rasio antara 0-1 (>0 dan <1), semakin rendah Koefisien Gini maka pendapatan suatu wilayah/daerah semakin merata. Kategori ketimpangan tinggi apabila Indeks Gini lebih besar dari 0,5 dan kategori rendah dengan Indeks Gini dibawah 0,5 (tinggi $> 0,5$ dan rendah $<0,5$).

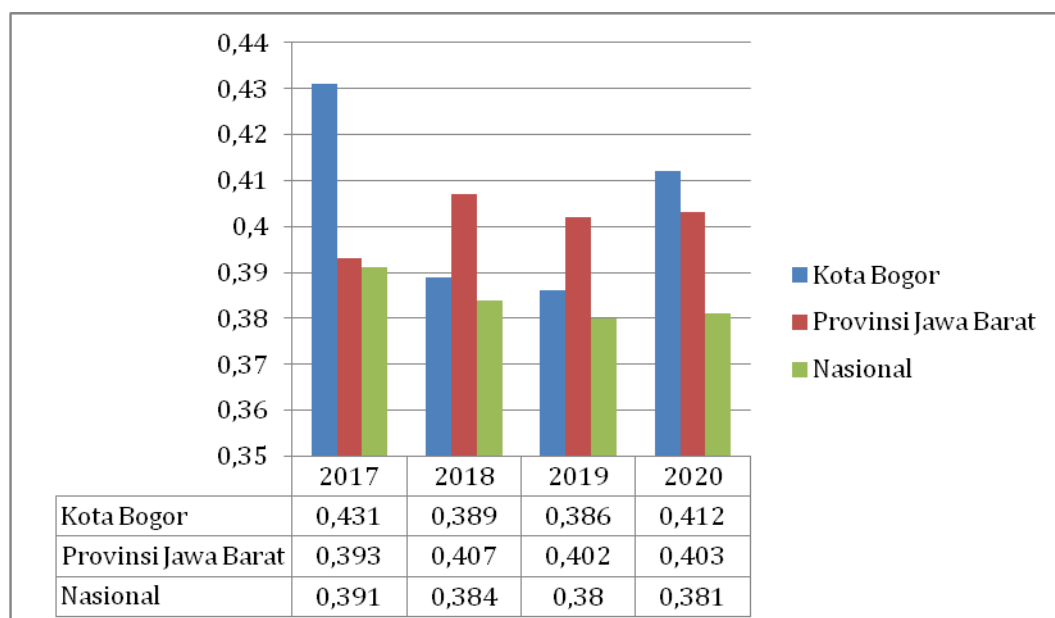
Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2020 adalah sebesar 0,412 poin artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level sedang. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.9
Perkembangan Indeks Gini Rasio Kota Bogor Tahun 2016-2020



Data diolah dari BPS

Grafik 2.10
Perbandingan Gini Rasio Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2017-2020



Sumber : BPS Jawa Barat, 2021

Jika berdasarkan grafik di atas, tahun 2020 gini rasio di Kota Bogor lebih tinggi jika dibandingkan dengan gini rasio Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Dimana Gini Rasio Kota Bogor sebesar 0,412 sedangkan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,403 dan gini rasio nasional sebesar 0,381.

Capaian gini rasio Kota Bogor hingga tahun 2019 masih dirasa terlalu tinggi. Artinya bahwa, pemerataan pendapatan antar golongan masyarakat Kota Bogor masih cukup tinggi. Dengan demikian, hal ini berarti pembangun bidang ekonomi saat ini belum dapat mengungkit pendapatan masyarakat bawah, hal ini sejalan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) yang

merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Bogor yang mencapai 0,72 di tahun 2019 dan meningkat menjadi 1.08 di tahun 2020.

Namun disisi lain tingginya gini rasio di negara berkembang khususnya pada di fase awal peningkatan pertumbuhan ekonomi sebenarnya merupakan fenomena yang umum, sejalan dengan waktu perlahan Gini ratio akan menurun mengikuti model kurva “U” terbalik.

2.2.5 TINGKAT KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:

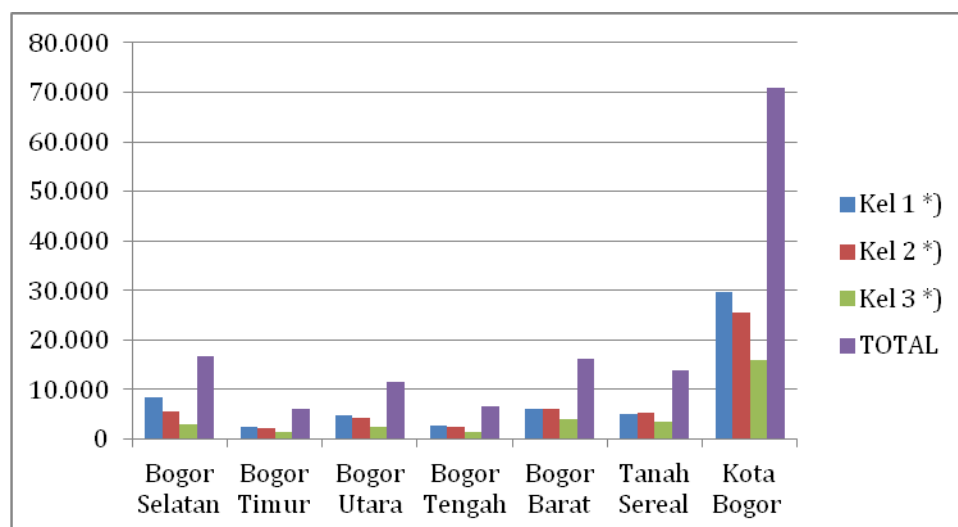
- a. Laju pertumbuhan penduduk, dimana jumlah penduduk semakin bertambah namun tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.
- b. Angkatan Kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c. Tingkat pendidikan yang rendah, dimana hal ini berpengaruh pada kompetensi dan skill yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja.
- d. Kurangnya perhatian pemerintah, dimana pemerintah terkadang kurang peka terhadap permasalahan kemiskinan serta tidak memiliki program yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan.
- e. Distribusi yang tidak merata, dimana secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan menjadi timpang.

Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) rumah tangga miskin dikelompokkan menjadi tiga, antara lain:

- a. Kelompok 1 adalah rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10 persen terendah di Indonesia/paling miskin.
- b. Kelompok 2 adalah rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11 persen - 20 persen terendah di Indonesia/hampir miskin.
- c. Kelompok 3 adalah rumah tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21 persen - 30 persen terendah di Indonesia/rentas miskin.

Pada tahun 2020 jumlah rumah tangga miskin di Kota Bogor mencapai 71.018 rumah tangga yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah rumah tangga miskin pada kelompok 1/paling miskin di Kota Bogor mencapai 29.555 rumah tangga. Pada kelompok 2/hampir miskin, jumlah rumah tangga miskin mencapai 25.605 rumah tangga, sedangkan penduduk yang masuk kelompok 3/rentas miskin sebanyak 15.858 rumah tangga.

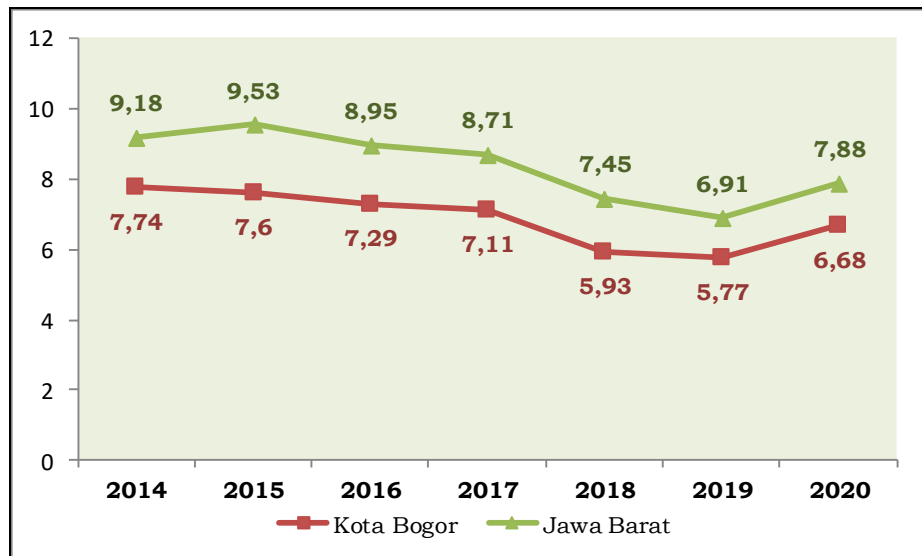
Grafik 2.11
Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Bogor Tahun 2020



Sumber: TNP2K Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Dapat dilihat dari grafik di atas, pada tahun 2020 jumlah rumah tangga miskin di Kota Bogor didominasi oleh Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Tanah Sareal dan Kecamatan Bogor Selatan. Kecamatan Bogor Selatan merupakan wilayah yang mempunyai sebaran Rumah Tangga Miskin terbanyak yaitu sebanyak KK 16.725 atau 23,55% dari total jumlah Rumah Tangga Miskin yang ada di Kota Bogor. Wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk dengan kondisi lingkungan yang kurang tertata baik

Grafik 2.12
Persentase Penduduk Miskin Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat
2014 - 2020 (Persen)



Sumber: BPS Kota Bogor, 2020

Berdasarkan data di atas persentase penduduk miskin Kota Bogor dari tahun 2014-2020 hampir selalu mengalami penurunan dan berada di bawah garis Provinsi Jawa Barat. Tercatat persentase penduduk miskin terendah terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 5,77 persen. Namun *trend* peningkatan terjadi kembali di tahun 2020 yaitu menjadi 6,68 persen.

Meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2020 tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19, dimana aktivitas ekonomi menurun baik disisi *supply* maupun di sisi *demand*, yang menyebabkan meningkatnya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan. Seluruh lapisan masyarakat memang terdampak, namun masyarakat menengah ke bawah merupakan yang paling merasakan akibat kebijakan-kebijakan penanggulangan Covid-19.

Dengan menurunnya aktivitas ekonomi Kota Bogor yang tercermin dengan PDRB Kota Bogor turun sehingga tenaga kerja yang bekerja turun (dengan asumsi fungsi produksi $Y=F(K,L)$), tenaga kerja turun, pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat.

Menurunnya Laju pertumbuhan ekonomi, menyebabkan menurunnya produksi perusahaan dan masyarakat, hal ini berpotensi pada berkurangnya kesempatan kerja, yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan atau masyarakat yang belum mendapat kerja makin sulit mencari kerja, yang pada akhirnya berujung pada penurunan daya beli masyarakat. Dengan menurunnya daya beli masyarakat terutama masyarakat yang secara ekonomi ada di sekitar garis kemiskinan, maka

berpotensi menjadi menurun berada di bawah kemiskinan. Kondisi ini menyebabkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin di Kota Bogor.

Dampak pandemi Covid-19 di sektor ekonomi paling dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, sementara untuk masyarakat berpenghasilan tinggi relatif tidak terpengaruh . Kondisi kemiskinan yang semakin meningkat akibat pandemi Covid-19 tentunya akan mempengaruhi ketimpangan yang terjadi di Kota Bogor.

Tingkat pengangguran memiliki hubungan yang erat dan positif dengan tingkat kemiskinan. Ketika pengangguran mengalami peningkatan, maka kemiskinan juga akan meningkat.

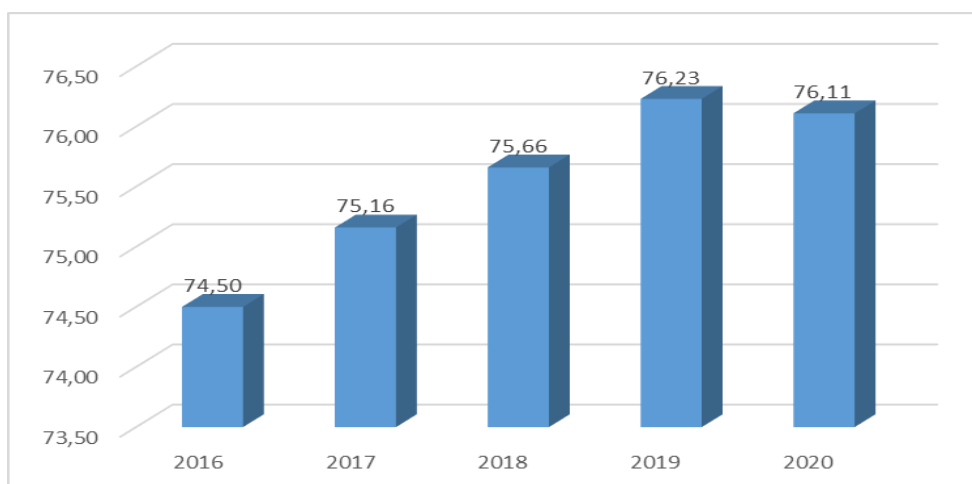
Seluruh lapisan masyarakat memang terdampak, namun masyarakat menengah ke bawah merupakan yang paling merasakan akibat kebijakan-kebijakan penanggulangan Covid-19. Kebijakan bantuan sosial tunai yang dilakukan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah Kota Bogor dirasa masih belum sesuai dengan yang diinginkan yaitu menurunkan tingkat kemiskinan

2.2.6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama periode 2016-2020 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan sumberdaya manusia Kota Bogor yang ditandai dengan meningkatnya kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.



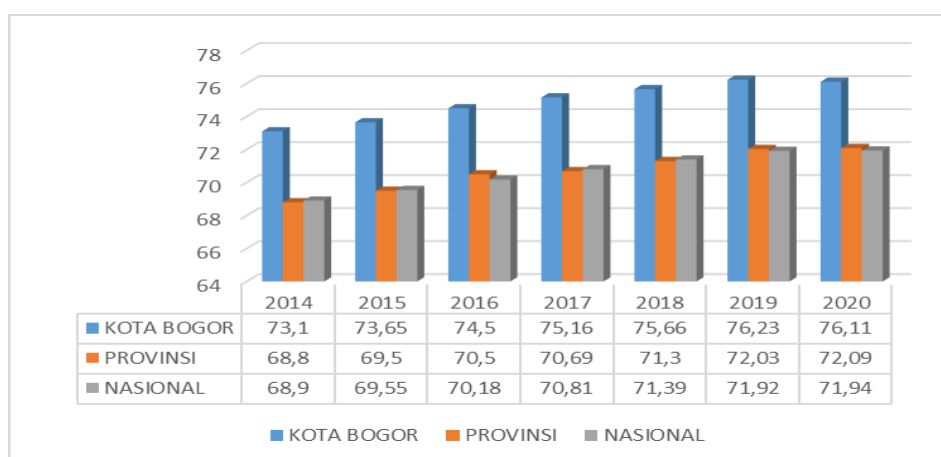
Grafik 2.13
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor 2016-2020



Sumber: BPS Kota Bogor

Gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Realisasi IPM Kota Bogor mencapai 76,11 persen pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasinya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 76,23 persen. Hal ini disebabkan adanya penurunan realisasi dari salah satu komponen IPM yaitu komponen ekonomi (pengeluaran per kapita per tahun). Pada tahun 2020 mencapai 76,11 persen, sesuai dengan klasifikasi UNDP bahwa angka ini termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera.

Grafik 2.14
Pertumbuhan IPM Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2020



Sumber : Data diolah dari SIPD

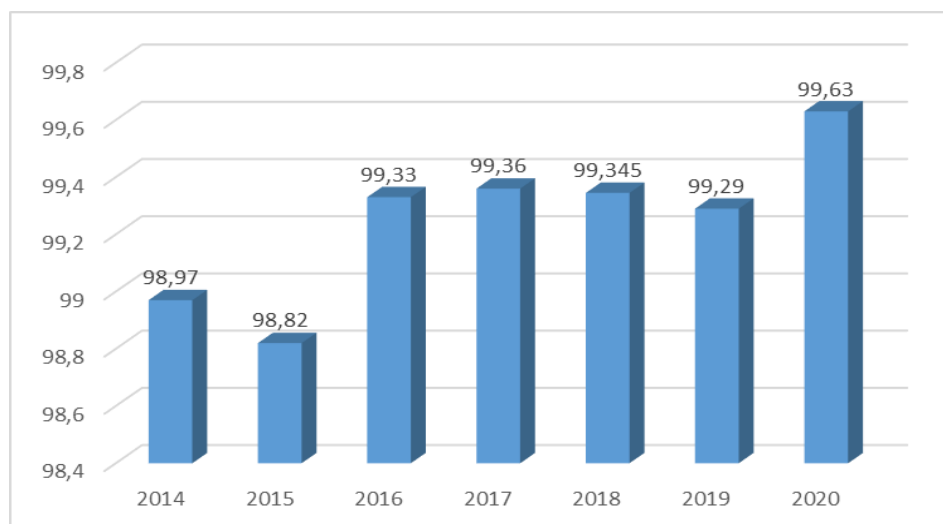
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa perkembangan IPM di Kota Bogor dalam kurun waktu 2014-2020 berada lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM secara provinsi dan nasional. Terlihat pada tahun 2020 IPM di Kota Bogor sebesar 76,11 persen jauh lebih

tinggi dibandingkan dengan IPM di provinsi yang hanya sebesar 72,09 persen dan tingkat nasional sebesar 71,94 persen.

2.2.7 ANGKA MELEK HURUF

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0% dan maksimal 100%. Pada periode 2014-2020 capaian angka melek huruf Kota Bogor fluktuatif. Angka Melek Huruf di Kota Bogor pada tahun 2020 sebesar 99,63 persen dimana angka tersebut merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 2.15
Angka Melek Huruf Kota Bogor 2014-2020



Sumber : BPS Kota Bogor 2018, AMJ 2014-2020

Tahun 2020 masih ada masyarakat Kota Bogor yang buta huruf (0,37 persen). Hal ini sebagai akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia.

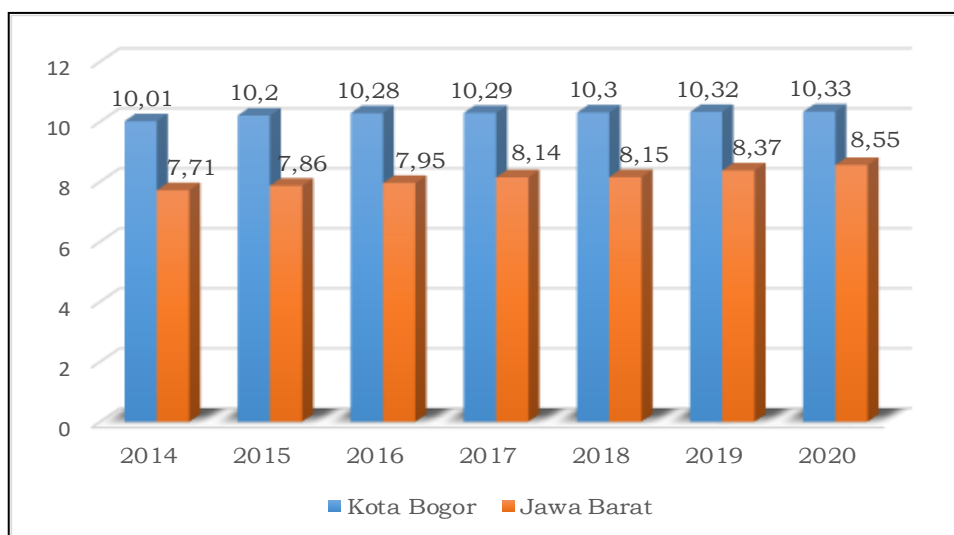
2.2.8 RATA RATA LAMA SEKOLAH

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah akan menjadi salah satu dari 4 komponen yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Angka Rerata Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bogor dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan sudah melampaui wajib pendidikan dasar 9 tahun, walaupun belum sesuai dengan harapan untuk mencapai rata rata lama sekolah 12 tahun. Berikut adalah perkembangan rata-rata lama sekolah di Kota Bogor dari tahun 2014-2020.

Grafik 2.16
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat 2014 - 2020



Sumber : BPS Kota Bogor. 2020

Mulai tahun 2016-2020 pertumbuhan angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor cenderung terjadi perlambatan sementara pertumbuhan angka Rata-Rata Lama Sekolah di Jawa Barat cenderung meningkat lebih tinggi dibanding pertumbuhan RLS Kota Bogor.

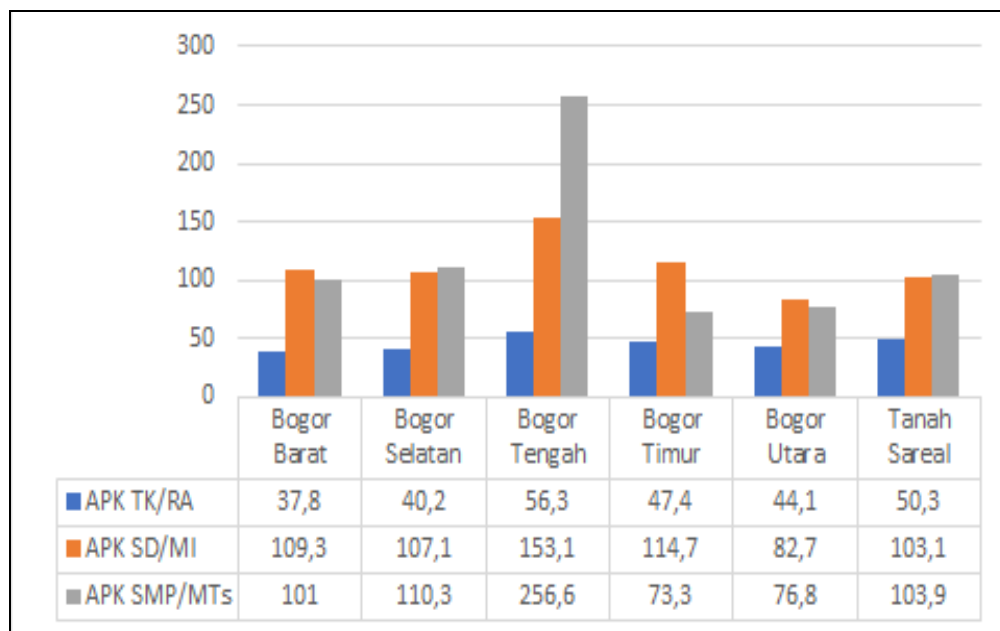
Permasalahan perlambatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bogor dikarenakan oleh masih adanya penduduk berusia > 25

tahun yang tidak tamat SMP dan SMA. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang perlu dilakukan oleh Kota Bogor adalah upaya untuk menekan Angka Putus Sekolah SMP dan SMA serta mengintensifikan program kejar paket A, paket B dan paket C melalui pengembangan PKBM di wilayah-wilayah.

2.2.9 ANGKA PARTISIPASI KASAR

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Berikut ini diuraikan gambaran mengenai perkembangan APK Kota Bogor Tahun 2020 menurut Kecamatan :

Grafik 2.17
Angka Partisipasi Kasar SD, SMP, dan SMA per Kecamatan Kota Bogor tahun 2020



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor (2020) ; Data diolah dari SIPD

Angka partisipasi kasar tingkatan pendidikan TK tertinggi yaitu di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 56,3, sedangkan terendah pada Kecamatan Bogor Barat sebesar 37,8. Untuk angka partisipasi kasar tingkatan SD tertinggi tercatat di Kecamatan Bogor Tengah yaitu sebesar 153,1, sedangkan yang terendah yaitu di Kecamatan Bogor Utara sebesar 82,7. Angka partisipasi kasar tingkatan SMP tertinggi tercatat pada angka 225,6 untuk Kecamatan Bogor Tengah dan 73,3 terendah untuk Kecamatan Bogor Timur.



2.2.10 ANGKA PARTISIPASI MURNI

Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bogor pada tahun 2020 secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI mencapai 95,74 persen dari target 99,5 dan SMP/MTS mencapai 74,88 persen dari target 94,14. Angka yang di capai belum cukup melampaui target, dan untuk jenjang pendidikan SMA/MA/MK sebesar 62,51 persen. Hal ini menunjukkan perlu masih adanya penduduk yang belum mengikuti jenjang pendidikan sehingga masih perlu dukungan program yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat melihat tabel di bawah ini sebagai gambarannya.

Catatan : jenjang pendidikan menengah SMA/SMK tahun 2018 menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bogor Tahun 2014 – 2020

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Kejar Paket A	99,44	103,98	98,30	95,44	108,05	95,47	95,74
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Kejar Paket B	97,89	99,41	74,30	74,75	94,14	74,91	74,88
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	73,75	103,99	78,6	61,21	88	62,21	62,51

Sumber : Bogor Dalam Angka 2020 dan Dinas Pendidikan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD dan Laporan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dan Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2020

2.2.11 ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP BAYI

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) pada tahun 2020 di Kota Bogor sebesar 996,85 persen menggambarkan peluang bayi yang hidup usia di bawah satu tahun diantara 1.000 bayi yang lahir adalah sebanyak 996,85 bayi. dengan jumlah kelahirannya 18.742 ribu pada tahun 2020. Angka kelangsungan hidup bayi ini mengalami penurunan dari tahun 2019 dimana sebanyak 997,98 persen.

Tabel 2.12
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Bogor 2014-2020

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelahiran Hidup	19.729	19.729	19.081	20.502	19.669	34.118	18.742
2	Jumlah Kematian Bayi	55/10	65	53	74	59	69	59
3	Angka Kematian Bayi	2,7	3,2	2,7	3,6	2,99	2,02	3,15
4	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	997,3	996,8	997,3	996,4	997,01	997,98	996,85

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

2.2.12 ANGKA KEMATIAN BAYI

Salah satu indikator utama derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR). Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Pada Tahun 2020, Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran di Kota Bogor mencapai 397,5 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Propinsi Jawa Barat yaitu 3.22. Upaya Pemerintah Kota Bogor terus berupaya untuk menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dalam rangka meningkatkan kualitas derajat kesehatan Masyarakat. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Bogor selama kurun waktu 2014-2020 dalam menekan AKB dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Angka Kematian Bayi Kota Bogor 2014 - 2020

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelahiran Hidup	19.729	19.729	19.081	20.502	19.669	34.118	18.742
2	Jumlah Kematian Bayi	10	65	53	74	59	69	74,5
3	Angka Kematian Bayi	TT	3,2	2,7	3,6	2,99	202,2	397,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor ; Data diolah dari SIP

Salah satu sasaran RPJMN 2015-2019 di bidang kesehatan adalah meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat dengan salah satu indikatornya adalah menurunkan Angka Kematian Bayi mencapai 24 kasus per 1000 kelahiran hidup pada akhir tahun 2019. Sementara dalam RPJMD Kota Bogor 2015-2019, telah ditargetkan bahwa pada akhir tahun 2019, Angka Kematian Bayi di Kota Bogor mencapai 3 kasus per 1000 kelahiran hidup. Target tersebut jauh melebihi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



2.2.13 ANGKA KELANGSUNGAN HIDUP IBU

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, Ibu dan Anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan. Penilaian terhadap status kesehatan dan pencapaian kinerja upaya kesehatan ibu menjadi salah satu tolak ukur yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat yang sangat berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur status kesehatan dan pencapaian kinerja upaya kesehatan ibu adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian Ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera.

Berdasarkan survei demografi Kesehatan Indonesia, (SDKI), sampai dengan tahun 2012, Angka Kematian Ibu di Indonesia masih sangat tinggi yaitu sebesar 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, untuk data di Kota Bogor pada Tahun 2020, Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 395 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan AKI di level nasional. Berikut ini adalah gambaran performa AKI di Kota Bogor berdasarkan hasil Dinas Kesehatan Kota Bogor (SIPD).

Tabel 2.14
Angka Kematian Ibu Kota Bogor 2014 - 2020

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelahiran Hidup	19.729	19.729	19.081	20.502	19.669	34.118	18.742
2	Jumlah Kematian Ibu	6	21	22	6	12/60	69	74
3	Angka Kematian Ibu	30	106	115	29,2	61	202,2	394,83

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

Hasil Sensus Kependudukan tahun 2010 menunjukkan bahwa 90% kematian ibu terjadi saat atau segera setelah proses persalinan. Persentase tertinggi sejak satu dekade terakhir karena perdarahan. Walaupun aborsi hanya berkontribusi 1% terhadap kematian ibu, data sesungguhnya mungkin lebih tinggi, bisa mencapai 11% - 15%. Hal ini disebabkan banyaknya kasus aborsi tidak aman tercatat sebagai infeksi dan perdarahan akibat komplikasi persalinan.

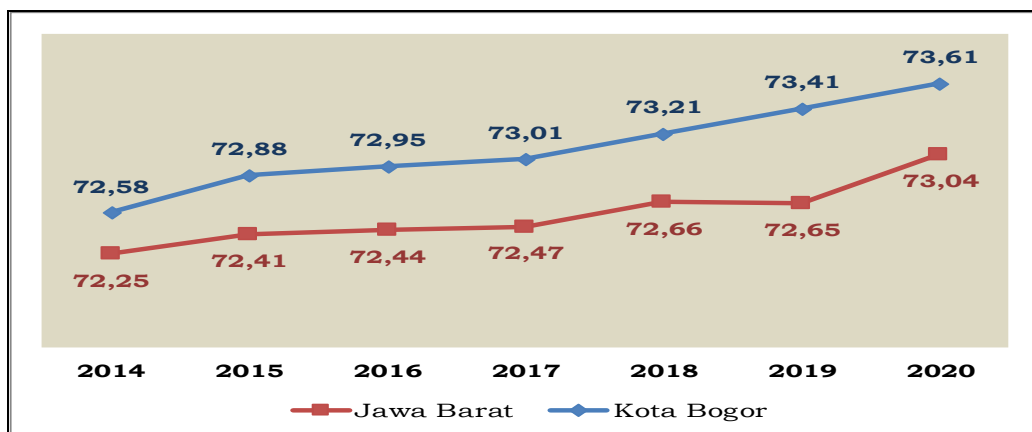
2.2.14 ANGKA USIA HARAPAN HIDUP

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidupnya. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan.

Peningkatan AHH di Kota Bogor cukup baik walaupun peningkatan dari tahun ke tahun tidak begitu signifikan, untuk itu beberapa variabel yang memiliki hubungan terhadap Angka Harapan Hidup perlu lebih diperhatikan lagi, seperti persentase penolong persalinan medis, jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan penyediaan air bersih sehingga peningkatan AHH di Kota Bogor lebih signifikan di tahun yang akan datang.

Angka Harapan Hidup Kota Bogor dalam kurun waktu 2014 hingga 2020 melampaui Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2020 Angka Harapan Hidup Kota Bogor mencapai 73,61 persen sedangkan Angka Harapan Hidup di Provinsi Jawa Barat sebesar 73,04 persen . Lebih lanjut, tren Angka Harapan Hidup di Kota Bogor tahun 2014-2020 dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2.18
Angka Harapan Hidup Kota Bogor 2014-2020



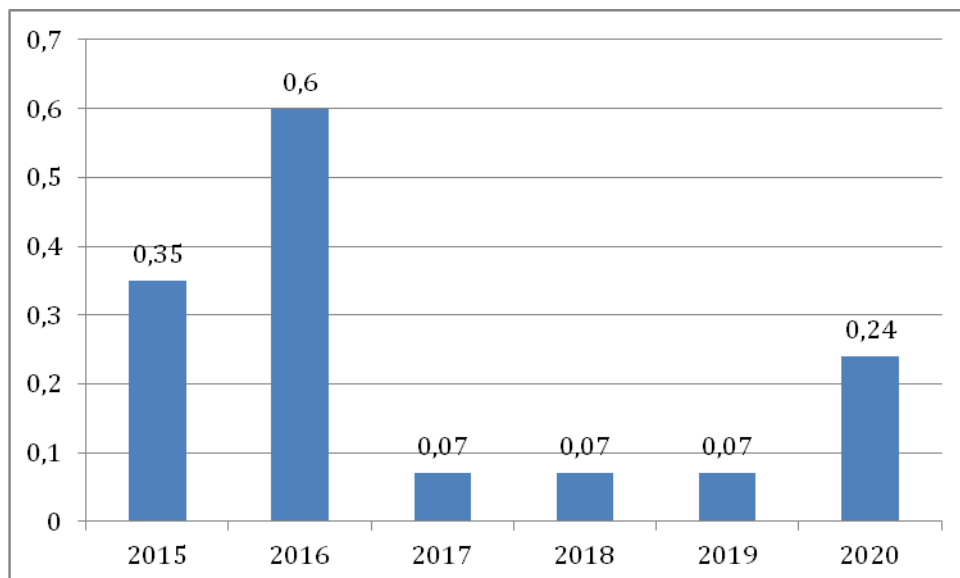
Sumber: BPS Jawa Barat 2021

2.2.15 PERSENTASE BALITA GIZI BURUK

Persentase jumlah balita yang menderita gizi buruk di Kota Bogor pada tahun 2017 – 2019 memiliki nilai konstan yaitu sebesar 0,07 persen. Penurunan persentase balita gizi buruk di Kota Bogor jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2016 yang sebesar 0,6 persen mengindikasikan adanya peningkatan kesehatan balita itu sendiri dan kesadaran ibu-ibu untuk memberikan makanan yang

bergizi untuk anaknya. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan persentase balita gizi buruk menjadi 0,24. Kenaikan persentase balita gizi buruk ini diindikasikan karena adanya pandemi Covid-19. Adapun perkembangan kondisi balita gizi buruk di dalam kurun waktu tahun 2015-2020 disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2.19
Persentase Balita Gizi Buruk 2015-2020



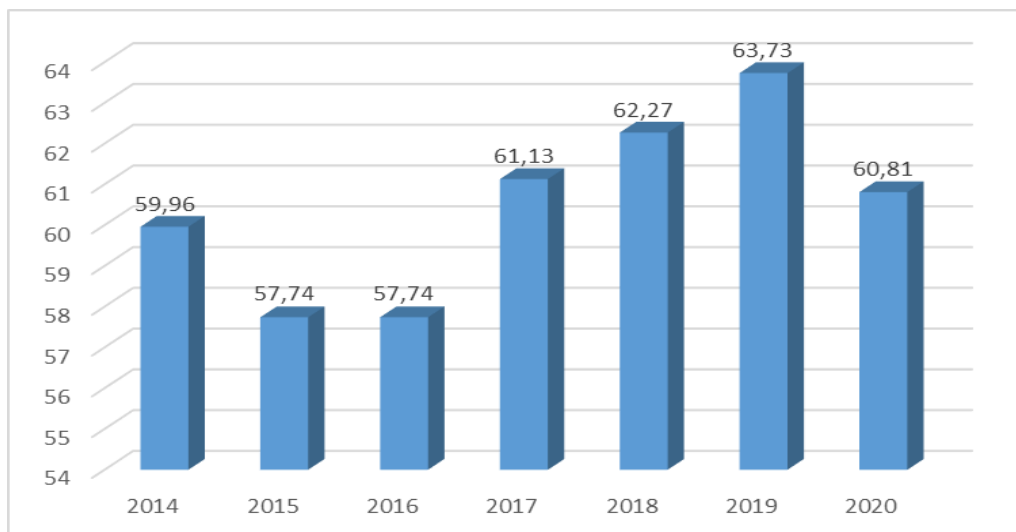
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bogor

2.2.16 RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Indikator ini mengukur jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per jumlah penduduk usia kerja 15-64 tahun. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja, dan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Bogor pada tahun 2014-2020 sebagai berikut :

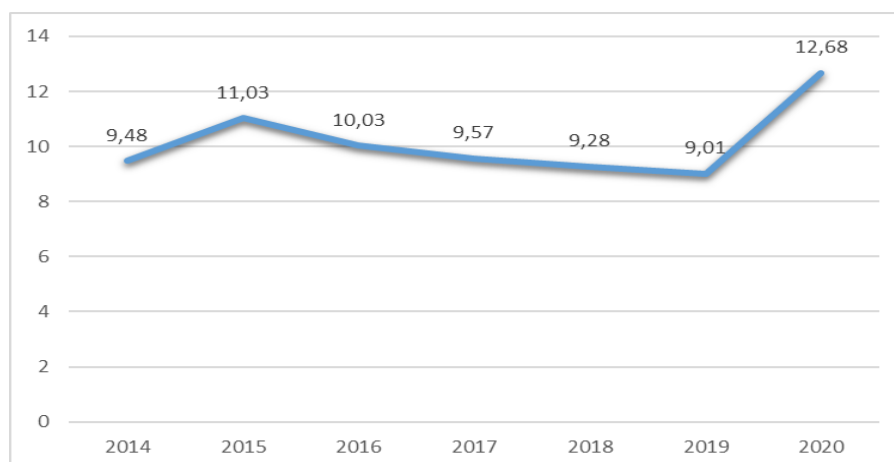
Grafik 2.20
Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bogor Tahun 2014-2020



Sumber: BPS dan angka Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

Selama kurun waktu 2014-2020 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Bogor relatif fluktuatif. Pada tahun 2014 nilai TPAK Kota Bogor 59,96 persen dan menurun pada tahun 2015 menjadi 57,74 persen dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2016. Kenaikan terjadi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 hingga 2019 berturut-turut menjadi 61,13 persen, 62,27 persen dan 63,73 persen. Hingga akhirnya mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 60,81 persen.

Grafik 2.21
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bogor Tahun 2014 - 2020



Sumber : BPS, Provinsi Jawa Barat

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bogor relatif fluktuatif sepanjang tahun 2014-2020. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka 11,03 persen dan menurun pada tahun 2016 menjadi 10,03 persen. Penurunan terjadi sepanjang tahun 2015-2019, pada tahun 2019 pengangguran terbuka di Kota Bogor sebesar 9,01 persen. Namun tingkat pengangguran terbuka kembali naik menjadi 12,68 persen pada tahun 2020.

Tingginya TPT di Kota Bogor di tahun 2020 dipicu dengan adanya pandemi Covid-19, dimana pada masa tersebut terjadi penurunan aktivitas ekonomi, penurunan permintaan akan barang dan jasa, dengan adanya penurunan tersebut maka menurunkan jumlah produksi yang menyebabkan terjadi pengurangan tenaga kerja yang terlihat dari adanya penurunan PDRB. Dengan menurunnya aktivitas ekonomi menyebabkan tenaga kerja, sehingga meningkatkan angka TPT.

Disisi lain struktur perekonomian Kota Bogor di motori oleh sektor tersier yang mana sektor-sektor tersebut bukan sektor yang bersifat padat karya, sehingga penyerapan tenaga kerjanya tidak terlalu banyak.

2.2.17 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survey Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Bogor disajikan pada Tabel di bawah.

Tabel 2.15
Indeks Kepuasan Masyarakat 2014-2020

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	N/A	3,1	3,2	3,21	3,39	3,45	3,37

Sumber data : DPMPSTSP Kota Bogor Data diolah dari SIPD 2014-2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat pada Tahun 2015 hingga 2019 terus mengalami peningkatan, terakhir mencapai 3,45 persen pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah semakin meningkat. Tetapi pada tahun 2020 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan hanya mencapai 3,37 persen.

2.2.18 OPINI BPK ATAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Kota Bogor setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kota Bogor pada kurun waktu 2014-2020 dapat dilihat pada tabel berikut. hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kota Bogor pada kurun waktu 2014-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2020

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
OPINI BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Data diolah dari SIPD

Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kota Bogor pada kurun waktu 2014-2016 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan meningkat pada 2017-2020 dengan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.2.19 PERCEPATAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Tabel 2.17
Skor PPH Konsumsi Pangan Kota Bogor 2014-2020

Skor PPH Konsumsi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	N/A	82,3	78,3	82,7	88,7	83,7	75,84

Sumber : Data diolah dari SIPD

Data menunjukkan, skor PPH Kota Bogor tahun 2015 sebesar 82,3 persen, menurun menjadi 78,3 persen pada 2016. Namun pada tahun-tahun berikutnya meningkat sehingga mencapai 88,7 persen di tahun 2018. Lalu pada 2019 skor ini menurun lagi ke angka 83,7 persen. Kemudian pada tahun 2020 skor PPH menurun kembali menjadi 75,84. Skor PPH terbesar ada pada tahun 2018 sebesar 88,7. Skor PPH tertinggi ada pada tahun 2018 sebesar 88,7.

Skor PPH ini menunjukkan tingkat keragaman konsumsi pangan di Kota Bogor.

2.2.20 KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB

Indikator yang digunakan untuk mengetahui urusan pilihan bidang pertanian salah satunya dengan melihat Kontribusi Sektor Pertanian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Tabel 2.18
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bogor 2014-2020

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,02	2,02	2,22	1,26	2,25	0,63	2,25

Sumber: Data diolah dari SIPD

Pada kurun waktu 2014-2020 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bogor mengalami fluktuasi. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kota Bogor terendah terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 0,63 persen dan mengalami kenaikan tahun 2020 sebesar 2,25 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya.

2.2.21 KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100 persen. Adapun kegiatan sektor perdagangan meliputi kegiatan-kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor perdagangan adalah perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Bogor selama kurun waktu tahun 2014-2020.

Tabel 2.19
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Bogor
Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2014-2020

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,22	21,90	21,59	21,23	20,58	20,31	19,52

Sumber : BPS Kota Bogor

Selama rentang tahun 2014-2020, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran berada di urutan pertama sebagai salah satu pembentuk PDRB Kota Bogor. Pada tabel di atas diperlihatkan bahwa distribusi sektor perdagangan terus mengalami penurunan. Penurunan ini ternyata tidak mengubah posisi sektor perdagangan sebagai peringkat teratas pembentuk PDRB. Hal ini dikarenakan lapangan usaha di peringkat di bawahnya juga ikut mengalami penurunan, yakni industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi. Makin melemahnya distribusi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan penurunan produksi. Hal ini sudah seharusnya menjadi masalah yang harus segera dicari strategi untuk meningkatkan kembali angka distribusi perdagangan besar dan eceran, paling tidak menghentikan penurunannya.

2.2.22 KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB

Sektor industri merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Akan tetapi kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Bogor terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 kontribusi sektor industri terhadap PDRB mencapai 19,15, kemudian terus menurun hingga mencapai 18,04 di tahun 2020. berikut disajikan data mengenai kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Bogor

Tabel 2.20
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Bogor

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Pengolahan	19,15	19,15	18,47	18,36	18,55	18,07	18,04

Sumber data : Bogor Dalam Angka dan Data diolah dari SIPD



2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah terdapat urusan wajib yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu urusan wajib pelayanan dasar (6 urusan) dan Urusan wajib non pelayanan dasar (18 Urusan). Adapun urusan wajib pelayanan dasar adalah : Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan pentaan ruang; Perumahan dan Permukiman; Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; Sosial.

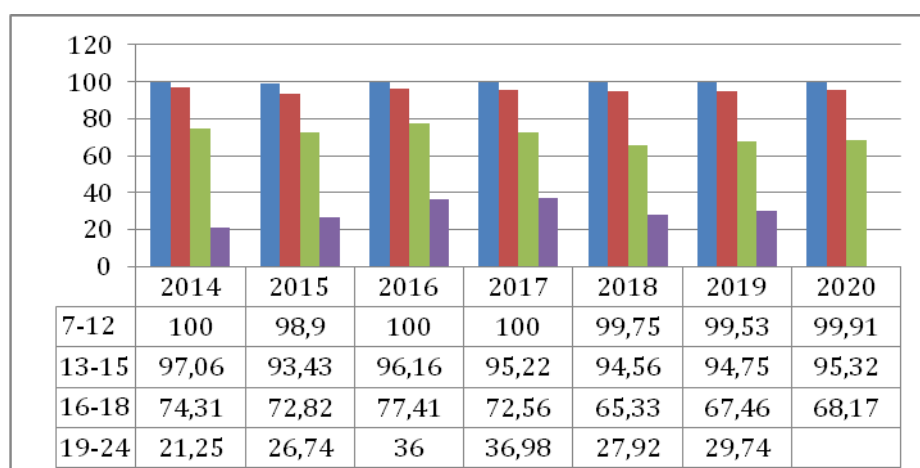
2.3.1.1 PENDIDIKAN

A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Angka partisipasi sekolah Kota Bogor berdasarkan data badan pusat statistik Jawa Barat, penduduk usia 7 – 12 tahun pada tahun 2020 sebesar 99,91. Kelompok umur 13-15 sebesar 95,32, kelompok umur 16-18 sebesar 68,17, sedangkan kelompok umur 19-24 sebesar N/A. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini terkait angka partisipasi sekolah di Kota Bogor.

Grafik 2.22
Angka Partisipasi Sekolah Kota Bogor 2014 - 2020



Sumber : BPS Kota Bogor

B. Rasio Ketersediaan Sekolah (Penduduk Usia SD dan Menengah)

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah, karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

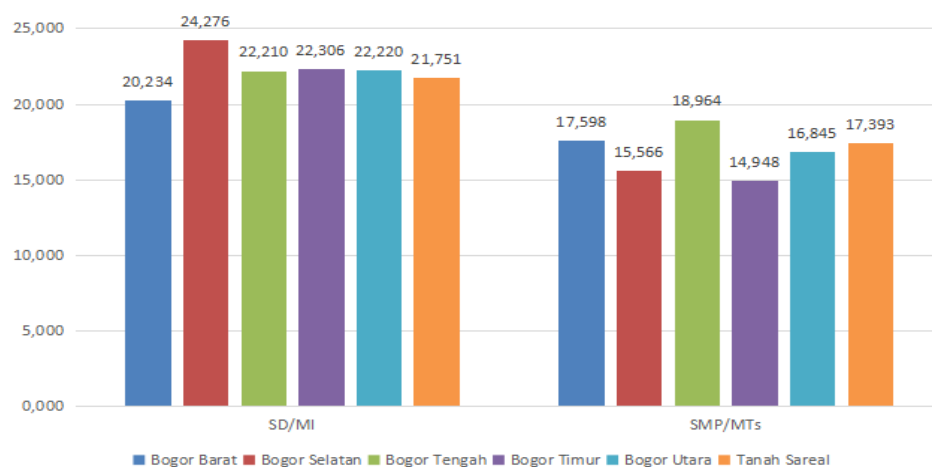
C. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru dan murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dan murid pada suatu jenjang tertentu. Rasio guru murid ini dapat menggambarkan beban tanggungan yang harus dijalani oleh seorang guru pada suatu daerah. Rasio ini juga dapat mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Semakin kecil nilai rasionya, maka akan semakin kecil juga beban tanggungan seorang guru. Sebaliknya semakin besar nilai rasionya, maka akan semakin besar juga beban tanggungan seorang guru diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, bahwa setiap SD/MI tersedia satu orang guru untuk setiap 32 peserta dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang, maka rasio guru terhadap murid di Kota Bogor masih dapat dikatakan ideal sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2.23
Rasio Murid dan Guru

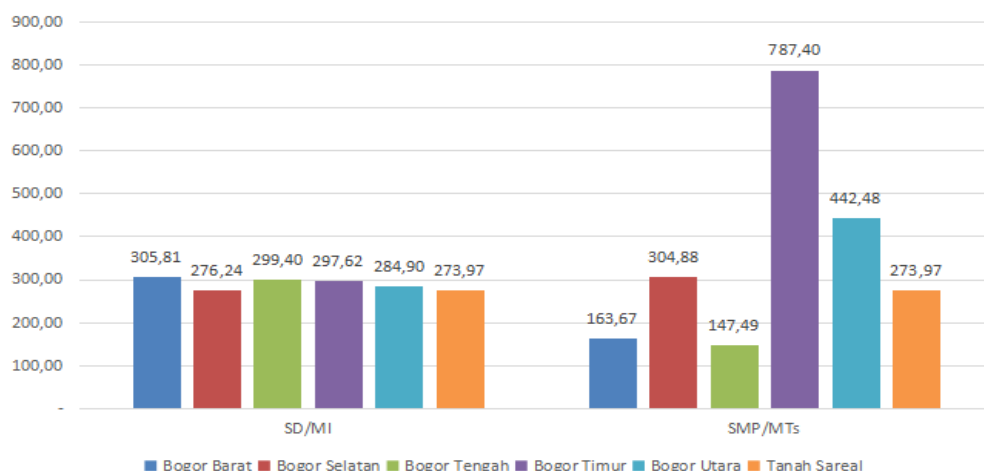


Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2021

D. Rasio Jumlah Murid dan Sekolah

Rasio jumlah murid dan sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Data ini menggambarkan daya tampung sekolah. Kondisi daya tampung sekolah di Kota Bogor pada setiap Kecamatan pada tahun 2019-2020 dapat tergambar dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2.24
Rasio Jumlah Murid dan Sekolah di Kecamatan Kota Bogor Tahun 2020



Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2021

Dari grafik di atas tergambar rasio jumlah murid dan sekolah tertinggi di Kota Bogor untuk jenjang SD/MI terdapat di Kecamatan Bogor Barat dan untuk jenjang SMP/MTs terdapat di Kecamatan Bogor Timur. Jenjang pendidikan SD/MI, 305,81 persen yang artinya satu sekolah SD/MI menampung 305 siswa. Jenjang pendidikan SMP/MTs dengan rasio sebesar 787,40 persen, angka ini berarti satu sekolah SMP/MTs menampung 787 siswa.

E. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-1V

Salah satu komponen penting dalam aspek pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan kualifikasi guru. Pada tahun 2020, persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi mengajar yang ditandai dengan terpenuhinya latar belakang pendidikan (S1) tercatat sudah mencapai 87. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kualifikasi guru di Kota Bogor, akan berdampak positif pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Berikut disajikan data mengenai angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-VI di Kota Bogor per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2015 - 2020.

Tabel 2.21
Perkembangan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	85	88,5	85	87,87	88	87

Sumber data: Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2020



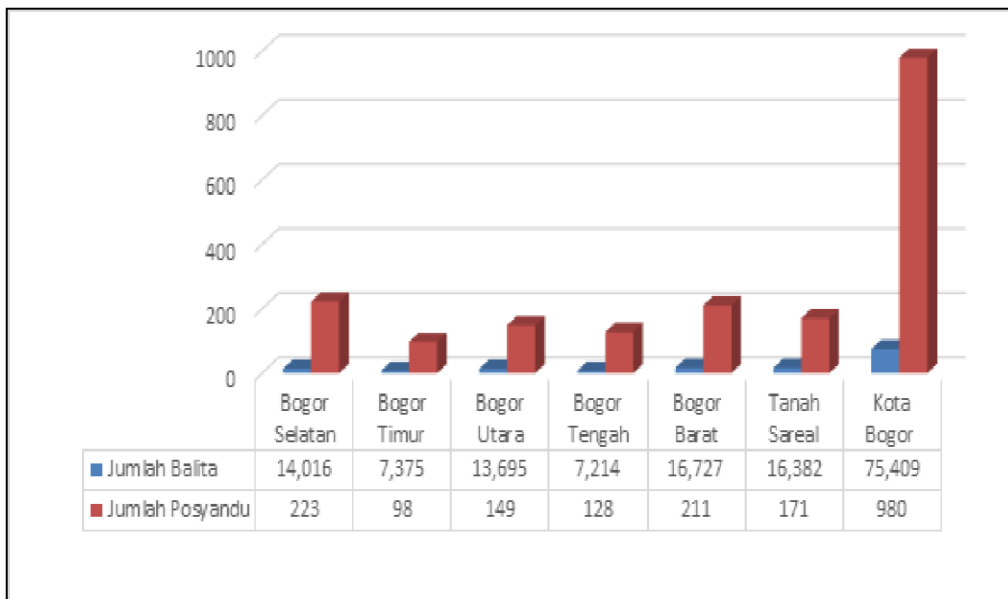
2.3.1.2 KESEHATAN

A. Rasio Posyandu

Rasio Posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah 75 – 100 balita. Apabila 1 unit posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka di lakukan pemekaran unit posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit posyandu.

Grafik 2.25
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2019



Sumber data : BPS, Data diolah ; Data diolah dari SIPD

Rasio Posyandu di Kota Bogor mencapai 1 : 90 dengan *range* 95 – 98. Artinya rasio posyandu di Kota Bogor termasuk rasio ideal.

B. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Tabel 2.22
Rasio Puskesmas dan Pustu di Kota Bogor Tahun 2014 - 2020

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	24	24	24	25	25	24	25
2	Jumlah Puskesmas Pembantu	29	29	32	31	31	31	32
3	Jumlah penduduk	1.030.720	1.047.922	1.064.687	1.081.009	1.096.828	1.112.081	1.126.927
4	Rasio Puskemas	0,69	0,68	0,67	0,69	0,68	0,68	0,67

Sumber data : Bogor Dalam Angka 2021, Data diolah dari SIPD

Dari data di atas, rasio puskesmas per satuan penduduk Kota Bogor dari tahun 2020 adalah 19.770,65 artinya setiap puskesmas dan pustu melayani sebanyak 19.770 jiwa. Dengan demikian rasio puskesmas/pustu di Kota Bogor sudah memenuhi standar karena standarnya 1 puskesmas/pustu 30.000 jiwa. Pada tahun 2020 baik jumlah puskesmas maupun jumlah puskesmas pembantu mengalami peningkatan sebesar satu poin. Namun pada tahun 2020 rasio puskesmas mengalami penurunan sebesar 0,01 persen bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk sebesar 14.846 jiwa.

C. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah jumlah Rumah Sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas Rumah Sakit berdasarkan jumlah penduduk. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Tabel 2.23
Rasio Rumah Sakit di Kota Bogor Tahun 2014 - 2020

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah sakit	19	17	18	19	20	19	20
2	Jumlah penduduk	1.030.720	1.047.922	1.064.687	1.081.009	1.096.828	1.112.081	1.126.927
3	Rasio Rumah sakit	0,018	0,016	0,016	0,017	0,018	0,018	0,018

Sumber data : BPS, Data diolah ; Data diolah dari SIPD



Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa rasio rumah sakit di Kota Bogor dari tahun 2020 rata-rata melayani 56.346 jiwa. Pada tahun 2020 jumlah rumah sakit mengalami peningkatan sebesar satu poin, dan bersamaan dengan jumlah penduduk yang meningkat sebesar 14.846 jiwa. Namun rasio rumah sakit pada tahun 2020 mengalami stagnansi atau dalam besaran yang tetap sejak tahun 2018.

D. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Rasio ini juga mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Idealnya adalah satu berbanding 2.500 artinya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, ini sesuai dengan standar sistem pelayanan terpadu.

Tabel 2.24
Rasio Dokter Per satuan Penduduk

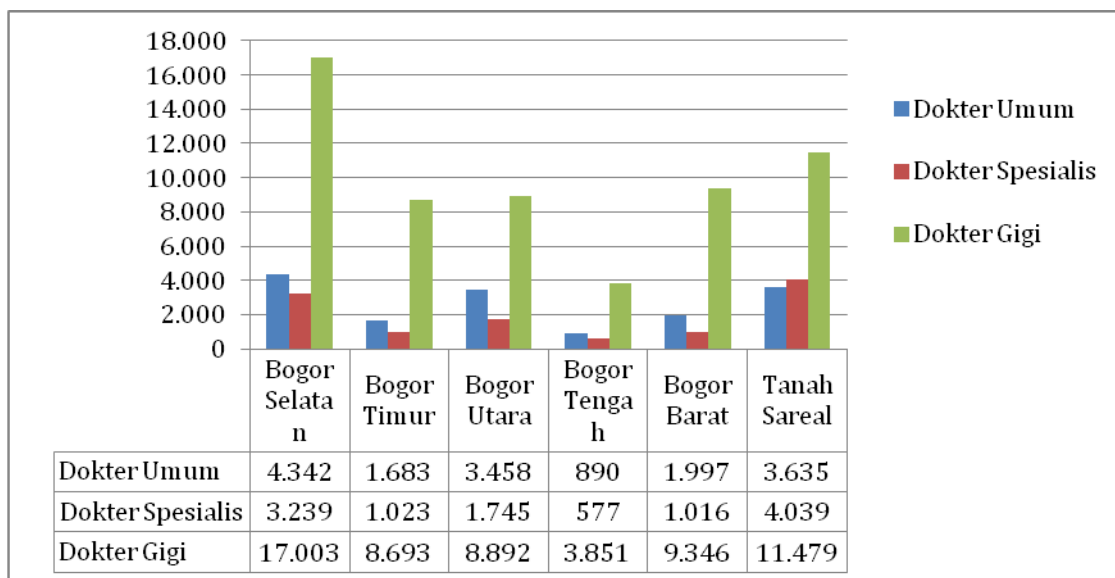
NO	URAIAN	Standar Rasio Dokter	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	JUMLAH PENDUDUK		1.047.922	1.064.687	1.081.009	1.096.828	1.112.081	1.126.927
JUMLAH DOKTER PRAKTEK								
2	DOKTER UMUM		302	296	330	373	452	447
3	DOKTER SPESIALIS		557	561	645	682	683	723
4	DOKTER GIGI		115	93	118	125	125	114
RASIO								
5	DOKTER UMUM	1:2500	3.470	3.422	3.276	2.941	2.320	2.521
6	DOKTER SPESIALIS	1: 16.000	1.881	1.806	1.676	1.608	1.341	1.559
7	DOKTER GIGI		9.112	10.893	9.163	8.775	6.433	9.885

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Pada tabel di atas, Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Bogor pada selang waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali. Dimana pada tahun 2018 rasio dokter umum per satuan penduduk mencapai 2.941 artinya satu dokter melayani 2.941 jiwa. Berlanjut sampai tahun 2019 rasio dokter per satuan penduduk menjadi 2.320. Sedangkan rasio dokter spesialis per satuan penduduk juga sudah memenuhi standar karena pada tahun

2019 rasio nya mencapai 1.341 yang artinya satu dokter spesialis melayani 1.341 jiwa. Rasio dokter gigi per satuan penduduk adalah 6.433 artinya satu dokter gigi melayani 6.433 jiwa. Kemudian pada tahun 2020 rasio dokter umum per satuan penduduk mencapai 2.521 artinya satu dokter melayani 2.521 jiwa. Sedangkan rasio dokter spesialis per satuan penduduk juga sama seperti tahun 2019 sudah memenuhi standar karena rasio nya mencapai 1.559 yang artinya satu dokter spesialis melayani 1.559 jiwa. Rasio dokter gigi per satuan penduduk adalah 9.885 artinya satu dokter gigi melayani 9.885 jiwa. Kondisi di atas menunjukkan bahwa rasio dokter per satuan penduduk di katakan sudah ideal. Untuk melihat kondisi sebarannya per kecamatan dapat di lihat pada grafik berikut :

Grafik 2.26
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Per Kecamatan



Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

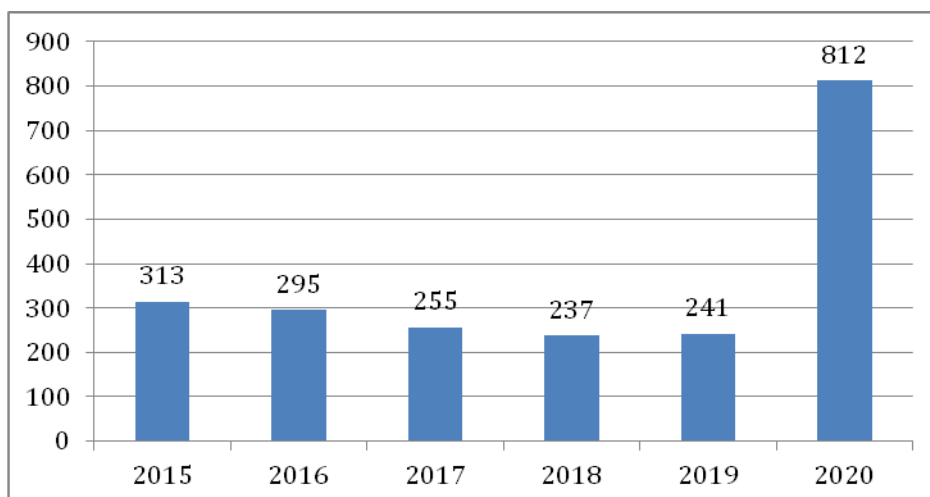
Rasio Dokter Umum per satuan penduduk per Kecamatan sudah memenuhi standar pelayanan terpadu. Sedangkan rasio tertinggi untuk rasio dokter gigi terdapat di kecamatan Bogor Selatan yaitu 17.003. Rasio yang ideal untuk dokter terhadap penduduk, yaitu satu dokter melayani 2.500 penduduk sehingga sangat jelas bahwa rasio dokter per satuan penduduk di Kecamatan Bogor Selatan tidak ideal.

E. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.



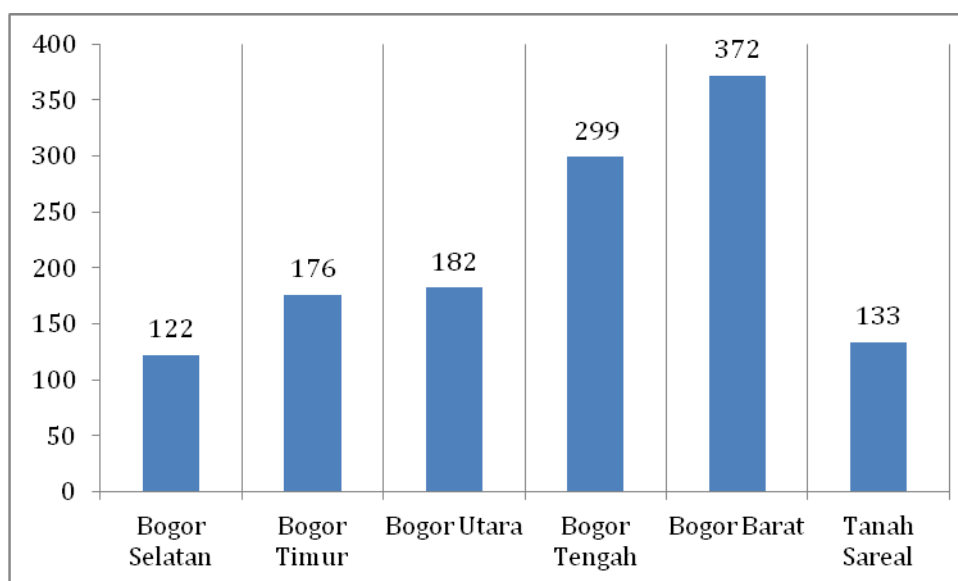
Grafik 2.27
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk di Kota Bogor
Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas kesehatan Kota Bogor, 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk di Kota Bogor dari tahun 2015 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Rasio tenaga medis sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami penurunan artinya ketersediaan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada penduduk mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 812 artinya satu tenaga medis harus melayani 1.559 jiwa.

Grafik 2.28
Jumlah Tenaga Medis Per Kecamatan Kota Bogor Tahun 2020



Sumber: Dinas kesehatan Kota Bogor, 2020

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah tenaga medis tertinggi terdapat di Kecamatan Bogor Barat yaitu sebanyak 372 tenaga medis dan terendah terdapat di Kecamatan Bogor Selatan yaitu sebanyak 122 tenaga medis.

2.3.1.3 PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG

A. Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum

Pembangunan aspek pelayanan umum urusan pekerjaan umum mencakup beberapa komponen penting, baik berupa panjang jalan Kota Bogor dalam kondisi baik serta komponen yang mendukungnya seperti drainase jalan dan trotoar jalan. Selain itu juga yang menjadi fokus pembangunan urusan pekerjaan umum adalah pembangunan turap penahan longsor dan perbaikan jaringan irigasi. Secara umum kinerja pelayanan umum pada urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bogor Tahun 2015-2020

No.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pekerjaan Umum							
1.	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	87.6	88.15	88.32	88.59	89.38	83.47
2.	Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	61.32	61.71	61.83	66.44	88.79	66.7
3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi yang aman	66.8	66.8	72.1	67.21	66.59	70.90
4.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	2.78	5.48	7.22	11.01	64.14	11.17
5.	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	23	89	37	74.19	87.63	77.69
6.	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik (%)	11.46	22.92	34.38	45.83	46.73	56.40

Sumber: Dinas pekerjaan Umum dan Penataan ruang ; Data diolah dari SIPD

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa :

- 1) Presentase jalan kota dalam kondisi baik (40 KM/Jam) sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya yaitu sebesar 0,17% hingga 0,79% dan menurun di tahun 2020 sebesar -5,91% jika dibandingkan dengan tahun 2019;
- 2) Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%) sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Penurunan terjadi di tahun 2020 sebesar -22.09% jika dibandingkan dengan tahun 2019;
- 3) Persentase rumah tinggal bersanitasi yang aman sejak tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu

sebesar 4,89% dan pada tahun 2019 menurun sebesar 0,62%. serta mengalami peningkatan kembali di tahun 2020 sebesar 4,31%;

- 4) Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat dapat diketahui bahwa sejak tahun 2015 hingga 2019 terjadi peningkatan disetiap tahunnya. Namun terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 sebesar -52.97 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- 5) Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya pada tahun 2017 mengalami penurunan, namun pada tahun 2018 hingga 2019 kembali mengalami peningkatan. Dan menurun kembali di tahun 2020 sebesar -9,94% lokasi lawan rawan longsor yang dibangun TPTnya;
- 6) Persentase irigasi kota dalam kondisi baik dapat diketahui bahwa sejak tahun 2015 hingga 2020 terjadi peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 9,67% dari tahun 2019.

B. Rasio Jaringan Irigasi

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap. Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya di Kota Bogor tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.26
Rasio Jaringan Irigasi di Kota Bogor Tahun 2015-2020

No	Irigasi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Jaringan Irigasi	0,0644	0,1289	0,1933	0,2578	46,73	58,75

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; Data diolah dari SIPD

Proporsi panjang jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya di Kota Bogor mengalami kenaikan setiap tahunnya.

C. Ketersediaan Air Minum

Ketersediaan air, terutama air minum, menjadi salah satu penentu kualitas hidup suatu masyarakat. Berdasarkan data capaian program peningkatan sanitasi dasar Kota Bogor tahun 2020 bahwa persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman di Kota Bogor pada tahun 2020 mencapai 76,98%. Capaian kinerja pelayanan air minum di Kota Bogor dari tahun 2015-2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum di Kota
Bogor Tahun 2015 - 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang aman	82	86,92	90,55	91,98	92,58	76,98
2	Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum PDAM	82	85,85	88,73	91,44	92,58	72,67
3	Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum NON PDAM	NA	1,07	1,82	0,54	0,85	4,31

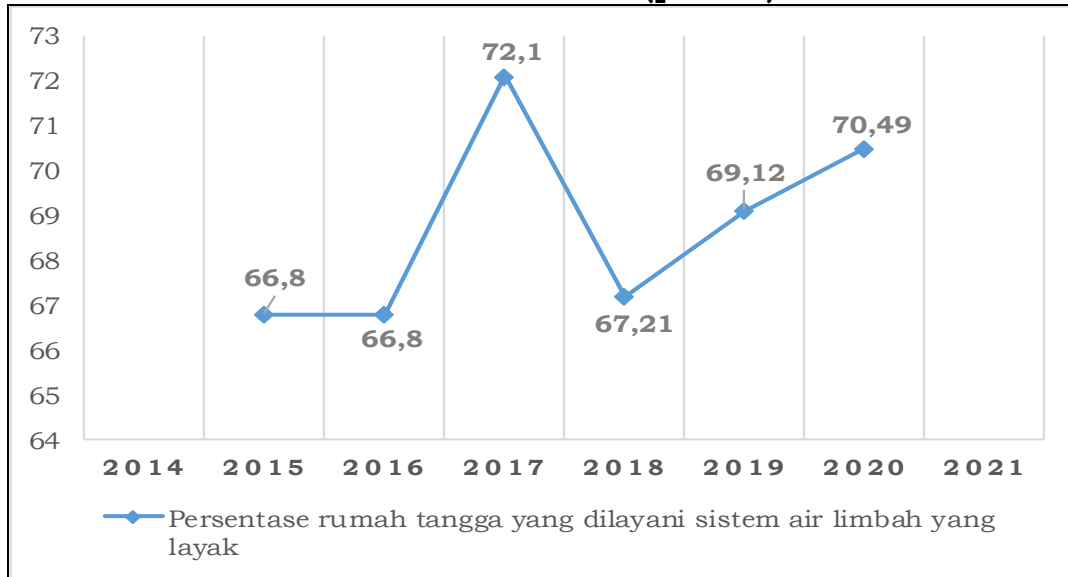
Sumber ; LKPJ AMJ Walikota tahun 2018 ; Data diolah dari SIPD

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga yang dilayani air minum yang aman dan rumah yang dilayani air minum PDAM sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 rumah tangga yang dilayani air minum yang aman meningkat sebesar 0,6% dan dan rumah yang dilayani air minum PDAM meningkat sebesar 1.14% dari tahun 2018. Namun pada rumah tangga yang dilayani air minum Non PDAM mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 meningkat sebesar 0.31% dari tahun 2018. Untuk tahun 2020, terjadi penurunan Persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum yang aman dan persentase Rumah Tangga yang Dilayani Air Minum PDAM, dikarenakan terdapat perbaikan perhitungan cakupan layanan sebagai tindak lanjut arahan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait perhitungan cakupan layanan, dengan asumsi jumlah per SR (Sambungan Rumah) harus mengikuti data dari BPS Kota/Kabupaten setempat. Kota Bogor menggunakan 1 SR (Sambungan Rumah) = 5 jiwa, sehingga berdampak terhadap cakupan layanan yang menurun karna hitungan di tahun sebelumnya Kota Bogor menggunakan asumsi 1 SR (Sambungan Rumah) = 6 Jiwa.

D. Ketersediaan Pengolahan Air Limbah yang Layak

Ketersediaan sistem jaringan pengolahan air limbah yang layak di Kota Bogor dari tahun 2015-2020 dapat dijelaskan pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.29
Ketersediaan Pengolahan Air Limbah yang Layak di Kota Bogor
Tahun 2015 – 2020 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bogor, Dinas PUPR Kota Bogor

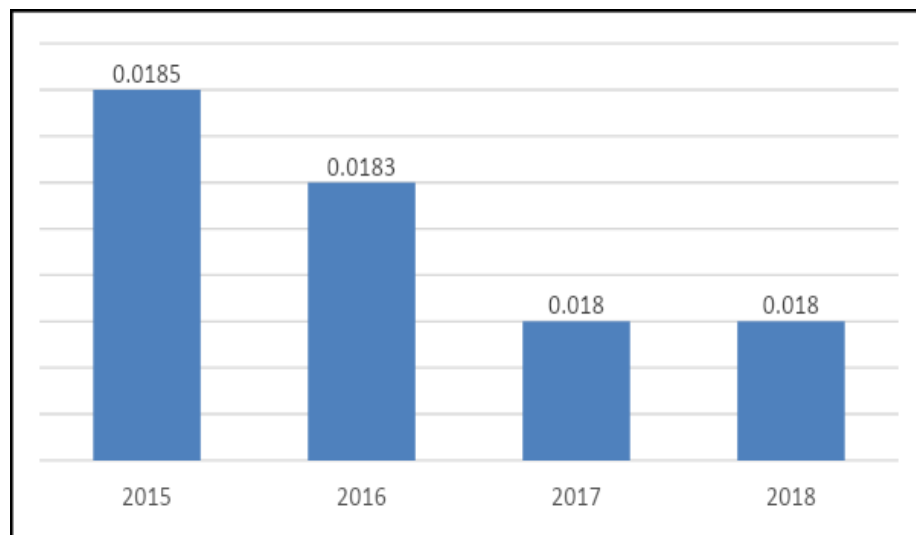
Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak tertinggi dicapai pada tahun 2017 sebesar 72,10%, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 66,80%. Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,91% dari tahun 2018. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,37% dari tahun 2019.

E. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.



Grafik 2.31
Rasio Tempat Ibadah di Kota Bogor Tahun 2015 - 2018



Sumber data : BPS, Data diolah ; Data diolah dari SIPD

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 rasio tempat ibadah di Kota Bogor mengalami stagnansi atau rasio dalam keadaan tetap yaitu sebesar 0,018. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam tiga tahun tersebut jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk di Kota Bogor tidak mengalami perubahan.

G. Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik

Dalam rangka mendukung sasaran strategis meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota, dan meningkatnya kuantitas dan kualitas taman kota dan taman lingkungan. Capaian Tahun 2016 adalah terpeliharanya hutan Kota di Kelurahan Pamoyanan dengan penanaman pohon sebanyak 700 pohon, dan tercapainya target RTH terbangun adalah sebesar 418.661 m² atau sebesar 98,90% dari target capaian tahunan sebesar 423.328 m².

Sampai dengan tahun 2018 telah tersedia Ruang Terbuka Hijau Publik seluas 1.160.083,07 m² yang meliputi taman dan taman sudut, jalur hijau, median jalan, hutan kota, pulau jalan, bantaran sungai, lapangan, kebun pembibitan dan area pemakaman dan di tahun 2018 terdapat penambahan total luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau lainnya yang baru sebesar 7.302,39 m² serta taman jalur, jalur hijau, dan furniture hijau lainnya yang tertata menjadi 418.651,41 m².

H. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Tabel 2.28
Perkembangan Pengendalian Bangunan ber-IMB di Kota Bogor (Persen) Tahun 2014-2019

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kesesuaian Bangunan dengan IMB yang telah terbangun	97,28	96,94	98,47	98,90	99,74	99,40
2.	Pencegahan Bangunan tidak Ber-IMB	NA	77,86	88,83	88,83	82,32	72,80

Sumber: LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2015,2016,2017,2018,2019 ; Data diolah dari SIPD

Kesesuaian bangunan dengan IMB yang di telah dibangun pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,34% dari tahun 2018. Dan dalam pencegahan bangunan tidak ber-IMB di Kota Bogor sejak tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan dengan masing-masing sebesar 6,51% dan 9,52%.

I. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya

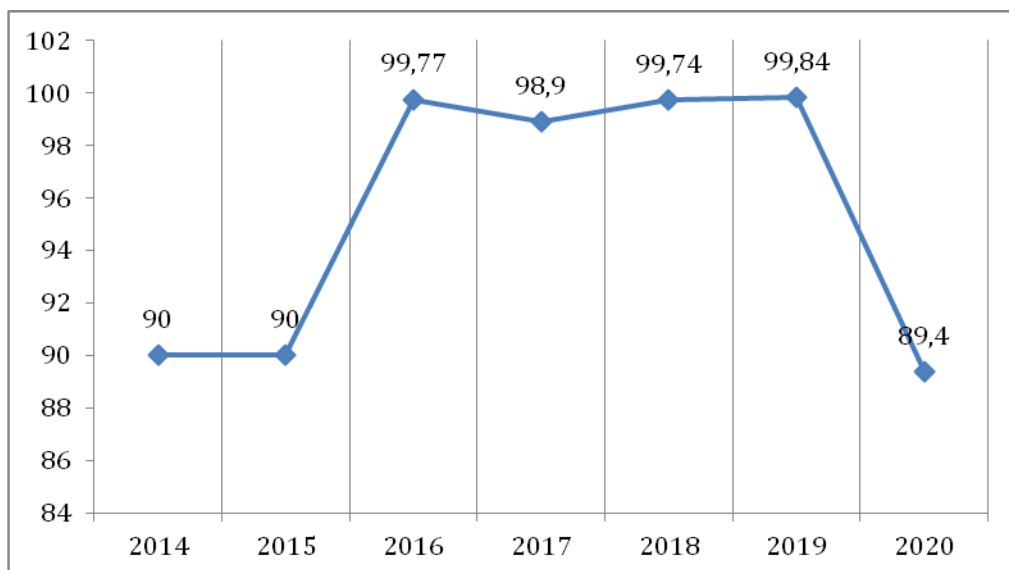
dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

Indikator ini mengukur kemampuan suatu daerah untuk mengikuti RTRW yang menjadi dasar bagi :

- penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah;
- penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah;
- pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional maupun daerah.

Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin taat suatu daerah pada RTRW, dan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut untuk menyelenggarakan otonomi.

Grafik 2.32
Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (persen)
di Kota Bogor Tahun 2014-2020



Sumber: Bappeda Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Bogor sejak tahun 2016 mengalami peningkatan namun pada tahun 2017 mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,84% dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 0,1%. Sejak tahun 2014 hingga 2019 ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Bogor dapat mencapai angka 90% hingga mendekati tingkat capaian 100% dengan nilai capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 99,84%. Pada tahun 2020 turun kembali sebesar 10,44% menjadi 89,4%.



2.3.1.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2015-2020. Dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 18,37. Artinya di tahun 2020 sekitar 18,37 penduduk Kota Bogor masih memiliki rumah tidak layak huni. Lebih lengkap kondisi rumah layak huni di Kota Bogor seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.29
Rumah Layak Huni di Kota Bogor Tahun 2014 - 2020

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio rumah layak huni (Rumah Layak Huni Per Satuan Penduduk)	20,84	20,84	20,73	20,71	17,28	17,07	18,37
2	Rasio pemukiman layak huni	91,8	91,8	92,92	94,03	95,14	95,53	95,51
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	74,3	99,06	98,11	78,4	70,59	73,02	75,00

Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman ; Data diolah dari SIPD

Dalam kurun waktu tahun 2014 – 2019 rasio pemukiman layak huni terus meningkat. Yang pada tahun 2014 mencapai 91,8 menjadi 95,53 di tahun 2019. Namun pada Tahun 2020 rasio pemukiman layak huni mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu menjadi 95,51. Sedangkan untuk cakupan ketersediaan rumah layak huni dan cakupan layak huni yang terjangkau sangat fluktuatif dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Pada tahun 2014 hingga 2016 mengalami peningkatan kemudian pada tahun 2017 hingga 2018 mengalami penurunan dan kemudian naik kembali hingga tahun 2020.

B. Penanganan Lingkungan Pemukiman Kumuh

Perbaikan jalan lingkungan pada lokasi kawasan kumuh pada setiap tahunnya memiliki besaran capaian yang berbeda-beda, hingga pada total akhir sejak tahun 2015 hingga 2020 perbaikan jalan tersebut sebesar 18.804,17. Begitupun dengan capaian perbaikan saluran/drainase pada lokasi Kawasan kumuh, dimana pada total akhir sejak tahun 2015 hingga 2020 perbaikan saluran/drainase tersebut sebesar 22.149,04.

Tabel 2.30
Data Penanganan Pada Kawasan Permukiman Kumuh
(Luas Kawasan < 10 Ha)

Kegiatan	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Penanganan Pada Kawasan Permukiman Kumuh (Luas Kawasan < 10 Ha)	Perbaikan Jalan Lingkungan Pada Lokasi Kawasan Kumuh	1.572,17	3.858,33	1.334,00	3.804,35	2.292,50	5.943,61	18.804,97
	Perbaikan Saluran/Drainase pada Lokasi Kawasan Kumuh	820	2.827,40	1.582,00	4.715,00	1.874,00	10.330,64	22.149,04

Sumber : Data diolah dari SIPD

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan beberapa kegiatan dengan anggaran dari KOTAKU APBN yaitu, penataan kawasan kumuh di 5 kelurahan (Kelurahan Paledang, Cibogor, Babakan Pasar, Ciwaringin dan Cimahpar) meliputi pekerjaan fisik, yaitu perbaikan jalan setapak, drainase, *septic tank* komunal, dan gerobak sampah. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu, 14 Kegiatan yang berlokasi di Kelurahan Mulyaharja, Kertamaya, Bojong Kerta, Batu Tulis, Babakan Pasar, Paledang, Cibuluh Suka Sari, Sempur, Ciwaringin, Cimahpar, Menteng, Cibogor, Gunung Batu. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan kegiatan penanganan kumuh di Kelurahan Paledang, Sukasari, Ciwaringin Dan Batu Tulis. Dan pada tahun 2020 sebanyak 12 (dua belas) kelurahan diantaranya Kelurahan Balumbang Jaya, Bubulak, Gunung Batu, Loji, Margajaya, Semplak, Kebon Kelapa, Sempur, Katulampa, Bantarjati, Ciparigi dan Kedungjaya.

2.3.1.5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SOSIAL

Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah di Kota Bogor terdiri atas: pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; pelayanan terkait kebencanaan.

A. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penyelesaian Penegakan Perda dan Sidang Tipiring

Capaian Kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dari tahun 2015 sampai tahun 2019, yang meliputi penegakan Perda dan capaian angka kriminalitas ditampilkan pada tabel 2.31



Tabel 2.31**Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2015-2019**

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase penegakan perda KTR	85	90	90	90	93
Persentase bangunan melanggar yang di tertibkan	98	98	98	98	95
Tingkat penegakan Perda ketertiban umum	100	100	100	100	100
Angka kriminalitas	NA	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005

Sumber : SatpolPP

Capaian Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dari tahun 2015 mencapai 85% selalu meningkat hingga tahun 2019 mencapai 93%. Meningkatnya capaian tersebut disebabkan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan ketertiban umum, serta yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Penegakan Perda terkait bangunan yang melanggar dari tahun 2015 sd 2018 mencapai 98% hanya terjadi penurunan di tahun 2019. Untuk penegakan Perda Ketertiban Umum capaiannya mencapai 100%. Untuk angka kriminalitas di Kota Bogor dari tahun 2015 – 2019 mencapai 0,0005 .

Secara lebih terperinci Kegiatan Penegakan Perda dan Sidang Tipiring Tahun 2014 s.d 2017 telah dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penertiban Perizinan (Sweeping) sebanyak 368 kali kepada 1.322 perusahaan;
2. Sidang Tipiring PKL sebanyak 16 kali kepada 540 PKL;
3. Sidang Tipiring KTR sebanyak 17 kali kepada 330 perokok;
4. Monitoring Tempat Hiburan Malam, Cafe dan rumah Bilyard sebanyak 54 kali.
5. Penyelidikan Pelanggar Perda sebanyak 69 kali;
6. Penyidikan Pelanggar Perda sebanyak 6 kali;
7. Razia mercon/petasan, majalah/ dan VCD/DVD porno, dan minuman keras sebanyak 141 kali;
8. Razia Wanita Tuna Susila (WTS) sebanyak 35 kali.

B. Penanganan Bencana

Aspek penilaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu Cakupan

Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time*) Penanggulangan Kebakaran. Dengan kondisi jumlah mobil pemadam kebakaran dan jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) serta jumlah Pos Pemadam Kebakaran saat ini, maka cakupan pelayanan kebakaran di Kota Bogor tahun 2015-2017 sudah mencapai angka 95% dengan Tingkat Waktu Tanggap (*Respon Time*) penanggulangan kebakaran rata-rata 18,6 menit (standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 adalah 15 menit).

Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan bagian dari SPM, oleh karena itu capaian lengkap terkait urusan ini ditampilkan pada pembahasan SPM di sub bab 2.6.2

2.3.1.6 SOSIAL

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari tabel 2.31 terlihat bahwa capaian indikator terkait PPKS umumnya mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2015, sebagai contoh pada tahun 2019 persentase fakir miskin dan PMKS /PPKS yang direhab dan berdaya mencapai 75,32% meningkat di bandingkan pada tahun 2015. Sementara jumlah PPKS yang terbina pada tahun 2019 mencapai 302 orang. Capaian lebih lengkapnya di perlihatkan tabel berikut:

Tabel 2.32
Capaian Urusan Sosial Umum Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	43,1	44,39	72,7	91,42	75,32
Persentase jumlah anak terlantar / anak jalanan yang di bina	13,22	32,25	21,22	2,08	36,7
Prosentase penyandang cacat trauma yang dibina	3,96	5,66	2,96	8,25	17,52
Jumlah PMKS/PPKS yang terbina	243	228	228	268	302

Sumber : Dinas Sosial



Dari tabel diatas secara umum capaian penanganan PPKS di Kota Bogor dalam tahun 2015-2019 mengalami perbaikan. Secara rinci capaian hingga tahun 2018 pada penanganan PPKS/penanganan urusan sosial adalah sebagai berikut :

1. Jumlah operator, pendamping dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/KSM Program Keluarga Harapan yang dibina tahun 2018 sebanyak 17.017 RTSM/KPM tahun 2017 yaitu 14.825 KPM tahun 2016 sebesar 9.823 KPM. Tahun 2015 jumlah RTSM yang dibina sebanyak 8.801 RTSM. Tahun 2018 telah diberikan juga Bantuan Pangan Non Tunai kepada 32.435 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp. 110.000/bulan;
2. Sampai dengan tahun 2018 jumlah E-Warong KUBE jasa untuk melayani KPM Penerima Bansos BPNT adalah 58 unit yang tersebar di 6 Kecamatan di Kota Bogor;
3. Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang ditindaklanjuti Tahun 2017 sebanyak 62 orang. Menurun jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 150 orang. Dan tahun 2018 jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang memperoleh pembinaan sebanyak 20 orang;
4. Jumlah Panti Asuhan yang dibina Tahun 2015-2017 sebanyak 74 atau 100% dari target. Tahun 2018 panti asuhan yang dibina sebanyak 78 yayasan;
5. Tahun 2018 terjadi penurunan jumlah PMKS yang ditangani dibanding tahun 2017 yaitu Anak jalanan 14 orang, Gepeng 42 orang dan WTS 19 orang. Jumlah PMKS yang ditangani tahun 2017 adalah: Anak jalanan 140 orang, Gepeng 257 orang, dan WTS 70 orang, tahun 2016 jumlah PMKS yang dibina sebanyak 334 orang yang terdiri dari: 133 anjal, 151 Gepeng dan 50 WTS. Tahun 2015 PMKS yang di bina sebanyak 402 orang yang terdiri dari: 140 anjal, 216 gepeng, dan 46 WTS;
6. Jumlah korban narkoba dan HIV/AIDS/WTS yang dibina tahun 2018 sebanyak 26 orang, tahun 2017 sebanyak 110 orang, Tahun 2016 sebanyak 40 orang, tahun 2015 sebanyak 40 orang dan tahun 2014 sebanyak 74 orang, sehingga total korban narkoba dan HIV/AIDS/WTS yang dibina tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 290 orang melalui pembinaan sosial, pembinaan dan keterampilan;
7. Jumlah anak terlantar yang dibina tahun 2018 sebanyak 38 anak. Tahun 2017 mencapai 41,47% yaitu tertanganinya 146

anak jalanan dan bayi terlantar dari 352 seluruh anjal di Kota Bogor. Tahun 2016 anak terlantar yang di bina sebanyak 100 orang, tahun 2015 sebanyak 25 orang dan tahun 2014 sebanyak 31 anak sehingga total anak terlantar yang dibina tahun 2015-2018 adalah sebanyak 340 anak melalui pemberian latihan keterampilan Jumlah penanganan korban tindak Perdagangan Anak (*Trafficking*) tahun 2017 sebanyak 4 kasus, tahun 2015 sebanyak 37 orang yang mengalami kasus *trafficking*, penanganan dilakukan melalui konseling, case conference dan pemberian rujukan bagi korban ke lembaga sosial. Ditahun 2018 Penanganan kasus *trafficking* sebanyak 2 (dua) kasus melalui konseling, case conference dan pemberian rujukan bagi korban ke lembaga sosial yang menangani serta penanganan korban tindak kekerasan (seksual) tahun 2018 sebanyak 15 kasus;

8. Tahun 2017 memberikan bantuan terhadap 33 orang penyandang cacat usia produktif yaitu berupa uang sebesar 5.000.000/orang, kursi roda, tongkat tuna netra, tongkat Disabilitas, dan tongkat patah tulang. Sedangkan pada tahun 2018 melalui Kementerian Sosial RI telah diberikan bantuan uang sebesar Rp. 2.800.000 kepada 25 Penyandang Disabilitas, selain itu diperoleh juga bantuan kursi roda dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebanyak 25 buah, dari yayasan Jepang Provinsi DKI Jakarta 25 buah, dari yayasan HDI sebanyak 12 buah dari CSR Mandiri sebanyak 5 buah, bantuan tongkat, walker, dan alat bantu dengar;
9. Pada tahun 2018 telah diberikan bantuan uang dari Kementerian Sosial RI kepada 25 orang penyandang cacat fisik sebesar Rp. 2.800.000,- Bantuan Kursi Roda sebanyak 25 buah dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dan 25 buah dari Yayasan Jepang Provinsi DKI Jakarta, 12 buah dari Yayasan HDI, 5 buah dari CSR Mandiri. Tongkat Dissabilitas 1 buah, alat bantu dissabilitas (walker) dari CSR 3 buah, alat bantu dengar dari CSR sebanyak 21 set serta pelunasan tunggakan biaya sekolah SMK Kamandaka dari CSR.

LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

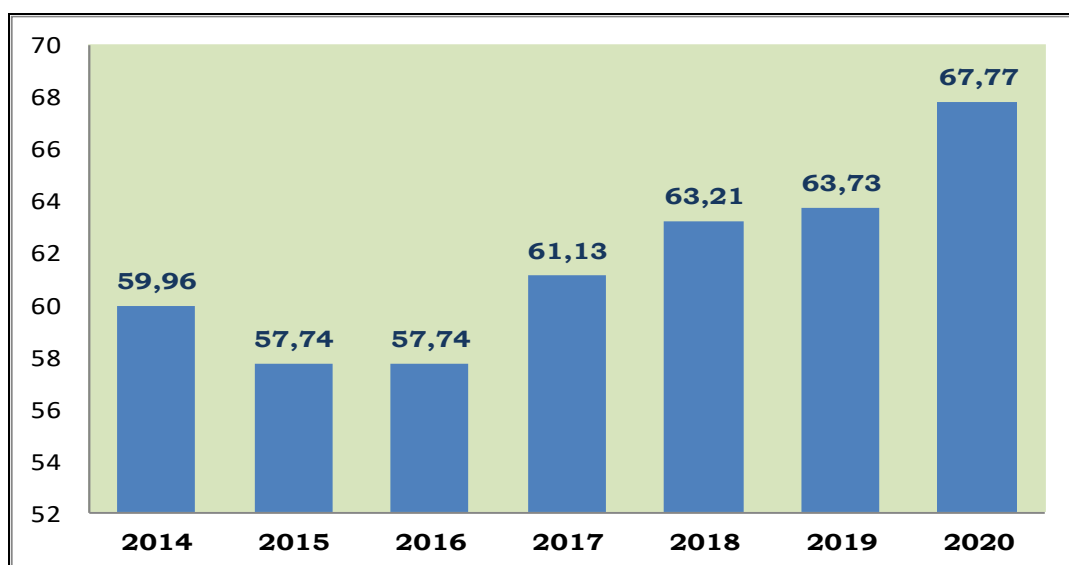
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan wajib non pelayanan dasar (18 Urusan), yang mana capaian pelaksanaan di Kota Bogor adalah sebagai berikut :

2.3.1.7 TENAGA KERJA

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari yang merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Grafik 2.33
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bogor Tahun 2014 – 2020 (persen)



Sumber : BPS, Kota Bogor

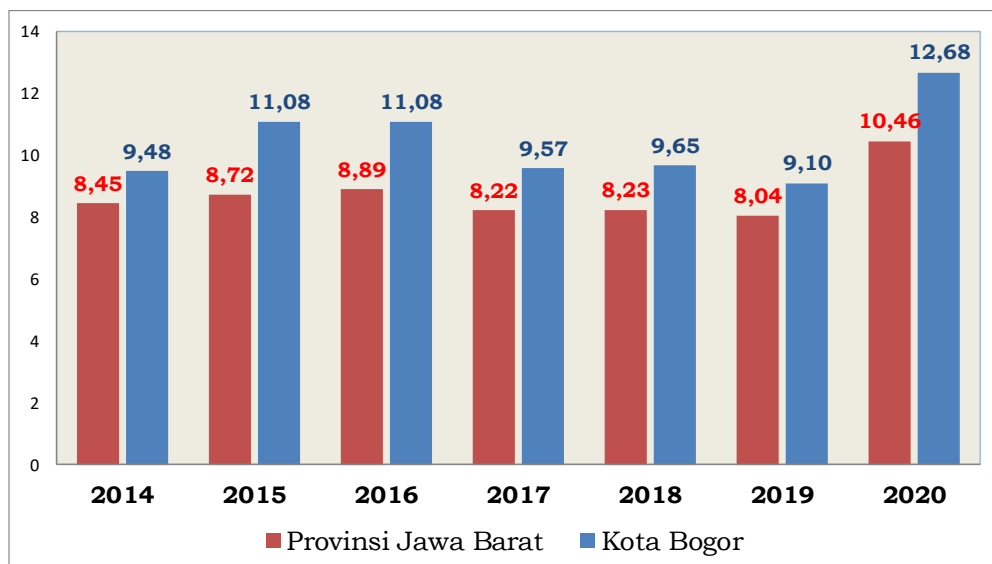
Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Bogor pada tahun 2014 mencapai 59,96% dari 764.972 jiwa jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2014. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Bogor pada tahun 2015 mencapai 57,74% dari 780.951 jiwa jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2015. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2017 mencapai 61,13% atau 495.825 jiwa dari jumlah penduduk angkatan kerja tahun 2017 sebanyak 811.118 jiwa jumlah penduduk usia kerja. Angka ini meningkat dari tingkat partisipasi tahun 2015. Tingkat partisipasi Angkatan kerja tahun 2018 mencapai 63,21% atau 471.775 jiwa dari jumlah penduduk Angkatan kerja tahun 2018 sebanyak 759.793 jiwa jumlah penduduk usia kerja. Angka ini meningkat dari tingkat partisipasi tahun 2017.

Tingkat partisipasi Angkatan kerja tahun 2019 mencapai 63,73% atau 486.867 jiwa dari jumlah penduduk Angkatan kerja tahun 2018 sebanyak 840.361 jiwa jumlah penduduk usia kerja. Angka ini meningkat dari tingkat partisipasi tahun 2018. Tingkat partisipasi Angkatan kerja tahun 2020 mencapai 67,77% atau 449.120 jiwa dari jumlah penduduk Angkatan kerja tahun 2019 sebanyak 845.777 jiwa jumlah penduduk usia kerja. Angka ini meningkat dari tingkat partisipasi tahun 2019.

Jumlah penyerapan tenaga kerja tahun 2018 mencapai 60 orang atau 11,60% dari target 517 tenaga kerja. Jumlah Penyerapan tenaga kerja tahun 2017 mencapai 2.781 atau mencapai 73% dari 3768 Pencari kerja, meningkat dibanding tahun 2016 mencapai 30,92% atau sebanyak 955 orang dari 3.088 pencari kerja dan tahun 2015 mencapai 32,23% atau sebanyak 2.033 orang dari 6.306 pencari kerja yang berhasil ditempatkan.

B. Tingkat Pengangguran Terbuka

Grafik 2.34
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor
Tahun 2014 – 2020 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat ; Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota (Persen), 2017-2020

Berdasarkan grafik di atas Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bogor sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 12,68% atau meningkat sebesar 3,52% dari tahun 2019, artinya dari 100 angkatan kerja di Kota Bogor masih terdapat 12 hingga 13 orang pengangguran. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 Presentase Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT) di Kota Bogor lebih besar jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil survey dan publikasi BPS dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, TPT Kota Bogor terbilang sangat tinggi dan melebihi TPT Nasional dan TPT Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2017, TPT Nasional adalah sebesar 5,5 sementara TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 8,22 persen sedangkan TPT Kota Bogor sebesar 9,57 yang berarti dari 100 angkatan kerja di Kota Bogor masih terdapat sekitar 9 hingga 10 orang pengangguran. Walaupun demikian, TPT Kota Bogor sudah dapat ditekan dari angka tahun sebelumnya pada tahun 2015 yaitu berkisar 11.08 menjadi 9,57.

Terjadinya wabah global Covid-19 di awal tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap lapangan kerja. Naiknya angka pengangguran diakibatkan adanya usaha-usaha yang tutup, serta usaha yang masih berjalan dan berganti usaha dengan mengurangi jumlah pegawainya. Kondisi tersebut digambarkan melalui hasil Survey Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Ekonomi Rumah Tangga di Kota Bogor menunjukkan bahwa 42% responden sempat menganggur dan di PHK saat terjadi pandemi. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Sempat menganggur namun sudah bekerja kembali di tempat lama sebesar 23,22%.
- b. Sempat menganggur namun sudah bekerja kembali di tempat baru sebesar 6,41%.
- c. Tidak memiliki pekerjaan (di PHK saat PSBB) sebesar 6,85%.
- d. Menganggur sejak sebelum PSBB sebesar 5,55%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dinilai perlu strategi percepatan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan penyerapan tenaga kerja untuk mengejar target capaian di tahun akhir RPJMD 2019-2024.

C. Rasio Pencari Kerja

Rasio pencari kerja tahun 2018 mencapai 80,71%, yaitu sebanyak 4558 pencari kerja terhadap 3679 lowongan yang tersedia. Rasio Pencari kerja tahun 2017 mencapai 63,23% yaitu sebanyak 3768 orang pencari kerja terhadap 5959 lowongan kerja yang tersedia. tahun 2015 Rasio jumlah pencari kerja terhadap lowongan kerja mencapai 92,95% yaitu sebanyak 6.306 pencari kerja dengan

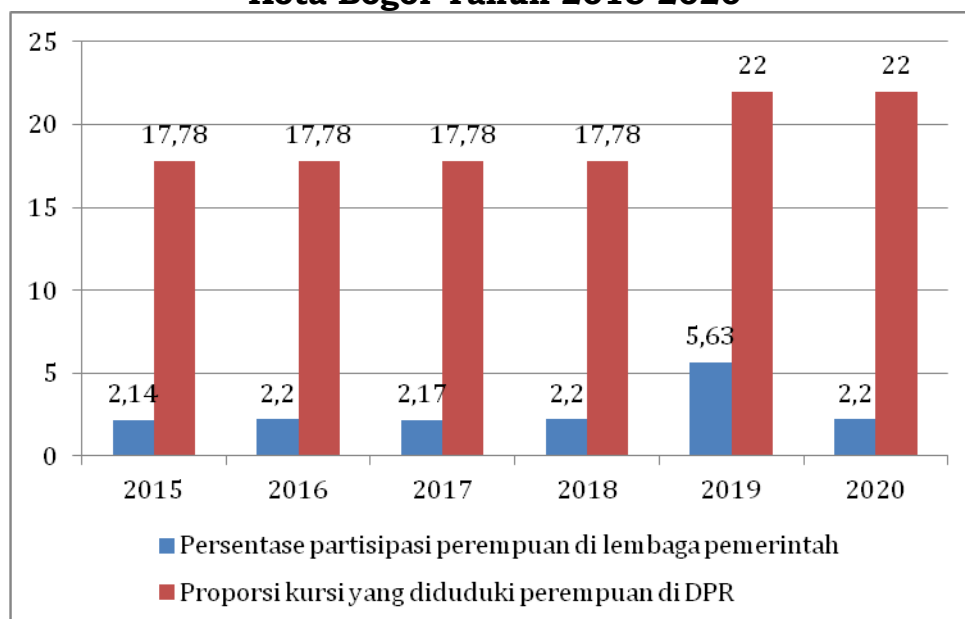
lowongan yang tersedia sebanyak 5.862. tahun 2014 mencapai sebesar 68,1% atau lebih besar dari target tahun 2014 sebesar 35%.

2.3.1.8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah

Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.35
Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah Dan DPRD Kota Bogor Tahun 2015-2020



Sumber: BPS dan Data diolah dalam SIPD

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan kemudian pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami peningkatan yang besar yaitu sebesar 3,34% dari tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan semakin bertambahnya partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah. Pada tahun 2020 tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami penurunan kembali menjadi 2,2. Pada proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami stagnansi atau tidak terdapat perubahan, namun pada tahun 2019 meningkat sebesar 4,22%, hal ini bersamaan dengan meningkatnya partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah. Pada tahun 2020 proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR mengalami stagnansi seperti tahun 2020.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Capaian pada Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan pada tahun 2016 sebanyak 52 Kasus yang dilaporkan baik terhadap Perempuan maupun Anak, dan yang terselesaikan sebanyak 42 kasus dan 13 kasus lainnya sedang dalam tahap proses penyelesaian baik di Pos Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun Pengadilan. Tahun 2017 P2TP2A telah menangani 117 kasus dengan 66 kasus terhadap perempuan dan 51 kasus kekerasan terhadap anak.

Selama tahun 2018, P2TP2A telah menangani sebanyak 109 kasus dengan terdiri dari Kasus Kekerasan terhadap Anak (KTA) sebanyak 56 kasus dan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) sebanyak 53 kasus dan semua kasus yang dapat ditangani dengan baik

Pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan yang masuk ke P2TP2A Kota Bogor sebanyak 109 kasus yang terdiri dari kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 56 kasus dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 53 kasus dan seluruhnya selesai ditangani dengan baik

C. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

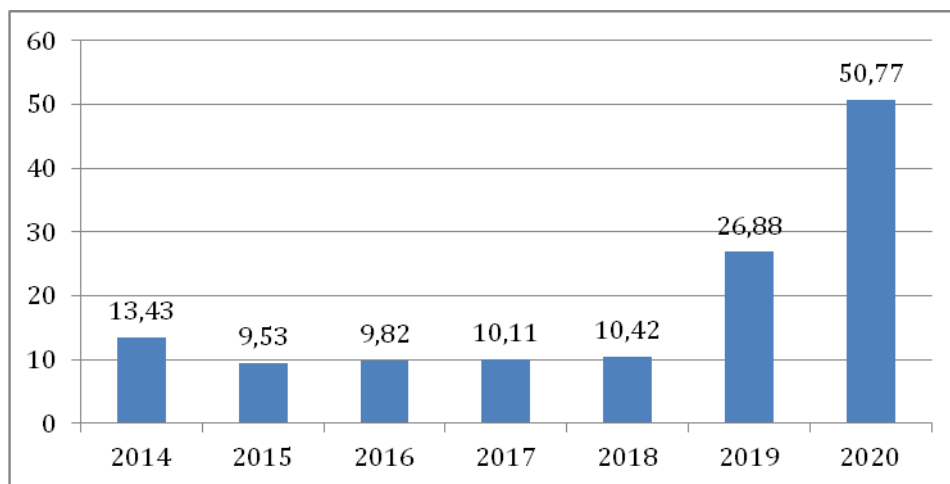
Pada tahun 2017 Kota Bogor meraih penghargaan Anugerah Kota Layak Anak untuk kategori Pratama Tingkat Nasional, pada tahun 2018 penghargaan Kota Tingkat Madya, dan pada tahun 2019

peringkat tidak berubah, tetap pada posisi Madya. Prestasi lainnya yang diperoleh yang terkait dengan program pengembangan kota layak anak diantaranya adalah meraih penghargaan inisiasi pelayanan ramah anak di puskesmas dari gubernur Provinsi Jawa Barat dan meraih penghargaan posyandu *award* dari gubernur Provinsi Jawa Barat.

D. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah jumlah angkatan kerja perempuan dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja perempuan dikalikan 100 persen.

Grafik 2.36
Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bogor Tahun 2014 – 2020



Sumber : BPS dan data diolah dari SIPD

Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Bogor sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dari tahun 2018 hingga tahun 2020 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16,46 dari tahun 2018 menjadi sebesar 26,88 %. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 23,89% dibandingkan dengan tahun 2019 atau menjadi sebesar 50,77%.

2.3.1.9 PANGAN

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Bogor. Ketersediaan pangan utama Kota Bogor selama kurun waktu 2015-2020 mengalami

fluktuasi, hal ini disebabkan salah satunya oleh peningkatan jumlah penduduk. Secara lebih lengkap mengenai indikator pangan Kota Bogor selama kurun waktu 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.33
Indikator Pangan Kota Bogor Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pangan utama	165,72	188,69	230,6	230,9	231,01	231,20
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	2318	2394,6	2482,7	2512,8	2592,9	2375
		91,1	102,3	105,3	89,4	110,3	68
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	94,62	86,37	87,1	91,53	93,96	90,81

Sumber; BPS dan Data diolah dalam SIPD

Persentase pangan utama Kota Bogor sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pangan utama Kota Bogor meningkat sebesar 0,19% dari tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2019 pangan utama Kota Bogor meningkat sebesar 0,11% dari tahun 2018. Selain itu ketersediaan energi dan protein perkapita mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 penurunan sebesar 42,3% dari tahun 2019. Dan capaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mengalami penurunan pada tahun 2016, namun meningkat kembali hingga tahun 2019 dan menurun kembali pada tahun 2020. Pada tahun 2020 capaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mengalami penurunan sebesar 3,15% dari tahun 2019.

2.3.1.10 PERTANAHAN

A. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

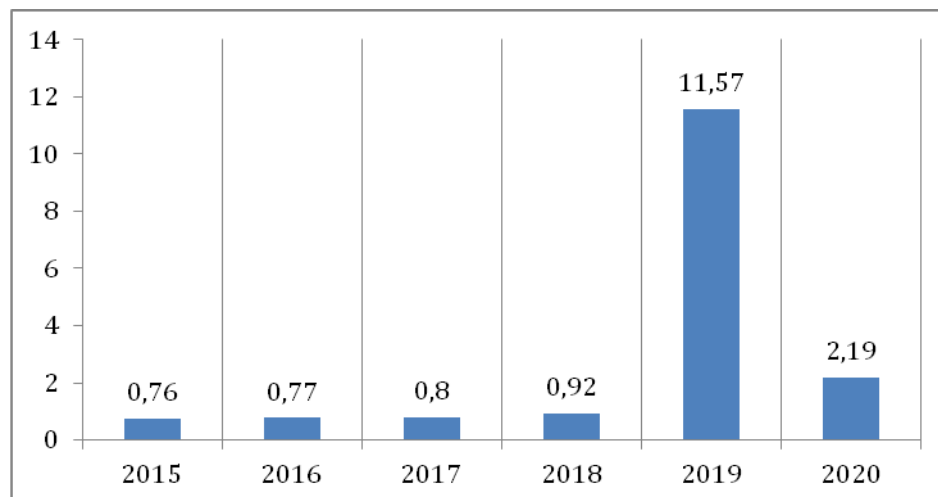
Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang.

Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Grafik 2.37
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Bogor
Tahun 2015-2020 (persen)



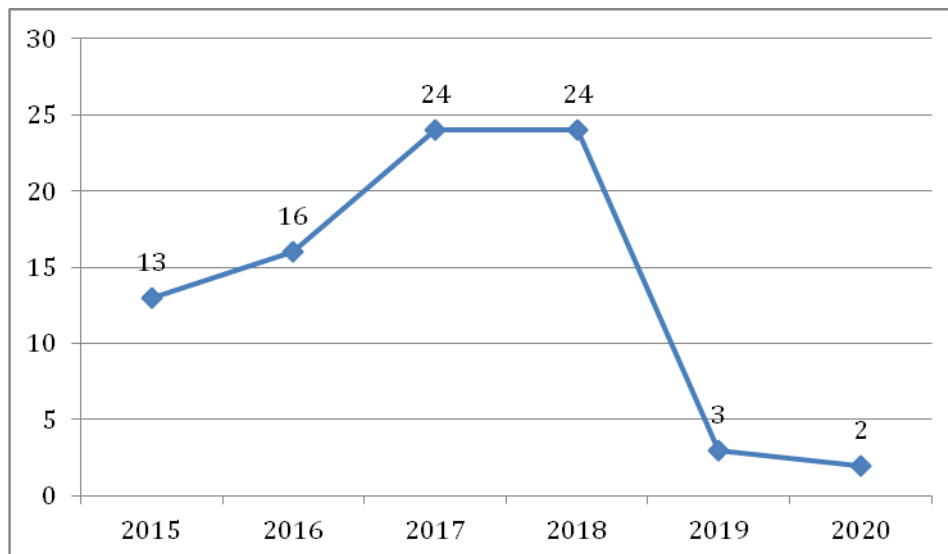
Sumber: Badan Pertanahan Nasional, diolah dalam SIPD

Luas lahan bersertifikat di Kota Bogor terhadap jumlah luas wilayah mengalami terus peningkatan yang pada tahun 2015 sebesar 0,76% menjadi 0,92% pada tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar 0,16 % dalam kurun waktu tahun 2015 – 2018. Namun dari Tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan sebesar 10,65% menjadi 11,57% dan Pada Tahun 2020 turun kembali sebesar 9,38% menjadi 2,19%. Luas Lahan bersertifikat tertinggi pada Tahun 2019 dan luas lahan bersertifikat terendah ada pada tahun 2015.

B. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Perkembangan penyelesaian kasus tanah negara di Kota Bogor mengalami peningkatan terhadap kasus yang terdaftar, lengkap terlihat dalam grafik berikut :

Grafik 2.38
Penyelesaian Kasus Tanah Di Kota Bogor Tahun 2015 – 2020



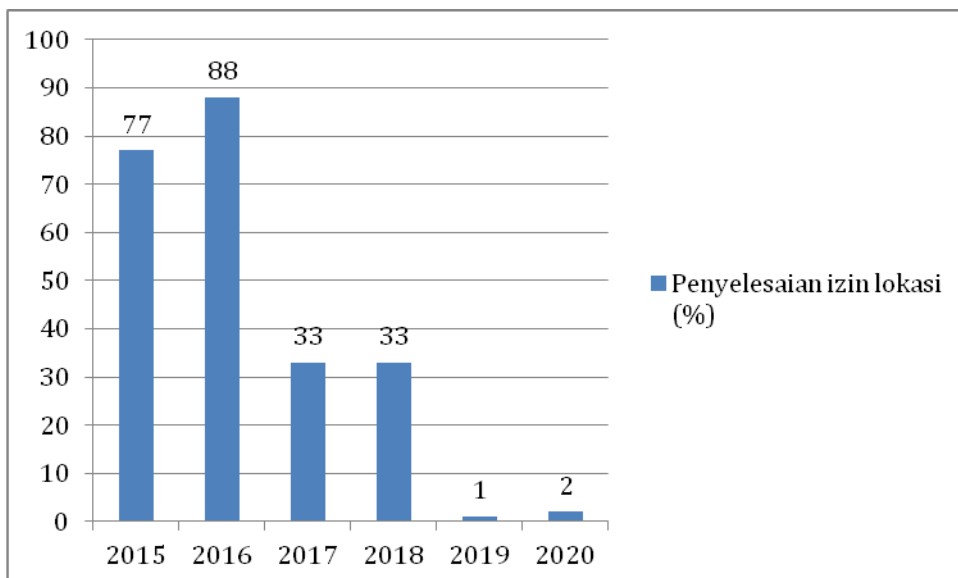
Sumber; BPKAD Kota Bogor ; diolah dalam SIPD

Penyelesaian kasus tanah di Kota Bogor mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2017. Kemudian mengalami stagnansi pada tahun 2018, kembali menurun hingga tahun 2020. Penyelesaian kasus tanah tahun 2019 di Kota Bogor terdapat 3 kasus atau menurun sebanyak 21 kasus dari tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 menjadi 2 kasus atau menurun 1 kasus dari tahun 2019.

C. Penyelesaian Izin Lokasi

Kondisi daerah Kota Bogor terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari penyelesaian permohonan izin lokasi. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengetahui kemudahan investasi sebagai daya tarik investasi dalam mengundang investor. Semakin banyak penyelesaian permohonan izin lokasi menggambarkan semakin mudah dan menarik berinvestasi di suatu daerah. Berikut disajikan data persentase penyelesaian izin lokasi/permohonan di Kota Bogor selama kurun waktu tahun 2015-2020.

Grafik 2.39
Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Bogor Tahun 2015-2020 (persen)



Sumber: BPMPTSP dan di olah dari SIPD

Penyelesaian izin lokasi di Kota Bogor meningkat pada tahun 2016 yaitu terdapat 88 penyelesaian izin lokasi. Namun pada tahun 2018 penyelesaian izin lokasi di Kota Bogor mengalami penurunan yaitu 55 izin lokasi, pada tahun 2019 penyelesaian izin lokasi juga mengalami penurunan sebanyak 32 izin lokasi jika dibandingkan tahun 2018 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 1 izin lokasi dibandingkan tahun 2019.

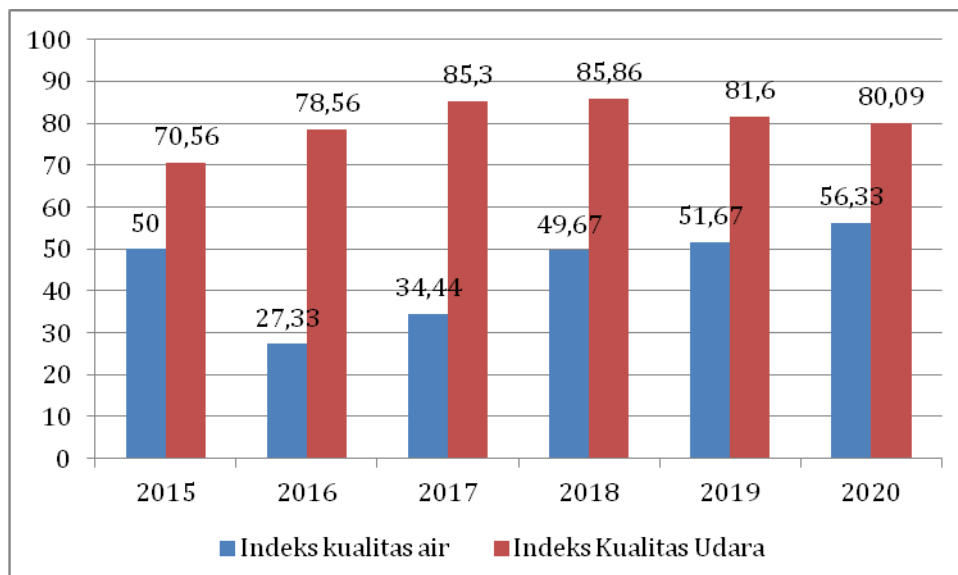
2.3.1.11 LINGKUNGAN HIDUP

A. HASIL PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS AIR

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kota Bogor dengan pemulihan kualitas lingkungan yang terus dilakukan tidak saja oleh Pemerintah Kota Bogor namun dilakukan pula oleh semua elemen masyarakat. Indeks Kualitas Udara (IKU) dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara di Kota Bogor kepada masyarakat. Perkembangan Indeks Kualitas Air dan Udara di Kota Bogor seperti terlihat dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.40

Perkembangan Indeks Kualitas Air dan Udara Di Kota Bogor Tahun 2015 – 2020



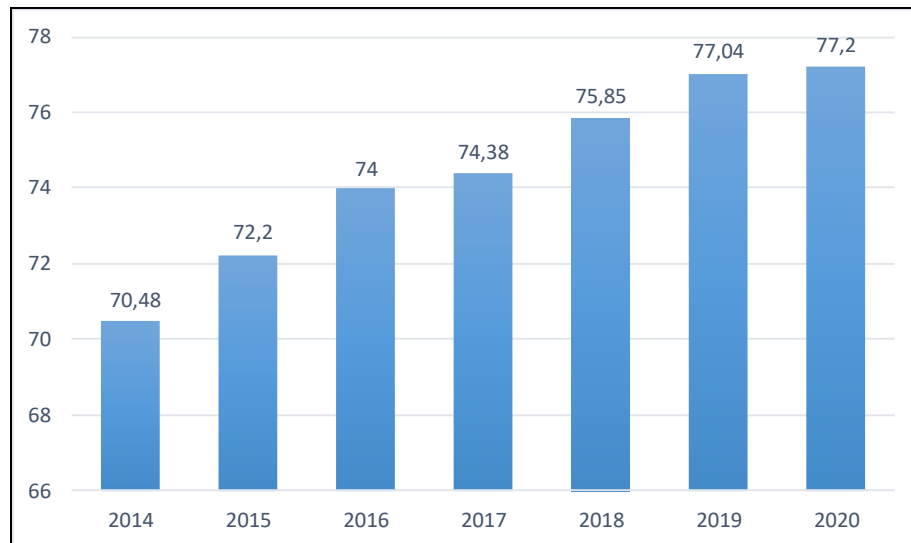
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor ; diolah dalam SIPD

Menurut Badan Pusat Statistik Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Indeks kualitas udara di Kota Bogor pada tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan sebesar 5,77. Indeks kualitas air Kota Bogor sejak tahun 2017 mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 indeks kualitas air Kota Bogor mencapai 51,67 atau meningkat 2,0 dari tahun 2018, pada tahun 2020 indeks kualitas air Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 4,66.

B. PERSENTASE JUMLAH SAMPAH YANG TERTANGANI

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Bogor adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

Grafik 2.41
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Bogor Tahun 2014-2020



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor ; diolah dalam SIPD

Persentase jumlah sampah yang ditangani setiap tahunnya relatif meningkat, hal ini dikarenakan tiap tahunnya selalu ada penambahan armada pengangkut sampah. Pada tahun 2014 persentase jumlah sampah yang ditangani 70,48 persen, pada tahun 2020 nilainya meningkat menjadi 77,2 persen.

2.3.1.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK dan Akte Kelahiran. Selama kurun waktu dari tahun 2014–2020 rata-rata rasio penduduk ber KTP mengalami peningkatan. Peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan. Namun untuk rata-rata rasio bayi ber akte kelahiran tahun 2020 mengalami penurunan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kepemilikan administrasi kependudukan selama kurun waktu tahun 2014-2020.

Tabel 2.34
Rasio Penduduk ber-KTP dan Akte Kelahiran di Kota Bogor Tahun 2014-2020

No.	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	94,53	91	95	93,08	94,30	96	98
2	Rasio bayi ber-akte kelahiran	91,90	25	93,01	93,84	94,70	98	95

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; diolah dalam SIPD

Pada tahun 2015 terjadi penurunan rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk dikarenakan adanya verifikasi ulang NIK se-Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri. Verifikasi sebagaimana dimaksud berkaitan dengan adanya NIK ganda dan NIK penduduk yang sudah meninggal dunia. Data rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk tahun 2014 sampai dengan 2020 didasarkan pada data konsolidasi bersih Kementerian Dalam negeri yang merupakan awal *online* SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 2 persen dari tahun 2019.

Data rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2015 juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya verifikasi ulang NIK se-Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri yang berdampak pada proses *entry* data akte kelahiran dan proses konsolidasi dari Kementerian Dalam Negeri belum sepenuhnya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2015. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019 rasio bayi berakte kelahiran mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 3,3 dari tahun 2018. Namun di Tahun 2020 rasio bayi berakte mengalami penurunan sebesar 3 dari tahun 2019.

2.3.1.13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat di Kota Bogor bertujuan untuk memberdayakan kelurahan dalam melakukan tindakan bersama sebagai satu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, yakni masyarakat kelurahan atau pihak lain. Tindakan bersama ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam proses pembangunan, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya di kelurahan.

Perkembangan partisipasi masyarakat di Kota Bogor dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.35
Perkembangan Partisipasi Masyarakat di Kota Bogor
Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata rata jumlah kelompok binaan PKK	100	100	100	100	104,95	100
2	Persentase LSM Aktif	32	26	30	26	28	28
3	PKK aktif	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100
5	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,72
6	Persentase partisipasi masyarakat	85	90	90	95	90	85

Sumber: Data diolah dari SIPD

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kota Bogor pada tahun 2015 hingga tahun 2020 mengalami stagnansi yaitu dengan rata-rata jumlah 100 kelompok binaan PKK. Namun pada tahun 2019 rata-rata jumlah binaan meningkat menjadi 104,95 kelompok binaan dan di tahun 2020 rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mengalami penurunan menjadi 100. PKK aktif di Kota Bogor pada tahun 2015 hingga tahun 2020 terjadi stagnasi yaitu sebesar 100 kelompok. Persentase posyandu aktif pun mengalami stagnansi sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 yaitu sebesar 100%.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, dimana pada tahun 2015 baru mencapai 0,72 % dan cenderung meningkat hingga tahun 2019 sebesar 0,76% namun sejalan dengan pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat dan perekonomian masyarakat persentase keswadayaan tersebut menurun menjadi 0,72%. Pola pencapaian tersebut terjadi pula pada partisipasi masyarakat ditahun 2015 mencapai 85%, setiap tahunnya cenderung meningkat namun di tahun 2020 kembali menjadi 85%.

2.3.1.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Pengendalian penduduk merupakan suatu pola perkembangan penduduk kearah pertumbuhan penduduk yang diinginkan yang ditempuh melalui kebijakan program Keluarga Berencana (KB).

Tujuan keluarga berencana (KB) adalah untuk menanamkan konsep Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) pada seluruh keluarga. NKKBS adalah salah satu slogan pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar lebih seimbang. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana rata rata jumlah anak per keluarga periode tahun 2015 - 2020 di Kota Bogor adalah 2 orang anak, sedangkan tingkat laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 1,06 artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya.

Perkembangan kesertaan masyarakat dalam program keluarga berencana dapat di lihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.36
Perkembangan Kesertaan Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana Tahun 2014 - 2020

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ratio akseptor KB	75,97	76,82	76,12	76,94	77,41	77,01	77,42
2	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	75,97	76,82	76,12	76,94	77,41	77,01	77,42

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ; Data diolah dari SIPD

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa ratio akseptor KB Selama kurun waktu 6 tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2020 menunjukkan data yang fluktuatif. Angka ratio akseptor KB tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan terendah terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 75,97 akan tetapi kisaran tahun 2014–2015 ratio akseptor KB mengalami peningkatan kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 dan kembali meningkat pada tahun 2017-2018 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2019 menjadi 77,01 dan pada tahun 2019–2020 mengalami peningkatan.

2.3.1.15 PERHUBUNGAN

A. Jumlah Penumpang Angkutan Umum

Jumlah penumpang umum pada tahun 2014-2020 menunjukkan data yang fluktuatif, mengalami penurunan pada tahun 2019 sebagaimana tergambar dalam tabel ini:

Tabel 2.37
Perkembangan Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kota Bogor Tahun 2014 – 2020

Uraian	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penumpang Angkutan Umum	37.832.256	17.962.560	19.600.351	25.149.852	25.149.852	3.771.600	16.662.600

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

Perkembangan jumlah penumpang angkutan umum di Kota Bogor pada tahun 2014 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah penumpang angkutan umum menurun sebanyak 3.771.600 penumpang. Kemudian pada tahun 2020 jumlah penumpang angkutan umum kembali meningkat sebanyak 12.854.400, sehingga pada tahun 2020 terdapat 16.662.600 jumlah penumpang angkutan umum.

B. Rasio Izin Trayek

Izin trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang atau pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. Rasio izin trayek adalah perbandingan jumlah izin trayek yang dikeluarkan selama satu tahun terhadap jumlah penduduk. Seluruh angkutan umum yang ada di Kota Bogor umum wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir keberadaan trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Tabel 2.37 berikut memperlihatkan Perkembangan Rasio Izin Trayek Kota Bogor.

Tabel 2.38
Perkembangan Rasio Izin Trayek Kota Bogor
Tahun 2014 – 2020

Uraian	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Izin Trayek Angkutan Kota	886	607	388	193	418	450	352
Jumlah Penduduk Kota Bogor	1.030.720	1.047.922	1.064.687	1.081.009	1.096.828	1.041.901	1.064.698
Rasio Izin Trayek	0,000860	0,000579	0,000364	0,000179	0,000381	0,000432	0,000331

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

Perkembangan rasio izin trayek di Kota Bogor pada tahun 2014 sebesar 0,000860, kemudian tahun 2015 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 rasio izin trayek kembali meningkat sebesar 0,000381 dibanding dengan tahun 2017 sebesar 0,000179, namun pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,000051 dari tahun 2018 dan kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2020 sebesar 0,000331. Rasio izin trayek tertinggi pada tahun 2015 sebesar 0,000860.

C. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji Kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Uji Kir ini diharapkan dapat menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum. Selain itu, juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan yang diakibatkan asap kendaraan.

Tabel 2.39
Jumlah Angkutan Umum Wajib Uji di Kota Bogor Tahun 2014-2020

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mobil Penumpang Umum	5.292	5.292	5.292	5.292	5.291	6.239	5.177
2	Mobil Bus	311	348	377	421	447	496	323
3	Mobil Barang	6.787	7.617	8.204	8.808	9.377	11.552	8.616
4	Kereta Gandengan	46	46	46	46	46	0	3

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Kereta Tempelan	3	3	3	4	4	0	2
6	Mobil Khusus	75	75	75	75	75	2	13
JUMLAH		12.514	13.381	13.997	14.646	15.240	18.262	14.135

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bogor; Data diolah dari SIPD

Jenis angkutan umum wajib uji di Kota Bogor terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan mobil khusus. Jumlah angkutan umum wajib uji di Kota Bogor pada tahun 2014 - 2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan secara keseluruhan yaitu sebesar 14.135. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 18.262 dari tahun 2018 sebesar 15.240.

Tabel 2.40
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Bogor Tahun 2014-2020

Uraian	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	5.625	5.716	5.850	5.601	5.640	5.598	5.542

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bogor

Berdasarkan dari grafik di atas data jumlah angkutan umum yang telah melakukan Uji Kir pada tahun 2014 - 2020 menunjukkan data yang fluktuatif. Pada tahun 2017 - 2020 terjadinya penurunan jumlah angkutan umum yang telah melakukan Uji Kir. Akan tetapi pada tahun 2014 hingga 2016 jumlah angkutan umum yang melakukan Uji Kir kembali meningkat. Hal ini disebabkan karena meningkatkannya kesadaran para pemilik kendaraan umum terhadap kendaraannya yang berimbas terhadap kenyamanan penumpang angkutan umum.

D. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum.

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum adalah jumlah orang/barang yang terangkut dalam periode 1 (satu) tahun. Jenis angkutan umum yang digunakan oleh penduduk ke ibukota, kecamatan dan Kabupaten/Kota terdekat meliputi angkutan umum yang tersedia untuk melayani trayek dari desa ke ibukota kecamatan, kabupaten/kota atau kabupaten/kota lain terdekat.

Indikator ini mengukur jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun. Semakin tinggi jumlah orang yang diangkut, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menyediakan fasilitas angkutan umum, dan semakin mampu daerah tersebut menyelenggarakan otonomi. Analisis terhadap indikator ini belum dapat dilaksanakan karena belum terdokumentasinya data terkait jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kota Bogor.

Tabel 2.41
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kota Bogor Tahun 2014-2020

Uraian	Tahun						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Orang/barang yang terangkut angkutan umum	4.946.222	4.973.950	3.749.210	5.328.604	101.205	287.276	96.010

Sumber : Dinas Pehubungan Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

Berdasarkan matriks di atas dapat diketahui bahwa, jumlah arus penumpang angkutan di setiap tahunnya selama 4 periode terakhir mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami fluktuasi dan penurunan jumlah penumpang. Berawal dari 4.946.222 pada tahun 2014 menjadi 5.328.604 di tahun 2017. Kemudian tahun 2018 mengalami penurunan drastis menjadi 101.205 pada tahun 2019 mengalami peningkatan kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali. Jumlah arus penumpang tertinggi berada pada tahun 2015 sebesar 4.973.950 sedangkan terendah berada pada tahun 2020 yaitu 96.010 penumpang. Penurunan ini diakibatkan oleh semakin rendah jumlah orang yang diangkut, semakin rendah juga kemampuan suatu daerah menyediakan fasilitas angkutan umum.

E. Terminal

Terminal yang melayani Kota Bogor terdiri dari Terminal Regional Baranangsiang dan Terminal Bubulak. Terminal Baranangsiang merupakan terminal tipe A yaitu melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan pedesaan. Dalam masalah integritas pelayanan dengan pihak Kabupaten Bogor

tampaknya perlu melakukan sinergitas, mengingat terminal yang beroperasi antara Terminal Laladon yang merupakan terminal milik kabupaten dan Bubulak milik Kota Bogor pelayanannya relatif dekat kurang lebih 500 meter. Sehingga efektifitasnya kurang, biaya operasionalnya menjadi mahal dan tidak berkembang secara maksimal.

F. Transportasi Kereta Api

Saat ini angkutan kereta api dilayani oleh 2 (dua) Stasiun Kereta Api yang terdapat di Kecamatan Kota Bogor Tengah dan Kota Bogor Selatan. Stasiun Kota Bogor Tengah melayani pergerakan orang atau barang ke arah Kota Jakarta dan Sukabumi paling sedikit 15 ritasi perhari. Umumnya pola pergerakan membentuk pola komuter. Pengguna jasa angkutan kereta terdiri dari pelajar, pekerja, pedagang yang melakukan aktivitas di Jakarta atau Sukabumi. Sedangkan Stasiun Kota Bogor Selatan hanya melayani rute angkutan Jakarta – Sukabumi dengan paling sedikit mencapai 3 (tiga) ritasi perharinya.

Transportasi kereta api merupakan angkutan yang memiliki intensitas yang cukup tinggi berkaitan dengan pergerakan penduduk Kota Bogor yang bekerja di Jakarta maupun Sukabumi. Sehingga perlu adanya pengembangan peningkatan sarana dan prasarana bagi peningkatan pelayanannya, mengingat laju pertumbuhan pengguna kereta api adalah 3,02% per tahun.

Berdasarkan data Kota Bogor Dalam Angka 2016 diketahui jumlah penumpang kereta api Stasiun Bogor pada tahun 2015 adalah sebanyak 16.541.315 orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 15.253.945 orang. Dengan rata rata penumpang perhari nya 45.284 orang di tahun 2015 dan 41.775 orang di tahun 2014.

2.3.1.16. KOMUNIKASI DAN INFORMASI.

Sumber daya manusia merupakan sektor sentral dan penting dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu pemerintahan, karena dengan adanya keahlian para pegawai dan kualitas sumber daya dapat menggerakkan suatu pemerintahan dengan baik dan benar. Di era globalisasi seperti ini peranan teknologi informasi dan komunikasi juga sangat penting dan berpengaruh salah satunya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Dengan berkembang pesatnya dunia teknologi informasi dan komunikasi

sangat membantu dan memudahkan dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pemerintahan.

Adanya teknologi informasi dan komunikasi ini juga akan meminimalisir atau bahkan menghilangkan kesalahan di dalam manajemen sumber daya manusia yang sebelumnya dilakukan tanpa dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Sumberdaya manusia di bidang TIK di Kota Bogor tersedia paling sedikit 2 orang di setiap perangkat daerah mulai tahun 2015.

Setiap Perangkat Daerah (PD) di dorong untuk menyediakan data dan informasi melalui media elektronik di awal 2015 hanya 90,7 % PD sementara di tahun 2019 mencapai seluruh perangkat daerah (100%). Lebih lanjut PD telah membangun berbagai Sistem Informasi Manajemen yang telah terintegrasi lintas PD, dimana pada tahun 2015 hanya 3,8% namun terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 20,59 %, sehingga hal ini perlu terus di tingkatkan.

Salah satu upaya pengembangan urusan komunikasi dan informasi adalah penyediaan ruang publik yang memiliki infrastruktur jaringan informasi publik, dimana setiap tahun selalu bertambah. Rincian capaian urusan komunikasi dan informasi per tahun di tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Capaian urusan Komunikasi dan informasi tahun 2015-2019

Indikator Kerja	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah ruang publik yang disediakan, infastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)	10	5	7	10	5
Persentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD (%)	3,88	12,62	15,53	18,45	20,59
Persentase PD yang menyediakan data dan informasi mlalui media elektronik	90,7	90,9	87,8	90,2	100
Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik (persandian)	100	100	100	100	100

Sumber : Diskominfo Kota Bogor

2.3.1.17. KOPERASI.

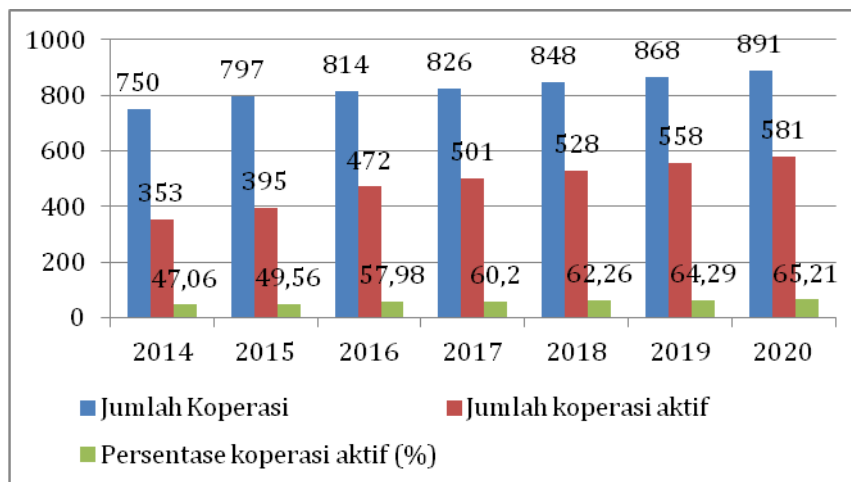
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

A. Persentase Koperasi Aktif.

Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin besar jumlah

persentase koperasi aktif maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

Grafik 2.42
Perkembangan Koperasi di Kota Bogor Tahun 2014-2020



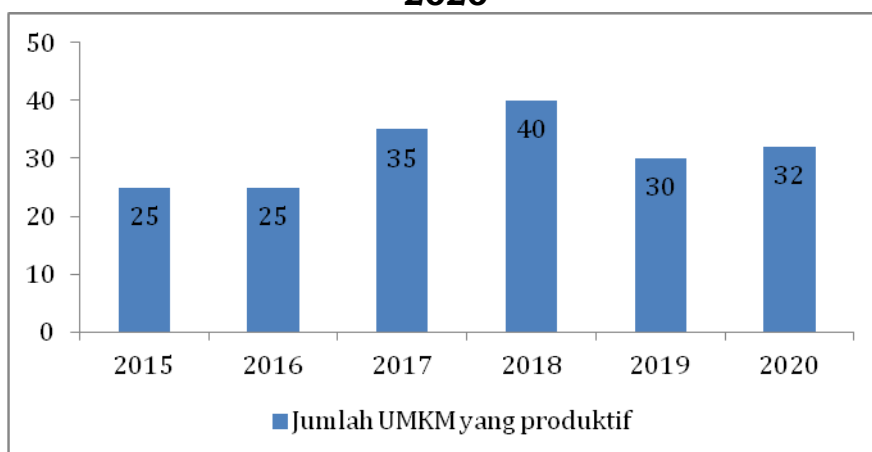
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM 2018 dan di olah dari SIPD

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya perkembangan/pertumbuhan jumlah koperasi dan koperasi aktif. Hal ini disebabkan jumlah koperasi dan koperasi aktif selama 7 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang cukup baik. Namun pada tahun 2019 persentase koperasi aktif menurun 1,76% kemudian pada tahun 2020 persentase koperasi aktif meningkat kembali sebesar 0,92%. Jumlah koperasi aktif selalu meningkat setiap tahun selama 7 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2020.

B. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Berikut Jumlah UKM yang produktif di Kota Bogor dapat dilihat dalam tabel berikut.

Grafik 2.43
Persentase UKM non BPR/LKM Aktif di Kota Bogor Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas koperasi dan UKM dan di olah dari SIPD

Berdasarkan data tersebut menunjukkan, jumlah UKM tertinggi yang produktif selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 yakni mencapai 40 jumlah UKM yang produktif, akan tetapi pada tahun 2019 jumlah UKM yang produktif di Kota Bogor mengalami penurunan menjadi 30 UKM atau menurun sebanyak 10 UMKM dari tahun 2018. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 32 UKM atau naik 2 UMKM dari tahun 2019.

2.3.1.18 PENANAMAN MODAL

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Capaian nilai realisasi investasi di Kota Bogor dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.43
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2014-2020 (Rupiah)

No	Tahun	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
1	2014	2.805.642.264.788,-
2	2015	3.104.313.574.444,-
3	2016	2.315.438.675.457,-
4	2017	2.947.851.998.320,-
5	2018	3.103.415.375.522,83,-

No	Tahun	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
6	2019	2.641.381.312.523,23,-
7	2020	1.603.215.590.165,2,-

Sumber: DPMPTSP; Data diolah dari SIPD

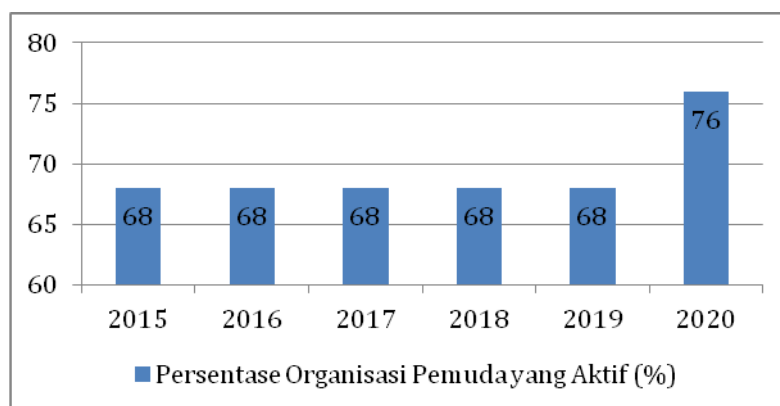
Tahun 2018 realisasi Investasi Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 0,05% dibanding Tahun 2017. Tahun 2019 realisasi investasi Kota Bogor mengalami penurunan dengan nilai Rp 2.641.381.312.523,23 dari tahun 2018 dan di tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai 1.603.215.590.165,2. Realisasi investasi Kota Bogor tahun 2017 mengalami peningkatan 27% dari Tahun 2016, nilai investasi Kota Bogor terbesar dalam kurun waktu 2014-2020 adalah tahun 2015 yang mencapai nilai Rp 3.104.313.574.444,-.

2.3.1.19 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Urusan kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang berprestasi yaitu dengan memberikan pembinaan dan insentif dalam meningkatkan prestasi kualitas pemuda dalam beragam bidang.

Data Dinas Pemuda dan olah raga Kota Bogor persentase organisasi pemuda yang aktif di Kota Bogor mencapai 68% selama rentang tahun 2015 – 2020. Sedangkan jumlah cabang olah raga yang di bina sebanyak 42 cabang dengan cakupan pelatih yang bersertifikasi dan hasil pembinaan seperti dalam tabel berikut

Grafik 2.44
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Bogor Tahun 2015-2020 (persen)



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bogor 2018 ; Data diolah dari SIPD

2.3.1.20 STATISTIK

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86

Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku “Kota Bogor Dalam Angka” dan Buku “PDRB Kota Bogor”.

Kedua dokumen tersebut ada di Kota Bogor, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan dan penyusunan program kegiatan.

Tabel 2.44
Ketersediaan Dokumen Perencanaan di Kota Bogor Tahun 2014-2020

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Bogor Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	PDRB Kota Bogor	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Data diolah dari SIPD

Ketersediaan dokumen perencanaan Kota Bogor dengan indikator Kota Bogor dalam angka dan PDRB Kota Bogor sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 menunjukkan adanya ketersediaan dokumen tersebut yang akan digunakan sebagai rujukan dalam merancang dan penyusunan program kegiatan.

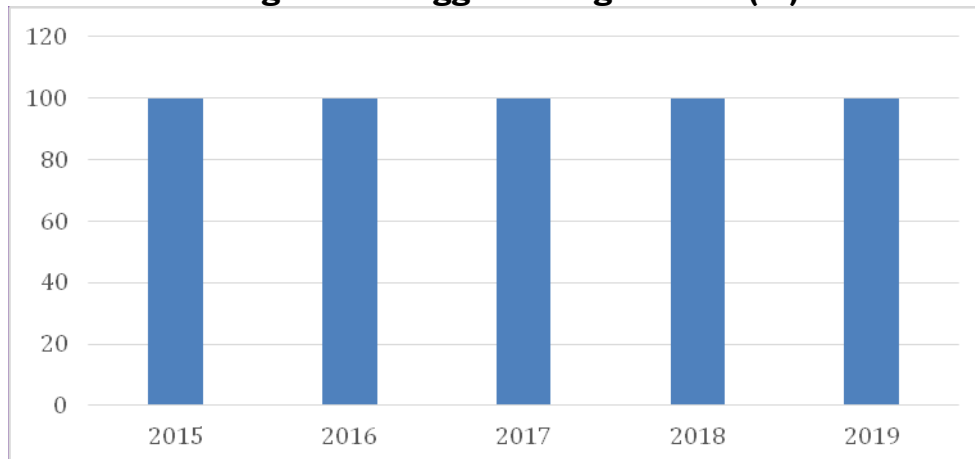
2.3.1.21 PERSANDIAN

Persandian terkait dengan:

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kota Bogor.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kota Bogor.

Urusan persandian, dapat di lihat dari seberapa besar prosentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik

Grafik 2.45
Pengamanan Informasi Daerah
Yang Terselenggara dengan Baik (%)



Sumber : Diskominfo, Data Diolah

2.3.1.22 KEBUDAYAAN

Kebudayaan merupakan hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Lingkupnya mencakup banyak aspek kehidupan seperti hukum, keyakinan, seni, adat atau kebiasaan, moral, dan juga keahlian. Kehadirannya mampu mempengaruhi pengetahuan seseorang, gagasan, dan ide meskipun budaya berwujud abstrak. Urusan kebudayaan ini bertujuan untuk menjadikan warisan budaya sebagai aset kota. Sasaran urusan tersebut adalah

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya;
2. Terpeliharanya kelestarian warisan budaya;
3. Tersedianya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur warisan budaya.

Indikator kebudayaan di Kota Bogor dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 2.45
Capaian Indikator Kebudayaan di Kota Bogor Tahun 2014-2020

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	53	75	63	32	59	24
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	24	0	0	0	0	0	7

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 2021 dan di olah dari SIPD

Penyelenggaraan festival seni dan budaya perkembangannya fluktuatif. Pada tahun 2015, 2016, dan 2019 penyelenggaraan kegiatan tersebut mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Meningkatnya kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya menggambarkan semakin besar sektor pariwisata berkembang di Kota Bogor. Sedangkan benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan mengalami stagnasi atau

tidak terdapat perubahan yaitu sebesar 14% sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Namun mengalami kenaikan situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan Kota Bogor di tahun 2020.

2.3.1.23 PERPUSTAKAAN

Perpustakaan adalah tempat untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan sekaligus sebagai sarana edukatif untuk membantu memperlancar cakrawala dalam kegiatan belajar mengajar yang bisa meningkatkan mutu kehidupan masyarakat sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Perkembangan perpustakaan di Kota Bogor dapat di lihat dari tabel berikut.

Tabel 2.46
Perkembangan Perpustakaan di Kota Bogor Tahun 2014-2020

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	37.000	49.039	45.011	74.623	25.421	28.790	9.601
2	koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	44.320	47.620	69.026	71.842	74.870	75.705	77.684
3	Rasio perpustakaan per 1000 penduduk	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
4	Jumlah rata rata pengunjung perpustakaan/tahun	37.000	49.039	45.011	45.489	25.421	28.790	800

Sumber ; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor dan diolah oleh SIPD

Jumlah pengunjung perpustakaan selama kurun waktu tahun 2014 – 2020 fluktuatif, pada tahun 2017 terjadi jumlah pengunjung tertinggi yaitu 74.623 pengunjung, dan jumlah pengunjung terendah terjadi di tahun 2018 yaitu 25.421. Pada tahun 2019 terjadi kembali peningkatan pengunjung perpustakaan sebanyak 3.369 pengunjung dari tahun 2018. Pada tahun 2020 pengunjung perpustakaan mengalami penurunan sebanyak 19.189.

Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 meningkat sebanyak 1.979. Sedangkan rasio perpustakaan persatuan penduduk selama 6 tahun yaitu 11 perpustakaan per 1000 penduduk. Yang dikelola oleh pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat sebanyak 4 orang. Selain itu, jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun nya pada tahun 2019 menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019

jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun sebesar 28.790 pengunjung dan mengalami penurunan kembali di tahun 2020 sebanyak 27.990 dari tahun 2019

2.3.2.24 KEARSIPAN

Tujuan dari kearsipan adalah agar arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman, agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan serta untuk menghindari pemborosan waktu dalam mencari arsip yang dibutuhkan disamping untuk menghemat tempat penyimpanan, menjaga kerahasiaan dan kelestarian arsip.

Menurut fungsi dan kegunaanya, arsip dapat dibedakan menjadi:

1. Arsip dinamis, yakni arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran;
2. Arsip dinamis aktif: Arsip ini berada dan berfungsi di unit pengolah yang pada umumnya memiliki nilai simpan satu sampai dengan dua tahun atau sesuai dengan jadwal retensi yang berlaku;
3. Arsip dinamis inaktif: Arsip ini berada pada fase ketiga yang oleh unit pengolah dirasakan atau dinilai sudah kurang atau jarang/tidak diperlukan lagi dalam menunjang proses administrasi sehari-hari, walaupun mungkin masih diperlukan tetapi frekuensinya sangat rendah;
4. Arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyelenggaraan administrasi perkantoran, atau sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari.

Tabel 2.47
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku dan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Bogor Tahun 2015-2020

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	13	28	48	68	70	13
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	100	106	106	117	109	75

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor 2018 dan diolah oleh SIPD

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi peningkatan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku yang pada tahun 2015 hanya 13 % perangkat daerah menjadi 70 % perangkat daerah di tahun 2019 namun pada tahun 2020 perangkat daerah mengalami penurunan menjadi 13% ,akan



tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan dalam kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yaitu menjadi 75 pada tahun 2020.

2.3.2 LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.2.1 Perikanan

Sesuai dengan kondisi geografis dan topografinya Kota Bogor dalam melaksanakan urusan pilihan *kelautan dan perikanan* hanya melaksanakan program terkait perikanan saja. Sektor Perikanan bukan merupakan sektor unggulan, namun tetap memiliki peran dalam struktur perekonomian Kota Bogor, sehingga Kota Bogor hanya melaksanakan program terkait perikanan, hal ini terlihat dari peran sektor perikanan

2.3.2.2 PARIWISATA

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor pada tahun 2015 sebanyak 4.786.023 orang wisatawan terdiri dari wisatawan nusantara 4.563.516 dan wisatawan mancanegara 222.507. Kota Bogor yang dalam sejarahnya pernah menjadi kota penting di mata dunia memiliki banyak sekali peninggalan sejarah dan kebudayaan, namun demikian berbagai potensi ini belum dikembangkan secara maksimal sebagai destinasi wisata di Kota Bogor. Data sekunder yang tersedia, hanya menyebutkan 23 Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kota Bogor termasuk Kebun Raya Bogor yang merupakan ikon legendaris.

Sebagai kota yang memiliki identitas serta karakter yang kuat, Kota Bogor seyogyanya dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk mengembangkan pariwisata. Pengembangan destinasi wisata baru tidak harus dilakukan dengan membuat wahana wisata baru, melainkan mengembangkan potensi yang telah dimiliki agar memiliki nilai tambah. Hal ini sekaligus dapat disinambungkan dengan upaya pelestarian dan pengembalian ruh dari peninggalan sejarah.

Tabel 2.48
Daftar Obyek Wisata Alamat dan Daya Tarik Wisata Kota Bogor

Obyek Wisata	Alamat	Jenis Obyek	Luas Wilayah
Kebun Raya Bogor	Jl. Ir. H. Juanda	Alam, Ilmiah, dan Budaya	87 Ha
Istana Kepresidenan Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No. 1	Sejarah dan Budaya	28,8 Ha
Prasasti Batu Tulis	Jl. Batutulis No. 54	Sejarah	21,34 m2
Plaza Kapten Muslihat	Jl. Kapten Muslihat No. 51	Taman Rekreasi	17.690 m2

Obyek Wisata	Alamat	Jenis Obyek	Luas Wilayah
Museum Zoologi Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No. 9	Ilmiah dan Budaya	1500 m ²
Museum Etnobotani (Munasain)	Jl. Ir. H. Juanda No, 22-24	Ilmiah	1600 m ²
Museum Perjuangan Bogor	Jl. Merdeka No 56	Sejarah dan Budaya	650 m ²
Rancamaya Country Golf	Jl. Rancamaya Utama Ciawi Bogor	Taman Rekreasi	400 Ha
Museum dan Monumen PETA	Jl. Jend Sudirman No. 35	Sejarah dan Budaya	9.400 m ²
Balai Penelitian Rempah dan Obat	Jl. Tentara Pelajar No. 3	Ilmiah	1 Ha
Museum Tanah	Jl. Ir. H Juanda	Ilmiah	30 m ²
Danau Wisata Situ Gede	Jl. Tambakan No. 1	Taman Rekreasi dan Alam	6 Ha
Country Club Cimanggu	Jl. KH. Sholeh Iskandar No. 1	Rekreasi	3,7 Ha
The Jungle	Bogor Nirwana Residence	Rekreasi	3 Ha
Museum Kepresidenan RI Balai Kirti	Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Bogor	Sejarah dan Budaya	
Taman Sringanis / Tanaman Obat	Jl Kampung Sukawarna, Jl Cimanengah No. 29 Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan	Ilmiah	1000 m ²
Bogor Golf Club	Jl.Dr.Semeru no. 65 Bogor	Rekreasi	18Ha
Kebun Raya Residence sports club	KRR Pasir kuda Bogor 16199	Rekreasi	2000 m
The Jungle fest	Bogor Nirwana Residence	Rekreasi	5,5 HA
Taman parahyangan 1	Jl. Temenggung Wiradireja	Rekreasi	4Ha /
Sagara Swiming pool	Jl. Sumanta Direja No.32 Pamoyanan Bogor	Rekreasi	5100 M ²
Yasmin Center	Jl. Ringroad Perum Taman Yasmin	Rekreasi dan Olahraga	21.433 m ²

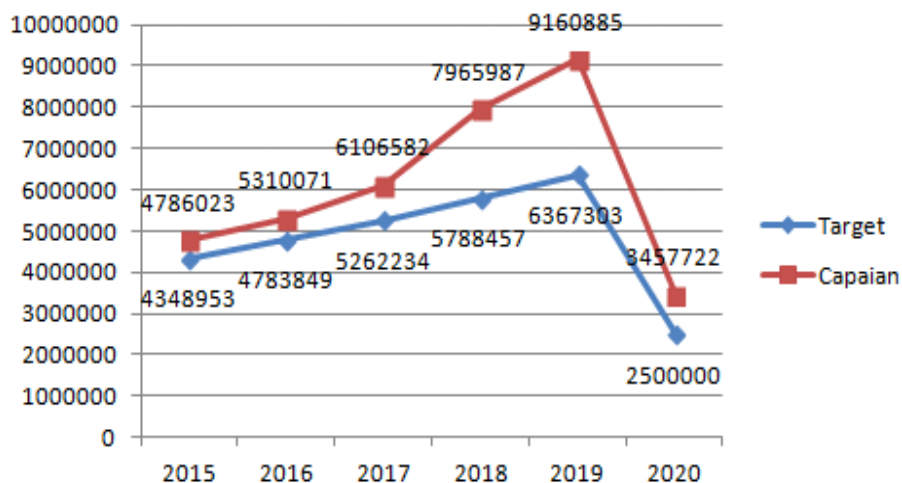
Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2018 ; Data diolah dari SIPD

Potensi yang telah dimiliki dan salah satu warisan budaya yang paling dikenal adalah Kebun Raya Bogor. Sebagai salah satu kebun raya yang mengoleksi tumbuhan tropis terbesar di dunia, Kebun Raya Bogor menjadi semakin disadari pentingnya baik ditinjau dari kepentingan ekologi maupun ekonomi. Namun demikian, lokasi ini tidak luput dari ancaman pencemaran udara dari lingkungan sekitarnya. Sebagai jalur lalu lintas yang semakin padat, ruas-ruas jalan di sekitar Kebun Raya Bogor menjadi tempat emisi pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor baik berupa gas maupun partikel. Kepadatan kendaraan di sekitar Kebun Raya Bogor sangat berpengaruh terhadap kondisi pohon.

Selain kepadatan kendaraan, pemanfaatan ruang di sekitar Kebun Raya Bogor semakin mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya lahan terbangun. Hal ini ditunjukkan dengan

banyaknya bangunan-bangunan yaitu pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan berbagai sentra lainnya.

Grafik 2.46
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bogor
Tahun 2015–2020



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2020 dan diolah oleh SIPD

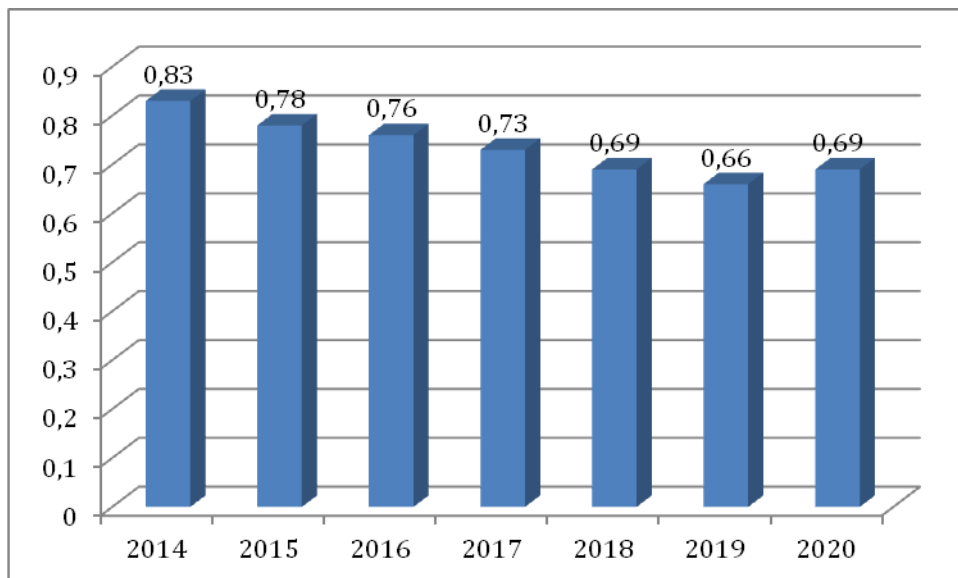
Berdasarkan data di atas perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Bogor pada realisasi RPJMD melampaui target RPJMD. Jumlah Kunjungan wisatawan ke Kota Bogor berdasarkan realisasi RPJMD menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Namun Jumlah Kunjungan wisatawan ke Kota Bogor mengalami penurunan Pada tahun 2020 dikarenakan adanya pembatasan berkunjung selama PPKM akibat Covid-19. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.859.405 kunjungan wisata dari tahun 2017.

2.3.2.3 PERTANIAN

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidup.

Kontribusi sub sektor Pertanian, dan perikanan terhadap PDRB dapat di lihat dalam tabel berikut.

Grafik 2.47
Kontribusi Sub Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB
Kota Bogor Tahun 2014 - 2020



Sumber: BPS ; Data diolah dari SIPD

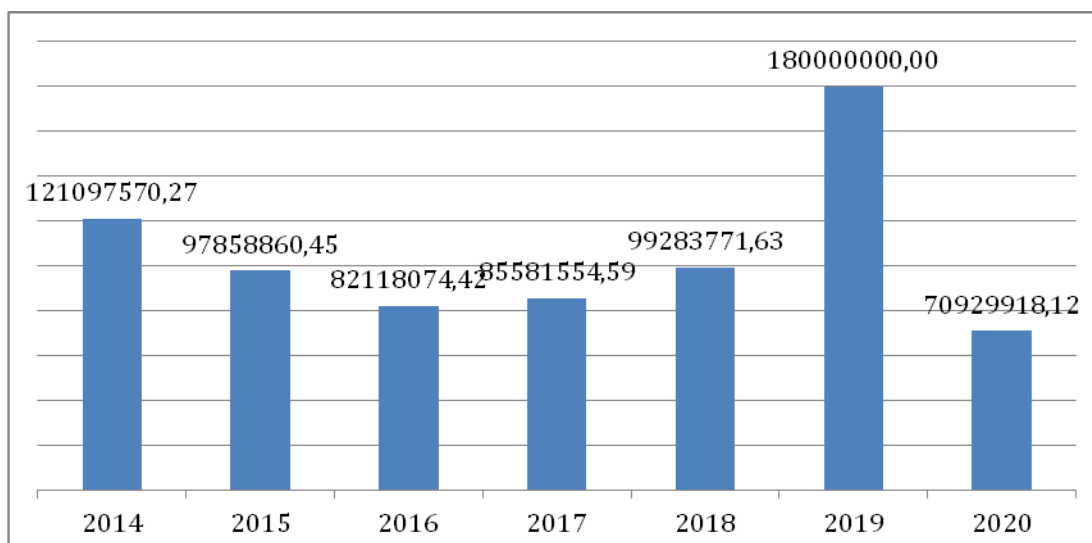
Berdasarkan data di atas bahwa kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Kota Bogor pada tahun 2014 hingga 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 kontribusi sub sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Kota Bogor menurun sebesar 0,05 dari tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 naik kembali sebesar 0,03 menjadi 0,69.

2.3.2.4 PERDAGANGAN

Pelaksanaan urusan perdagangan memiliki sasaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan jumlah komoditi ekspor. Dalam rangka meningkatkan perdagangan dalam negeri serta mendorong IKM untuk termotivasi dan memiliki mental bersaing, telah dilaksanakan Promosi Perdagangan dalam negeri antara lain keikutsertaan para IKM dalam Pameran yaitu :

1. Pameran INACRAFT 2014-2018
2. Pameran Jatim Trade Expo 2017
3. Pameran Banjarmasin Tourism Trade Invesment Expo 2016
4. Jawa Barat Expo 2014 (JABEX)
5. Manado Tourism Trade Invesment Expo 2014

Grafik 2.48
Realisasi Nilai Ekspor Kota Bogor Tahun 2014-2020
(dalam US Dollar)



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Data diolah dari SIPD

Realisasi Nilai Ekspor Kota Bogor pada tahun 2014 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi. Peningkatan realisasi nilai ekspor Kota Bogor mulai meningkat pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 80.716.228,37 US Dollar dari tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan 109.070.081,88 dari tahun 2019. Nilai ekspor tertinggi ada pada tahun 2019 sebesar 180.000.000 sedangkan nilai ekspor terendah saat ini ada pada tahun 2020 yaitu 70.929.918,12.

Tabel 2.49
Kinerja Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Bogor

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran	22,22	21,90	21,59	21,23	20,58	20,31	19,52
2.	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	4,94	5,27	5,71	5,58	2,99	3,85	-7,77

Sumber : Kota Bogor Dalam Angka, 2021

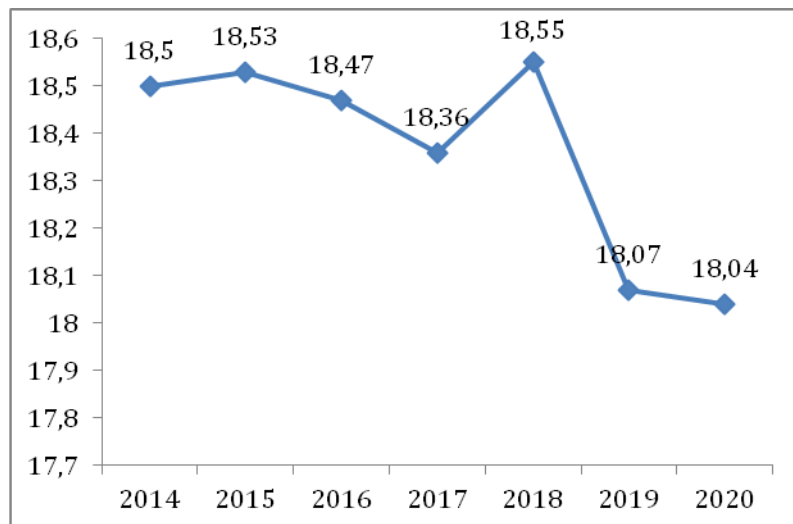
Berdasarkan data tersebut Kontribusi Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Bogor, selama 7 tahun terakhir menunjukkan data yang fluktuatif. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 22,22 dan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 19,52. Disamping itu, untuk laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran juga menunjukkan data yang fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni mencapai 5,71 dan terendah mencapai -7,77 di tahun 2020.

2.3.2.5 PERINDUSTRIAN

Mengembangkan iklim ekonomi kreatif dengan sasaran terciptanya iklim industri kreatif dan terjalannya kemitraan antar pelaku industri kreatif serta terciptanya SDM yang kreatif dan wirausahawan kreatif merupakan tujuan dari urusan perindustrian.

Kontribusi sub sektor industri pengolahan terhadap PDRB dapat di lihat dalam tabel berikut.

Grafik 2.49
Kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Bogor Tahun 2014 -2020 (persen)



Sumber: BPS ; Data diolah dari SIPD

Berdasarkan data di atas bahwa kontribusi sub sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Bogor pada tahun 2014 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi. Kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 18,55%, dan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 18,04%

2.3.3 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2.3.3.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, diantaranya terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan
Pembangunan Tahun 2014-2020

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	-	-	-	-
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	-	-	-	-	1	-
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2	2	2	2	2	2	2
4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	-	90	99.37	98.9	99.74	99.84	-

Sumber: *Bappeda Kota Bogor, 2020*

Berdasarkan data di atas pada indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA pada tahun 2014 hingga tahun 2020 tidak terdapat ketersediaan dokumen tersebut, karena RPJPD Kota Bogor tahun 2005-2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2009 tentang RPJPD Kota Bogor tahun 2005-2025. Begitupun dengan indikator tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA tidak terdapat ketersediaan dokumen, namun pada tahun 2019 ketersediaan dokumen tersebut terdapat satu dokumen. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA mengalami stagnasi atau tidak ada perubahan ketersediaan dokumen.

2.3.3.2 KEUANGAN

Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bogor dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 termasuk predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan mengalami kenaikan predikat pada tahun 2018 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . Dalam hal penetapan APBD, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 termasuk kategori Tepat Waktu. Indikator keuangan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.51
Indikator Keuangan Kota Bogor Tahun 2014 – 2020

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	15,33	15,33	12,23	12,78	10,88	8,84	11,90



No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase SILPA terhadap APBD	15,33	15,33	12,23	12,78	10,89	8,84	11,90
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0	0	0	0	0	0	0
5	Persentase belanja Pendidikan	-	-	23,84	21,06	23,49	24,35	21,15
6	Persentase belanja Kesehatan	-	10,75	13,98	14,58	16,54	22,45	21,7
7	% BTL terhadap total APBD	45,79	46,9	42,77	41,39	43,33	42,74	49,80
8	% BL terhadap total APBD	54,21	53,1	57,23	58,61	56,67	57,26	50,20
9	Bagi hasil kabupaten/kota	0	0	0	0	0	0	0
10	Penetapan APBD	-	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKAD Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

2.3.3.3. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai formasi dan kompetensi merupakan salah satu indikator kepegawaian yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Indikator Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bogor
Tahun 2014 – 2020.

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1	1	1	1	1	1	1
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan normal	65	61,21	66,92	84,27	91,84	93,44	94,12
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	45	43	39	43	72	75	52,72
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	31	31	31	33	34	35	35
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	138	135	136	149	150	155	157
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan	6458	5097	5083	3889	3690	3875	3651

Sumber: BPKSDA Kota Bogor; Data diolah dari SIPD

Berdasarkan data di atas rata-rata lama pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 mengalami stagnasi atau tidak terdapat perubahan. Kemudian persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan normal setiap tahun nya mengalami peningkatan, dimana pada

tahun 2020 meningkat sebesar 0,68% dari tahun 2019. Selanjutnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pada tahun 2016 dan 2020 mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4% dari tahun 2015 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 22,28% dari tahun 2019. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar satu jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah dari tahun 2018 dan pada tahun 2020 mengalami stagnasi jika dibandingkan dengan tahun 2019. Selanjutnya pada jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar dua jabatan administrasi pada instansi pemerintah dari tahun 2018. Dan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 224 pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan dari tahun 2019.

2.3.3.4. PENGAWASAN.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja pengawasan dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.53
Indikator Pengawasan Kota Bogor Tahun 2014 – 2020

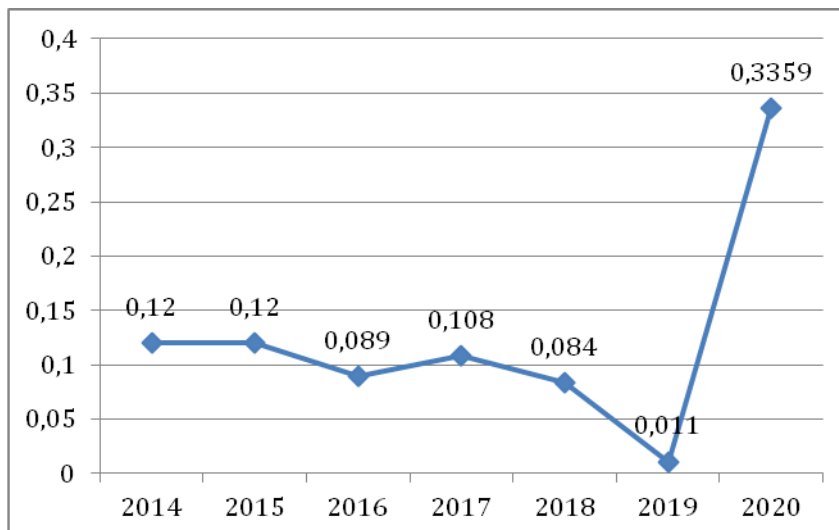
No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah temuan BPK	15	34	30	16	12	24	16

Sumber: Inspektorat Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

Selama kurun waktu 7 tahun dari tahun 2014 semua temuan dapat ditindaklanjuti oleh inspektorat. Sedangkan temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) cenderung menurun dari tahun 2014 terdapat 34 temuan menjadi 12 temuan pada tahun 2018 dan kemudian pada tahun 2019 temuan BPK meningkat kembali menjadi 24 temuan. Setelah itu pada Tahun 2020 menurun kembali sebanyak 8 temuan menjadi 16 temuan pada Tahun 2020.

Data dari BKPSDA Kota Bogor persentase pelanggaran yang dilakukan ASN yang dikenai hanya 0,12 pada tahun 2014, tertinggi persentase pelanggaran pada tahun 2020 yaitu 0,3359 dan terendah persentase pelanggaran pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,011

Grafik 2.50
Persentase Pelanggaran Pegawai Kota Bogor 2014 – 2020 (Persen)



Sumber: BKPSDA Kota Bogor ; Data diolah dari SIPD

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui persentase pelanggaran pegawai Kota Bogor pada tahun 2014 hingga 2020 mengalami fluktuasi, Namun di Tahun 2020 pelanggaran pegawai Kota Bogor mengalami peningkatan sebesar 0,3359, dimana peningkatan pelanggaran terjadi pada tahun 2017 dan pada tahun 2020. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2016, tahun 2018, dan tahun 2019. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,073% dibandingkan tahun 2018.

2.3.3.5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

Penelitian dan Pengembangan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah. Perkembangan Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan digambarkan seperti dalam tabel berikut.

Tabel 2.54
Indikator Penelitian dan Pengembangan Kota Bogor Tahun 2015- 2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	0	0	80	52,5	125	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	0	54,17	68	42,85	68	100
3	Penerapan SIDA						
4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	0	0	45,95	73,68	45,96	78,3

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah	0	0	84,44	87,5	84,45	100

Sumber: Bappeda ; Data diolah dari SIPD

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa persentase implementasi rencana kelitbangan mulai diimplementasikan pada tahun 2017, persentase implementasi menurun terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 72,5% kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 namun di tahun 2020 persentase implementasi menurun. Kemudian pemanfaatan hasil kelitbangan terjadi mulai tahun 2016, dimana pemanfaatannya terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 100%. Selanjutnya perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah terjadi mulai tahun 2017, dimana presentasi tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 78,3%. Dan pada kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah juga terjadi mulai tahun 2017, dimana presentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 100%.

2.3.3.6. SEKRETARIAT DAERAH.

A. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Bogor. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bogor diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LAKIP Pemerintah Kota Bogor yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.55
Nilai SAKIP Kota Bogor Tahun 2014-2020

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
NILAI SAKIP	CC	CC	CC	B	B	BB	BB

Sumber: Data diolah dari SIPD

Berdasarkan tabel di atas Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kota Bogor mengalami peningkatan signifikan dari CC di Tahun 2014

menjadi B di tahun 2017-2018 dan pada tahun 2019-2020 menjadi BB. Prestasi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Bogor semakin baik, akuntabel, dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran.

B. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah Pusat setiap tahun berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008.

Hasil evaluasi menggambarkan kinerja dari pemerintah daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Adapun hasil evaluasi Kota Bogor terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.56
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2014 - 2019

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
NILAI	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

Sumber : Data diolah dari SIPD

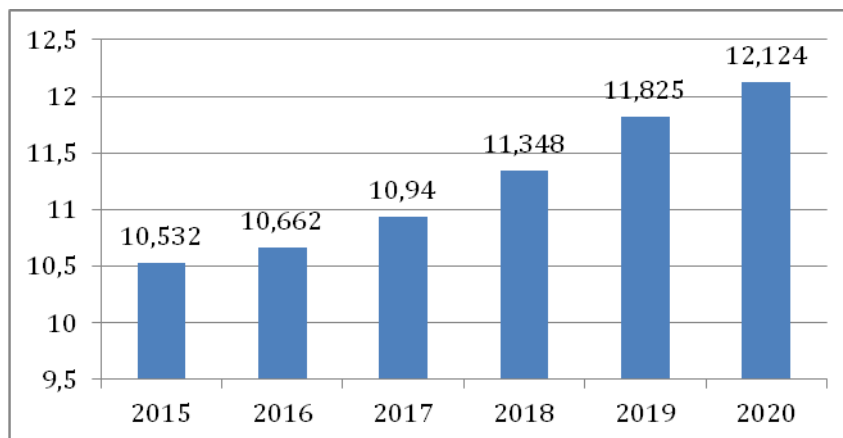
Berdasarkan tabel tersebut, nilai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Bogor mencapai nilai 3,1 selama rentang tahun 2014 – 2019.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH.

2.4.1. PENGELUARAN PER KAPITA.

Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi Rumah Tangga (RT) per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya pengeluaran konsumsi RT per kapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Grafik 2.51
Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita di Kota Bogor
Tahun 2015-2020 (Rupiah)



Sumber: LKPJ AMJ WaliKota Bogor 2015 – 2020 ; Data diolah dari SIPD

Pengeluaran per kapita di Kota Bogor cenderung naik setiap tahunnya akan tetapi kenaikannya melambat. Kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2018 sebesar Rp. 816. Pendekatan pengeluaran rumah tangga ini yang dijadikan sebagai alat ukur kesejahteraan masyarakat dalam Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) oleh BPS, mengingat sulitnya memperoleh data pendapatan yang akurat.

Kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2019 sebesar Rp. 1.293 sedangkan kenaikan dari tahun 2015 ke tahun 2020 sebesar Rp. 1.592. Kenaikan pada tahun 2019 ke tahun 2020 cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2.4.2. PERSENTASE PENGELUARAN KONSUMSI NON PANGAN PER KAPITA

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di gunakan sebagai salah satu alat untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi untuk Kota Bogor pada tahun 2020 dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.57
Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kota Bogor
Tahun 2014-2019

No	URAIAN	2014	2017	2018	2019	Kenaikan	%
1.	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	222.258	3.058.467	431.038	470.106	2.836.209	1.376
2	Aneka barang dan jasa	199.042	970.377	226.002	282.155	771.335	488
3	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	18.547	183.544	32.727	57.000	164.997	990
4	Barang tahan lama	15.512	368.344	64.772	81.302	352.832	2.375
5	Pajak, pungutan dan asuransi	20.089	232.353	50.257	56.834	212.264	1.157
6	Keperluan pesta, upacara dan kenduri	13.957	74.866	12.528	23.714	60.909	536
	Jumlah pengeluaran non pangan	489.404	3.583.436	817.323	971.111	3.094.032	732

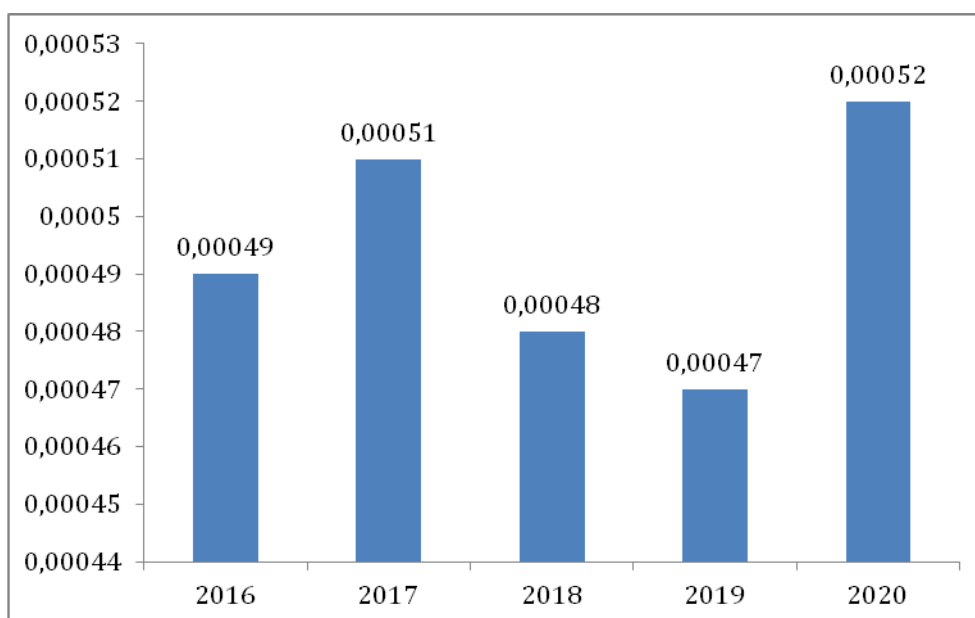
Dari tabel di atas terlihat ada kenaikan yang sangat tinggi pada pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kota Bogor. Rata-rata kenaikan mencapai 1.093 % dari semua jenis konsumsi. Konsumsi pangan tertinggi ada pada perumahan dan fasilitas rumah tangga, ini menunjukkan identitas masyarakat perkotaan.

2.4.3 KRIMINALITAS

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Iklim berinvestasi dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menanggulangi kriminalitas.

Angka kriminalitas yang tertangani diperoleh dari jumlah kriminalitas yang ada di bagi jumlah penduduk pada tahun tersebut.

Grafik 2.52
Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kota Bogor
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Badan Kesbangpol ; Data diolah dari SIPD

Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Bogor pada tahun 2016 sampai tahun 2019 menunjukkan data yang fluktuatif. Hal ini dapat dilihat ada kenaikan pada tahun 2017 akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 kembali mengalami penurunan.

Kejadian unjuk rasa yang terjadi di kota berdasarkan jenisnya mengalami penurunan pada rentang waktu tahun 2014 hingga tahun

2019. Angka kejadian unjuk rasa tertinggi pada tahun 2014 adalah unjuk rasa bidang politik 61 kejadian (55,96%) diikuti unjuk rasa bidang ekonomi 46 kasus (42,20%) dan hanya 2 kejadian unjuk rasa kasus pemogokan kerja (1,8%).

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa pada dasarnya hanyalah penyampaian aspirasi kepada objek unjuk rasa dalam banyak kasus adalah pemerintah. Meningkatnya kasus unjuk rasa di Kota Bogor, terutama unjuk rasa bidang politik, menggambarkan bahwa beberapa pihak masyarakat Kota Bogor tidak sependapat dengan kebijakan yang ada, baik pemerintah maupun swasta.

Tabel 2.58
Banyaknya Kejadian Unjuk Rasa di Kota Bogor
Tahun 2014-2020

No	URAIAN	2014	2015	2016	2019	2020
1	Bidang politik	61	12	19	16	19
2	Ekonomi	46	85	58	7	26
3	Kasus pemogokan kerja	2	-	-	-	26
4	Sosbud	-	-	-	21	32
5	Jumlah unjuk rasa	109	97	77	44	130

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2020

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa banyak nya jumlah unjuk rasa pada tahun 2014 hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Kejadian unjuk rasa di dominasi pada bidang politik dan ekonomi.

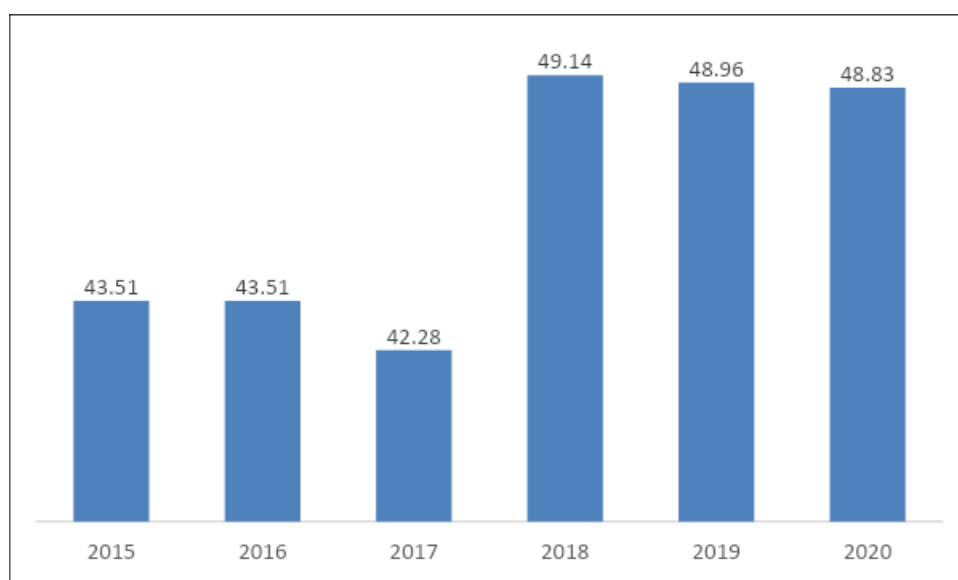
2.4.4. RASIO KETERGANTUNGAN.

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia

di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio Ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase Rasio Ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Grafik 2.53
Rasio Ketergantungan di Kota Bogor Tahun 2015-2020 (Persen)



Sumber: BPS Di olah oleh Bappeda ; Data diolah dari SIPD

Rasio ketergantungan di Kota Bogor kurun waktu 2015-2017 berkisar antara 43.51 s/d 42.28. Pada tahun 2017 rasio ketergantungan total sebesar 42.28 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak

42 sampe 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Untuk tahun 2018-2020 rasio ketergantungan turun dari 49.14 ke 48.96 lalu pada tahun 2020 menjadi 48.83. artinya setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 48 sampai 49 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan dapat dilihat berdasarkan usia, yaitu Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua. Rasio Ketergantungan Muda merupakan perbandingan jumlah penduduk usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun). Untuk Rasio Ketergantungan Muda tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan dari 35,41 ke 36,71 namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 36,55. Pada tahun 2016 rasio ketergantungan muda sebesar 35,41; mengalami peningkatan menjadi 35,79 pada tahun 2017; ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 36 orang dan 22 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun).

Tabel 2.59
Rasio Ketergantungan Muda Kota Bogor
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	262.708	271.944	261.557	264.425	272.800
2	Jumlah Penduduk Usia > 65 Tahun	60.072	49.272	55.050	60.730	54.693
3	Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 Tahun	741.907	759.793	712.477	722.455	737.205
4	Rasio Ketergantungan Muda	35,41	35,79	36,71	36,55	37,00
5	Rasio Ketergantungan Tua	8,10	6,48	7,73	8,39	7,42

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, 2021

Berdasarkan data di atas, Rasio Ketergantungan Tua merupakan perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan Tua mengalami kenaikan dalam selang waktu antara tahun 2016 hingga tahun 2017. Pada tahun 2016 rasio ketergantungan tua sebesar 8,10; mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 6,48; mengalami kenaikan 1,62%. ini berarti setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 5 - 7 orang usia tidak produktif. Rasio ketergantungan muda di Kota Bogor pada tahun 2019 mengalami penurunan 0,16% dari tahun 2018.

Secara Umum capaian setiap bidang urusan sebagaimana uraian diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.60
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)		
		2015	2016	2017	2018	2019		
I	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan							
1.1.	Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	PDRB ADHB	32.364,9	35.400,8	38.478,4	42.261,0	46.223,36	NA	NA
	PDRB ADHK	25.298,6	27.002,3	28.655,0	30.413,6	32.350,5	NA	NA
1.1.1.2	Laju inflasi	2,75	3,6	4,59	3,69	3,02	4,04	<
1.1.1.3	PDRB per kapita	4,4	5,05	4,52	38,49	41,79	26,7	>
1.1.1.4	Indeks Gini	0,47	0,43	0,431	0,41	0,4	0,31	>
1.1.1.5	Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	7,6	7,29	7,8	5,93	5,77	7,89	<
1.1.1.6	Indeks Pembangunan Manusia	73,65	74,5	75,16	75,66	76,23	79,77	<
1.1.1.7	Angka Melek Huruf	98,82	99,33	99,36	99,345	99,35	99,32	>
1.1.1.8	Rata-rata Lama Sekolah	10,2	10,28	10,29	10,3	10,32	NA	NA
1.1.1.9	Angka Partisipasi Murni SD	99,41	89,27	99,93	108,12	96,92	100	<
1.1.1.10	Angka Partisipasi Murni SMP	86,49	82,3	92,48	104,01	78,69	92	<
1.1.1.11	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	996,8	997,3	996,4	997,01	997,98	951	>
1.1.1.12	Angka Kematian Bayi	3,2	2,7	3,6	2,99	2,67	49	<
1.1.1.13	Angka Kelangsungan Hidup Ibu	106	115	29,2	61	202,2	NA	NA
1.1.1.14	Angka Kematian Ibu	105	110	30	30	69	10	>
1.1.1.15	Angka Usia Harapan Hidup	72,88	72,95	73,01	73,21	73,41	69,83	>
1.1.1.16	Persentase Balita Gizi Buruk	0,35	0,07	0,07	0,07	0,07	0,3	<
1.1.1.17	Rasio Penduduk yang Bekerja (Partisipasi Angkatan Kerja)	57,74	57,74	61,13	62,27	63,73	NA	NA
1.1.1.18	Tingkat Pengangguran Terbuka	11,03	10,1	6,5	9,57	9,1	5,66	<
1.1.1.19	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,7	3,2	3,21	3,32	3,45	3,39	>
1.1.1.20	Opini BPK Atas Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
1.1.1.21	Percepatan Skor Pola Pangan Harapan	82,3	78,3	82,7	88,7	83,7	NA	NA
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Pendidikan							
1.2.1.1	Angka Melek Huruf	98,82	99,33	99,36	99,345	99,29	99,32	<
1.2.1.2	Rata-rata Lama Sekolah	10,2	10,28	10,29	10,3	10,32	10,15	>
1.2.1.3	Angka Partisipasi Kasar SD	107,9	106,4	105,89	103,19	103,4	114	<
1.2.1.4	Angka Partisipasi Kasar SMP	100,72	101,05	102,08	87,32	85,53	105	<
1.2.1.5	Angka Partisipasi Murni SD	99,41	74,3	74,75	94,14	74,91	100	<
1.2.1.6	Angka Partisipasi Murni SMP	103,99	78,6	61,21	88	62,21	92	<
1.2.2	Kesehatan							<
1.2.2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	996,8	997,3	996,4	997,01	997,98	NA	NA
1.2.2.2	Angka Usia Harapan Hidup	72,88	72,95	73,01	73,21	73,41	69,83	>
1.2.2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	0,35	0,6	0,07	0,07	0,07	0,3	<



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)		
		2015	2016	2017	2018	2019		
II	PELAYANAN UMUM							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah Usia 7-12	98,9	100	100	99,75	99,53	100	<
2.1.1.2	Pendidikan menengah							
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah Usia 13-15	93,43	96,16	95,22	94,56	94,75	100	<
2.1.1.3	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-1V	85	88,5	85	87,87	88	72,19	>
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.2	Rasio puskesmas per satuan penduduk	0,68	0,67	0,69	0,68	0,68	0,7	<
2.1.2.3	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0,016	0,016	0,017	0,018	0,018	NA	NA
2.1.2.4	Rasio Dokter umum per Satuan Penduduk	3470	3422	3276	2941	2320	NA	NA
2.1.2.5	Rasio Dokter Spesialis per Satuan Penduduk	1881	1806	1676	1608	1341	NA	NA
2.1.2.6	Rasio Dokter Gigi per Satuan Penduduk	9112	10893	9163	8775	6433	NA	NA
2.1.2.7	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	313	295	255	237	241	NA	NA
2.1.3	Pekerjaan Umum Penataan Ruang							
2.1.3.1	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) (%)	87,6	88,15	88,32	88,59	89,38	88,5	>
2.1.3.2	Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air	61,32	61,71	61,83	66,44	88,79		
2.1.3.3	Persentase rumah tinggal bersantitas yang aman	66,8	66,8	72,1	67,21	66,59	NA	NA
2.1.3.4	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	2,78	5,48	7,22	11,01	64,14	NA	NA
2.1.3.5	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPT nya	23	89	37	74,19	87,63	120	<
2.1.3.6	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	11,46	22,92	34,38	45,83	46,73	NA	NA
2.1.3.7	Rasio Jaringan Irigasi	0,0644	0,1289	0,1933	0,2578	46,73	NA	NA
2.1.3.8	Ketersediaan Air Minum (Persentase Rumah Tangga yang dilayani Air Minum yang Aman)	82	86,92	90,55	91,98	92,58	98,95	<
2.1.3.9	Persentase Rumah Tangga yang dilayani Air Minum PDAM	82	85,85	88,73	91,44	92,58	97,3	<
2.1.3.10	Persentase Rumah Tangga yang dilayani Air Minum Non PDAM		1,07	1,82	0,54	0,85	1,65	<
2.1.3.11	Ketersediaan Pengolahan Air Limbah yang Layak	66,8	66,8	72,1	67,21	69,12		
2.1.3.12	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	11,59	11,41	11,24	11,71	12,25	NA	NA
2.1.3.13	Rasio Tempat Beribadah Per Satuan Penduduk	0,0185	0,0183	0,018	0,018		NA	NA
2.1.3.14	Kesesuaian Bangunan dengan IMB yang telah terbangun	96,94	98,47	98,9	99,74	99,4	98	>
2.1.3.15	Pencegahan Bangunan tidak Ber-IMB	77,86	88,83	88,83	82,32	72,8	80	<
2.1.3.16	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	90	99,77	98,9	99,74	99,84	90	>
2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
2.1.4.1	Rasio Rumah Layak Huni	20,84	20,73	20,71	17,28	17,07	NA	NA
2.1.4.2	Rasio pemukiman layak huni	91,8	92,92	94,03	95,14	95,53	NA	NA
2.1.4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	99,06	98,11	78,4	70,59	73,02	85,5	<
2.1.4.4	Perbaikan Jalan Lingkungan pada Lokasi Kawasan Kumuh	1572,17	3858,33	1334	3804,35	2292,5	NA	NA
2.1.4.5	Perbaikan Saluran/Drainase pada Lokasi Kawasan Kumuh	820	2827,4	1582	4715	1874	NA	NA
2.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial							
2.1.5.1	Persentase penegakan perda KTR	85	90	90	90	93	80	>
2.1.5.2	Persentase bangunan melanggar yang di tertibkan	98	98	98	98	95	98	<
2.1.5.3	Tingkat penegakan Perda ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	=
2.1.5.4	Angka kriminalitas	NA	0,00049	0,00051	0,00048	0,00047	<0,146	>

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)		
		2015	2016	2017	2018	2019		
II	PELAYANAN UMUM							
2.1.6	Sosial							
2.1.6.1	Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	43,1	44,39	72,7	91,42	75,32	63	>
2.1.6.2	Prosentase jumlah anjal Gepeng dan PSK yang berdaya	103,87	202,29	70,33	18,8	63,79	75	<
2.1.6.3	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	100	100	100	100	100	=
2.1.6.4	Persentase panti asuhan/yayasan yang terbina (%)	100	100	100	93,98	100	100	=
2.1.6.5	Persentase jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina(%)	29,9	60,75	108,21	19	22,72	67	<
2.1.6.6	Prosentase jumlah anak terlantar / anak jalanan yang di bina	13,22	32,25	21,22	2,08	36,7	41	<
2.1.6.7	Prosentase penyandang cacat trauma yang dibina	3,96	5,66	2,96	8,25	17,52	12	>
2.1.6.8	Prosentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial sosial yang dibina	-	-	35,51	41,74	100	100	=
2.1.6.9	Jumlah PSKS yang terbina	243	228	228	268	302	267	>
2.2	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
2.2.1	Tenaga Kerja							
2.2.1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	57,74	57,74	61,15	65,21	63,73	NA	NA
2.2.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	11,08	11,08	9,57	9,65	9,1	5,66	<
2.2.1.3	Rasio Pencari Kerja	92,95		63,23	80,71			
2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.2.2.1	Persentase Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Pemerintah	2,14	2,2	2,17	2,2	5,63	NA	NA
2.2.2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	17,78	17,78	17,78	17,78	22	NA	NA
2.2.2.3	Kekerasan Dalam Rumah Tangga		52	117	109	70	75	>
2.2.2.4	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	9,53	9,82	10,11	10,42	26,88		
2.2.2.5	Persentase Pangan Utama	165,72	188,69	230,6	230,9	231,01		
2.2.2.6	Ketersediaan Energi	2318	2394,6	2482,7	2512,8	2592,9	2220	>
2.2.2.7	Ketersediaan protein perkapita	91,1	102,3	105,3	89,4	110,3	57	>
2.2.2.8	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	94,62	86,37	87,1	91,53	93,96		
2.2.3	Pertanahan							
2.2.3.1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	0,76	0,77	0,8	0,92	11,57	NA	NA
2.2.3.2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	13	16	24	24	3	NA	NA
2.2.3.3	Penyelesaian Izin Lokasi	77	88	33	33	1	NA	NA
2.2.4	Lingkungan Hidup							
2.2.4.1	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air	50	27,33	34,44	49,67	51,67	55	<
2.2.4.2	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara	70,56	78,56	85,3	85,86	81,6	80	>
2.2.4.3	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	72,2	74	74,38	75,85	77,04	75,37	>
2.2.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
2.2.5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	91	95	93,08	94,3	96	73,1	>
2.2.5.2	Rasio bayi ber-akte kelahiran	92,87	93,1	93,84	94,7	98	88	>
2.2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan							
2.2.6.1	Jumlah pengurus UEK SP yang mendapat pelatihan	204	204	204	204	-	204	=
2.2.6.2	Jumlah santri yang mendapat pelatihan usaha ekonomi syariah	500	600	700	800	920	900	>
2.2.6.3	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,76	=
2.2.6.4	Persentase partisipasi masyarakat	85	90	90	95	90	90	=
2.2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2.2.7.1	Ratio Akseptor KB	76,82	76,12	76,94	77,41	77,01	NA	NA
2.2.7.2	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	76,82	76,12	76,94	77,41	77,01	NA	NA
2.2.8	Perhubungan							
2.2.8.1	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	17962560	19600351	25149852	25149852	3771600	NA	NA
2.2.8.2	Jumlah Izin Trayek Angkutan Kota	607	388	193	418	450	NA	NA
2.2.8.3	Rasio Izin Trayek	0,000579	0,000364	0,000179	0,000381	0,000432	NA	NA
2.2.8.4	Jumlah Angkutan Umum Wajib Uji	13381	13997	14646	15240	18262	NA	NA
2.2.8.5	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	4973950	3749210	5328604	101205	287276	NA	NA



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)		
		2015	2016	2017	2018	2019		
II	PELAYANAN UMUM							
2.2.9	Komunikasi dan Informasi							
2.2.9.1	Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)	10	5	7	10	5	40	<
2.2.9.2	Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD(%)	3,88	12,62	15,53	18,45	20,59	20,39	>
2.2.9.3	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	90,7	90,9	87,8	90,2	100	100	=
2.2.10	Koperasi							
2.2.10.1	Jumlah Koperasi	797	814	826	848	868		
2.2.10.2	Jumlah Koperasi Aktif	395	472	501	528	558	85	>
2.2.10.3	Persentase Koperasi Aktif	49,56	57,98	60,2	62,26	64,26		
2.2.10.4	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	25	25	35	40	30	NA	NA
2.2.11	Penanaman Modal							
2.2.11.1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	3.104.313.	2.315.438.	2.947.851.	3.103.415.	2.641.381.	2.500.000.000	>
		574.444	675.457	998.320	#####	312.523,23		
2.2.12	Kepemudaan dan Olahraga							
2.2.12.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	68	68	68	68	68	68	=
2.2.13	Statistik							
2.2.13.1	Ketersediaan Dokumen Daerah Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.2.13.2	Ketersediaan Dokumen PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.2.14	Persandian							
2.2.14.1	Prosentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik(persandian)	100	100	100	100	100	100	=
2.2.15	Kebudayaan							
2.2.15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	53	75	63	32	59	NA	NA
2.2.15.2	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	0	0	0	0	0	NA
2.2.16	Perpustakaan							
2.2.16.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun	49.039	45.011	74.623	25.421	28.790	97.000	<
2.2.16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	47.620	69.026	71.842	74.870	75.705	60.820	>
2.2.16.3	Rasio perpustakaan per 1000 penduduk	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	=
2.2.16.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	49.039	45.011	45.489	25.421	28.790	97.000	<
2.2.17	Kearsipan							
2.2.17.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	13	28	48	68	70	100	<
2.2.17.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	100	106	106	117	109		
2.3	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.3.1	Pariwisata							
2.3.1.1	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan	4786023	5310071	6106582	7965987	9160885	6.567.303	>
2.3.2	Pertanian							
2.3.2.1	Kontribusi Sub Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	0,78	0,76	0,73	0,69	0,66	NA	NA
2.3.2	Perdagangan							
2.3.2.1	Realisasi Nilai Ekspor	97858860	82118074	85581555	99283772	180000000		
2.3.2.2	Kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran	21,90	21,59	21,23	20,58	20,31	25	<
2.3.2.3	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	5,27	5,71	5,58	2,99	3,85	NA	NA
2.3.4	Perindustrian							
2.3.4.1	Kontribusi Sub Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	18,53	18,47	18,36	18,55	18,07	NA	NA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		(n-5)	(n-4)	(n-3)	(n-2)	(n-1)		
		2015	2016	2017	2018	2019		
2.4.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
2.4.1	Perencanaan Pembangunan							
2.4.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2	2	2	2	2	2	=
2.4.1.2	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	90	99,37	98,9	99,74	99,84	90	>
2.4.2	Keuangan							
2.4.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
2.4.2.2	Persentase SILPA	15,33	12,23	12,78	10,88	8,84	NA	NA
2.4.2.3	Persentase belanja pendidikan		23,84	21,06	23,49	24,35	20	>
2.4.2.4	Persentase belanja kesehatan	10,75	13,98	14,58	16,54	22,45	10	>
2.4.2.5	%BTL terhadap total APBD	46,9	42,77	41,39	43,33	42,74		
2.4.2.6	%BL terhadap total APBD	53,1	57,23	58,61	56,67	57,26		
2.4.2.7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	=
2.4.3	Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan						NA	NA
2.4.3.1	Rata-Rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1	1	1	1	1	NA	NA
2.4.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan normal	61,21	66,92	84,27	91,84	93,44	NA	NA
2.4.3.3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	43	39	43	72	75	NA	NA
2.4.4	Pengawasan							
2.4.4.1	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	=
2.4.4.2	Jumlah temuan BPK	34	30	16	12	24	NA	NA
2.4.4.3	Persentase Pelanggaran Pegawai Kota Bogor	0,12	0,089	0,108	0,084	0,011	NA	NA
2.4.5	Penelitian dan Pengembangan						NA	NA
2.4.5.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	0	0	80	52,5	125	NA	NA
2.4.5.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	0	54,17	68	42,85	68	NA	NA
2.4.5.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	0	0	45,95	73,68	45,96	NA	NA
2.4.5.4	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah	0	0	84,44	87,5	84,45	NA	NA
2.4.6	Sekretariat Daerah							
2.4.6.1	Nilai SAKIP	CC	CC	B	B	BB	BB	=
2.4.6.2	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	<
III	DAYA SAING DAERAH							
3.1	Kemampuan Ekonomi							
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	10,532	10,662	10,94	11,345	12,124	NA	NA
3.1.1.6	Jumlah pengeluaran non pangan			3.583.436	817.323	971.111	402.576	>
3.1.1.5	Angka Kriminalitas yang Tertangani		0,00049	0,00051	0,00048	0,00047	<0,146	>
3.1.1.6	Banyaknya kejadian Unjuk Rasa	97	77			44	NA	NA
3.1.1.7	Rasio Ketergantungan di Kota Bogor	43,51	43,51	42,28	49,14	48,96	NA	NA
3.1.1.8	Rasio Ketergantungan Muda		35,41	35,79	36,71	36,55	NA	NA
3.1.1.7	Rasio Ketergantungan Tua		8,1	6,48	7,73	8,39	NA	NA



2.5 PENCAPAIAN SASARAN RPJMD TAHUN 2014 – 2019.

Berdasarkan Tabel 2.61 berikut ini, dapat dilihat rata-rata capaian sasaran RPJMD Tahun 2014-2019 berdasarkan Misi. Pada Misi 1, tidak ada dari 8 sasaran yang berhasil mencapai target.

Pada misi 1 khususnya di bidang pendidikan, khususnya indikator rata rata lama sekolah adalah masih ada sebagian penduduk Kota Bogor yang berusia diatas 15 tahun yang putus sekolah oleh barbagai sebab dianatraanya permasalahan ekonomi, hamabatan akses ke sarana pendidikan, hambatan yang disebabkan factor budaya, terbatasnya akses ke sarana pendidikan mengingat jumlah sarana pendidikan negeri di Kota Bogor persebarannya belum merata. Di sisi lain kewenangan penyelenggaraan sekolah menengah ada di provinsi Jawa Barat.

Pada Misi 2, terdapat 10 sasaran yang bisa dicapai dari 17 target. Pada Misi 3, tercapai 1 target dari 8 sasaran. Pada Misi 4, dari 2 sasaran bisa tercapai 100%. Sedangkan Misi 5, tercapai 1 sasaran dari 6 target. Dan, Misi 6 berhasil mencapai 6 target dari 7 sasaran. Rincian persasaran ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.61
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja 2014 – 2019						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
A.	MISI 1 : MEWUJUDKAN BOGOR KOTA YANG CERDAS DAN BERWAWASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI							
	Tujuan 1 : Membangun Masyarakat yang Cerdas dan Berwawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi							
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (Smart Government)							
1.	Indeks E-Government	2.19	2,91	NA	2,92	3,03	3,10	Tidak Tercapai
	Sasaran 2 : Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan (smart people)							
1.	Rata-rata Lama Sekolah	10,01	10,20	10,28	10,29	10,30	10,32	Tidak Tercapai
2.	APK SD	133.33	110,5	106,57	105,55	112,6	106,20	Tidak Tercapai
3.	APK SMP	104.66	108,56	105,55	101,06	104,1	103,56	Tidak Tercapai
4.	Nilai Rata-Rata USBN SD	75.47	75,47	75,75	72,12	68,12	73,95	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja 2014 – 2019						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
5.	Nilai Rata-Rata UN SMP	65	65	67	59,62	58,27	61,07	Tidak Tercapai
6.	Persentase Sekolah Terakreditasi A	58	60	62	70,26	73,5	60	Tidak Tercapai
Sasaran 3 : Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarakat								
1.	Persentase inovasi masyarakat yang berhasil di implementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota	NA	NA	NA	NA	100	NA	
B.	MISI 2 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA SEHAT DAN MAKMUR							
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat								
Sasaran 1 : Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat								
1.	Persentase masyarakat yang	30	65	67	76,6	95,85	94,02	Tidak Tercapai
2.	Angka Harapan Hidup saat Lahir	72.58	72,88	72,95	73,01	73,21	73,41	Tercapai
3.	Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	30	106/ kelahiran hidup	115/ 100.000 kelahiran hidup	29,2/ 100.000 kelahiran hidup	61/ 100.000 kelahiran hidup	69/ 100.000 kelahiran hidup	Tercapai
4.	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	0.54	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	3/1.000 kelahiran hidup	2,67/1000 kelahiran hidup	Tercapai
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman								
1.	Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/ kota	NA	NA	66,8	72,1	67,21	69,12	Tercapai
2.	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum yang aman	NA	82	86,92	90,55	91,98	92,58	Tidak Tercapai
3.	Prosentase luasan kawasan kumuh sedang	NA	0,42	0,42	0,42	0,42	0	Tercapai



No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja 2014 – 2019						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Sasaran 3 : Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat							
1.	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)	61,7	63,4	64,2	65,2	66	65,80	Tidak Tercapai
2.	Tingkat kepatuhan penerapan KTR	22.49	100	100	100	100	73,80	Tidak Tercapai
	Tujuan 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor							
	Sasaran 1 : Berkurangnya tingkat pengangguran							
1.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	9.48	11,03	10,1	9.57	9,28**	9,1	Tidak Tercapai
2.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	8.87	57,84	31,62	60,88	56,52	58,75	Tercapai
	Sasaran 2 : Menurunnya tingkat kemiskinan							
1.	Angka kemiskinan		7,6	7,29	7,11	5,93	5,77	Tercapai
2.	Indeks gini ratio	0.36	0,47	0,43	0,43	0.41*	0,41*	Tidak Tercapai
	Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat							
	Tujuan 3 : Terwujudnya Stabilitas Perekonomian Masyarakat							
	Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi							
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	2013 = 5.86 ; 2014 =NA	6,14*	6,73**	6,12	6,14*	6,04	Tidak Tercapai
2.	Nilai investasi	2,805 T	3,104 T	2,315 T	2.9 T	3.1 T	2,641 T	Tercapai
3.	Pertumbuhan jumlah komoditi ekspor	121.097.570,27 (Realisasi Nilai Ekspor)	21	23	30	30	30	Tercapai
4.	PDRB per kapita (dalam juta rupiah)	23.12	30,88**	33,25**	37,18	37,99	NA	
C.	MISI 3 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN							
	Tujuan 1 : Mempertahankan Kualitas Daya Dukung dan Daya Tampung Ruang Kota Bogor							
	Sasaran 1 : Terkendalinya tata ruang Kota Bogor							
1.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Persentase)	75	NA	80	86	88	NA	

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja 2014 – 2019						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW							
2.	Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang (Persentase ketercapaian Rencana Struktur Ruang)	75	NA	80	86	89	93	
Sasaran 2 : Berkurangnya tingkat kemacetan								
1.	Peningkatan kecepatan rata-rata jalan arteri dan kolektor (150 ruas jalan arteri dan kolektor)	2	24,65	26,1	34,84	35,39	30,94	Tidak Tercapai
Sasaran 3 : Meningkatnya prosentase luasan dan kualitas ruang terbuka hijau								
1.	Persentase ruang terbuka hijau publik	5,58	5,7	5,73	5,79	5,89	6,12	Tercapai
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan persampahan								
1.	Persentase volume sampah terangkut ke TPA	70.37	72,2	74	74,34	75,85	75,85	Tercapai
2.	Prosentase reduksi sampah	3.2	3,2	3,2	4,1	6,26	6,89	Tercapai
Sasaran 5 : Terkendalanya kualitas lingkungan								
1.	Indeks kualitas air	52	50	27,33	34,44	49,67	51,67	Tidak Tercapai
2.	Indeks kualitas udara	NA	70,56	78,56	85,3	85,86	81,76	Tercapai
D.	MISI 4 : MEWUJUDKAN BOGOR SEBAGAI KOTA YANG BERORIENTASI PADA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF							
Tujuan 1 : Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menunjang perekonomian masyarakat								
Sasaran 1 : Berkembangnya sektor kepariwisataan								
1.	Jumlah kunjungan wisatawan	4.350.930	4.786.023	5.310.072	6.106.582	7.965.987	9.160.885	Tercapai
Sasaran 2 : Berkembangnya usaha masyarakat di sektor ekonomi kreatif								
2.	Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif	NA	NA	40	148	57	170	Tercapai
E.	MISI 5 : MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TRANSPARANSI							
Tujuan 1 : Terwujudnya Birokrasi Pemerintah yang berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani								

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja 2014 – 2019						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
publik secara prima								
Sasaran 1 : Terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel								
1.	Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	CC	CC	CC	B	B	BB	
2.	Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	3.1	3,1	3,1	3,1	3,1	NA	
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	NA	NA	B	B	B	Tidak Tercapai
4.	Opini BPK (Hasil pemeriksaan BPK)	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	Tercapai
5.	Level Maturitas SPIP	1	1	1	1	1	3	Tidak Tercapai
Sasaran 2 : Terciptanya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima								
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	3,1	3,2	3,21	3,31	3,22	
F.	MISI 6 : MENGOKOHKAN PERAN MORAL AGAMA DAN KEMANUSIAAN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI							
Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebhinekaan								
Sasaran 1 : Meningkatnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat								
1.	Angka kriminalitas	0.142	0,142	0,143	0,144	<0,145	<0,146	Tercapai
2.	Prevalensi HIV/AIDS	5	0,29	0,36	0,15	0,15	0,46	Tercapai
3.	Persentase penurunan kasus narkoba	NA	6,32	23,78	21,99	21,99	NA	
Sasaran 2 : Meningkatnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat								
1.	Persentase tanggap penanganan bencana	100	100	100	100	100	100	Tercapai
Sasaran 3 : Meningkatnya nilai-nilai kebhinekaan dan keharmonisan antar umat beragama, antar suku,ras, dan golongan								
1.	Persentase deteksi dini permasalahan intoleransi	100	100	100	100	100	100	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja 2014 – 2019						Evaluasi Capaian di Akhir Tahun 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
2.	Persentase pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.	Persentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Sumber: Analisis Bappeda Kota Bogor

Dari tabel diatas terlihat capaian dari berbagai indikator makro, dan indikator setiap urusan , beberapa indikator tercapai dan beberapa tidak tercapai, walaupun beberapa indikator makro tidak tercapai tapi untuk indikator makro pembangunan umumnya masih diatas rata-rata provinsi Jawa Barat , seperti Indeks Pembangunan Manusia.

Capain Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor dari tahun 2015 hingga tahun 2019 selalu mengalami peningkatan dari 73,65 (2015) menjadi 76,23 (2019). Kota Bogor cenderung dapat mempertahankan percepatan pertumbuhan IPM. peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Pengukuran IPM terkait dengan indikator-indikator lain sebagai pendukungnya, dimana setiap perubahan pada indikator tersebut memberikan pengaruh terhadap pencapaian pembangunan manusia. Lambatnya laju tingkat pertumbuhan faktor-faktor tersebut, dikarenakan adanya indikator-indikator lain yang juga membentuk faktor-faktor tersebut. Seperti usia harapan hidup masyarakat di suatu daerah, jika dalam daerah tersebut tidak memiliki tingkat sarana dan prasarana kesehatan yang baik, maka akan berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa usia harapan hidup masyarakat tersebut juga akan semakin rendah dan juga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut juga akan semakin rendah.

Capaian pembangunan ekonomi tahun 2015-2019 dapat terlihat dari LPE, PDRB, laju inflasi, persentase penduduk miskin, Gini rasio, Tingkat pengangguran terbuka. LPE Kota Bogor di tahun 2019 mencapai 6,04% namun hal ini masih diatas rata rata Provinsi

Jawa Barat yang berada di kisaran 5,07%. Selain dari LPE kondisi perekonomian Kota Bogor dapat dilihat dari PDRB. PDRB merupakan indikator makro ekonomi yang digunakan untuk menganalisis kondisi perekonomian suatu wilayah. Nilai PDRB Kota Bogor setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Pada 2019 mencapai Rp 46.223,36 juta, meningkat 9,37% dibanding Rp 42.261,02 juta pada tahun 2018. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2019 mencapai Rp 32.253,51 juta, mengalami pertumbuhan sebesar 6,05 persen. dibanding tahun 2018 yang mencapai nilai Rp 30.413,57 juta. Kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Bogor disumbang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, hal ini sejalan dengan kondisi dimana jumlah tenaga kerja yang bekerja di lapangan pekerjaan perdagangan, restoran, dan hotel di Kota Bogor terus mengalami peningkatan.

Tingkat inflasi di Kota Bogor secara keseluruhan setiap bulannya rendah (<10%). Bahkan ada yang deflasi. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi yang paling tinggi pada tahun 2017 adalah pada sektor pendidikan, rekreasi dan olahraga, sekitar 8% pada bulan September. Sedangkan pada bulan lainnya lebih rendah lagi, secara rata-rata di bawah 4%. Permasalahannya adalah inflasi yang fluktuatif. Beberapa bulan di Kota Bogor, inflasi mencapai titik negatif. Menurut BI, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sementara itu menurut Hellerstein, FRB, 1997, perekonomian stabil jika inflasi < 2,5%, inflasi moderat antara 2,5-5%, inflasi tinggi antara 5-8%, diatas 8% berarti perekonomian memasuki fase inflasi berbahaya.

Pendapatan per kapita berdasarkan PDRB harga berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan laju pendapatan per kapita meningkat pada 2018-2019. Hal ini juga dikarenakan berbagai kondisi peningkatan berbagai sektor penyusun lapangan usaha di Kota Bogor. Meskipun PDRB per kapita mengalami pertumbuhan yang meningkat, peningkatan PDRB per kapita tersebut masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Bogor secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar

harga berlaku masih terkandung faktor perubahan harga (inflasi atau deflasi) yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Kondisi ekonomi erat kaitannya dengan kondisi ketenagakerjaan, salah satunya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Bogor tahun 2019 masih cukup tinggi yaitu 9,10% , masih diatas Jawa Barat yang mencapai 8,04%. Walaupun demikian bila dilihat tingkat pengangguran terbuka tahun 2015-2019 di Kota Bogor mengalami penurunan dari 11,03 pada tahun 2015 menjadi 9,10 pada tahun 2019. Penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, makin membaiknya perekonomian secara nasional sehingga terbukanya perluasan kesempatan kerja diberbagai sektor lapangan usaha yang dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran.

Kemiskinan di Kota Bogor jumlahnya mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio kemiskinan di Kota Bogor pun mengalami penurunan, dari 7,60% menjadi 6,77%. Pemerintah Kota Bogor berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakatnya, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota.

Pembangunan ekonomi daerah selain mengejar pertumbuhan perlu juga mengejar pemerataan, dimana hasil pembangunan ekonomi tersebut dapat di rasakan oleh berbagai kelompok masyarakat dari berbagai tingkat ekonomi. Oleh karena itu upaya untuk menurunkan Gini rasio terus dilakukan. Nilai gini ratio Kota Bogor setiap tahunnya memiliki nilai lebih dari 0,4, kecuali pada tahun 2018 dan 2019 yang memiliki nilai sebesar 0,389 dan 0,386. Gini Ratio untuk mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah yang telah diakui secara luas. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat

digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Kinerja di Aspek kesehatan dapat dilihat diantaranya melalui capaian UHH. Pencapaian Angka Usia Harapan Hidup (UHH) tidak lepas dari Indikator derajat Kesehatan lainnya yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) suatu daerah. Indikator-indikator tersebut adalah indikator dasar pembentuk UHH individu manusia di suatu daerah. Kasus Kematian Bayi (AKB) Kota Bogor sebenarnya cenderung turun pada 2019 (2,67 kasus per 1000 kelahiran bayi) dimana pada 2015 mencapai 3,2 kasus per 1000 kelahiran bayi. Angka kematian dapat menggambarkan seberapa tinggi derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Pada dasarnya penyebab kematian ada yang langsung dan tidak langsung, walaupun dalam kenyataannya terdapat interaksi dari berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat kematian di masyarakat. Berbagai faktor yang berkaitan dengan penyebab kematian, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi, kualitas lingkungan hidup, upaya pelayanan kesehatan dan lain-lain.

Di aspek pendidikan dapat dilihat dari capaian APK dan APM. Capaian APM pendidikan dasar Kota Bogor yang cenderung menurun dapat diakibatkan berbagai sebab seperti, faktor ekonomi keluarga, anak yang masuk sekolah tahun pertama masih dibawah usia <7 tahun (6-6.5 tahun), kuota (kapasitas) sekolah dasar yang belum dapat menampung, persaingan dengan penduduk luar Kota Bogor. Faktor kapasitas dan persaingan antar penduduk sekitar Bogor nampaknya lebih mengemuka, sebab beberapa Sekolah Dasar (negeri atau swasta) di Kota Bogor menjadi primadona seperti SD Aliya, Polisi, Regina Pacis, Umul Quro, Insan Kamil dan lainnya, meskipun demikian diperlukan kajian lebih mendalam terkait kondisi tersebut. Kondisi ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Bogor sebab, pemerintah harus menghadirkan Pendidikan Dasar yang baik dan terjangkau (lokasi dan keterterimaan) bagi seluruh anak-anak usia sekolah di Kota Bogor. APK Capaian APK SD tahun 2015-2018 di Kota Bogor mengalami kenaikan dari 110,5 pada tahun 2015 menjadi 112,96 pada tahun 2018. Sedangkan capaian APK SMP tahun 2015-2019 di Kota Bogor mengalami penurunan dari 108,56 pada tahun 2015 menjadi 103,56 pada tahun 2019.

Capaian dan kondisi APK dan APM Kota Bogor tersebut mungkin disebabkan dari beberapa kendala, seperti faktor ekonomi keluarga, sarana pendidikan baik secara jumlah atau lokasi sekolah. APK dan APM dapat menjadi landasan yang cukup kuat bagi pemerintah Kota Bogor dalam melakukan evaluasi program dan infrastruktur pendidikan di Kota Bogor. Sebagaimana pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah Kota Bogor meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam upaya mendorong peningkatan pencapaian program wajib belajar 9 dan 12 tahun khususnya pada jenjang pendidikan menengah (SMP dan SMA/K).

2.6 CAPAIAN RPJMD 2019-2024

Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 pertimbangan hasil pencapaian program yang ada dalam RPJMD yang telah dilaksanakan terutama dalam kurun waktu Tahun 2019-2020. Capaian berbagai program tersebut tercermin dalam pencapaian target Indikator makro pembangunan tahun 2019 dan tahun 2020, serta capaian indikator kinerja utama pemerintah Daerah.

Capaian indikator Makro pembangunan daerah menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Indeks Gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*Impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Tabel 2.62
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota
Bogor Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2019		Tingkat Capaian	2020		Tingkat Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,66	76,23	100,75	76,67	76,11	99,27
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,53	1,46	104,57	1,51	1,53	98,70
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,93	5,77	102,70	5,8	6,68	86,83
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,28	9,10	101,94	8,47	12,68	66,80
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,66	6,14	92,19	6,66	-0,53	-7,96
6	Indeks Gini	Poin	0,41	0,4	102,44	0,4	0,4*	100

Sumber: RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

Keterangan: * : data tahun 2019, BPS tidak merilis gini ratio tahun 2020

Capaian indikator makro RPJMD Kota Bogor pada Tahun 2019 menunjukkan 83,33 persen melampaui target (>100 persen), 16.67 persen hampir mencapai target dengan predikat sangat tinggi (91 persen \leq 100 persen).

Capaian indikator makro RPJMD Kota Bogor pada Tahun 2020 menunjukkan 50 persen hampir mencapai target dengan predikat sangat tinggi (91 persen \leq 100 persen). Adapun penjelasan masing-masing indikator makro tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Kualitas hidup manusia di Kota Bogor mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor. Pada Tahun 2020, IPM Kota Bogor telah mencapai 76,11. Angka ini menurun 0,12 poin dibandingkan dengan Tahun 2019 yang sebesar 76,23.
- b. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 sebesar 1,53 persen mengalami kenaikan dari 1,46 persen di tahun 2019 menjadi 1,53 persen di tahun 2020.
- c. Berdasarkan publikasi BPS laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan Kota Bogor tahun 2020 sebesar -0,53 persen, mengalami penurunan yang signifikan sebesar 6,67 poin dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 6,14. Capaian tersebut sangat jauh di bawah dari angka yang ditargetkan di RPJMD maupun

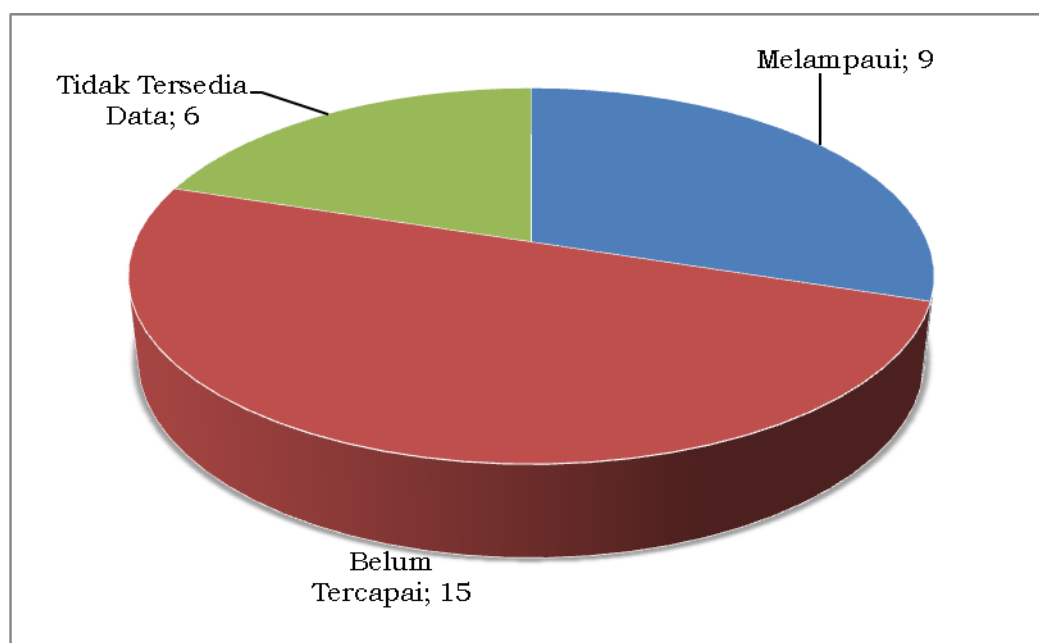
RKPD tahun 2020 yaitu 6,66 persen.

- d. Dalam setahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor meningkat menjadi 12,68 persen pada tahun 2020 dari 9,10 pada tahun sebelumnya. Angka ini masih berada di bawah target TPT pada dokumen RPJMD maupun RKPD Kota Bogor Tahun 2020 yang berkisar 8,47.
- e. Indeks gini Kota Bogor tahun 2019 mencapai 0,4 artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level sedang. Angka ini masih di bawah target indeks gini di RPJMD dan RKPD tahun 2019 yakni sebesar 0,31. Nilai Gini Ratio mengalami penurunan yakni dari 0,41 menjadi 0,40. Pada tahun 2020, BPS belum merilis angka gini ratio.
- f. Persentase penduduk miskin di Kota Bogor tahun 2020 sebesar 6,68. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, maka persentase penduduk miskin Kota Bogor tahun 2020 meningkat sebesar 0,91 dari 5,77 persen.

Selain capaian indikator makro pembangunan Kota Bogor, berikut ini juga disajikan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bogor tahun 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian IKU Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2020, dari 30 IKU terdapat 9 (sembilan) indikator (30 persen) yang melampaui target, 15 (lima belas) indikator (50 persen) yang belum tercapai, dan 6 (enam) indikator (20 persen) yang tidak ada tersedia data realisasinya sampai laporan ini disusun.

Gambar 2.4
Rekap Capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota
Bogor Tahun 2020



Sumber : Bappeda Kota Bogor

Lebih rinci mengenai target, realisasi dan tingkat capaian IKU Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bogor
Tahun 2020

No	Indikator	Satuan	2020		Tingkat Capain	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	AHH saat lahir	Tahun	73.69	73,61	99,89	IKU Pemerintah Daerah
2	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS(%)	%	68	66,30	97,5	IKU Pemerintah Daerah
3	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Angka	0.45	0,39	86,67	IKU Pemerintah Daerah
4	Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman (%)	%	93,15	81,46	87,45	IKU Pemerintah Daerah
5	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang aman (%)	%	67.47	70,90	105,08	IKU Pemerintah Daerah

No	Indikator	Satuan	2020		Tingkat Capain	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
6	Persentase Luasan kawasan kumuh kewenangan kota (%)	%	2,44	2,30	94,26	IKU Pemerintah Daerah
7	Persentase Reduksi Sampah	%	6.4	7,61	118,90	IKU Pemerintah Daerah
8	Indeks Kualitas Air	Angka	49.67	56,33	113,41	IKU Pemerintah Daerah
9	Indeks Kualitas Udara	Angka	85.9	80,09	93,23	IKU Pemerintah Daerah
10	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Publik (%)	%	10,98	6,12	55,74	IKU Pemerintah Daerah
11	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,63	10,33	97,18	IKU Pemerintah Daerah
12	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.6	13,41	98,60	IKU Pemerintah Daerah
13	Nilai rata -rata Ujian Nasional Tingkat SD	Angka	68.14	Tidak ada UN Tingkat SD Tahun 2020	NA	IKU Pemerintah Daerah
	Nilai rata -rata Ujian Nasional Tingkat SMP	Angka	58.3	Tidak ada UN Tingkat SMP Tahun 2020	NA	IKU Pemerintah Daerah
14	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56.31	Tidak dilaksanakan kegiatan perhitungan IPP Tahun 2020 karena <i>refocusing</i> anggaran akibat Covid-19	NA	IKU Pemerintah Daerah
15	Indeks Inovasi daerah	Angka	600-610	5.162	NA	IKU Pemerintah Daerah

No	Indikator	Satuan	2020		Tingkat Capain	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
16	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	69.5	68,91* (data tahun 2019; BPS belum mempublikasikan IPG Tahun 2020)	NA	IKU Pemerintah Daerah
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	70.5	Belum dianggarkan di Tahun Anggaran Reguler 2020 direncanakan disusulkan di ABT tetapi pada saat diusulkan anggaran di masukan ke BTT untuk penanganan Covid-19 - 19)	NA	IKU Pemerintah Daerah
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	B* (data tahun 2019; Belum ada hasil penilaian tahun 2020)	NA	IKU Pemerintah Daerah
19	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Integrative* (data tahun 2019)	NA	IKU Pemerintah Daerah
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.47	12,68	66.80	IKU Pemerintah Daerah
21	Angka Kemiskinan	%	5.8	6,68	86,83	IKU Pemerintah Daerah

No	Indikator	Satuan	2020		Tingkat Capaian	Keterangan
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
22	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	73-74	85,2	NA	
23	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,66	-0,53	-7,96	IKU Pemerintah Daerah
24	PDRB Per Kapita	Trilyun Rp	40,36	40,76*	1,01	IKU Pemerintah Daerah
25	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	11.124	11.564	103,95	IKU Pemerintah Daerah
26	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	21	19,11	91	IKU Pemerintah Daerah
27	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	20	48,7	243,5	IKU Pemerintah Daerah
28	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	20	92,5	462,5	IKU Pemerintah Daerah
29	Persentase Jalan Berkondisi Baik (%)	%	89	83,47	93,77	IKU Pemerintah Daerah
30	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum (%)	%	45	50	32	IKU Pemerintah Daerah



2.7 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

2.7.1 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2016.

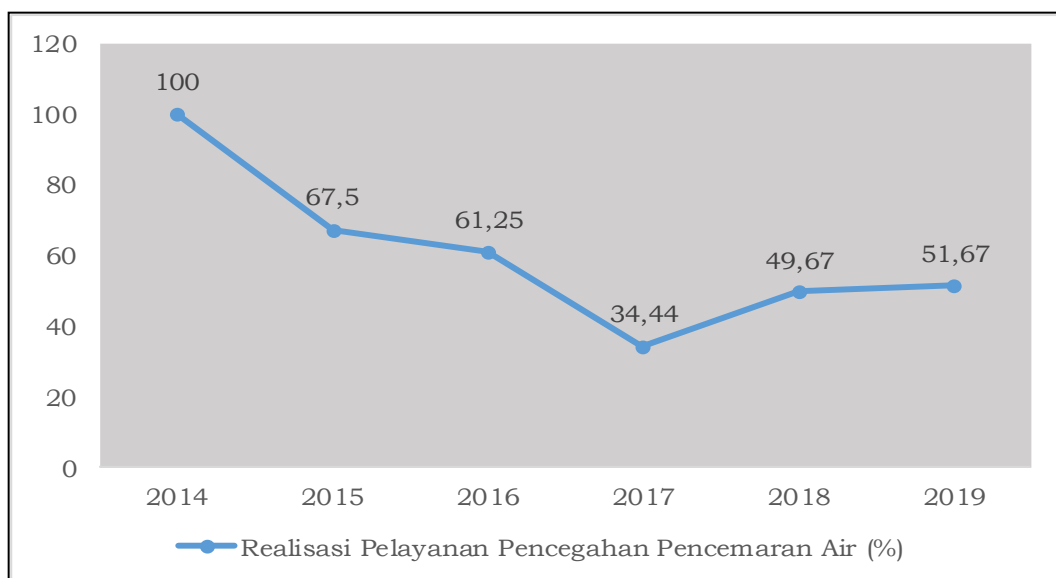
2.7.1.1 Lingkungan Hidup

Realisasi pencapaian SPM yang sudah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

A. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air.

Indikator SPM ini menunjukkan persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan air. Adapun realisasi pelayanan pencegahan pencemaran air 2014 sampai dengan Tahun 2019 sebagai berikut:

Grafik 2.54
Realisasi Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air 2014 - 2019



Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air pada tahun 2018 sebanyak 49,67%. Pada grafik dapat kita ketahui pula bahwa persentase pencapaian kinerja pada tahun 2019 terhadap indikator tingkat pemenuhan baku mutu kualitas limbah cair terealisasi sebesar 51,67%.

B. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tak bergerak.

Indikator SPM ini menunjukkan persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan udara dari sumber tak bergerak. Adapun realisasi pencapaian SPM sampai dengan Tahun 2019 sebagai berikut. Adapun realisasi pencapaian SPM dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut:

Grafik 2.55
Realisasi Pelayanan Pencemaran Udara dari Sumber Tak Bergerak Tahun 2014-2019



Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 2019, realisasi pelayanan pencemaran udara dari sumber tak bergerak terealisasi 100% sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 hal ini menunjukkan bahwa target yang dituju telah tercapai dengan baik dan konsisten dari tahun ke tahun.

Pengujian dan Analisa Kualitas Udara sumber tidak bergerak/cerobong dilakukan di 7 (tujuh) lokasi titik sampel di Kota Bogor dengan rincian lokasi pengambilan sampel.

Tabel 2.64
Lokasi Pengambilan Sampel Pengujian Kualitas Udara Sumber Tidak Bergerak

No	Lokasi	Jumlah Sample	Ket
1.	PT. Nutrifood Indonesia	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
2.	PT. Goodyear	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
3.	PT. Unitex	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
4.	PT. Coast Rejo	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
5.	PT. Boehringer Ingelheim	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
6.	PT. Astra Daihatsu	1 (Satu)	1 (Satu) Kali
7.	PT. Tanah Sumber Makmur	1 (Satu)	1 (Satu) Kali

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Hasil dari pengujian dan analisa udara dari sumber tidak bergerak bahwa Parameter kualitas udara emisi sumber tidak bergerak yang berasal dari cerobong seperti: NH₃, Cl₂, HCl, HF, NO₂, Opasitas, Partikel, SO₂, H₂S dan logam berat (Hg, As, Sb, Cd, Zn dan Pb) masih berada dibawah baku mutu sehingga masih tergolong dalam kategori baik.

C. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa.

Indikator SPM ini menunjukkan persentase luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan dibandingkan dengan luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. Adapun target dan realisasi pencapaian SPM dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 2.65
Realisasi Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan Dan Atau Tanah Untuk Produksi Biomassa 2014 - 2019

No	Jenis Layanan	Realisasi (%)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk prosuksi biomassa	0	0	100	10.58	26.21	97.01

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Berdasarkan pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2019 realisasi pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa tercapai sebanyak 97,01%. Dari data hasil analisa kesuburan tanah seluruh titik

sampling yang di lakukan pada berbagai peruntukan tanah di Kota Bogor dikategorikan subur. Hasil analisa logam berat potensial yang dianalisis, memperlihatkan hasil dari seluruh titik sampling yang dilakukan nilainya rendah. Mengacu pada PP RI No. 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa, berbagai indikator dari parameter yang dianalisa masih pada ambang batas yang diperkenankan. Hasil analisis tanah di Kota Bogor dari berbagai kriteria masih digolongkan baik, belum mengalami kerusakan. Namun kegiatan ini belum dapat menggambarkan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa, karena belum dapat dihitung luasan lahan yang telah rusak di daerah produksi biomassa. Kegiatan ini hanya mengukur tingkat pencemaran per titik lokasi.

2.7.2 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2017

2.7.2.1 PEKERJAAN UMUM

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pekerjaan Umum yakni (1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan (2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.66
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
Tahun 2017-2020

Pelayanan Dasar	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90,55%	91,98%	92,75%	81,46%
- Non Perpipaan	1,82%	NA	NA	4,32
- Perpipaan (Perumda Tirta Pakuan)	88,73%	NA	NA	77,14
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	72,1%	67,21%	69,12%	74,70%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum sampai dengan tahun 2018 dapat terealisasi sebesar 91,98% dari target sebesar 94,62%. Sampai dengan tahun 2018 penduduk Kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan Oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sebanyak 1.064.362 jiwa. Di samping itu terdapat penduduk di wilayah Kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan Kabupaten Bogor sebanyak 91.116 jiwa. Begitu pula sebaliknya, terdapat penduduk wilayah Kabupaten Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan Kota Bogor sebanyak 17.375 jiwa. Sehingga total penduduk Kota Bogor yang telah terlayani air bersih jaringan perpipaan mencapai 1.064.362 jiwa atau sebesar 91,98% dari total proyeksi jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2018 sebanyak 1.124.539 jiwa. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tertinggi pada tahun 2019 sebesar 92,75% dan terendah pada tahun 2020 yakni sebesar 77,14%.

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Capaian Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik tahun 2018 diperoleh melalui SPALD-S (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik-Setempat) Individu didapatkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan dan menggunakan data untuk jumlah rumah yang memiliki jamban yang layak dengan asumsi sudah dilengkapi dengan tanki septik individual dengan memperhatikan standarisasi teknis secara detail, dimana jumlah tangki septik yang telah terdata sebanyak 141.886 Sambungan Rumah. SPALD-S (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik-Setempat) Komunal, berdasarkan data IPAL Komunal yang terbangun di Kota Bogor baik yang didanai dari APBD Kota maupun dana Bantuan IDB. Sampai tahun 2020 IPAL Komunal yang terbangun di Kota Bogor sebanyak 129 Unit yang melayani sebanyak 3.335 Sambungan Rumah (SR). SPALD-T (Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik-Terpusat) Skala Permukiman diwakili oleh jumlah Sambungan Rumah (SR) yang sudah tersambung ke IPAL Tegal Gundil, dimana sampai tahun 2018 telah tersambung sebanyak 422 Sambungan Rumah (SR). Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 74,70% dan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 67,21%.

A. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum sampai dengan tahun 2017 dapat terealisasi sebesar 90,55% dari target sebesar 90,03%. Capaian tersebut diperoleh melalui pelayanan air bersih non perpipaan sebesar 1,82% dan perpipaan sebesar 88,73%. Pelayanan air bersih melalui jaringan non perpipaan merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pembangunan infrastruktur jaringan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum terlayani air minum jaringan perpipaan dari Perumda Tirta Pakuan. Pembangunan infrastruktur jaringan air bersih sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 19.332 SR, dimana 67 SR merupakan hasil pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 yang berlokasi di Kelurahan Cimahpar dan Kelurahan Kencana.

Sedangkan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan merupakan hasil pelayanan yang dilaksanakan oleh Perumda Tirta Pakuan. Sampai dengan tahun 2017 penduduk Kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan Kota Bogor sebanyak 900.862 jiwa. Di samping itu terdapat penduduk di wilayah Kota Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan Kabupaten Bogor sebanyak 91.116 jiwa. Begitu pula sebaliknya, terdapat penduduk wilayah Kabupaten Bogor yang terlayani air bersih jaringan perpipaan Kota Bogor sebanyak 17.375 jiwa. Sehingga total penduduk Kota Bogor yang telah terlayani air bersih jaringan perpipaan mencapai 974.603 jiwa atau sebesar 88,73% dari total proyeksi jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2017 sebanyak 1.098.397 jiwa. Upaya yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 dalam rangka peningkatan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan diantaranya penanganan produksi dan penanganan distribusi.

Penanganan produksi dilakukan diantaranya melalui penambahan kapasitas produksi di instalasi pengolahan air Dekeng 1 dan 2; pengadaan dan pemasangan meter induk produksi; penanganan permasalahan sampah melalui pemasangan screen sampah; serta pengadaan IPA Portabel di Kota Batu dengan kapasitas 30 liter/detik. Sedangkan penanganan distribusi dilakukan diantaranya melalui penggantian meter induk distribusi; pemasangan alat level control di Reservoir; pengadaan Air Valve dan Reservoir Portabel; pembentukan Distric Metering Area (DMA); serta pemasangan Tangki Hydrant Umum (TAHU).

Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih/air minum sampai dengan tahun 2018 dapat terealisasi sebesar 91,98% dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar 92,75%. Pada tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 81,46%. Capaian tersebut diperoleh melalui pelayanan air bersih non perpipaan sebesar 4,32% dan perpipaan sebesar 77,14%.

B. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota dapat terealisasi sebesar 72,1% dari target sebesar 67%. Data tersebut diperoleh dari jumlah rumah tangga yang memiliki sarana jamban (*septic tank*) sampai dengan tahun 2017 mencapai 185.214 SR, dan 133.534 diantaranya telah terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota. Sistem jaringan dan pengolahan air limbah diselenggarakan melalui 3 sistem yakni sistem onsite individual, sistem komunal, serta sistem intermediate. Pengolahan air limbah domestik melalui sistem onsite (setempat) yaitu pelayanan penyedotan lumpur tinja dengan menggunakan sistem pelayanan on call (berdasarkan permintaan/kebutuhan masyarakat), dimana pada tahun 2017 telah terlayani sebanyak 130.565 SR. Sarana penyedotan lumpur tinja yang dioperasikan adalah 4 unit vacum truk tinja dengan kapasitas 2-3 m³, 2 unit motor tanki dengan kapasitas 0,4 m³, serta 1 unit bus toilet. Lumpur tinja hasil penyedotan dari *septic tank* diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tegal Gundil, untuk kemudian dilakukan pengujian kualitas effluent air limbah sebagai audit internal di laboratorium UPTD Pengolahan Air Limbah sehingga memenuhi ketentuan baku mutu air limbah domestik.

Pengolahan air limbah domestik melalui sistem komunal merupakan sistem pengolahan berbasis masyarakat dimana pelaksanaannya yang dimulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi dilaksanakan oleh masyarakat dengan dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Pada tahun 2017 telah dilakukan pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis komunal sebanyak 855 SR di 14 lokasi, dimana pembiayaannya bersumber dari Islamic Development Bank (IDB) melalui APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan demikian apabila dikumulatifkan sampai dengan tahun 2017

telah terbangun infrastuktur pengolahan air limbah berbasis komunal sebanyak 2.547 SR.

Sedangkan sistem pengolahan air limbah domestik intermediate (terpusat) yaitu pelayanan perpipaan air limbah untuk sambungan rumah yang dikumpulkan dan dialirkan dengan sistem pemompaan dan gravitasi untuk kemudian diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tegal Gundil. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan penambahan cakupan wilayah pelayanan berupa penyediaan jaringan perpipaan air limbah, sambungan rumah, dan bangunan pelengkap pada sistem intermediate sebanyak 16 SR. Sehingga apabila dikumulatifkan sampai dengan tahun 2017 pelayanan air limbah domestik melalui sistem intermediate telah mencapai 422 SR. Cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota tertinggi pada tahun 2020 sebesar 74,70% dan terendah pada tahun 2018 terealisasi sebesar 67,21%.

2.7.2.2 PERUMAHAN RAKYAT

SPM Bidang Perumahan Rakyat yakni (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan (2) penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Perumahan Rakyat yakni (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan (2) penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.67
Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat

Pelayanan Dasar	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	100%	100%	100%
2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota	100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

Tahun 2017 terdapat 2 KK yang menjadi korban bencana dengan 11 anggota keluarga. Pada tanggal 13 November 2017 korban bencana tersebut telah difasilitasi untuk menempati rumah susun milik Pemerintah Kota Bogor. Sehingga pada tahun 2017 kinerja pelayanan dasar ini mencapai 100%. Berdasarkan Tabel 2.64 tersebut dapat diketahui bahwa pada layanan dasar tersebut pada tahun 2017 hingga tahun 2020 telah mencapai target yaitu sebesar 100%.

B. Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota

Pada tahun 2017 terdapat 1 KK yang terkena relokasi akibat program pemerintah kota dan telah difasilitasi untuk menempati 2 unit hunian di rumah susun milik Pemerintah Kota Bogor. Sehingga pada tahun 2017 kinerja pelayanan dasar ini mencapai 0,68%. Sedangkan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 telah mencapai target yaitu sebesar 100%.

2.7.2.3 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yakni (1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; (2) pelayanan informasi rawan bencana; (3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan (5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Namun dikarenakan terdapat kesulitan dalam mengintegrasikan kelima jenis pelayanan dasar tersebut, maka dalam laporan ini masih menjelaskan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, dimana terdapat dua pelayanan dasar yang masih terkait yakni (1) pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan (2) penanggulangan bencana

kebakaran. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah :

Tabel 2.67
Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Pelayanan Dasar	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	1. Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat					
	a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	-	78,95%	90%	96%	96%
	b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	-	100%	100%	100%	100%
	c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	-	100%	100%	100%	100%
2	2. Penanggulangan bencana kebakaran					
	a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran	-	125%	100%	100%	100%
	b. Tingkat waktu tanggap	-	95%	95%	75%	90%
	c. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	-	54%	52%	58%	58%
	d. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK	-	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	-	-	100%	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan Bencana	-	-	100%	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	100%	100%	100%

No	Pelayanan Dasar	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	-	100%	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	-	100%	100%	100%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Adapun penjelasan capaian kelima jenis pelayanan dasar tersebut selama tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
 - a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Pada tahun 2016 jumlah pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau sebanyak 152 kasus. Dari total kasus tersebut, 78,95% atau 120 kasus dapat diselesaikan dan sampai tahun 2020 telah mencapai target yaitu sebesar 100%.
 - b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan masyarakat.
Pada tahun 2016 terdapat masing-masing 1 kelompok di 6 kecamatan. Seluruh kelompok tersebut melakukan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebanyak 3 kali/hari, sesuai dengan target SPM yang ditetapkan. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020 target telah tercapai hingga 100% dalam 3 tahun berturut-turut.
 - c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat
Sampai dengan tahun 2017 terdapat 3.739 orang petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dan 3.563 RT di wilayah Kota Bogor. Sehingga setiap RT memiliki minimal 1 orang petugas Linmas. Jumlah tersebut telah sesuai dengan target SPM. Berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 target yang telah tercapai adalah 100%.

2. Penanggulangan bencana kebakaran

a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Luas Kota Bogor adalah 11.138 ha, dan seluruhnya termasuk ke dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Capaian tertinggi pada tahun 2017 tersebut telah melebihi target SPM yang hanya sebesar 80%.

b. Tingkat waktu tanggap

Sepanjang tahun 2017 terjadi kasus kebakaran di WMK sebanyak 28 kejadian, dan 20 kejadian diantaranya (71,43%) dapat ditangani dalam waktu tanggap. Sehingga untuk pelayanan dasar ini baru mencapai 95% dari target SPM sebesar 75%. Capaian target pada tahun 2017 adalah capaian tertinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018, 2019 dan tahun 2020.

c. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi.

Pemerintah Kota Bogor memiliki 72 orang aparatur pemadam kebakaran, namun baru 33 orang (45,83%) diantaranya yang telah memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi. Capaian tersebut baru sebesar 54% dari target SPM dimana minimal 85% aparatur pemadam kebakaran harus memenuhi standar kualifikasi. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 58%.

d. Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK

Untuk capaian terkait jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 – 5000 liter pada WMK, data menunjukkan bahwa capaian telah melebihi 100%, yakni mencapai 167% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018, 2019, 2020 realisasi capaian 100%.

3. Jenis pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor terdiri dari

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

Jenis pelayanan ini memiliki indikator jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda, selama tahun 2018, 2019 dan 2020 telah realisasi capaian 100%.

- b. Pelayanan informasi rawan bencana.
Jenis pelayanan ini memiliki indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana realisasi capaian 100%.
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
Jenis pelayanan ini memiliki indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana realisasi capaian 100%.
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Jenis pelayanan ini memiliki indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana realisasi capaian 100%.
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
Jenis pelayanan ini memiliki indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran realisasi capaian 100%.

2.7.3 PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL (SPM) TAHUN 2018

2.7.3.1 PENDIDIKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis layanan dasar tersebut adalah (1) pendidikan anak usia dini; (2) pendidikan dasar; dan (3) pendidikan kesetaraan. Capaian kinerja ketiga jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.69
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

No.	Pelayanan Dasar	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pendidikan Anak Usia Dini	-	-	-	48,45%	49,66%	51,09%
2	Pendidikan Dasar	-	-	-	106,10 %	122,65%	101,29%
3	Pendidikan Kesetaraan	-	-	-	1,61%	1,42%	0,7%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Capaian pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bogor tiga tahun terakhir terus meningkat, dengan indikator jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Hal ini disebabkan kenaikan APK PAUD, dikarenakan masyarakat sudah memahami akan pendidikan Anak pada Usia Dini.

b. Pendidikan Dasar

Jenis pelayanan ini memiliki indikator jumlah warga Kota Bogor usia 7 s.d. 15 tahun yang mendapatkan pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan di Kota Bogor. Realisasi capaian melampaui 100% dikarenakan tidak sedikit warga usia 7 s.d. 15 tahun yang bersekolah di Bogor berasal dari luar Kota Bogor.

c. Pendidikan Kesetaraan

Jenis pelayanan dasar ini memiliki indikator Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Tahun 2020 realisasi capaian menurun, disebabkan adanya penurunan warga belajar di non-formal.

2.7.3.2 KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat dua belas jenis layanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Bogor terkait pelayanan dasar yang menjadi SPM tersebut sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 2.70
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

Pelayanan Dasar	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
a. Pelayanan kesehatan ibu hamil	-	-	50,76%	99,60%	100,3%	93,6%
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	-	-	49,98%	96,05%	99,1%	93,1%
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	-	55,85%	100,70%	103,5%	96,6%
d. Pelayanan kesehatan balita	-	-	59,72%	90,10%	100%	78,8%
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	-	-	75,65%	100%	100%	51%
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	-	-	11,01%	100%	78,67%	18,8%
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	-	-	72,45%	100%	100%	60,2%
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	-	-	19,81%	100%	69,8%	68,8%
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	-	-	26,08%	100%	102,91%	88,5%
j. Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat	-	-	63,96%	100%	89,2%	88,4%
k. Pelayanan kesehatan orang dengan TB	-	-	100%	100%	110,8%	104,1%
l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	-	-	89%	96,00%	86,38%	95,7%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2018 belum memenuhi target disebabkan pada saat hamil ibu sudah memiliki penyakit lain sehingga terjadi komplikasi hingga kematian. Pencegahan komplikasi penyakit penyerta pada ibu hamil harus dilakukan dengan meningkatkan program KB pada wanita usia subur yang menderita penyakit penyerta untuk mencegah atau

menunda kehamilan pada wanita tersebut. Upaya lain yang harus dilakukan adalah deteksi dini dan penanganan penyakit penyerta melalui pelayanan Antenatal Care Terpadu sesuai standar yang melibatkan disiplin medis lainnya, sehingga dapat melakukan penatalaksanaan yang baik untuk penyakit penyertanya. Setelah tahun 2019 bisa mencapai target, tahun 2020 capaian turun menjadi 93,60%, diantaranya karena pelayanan posyandu tidak ada dan banyak ibu hamil takut untuk datang ke fasilitas kesehatan karena kondisi pandemi.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Tahun 2018 pelayanan kesehatan ibu bersalin tercapai sebesar 96,05%, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan deteksi dini dan penanganan komplikasi kebidanan, termasuk penanganan kegawatdaruratan kebidanan, tindakan pra rujukan, rujukan efektif dan penanganan di faskes rujukan termasuk fasilitas perawatan intensif (ICU). Setelah capaian meningkat di tahun 2019, tahun 2020 mengalami penurunan. Beberapa penyebab karena posyandu tidak ada di masa pandemi, beberapa program pendampingan juga tidak dapat dilaksanakan.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.

Seperti pada dua layanan dasar sebelumnya, pelayanan kesehatan bayi baru lahir juga mengalami penurunan capaian di tahun 2020, setelah di tahun-tahun sebelumnya meningkat. Tidak adanya posyandu, tidak maksimalnya kegiatan pelatihan dan pendampingan, serta kelas ASI yang juga tidak dapat dilaksanakan.

d. Pelayanan Kesehatan Balita.

Pelayanan kesehatan balita capaiannya terus meningkat di tahun 2019, diantaranya karena beberapa upaya seperti peningkatan kapasitas guru TK dan PAUD dan peningkatan pelayanan imunisasi dasar lanjutan dengan meningkatkan sweeping imunisasi, juga didukung dengan kegiatan bulan pemantauan tumbuh kembang balita. Tidak adanya posyandu dan kelas ibu balita di masa pandemi cukup mempengaruhi capaian kinerja di tahun 2020, selain itu banyak ibu yang takut membawa balitanya ke fasilitas kesehatan selama pandemi.

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar.

Tahun 2020 capaian pelayanan dasar ini mengalami penurunan yang cukup besar. Tidak adanya pembelajaran tatap muka

selama pandemi menyulitkan petugas kesehatan untuk melakukan skrining. Upaya penjangkaran secara online belum maksimal.

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif.

Capaian kinerja pada pelayanan dasar ini turun cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini karena saat pandemi Posbindu PTM tidak dapat dilakukan, kegiatan skrining hanya dapat dilakukan di puskesmas, serta beberapa kegiatan yang mendukung tidak dapat dilaksanakan.

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut.

Capaian pelayanan kesehatan pada usia Lanjut tahun 2018 dan 2019 adalah sebesar 100%, dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Selama pandemi, banyak masyarakat terutama lansia takut berkunjung ke fasilitas kesehatan, kegiatan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan juga terbatas untuk kondisi darurat.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.

Tidak dapat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan layanan dasar ini, SDM puskesmas yang terbatas, beberapa kegiatan yang mendukung tidak dapat dilaksanakan, dan kondisi masyarakat yang enggan datang ke fasilitas kesehatan selama pandemi adalah beberapa hal yang menyebabkan turunnya capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di tahun 2020 menurun. Faktor penyebabnya sama seperti pelayanan dasar sebelumnya, yaitu SDM puskesmas yang terbatas, beberapa kegiatan yang mendukung tidak dapat dilaksanakan, dan kondisi masyarakat yang enggan datang ke fasilitas kesehatan selama pandemi.

j. Upaya Kesehatan Jiwa Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat.

Permasalahan disebabkan tidak tercapainya target kinerja terutama di tahun 2020 diantaranya, kondisi pandemi Covid-19 membuat kegiatan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan sementara ditiadakan, kecuali untuk kondisi darurat. Pelayanan Pasien ODGJ di masa pandemi hanya dilakukan di puskesmas, serta jumlah kunjungan untuk kontrol/terapi obat bagi beberapa

pasien menjadi kurang teratur, sehingga menyebabkan kondisi kekambuhan kembali atau putus obat.

k. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB.

Capaian kinerja pelayanan kesehatan orang dengan TB memenuhi target selama tiga tahun berturut-turut. Tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, namun tetap mencapai target kinerja.

1. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi HIV. Capaian kinerja selama tiga tahun ini cenderung meningkat, namun belum sesuai dengan target yang ditentukan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan:

- 1) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan HIV.
- 2) Masih terdapat stigma dan diskriminasi di masyarakat tentang HIV.
- 3) Masih banyak Rumah Sakit di Kota Bogor yang belum membuka layanan HIV, dan belum semua faskes melakukan input data pasien secara mandiri.
- 4) Sulit untuk menjangkau sasaran pada populasi kunci.
- 5) Pasien belum siap untuk minum obat Anti Retro Viral (ARV) karena pengetahuan klien terhadap ARV belum optimal.

2.7.3.3 SOSIAL

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdapat lima jenis pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor. Lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Sosial yakni: (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana. Capaian kinerja kedua jenis pelayanan dasar tersebut tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.71
Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial

No	Pelayanan Dasar	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	-	-	87,56%	22%	17,52%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantardi luar panti	-	-	100%	18,05%	36,70%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	-	-	100%	31,94%	32,36%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	-	-	100%	21,53%	55,72%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	-	-	96,10%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Adapun penjelasan capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut adalah sebagai berikut.

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.

Tahun 2017, Penyandang disabilitas yang terlantar sebanyak 193 orang, dan dari jumlah tersebut 169 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti (87,56%). Tahun 2018, Penyandang disabilitas yang terlantar sebanyak 970 orang, dan dari jumlah tersebut 212 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti (22%). Tahun 2019, Penyandang disabilitas yang terlantar sebanyak 1.010 orang, dan dari jumlah tersebut 177 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti (17,25%). Tahun 2020 jumlah penyandang disabilitas terlantar teridentifikasi pada tahun 2020 sebanyak 75 orang, dan semuanya mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial luar panti.



2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.

Tahun 2017 terdapat anak terlantar sebanyak 131 orang, seluruhnya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Pada tahun 2018 terdapat anak terlantar sebanyak 288 orang dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 52 orang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses pengangkatan 8 anak / adopsi. Tetapi dalam hal ini 5 anak belum selesai untuk prosesnya (masih dalam tahap persidangan). Dengan begitu capaian kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 18,05%. Tahun 2019 terdapat 395 orang anak terlantar, dan 145 orang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti (36,70%). Tahun 2020 terdapat anak terlantar sebanyak 61 orang, seluruhnya (100%) telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.

Pada tahun 2017 terdapat lanjut usia terlantar sebanyak 150 orang, dan seluruhnya mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Tahun 2018 terdapat lanjut usia terlantar sebanyak 313 orang dan telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 100 orang (31,94%). Pada tahun 2019, dari 309 orang lanjut usia terlantar di luar panti, 100 orang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti (32,36%). Pada tahun 2020 terdapat lanjut usia terlantar sebanyak 46 orang, dan seluruhnya mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

Selama tahun 2017 total jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 233 orang, dan seluruhnya telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Pada tahun 2018 terdapat tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 195 orang, dan yang telah mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sebanyak 42 orang (21,53%). Tahun 2019 ada 201 orang tuna sosial gelandangan dan pengemis, dan sebanyak 112 orang mendapatkan rehabilitasi (55,72%). Tahun 2020 terdapat tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis sebanyak 86 orang, seluruhnya telah dibina berupa *assessment* awal.

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Tahun 2017 terdapat 7000 orang korban bencana, dan 6727 orang diantaranya (96,10%) telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana. Tahun 2018 terdapat 7.029 orang korban bencana, tahun 2019 terdapat 3.523 orang, dan tahun 2020 jumlah korban bencana alam sebanyak 1.040 orang, seluruhnya terpenuhi kebutuhan dasarnya.

2.8 CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) KOTA BOGOR

Implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 *goals* dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jumlah Indikator TPB berdasarkan Urusan dan Kewenangannya 319 indikator dan pembagian Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi :

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222

Selain wewenang, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah: (1) kekhususan indikator, (2) kondisi geografis, (3) dan ketentuan indikator RPJMD. Kota Bogor telah mulai melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS.
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB.
3. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA.

A. Pelaksanaan TPB Di Kota Bogor

Secara umum terdapat sekitar 84,62% dari 208 indikator TPB yang relevan untuk Kota Bogor yang telah diisi. Sementara 15,38% sisanya belum dapat diisi karena tidak tersedianya data. Dari banyak Indikator TPB yang menjadi kewenangan pemerintah kota telah dilaksanakan oleh Kota Bogor sebanyak 208 indikator, dimana 138 indikator atau sekitar 66,35% telah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017. Sedangkan 38 indikator atau sekitar 18,27% sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, dan 32 indikator atau 15,38% belum ada datanya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan TPB setidaknya indikator yang sudah diisi dan mencapai target masih lebih banyak dibandingkan dengan indikator yang belum mencapai target dan tidak terisi. Hal ini juga menunjukkan perkembangan yang baik perihal capaian dan ketersediaan data SDGs dari penyusunan KLHS RPJMD yang dilakukan sebelumnya. Dimana pada tahun penyusunan yang dilakukan tahun 2019, terdapat sekitar 54,81% dari 208 indikator TPB yang relevan untuk Kota Bogor yang telah diisi. Sementara 45,19% sisanya belum dapat diisi karena tidak tersedianya data. Untuk lebih jelas persentase capaian TPB dapat dilihat pada **Grafik 2.55**

Grafik 2.56
Proporsi Capaian TPB Kota Bogor Tahun 2019



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor (2019)

Gafik 2.57
Proporsi Capaian TPB Kota Bogor Tahun 2021

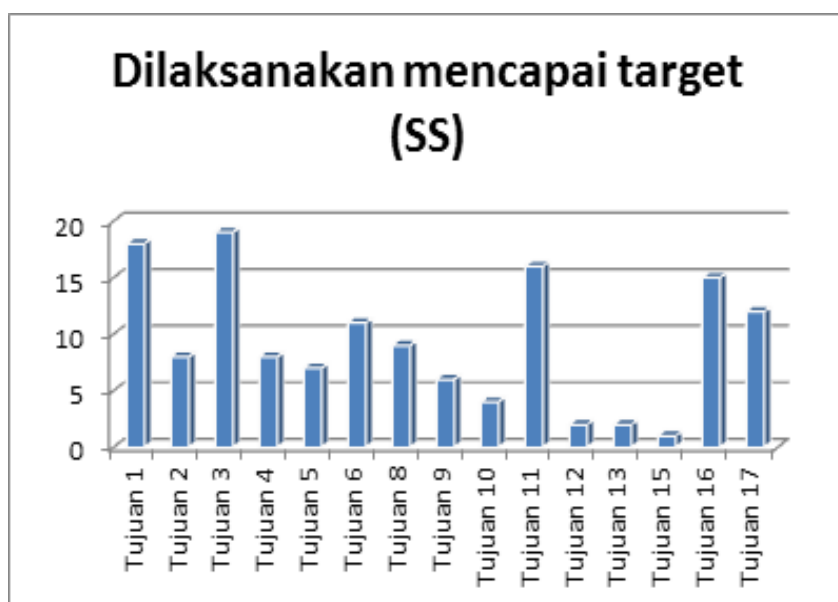


Sumber: Hasil analisis, 2021

1. Target TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 138 indikator atau 66,35 % dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan pemerintah kabupaten. Berikut grafik indikator capaian masing-masing tujuan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target.

Grafik 2.58
Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai (SS)

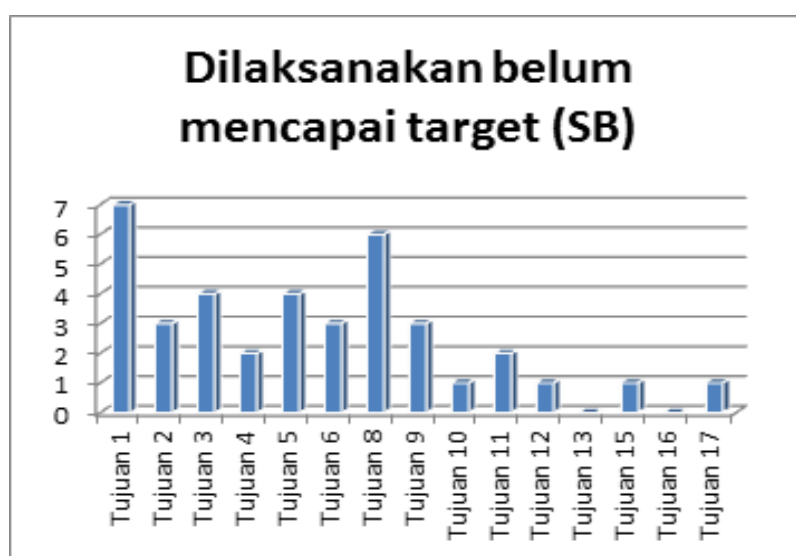


Sumber: Hasil analisis, 2021

2. Target TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 38 indikator atau 18,27% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan Kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian TPB kategori sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) Kota Bogor dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Grafik 2.59
Capaian TPB Kategori Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target (SB)

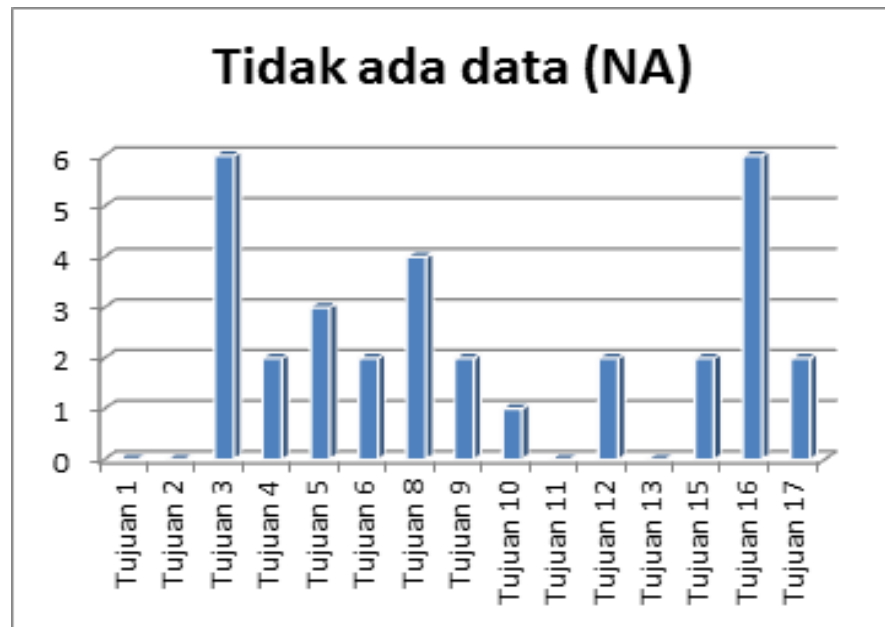


Sumber: Hasil analisis, 2021

3. Target TPB yang belum ada data (NA)

Indikator ini tidak ada data yang dapat mendukung penjelasan capaiannya. Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 32 indikator atau 15,38 % dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan pemerintah Kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai target TPB yang belum ada data (NA) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 2.60
Capaian TPB Kategori Tidak Ada Data (NA)



Sumber: Hasil analisis, 2021

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kota Bogor terhadap target nasional, maka terdapat 208 TPB yang memiliki indikator yang di analisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai terbanyak yaitu:

- Tujuan 01 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun dengan total indikator yang dinilai sebanyak 25 indikator dengan capaian yang telah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 18 indikator.
- Tujuan 02 yaitu Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan sebanyak 11 indikator dan sebanyak 8 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target.
- Untuk tujuan 14 yaitu konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera, dan maritim tidak relevan dengan kondisi geografis Kota Bogor.

Total indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB beserta dengan rincian masing-masing kelompok capaian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.72

Capaian TPB Kota Bogor terhadap Target Nasional

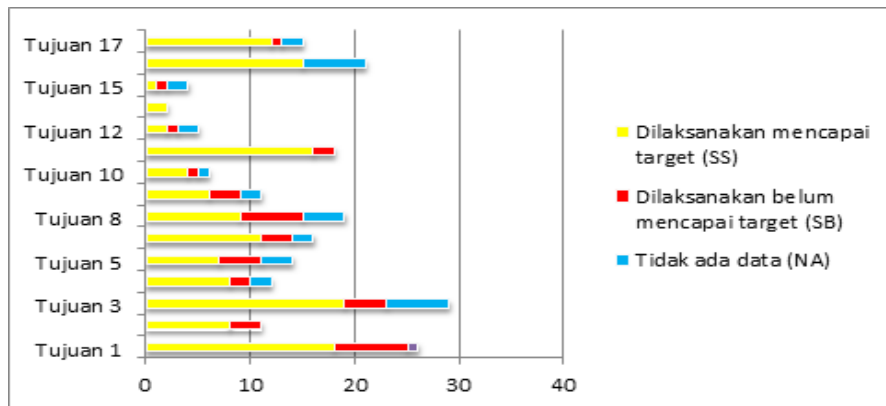
No	TPB	Jumlah Indikator	dilaksanakan mencapai target (SS)	dilaksanakan belum mencapai target (SB)	tidak ada data (NA)	Pilar
1	Tujuan 1	25	18	7	0	Sosial
2	Tujuan 2	11	8	3	0	Sosial
3	Tujuan 3	29	19	4	6	Sosial
4	Tujuan 4	12	8	2	2	Sosial
5	Tujuan 5	14	7	4	3	Sosial
6	Tujuan 6	16	11	3	2	Lingkungan
7	Tujuan 8	19	9	6	4	Ekonomi
8	Tujuan 9	11	6	3	2	Ekonomi
9	Tujuan 10	6	4	1	1	Ekonomi
10	Tujuan 11	18	16	2	0	Lingkungan
11	Tujuan 12	5	2	1	2	Lingkungan
12	Tujuan 13	2	2	0	0	Lingkungan
13	Tujuan 15	4	1	1	2	Lingkungan
14	Tujuan 16	21	15	0	6	Hukum & Tata Kelola
15	Tujuan 17	15	12	1	2	Ekonomi
Total		208	138	38	32	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Indikator TPB Kota Bogor yang telah mencapai target nasional paling banyak adalah tujuan TPB 01 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun) dengan jumlah indikator yang mencapai target nasional 18 dari 25 indikator, TPB 02 (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan) dengan jumlah 8 indikator yang mencapai target dari 11 indikator, Pencapaian target Nasional paling banyak selanjutnya pada tujuan TPB 11 (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan) dengan jumlah 16 indikator dari 18 indikator, dan Pencapaian target nasional paling banyak selanjutnya pada tujuan TPB 17 (Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan) dengan jumlah 12 indikator dari 15 indikator. Indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbesar dan masih belum diketahui gapnya dengan jumlah terbanyak terdapat di TPB 08 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua) dengan jumlah 6 indikator dari 19 indikator. Disisi lain,

terdapat indikator TPB yang hanya memiliki kriteria tidak adanya data (N/A), yakni TPB 15 (Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati) dengan jumlah 2 indikator dari 4 indikator, selanjutnya TPB 12 (Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan) dengan jumlah 2 indikator dari 5 indikator. Total pencapaian indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB beserta dengan rincian masing-masing kelompok capaian disajikan pada **Grafik 2.61**

Grafik 2.61
Capaian TPB Setiap Tujuan Kota Bogor

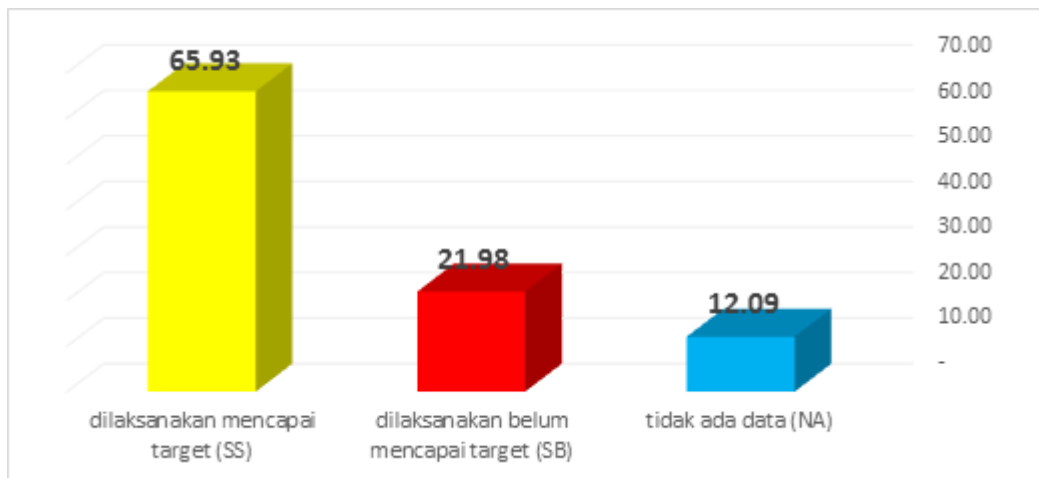


Sumber: Hasil analisis, 2021

1. Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 01, TPB 02, TPB 03, TPB 04, dan TPB 05. Total indikator untuk pilar sosial adalah sebanyak 91 indikator. persentase capaian indikator pilar sosial disajikan pada **Grafik 2.62** Dari total 91 indikator pilar sosial, terdapat 60 indikator atau 65,93% telah mencapai target, 20 indikator atau 21,98% belum mencapai target, dan 11 indikator atau 12,09% tidak ada data.

Grafik 2.62
Persentase status ketercapaian TPB Pilar Sosial

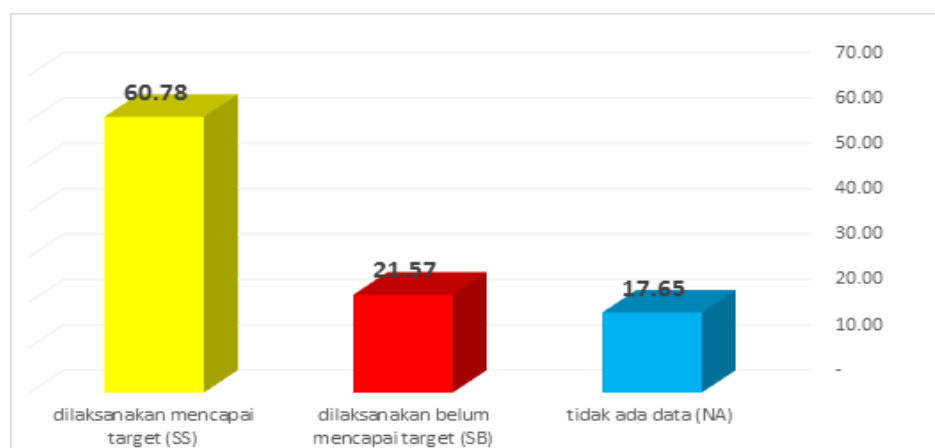


Sumber: Hasil analisis, 2021

2. Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 08, TPB 09, TPB 10 dan TPB 17. Total indikator untuk pilar ekonomi adalah sebanyak 51 indikator. persentase capaian indikator pilar ekonomi disajikan pada **Grafik 2.62** Dari total 51 indikator, terdapat 31 indikator atau 60,78% telah mencapai target, 11 indikator atau 21,57% belum mencapai target, dan 9 indikator atau 17,65% tidak ada data.

Grafik 2.63
Persentase status ketercapaian TPB Pilar Ekonomi



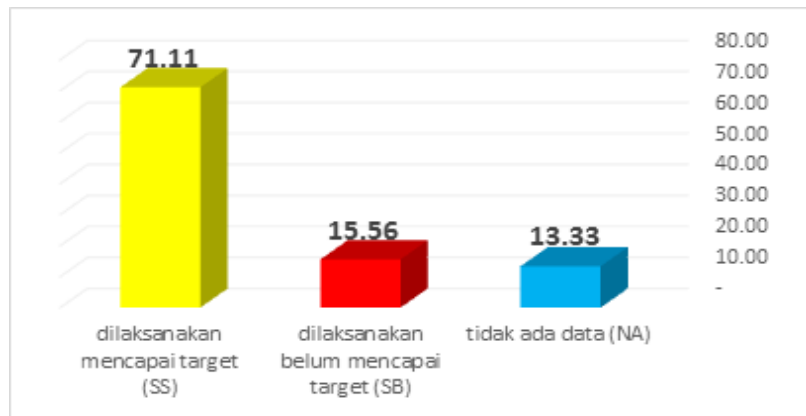
Sumber: Hasil analisis, 2021

3. Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan hidup mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 06, TPB 11, TPB 12, TPB 13, dan TPB

15. Total indikator untuk pilar lingkungan hidup adalah sebanyak 45 indikator. persentase capaian indikator pilar lingkungan hidup disajikan pada **Grafik 2.64** Dari total 45 indikator pilar lingkungan, terdapat 32 indikator atau 71,11% telah mencapai target, 7 indikator atau 15,56% belum mencapai target, dan 6 indikator atau 13,33% tidak ada data.

Grafik 2.64
Persentase status ketercapaian TPB Pilar Lingkungan

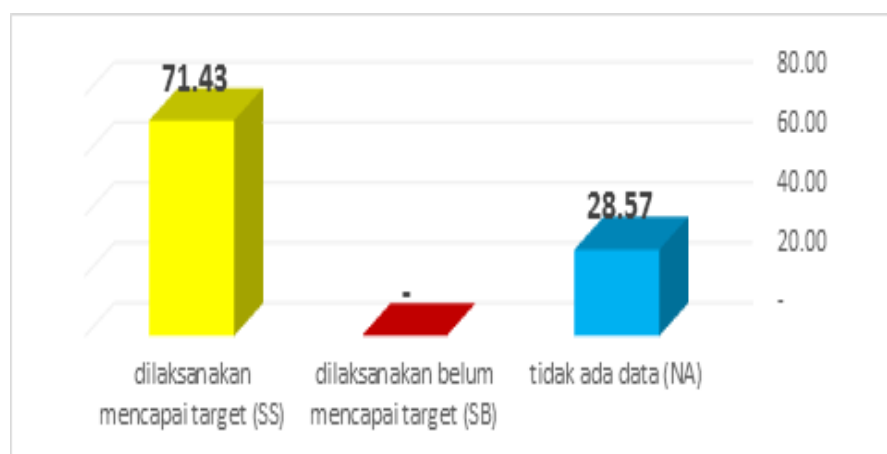


Sumber: Hasil analisis, 2021

4. Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah Pilar Hukum Dan Tata Kelola

Pilar Hukum dan Tata Kelola mencakup satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu TPB 16. Total indikator untuk pilar hukum dan tata kelola adalah sebanyak 21 indikator. persentase capaian indikator pilar hukum dan tata kelola disajikan pada **Grafik 2.65** Dari total 21 indikator, terdapat 15 indikator atau 71,43% telah mencapai target, 0 indikator atau tidak ada indikator yang belum mencapai target, dan 6 indikator atau 28,57% tidak ada data.

Grafik 2.65
Persentase status ketercapaian TPB Pilar Hukum dan tata Kelola



Sumber: Hasil analisis, 2021

2.9 PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

2.9.1 PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KOTA BOGOR

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor (Perumda BPR Bank Kota Bogor) adalah salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kota Bogor (BUMD) yang bergerak dibidang perbankan yang sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (PD BPR Bank Pasar Kota Bogor) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat Nomor KEP-66/KR.02/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PD. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor Menjadi Izin Usaha Atas Nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor.

Adapun tujuan pendirian Perumda BPR Bank Kota Bogor adalah untuk menyelenggarakan pelayanan dalam bidang jasa perbankan kepada masyarakat (PNS, Karyawan, Pensiunan, UMKM) yang berada di wilayah Kota Bogor, selain itu memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperoleh laba atau keuntungan.

Lembaga ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perkembangan usaha Perumda BPR Bank Kota Bogor saat ini telah menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup baik, Secara garis besar dapat digambarkan pada Tabel sebagai berikut :



Tabel 2.73
Perkembangan Usaha Perumda BPR Bank Kota Bogor

Perkiraan	(dalam Ribuan Rupiah)				
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Volume Usaha	122.787.107	140.636.496	162.190.734	179.704.138	189.029.147
Kredit yang Diberikan	88.524.475	105.050.527	111.137.016	132.452.393	139.510.271
Saldo Tabungan	24.801.825	33.696.929	37.901.882	45.519.653	45.923.144
Saldo Deposito Berjangka	25.307.800	23.306.100	34.988.842	36.150.300	44.175.800
Saldo Antar Bank Pasiva	4.200.000	4.500.000	500.000	2.500.000	4.000.000
Modal disetor	30.000.000	39.300.000	39.300.000	54.000.000	54.000.000
Pinjaman yang Diterima	15.788.983	13.041.674	9.750.000	8.750.000	5.750.000
Pendapatan Operasional	25.702.822	23.944.789	28.206.077	36.097.427	35.505.146
Beban Operasional	15.978.497	13.276.608	16.672.697	24.174.370	23.732.156
Pendapatan Non Operasional	169.106	147.768	145.872	207.239	276.836
Beban Non Operasional	114.068	138.623	399.069	51.606	286.732
Laba Sebelum Pajak	9.779.363	10.677.325	11.280.184	12.078.691	11.763.094
Taksiran Pajak Badan Ps. 25	2.311.117	2.547.692	2.838.959	3.276.695	2.608.764
Laba Setelah Pajak	7.468.246	8.129.633	8.441.225	8.801.996	9.154.330
Bagian Laba Pemda	2.668.331	3.734.123	4.064.817	4.220.613	4.400.998

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Perumda BPR Bank Kota Bogor pada tahun buku 2021 telah bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik “Sabar & Rekan”. Pada Audit atas laporan Keuangan Tahun Buku 2020 Perumda BPR Bank Kota Bogor, Kantor Akuntan Publik memberikan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Sebagai indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian kinerja keuangan, disajikan dalam bentuk data Rasio Tingkat Kesehatan Bank. Dengan memperhatikan target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, maka pencapaian Rasio Tingkat Kesehatan Perumda BPR Bank Kota Bogor tahun 2020 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.74
Tingkat Kesehatan Bank

RASIO	Satuan	Standar BI	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020
CAR	%	≥ 8	54,99	56,52
KAP	%	≤ 10,35	1,58	2,47
PPAP	%	≥ 81,0	100,00	100,00
ROA	%	≥ 1,215	6,73	6,55
BOPO	%	≤ 93,52	68,12	68,80
LDR	%	≤ 94,75	87,00	79,46
Cash Ratio	%	≥ 4,05	17,37	31,33
Non Performing Loan (Gross)	%	-	2,16	3,81
Non Performing Loan (Net)	%	-	0,57	1,15

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Dari data di atas dapat diketahui bahwa rasio Tingkat Kesehatan Perumda BPR Bank Kota Bogor masih dalam ambang batas standar rasio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga dengan demikian secara keseluruhan tingkat kesehatan Perumda BPR Bank Kota Bogor masih dalam predikat “SEHAT”.

2.9.2 Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Pakuan Kota Bogor

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirta Pakuan Kota Bogor adalah salah satu Perusahaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor. Beberapa peraturan yang mendasari pembentukan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 1977 tanggal 31 Maret 1977, diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 28 April 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor. Dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
5. Peraturan WaliKota Bogor Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor; dan
6. Peraturan WaliKota Bogor Nomor 25 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor.

Potensi pengembangan yang dapat dikelola dan yang telah dikelola oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, diantaranya :

a. Kapasitas Air Baku

Sumber air baku yang masih bisa diandalkan untuk penambahan kapasitas Produksi adalah sungai Cisadane.

b. Daerah Pelayanan

Daerah pelayanan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor meliputi wilayah Kota Bogor yang telah mengalami perluasan wilayah

pada tahun 1995 sehingga tanggung jawab Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor semakin bertambah. Dengan adanya perluasan wilayah tersebut, terdapat wilayah Kota Bogor yang dilayani oleh Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan jumlah layanan mencapai 15.186 SL atau 91.116 jiwa. Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor telah menjangkau enam wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Tengah, dan Kecamatan Tanah Sereal dengan jumlah pelanggan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 159.290 sambungan yang tersebar pada enam wilayah kecamatan terdiri dari kelompok Sosial, Kelompok Rumah Tangga, Instansi Pemerintah, Niaga, dan Industri.

Sumber mata air yang dikelola oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor telah mampu mengaliri ke zona-zona pelayanan air minum, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.75
Sumber Air Baku & Kapasitas Produksi Air Bersih
PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Tahun 2020

No.	Sumber	Lokasi	Tahun	Kapasitas (Liter/detik)			Keterangan
				Terpasang Awal	Terpasang Saat Ini	Produksi	
1	Mata Air	Kota Batu	1918	70	68,88	68,88	
2	Mata Air	Bantar Kambing	1969	170	156,47	156,47	
3	Mata Air	Tangkil	1974	170	110,34	110,34	
4	IPA	Cipaku 1 & 2	1988	120	NA	NA	
		Cipaku 3	1995	60	260,58	275,26	Mengoptimalkan IPA
		Cipaku 4	2003	60	NA	NA	
5	IPA	Dekeng 1	1997	600	NA	NA	
		Dekeng 1	2005	Up-Rating	962,03	915,67	
		Dekeng 1	2011	2 Unit Filter	NA	NA	
6	IPA	Dekeng II	2013	400	740,15	711,40	Mengoptimalkan IPA
7	Mata Air	Palasari	2008	30	13,50	13,50	
8	IPA	Palasari	2008	20	19,23	18,42	
9	IPA	Cikereteg	2015	40	37,52	36,47	
10	IPA	Katulampa	2018	300	264,23	251,99	
	Jumlah			2.040	2.632,93	2.558,40	

Sumber : Laporan SPM

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa data sumber air baku dan kapasitas produksi air bersih Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor pada tahun 2020 dari berbagai sumber dan



berbagai lokasi, dalam kapasitas liter/detik sejak tahun 1918 hingga tahun 2020 telah didapatkan data bahwa terpasang awal sebanyak 2.040, sedangkan untuk data terpasang saat ini mencapai 2.486, dengan total produksi sebanyak 2.558,40.

Sedangkan untuk perkembangan jumlah pelanggan per kecamatan, secara umum total pengguna dari tujuh kecamatan di Kota Bogor dari tahun 2014 hingga 2020 terus mengalami peningkatan. Dimana jumlah pelanggan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 166.299 pelanggan, sedangkan jumlah pelanggan terendah terdapat pada tahun 2014 dengan total 129.312. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76
Perkembangan Jumlah Pelanggan Per Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kec. Bogor Utara	20.632	22.345	28.465	25.019	26.081	26.915	28.138
2	Kec. Bogor Selatan	24.145	26.150	16.141	30.030	30.838	31.887	32.307
3	Kec. Bogor Barat	22.880	25.015	20.200	27.950	29.256	29.912	30.685
4	Kec. Bogor Timur	13.996	15.246	23.521	16.975	17.257	17.525	17.850
5	Kec. Tanah Sareal	25.060	27.658	26.443	30.751	32.150	32.883	33.432
6	Kec. Bogor Tengah	19.727	20.052	29.377	20.458	20.627	20.743	20.710
7	Kab. Bogor	2.872	2.946	2.947	2.949	2.955	2.284	3.177
Jumlah Pelanggan Per Kecamatan		129.312	139.412	147.094	154.132	159.290	162.985	166.299

Sumber : Laporan SPM ; Data diolah dari SIPD

Tabel 2.77
Jumlah Pelanggan Per Golongan Tarif

No.	Jenis Golongan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
a.	Pelanggan Domestik						
	Rumah Tangga :						
	Rumah Tangga R1	1.526	1.498	1.472	186	180	180
	Rumah Tangga R2	17.190	21.239	23.814	22.727	17.428	14.530
	Rumah Tangga R3	41.700	43.188	44.113	46.357	51.347	55.073
	Rumah Tangga R4	27.235	28.051	30.020	32.691	35.199	36.438
	Rumah Tangga R5	20.529	21.088	21.728	23.047	23.743	24.318
	Rumah Tangga R6	15.486	16.187	16.957	17.867	18.320	18.528
	Rumah Tangga R7	4.928	4.959	5.062	5.360	5.657	6.126
	Rumah Tangga R8	2.495	2.495	2.499	2.508	2.497	2.518
	Sub Jumlah Pelanggan Domestik	131.089	138.705	145.665	150.743	154.371	157.711
b.	Pelanggan Non Domestik						
	Sosial Umum / S1	1.277	1.263	1.274	1.299	1.322	1.341
	Sosial Umum / S2	807	849	883	842	844	864
	Instansi Pemerintah	364	368	367	376	381	378
	Niaga Kecil N1	1.586	1.579	1.595	1.673	1.680	1.659
	Niaga Kecil N2	3.680	3.719	3.753	3.811	3.845	3.816
	Niaga Besar N3	530	532	516	466	458	448
	Niaga Besar N4	70	70	70	72	76	75
	Industri / I-1	3	3	3	2	2	2
	Industri / I-2	6	6	6	6	6	5
	Sub Jumlah Pelanggan Non Domestik	8.323	8.389	8.467	8.547	8.614	8.588
	Jumlah	139.412	147.094	154.132	159.290	162.985	166.299

Berdasarkan tabel jumlah pelanggan per golongan tarif di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelanggan domestik mendominasi sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 jika dibandingkan dengan pelanggan non domestik. Meskipun demikian, dari data tersebut dapat kita lihat bahwa baik pelanggan domestik maupun non domestik keduanya selalu meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Tabel 2.78
Jumlah Pelanggan dan cakupan Pelayanan Tahun 2014- 2020

No	Uraian	Tahun						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelanggan	129.312	139.412	147.094	154.132	159.290	162.985	166.299
2	Cakupan Pelayanan	78,41%	82,79%	85,85%	88,73%	91,44%	75,73%	83,33%

Sumber : Laporan SPM

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa cakupan pelayanan yang telah dilakukan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor pada tahun 2014 hingga tahun 2020 terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah pengguna. Cakupan pelayanan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai 90,22%, dimana angka tersebut merupakan peningkatan sebesar 1,49% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 88,73%. Pada Tahun 2019 terjadi penurunan nilai cakupan pelayanan yang disebabkan oleh berubahnya perhitungan asumsi jumlah pelanggan per Sambungan Rumah (SR) yang semula 5 Jiwa menjadi 4 Jiwa.

Dalam upaya membantu peningkatan kinerja pelayanan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, pihak Pemerintah Kota Bogor telah memberikan bantuan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Tabel 2.79
Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak

No	Tahun	Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak dan Audit	Pembagian Laba Bersih	Penyertaan Modal
1	2014	35.983.297.589,45	19.790.814.000,00	31.073.447.956,00
2	2015	45.815.256.978,42	25.198.391.000,00	10.921.110.161,00
3	2016	39.891.073.742,43	21.940.091.000,00	52.898.242.000,00
4	2017	33.325.544.280,00	18.329.049.400,00	10.934.000.000,00

No	Tahun	Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak dan Audit	Pembagian Laba Bersih	Penyertaan Modal
5	2018	35.790.425.573,67	19.684.734.065,52	-
6	2019	41.738.492.420,92	22.949.745.171,60	10.000.000.000,00
7	2020	41.096.707.908,74	22.603.189.349,81	24.300.000.000,00
Jumlah		273.640.798.493,63	150.496.013.986,93	140.126.800.117,00

Sumber : Laporan SPM

2.9.3 Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT)

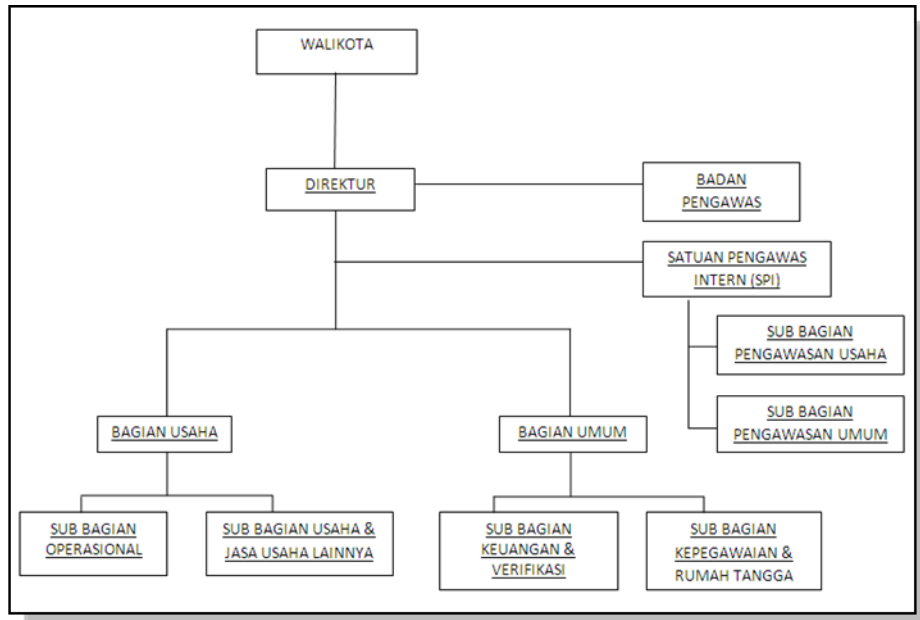
Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 pada tanggal 12 April 2007 tentang “Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor” yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008.

PDJT sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah unit bisnis pemerintah yang didirikan dalam rangka meningkatkan layanan kepada publik khususnya bidang jasa transportasi, yang bertujuan selain menyediakan layanan transportasi yang efektif, efisien dan bertanggung jawab, juga diharapkan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan daerah.

Modal Dasar Perusahaan Daerah JasaTransportasi (PDJT) Kota Bogor menurut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) yang telah terealisasi seluruhnya hingga 31 Desember 2014. Dan berdasarkan hasil kajian investasi daerah Nomor 102/BEST-BS/lap.FS/I/2015 tanggal 5 Januari 2015, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor diberikan penyertaan modal sebesar Rp 5.519.390.000,- (lima milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 tahun 2015 tentang “Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor.

Pada tahun 2015 terjadi perubahan dalam susunan Direksi dan Organisasi PDJT Kota Bogor dari 3 Direksi menjadi 1 Pjs. Direktur sebagaimana Struktur organisasi dan Tata Kerja PD. Jasa Transportasi (PDJT) ditetapkan berdasarkan Peraturan WaliKota Bogor No. 14 Tahun 2015 sebagai berikut :

Gambar 2.5
Struktur Organisasi PDJT Kota Bogor



A. Maksud Dan Tujuan Awal Pendirian Pdjrt Kota Bogor

Konsep awal pendirian PDJT Kota Bogor adalah membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mandiri dalam membiayai layanan jasa transportasi umum berkelanjutan, melalui kemampuan mengembangkan usaha lain yang lebih luas.

Dan karenanya, dalam PERDA Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 yang mendasari pendirian PDJT Kota Bogor sebagai BUMD menyelenggarakan usaha – usaha;

1. Jasa Angkutan “Trans Pakuan” sebagai layanan jasa transportasi angkutan umum massal berkelanjutan.
2. Jasa Bengkel Umum
3. Jasa Kendaraan Derek
4. Jenis Usaha Lainnya dibidang Transportasi, yang al. Pengelolaan Perpajakan, Jasa Advertising di sarana/prasarana transportasi.

a. Tujuan awal Pendirian PDJT Kota Bogor adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan dalam jasa transportasi kepada masyarakat.
- 2) Mendorong perekonomian daerah.
- 3) Menunjang pembangunan daerah.
- 4) Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
- 5) Menyelenggarakan kemanfaatan umum.

b. Pendirian PDJT Kota Bogor mempunyai Tugas Pokok:

- 1) Memberikan pelayanan angkutan secara memadai, nyaman dan aman.
- 2) Memberikan pelayanan jasa bengkel, jasa kendaraan derek dan jasa usaha transportasi lainnya.
- 3) Menjadikan PDJT mampu mengembangkan diri sesuai tugas dan fungsi, sehingga menambah PAD secara langsung dan/atau tidak langsung.
- 4) Melakukan pengembangan usaha dan investasi pada PDJT.

c. Pendirian PDJT Kota Bogor mempunyai Fungsi Ekonomi:

Sebagai sarana dan prasarana publik dituntut untuk meningkatkan kemampuan pengembangan usaha dan memenuhi kewajiban² lainnya dengan cara pengelolaan PDJT secara sehat berdasar asas ekonomi Perusahaan.

d. Pendirian PDJT Kota Bogor mempunyai Fungsi Sosial

Sebagai sarana Publik dalam melaksanakan pengelolaan jasa transportasi yang merupakan urat nadi pembangunan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat dari semua golongan masyarakat dengan memberlakukan tarif yang terjangkau sesuai kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

B. Arah Pengembangan PDJT Kota Bogor

Visi Perusahaan Tahun 2020 – 2024 adalah “Terwujudnya Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Sebagai Perusahaan Yang Handal”, yang merupakan Arah dan Tujuan Perusahaan meliputi:

1. Dihandalkan dan memenuhi harapan konsumen dan/masyarakat untuk mampu meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen.
2. Dihandalkan dan memenuhi harapan Pemerintah Kota Bogor (sebagai Owner) dalam memberikan pelayanan umum dan mengembangkan usaha untuk meningkatkan *profit* usaha dan *accountabel*
3. Dihandalkan dan memenuhi harapan pegawai untuk mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemberian hak-hak pegawai

C. Strategi Perusahaan Tahun 2020 – 2024

Startegi perusahaan Tahun 2020- 2024 meliputi:

1. Re-Strukturisasi Perusahaan



Dengan kondisi PDJT Kota Bogor s/d akhir 2019 yang sangat terpuruk dan layak untuk dipailitkan, tetapi adanya kebijakan Walikota dan Wakil WaliKota Bogor pentingnya PDJT Kota Bogor untuk tetap hadir dalam memberikan kemanfaatan umum, maka perlu dilakukan langkah – langkah Re-Strukturisasi meliputi;

- a) Re-Strukturisasi Manajemen (Organisasi)
- b) Re-Strukturisasi Modal (Keuangan)
- c) Re-Strukturisasi Porofolio (Bisnis)

2. Optimalisasi Pelayanan Bus Trans Pakuan

Optimalisasi dan pemenuhan layanan umum sebagai bagian penugasan, serta guna meningkatkan pendapatan usaha, perusahaan akan mengembangkan Koridor Pelayanan, menyesuaikan tarif penumpang dan/atau adanya PSO, serta memperbanyak jumlah shelter pada koridor yang ada. Diupayakan penggunaan Kartu Non Tunai kepada penumpang, sehingga sistem e-ticketing akan mengefisienkan jumlah pegawai operasional perusahaan. Strategi ini diharapkan akan memperbaiki kinerja keuangan dan operasional perusahaan serta mampu memenuhi harapan konsumen dan pemerintah.

3. Pengembangan Unit Usaha Profitabel

Pengembangan untit usaha-usaha baru yang *feasible* dari segi aturan & *financial investment* , dengan analisis resiko yang dituangkan dalam *Coorporate Plan*. Disertai dengan pengukuran kinerja operasional dan standar pelayanan minimal. Mekanisme pendanaan tidak terbatas pada penyertaan modal dari APBD Kota Bogor namun bisa juga dari APBN, dana hibah dalam/luar negeri, pinjaman dalam/ luar negeri ataupun investasi dari pihak lain yang tidak mengikat. Dengan strategi ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan kinerja keuangan perusahaan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

4. Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan transparan yang diaudit oleh pihak independen

setiap tahun guna memperoleh opini atas laporan keuangan yang disajikan perusahaan

5. Meningkatkan Kesejahteraan dan Keterampilan Pegawai

Kesejahteraan pegawai akan ditingkatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kemampuan perusahaan. Program jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Selain itu pegawai juga berhak memperoleh jasa produksi jika perusahaan telah memperoleh laba dari aktivitas usahanya. Pelatihan-pelatihan diberikan perusahaan meliputi orientasi pegawai, *Outbond Training*, *HSQ Training*, *Mangement Training* dan lain sebagainya. Strategi ini akan mampu memenuhi harapan pegawai serta mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

D. Program Pd Jasa Transportasi

1. Program Yang Akan Dilaksanakan

Dalam penyusunan rencana bisnis Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor memiliki beberapa program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari rencana bisnis perusahaan, seperti pembangunan dan pengelolaan SPBU, pengelolaan Lahan parkir dan penambahan beberapa armada dan trayek pada jasa Angkutan Umum , Jasa Derek , Jasa Angkutan Pariwisata , Jasa Perbengkelan dan Advertising tidak hanya itu , Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor akan menciptakan Sumber daya manusia yang berkarakter baik , berikut beberapa bisnis yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor:

a. Jasa Angkutan Trans Pakuan

merupakan bentuk kehadiran Pemerintah sebagai pelayanan umum kepada masyarakat dengan penyediaan Sistem Angkutan Umum Massal “Trans Pakuan” sebagai bagian system transportasi, dengan tariff yang terjangkau dengan harapan/ditopang Subsidi (*Publik Service Obligation*) dari Pemerintah Kota Bogor.

Sebagaimana Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 9 Tahun 2020 tentang pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan :

Ayat (1) Subsidi Angkutan Penumpang umum Perkotaan diberikan Oleh :

c Bupati/walikota untuk Angkuta Perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten dan Angkutan perkotaan yang berada dalam wilayah kota

Ayat (2) “Dalam hal gubernur atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya tidak mampu memberikan subsidi, gubernur atau bupati/walikota dapat menyampaikan permohonan pemberian subsidi Angkutan Umum Perkotaan kepada menteri”

Berdasarkan hal tersebut adanya Program Pengembangan system Angkutan Umum massal “Trans Pakuan” melalui subsidi dengan skema “ *Buy The Service*” Dari kementerian Perhubungan RI Melalui badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada TA-2021 adalah kesempatan emas untuk dilakukan akselerasi dan sekaligus sebagai lahirnya kembali (*Re-born*) pelayanan bus Transpakuan, yang sekaligus menjadi bagian proses re-strukturalisasi perusahaan melalui pengembangan pelayanan koridor Trans Pakuan sebagai bagian pelaksanaan Program penataan angkutan umum di Kota Bogor (Rasionalisasi dengan reduksi angkutan kota melalui konversi 3: 1 dalam kerangka peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

- b. Jasa Bengkel Umum
- c. Jasa Mobil Derek
- d. Jasa Pakuan Pariwisata
- e. Jasa data Interface,
- f. *Jasa Advertising*
- g. *Jasa Pengelolaan Perparkiran*
- h. *Jasa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)*
- i. Pembangunan Kawasan Berbais *Transit Oriented Development (TOD)*

2.10 KERJA SAMA DAERAH

2.10.1 Kerjasama Antar Daerah

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat menjalin kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga dan atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling



menguntungkan. Ketentuan itu tertuang di dalam pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyeraskan pembangunan daerah, dan mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar kabupaten dan kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

Sepanjang tahun 2014-2018 telah dihasilkan 780 Perjanjian Kerjasama dan 67 Kesepakatan Bersama. Adapun perjanjian kerjasama dan Kesepakatan bersama yang masih berlaku sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 896 buah.

Adapun kerjasama antar daerah yang dijalin pada tahun 2015-2018 dan masih berlaku sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 19 kerjasama dan Kesepakatan Antar Daerah sebanyak 14 KB.

1. Perjanjian Kerja sama Nomor 119/KK.11-Kerja sama/2017 antara Pemerintah Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai Kerja sama Antar Daerah dengan jangka waktu perjanjian 1 tahun;
2. Perjanjian kerja sama Nomor 119/KK.19-Dishub/2017 antara Kaban. Pengelolaan Transportasi Jakarta dengan Djarot Saiful Hidayat (Gubernur DKI Jakarta), Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), Wahidin Halim (Gubernur Banten) Bima Arya (WaliKota Bogor), Nurhayanti (Bupati Bogor), KH. Mohammad Idris (Walikota Depok), Arief R. Wirmasyah (Walikota Tangerang), Ahmed Zaki Iskandar (Bupati Tangerang), Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan), H. Rahmat Effendi

(Walikota Bekasi) tentang Rencana Induk Transportasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

3. Perjanjian Kerjasama antara Bupati Bogor dengan Wali Kota Bogor Nomor 060/KK.20-Bag.Kerja sama/2017 tentang Kerja sama antar Daerah Dalam Pelayanan Publik;
4. Perjanjian Kerjasama Bima Arya Wali Kota Bogor dengan Nurhayati Bupati Bogor, Mohammad Idris (Walikota Depok), Mohamad Muraz (Walikota Sukabumi), Marwah Hamami (Bupati Sukabumi), Herman Suherman (Plh. Bupati Cianjur) tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal;
5. Perjanjian Kerjasama Nomor 900/KK.37-BPKAD/2017 Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat) dengan Wiwiek Sisto Widayat selaku Pihak ke II dan Nurhayanti (Bupati Bogor), Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor), Mohammad Idris (Walikota Depok), H. Marwan Hamami (Bupati Sukabumi), Mohamad Muraz (Walikota Sukabumi), H. Irvan Rivano Muchtar (Bupati Cianjur), Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi), Rahmat Effendi (Walikota Bekasi), Cellica Nurrachadiana (Bupati Karawang), Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta), Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta), Imas Aryumningsih (Bupati Subang), Sunjaya Purwadisastra (Bupati Cirebon), Nasrudin Azis (Walikota Cirebon), Anna Sophanah (Bupati Indramayu), Acep Purnama (Bupati Kuningan), Sutrisno (Bupati Majalengka), Dadang M. Naser (Bupati Bandung), M. Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Ajay Muhammad Priyatna (Walikota Cimahi), Abu Bakar (Bupati Bandung Barat), Eka Setiawan (Bupati Sumedang), Rudy Gunawan (Bupati Garut), UU Ruzhanul Ulum (Bupati Tasikmalaya), Budi Budiman (Walikota Tasikmalaya), Ade UU Sukaesih (Walikota Banjar), Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran) selaku Pihak ke III tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Jawa Barat;
6. Perjanjian Kerjasama Nomor 119/KK.2-Bappeda/2018 Anies Baswedan dengan Ahmad Heryawan; H.Wahidin Halim; Hj.Nurhayanti; Bima Arya; K.H.Mohammad Idris; Rahmat Effendi; Hj.Neneng Hasanah Yasin; Irvan Rivano Muchtar; H.Arief R. Wismansayah; A. Zaki Iskandar; Airin Rachmi Diany tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bidang Transportasi Dan Perhubungan, Sumberdaya Air, Lingkungan



Hidup, Energi, Pariwisata, Ketahanan Pangan, Investasi, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil, Serta Penataan Ruang Di Wilayah Provinsi Dki Jakarta Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Dan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

7. Perjanjian Kerjasama Nomor 060/KK.1-Bag.Kerja Sama/2018 H. Irvan Rivano Muchtar, Bupati Cianjur dengan Bima Arya, WaliKota Bogor tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik;
8. Perjanjian kerjasama No.475.1/Perj.Disakersostrans/2015 antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Dengan Pemerintah Kota Bogor tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Sarana Pemukiman (SP) 3 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Satai Lestari Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015;
9. Perjanjian Kerja Sama Nomor 119/62/PKS/KS/III/2018 antara Drs. H. Herdi, M.Si. KA. Satpol PP Kab. Bogor dengan Drs. Herry Karnadi, M.Si. Ka. Satpol PP. Kota Bogor tentang Penegakan peraturan daerah, penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan;
10. Perjanjian Kerjasama Nomor 119/85/PKS/KS/IV/2018 E. Rupali, SH, MH. KADIS Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor dengan Drs. Herry Karnadi, M. Si. Kepala Sat.Pol.PP Kota Bogor tentang Penanganan Bencana Kebakaran Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor;
11. Perjanjian Kerja sama Nomor 119/163/PKS/KS/IX/2018 Drs. Rahmat Surjana, Kadis Pariwisata Kabupaten Bogor dengan H. Sahlan Rasyidi, SE. MM. Kadis Disparbudpar Kota Bogor tentang Pengembangan Kepariwisataaan, Ekonomi kreatif, kebudayaan dan kesenian Bogor;
12. Perjanjian Kerjasama Nomor 119/59/PKS/KS/III/2018 antara Ir. H. Joko Pitoyo, CES, Ka. DPMPSTSP Kabupaten Bogor dengan H. Denny Mulyadi, SE. Ka. DPMPSTSP Kota Bogor tentang Penanaman Modal;

13. Perjanjian Kerjasama Nomor 119/70/PKS/KS/IV/2018 antara Ir. Hj. Siti Farikah, M.M. Kadis. Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor dengan Drs. Irwan Riyanto, M.Si. Kadis. Distan Kota Bogor tentang Pengembangan Bidang Peternakan dan Bidang Perikanan;
14. Perjanjian Kerjasama Ahmad Heryawan dengan Hj. Nurhayanti (Bupati Bogor), Dr. Bima Arya (Wali Kota Bogor), Mohammad Idris (Wali Kota Depok) tentang Pelayanan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) Regional Nambo untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok;
15. Perjanjian Kerjasama Nomor Nurhayanti Bupati Bogor dengan DR. Bima Arya WaliKota Bogor tentang Hibah Tanah seluas + 363 m² Beserta Bangunan Di atasnya Seluas + 243 M² milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor Kepada Pemerintah Kota Bogor Untuk Perluasan SMPN 2 Kota Bogor Terletak Di Jalan Gedong sawah IV Kelurahan Pabaton Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
16. Perjanjian Kerja sama KEP-243/WPB.13/BD.03/2016 Nomor Yuniar Yanuar Rasyid,Ak., MM. dengan Dr. Bima Arya tentang Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
17. Perjanjian Kerjasama Nomor 119/132/PKS/KS/XI/2016 Nurhayanti dengan Bima Arya tentang Perpanjangan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
18. Perjanjian Kerja sama 591/Perj.50-DPKAD/2016 Ahmad Heryawan dengan Dr. Bima Arya tentang tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan di jalan raya pajajaran Nomor 121 Bogor.

Selain 18 Perjanjian tersebut di atas sudah dijalin juga kejasama dengan Kantor Lembaga dan Pemerintah Pusat yaitu:

1. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN);
2. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN);

3. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Yohana Yembise Menteri Negara PPPA RI tentang Percepatan Gerakan Sekolah Ramah Anak Kota Bogor;
4. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Komando Distrik tentang Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian;
5. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian tentang Kerja Sama mewujudkan Kota Bogor Sebagai Kawasan Inovasi Teknologi Pertanian;
6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kota Bogor;
7. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan BPPT Pusat tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Di Pemerintah Kota Bogor;
8. Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang Pengembangan, pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah;

2.10.2 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Berdasarkan Pasal 366 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa kerja sama daerah dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik; kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah; kerjasama investasi; dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada pertimbangan efisien, efektivitas, pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Kerjasama antara Pemerintah Daerah; dengan pihak ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan

karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom.

Sepanjang Tahun 2014 - 2018 kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan pihak ketiga telah terjalin dan masih berlaku sampai dengan tahun 2018 sebanyak 869 perjanjian Kerja sama yang terbagi menjadi :

- 1) 67 dokumen Perjanjian Kerja Sama di bidang Kesehatan dengan Rumah Sakit di wilayah Kota, Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta. Serta Perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Utama Bogor. Adapun ruang lingkup utama dari perjanjian tersebut ialah pemberian bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin Kota Bogor;
- 2) 652 dokumen Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ke III di bidang Sewa menyewa Barang Milik Pemerintah Kota Bogor, Pinjam Pakai Barang Milik Pemerintah Kota, dan persetujuan sewa pemakaian tanah milik Pemerintah Kota Bogor;
- 3) 7 Dokumen Perjanjian Kerjasama bidang Kependudukan meliputi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Rumah Sakit dan Program Pelayanan Isbat Nikah Terpadu Bagi Masyarakat Kota Bogor dan lain-lain;
- 4) 11 Dokumen Perjanjian Kerjasama di bidang Pendidikan meliputi kerjasama pemberian beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi dan dari keluarga tidak mampu, Penyelenggaraan Bantuan Teknis USAID, dan Penerimaan Siswa Baru, Mutasi Siswa dan Pembinaan Kesiswaan serta penanganan Penyimpangan Perilaku Siswa dan lain-lain;
- 5) 3 Dokumen Perjanjian Kerjasama di bidang Pertanian meliputi kerjasama pendidikian, penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, Budidaya Jahe Merah dan lomba Taman Obat Keluarga dan kerjasama Pelaksanaan Bursa Hewan Qurban;
- 6) 18 Dokumen Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum dan HAM yaitu kerjasama pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya dalam Didag Perdata dan Tata Usaha Negara dan lain-lain;
- 7) 8 Dokumen Perjanjian Kerja sama bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu kerja sama dengan Rumah Sakit dalam pelayanan Keluarga Berencana Metode

Operasi Wanita (MOW), Metode Operasi Pria (MOP) dan lain-lain;

- 8) 4 Dokumen Perjanjian Kerjasama di bidang Komunikasi dan Informatika yaitu kerjasama dalam penyediaan layanan Nomor Panggilan Tunggal Darurat 112 di Kota Bogor, dan pemanfaatan saluran khusus televise kabel dan jaringan *Hybrid Fiber Coaxial*;
- 9) 14 Dokumen Kerja sama bidang Pengelolaan Keuangan yaitu kerjasama dalam pengembangan dan penggunaan aplikasi SIMDA-Keuangan dalam rangka pencairan SP2D secara *online* di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, pengelolaan rekening kas Umum Daerah Kota Bogor, penunjukan sebagai penyimpan kelebihan uang kas daerah Rekening Giro Pemerintah Kota Bogor pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Bogor dan lain-lain;
- 10) 3 Dokumen kerjasama di bidang Lingkungan Hidup yaitu kerjasama dalam pengembangan dan Pembangunan ECO CITY di Kota Bogor, dan pelaksanaan Program perumusan dan pengintegrasian strategi ketahanan kota terhadap dampak perubahan iklim;
- 11) 4 Dokumen kerjasama dibidang pengembangan Sumber Daya Aparatur yaitu kerjasama dalam penyelenggaraan psikotes dan wawancara perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Penyediaan Sarana-prasarana Pelaksanaan Seleksi Calon PNS dengan metode CAT dan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Darat;
- 12) 7 Dokumen Kerjasama bidang Penanaman Modal yaitu kerjasama dalam Layanan Pembayaran Retribusi Perizinan, Pembangunan Web portal Pusat Informasi Perizinan Usaha, Pemanfaatan Data Perizinan Kota Bogor melalui *Web Service* dan Pengintegrasian program jaminan sosial kesehatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;
- 13) 2 Dokumen Kerjasama bidang Tenaga Kerja yaitu kerjasama dalam Program pengurangan Pekerja Anak di Kota Bogor, dan Peningkatan Kesadaran Dan Kepatuhan Pemberi Kerja Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

- 14) 2 Dokumen Kerja Sama bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu kerjasama dalam pembinaan, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui lembaga koperasi, dan Perluasan kepesertaan dan peningkatan kesadaran kepatuhan bagi pelaku usaha koperasi, usaha mikro kecil menengah dan pedagang kaki lima dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Kota Bogor;
- 15) 5 Dokumen Perjanjian Kerja sama bidang Perencanaan Pembangunan yaitu kerja sama dalam Perencanaan Sarana dan Prasarana Perkotaan dengan Univ IBN Khaldun Bogor;
- 16) 3 Dokumen Kerjasama bidang Perdagangan yaitu kerjasama dalam bantuan Sertifikasi Jaminan Halal dan Penggunaan Instalasi Standar Uji Meter Gas Untuk Pelaksanaan Tera Dan / Atau Tera Ulang Meter Gas Diafragma;
- 17) 2 Dokumen Kerjasama bidang Penanggulangan bencana yaitu kerjasama Penguatan Kelembagaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah Tahun Anggaran 2016, dan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanggulangan Bencana di wilayah Perbatasan Dan Daerah;
- 18) 2 Dokumen Kerja sama bidang Pariwisata yaitu kerja sama Pengembangan kepariwisataan, ekonomi, kreatif, kebudayaan dan kesenian Bogor dan pengembangan promosi dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan & kebudayaan Bogor

Selain Kerjasama diatas telah dilakukan kerjasama lainnya sebanyak 26 perjanjian antara tahun 2019 – 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.80
Daftar Perjanjian Kerjasama

NO	PERJANJIAN KERJA SAMA	Jangka Waktu
1	Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Di Kota Bogor	5 Tahun 21-02-2019 21-02-2024
2	Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai non pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Bogor	5 Tahun 11-03-2019 11-03-2024
3	Penyelenggaraan Tes Kesehatan Bagi Peserta Seleksi Perpindahan Ke Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, Peserta Seleksi Penghargaan PNS Berprestasi dan Peserta Seleksi Terbuka Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor	5 Tahun 28-02-2019 28-02-2024
4	Penggunaan Data Kependudukan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor	5 Tahun 01-03-2019 01-03-2024
5	Persertipikatan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan barang milik daerah berupa tanah.	4 Tahun 29-04-2019 09-04-2024
6	Pengintegrasian data pertanahan dengan data perpajakan daerah.	5 Tahun 29-04-2019 29-04-2024
7	Pemanfaatan nomor induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Sosial Kota Bogor	5 Tahun 08-01-2019 11-01-2024
11	Penggunaan Fasilitas Bikeshare di seputar Kebun Raya Bogor	5 Tahun 23-04-2019 23-04-2024
12	Pemanfaatan Nomor induk Kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam layanan lingkup tugas dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Bogor	5 Tahun 25-03-2019 25-03-2024
14	Penyelenggaraan Program Transmigrasi Di Lokasi/Kawasan Transmigrasi Salundeang, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat	5 Tahun 15-08-2019 15-08-2024
15	Pengelolaan penyelenggaraan reklame pada taman pulau warng jambu yang terletak di samping empat antara jalan pajajaran,jalan k.s. Tubun, Jalan Jendral Ahmad Yani dan Jalan Adnawijaya kepada PT MAXIMA CITRA PRIMA	5 Tahun 28-10-2019 28-10-2024
16	Pengelolaan penyelenggaraan reklame pada taman pulau simpang jalan KH. Sholeh Iskandar dan Jalan KH. Abdullah Bin Nuh Kota Bogor kepada PT. MAXIMA CITRA PRIMA	5 Tahun 28-10-2019 28-10-2024
18	Pelayanan Kemetrolagian	5 Tahun 17-12-2019 17-12-2024
19	Fasilitasi penitipan sertipikat tanah wakaf Alun-Alun Empang dan Masjid Agung Empang	4 Tahun 31-01-2020 31-01-2024

23	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Menengah Pertama dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	3 Tahun 11-02-2021 11-02-2024
24	Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan bagi ASN yang tidak cakap Jasamani dan Rohani di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	3 Tahun 16-02-2021 16-02-2024
25	Program Pemberdayaan UMKM dan Kewirausahaan di Kota Bogor	3 Tahun 07-06-2021 07-06-2024
26	Pembinaan dan Pemberdayaan Penerapan/Pengembangan Layanan Teknologi Informasi	3 Tahun 07-06-2021 07-06-2024

Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor baik dengan daerah lain, instansi pemerintah maupun pihak ketiga diapresiasi oleh Provinsi Jawa Barat melalui penghargaan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Award Tahun 2018. Penilaian didasarkan pada 5 kriteria yaitu *Leadership* (bobot 25), *Strategic Planning* (bobot 20), *Customer Focus* (bobot 15), *People Focus* (bobot 15) serta *Performance Measurement* (bobot 10) bersaing dengan 8 Kota dan 19 Kabupaten lain di Jawa Barat, Kota Bogor berhasil mendapatkan penghargaan Juara II TKKSD Award 2018.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Bogor pada tahun ke 3 dalam rentang waktu Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 telah terjadi perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sejak tahun 2021 pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merubah pola Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun Belanja Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Struktur APBD Kota Bogor terdiri dari: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan daerah dan untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Gambaran umum capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud meliputi capaian kinerja pendapatan, trend realisasi belanja serta capaian pembiayaan.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun terakhir.

3.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN 2015-2020

Kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2015-2020 meliputi perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan pembiayaan daerah selama 2015-2020.

3.1.1.1. PENDAPATAN DAERAH.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah diperoleh melalui sumber-sumber meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kapasitas keuangan daerah akan menentukan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pembiayaan daerah.

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014 s.d. tahun 2020 mengalami peningkatan, sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Penerimaan PAD Kota Bogor Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH						
1.1	PAD						
1.1.1	Pajak Daerah	398.435.398.328	492.138.653.391	555.477.512.682	592.978.746.862	689.543.006.040	509.039.468.746
1.1.2	Retribusi Daerah	46.219.894.849	62.727.631.456	49.046.366.179	48.414.245.997	51.362.153.192	35.010.375.259
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.807.740.268	33.107.211.225	29.949.487.128	26.772.427.406	28.241.844.911	31.927.293.792
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	154.134.016.696	195.900.091.147	267.354.262.108	240.081.650.933	246.737.212.776	296.069.787.730
	TOTAL PAD	627.597.050.141	783.873.587.219	901.827.628.097	908.247.071.198	1.015.884.216.919	872.046.925.527

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2015-2019

Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 2015-2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu tingkat pertumbuhan rata-rata per tahunnya adalah berkisar 11,17%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan adanya pelemahan kondisi perekonomian global akibat Pandemi Covid-19 dengan tingkat pertumbuhan sekitar -14,16%.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 ini disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan pada semua komponen Pendapatan Asli Daerah kecuali komponen retribusi daerah yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah Komponen Pajak Daerah dimana rata-rata pertumbuhan per tahunnya mengalami peningkatan sebesar 9,79% dan komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 36,34%.

Selain itu Pajak Daerah juga menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor, dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata diatas 60 % dari total Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah adalah bagian dari kewenangan moneter yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Namun, Pemerintah Daerah masih diberikan hak pengelolaannya sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, perlu upaya untuk lebih mengintensifkan penerimaan Pajak Daerah antara lain :

1. Mempertahankan penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya melalui upaya peningkatan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Menggali potensi pajak melalui regulasi dan penerapan insentif dan disinsentif.

Komponen-komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total PAD berturut-turut adalah sebagai berikut :

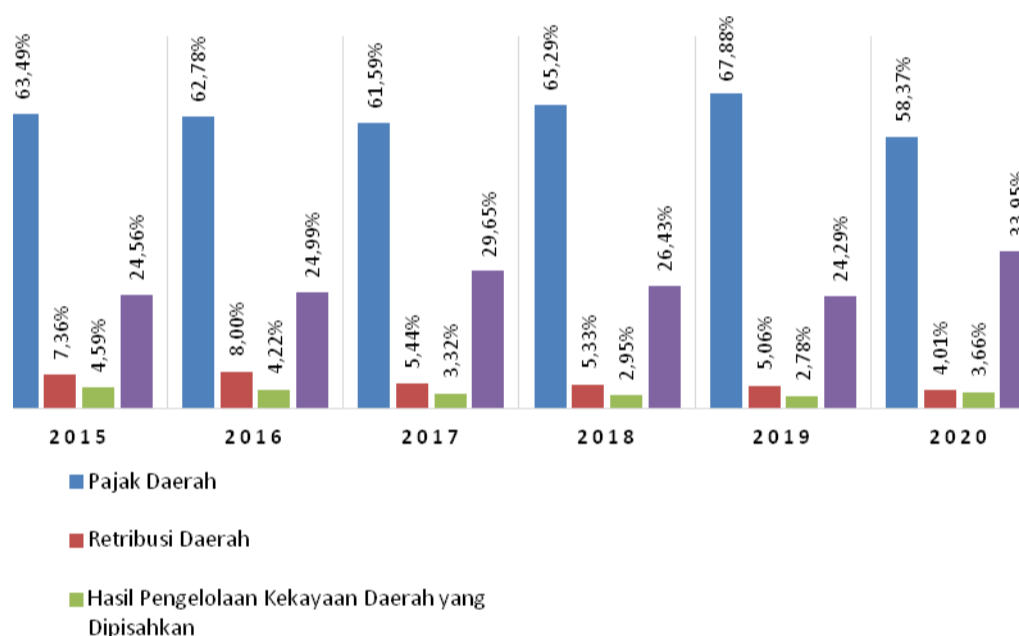
- a. Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 65,29% dari total Pendapatan Asli Daerah 2018 dan meningkat menjadi 67,87% dari total Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019.
- b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pajak Daerah yaitu sebesar

26,43% dari total Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 dan 24,29% dari total Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019.

- c. Retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu sebesar 5,33% dari total Pendapatan Asli Daerah 2018 dan 5,06% dari total Pendapatan Asli Daerah tahun 2019.
- d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah yaitu sebesar 2,95% dari total Pendapatan Asli Daerah 2018 dan 2,78 % dari total Pendapatan Asli Daerah tahun 2019.

Grafik 3.1

Porsi Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2015-2019

Dengan adanya Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 menyebabkan kondisi perekonomian nasional menurun bahkan hampir mengalami resesi, hal tersebut berdampak terhadap Perekonomian Kota Bogor, bahkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor pada triwulan III Tahun 2020 sempat menurun diangka -2,23% yang berimbas sangat signifikan terhadap Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Dari sisi kebijakan, ada 3 (tiga) komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah yang dapat terus menerus dilakukan upaya-upaya intensifikasi yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dapat dipisahkan, sementara

untuk komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah besaran kontribusinya sangat bergantung dari kebijakan kebijakan eksternal.

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global pada Maret Tahun 2020 hingga saat ini, telah menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem Kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan angka kematian akibat virus Covid-19. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah ada pada daerah yang cenderung padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan, dan SDM kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat. Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya non performing loan (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat hingga mencapai -0,4% s.d. 2,3%, dengan risiko menuju negatif jika penanganan penyebaran pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama.

Dengan adanya kebijakan pembatasan sosial dalam rangka menekan laju persebaran virus Covid-19 maka secara otomatis berpengaruh terhadap menurunnya aktivitas ekonomi. Penurunan Penerimaan Pajak Daerah berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sangat terpengaruh signifikan karena menurunnya aktivitas pariwisata di Kota Bogor. Berbagai kebijakan dan strategi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai

upaya untuk tetap mendorong penerimaan sektor Pajak Daerah di masa pandemi, antara lain :

a) Memberikan stimulus bagi Wajib Pajak di Kota Bogor yang jenis usahanya terkena dampak akibat Pandemi COVID-19, melalui penetapan peraturan Wali Kota sebagai berikut :

1. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terhutang untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa Covid-19. Peraturan Wali Kota ini memperpanjang masa pembayaran pajak hingga 30 Desember 2021 bagi Wajib Pajak yang jatuh tempo pada Bulan April, Mei, dan Juni 2020.
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 dan Penghapusan Sanksi Administrasi Tunggakan PBB P2 masa Pajak sampai dengan Tahun 2019 Sebagai Dampak Kejadian Luar Biasa COVID-19. Peraturan Wali Kota ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki Objek PBB P2 di Kota Bogor mendapatkan pengurangan ketetapan PBB P2 tahun 2020 dengan pembayaran masa pajak bulan April sebesar 15%, dan masa Pajak Bulan Mei sebesar 10%, serta masa Pajak di Bulan Juni sebesar 5%. Dan pembebasan pembayaran sanksi administratif tunggakan PBB P2 Sampai dengan tahun 2019.
3. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengurangan Pajak Terhutang BPHTB Tahun 2020 sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa COVID-19 di Kota Bogor. Peraturan Wali Kota ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak BPHTB untuk mendapatkan pengurangan sebesar 10% untuk masa Pajak Bulan Mei dan Juni 2020.

b) Mendorong percepatan pemulihan sektor ekonomi yang terdampak Pandemi Covid-19, terutama pemulihan dan penguatan pertumbuhan sektor Jasa, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

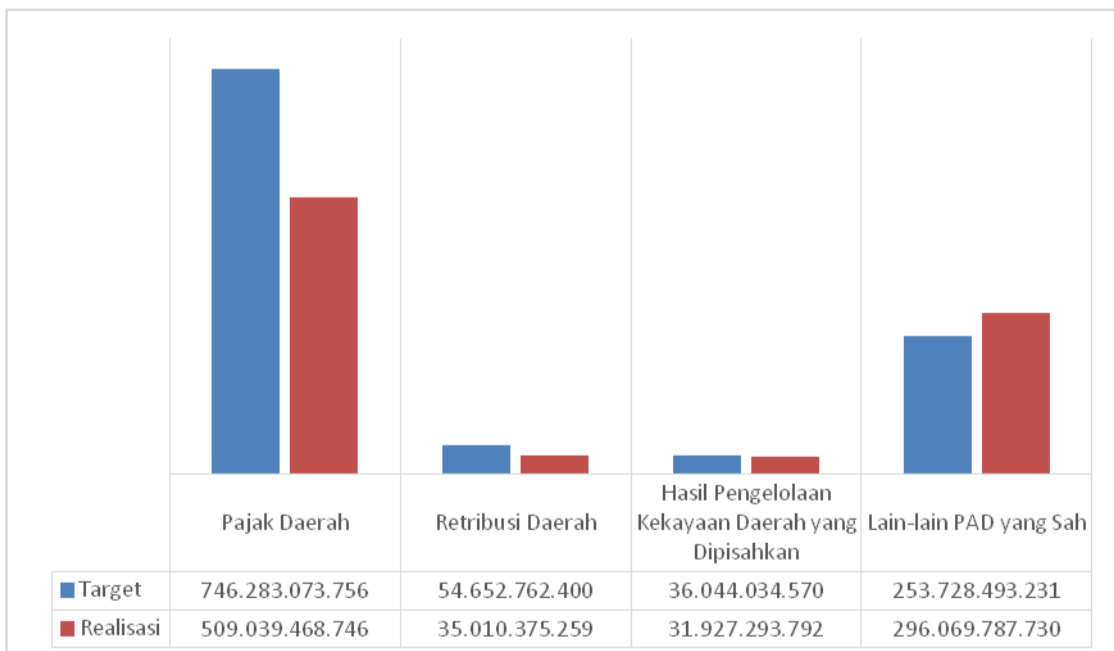
c) Memantapkan Sistem dan Prosedur Operasional Pemungutan Pajak Daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam

melakukan pembayaran pajak di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB);

- d) Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha yang salah satunya melalui penataan reklame dan sebagainya.
- e) Mendorong inovasi dalam pengendalian aktivitas ekonomi masyarakat di era adaptasi kebiasaan baru untuk mempercepat pengembalian pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan ditetapkannya kebijakan tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2020, masih berada pada kisaran Rp. 872.046.925.527,- atau turun sebesar 14,15% dari realisasi PAD Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1,090,708,363,957,-, kinerja realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2020 masih mencapai 79,5 %.

Grafik 3.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2020



Dari sisi kebijakan, ada 3 (tiga) komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah yang dapat terus diintensifikasi, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dapat Dipisahkan, sementara untuk komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah besaran kontribusinya sangat bergantung dari kebijakan kebijakan eksternal.

B. PENDAPATAN TRANSFER DAERAH.

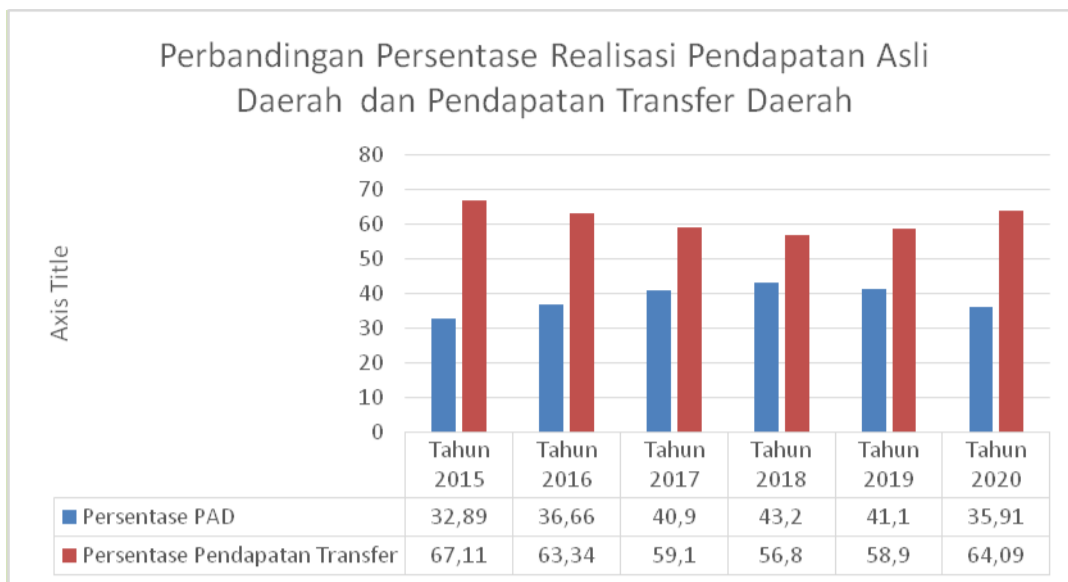
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer Daerah adalah pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; dan Dana Desa. Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.

Struktur Pendapatan tersebut berbeda dengan struktur Pendapatan yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu PP nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pada Peraturan Pemerintah tersebut, Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya menjadi bagian dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Memperhatikan tabel 3.3 tentang Realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2015-2020, terlihat secara umum tingkat kemandirian daerah semakin meningkat, hal ini ditunjukkan dari persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor dibanding pendapatan transfer daerah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah secara umum sudah semakin mandiri dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Berikut adalah Tabel perbandingan Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor dan Penerimaan Pendapatan Transfer Daerah dari Tahun 2015-2020 :

Grafik 3.3.

Perbandingan Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Daerah



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2015-2020

C. PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; dan Dana Desa. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Kota Bogor selama tahun 2015-2020 terdiri dari :

- a. Dana Perimbangan terbagi menjadi 2 kategori yaitu kategori dana transfer umum berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan kategori dana transfer khusus berupa DAK (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. DAU bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara DBH bersumber dari perhitungan bagi hasil pajak.
- b. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu.

Berikut ini adalah realisasi penerimaan pendapatan transfer Pemerintah Pusat Tahun 2015-2020 sebagai berikut :

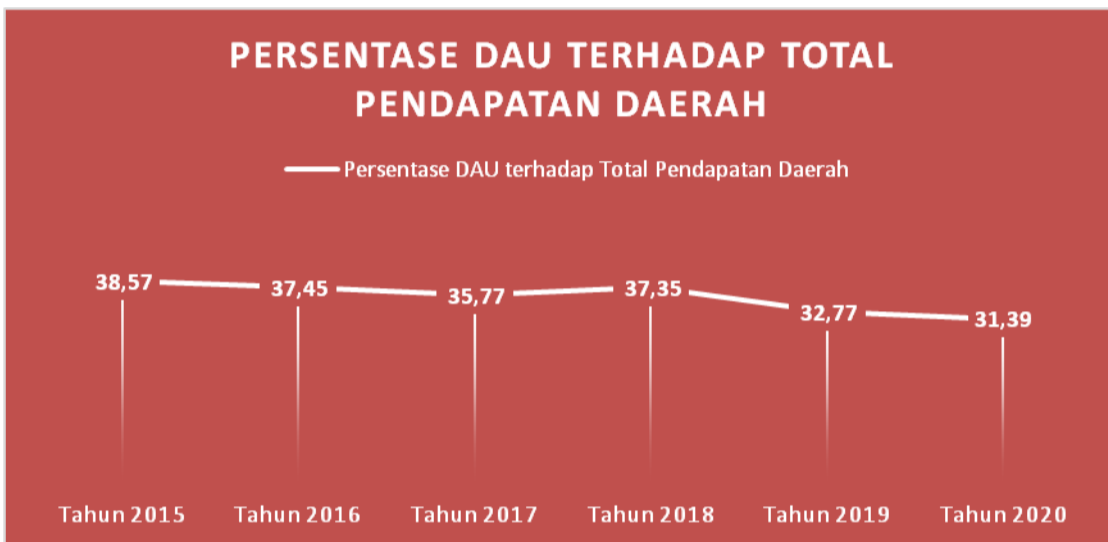
Tabel 3.2.**Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2015-2020.**

NO	URAIAN	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	68.503.716.916	96.843.148.408	90.543.462.995	77.129.803.351	77.654.424.279	125.014.721.701
1.2.2	Dana Alokasi Umum	737.833.158.000	806.089.544.000	791.929.143.000	791.929.143.000	838.948.449.000	762.556.115.000
1.2.3	DAK	8.616.560.000	194.681.619.028	190.013.867.775	162.369.919.564	189.891.532.535	195.601.128.198
1.2.4	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	41.073.011.000	28.928.586.000
1.2.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	202.799.344.000	-	936.232.656			
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER		1.017.752.778.916	1.097.614.311.436	1.073.422.706.426	1.031.428.865.915	1.147.567.416.814	1.112.100.550.899

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2015-2020

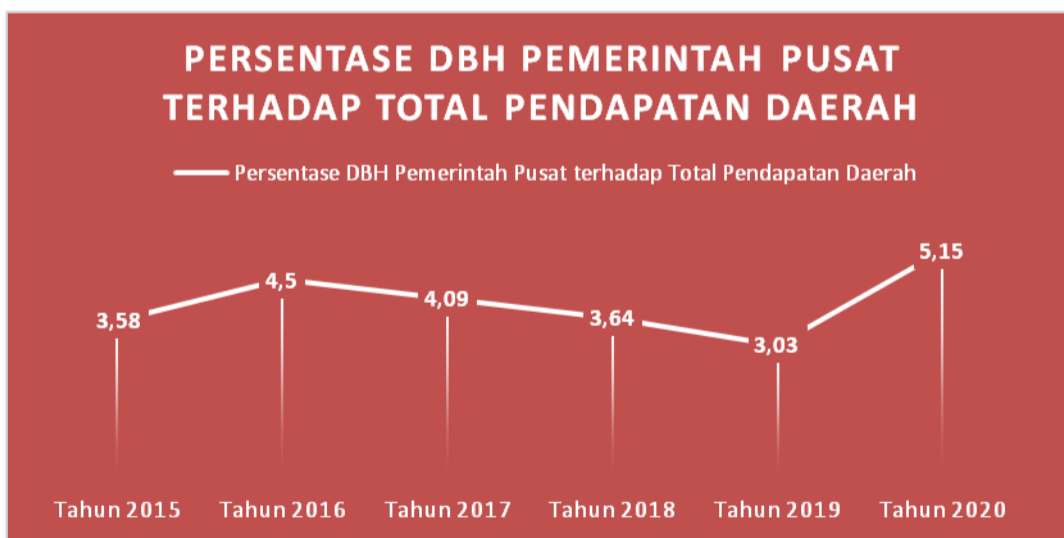
Pada tahun 2015 - 2020, rata-rata kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah Kota Bogor sebesar 36,38%. Namun demikian kecenderungan yang terjadi persentase DAU terhadap pendapatan Kota Bogor dari tahun 2015-2020 cenderung semakin menurun. Pada Tahun 2019, persentase penerimaan DAU terhadap total pendapatan Kota Bogor berkisar 32,77% dan pada tahun 2020 turun lagi menjadi 31,39%. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.4.
Persentase Penerimaan DAU terhadap Total Pendapatan Kota Bogor Tahun 2015-2020.



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2015-2020

Grafik 3.5.
Persentase Penerimaan DBH Pusat terhadap Total Pendapatan Kota Bogor Tahun 2015-2020



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2015-2020

Begitu juga dengan Kontribusi DBH Pemerintah Pusat terhadap Pendapatan Daerah, dari tahun 2015-2020 mengalami kecenderungan menurun, hingga pada tahun 2019 hanya berkisar 3,03 %, namun

demikian, pada tahun 2020 mengalami kenaikan cukup signifikan pada level 5,15%.

Untuk Dana Insentif Daerah (DID) diperoleh Kota Bogor mulai tahun 2019-2021 dengan kontribusi yang makin meningkat dari tahun ke tahun. DID diperoleh karena penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bogor atas perbaikan dan/atau prestasi pencapaian kinerja pembangunan daerah.

D. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil yaitu dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bantuan Keuangan yaitu dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Berikut ini adalah gambaran realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah ke Kota Bogor Tahun 2015-2020 sebagaimana dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

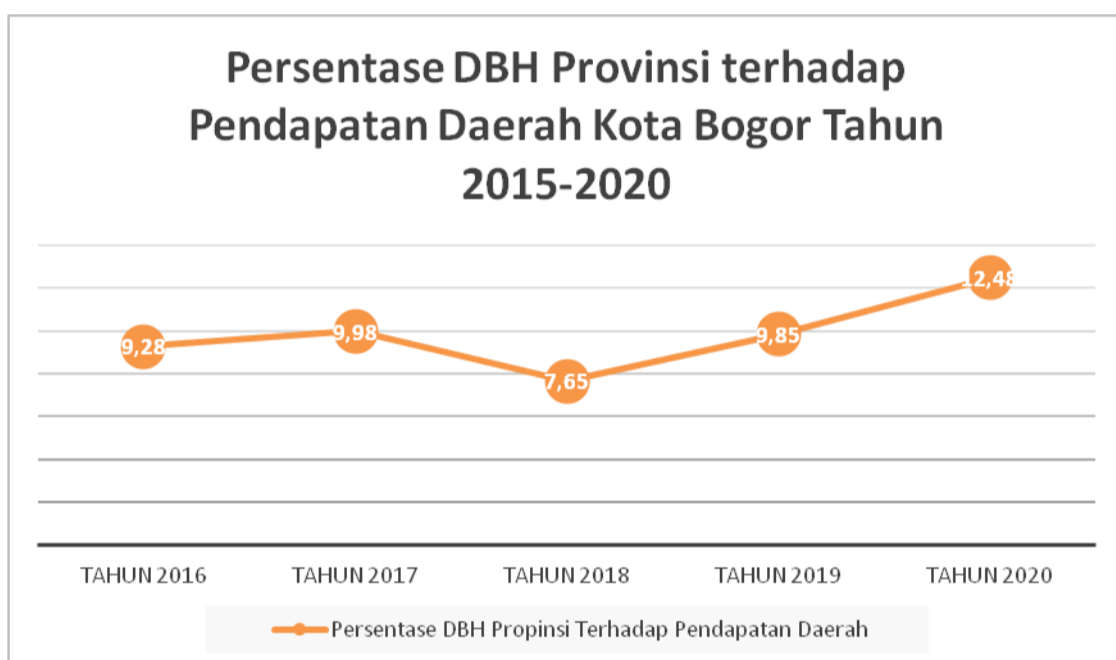
Tabel 3.3.**Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2015-2020**

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)
1.3.1	Dana Bagi Hasil (Provinsi)	200.623.100.069	199.830.168.384	221.019.088.491	162.162.144.861	252.139.954.160	222.967.276.647
1.3.2	Bantuan Keuangan	62.362.474.910	56.946.015.847	8.656.058.467	674.483.200	55.936.979.900	80.430.838.850
Transfer Antar Daerah		262.985.574.979	256.776.184.231	229.675.146.958	162.836.628.061	308.076.934.060	303.398.115.207

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2015-2020

Pada tahun 2015-2020, rata-rata kontribusi DBH Pemerintah Provinsi terhadap Pendapatan Daerah Kota Bogor sebesar 9,45%. Namun demikian kecenderungan yang terjadi persentase DBH Provinsi terhadap pendapatan Kota Bogor dari tahun 2015-2020 cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2019, persentase penerimaan DBH Provinsi terhadap total pendapatan Kota Bogor berkisar 9,85% dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 12,48% dari total Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Grafik 3.6.
Persentase DBH Provinsi Terhadap Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2020



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2015-2020

E. LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah adalah Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk

mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini adalah gambaran realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2015-2020 sebagaimana dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Lain Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2015-2020

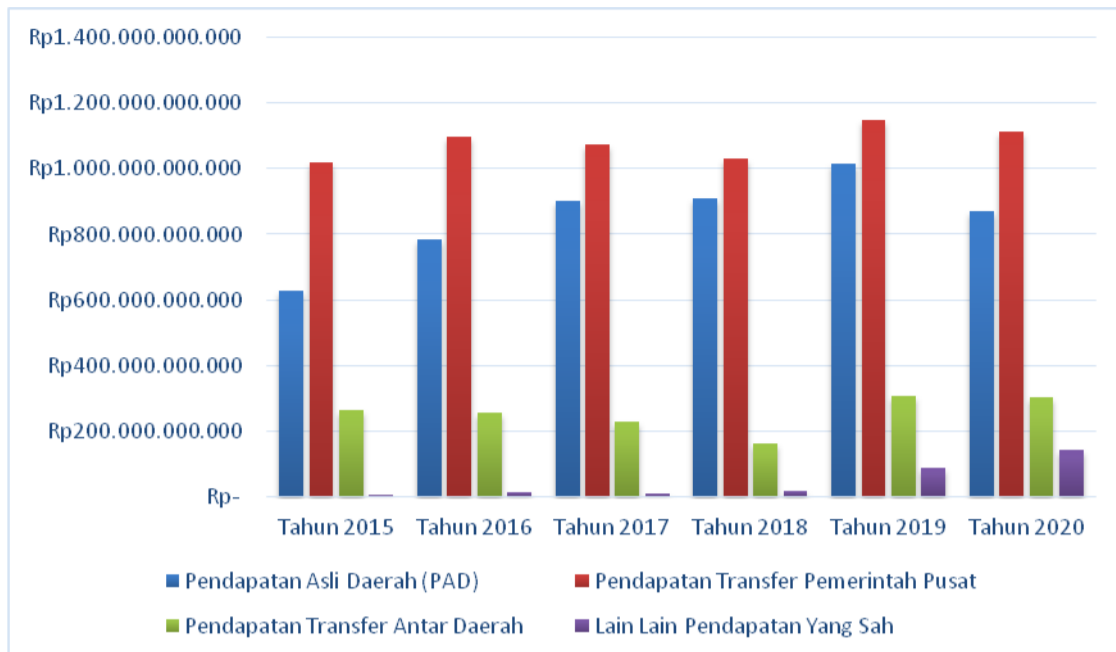
NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah						
1.4.1	Hibah	4.875.000.000	14.106.000.000	9.000.000.000	17.842.285.147	88328.640.000	140.434.222.693
	Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.875.000.000	14.106.000.000	9.000.000.000	17.842.285.147	88328.640.000	140.434.222.693

Sumber : Diolah Dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2015-2020

Pada tahun 2015 - 2020, rata-rata kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Kota Bogor sebesar 1,12%. Namun demikian kecenderungan yang terjadi persentase pendapatan hibah terhadap total pendapatan Kota Bogor dari tahun 2015-2020 cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2019, persentase penerimaan pendapatan hibah terhadap total pendapatan Kota Bogor berkisar 3,45% dan meningkat pada Tahun 2020 meningkat menjadi 5,76% dari total Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Setelah memperhatikan realisasi seluruh komponen Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2020, maka berikut ini adalah gambaran perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kota Per Komponen, sebagaimana ditampilkan dalam Grafik berikut ini :

Grafik 3.7.
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2020.



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2015-2020

Dari gambaran tabel diatas, dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan Kota Bogor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masih didominasi oleh penerimaan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, namun demikian laju peningkatan penerimaan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat jauh lebih rendah dibanding dengan laju peningkatan penerimaan PAD. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Kota Bogor dari tahun 2015-2019 menunjukkan tren positif, dimana persentase kontribusinya terhadap total pendapatan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, kontribusi PAD terhadap total pendapatan Kota Bogor masih berkisar 32,8% dan meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 mencapai kisaran 39.69%. Pada Tahun 2020 penerimaan PAD menurun kurang lebih 14% karena dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pembatasan aktivitas ekonomi di daerah.

3.1.1.2 Belanja Daerah.

Belanja Daerah Tahun 2015-2020, masih mengacu pada PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PMDN Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana, Belanja dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, belanja bantuan sosial,

belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu terdiri Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berdampak pada perubahan struktur keuangan daerah, dimana salah satunya adalah perubahan struktur Belanja Daerah. Pada PP 58 Tahun 2005, Belanja Daerah terdiri dari 2 klasifikasi, yakni Belanja Langsung dan Tidak Langsung. Sedangkan pada PP Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah terdiri dari 4 klasifikasi, yakni : 1) Belanja Operasional, 2) Belanja Modal, 3) Belanja Tidak Terduga, 4) Belanja Transfer. Dengan demikian di dalam sub bahasan ini, Belanja Daerah dalam struktur klasifikasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung hanya dapat disampaikan hingga data Tahun 2018.

Dari gambaran Tabel 3.5. mengenai Realisasi Belanja Tahun 2014-2020 berikut ini menunjukkan bahwa total Belanja Tidak Langsung dari tahun 2014-2020 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama peningkatan setiap tahun terjadi pada komponen Belanja Pegawai. Peningkatan Belanja Pegawai sejalan dengan penambahan jumlah pegawai yang ada di Kota Bogor dan perubahan administrasi kepegawaian secara berkala. Lain halnya dengan Belanja Hibah dan belanja bantuan sosial, besarnya mengalami fluktuasi setiap tahunnya karena hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan kebijakan umum terhadap prioritas anggaran tahun bersangkutan.

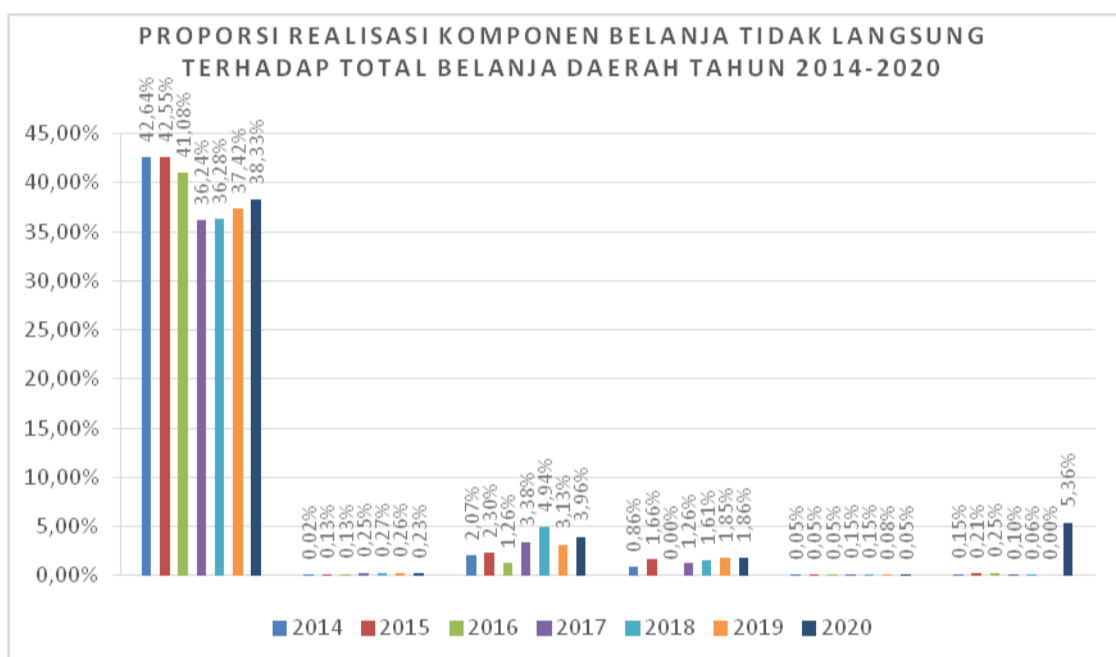
Berikut ini adalah Tabel 3.5 yang menggambarkan Belanja Daerah Tahun 2015-2020 menurut struktur belanja yang diatur pada PMDN nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015-2020

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	873.674.870.470	904.608.992.284	928.917.117.816	1.030.484.918.019	1,080,707,776,909	1,172,482,164,991
1.1	Belanja Pegawai (Bel. Tidak Langsung)	792.640.665.276	868.927.388.610	814.005.452.521	872.972.628.517	946,231,166,393	902.722.166.877
1.2	Belanja Bunga	2.415.905.429	2.646.198.572	5.68.279.325	6.609.258.977	6,578,046,142	547.749.091
1.3	Belanja Subsidi						
1.4	Belanja Hibah	42.891.089.240	26.636.028.500	75.739.412.400	116.769.203.285	79,149,334,000	93.233.837.587
1.5	Belanja Bantuan Sosial	30.872.505.105	29.748.900	28.400.948.000	32.177.459.900	46,743,921,755	43.686.702.506
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes	-	-	-	-		-
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes.	999.621.220	999.621.220	3.371.939.614	1.912.780.390	1,995,853,019	1.134.531.000
1.8	Belanja Tidak Terduga	3.855.084.200	5.370.006.482	1.714.085.956	43.586.950	9,455,600	126.277.177.930
2	BELANJA LANGSUNG	989.308.000.764	1.210.687.895.986	1.090.828.168.900	1.360.087.367.001	1,447,793,026,029.19	1,182,388,537,991
2.1	Belanja Pegawai (Bel. Langsung)	164.327.724.558	175.103.589.795	160.721.220.228	234.051.884.972	235,658,195,436	107.389.674.312
2.2	Belanja Barang dan Jasa	384.060.724.979	483.099.789.155	519.022.548.669	671.754.308.226	711,101,422,815.19	798.841.580.650
2.3	Belanja Modal	440.919.551.227	552.484.517.036	411.084.400.003	454.281.173.803	501,033,407,778	276.157.283.029
	TOTAL BELANJA DAERAH	1.862.982.871.234	2.115.296.888.270	2.019.745.286.716	2,390.572.285.020	2,528,500,802,938.19	2.354.870.702.982

Pada Grafik 3.8. berikut ini digambarkan rata-rata proporsi Belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan pegawai yang termasuk dalam kategori Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah berkisar 39,76%, sementara secara umum rata-rata proporsi total realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap total realisasi Belanja Daerah berkisar 44,03%. Angka ini secara tidak langsung menunjukkan masih lebih besar keberpihakan pemerintah Kota Bogor untuk pelaksanaan program-program pembangunan yang dapat membawa hasil (*outcome*) bagi kepentingan masyarakat.

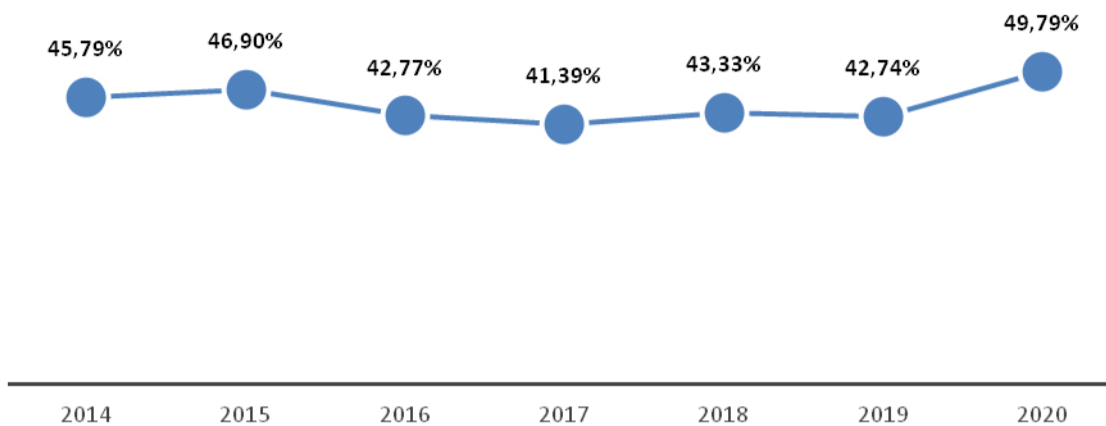
Grafik 3.8



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2020

Persentase realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah Tahun 2014-2020 digambarkan melalui grafik berikut:

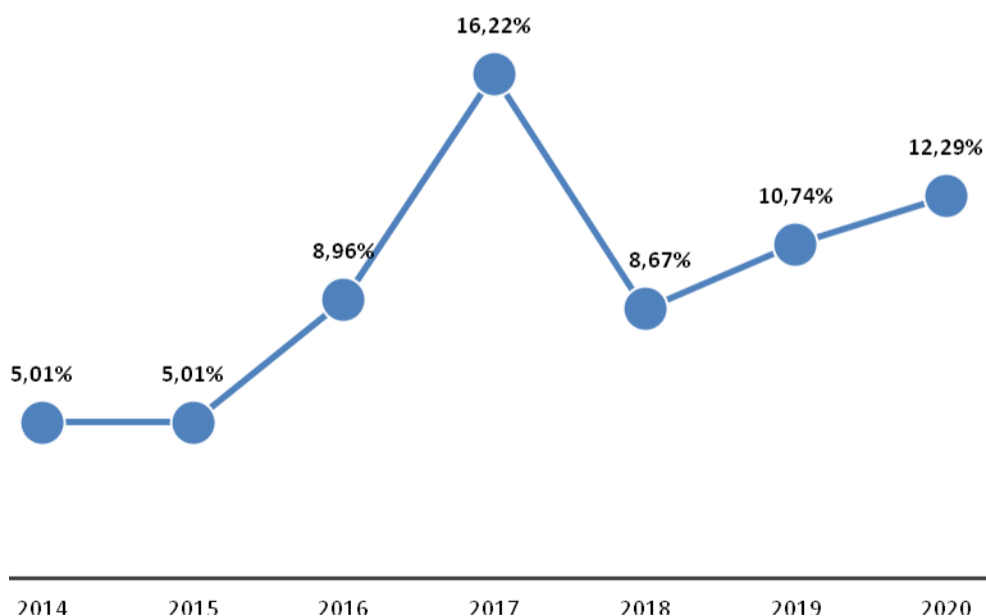
Grafik 3.9.
Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap
Total Belanja Daerah Tahun 2014-2020



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2020

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2014-2020 terdapat permasalahan bahwa sisa lebih anggaran Belanja Pegawai dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada Tahun 2018, sisa lebih anggaran Belanja Pegawai berkisar 8,67% dari Pagu Anggaran Belanja Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan penganggaran Belanja Pegawai belum dilakukan secara akurat.

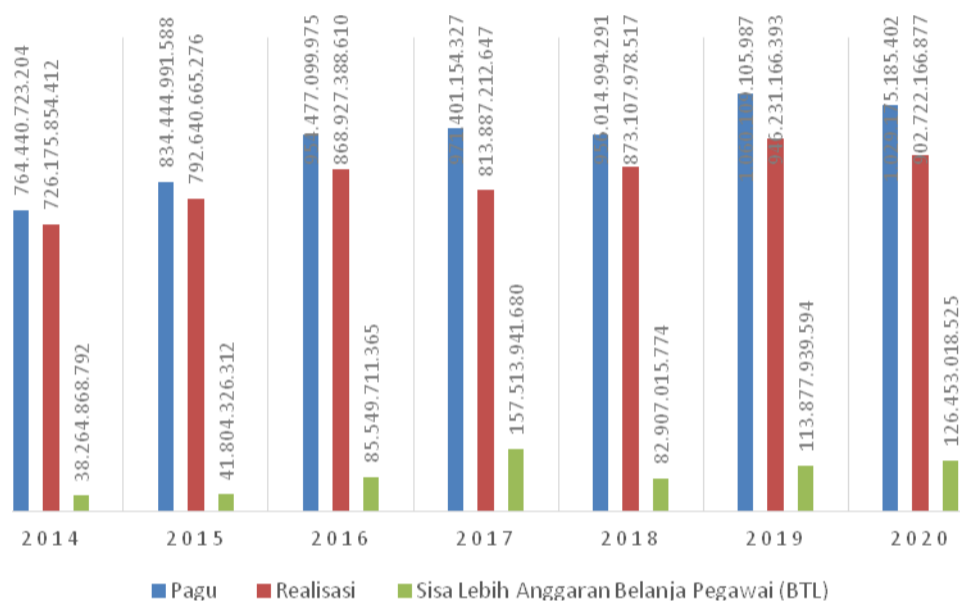
Grafik 3.10.
Persentase Sisa Lebih Anggaran Belanja Pegawai pada Belanja
Tidak Langsung Tahun 2014-2020



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2020

Untuk menghindari kurang akuratnya perencanaan penganggaran Belanja Pegawai sudah seharusnya integrasi antara sistem infomasi/ data pegawai dan sistem informasi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan Belanja Pegawai perlu dilakukan. Berikut ini adalah gambaran perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi Belanja Pegawai tahun 2014-2020.

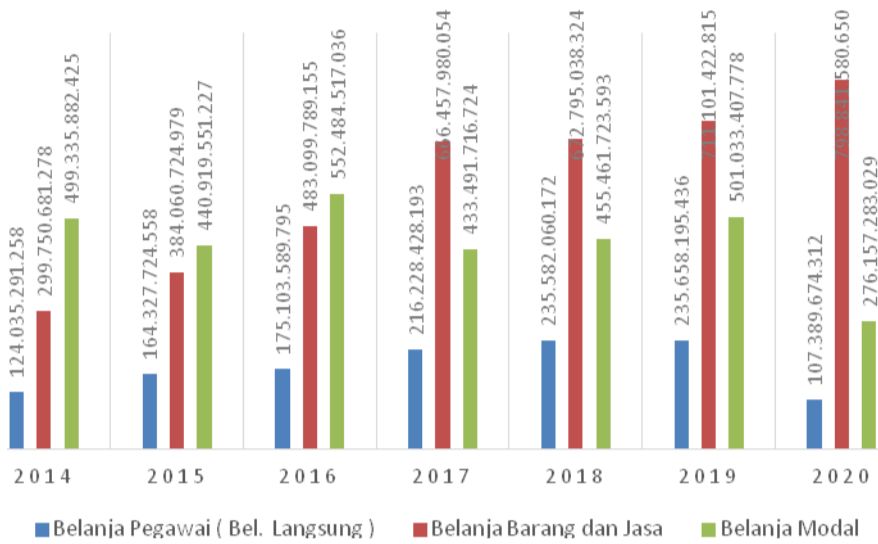
Grafik 3.11.
Perbandingan Pagu Anggaran, Realisasi dan Sisa Lebih Anggaran Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung Tahun 2014-2020



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2020

Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Untuk mengukur capaian prestasi kerja dari Belanja Langsung dapat dilihat dari sejauh mana indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai. Belanja Langsung terdiri atas tiga komponen utama yang menjadi prioritas, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta belanja modal.

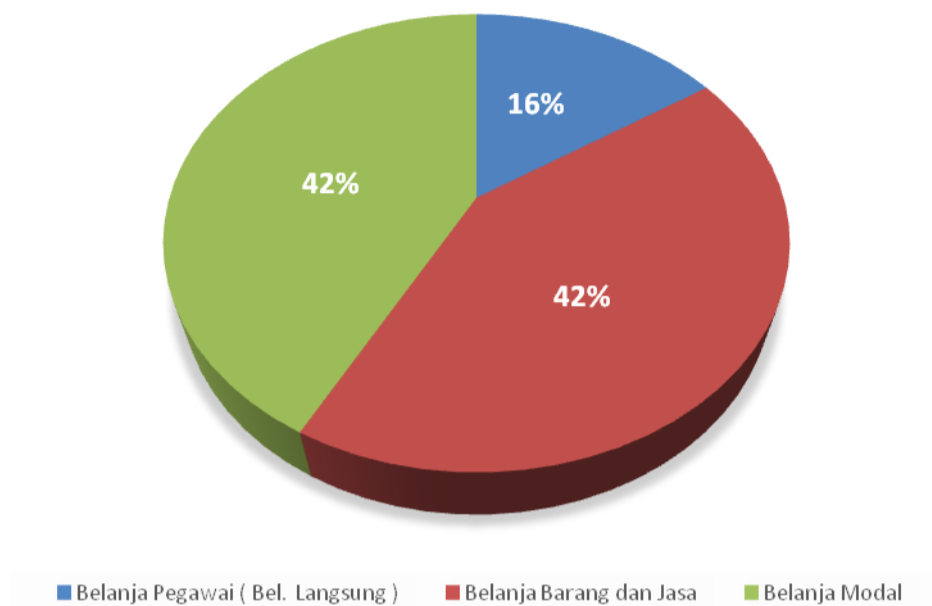
Grafik 3.12.
Pertumbuhan Realisasi Belanja Langsung Daerah
Tahun 2014-2020



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2020

Apabila dilihat pada Tabel 3.11. tentang Realisasi Belanja Langsung 2014-2020, terlihat bahwa proporsi Belanja Pegawai pada komponen Belanja Langsung masih cukup tinggi yaitu berkisar antara 13 – 17 % dari total Belanja Langsung, sementara proporsi Belanja Modal berkisar antara 33-54% dari Belanja Langsung sedangkan proporsi Belanja Barang dan Jasa berkisar rata-rata 32-49% dari Belanja Langsung. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian adalah terdapat kecenderungan penurunan proporsi Belanja Modal terhadap Belanja Langsung dari tahun 2014-2020. Sementara sebaliknya terdapat kecenderungan peningkatan proporsi Belanja Barang dan Jasa setiap tahunnya.

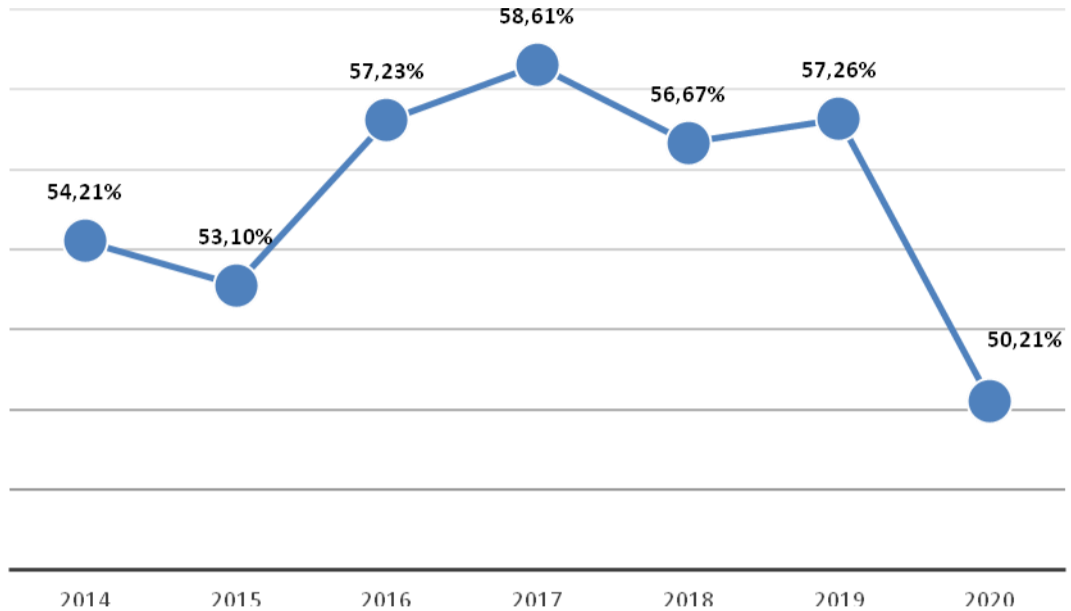
Grafik 3.13.
Rata-Rata Perbandingan antara Komponen-Komponen Belanja pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014-2020



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Apabila kita lihat tren realisasi Belanja Langsung dan realisasi total Belanja Daerah dari tahun 2014-2020, maka dapat dilihat bahwa rata-rata persentase realisasi Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah masih berkisar 55,33%. Angka ini masih lebih besar dibandingkan dengan persentase realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah yang hanya berkisar 44,67%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan APBD Kota Bogor masih lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan pembangunan dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan pegawai/aparatur. Persentase Realisasi Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah Tahun 2014-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

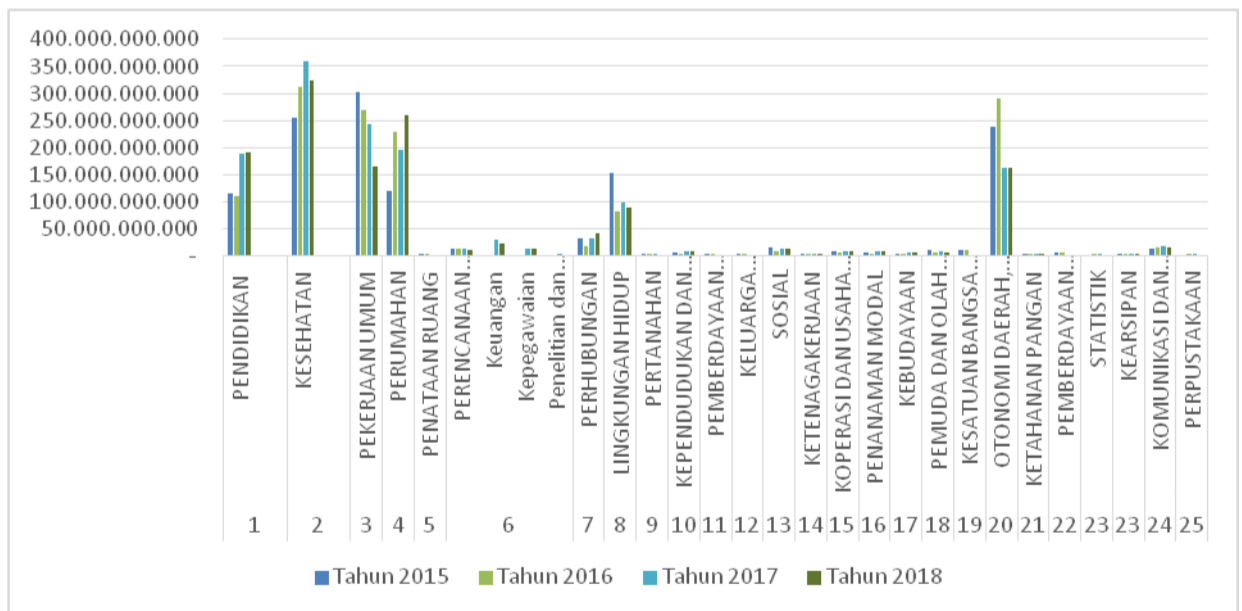
Grafik 3.14.
Persentase Realisasi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2020



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Berikut ini adalah tren pagu anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bogor, APBD Provinsi Jawa Barat maupun DAK Pemerintah Pusat Tahun 2015-2018 yang dialokasikan untuk setiap urusan pemerintahan :

Grafik 3.15.
Tren Pagu Anggaran Belanja Langsung Per Urusan Tahun Anggaran 2015-2018.



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2015-2018

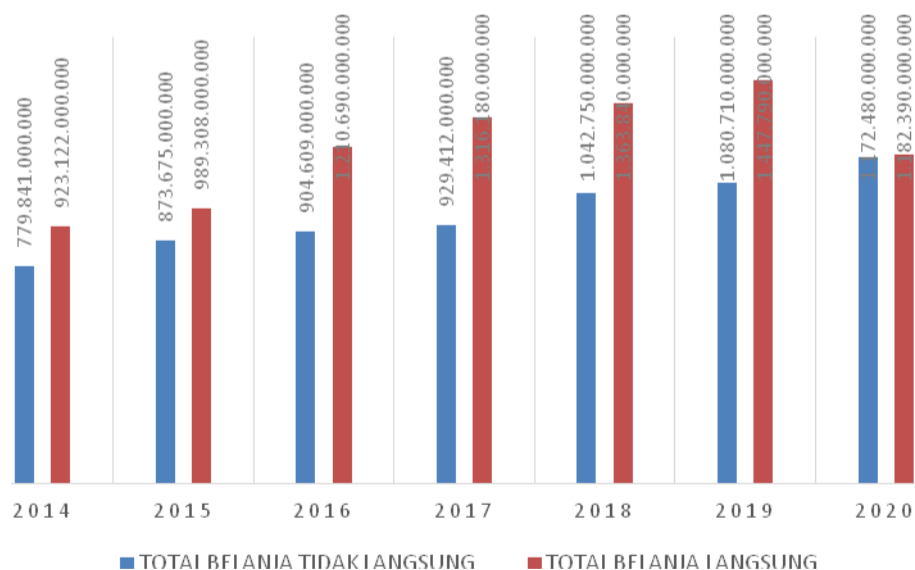
Tabel 3.6.
Realisasi Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2020

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	AVERAGE
1	Persentase Realisasi BTL terhadap Total Belanja Daerah	45,79%	46,90%	42,77%	41,39%	43,33%	42.74%	49.79%	44.03%
2	Persentase Realisasi BL terhadap Total Belanja Daerah	54,21%	53,10%	57,3%	58,61%	56,67%	57.26%	50.21%	55.97%

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

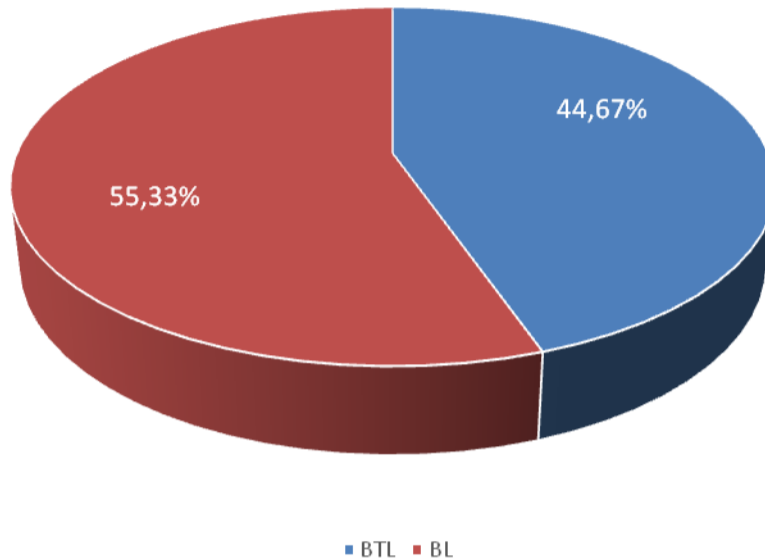
Apabila dilihat pada Tabel 3.6 tentang realisasi Belanja Kota Bogor tahun 2014-2020, terlihat bahwa rata-rata rasio antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah 55 % : 44%. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan publik yang telah direncanakan dalam bentuk pelaksanaan urusan dan program pembangunan lebih besar dibanding kebutuhan lainnya berupa belanja gaji pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes, belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes dan Belanja Tidak Terduga. Tren yang menggambarkan rasio antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun 2014-2020 tergambar pada diagram berikut ini :

Grafik 3.16.
Perbandingan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014-2018



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Grafik 3.17.
Persentase Komposisi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2020



Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Sementara apabila dianalisa lebih detail lagi rasio antara total Belanja Pegawai yang terdapat dalam komponen Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan belanja lainnya yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan publik/ kebutuhan non pegawai adalah berkisar 48-49% untuk Belanja Pegawai dan 51-52% untuk belanja pemenuhan kebutuhan publik. Dan terlihat kecenderungannya dari tahun ke tahun terdapat penurunan proporsi Belanja Pegawai dibanding belanja pemenuhan kebutuhan publik. Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah terhadap prioritas pemenuhan kebutuhan publik.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah di definisikan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tahun yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Barang dan Jasa;
- b. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.;
- c. Belanja Tidak Terduga, yaitu pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
- d. Belanja transfer.

Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja yaitu Belanja Daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja. Mengingat kinerja pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, oleh karenanya kinerja harus selalu diukur tingkat efektivitas dan efisiennya sehingga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya kepada masyarakat.

Berikut ini adalah gambaran realisasi belanja pada Tahun 2019 yang dikonversikan pada struktur belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, sebagaimana dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2020

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020
II.	BELANJA DAERAH	2.528.507.371.799	1.951.301.711.023
A.	Belanja Operasi		
	1. Belanja Pegawai	1.181.891.175.329	1.010.375.376.986
	2. Belanja Bunga	6.578.046.142	5.427.749.091
	3. Belanja Subsidi		-
	4. Belanja Hibah	79.149.334.000	93.233.837.587
	5. belanja bantuan sosial	46.743.921.755	43.678.702.506
	6. Belanja Barang dan Jasa	711.106.178.176	798.213.394.942
B.	Belanja Modal	501.033.407.778	276.157.283.029
C.	Belanja Tidak Terduga	9.455.600	62.350.812.198
D.	Belanja Transfer		
	1. Belanja Bagi Hasil		-
	2. Belanja Bantuan Keuangan	1.995.853.019	1.134.531.000

Sumber : diolah dari Laporan Keuangan Daerah tahun 2020



3.1.2 NERACA DAERAH

Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Di sisi Neraca Daerah, total aset pemerintah Kota Bogor yang tercatat pada tahun 2018 sebesar Rp 8.134.004.234.560,- dengan rincinan aset lancar sebesar Rp. 597.909.309.350,- investasi jangka panjang sebesar Rp. 504.156.265.652,- aset tetap sebesar Rp. 6.805.408.855.781,- sedangkan aset lainnya sebesar Rp. 226.529.803.775,-. Pada tahun 2019 total asset pemerintah Kota Bogor mencapai Rp. 8.450.865.944.760,56; dengan rincinan aset lancar sebesar Rp. 718.953.836.768,25; investasi jangka panjang sebesar Rp. 523,706,475,432.61,- aset tetap sebesar Rp. 7,093,013,218,195.35 ,- sedangkan asset lainnya sebesar Rp. 115,192,414,364.35 ,-.

Berikut ini adalah perkembangan kondisi Neraca Daerah dalam kurun waktu 2014-2019 yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.8.
Kondisi Neraca Daerah Tahun 2014-2019

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		(audited)	(audited)	(audited)	(audited)	SIMRAL	SIMRAL
1	ASET						
11	ASET LANCAR						
11101	Kas di Kas Daerah	289.565.303.000,00	324.780.908.786,00	288.028.518.947,00	300.431.310.181,00	241.211.999.533,00	256.115.222.198,00
11102	Kas di Bendahara Penerimaan	22.250.000,00	2.985.000,00	8.522.500,00	5.760.000,00	-	-
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.649.800.802,00	309.243.753,00	137.561.674,00	694.504.515,00	549.961.149,00	153.905.685,00
11104	Kas di BLUD	5.131.020.928,00	5.442.572.901,00	2.898.752.122,00	14.350.183.958,71	1.854.238.461,52	8.107.669.667,19
11105	Kas di Bendahara FKTP	3.484.964.453,00	10.624.410.125,00	14.393.911.340,00	14.442.219.555,00	12.656.415.139,00	9.337.552.993,00
11106	Kas Lainnya	79.101.520,00	92.212.151,00	15.234,00	9.722.841,00	173.631.664,00	-
11107	Kas di Bendahara BOS Pusat		2.610.967.858,00	1.383.988.995,00	553.021.703,00	417.961.220,00	4.229.656.416,00
11108	Setara Kas					-	-
112	Investasi Jangka Pendek						
113	Piutang Pendapatan	201.683.610.623,00	234.263.525.081,00	228.710.549.332,00	266.562.258.467,00	290.103.493.941,00	454.435.483.328,82
114	Piutang Lainnya	178.881.402.224,00	196.077.941.115,00	217.830.975.789,00	156.355.315.477,89	192.470.717.640,00	150.777.331.093,38
115	Penyisihan Piutang	-	(134.562.670.943,00)	(210.479.082.190,00)	(150.642.870.025,90)	(168.778.975.776,00)	(197.644.133.020,74)
116	Beban Dibayar Dimuka	-	543.537.332,00	624.085.970,00	628.357.288,48	540.978.634,00	844.904.499,12
117	Persediaan	21.343.218.214,00	26.475.086.576,00	21.633.622.895,00	25.902.278.249,08	26.708.887.745,00	32.596.243.908,48
11801	R/K SKPD						
	JUMLAH ASET LANCAR	703.840.671.764,00	666.660.719.735,00	565.171.422.608,00	629.292.062.210,26	597.909.309.350,52	718.953.836.768,25
12	INVESTASI JANGKA PANJANG						
121	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	63.742.100,00	63.742.100,00	63.742.100,00	63.742.100,00	63.742.100,00	63.742.100,00

12101	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya						
12102	Investasi dalam Obligasi						
12103	Investasi dalam Proyek Pembangunan						
12104	Dana Bergulir	63.742.100,00	63.742.100,00	63.742.100,00	63.742.100,00	63.742.100,00	63.742.100,00
12105	Deposito Jangka Panjang						
12106	Investasi Non Permanen Lainnya						
122	Investasi Jangka Panjang Permanen	377.200.142.940,00	414.813.899.454,00	480.145.325.043,00	495.500.265.058,94	504.092.523.552,36	523.642.733.332,61
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	377.200.142.940,00	414.813.899.454,00	480.145.325.043,00	495.500.265.058,94	504.092.523.552,36	523.642.733.332,61
12202	Investasi Permanen Lainnya						
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	377.263.885.040,00	414.877.641.554,00	480.209.067.143,00	495.564.007.158,94	504.156.265.652,36	523.706.475.432,61
13	ASET TETAP						
131	Tanah	2.966.049.533.007,00	3.798.390.467.269,00	4.777.034.955.270,00	4.708.114.761.107,28	4.749.339.012.961,63	4.767.414.421.962,63
132	Peralatan dan Mesin	373.664.663.395,00	373.807.735.084,00	482.687.944.551,00	526.574.545.751,27	627.792.307.268,29	743.613.685.335,72
133	Gedung dan Bangunan	641.444.980.505,00	690.549.117.290,00	811.933.746.981,00	796.074.327.216,79	1.064.887.956.865,95	1.206.807.131.742,41
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.013.583.750.943,00	1.239.288.612.328,00	1.599.063.331.888,00	1.781.248.778.911,79	1.904.629.267.613,01	2.124.872.812.527,01
135	Aset Tetap Lainnya	18.348.602.332,00	19.566.866.046,00	15.238.592.504,00	13.835.356.164,72	9.114.028.408,32	9.905.925.846,82
136	Konstruksi dalam Pengerjaan	10.438.201.945,00	20.144.534.718,00	62.721.423.609,00	114.545.306.676,29	58.417.911.301,16	57.861.964.006,16
137	Akumulasi Penyusutan	-	(927.377.840.579,00)	(1.302.449.283.874,00)	(1.373.824.513.203,45)	(1.608.771.628.636,89)	(1.817.462.723.225,40)
	JUMLAH ASET TETAP	5.023.529.732.127,00	5.214.369.492.156,00	6.446.230.710.929,00	6.566.568.562.624,69	6.805.408.855.781,47	7.093.013.218.195,35
14	DANA CADANGAN						

141	Dana Cadangan						
	JUMLAH DANA CADANGAN						
15	ASET LAINNYA						
151	Tagihan Jangka Panjang	1.884.686.569,00	1.835.834.279,00	1.357.186.175,00	3.477.148.757,00	3.350.792.857,00	3.266.687.864,00
152	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	127.572.732.768,00	127.572.732.768,00	127.572.732.768,00	127.572.732.768,00	52.526.184.310,00	52.526.184.310,00
153	Aset Tak Berwujud	8.641.753.030,00	11.092.553.493,00	13.100.114.798,00	13.038.019.186,90	12.720.633.781,80	13.345.818.781,80
154	Aset Lain-lain	20.696.537.766,00	134.027.089.084,00	132.281.197.032,00	150.808.465.199,71	168.763.333.169,03	175.679.958.444,04
155	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud				(10.680.822.599,49)	(10.831.140.342,40)	(12.013.269.674,60)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya						(117.612.965.360,89)
	JUMLAH ASET LAINNYA	158.795.710.133,00	274.528.209.624,00	274.311.230.773,00	284.215.543.312,12	226.529.803.775,43	115.192.414.364,35
	JUMLAH ASET	6.263.429.999.064,00	6.570.436.063.069,00	7.765.922.431.453,00	7.975.640.175.306,01	8.134.004.234.559,78	8.450.865.944.760,56
2	KEWAJIBAN						
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.003.003.979,00	1.575.717.459,00	727.852.898,00	463.359.376,00	118.059.579,00	268.757.122,00
212	Utang Bunga				-	-	155.902.381,00
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.333.333.328,00	-	1.708.622.235,00	103.477.777,80	-	5.484.766.176,84
214	Pendapatan Diterima Dimuka	-	3.477.777.580,00	23.401.719.615,00	517.737.454,00	1.657.035.105,14	1.705.986.062,69
215	Utang Beban	-	12.334.600.489,00	6.050.701.870,00	7.696.678.003,00	7.843.210.475,00	8.176.671.331,00
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.244.219.020,00	52.861.101,00	30.552.980.707,00	9.683.558.773,90	23.424.617.826,69	32.113.634.366,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	17.580.556.327,00	17.440.956.629,00	62.441.877.325,00	18.464.811.384,70	33.042.922.985,83	47.905.717.439,53
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
221	Utang Dalam Negeri	89.745.233.774,00	89.297.790.559,00	85.255.834.996,00	85.013.875.740,00	82.271.492.651,00	71.301.960.298,90
222	Utang Jangka Panjang Lainnya						

	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	89.745.233.774,00	89.297.790.559,00	85.255.834.996,00	85.013.875.740,00	82.271.492.651,00	71.301.960.298,90
	JUMLAH KEWAJIBAN	107.325.790.101,00	106.738.747.188,00	147.697.712.321,00	103.478.687.124,70	115.314.415.636,83	119.207.677.738,43
3	EKUITAS						
311	Ekuitas	6.156.104.208.964,00	6.463.697.315.880,00	7.618.224.856.238,00	7.890.419.513.340,87	8.018.689.818.922,82	8.332.149.457.022,12
	JUMLAH EKUITAS	6.156.104.208.964,00	6.463.697.315.880,00	7.618.224.856.238,00	7.890.419.513.340,87	8.018.689.818.922,82	8.332.149.457.022,12
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.263.429.999.065,00	6.570.436.063.068,00	7.765.922.568.559,00	7.993.898.200.465,57	8.134.004.234.559,65	8.451.357.134.760,55

Pertumbuhan dari neraca daerah di atas bila dihitung diperlihatkan pada tabel berikut. Pertumbuhan aset lancar mencapai 1,22% , sementara jumlah aset tetap tumbuh sebesar 7,34%. Di sisi kewajiban terjadi pertumbuhan sebesar 4,54%, sedangkan dari sisi ekuitas tubuh sebesar 6,39%.

Tabel 3.9.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bogor

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET	
11	ASET LANCAR	
11101	Kas di Kas Daerah	-1,68%
11102	Kas di Bendahara Penerimaan	-6,70%
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	33,00%
11104	Kas di BLUD	120,91%
11105	Kas di Bendahara FKTP	40,42%
11106	Kas Lainnya	
11107	Kas di Bendahara BOS Pusat	
11108	Setara Kas	
112	Investasi Jangka Pendek	
113	Piutang Pendapatan	19,16%
114	Piutang Lainnya	-1,22%
115	Penyisihan Piutang	
116	Beban Dibayar Dimuka	
117	Persediaan	10,13%
11801	R/K SKPD	
	JUMLAH ASET LANCAR	1,22%
12	INVESTASI JANGKA PANJANG	
121	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00%
12101	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	
12102	Investasi dalam Obligasi	
12103	Investasi dalam Proyek Pembangunan	
12104	Dana Bergulir	0,00%
12105	Deposito Jangka Panjang	
12106	Investasi Non Permanen Lainnya	
122	Investasi Jangka Panjang Permanen	6,91%
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6,91%
12202	Investasi Permanen Lainnya	
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	6,91%
13	ASET TETAP	
131	Tanah	10,73%
132	Peralatan dan Mesin	15,19%
133	Gedung dan Bangunan	14,07%
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	16,24%
135	Aset Tetap Lainnya	-10,03%
136	Konstruksi dalam Pengerjaan	67,40%
137	Akumulasi Penyusutan	
	JUMLAH ASET TETAP	7,43%
14	DANA CADANGAN	
141	Dana Cadangan	
	JUMLAH DANA CADANGAN	

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
15	ASET LAINNYA	
151	Tagihan Jangka Panjang	24.28%
152	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-11.77%
153	Aset Tak Berwujud	9.69%

154	Aset Lain-lain	115.26%
155	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.39%
	JUMLAH ASET	6.34%
2	KEWAJIBAN	
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.02%
212	Utang Bunga	
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
214	Pendapatan Diterima Dimuka	
215	Utang Beban	
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	11541.93%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	62.15%
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
221	Utang Dalam Negeri	-4.37%
222	Utang Jangka Panjang Lainnya	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-4.37%
	JUMLAH KEWAJIBAN	4.54%
3	EKUITAS	
311	Ekuitas	6.39%
	JUMLAH EKUITAS	6.39%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.34%

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-201

Tabel 3.10.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Pagu Anggaran Belanja Kota Bogor Tahun 2014-2020

NO	URAIAN	2014			2015			2016		
		ANGGARAN	REALISASI	PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP BELANJA
	BELANJA									
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	850,982,803,485.00	779,840,621,487.00	45.79%	963,671,950,091.00	873,674,870,470.00	46.90%	1,011,493,584,964.00	904,608,992,284.00	42.77%
	Belanja Pegawai	764,440,723,204.00	726,175,854,412.00	42.64%	834,444,991,588.00	792,640,665,276.00	42.55%	954,477,099,975.00	868,927,388,610.00	41.08%
	Belanja Bunga	6,603,600,000.00	352,457,562.00	0.02%	4,952,483,331.00	2,415,905,429.00	0.13%	4,938,951,956.00	2,646,198,572.00	0.13%
	Belanja Hibah	40,099,104,000.00	35,272,291,000.00	2.07%	46,687,048,729.00	42,891,089,240.00	2.30%	27,656,752,500.00	26,636,028,500.00	1.26%
	Belanja Bantuan Sosial	31,180,229,000.00	14,654,510,975.00	0.86%	57,070,197,500.00	30,872,505,105.00	1.66%	50,000,000.00	29,748,900.00	0.00%
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	900,000,000.00	852,232,538.00	0.05%	1,207,251,155.00	999,621,220.00	0.05%	1,115,203,192.00	999,621,220.00	0.05%
	Belanja Tidak Terduga	7,759,147,281.00	2,533,275,000.00	0.15%	19,309,977,788.00	3,855,084,200.00	0.21%	23,255,577,341.00	5,370,006,482.00	0.25%
	BELANJA LANGSUNG	1,141,844,560,140.00	923,121,854,961.00	54.21%	1,348,382,607,278.00	989,308,000,764.00	53.10%	1,414,247,568,941.00	1,210,687,895,986.00	57.23%
	Belanja Pegawai	123,981,461,298.00	124,035,291,258.00	7.28%	178,638,138,090.00	164,327,724,558.00	8.82%	181,772,153,544.00	175,103,589,795.00	8.28%
	Belanja Barang dan Jasa	343,688,262,703.00	299,750,681,278.00	17.60%	481,022,426,081.00	384,060,724,979.00	20.62%	530,892,764,217.00	483,099,789,155.00	22.84%
	Belanja Modal	674,174,836,139.00	499,335,882,425.00	29.32%	688,722,043,107.00	440,919,551,227.00	23.67%	701,582,651,180.00	552,484,517,036.00	26.12%
	JUMLAH BELANJA	1,992,827,363,625.00	1,702,962,476,448.00	100.00%	2,312,054,557,369.00	1,862,982,871,234.00	100.00%	2,425,741,153,905.00	2,115,296,888,270.00	100.00%

NO	URAIAN	2017			2018		
		ANGGARAN	REALISASI	PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP BELANJA
	BELANJA						
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,125,477,663,587.00	929,411,877,942.00	41.39%	1,154,083,853,702.71	1,042,748,114,753.83	43.33%
	Belanja Pegawai	971,401,154,327.00	813,887,212,647.00	36.24%	956,014,994,291.71	873,107,978,517.00	36.28%
	Belanja Bunga	5,685,279,327.00	5,685,279,325.00	0.25%	7,000,000,000.00	6,598,058,977.83	0.27%
	Belanja Hibah	81,832,872,400.00	75,813,412,400.00	3.38%	122,276,492,285.00	118,993,313,285.00	4.94%
	Belanja Bantuan Sosial	31,518,018,840.00	28,383,948,000.00	1.26%	43,759,144,900.00	38,774,816,900.00	1.61%
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	6960762926	3371939614	0.15%	5,157,216,192.00	3,716,867,124.00	0.15%
	Belanja Tidak Terduga	28,079,575,767.00	2,270,085,956.00	0.10%	19,876,006,034.00	1,557,079,950.00	0.06%
	BELANJA LANGSUNG	1,471,979,780,975.00	1,316,178,124,971.00	58.61%	1,502,196,796,458.00	1,363,838,822,089.21	56.67%
	Belanja Pegawai	230,978,702,104.00	216,228,428,193.00	9.63%	239,955,040,235.00	235,582,060,172.00	9.79%
	Belanja Barang dan Jasa	733,911,053,849.00	666,457,980,054.00	29.68%	749,808,967,659.00	672,795,038,324.21	27.96%
	Belanja Modal	507,090,025,022.00	433,491,716,724.00	19.30%	512,432,788,564.00	455,461,723,593.00	18.93%
	JUMLAH BELANJA	2,597,457,444,562.00	2,245,590,002,913.00	100.00%	2,656,280,650,160.71	2,406,586,936,843.04	100.00%

NO	URAIAN	2019			2020		
		ANGGARAN	REALISASI	PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP BELANJA
	BELANJA						
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,212,734,451,865.52	1,080,707,776,909.00	42.74%	1,370,222,015,629.00	1,172,482,164,991.00	49.79%
	Belanja Pegawai	1,060,109,105,986.52	946,231,166,393.00	37.42%	1,029,175,185,402.00	902,722,166,877.00	38.33%
	Belanja Bunga	7,000,000,000.00	6,578,046,142.00	0.26%	8,010,000,000.00	5,427,749,091.00	0.23%
	Belanja Hibah	85,099,234,000.00	79,149,334,000.00	3.13%	128,766,006,687.00	93,233,837,587.00	3.96%
	Belanja Bantuan Sosial	50,399,956,200.00	46,743,921,755.00	1.85%	44,492,714,500.00	43,686,702,506.00	1.86%
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	5,157,216,192.00	1,995,853,019.00	0.08%	1,134,531,000.00	1,134,531,000.00	0.05%
	Belanja Tidak Terduga	4,968,939,487.00	9,455,600.00	0.00%	158,643,578,040.00	126,277,177,930.00	5.36%
	BELANJA LANGSUNG	1,663,641,526,926.00	1,447,793,026,029.19	57.26%	1,271,941,013,429.19	1,182,388,537,991.00	50.21%
	Belanja Pegawai	243,403,566,806.00	235,658,195,436.00	9.32%	105,389,237,823.19	107,389,674,312.00	4.56%
	Belanja Barang dan Jasa	789,887,964,541.00	711,101,422,815.19	28.12%	859,382,967,805.00	798,841,580,650.00	33.92%
	Belanja Modal	630,349,995,579.00	501,033,407,778.00	19.82%	307,168,807,801.00	276,157,283,029.00	11.73%
	JUMLAH BELANJA	2,876,375,978,791.52	2,528,500,802,938.19	100.00%	2,642,163,029,058.19	2,354,870,702,982.00	100.00%

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2020

Gambaran tentang realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Bogor yang menginformasikan kebutuhan belanja aparatur selama tahun 2014-2020, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11.

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor Tahun 2014-2020

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Belanja Tidak Langsung							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	628.667.475.086	683.220.310.370	710.723.908.975	466.850.472.154	460.118.149.976	480.807.837.587	483.295.627.451
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	72.719.690.300	83.714.425.000	128.193.906.419	315.056.595.870	372.130.781.375	430.063.148.526	387.234.448.397
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.377.165.000	4.395.120.000	4.565.370.000	8.619.700.000	15.216.625.000	9.934.860.000	10.251.620.000
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	17.176.262.666	19.390.598.280	22.655.139.708	22.536.365.039	19.127.250	25.425.320.280	21.940.471.029
B	Belanja Langsung							
1	Belanja Honorarium PNS**)	61.782.809.635	48.714.560.477	48.119.025.550	35.564.828.100	24.801.193.110	11.859.459.500	1.682.957.500
2	Belanja Uang Lembur**)	1.367.329.000	1.874.684.600	2.497.153.500	4.246.925.500	3.041.619.000	2.350.190.000	1.141.104.000
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	87.000.000	142.250.000	-	113.000.000	112.800.000	69.000.000	185.000.000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	5.465.422.200	6.242.219.800	7.323.230.807	6.405.699.760	4.841.418.009	9.355.501.800	3.978.593.200
5	Belanja premi asuransi kesehatan	879.100.000	4.475.020.070	20.255.938.500	27.416.500.000	37.305.317.719	37.305.317.719	71.514.766.672
6	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	3.147.583.500	2.238.747.845	5.604.530.025	3.564.321.237	3.489.123.671	1.657.095.515	858.391.980
7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	1.006.016.300	1.327.686.550	1.354.797.400	1.637.617.870	2.352.455.815	1.152.019.800	690.872.000
8	Belanja perjalanan dinas**)	31.422.799.144	44.464.215.821	64.649.885.367	80.414.518.068	92.773.154.401	98.925.696.726	56.126.654.891
9	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	492.283.600.325	440.919.551.227	552.484.517.036	433.491.716.724	455.461.723.593	501.033.407.778	276.157.283.029
	TOTAL	1.320.382.253.156	1.341.119.390.040	1.568.427.403.287	1.405.918.260.322	1.471.663.488.919	1.609.938.855.231	1.315.057.790.149

Gambaran tentang pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Bogor yang menginformasikan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2014-2020, disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.12.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2014-2020

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Belanja Tidak Langsung							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	628.667.475.086	683.220.310.370	710.723.908.975	466.850.472.154	460.118.149.976	480.807.837.587	483.295.627.451
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	72.719.690.300	83.714.425.000	128.193.906.419	315.056.595.870	372.130.781.375	430.063.148.526	387.234.448.397
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.377.165.000	4.395.120.000	4.565.370.000	8.619.700.000	15.216.625.000	9.934.860.000	10.251.620.000
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**))	17.176.262.666	19.390.598.280	22.655.139.708	22.536.365.039	19.127.250	25.425.320.280	21.940.471.029
B	Pembiayaan Pengeluaran							
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	54.934.179.256	10.921.110.161	71.917.632.000	19.234.000.000	8.700.000.000	16.000.000.000	24.300.000.000
3	Pembayaran Pokok Utang	777.777.776	-	-	-	45.523.415.589	139.495.608.833	56.245.341.402
4	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	936.048.000	936.048.000	-	-	-	-
Total (A+B)		779.152.550.084	802.577.611.811	938.992.005.102	832.297.133.063	901.708.099.190	1.101.726.775.226	983.267.508.279

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2020

Adapun rata-rata pertumbuhan APBD Kota Bogor tahun 2019-2020 ditampilkan dalam tabel 3.31, dalam tabel tersebut dapat diperlihatkan jika pada komponen pendapatan, dana alokasi khusus memberikan rata-rata pertumbuhan tertinggi, selanjutnya pada komponen belanja, belanja tidak terduga memberikan rata-rata pertumbuhan tertinggi dan pada komponen pembiayaan daerah, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah memberikan rata-rata pertumbuhan tertinggi.

Tabel 3.13.
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 - 2020 Pemerintah Kota Bogor

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	1,600,396,270,840.00	1,710,411,060,036.00	2,152,370,082,850.00	2,289,359,362,675.33	2,328,703,432,668.85	2,518,784,196,793.00	2,399,051,228,616.00	7.37%
11	PENDAPATAN ASLI DAERAH	544,835,708,254.00	627,597,050,141.00	783,873,587,219.00	978,197,741,947.33	912,197,971,288.85	1,015,884,216,919.00	872,046,925,527.00	9.22%
111	Pendapatan Pajak Daerah	376,487,551,008.00	398,435,398,328.00	492,138,653,391.00	555,475,409,588.00	592,978,746,862.00	689,543,006,040.00	509,039,468,746.00	6.51%
112	Hasil Retribusi Daerah	77,167,650,951.00	46,219,894,849.00	62,727,631,456.00	49,043,299,929.00	48,418,070,315.00	51,362,153,192.00	35,010,375,259.00	-8.87%
113	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23,681,532,602.00	28,807,740,268.00	33,107,211,225.00	29,949,487,128.00	26,772,427,406.00	28,241,844,911.00	31,927,293,792.00	5.83%
114	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67,498,973,693.00	154,134,016,696.00	195,900,091,147.00	343,729,545,302.33	244,028,726,705.85	246,737,212,776.00	296,069,787,730.00	37.17%
12	DANA PERIMBANGAN	855,645,928,015.00	814,953,434,916.00	1,097,614,311,436.00	1,072,486,473,770.00	1,066,762,734,201.00	1,106,494,405,814.00	1,083,171,964,899.00	4.79%
121	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	89,831,370,015.00	68,503,716,916.00	96,843,148,408.00	90,543,462,995.00	94,958,394,936.00	77,654,424,279.00	125,014,721,701.00	9.79%
122	Dana Alokasi Umum	732,337,058,000.00	737,833,158,000.00	806,089,544,000.00	791,929,143,000.00	791,929,143,000.00	838,948,449,000.00	762,556,115,000.00	0.85%
123	Dana Alokasi Khusus	33,477,500,000.00	8,616,560,000.00	194,681,619,028.00	190,013,867,775.00	179,875,196,265.00	189,891,532,535.00	195,601,128,198.00	347.66%
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	199,914,634,571.00	267,860,574,979.00	270,882,184,195.00	238,675,146,958.00	349,742,727,179.00	396,405,574,060.00	443,832,338,190.00	15.84%
131	Pendapatan Hibah	1,034,000,000.00	4,875,000,000.00	14,106,000,000.00	9,000,000,000.00	87,142,218,371.00	88,328,640,000.00	140,434,222,693.00	242.20%
133	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	175,444,557,860.00	200,623,100,069.00	199,830,168,348.00	221,019,088,491.00	236,569,329,408.00	252,139,954,160.00	222,967,276,647.00	4.43%
135	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23,436,076,711.00	62,362,474,910.00	56,946,015,847.00	8,656,058,467.00	26,031,179,400.00	55,936,979,900.00	80,430,838,850.00	72.00%

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA	1,702,962,476,448.00	1,862,982,871,234.00	2,115,296,888,270.00	2,245,590,002,913.00	2,406,586,936,843.04	2,528,500,802,938.19	2,349,990,702,982.00	5.71%
21	BELANJA TIDAK LANGSUNG	779,840,621,487.00	873,674,870,470.00	904,608,992,284.00	929,411,877,942.00	1,042,748,114,753.83	1,080,707,776,909.00	1,167,602,164,991.00	7.03%
211	Belanja Pegawai	726,175,854,412.00	792,640,665,276.00	868,927,388,610.00	813,887,212,647.00	873,107,978,517.00	946,231,166,393.00	902,722,166,877.00	3.92%
212	Belanja Bunga	352,457,562.00	2,415,905,429.00	2,646,198,572.00	5,685,279,325.00	6,598,058,977.83	6,578,046,142.00	547,749,091.00	105.65%
214	Belanja Hibah	35,272,291,000.00	42,891,089,240.00	26,636,028,500.00	75,813,412,400.00	118,993,313,285.00	79,149,334,000.00	93,233,837,587.00	34.93%
215	Belanja Bantuan Sosial	14,654,510,975.00	30,872,505,105.00	29,748,900.00	28,383,948,000.00	38,774,816,900.00	46,743,921,755.00	43,686,702,506.00	15895.52%
217	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	852,232,538.00	999,621,220.00	999,621,220.00	3,371,939,614.00	3,716,867,124.00	1,995,853,019.00	1,134,531,000.00	29.23%
	Belanja Tidak Terduga	2,533,275,000.00	3,855,084,200.00	5,370,006,482.00	2,270,085,956.00	1,557,079,950.00	9,455,600.00	126,277,177,930.00	222546.33%
22	BELANJA LANGSUNG	923,121,854,961.00	989,308,000,764.00	1,210,687,895,986.00	1,316,178,124,971.00	1,363,838,822,089.21	1,447,793,026,029.19	1,182,388,537,991.00	4.95%
221	Belanja Pegawai	124,035,291,258.00	164,327,724,558.00	175,103,589,795.00	216,228,428,193.00	235,582,060,172.00	235,658,195,436.00	107,389,674,312.00	2.85%
222	Belanja Barang dan Jasa	299,750,681,278.00	384,060,724,979.00	483,099,789,155.00	666,457,980,054.00	672,795,038,324.21	711,101,422,815.19	798,841,580,650.00	18.48%
223	Belanja Modal	499,335,882,425.00	440,919,551,227.00	552,484,517,036.00	433,491,716,724.00	455,461,723,593.00	501,033,407,778.00	276,157,283,029.00	-6.29%
	Surplus/Defisit	(102,566,205,608.00)	(152,571,811,198.00)	37,073,194,580.00	43,769,359,762.33	(77,883,504,174.19)	(9,716,606,145.19)	49,060,525,634.00	-171.31%
3	PEMBIAYAAN DAERAH								
31	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	302,181,957,954.00	301,704,906,314.00	340,597,623,600.00	305,753,186,216.00	388,671,502,466.71			
311	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	294,245,909,954.00	300,704,906,314.00	339,661,575,600.00	304,817,138,216.00	330,288,545,977.71	256,564,582,703.52	277,640,687,080.19	-0.14%
312	Penerimaan Pinjaman	7,000,000,000.00	-	-	-	55,640,573,400.00	139,752,780,949.00	32,159,096,032.00	
313	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	936,048,000.00	500,000,000.00	936,048,000.00	936,048,000.00	2,742,383,089.00	5,484,766,178.00	5,484,766,176.00	55.60%
314	Penerimaan Piutang Daerah	-	500,000,000.00	-	-	-	-	19,053,167,687.00	
32	PENGELUARAN	56,211,957,032.00	11,857,158,161.00	72,853,680,000.00	20,170,048,000.00	56,965,798,678.00			
321	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	54,934,179,256.00	10,921,110,161.00	71,917,632,000.00	19,234,000,000.00	8,700,000,000.00	16,000,000,000.00	24,300,000,000.00	81.03%
322	Pembayaran Pokok Utang	777,777,776.00	-	-	-	45,523,415,589.00	139,495,608,833.00	56,245,341,402.00	
	Pemberian Pinjaman Daerah	500,000,000.00	936,048,000.00	936,048,000.00	936,048,000.00	2,742,383,089.00	-	-	

sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU.

Kebijakan pengelolaan pada masa sebelumnya dapat dijadikan evaluasi dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Realisasi atas capaian target pendapatan dan penerimaan daerah menggambarkan peta kemampuan daerah untuk memperoleh pendanaan APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan dicerminkan dari proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja keseluruhan dan proporsi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah.

3.3 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Proporsi Penggunaan Anggaran Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan kepada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan Belanja Daerah secara efektif dan efisien.

Secara umum Belanja Daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

Tabel 3.14.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2014-2020

TAHUN ANGGARAN	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp.)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	%
2014	1.320.382.253.156	1.759.174.433.480	75,06%
2015	1.341.119.390.040	1.874.840.029.395	71,53%
2016	1.568.427.403.287	2.188.150.568.270	71,68%
2017	1.405.918.260.322	2.264.824.002.913	62,08%
2018	1.471.663.488.919	2.460.810.352.432	59,80%
2019	1.609.938.855.231	2.683.996.411.771	59,98%
2020	1.315.057.790.149	2.435.416.044.384	54,00%

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

3.4 ANALISIS PEMBIAYAAN.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan

Belanja Daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Defisit riil anggaran Kota Bogor dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, diperlihatkan pada tabel 3.15

Tabel 3.15
Defisit Riil Anggaran Kota Bogor

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,600,396,270,840.00	1,710,411,060,036.00	2,152,370,082,850.00	2,289,359,362,675.33	2,328,703,432,668.85
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	1,702,962,476,448.00	1,862,982,871,234.00	2,115,296,888,270.00	2,245,590,002,913.00	2,406,586,936,843.04
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	56,211,957,032.00	11,857,158,161.00	72,853,680,000.00	20,170,048,000.00	56,965,798,678.00
	Defisit riil	(158,778,162,640.00)	(164,428,969,359.00)	(35,780,485,420.00)	23,599,311,762.33	(134,849,302,852.19)

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Untuk menutup defisit riil tersebut dilakukan analisis pembiayaan, yang dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan defisit riil yang dihitung berdasarkan data realisasi pendapatan, realisasi belanja serta realisasi pengeluaran pembiayaan pada masa sebelum tahun perencanaan. Selanjutnya analisis pembiayaan juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan sumber-sumber penutup defisit riil tersebut berdasarkan komposisinya.

Tabel 3.16
Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2014-2018

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	97.37%	99.67%	99.73%	99.69%	84.98%
2	Pencairan Dana Cadangan	0%	0%	0%	0%	0%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0%	0%	0%	0%	0%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.32%	0.00%	0.00%	0.00%	14.32%
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.31%	0.17%	0.27%	0.31%	0.71%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk menuntup defisit proporsi terbesar dilakukan melalui SiLPA yaitu sebesar 84,98% (tahun 2018) , sedangkan lainnya melalui pinjaman daerah sebesar

14,32%, dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar 0,71%.

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

Rincian jumlah Silpa dari tahun 2015 sampai tahun 2020 di tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Jumlah SILPA	339.575.280.955,00	304.817.138.216,00	330.288.545.978,33	256.564.582.703,52	277.662.925.853,19	327.501.176.240,31
2	Pelampauan penerimaan PAD	(218.030.093,00)	55.842.763.286,00	60.409.135.497,33	24.801.929.606,85	43.276.927.941,86	130.486.118.951,12
3	Pelampauan penerimaan dana transfer	(84.389.854.488,00)	(55.143.581.197,00)	(74.010.337.635,00)	(25.805.520.146,00)	(55.695.614.186,00)	(3.123.183.661,00)
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(24.452.472.590,00)	(6.412.604.153,00)	(8.913.741.533,00)	(4.985.080.975,00)	(67.694.666.650,00)	(61.742.699.446,00)
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	(449.071.686.135,00)	(310.444.265.635,00)	(351.867.441.648,38)	(249.693.713.317,67)	(347.875.175.853,33)	(287.292.326.076,19)

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Bogor 2014-2018.

3.5 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk Belanja Daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.5.1 PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Adapun komponen dari Pendapatan Daerah, meliputi: PAD; Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), maka Kota Bogor mengalokasikan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% dari APBD. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

Proyeksi pendapatan dan belanja Kota Bogor tahun 2020-2024 melihat dari tren realisasi pendapatan dan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir dengan memperhitungkan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan aspek-aspek lainnya, seiring dengan perubahan RPJMD 2019-2024 disajikan proyeksi dalam kurun waktu RPJMD 2019-2024 pada tabel berikut ini.

Tabel 3.18.
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	Pertumbuhan (%)	PROYEKSI (Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN DAERAH	8.49%	2,384,016,653,140	2,482,148,757,721	2,843,824,901,597	3,123,565,656,721	3,293,257,779,767
11	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.81%	771,531,123,201	914,550,650,320	1,110,709,515,951	1,143,389,984,528	1,238,358,735,761
111	Pajak Daerah	17.24%	470,000,000,000	565,600,000,000	774,175,900,000	787,793,490,000	866,572,839,000
112	Retribusi Daerah	1.92%	36,691,027,400	31,609,433,495	36,394,007,000	36,183,192,843	38,705,356,619
113	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	0.42%	33,520,905,570	32,420,552,150	30,503,342,185	32,009,612,993	33,911,252,770
114	Lain lain PAD yang Sah	7.12%	231,319,190,231	284,920,664,675	269,636,266,766	287,403,688,692	299,169,287,372
12	PENDAPATAN TRANSFER	4.52%	1,444,534,029,939	1,461,272,579,401	1,581,998,665,646	1,650,827,476,781	1,721,986,219,086
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.67%	1,109,545,098,295	1,117,385,616,482	1,252,270,116,000	1,263,205,375,301	1,326,611,675,577
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4.52%	334,988,931,644	343,886,962,919	329,728,549,646	387,622,101,480	395,374,543,509
14	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	31.11%	167,951,500,000	106,325,528,000	151,116,720,000	329,348,195,412	332,912,824,920
141	Hibah		396,000,000	276,000,000	0	178,231,475,412	181,796,104,920
142	Lainlain pendapatan sesuai dengan ketentuan peratauran	1.45%	167,555,500,000	106,049,528,000	151,116,720,000	151,116,720,000	151,116,720,000
2	BELANJA DAERAH	5.80%	2,633,220,414,393	2,841,609,070,361	2,885,557,643,997	3,140,238,529,483	3,295,079,677,268
21	BELANJA OPERASI	8.05%	2,164,587,236,102	2,331,894,995,723	2,386,551,373,350	2,784,563,863,552	2,936,065,264,678
211	Belanja Pegawai	2.92%	1,134,564,423,225	1,114,317,702,705	1,153,277,820,871	1,256,708,922,083	1,269,276,011,304
212	Belanja Barang dan Jasa	16.72%	848,754,091,690	1,081,139,499,721	1,102,146,100,461	1,411,274,733,507	1,545,355,035,014
213	Belanja Bunga	-3.15%	8,010,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000
214	Belanja Hibah	-18.55%	128,766,006,687	72,728,643,297	71,879,728,018	47,080,207,962	49,434,218,360
215	Belanja Bantuan Sosial	10.80%	44,492,714,500	56,709,150,000	52,247,724,000	62,500,000,000	65,000,000,000
22	BELANJA MODAL	6.35%	307,168,807,801	477,902,795,330	459,506,270,647	333,974,665,931	337,314,412,590
23	BELANJA TIDAK TERDUGA	-25.69%	160,329,839,490	30,111,279,308	37,800,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000
24	BELANJA TRANSFER	12.46%	1,134,531,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000
	SURPLUS/DEFISIT	-48.32%	-249,203,761,253	-359,460,312,640	-41,732,742,400	-16,672,872,762	-1,821,897,501

NO	URAIAN	Pertumbuhan (%)	PROYEKSI (Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	PEMBIAYAAN	0.00%					
31	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-14.28%	358,159,958,113	364,957,344,900	205,497,032,260	188,628,847,523	175,179,511,037
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-9.19%	277,662,925,853	327,501,176,240	200,000,000,000	183,131,815,263	169,682,478,777
	Penerimaan Pinjaman Daerah		75,000,000,000	31,959,136,400	0	0	0
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00%	5,497,032,260	5,497,032,260	5,497,032,260	5,497,032,260	5,497,032,260
	Piutang Daerah	0.00%					
		0.00%					
32	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.30%	108,956,196,860	5,497,032,260	12,527,569,860	10,556,156,662	10,556,156,662
	Penyertaan Modal Daerah		28,459,164,600	0	7,030,537,600	5,000,000,000	5,000,000,000
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-23.02%	80,497,032,260	5,497,032,260	5,497,032,260	5,556,156,662	5,556,156,662
	Pembiayaan Netto	-4.34%	249,203,761,253	359,460,312,640	192,969,462,400	178,072,690,861	164,623,354,375
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun		-	-	151,236,720,000	161,399,818,099	162,801,456,874
	TOTAL APBD	4.81%	2,742,176,611,253	2,847,106,102,621	2,898,085,213,857	3,150,794,686,145	3,305,635,833,930

Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kota Bogor *)Untuk Pendapatan Tahun 2020 sudah merupakan realisasi

3.5.2 PERHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN.

3.5.2.1 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).

Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.19.
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kota Bogor Tahun 2020-2024

URAIAN	PROYEKSI				
	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	277,662,925,853	327,501,176,240	200,000,000,000	183,131,815,263	169,682,478,777

Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kota Bogor

3.5.2.2 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2020 - 2024 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2014-2020, sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.20.
Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kota Bogor Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2020* (Rp)	2021* (Rp)	2022* (Rp)	2023* (Rp)	2024* (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.134.564.423.225	1,114,317,702,705	1,153,277,820,871	1,256,708,922,083	1,269,276,011,304
2	Belanja Bunga	8.010.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.134.531.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
4	Belanja Hibah	128.766.006.687	72,728,643,297	71,879,728,018	47,080,207,962	49,434,218,360
5	Belanja Bantuan Sosial	44.492.714.500	56,709,150,000	52,247,724,000	62,500,000,000	65,000,000,000
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
6	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	28.459.164.600	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
7	Pembayaran Pokok Utang	5.497.032.258	5.497.032.258	5.497.032.258	5.497.032.258	5.497.032.258
	Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama					

Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kota Bogor

3.5.2.3 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.21.**Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan	2.409.619.206.351	2.466.284.423.748	2.618.813.325.202	2.765.521.844.946	2.920.750.529.431
2	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	213.597.265.866	204.485.494.462	197.303.745.017	192.052.017.532	188.730.312.006
	Total penerimaan	2.623.216.472.217	2.670.769.918.210	2.816.117.070.219	2.957.573.862.478	3.109.480.841.437
	Dikurangi:					
3	Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama	1.227.393.247.517	1.232.927.401.455	1.269.150.768.250	1.306.278.296.464	1.344.959.922.244
	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	1.395.823.224.700	1.437.842.516.754	1,546.966.301.968	1.651.295.566.014	1.764.520,919.192

Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kota Bogor

3.5.3 KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 3.18.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai Belanja Langsung operasional Perangkat Daerah dan pemenuhan pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pencapaian target SPM urusan wajib pelayanan dasar.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah termasuk janji janji politis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai Belanja Langsung yang wajib dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku

Tabel 3.22.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Daerah Kota Bogor

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	1.395.823.224.700	1.437.842.516.754	1.546.966.301.968	1.651.295.566.014	1.764.520.919.192
2	Prioritas 1	390.656.627.146	479.817.809.654	568.636.420.113	648.713.972.880	627.513.131.707
3	Prioritas 2	794.499.772.473	771.969.872.058	795.756.200.759	787.929.506.800	923.093.493.181
4	Prioritas 3	210.666.825.081	186.054.835.041	182.573.681.096	214.652.086.333	213.914.294.305

Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD Kota Bogor

3.6. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya.

Besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di Kota Bogor dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong pemerintah Kota Bogor untuk mencari alternatif pembiayaan. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan diantaranya : APBN (Dana Transfer), APBD Provinsi, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Sumber Pendanaan Lainnya (PHLN & Obligasi).

3.6.1. APBN (Dana Transfer).

Dana APBN yang masuk ke Pemerintah daerah terdiri dari dana Transfer ke Daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), DAK (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah, dan Dana Insentif Daerah (DID), serta Tambahan DAU untuk dana Kelurahan. Beberapa kebijakan utama yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Bogor agar pemanfaatan Dana Transfer di daerah dapat terwujud di antaranya :

- a. **Pertama**, Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
- b. **Kedua**, DAK fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air

minum, irigasi dan pertanian, perumahan, dan jalan) serta afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. "Sedangkan DAK non-fisik diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), dan bantuan operasional kesehatan untuk Puskesmas.

- c. **Ketiga** adalah pemberian dana insentif kepada daerah untuk memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, dan pelayanan pemerintahan umum.
- d. **Keempat**, Tambahan DAK untuk dana kelurahan diarahkan untuk kegiatan peningkatan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

3.6.2 Pendanaan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Pendanaan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya bersumber dari pendanaan Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah Lainnya.

1. Dana APBD Provinsi yang masuk ke Pemerintah Daerah terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat.
2. Dana dari Provinsi DKI Jakarta yang masuk ke Pemerintah Daerah terdiri dari dana Bantuan Keuangan dan atau hibah dari Provinsi DKI Jakarta

3.6.3 Peran Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) Dalam Penganggaran Pembangunan Daerah.

Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024 selain berasal dari sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud diatas, potensi Pendapatan Daerah juga berasal dari CSR/TJSLP. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada 3 (tiga) hal yaitu profit, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan

lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang.

Kegiatan program CSR/TJSLP pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun ekonomi, ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti pendidikan, dan lingkungan. Implementasi CSR/TJSLP di Kota Bogor disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dan dengan koridor tetap skala prioritas Kota Bogor.

Tabel 3.23.

**Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan Kota Bogor Tahun 2016-2018**

No	Nama Perusahaan	2016	2017	2018
1	Perumda BPR Bank Kota Bogor	104.282.000		183.900.000
2	Bank BJB Cabang Bogor		948.260.000	15.000.000
3	PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor			350.000.000
4	PT. Patra Telekomunikasi Indonesia (Patrakom)/ Telkom Group	10.000.000	15.000.000	
5	PT. Metrasat (Telkom Group)	15.000.000	20.000.000	
6	The 101 Hotel Bogor Suryakencana	10.000.000	67.250.000	124.464.600
7	Universitas Ibn Khaldun Bogor	19.600.000	180.000.000	
8	PT. Bank Mandiri (Persero) TBK		2.969.300.000	
9	Yogya Bogor Junction		14.000.000	
10	Rumah Makan Gurih 7		13.920.000	
11	The Mirah Hotel (PT Mirah Segar)			197.226.850
12	PT Taspen (Persero)			242.500.000
13	PT Bogor Anggana Cendekia (Botani Square)			233.000.000
14	PT Adev Natural Indonesia			231.153.000
15	PT Baruna Bangun Sentosa (Damara Village)			16.500.000
16	Yayasan Inspirasi Anak Bangsa dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)			300.000.000
17	PT Agricon			300.000.000
	TOTAL	158.882.000	4.227.730.000	2.193.744.450

Sumber : Bappeda Kota Bogor

Sementara untuk tahun 2019, CSR yang berhasil dihimpun mencapai Rp. 4.531.798.335,-.

Tabel 3.24.
Perkembangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan Kota Bogor Tahun 2019

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NILAI TOTAL (Rp)
1	Boehringer Ingelheim	27,300,000
2.	Padjadjaran Suites Resort & Convention Hotel	58,000,000
3	Perumda BPR Bank Kota Bogor	220,000,000
4	Lemongrass	3,000,000
5	The Mirah Hotel (PT Mirah Segar)	364,114,530
6	Salak Pajajaran Hotel	15,000,000
7	PT Sinar Indonesia Loka (Mal Boxies 123)	51,983,345
8	PT. Nutrifood	228,174,000
9	Zest Hotel Bogor	9,500,000
10.	PT. PLN UP3 Bogor	480,250,000
11.	PT Bogor Anggana Cendekia (Botani Square)	579,433,300
12.	Yamaha Mekar Motor	26,350,000
13.	101 Hotel Bogor Suryakencana	62,980,000
14.	PT. Bank OCBC NISP, Tbk	6,800,000
15.	Bank BNI (Persero), Tbk.	1,040,225,000
16.	Royal Padjadjaran Hotel	12,630,500
17.	PT. Telekomunikasi, Tbk (Witel Bogor)	110,000,000
18.	Aston Bogor Hotel & Resort	29,179,660
19.	PT. Taspen (Persero) KC Bogor	527,625,000
20.	PT. PLN (Persero) UP3 Bogor	629,250,000
21.	Hotel Amaroossa Royal Bogor	50,003,000
		4,531,798,335

Sedangkan untuk tahun 2020, CSR yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp. 3.929.034.598,-. Peran perusahaan/ sektor swasta dalam memenuhi TJSPL pada tahun 2019-2024 akan diarahkan untuk :

1. Pembangunan Sosial, yaitu diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman pohon, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;

3. Kesehatan, yang diarahkan untuk penyelenggaraan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
4. Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
5. Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
6. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan;
7. Sarana dan prasarana keagamaan; dan
8. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan menunjang perencanaan pembangunan Kota Bogor yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mendorong minat perusahaan untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah melalui Program CSR/TJSPL, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan upaya – upaya melalui :

1. Diseminasi/Sosialisasi program CSR/TJSPL Kota Bogor
2. Peningkatan koordinasi sinergi program pembangunan dengan perusahaan – perusahaan yang telah bermitra di Kota Bogor.
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi CSR/TJSPL.
4. Peningkatan kerjasama melalui updating data penawaran program prioritas pembangunan melalui CSR/TJSPL.
5. Berkolaborasi dengan Pemerintah Jawa Barat dalam mendorong peningkatan peran perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi dalam program CSR/TJSPL. Berdasarkan upaya-upaya diatas diharapkan adanya peningkatan mitra CSR Jawa Barat serta peminatan program dan kegiatan pembangunan yang ditawarkan pada perusahaan-perusahaan di Jawa Barat.

3.6.4. Pendanaan melalui *Creative Financing*.

Selama ini Pemerintah Daerah mengandalkan dana pemerintah berupa APBN, APBD I dan APBD II untuk membiayai pembangunan

daerah. Perolehan sumber pembiayaan yang bersifat konvensional tersebut menyebabkan daerah memiliki kapasitas fiskal yang terbatas dalam penyediaan infrastruktur. Perlu adanya upaya mendapatkan alternatif pembiayaan lainnya melalui *creative financing*. *Creative financing* adalah paradigma baru dalam membiayai kebutuhan pembangunan, sehingga pembiayaan infrastruktur tidak hanya dibebankan APBN dan APBD, beberapa jenis *creative financing* adalah:

1. *Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perusahaan*
2. Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
3. Pinjaman.
4. Pendanaan berasal dana masyarakat melalui mekanisme pasar modal seperti Obligasi Daerah.
5. PINA (pembiayaan Infrastruktur non anggaran Pemerintah)

KPBU, Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum.

Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha.

2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

1. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
5. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule-on budget).
2. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
3. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan *governance* terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri

dalam pemberian rekomendasi *Availability Payment/AP* Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam *debottlenecking*, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marjinal. Skema pendanaan 19 sektor melalui KPBU dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri

1. Kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika),
2. Kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumahan rakyat, dan
3. Kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan).

Alternatif pembiayaan lainnya adalah Pinjaman Daerah, mengacu pada PP 56 Tahun 2018, pinjaman daerah yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman

Pinjaman Daerah terdiri dari pinjaman melalui perbankan misalnya melalui Bank Pembangunan Daerah atau perbankan nasional, pinjaman dari lembaga bukan bank seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan pinjaman yang berasal dari masyarakat melalui mekanisme pasar modal seperti Obligasi Daerah.

Berdasarkan PMK No 111/PMK.07/2012 yang telah diperbaharui oleh PMK Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas tentang Tatacara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, Pengertian Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di Pasar Modal. Obligasi Daerah merupakan sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka Obligasi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (Revenue Bond); Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai Obligasi Daerah pada saat diterbitkan. Dengan ketentuan ini maka Pemerintah Daerah dilarang menerbitkan Obligasi Daerah dengan jenis indeks bond yaitu Obligasi Daerah yang nilai jatuh temponya dinilai dengan indeks tertentu dari nilai nominal.

Dalam pemanfaatan mekanisme pendanaan melalui *creative financing* diatas (khususnya untuk obligasi dan pinjaman), harus di bahas secara khusus dan mendapatkan persetujuan dari legislatif, dan perlu melalau analisis kelayakan proyek yang mendalam dan menyeluruh. Namun dalam kerangka perencanaan jangka menengah, semua sumber pembiayaan pembangunan yang memungkinkan, perlu dicantumkan sebagai dasar untuk mencari sumber pendanaan tersebut. Namun demikian keputusan dalam pemanfaatan *creative financing* diatas tetap harus melalui persetujuan legislatif.

Terdapat beberapa rencana pembangunan Infrastruktur strategis Kota Bogor 5 (lima) tahun ke depan yang sangat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kota Bogor, serta sekaligus berdampak pada peningkatan penerimaan bagi APBD Kota Bogor yang dapat di danai melalui berbagai pola *Creative financing*, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.25.
Program Pembangunan Infrastruktur Strategis Kota Bogor
Tahun 2020-2024 melalui *Creative financing*

No.	Pembangunan Infrastruktur	Lokasi	Rencana Anggaran (Rp.)	Pola <i>Creative Financing</i>
1	Pembangunan WTP Palasari 50 Liter/Detik, Reservoair Kapasitas 1000 M3, Jaringan	Kota Bogor	Rp. 16.000.000.000,-	Sinergi Pendanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan

No.	Pembangunan Infrastruktur	Lokasi	Rencana Anggaran (Rp.)	Pola <i>Creative Financing</i>
	Distribusi Utama			Pembiayaan Hutang Daerah
2	Pembangunan WTP Cikereteg 200 Liter/Detik, Reservoir Kapasitas 4000 M3, Jaringan Distribusi Utama	Kota Bogor	Rp. 68.000.000.000,-	
3	Pembangunan Gedung RSUD Tahap III (4 Blok)	Kota Bogor	Rp. 449.973.490.000,-	
4	Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	Kota Bogor	Rp.300.000.000.000,-	Sinergi pendanaan pemerintah pusat, Pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan kerja sama swasta
5	Pembangunan Transportasi Berbasis Rel	Kota Bogor	Rp. 400.000.000.000,-	
6	Pembangunan kawasan pusat pemerintahan Kota Bogor	Kota Bogor	Rp. 550.000.000.000,-	
	TOTAL		Rp. 1.783.973.490.000	



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sementara isu strategis pembangunan daerah merupakan seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kota Bogor. Pembangunan daerah Kota Bogor ke depan diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana potensi yang terkandung di dalamnya. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi, dan masalah keberlangsungan (sustainability) pembangunan.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pembangunan daerah di Kota Bogor bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang ditandai oleh meningkatnya berbagai indikator sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Kota Bogor; meningkatnya kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, dan antar kelompok masyarakat.

Agar pembangunan daerah dapat berhasil sesuai dengan tujuannya, pemerintah harus tanggap terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala untuk mewujudkan Kota Bogor yang lebih baik. Langkah awal pemetaan permasalahan adalah identifikasi potensi permasalahan yang selanjutnya dipetakan menjadi permasalahan pokok, permasalahan dan akar masalah. Permasalahan pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi

daerah. Selanjutnya penyebab yang spesifik dari permasalahan pokok sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan sebagai permasalahan. Sementara, perumusan akar masalah dilakukan dengan mencari beberapa penyebab dari permasalahan yang lebih rinci.

Berdasarkan evaluasi pembangunan Kota Bogor 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, ada 4 permasalahan pokok yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Bogor untuk mencapai tujuan akhir RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 yakni:

1. Permasalahan Pembangunan Manusia (IPM, derajat pendidikan, dan derajat kesehatan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pemberdayaan Masyarakat, Pengarusutamaan gender, Perlindungan Sosial Masyarakat, dan Ketahanan Keluarga)
2. Permasalahan Pembangunan Ekonomi (Laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, pemerataan kesejahteraan masyarakat)
3. Permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Lingkungan (Permasalahan Kapasitas dan kualitas infrastruktur dan Prasarana Sarana Utilitas permukiman, Permasalahan infrastruktur kebencanaan, Permasalahan konektivitas infrastruktur dan manajemen transportasi, serta Permasalahan Penataan Ruang dan pengelolaan lingkungan hidup)
4. Permasalahan Efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan (8 area perubahan dalam reformasi birokrasi).

Dari empat Permasalahan Pokok sebagaimana dimaksud diatas, ada tujuh masalah yang lebih rinci harus diselesaikan dalam periode tahun 2019-2024 yaitu :

Gambar 4.1
Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Bogor 2019-2024



Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor Tahun 2020

Selanjutnya permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud diatas akan diuraikan akar masalahnya berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

4.1.1 URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan menjadi permasalahan yang paling dominan dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik tahun 2017, IPM Kota Bogor memang sudah berada diatas IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat, dimana IPM Kota Bogor adalah 75.16, sedangkan IPM Nasional 70.81 dan IPM Provinsi Jawa Barat 70,69. Meskipun demikian, kualitas SDM di Kota Bogor harus tetap ditingkatkan mengingat SDM merupakan faktor penentu bagi pembangunan daerah agar menjadi daerah yang memiliki daya saing tinggi.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Bogor dalam urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Masih belum tuntasnya melek huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke Atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0% dan maksimal 100%. Pada periode 2014-2017. Capaian angka melek huruf Kota Bogor selalu mengalami trend peningkatan. AMH di Kota Bogor pada tahun 2016 adalah sebesar 98,83 % dan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 99,20%,

Berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bogor pada tahun 2016, tercatat bahwa 1 orang dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas masih buta huruf (1,17% penduduk Kota Bogor masih buta huruf). Dari angka tersebut, ditemukan perempuan yang buta huruf sebesar 2,22% atau 15 kali lipat dibandingkan laki-laki buta huruf yaitu sebesar 0,15%. Sementara persentase terbesar penduduk buta huruf di Kota Bogor justru berada pada kuintil 3 yaitu sebesar 2,84% dari penduduk di kuintil 3, sementara hanya 0,96% penduduk di kuintil 1 (penduduk miskin) yang buta huruf. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan persentase Penduduk 15 tahun ke atas menurut karakteristik dan kemampuan membaca dan menulis.

Tabel 4.1
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Berdasarkan Kemampuan Membaca Dan Menulis

KARAKTERISTIK	HURUF LATIN	HURUF ARAB	HURUF LAINNYA	BUTA HURUF
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	99,59	62,61	5,14	0,15
Perempuan	96,93	64,28	4,46	2,22
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	98,03	56,47	3,41	0,96
Kuintil 2	98,36	64,10	4,54	0,97
Kuintil 3	96,40	74,29	2,51	2,84
Kuintil 4	98,69	63,21	3,16	1,1
Kuintil 5	99,78	58,37	9,99	NA
Kota Bogor	98,27	63,44	4,80	1,17

Sumber : BPS, Tahun 2018

Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun ke tahun cenderung tidak terlalu besar, hal ini disebabkan karena capaian kinerja sudah mendekati 100%. Walaupun demikian, di tahun 2017 masih ada masyarakat Kota Bogor yang buta huruf (0,8%). Hal ini sebagai akibat adanya penduduk lanjut usia yang masih belum bisa membaca dan menulis, namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia.

- Masih adanya penduduk miskin usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah (0,3%)

Sekitar 26,88% penduduk Kota Bogor usia 7-24 tahun sudah tidak bersekolah lagi. Kondisi ini menjadi salah satu potensi penyumbang angka pengangguran terbuka di Kota Bogor. Berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bogor pada tahun 2017, tercatat 27 dari 100 penduduk berusia 7-24 tahun sudah tidak bersekolah lagi. Sementara apabila dipilah antara laki-laki dan perempuan, ternyata persentase laki-laki usia 7-24 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi lebih besar (27,53%) dibanding persentase perempuan usia 7-24 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi (26,19%). Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan persentase Penduduk usia 7-24 tahun menurut karakteristik dan status pendidikan, 2017 (BPS, 2017).

Tabel 4.2
Penduduk Kota Bogor Usia 7-24 Tahun Berdasarkan Status Bersekolah

KARAKTERISTIK	TIDAK /BELUM PERNAH BERSEKOLAH	TIDAK/BELUM PERNAH BERSEKOLAH			TIDAK BERSEKOLAH LAGI	JUMLAH
		SD/ SEDERAJAT	SMP/ SEDERAJAT	SMA/ SEDERAJAT		
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	0,28	32,59	14,93	24,68	27,53	100,00
Perempuan	0,32	29,69	16,08	27,71	26,19	100,00
Kuintil Pengeluaran						
Kuintil 1	0,64	37,38	18,58	14,54	28,86	100,00
Kuintil 2	0,64	32,66	10,15	28,07	28,48	100,00
Kuintil 3		33,90	18,08	24,28	23,75	100,00
Kuintil 4		26,10	12,36	29,22	32,32	100,00
Kuintil 5		22,70	18,91	39,69	18,70	100,00
Kota Bogor	0,30	31,18	15,49	26,16	26,88	100,00

Sumber : BPS, 2018

- Angka Partisipasi Sekolah Penduduk miskin usia 5-6 Tahun masih sangat rendah (APS PAUD)

Berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bogor pada tahun 2017, tercatat Angka Partisipasi sekolah anak usia 5-6 tahun pada rumah tangga miskin (kuintil 1 dan Kuintil 2) masih sangat rendah yaitu < 50%.

- Angka Partisipasi Sekolah Penduduk miskin usia 16-18 Tahun masih rendah (APS SMA)

Berdasarkan data statistik kesejahteraan rakyat yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bogor pada tahun 2017, tercatat Angka Partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun pada rumah tangga miskin terutama di kuintil 1 masih sangat rendah yaitu < 50% dan di Kuintil berkisar 66,44%. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Berumur 5-18 Tahun menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2017 (BPS, 2017).

Tabel 4.3
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Berumur 5-18 Tahun menurut Karakteristik Dan Kelompok Umur Tahun 2017

KARAKTERISTIK	5 - 6 Tahun	7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun	16 - 18 Tahun
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	20,63	NA	95,95	68,46
Perempuan	25,87	NA	94,54	77,14
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	34,63	NA	91,10	41,38
Kuintil 2	26,29	NA	95,41	66,44
Kuintil 3	31,32	NA	94,79	80,97
Kuintil 4	NA	NA	99,05	80,39
Kuintil 5	NA	NA	NA	NA
Kota Bogor	23,39	NA	95,22	72,56

Sumber : BPS Kota Bogor, 2018

5. Mutu/kualitas anak didik masih belum menunjukkan tingkat daya saing siswa yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tren rata-rata nilai hasil ujian nasional siswa SMP dan SD masih belum sesuai dengan yang telah ditargetkan.
6. Pendidikan karakter sejak usia dini masih belum mampu secara optimal mengantisipasi pengaruh globalisasi.
7. Kesiapan dan pelaksanaan Sistem pendidikan di masa pandemi masih belum optimal
8. Kualitas daya saing lulusan masih relative lemah khususnya dalam hal pendidikan vokasi, hal ini terlihat dari tingginya pengangguran yang berasal dari lulusan SMA/SMK
9. Masih terjadinya putus jenjang, hal ini juga diperkuat dengan rata rata lama sekolah yang sulit untuk tercapai

Adapun akar masalah dari kondisi permasalahan sebagaimana tersebut diatas adalah :

1. Belum meratanya mutu/kualitas layanan pendidikan

2. Belum terpenuhinya sarana prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal
3. Belum terpenuhinya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik/guru sesuai dengan standar
4. Kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar dikdas dan menengah serta pemberantasan buta aksara belum optimal
5. Belum optimalnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, khususnya untuk pendidikan nonformal; Konsep *link and match* antara dunia pendidikan dengan lapangan pekerjaan masih belum menjadi salah satu target pembelajaran terutama untuk pendidikan nonformal;
6. Pendidikan karakter di sekolah belum mampu secara efektif mengimbangi Kecepatan perubahan lingkungan sebagai dampak globalisasi
7. Ketidakberdayaan penduduk miskin dalam mengakses pendidikan, yang disebabkan karena faktor ekonomi, sosial budaya, dan sarana prasarana pendukung pendidikan
8. Masih belum optimalnya pengembangan sekolah inklusif.
9. Belum optimalnya tata kelola dan penjaminan mutu pendidikan
10. Belum ada desain kurikulum, formulasi, dan SOP pembelajaran jarak jauh yang tepat untuk dilaksanakan di masa pandemi.
11. Belum optimalnya sinergitas antara sekolah dengan keluarga dalam hal pembelajaran di masa pandemi.
12. Belum meratanya sarana pembelajaran jarak jauh
13. Kemampuan Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan belum seluruhnya siap dengan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Bogor dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Angka Kesakitan yang masih cukup tinggi

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu dalam aktivitas sehari-hari (tidak dapat melakukan kegiatan secara normal seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya).

Apabila dilihat dari data statistik kesehatan berdasarkan gender terlihat bahwa angka kesakitan perempuan lebih tinggi dibanding dengan angka kesakitan laki-laki. Sementara apabila dilihat berdasarkan tingkat kesejahteraan, angka kesakitan penduduk di kuintil 5 (penduduk dengan tingkat kesejahteraan tinggi) ternyata lebih besar dibanding dengan angka kesakitan penduduk miskin. Hal ini kemungkinan besar dipicu oleh makin meningkatnya gangguan penyakit tidak menular yang diakibatkan oleh pola hidup dan konsumsi makanan yang tidak sehat. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan kondisi angka kesakitan di kota Bogor tahun 2017 (BPS, 2017).

Tabel 4.4
Angka Kesakitan Kota Bogor Tahun 2017

KARAKTERISTIK	ANGKA KESAKITAN	RATA-RATA LAMA SAKIT (HARI)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	13,36	5,33
Perempuan	15,62	5,08
Kuintil Pengeluaran		
Kuintil 1	14,33	6,52
Kuintil 2	13,82	5,49
Kuintil 3	14,85	5,99
Kuintil 4	14,17	3,68
Kuintil 5	15,2	4,30
Kota Bogor	14,47	5,20

Sumber : BPS Kota Bogor, Tahun 2018

2. Kasus BBLR masih cukup tinggi yaitu sekitar 19,88%

Dari angka tersebut kasus BBLR paling banyak terjadi pada kelompok masyarakat miskin (kuintil 1) dengan persentase hampir 32,93%. Berikut ini adalah data statistik berdasarkan hasil survey BPS tahun 2017.

Tabel 4.5
Persentase Bayi Lahir Berdasarkan Berat Badan Saat Lahir

KARAKTERISTIK	< 2,5 KG	≥ 2,5 KG	TIDAK DITIMBANG / TIDAK TAHU	JUMLAH
Jenis Kelamin KRT				
Laki-Laki	19,72	78,17	NA	100,00
Perempuan	23,96	NA		100,00
Kuintil Pengeluaran				
Kuintil 1	32,93	67,07		100,00
Kuintil 2	NA	77,03	NA	100,00
Kuintil 3	NA	89,07		100,00
Kuintil 4	NA	91,78		100,00
Kuintil 5	30,43	69,57		100,00
Pendidikan Tertinggi KRT				
Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat	NA	80,31		100,00

KARAKTERISTIK	< 2,5 KG	≥ 2,5 KG	TIDAK DITIMBANG / TIDAK TAHU	JUMLAH
SD				
SD Dan Sederajat	NA	70,78		100,00
SMP Dan Sederajat	NA	76,44		100,00
SMA Ke Atas	14,82	81,40	NA	100,00
Kota Bogor	19,88	78,09	NA	100,00

Sumber : BPS Kota Bogor Tahun 2018

Data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor menyebutkan bahwa persentase kasus BBLR terhadap seluruh kasus komplikasi pada bayi baru lahir memang terus menurun tetapi tingkat penurunannya belum signifikan. Selain kasus BBLR, kasus-kasus lainnya yang berpotensi menjadi pemicu kematian bayi adalah kasus asfiksia pada bayi baru lahir, kasus penumenonia pada bayi, dan kasus diare pada bayi. Berikut ini adalah Data kasus-kasus kesehatan yang berpotensi memicu kematian pada bayi yang terjadi di Kota Bogor pada tahun 2015-2018

Tabel 4.6
Kasus Kesehatan yang Berpotensi Memicu Kematian Pada Bayi

Tahun	2015	2016	2017	s.d. Oktober 2018
Persentase Kasus BBLR	19,8	18	16,9	17,2
Persentase Kasus Asfiksia	5,8	3	4,7	5,3
Kasus Kelainan Kongenital	2,9	4	4,7	2,9
Jumlah Kematian Bayi karena Diare per 1000 kelahiran	1	0	2	
Jumlah Kematian Bayi karena pneumonia per 1000 kelahiran	2	3	4	

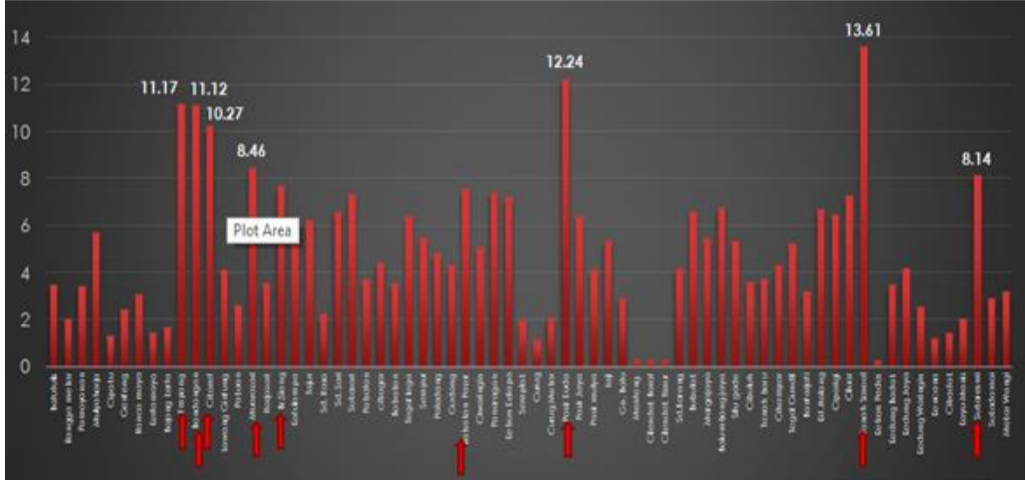
Sumber : Laporan Evaluasi Renstra Dinkes, 2018

3. Permasalahan Stunting dan Status Gizi Bayi dan Balita,

Saat ini sebagian masyarakat masih mengalami permasalahan dalam hal kecukupan gizi, dimana permasalahan gizi ini berisiko terhadap stunting pada anak, yaitu kondisi gagal tumbuh pada balita karean kekurangan gizi kronis. Stunting menyebabkan terhambatnya perkembangan fisik, otak, kecerdasan, dan kemampuan belajar, yang bersifat permanen. Kondisi ini menyebabkan potensi penurunan kualitas SDM kota Bogor di masa depan. Tahun 2019 Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) di kota Bogor mncapai 4,8%. Yang tersebar di 68 kelurahan. Adapaun kelurahan yang paling tinggi angka stuntingnya

adalah kelurahan Tanah Sareal, data selengkapnya diperlihatkan pada grafik berikut:

Grafik 4.1
Persentase Data Stunting per Kelurahan



Sumber : Data Dinas Kesehatan, 2021

Berikut ini adalah beberapa data permasalahan terkait gizi bayi dan balita berdasarkan hasil pemantauan dinas kesehatan tahun 2015-2018 sebagai berikut :

Tabel 4.7
Data Permasalahan Terkait Gizi Bayi dan Balita 2015-2018

TAHUN	2015	2016	2017	S.D. OKTOBER 2018
Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang (Under weight)	5,78	5,62	5,72	
Persentase Balita Wasting (kurus dan kurus sekali)	2,57	2,44	2,38	
Persentase stunting (Balita Pendek dan pendek sekali)	8,62	7,62	6,58	

Sumber : Data Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan, 2018

Permasalahan tersebut diatas, antara lain dipicu karena asupan makanan bayi sejak dalam kandungan dan setelah lahir masih belum optimal. Hal ini dapat dipicu karena masih adanya ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi kronik (KEK) dan atau menderita anemia, serta masih rendahnya kualitas pemberian ASI pada bayi. Data-data yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Penyebab Masalah Gizi Pada Bayi Dan Balita Tahun 2015-2018

TAHUN	2015	2016	2017	S.D. OKTOBER 2018
Persentase Ibu Hamil KEK	5,4	6,9	5,9	4,41
Persentase Ibu Hamil Anemia	8,7	11	15	7,85
Persentase Pemberian ASI Eksklusif	53,7	49,5	49,5	38,18
Persentase bayi baru lahir mendapatkan layanan Insiasi Menyusu Dini (IMD)		53,6	64,8	

Sumber : Data Dinas Kesehatan, 2018

BPS mencatat pada tahun 2017, baru 86,16 % penduduk berusia 0-23 bulan yang mendapatkan ASI. Rata-rata bayi pada penduduk miskin dan rentan miskin (kuintil 1 dan kuintil 2) hanya diberikan ASI selama 11 bulan sementara pada penduduk di kuintil 3-5 sudah lebih dari 12 bulan. Data BPS juga mencatat bahwa latar belakang Pendidikan Ibu juga sangat mempengaruhi pola pemberian ASI pada baduta. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Cakupan Pemberian ASI Pada Baduta Tahun 2017

KARAKTERISTIK	PERSENTASE BADUTA PERNAH DIBERI ASI	RATA-RATA LAMA PEMBERIAN ASI (BULAN)
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	76,65	13,44
Perempuan	95,04	11,65
Kuintil Pengeluaran		
Kuintil 1	66,59	11,68
Kuintil 2	93,67	12,59
Kuintil 3	93,27	11,80
Kuintil 4	100,00	12,99
Kuintil 5	82,40	13,00
Pendidikan Tertinggi KRT		
Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD	100,00	10,84
SD Dan Sederajat	64,99	13,11
SMP Dan Sederajat	91,30	13,84
SMA Ke Atas	91,96	12,22
Kota Bogor	86,16	12,42

Sumber : BPS, Tahun 2017

4. Permasalahan Imunisasi juga sangat mempengaruhi tingkat kesehatan dan tumbuh kembang bayi dan balita.

Menurut data BPS, pada tahun 2017 persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap baru sekitar 17,06 %. Sementara untuk imunisasi dasar, Dinas Kesehatan mencatat bahwa persentase pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi sudah mencapai angka 93,9 % pada tahun 2017.

Tabel 4.10
Cakupan Pemberian Imunisasi Pada Balita Tahun 2017

KARAKTERISTIK	MEMILIKI KARTU IMUNISASI	MENDAPAT IMUNISASI LENGKAP
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	92,48	19,23
Perempuan	85,92	14,75
Kuintil Pengeluaran		
Kuintil 1	88,67	14,76
Kuintil 2	85,59	22,11
Kuintil 3	98,85	32,33
Kuintil 4	83,51	NA
Kuintil 5	91,00	NA
Pendidikan Tertinggi KRT		
Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD	97,66	NA
SD Dan Sederajat	95,95	19,99
SMP Dan Sederajat	79,18	15,65
SMA Ke Atas	88,09	16,05
Kota Bogor	89,30	17,06

Sumber : BPS, 2017

5. Masih cukup tingginya persentase proses kelahiran pada penduduk miskin (kuintil 1 dan kuintil 2) yang ditangani bukan di fasilitas kesehatan.

Berdasarkan data statistik masih ada lebih dari 10% proses kelahiran pada kelompok penduduk miskin yang ditangani bukan di fasilitas kesehatan. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Proses Melahirkan di Fasilitas Kesehatan dan Bukan Fasilitas Kesehatan Tahun 2017

KARAKTERISTIK	FASILITAS KESEHATAN*	BUKAN FASILITAS KESEHATAN
Kuintil Pengeluaran		
Kuintil 1	89,37	NA
Kuintil 2	86,02	NA
Kuintil 3	100,00	
Kuintil 4	100,00	
Kuintil 5	100,00	
Pendidikan Tertinggi KRT		
Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD	100,00	
SD Dan Sederajat	90,25	NA
SMP Dan Sederajat	95,79	NA
SMA Ke Atas	96,41	NA
Kota Bogor	95,17	NA
*Fasilitas Kesehatan : RS Pemerintah, RS Swasta, Puskesmas, Pustu, Polides, Tempat Praktek Tenaga Kesehatan		

Sumber : Data BPS, 2017

- Masih banyaknya ibu hamil pada usia yang terlalu tua atau terlalu muda, dan ibu hamil dengan jarak kehamilan terlalu dekat atau terlalu banyak anak yang berpotensi terhadap tingginya faktor resiko kematian ibu.

Berdasarkan hasil evaluasi dari dinas kesehatan, kasus-kasus kehamilan yang mempunyai resiko tinggi terhadap kematian ibu dapat digambarkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.12
Kasus Kelahiran dengan Resiko Tinggi Tahun 2018

TAHUN	2015	2016	2017	S.D. OKTOBER 2018
Persentase Kehamilan pada Ibu Umum < 20 Tahun	3,8	3,8	3,8	2,4
Persentase Kehamilan pada Ibu umur > 35 Tahun	5,3	5,3	5,3	4,4
Persentase Kehamilan pada Ibu dengan jumlah anak > 4	2,7	2,7	2,7	1,9
Persentase Kehamilan pada Ibu dengan Jarak Kehamilan < 2 tahun	1,5	1,5	1,5	1,2

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

- Masih cukup tinggi kematian ibu dan kematian bayi. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih cukup tinggi, hal ini terjadi oleh berbagai faktor diantaranya: pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak belum merata, kehamilan risiko tinggi, keterlambatan penanganan, pelayanan kesehatan ibu anak, Kecukupan asupan pada saat kehamilan, dan pemeliharaan saat kehamilan. Sejak tahun 2017 ada kecenderungan Angka Kematian Ibu (AKI) cenderung meningkat, pada tahun 2019 mencapai 68,9, begitu pula jumlah kematian ibu meningkat, data selengkapnya diperlihatkan sebagai berikut:

Tabel 4.13
Angka Kematian Ibu

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelahiran Hidup	19.729	19.729	19.081	20.502	19.669	34.118	18.742
2	Jumlah Kematian Ibu	6	21	22	6	12	69	74
3	Angka Kematian Ibu	30	106	115	29,2	61	202,2	394,83
Rumus	$AKI = \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$							

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Masih cukup tingginya komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan yang berisiko tinggi memicu kematian Ibu diantaranya disebabkan karena komplikasi ketuban pecah dini (KPD) dan komplikasi karena hipertensi.

Berikut ini adalah data hasil evaluasi Dinas Kesehatan terhadap kasus kasus komplikasi pada saat kehamilan :

Tabel 4.14
Kasus Komplikasi Saat Kehamilan Tahun 2018

TAHUN	2015	2016	2017	S.D. OKTOBER 2018
Persentase komplikasi ketuban pecah dini (KPD)	24	26	29	21,6
Persentase komplikasi Hipertensi dalam kehamilan (HDK)	20	23	21,4	28,9

Sumber : Data Dinas Kesehatan, Tahun 2018

Selain itu kelengkapan alat kesehatan yang berhubungan dengan persalinan, kesehatan ibu anak, seperti NICU dan PICU di rumah sakit secara kuantitas belum memadai.

8. Adanya Kecenderungan masih cukup tingginya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Apabila dilihat dari hasil evaluasi Dinas Kesehatan, masih ada sepuluh penyakit utama yang dominan terjadi pada penduduk usia 5-44 tahun di Kota Bogor. Berdasarkan data dari laporan LB1 Puskesmas, tahun 2017, 10 penyakit utama tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15
Sepuluh Penyakit Utama di Kota Bogor Tahun 2017

NO	NAMA PENYAKIT	KASUS PENYAKIT	
		JUMLAH	%
1.	Nasopharyngitis Akut (Common Cold)	72.692	33,86
2.	Hypertensi	47.373	22,07
3.	Pharyngitis Akut	18.187	8,47
4.	Diare dan Gastroenteritis	16.505	7,69
5.	Gastritis	14.954	6,97
6.	Diabetes Mellitus Tidak tergantung Insullin (NIDDM)	14.590	6,80
7.	Influenza	10.435	4,86
8.	Dermatitis Kontak	8.345	3,89
9.	Cephalgia	6.184	2,88
10.	Scabies	5.411	2,52

Sumber : Data Dinas Kesehatan Tahun 2018

Selain 10 penyakit tersebut diatas, berdasarkan laporan Seksi P3MS Dinas Kesehatan, ada beberapa penyakit menular termasuk

penyakit menular berbasis lingkungan yang perlu diwaspadai karena kasus-kasus tersebut masih cukup banyak ditemui di Kota Bogor sampai dengan tahun 2017, seperti Tuberkolusis paru (TBC Paru), HIV Aids, DBD, Kusta, dan Pneumonia, dengan rincian kasus sbb:

Tabel 4.16
Penyakit Menular Berbasis Lingkungan di Kota Bogor
Tahun 2017

NO	NAMA PENYAKIT	JUMLAH	JUMLAH KASUS TERBANYAK
1.	Kasus Pneumonia pada balita	5.308 kasus	Bogor Barat
2.	Suspect Tuberkolusis paru (TBC Paru)	5.570 kasus	Bogor Barat
3.	Demam Berdarah Dengue	855 kasus	Bogor Utara
4.	HIV Aids	273 kasus	80 orang kasus meninggal
5.	Kusta	19 kasus	Penduduk urban

Sumber : Dinas Kesehatan, 2018

Dinas Kesehatan juga menemukan adanya kecenderungan peningkatan gangguan kejiwaan pada masyarakat dari tahu 2015-2018, dengan data sebagai berikut :

Tabel 4.17
Tren Jumlah Penduduk Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan
Tahun 2015-2017

TAHUN	2015	2016	2017	S.D. OKTOBER 2018
Gangguan Kejiwaan		869	1172	1030

Sumber data : Dinas Kesehatan, 2018

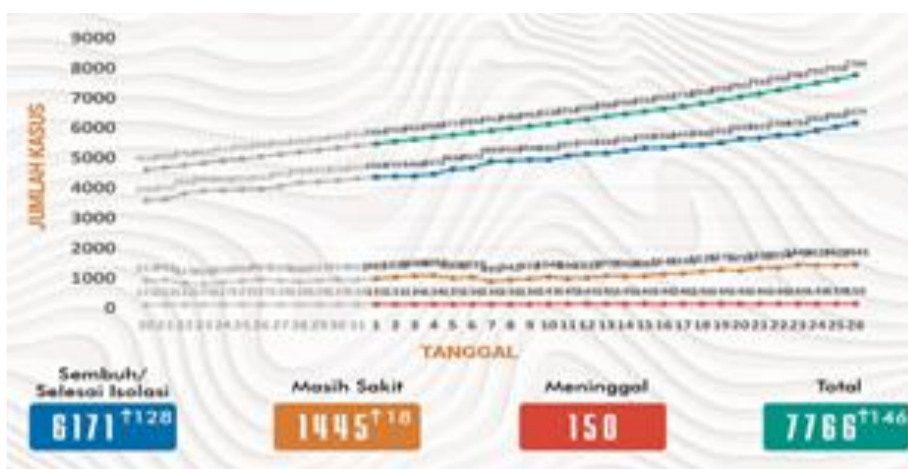
9. Kecenderungan meningkatnya penyakit degeneratif.

Selain penyakit menular, penyakit degeneratif juga memiliki kecenderungan meningkat, yang disebabkan oleh pola hidup , disampaing penduduk lansia juga meningkat, yang manan umumnya penyakit degenratif ini dapat muncul di penduduk lansia bahkan pada usia produktif.

10. Terjadinya Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19, yang dimulai awal tahun 2020, menyebabkan sebagian masyarakat terjangkit virus ini ,dan kecenderungan selama tahun 2020 trend nya meningkat. Hingga januari 2021 jumlah yang terkonfirmasi positif di kota Bogor lebih dari 7000 , dan yang meninggal 150 jiwa, sebagaimana terlihat grafik berikut:

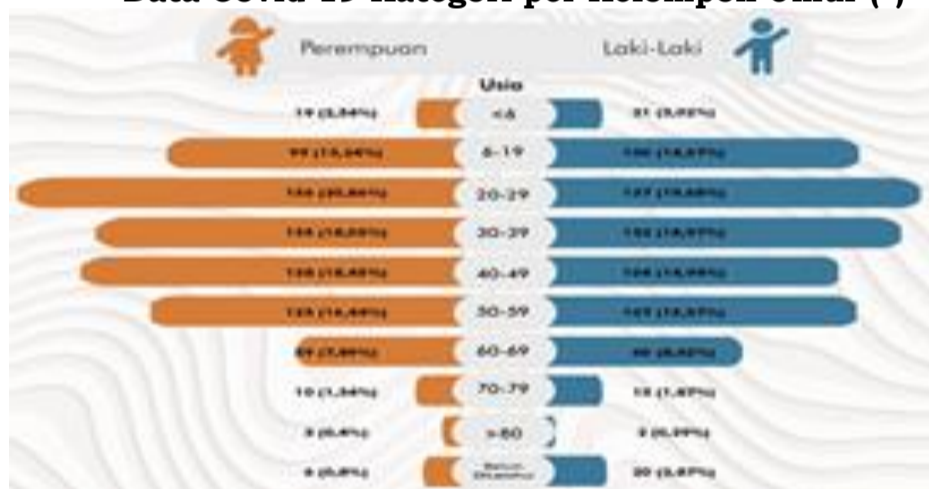
Grafik 4.2
Konfirmasi Positif Covid-19 per 26 Januari 2021 (*)



Sumber : Dinas Kesehatan, 2021
*) Data hingga pukul : 20.50 21/1/2021)

Covid 19 ini menyerang berbagai kelompok usia, dan kelompok terbanyak yang terserang covid 19 umumnya dalam kategori kelompok usia produktif, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 4.3
Data Covid-19 Kategori per Kelompok Umur (*)



Sumber : Dinas Kesehatan, 2021
*) Data hingga pukul : 20.50 21/1/2021)

Adanya pandemi ini menimbulkan serangkaian permasalahan di bidang kesehatan dan non kesehatan. Dibidang kesehatan sendiri permasalahan tersebut diantaranya:

- Penyiapan sarana pelayanan kesehatan untuk penanganan Covid-19, mulai dari dari puskesmas hingga tingkat rumah sakit
- Ketersedian, distribusi dan manajemen, Alkes , APD, dan obat-obatan (kefarmasian)
- Kecukupan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
- Penyediaan dan distribusi vaksin

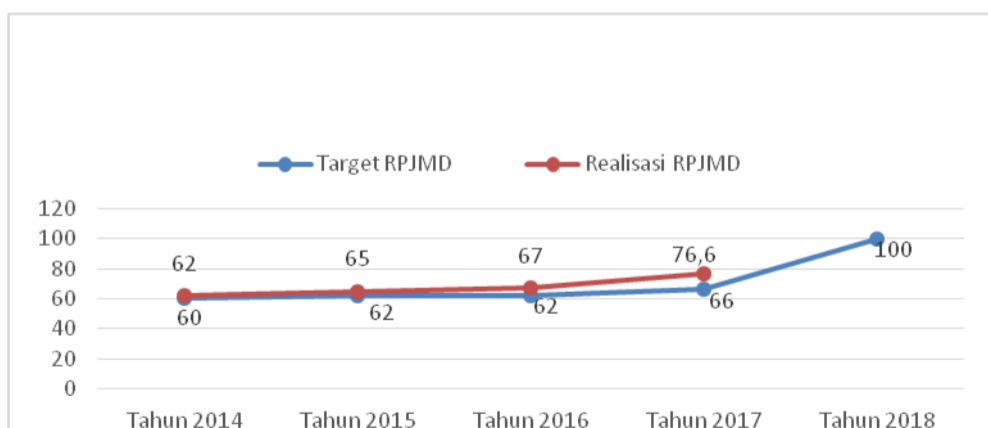
- Edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan dan PHBS masyarakat dalam masa pandemi
- Reformasi sistem kesehatan, terkait regulasi, manajemen, pelayanan, dan edukasi masyarakat

11. Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada dasarnya merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Sebagaimana dimanakan, bahwa salah satu sasaran pokok dalam RPJMN 2015-2019 adalah terpenuhinya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan dengan target pada tahun 2019 mencapai 95%. Sesuai dengan target Nawacita tersebut dalam RPJMD Kota Bogor tahun 2015-2019, Pemerintah Kota Bogor telah menargetkan bahwa pada tahun 2018, cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk kota Bogor sudah harus mencapai 100%.

Perkembangan peningkatan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di Kota Bogor dalam kurun waktu tahun 2014-2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 4.4
Perkembangan Persentase Penduduk Kota Bogor Yang Memiliki Jaminan Kesehatan



Sumber : Hasil Analisa, 2018

Namun demikian, sampai saat ini upaya pemerintah Kota Bogor untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin melalui program JKN masih belum dapat terealisasi dengan optimal. Persentase penduduk miskin Kota Bogor yang menggunakan jaminan Kesehatan untuk berobat jalan masih sangat rendah.

Berdasarkan survey dari BPS pada tahun 2017, persentase penduduk Kota Bogor yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan baru berkisar 56,96 %. Dari angka tersebut, persentase penduduk miskin di kuintil 1 yang menggunakan jaminan kesehatan baru sekitar 39,88%. Berikut ini adalah data persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan berdasarkan data BPS dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2017.

Tabel 4.18
Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Tahun 2017

KARAKTERISTIK	MENGUNAKAN JAMINAN KESEHATAN UNTUK BEROBAT JALAN	JAMINAN KESEHATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK BEROBAT JALAN			
		BPJS KESEHATAN PBI	BPJS KESEHATAN NON PBI	JAMKESDA	ASURANSI SWASTA ATAU PERUSAHAAN / KANTOR
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	56,52	19,02	25,62		11,88
Perempuan	57,32	23,90	25,99		7,42
Kuintil Pengeluaran					
Kuintil 1	39,88	23,73	13,13		NA
Kuintil 2	51,65	31,87	15,59		NA
Kuintil 3	62,26	30,23	32,03		0,00
Kuintil 4	63,99	12,97	43,51		NA
Kuintil 5	67,30	11,78	26,16		29,36
Kota Bogor	56,96	21,72	25,83		9,41

Sumber : BPS, 2017

12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih belum optimal

Dari data BPS tahun 2017, dicatat bahwa masih ada 30,72 % penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok, dan rata-rata tertinggi penduduk merokok tersebut berpendidikan SD dan sederajat dan penduduk yang tidak tamat SD. Berikut adalah data sebaran penduduk berusia 15 tahun ke atas yang merokok:

Tabel 4.19
Persentase Penduduk Yang Merokok Tahun 2017

KARAKTERISTIK	PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG MEROKOK	RATA-RATA BATANG ROKOK YANG DIHISAP PER MINGGU
Kuintil Pengeluaran		
Kuintil 1	31,69	55,72
Kuintil 2	32,91	70,29
Kuintil 3	37,55	70,17
Kuintil 4	30,34	77,30
Kuintil 5	21,75	86,33
Pendidikan Tertinggi KRT		
Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD	32,21	61,28
SD Dan Sederajat	32,02	76,18

SMP Dan Sederajat	30,79	61,89
SMA Ke Atas	29,68	75,68
Kota Bogor	30,72	71,52

Sumber : BPS, tahun 2017

Pelaksanaan PHBS erat kaitanya dengan akses masyarakat terhadap sanitasi, diantaranya akses masyarakat terhadap pengelolaan persampahan dan pengelolaan air limbah domestik. Terkait dengan akses masyarakat ke jamban yang sehat, pada tahun 2017 BPS mencatat bahwa 74,35 dari rumah tangga memiliki akses membuang limbah domestik ke tangki septic/IPAL/SPAL. Data penduduk mendapatkan akses pembuangan limbah domestic dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.20
Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Akses Ke Jamban Sehat Tahun 2017

KARAKTERISTIK	MENGUNAKAN JAMINAN KESEHATAN UNTUK BEROBAT JALAN					JUMLAH
	TANGKI SEPTIK/IPAL/ SPAL	KOLAM/SAWAH/ SUNGAI/DANAU/ LAUT	LUBANG TANAH	PANTAI/ TANAH LAPANG/ KEBUN	LAINNYA	
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	75,11	20,62	23,85	NA		100,00
Perempuan	70,82	27,39	NA		NA	100,00
Kuintil Pengeluaran						
Kuintil 1	66,25	29,12	NA			100,00
Kuintil 2	71,20	24,00	NA	NA		100,00
Kuintil 3	65,10	29,35	3,57	NA	NA	100,00
Kuintil 4	70,09	27,88	NA			100,00
Kuintil 5	93,14	4,10	2,76			100,00
Pendidikan Tertinggi KRT						
Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD	69,00	26,50	NA	NA	NA	100,00
SD Dan Sederajat	66,42	29,52	3,05	NA		100,00
SMP Dan Sederajat	71,45	26,39	NA			100,00
SMA Ke Atas	80,64	15,27	4,09			100,00
Kota Bogor	74,35	21,82	3,32	0,34	0,17	100,00

Sumber : BPS, 2017.

Sementara, dalam hal akses pelayanan air bersih, berdasarkan data dari BPS tahun 2017, 85,11% masyarakat telah mendapatkan air minum yang bersih dan 43,92 % mendapatkan air minum yang layak, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.21
Persentase Rumah Tangga Yang Mempunyai Akses Air Minum Bersih Dan Akses Air Minum Layak Tahun 2017

KARAKTERISTIK	SUMBER AIR MINUM BERSIH	SUMBER AIR MINUM LAYAK
---------------	-------------------------	------------------------



Jenis Kelamin		
Laki-Laki	85,64	43,73
Perempuan	82,57	44,81
Kuintil Pengeluaran		
Kuintil 1	74,45	48,51
Kuintil 2	81,79	48,22
Kuintil 3	82,01	48,24
Kuintil 4	89,87	52,24
Kuintil 5	92,91	26,39
Pendidikan Tertinggi KRT		
Tidak Pernah Sekolah / Tidak Tamat SD	80,28	42,85
SD Dan Sederajat	75,67	48,08
SMP Dan Sederajat	89,62	58,01
SMA Ke Atas	89,92	37,23
Kota Bogor	85,11	43,92

Sumber : Data BPS, 2017

13. Cakupan dan kualitas pelayanan rumah sakit serta pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan belum optimal.

Prinsip pelayanan kesehatan berjenjang dari mulai fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga ke rumah sakit, masih sering terkendala, termasuk untuk rujukan gawat darurat 24 jam masih perlu ditingkatkan.

14. Ketersediaan sumber daya kesehatan belum memadai

- a. Sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia di bidang kesehatan menjadi salah satu permasalahan penting di Kota Bogor mengingat :

- 1) Pengembangan tenaga kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan/pembangunan kesehatan. Tenaga kesehatan terus membaik dalam jumlah, kualitas dan penyebarannya, namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah sesuai dengan standar. Mutu tenaga kesehatan belum memiliki daya saing dalam memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri.
- 2) Regulasi untuk mendukung upaya pengembangan tenaga kesehatan masih terbatas.
- 3) Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan dan belum didukung dengan sistem informasi tenaga kesehatan yang memadai. Rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang menyeluruh belum disusun sesuai yang diharapkan, sehingga belum sepenuhnya dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan,

pendayagunaan tenaga kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.

- 4) Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan/pendidikan berbagai jenis tenaga kesehatan. Kajian jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan tersebut belum dilakukan sebagaimana mestinya. Kualitas hasil pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan pada umumnya masih kurang memadai. Masih banyak institusi pendidikan tenaga kesehatan yang belum terakreditasi dan memenuhi standard. Hal ini akan berdampak terhadap kompetensi dan kualitas lulusan tenaga kesehatan. Permasalahan pendidikan tenaga kesehatan pada umumnya bersifat sistemik, antara lain terdapat ketidaksesuaian kompetensi lulusan pendidikan dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, lemahnya kerjasama antara pelaku dalam pembangunan kesehatan dan pendidikan tenaga kesehatan, lebih dominannya pendidikan tenaga kesehatan yang berorientasi ke Rumah Sakit dibandingkan dengan Primary Health Care (PHC).
 - 5) Dalam pendayagunaan tenaga kesehatan, pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Pengembangan profesi yang berkelanjutan (Continue Professional Development/CPD), serta Training Need Assesment (TNA) masih perlu dikembangkan.
 - 6) Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan masih terbatas pada tenaga dokter dan dokter gigi. Sosialisasi dan penerapan peraturan perundang-perundangan di bidang pengembangan tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara memadai.
 - 7) Sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan masih terbatas. Sistem informasi tenaga kesehatan belum sepenuhnya dapat menyediakan data yang akurat, terpercaya dan tepat waktu. Dukungan sumber daya pembiayaan dan lain-lain sumber daya belum memadai.
- b. Sarana prasarana Kesehatan
1. Kondisi sarana, prasarana dan alat kesehatan yang belum terpenuhi di puskesmas dan rumah sakit.
 2. Tingkat kepatuhan rumah sakit dalam pemenuhan perijinan

3. Mutu layanan di beberapa puskesmas dan rumah sakit belum dipenuhi dengan SOP
4. Respon kesiapsiagaan dalam Sistem penanganan kegawatdaruratan belum semua terlaksana dengan baik di rumah sakit
5. Masih adanya Kesulitan mengakses fasilitas kesehatan rujukan di rumah sakit
6. Informasi ketersediaan layanan kesehatan di Rumah Sakit belum optimal
7. Sarana, prasarana dan fasilitas pendukung sistem rujukan belum semua terpenuhi.

c. Obat dan Makanan

1. Manajemen pengelolaan obat (perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, serta penggunaan obat serta pengelolaan sistem informasi pengelolaan obat) di sarana kesehatan dasar masih belum optimal.
2. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga kefarmasian di pelayanan kefarmasian.
3. Semakin maraknya peredaran bahan pangan yang tidak sehat

Sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan masih terbatas. Sistem informasi tenaga kesehatan belum sepenuhnya dapat menyediakan data yang akurat, terpercaya dan tepat waktu. Dukungan sumber daya pembiayaan dan lain-lain sumber daya belum memadai

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Sub Bidang Penataan Ruang

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di Sub Bidang Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RDTR) sebagai turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sesuai dengan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) yang telah ditetapkan.
- b. Rencana Pemanfaatan Ruang belum optimal dilaksanakan sesuai dengan tahapannya (inkonsistensi rencana pemanfaatan ruang)
- c. Alih Fungsi Lahan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang karena pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan secara optimal

- d. Sinergitas perencanaan dan pemanfaatan ruang di wilayah perbatasan (kabupaten/kota)
- e. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama pemerintah dan private dalam percepatan pencapaian rencana struktur dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
- f. Belum optimalnya penyediaan ruang terbuka hijau.
- g. Belum optimalnya Implementasi penataan ruang berbasis mitigasi bencana.
- h. Pemahaman masyarakat terkait penataan ruang belum merata.

2. Sub Urusan Pekerjaan Umum

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di Sub Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Belum tercapainya 100% cakupan pelayanan air minum sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini disebabkan karena:
 - Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama;
 - Ketersediaan dan kualitas air tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih;
 - Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk; Air baku yang tersedia diluar wilayah kota Bogor (perlu adanya peran Pemerintah Pusat dan Provinsi);
 - Sungai di Kota Bogor sebagai salah satu sumber air baku juga sudah mengalami pencemaran (belum memenuhi baku mutu, baik kualitas, kuantitas, serta kontinuitas) sehingga memerlukan biaya tinggi untuk pengolahannya menjadi air minum yang layak dan aman;
 - Belum tersedia infrastruktur perkotaan yang terintegrasi untuk sistem penyediaan air minum yang dapat menjangkau seluruh masyarakat Kota Bogor
- b. Belum tercapainya 100% cakupan pelayanan air limbah sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- c. Konektivitas infrastruktur jalan belum optimal sehingga terjadi penumpukan volume kendaraan di pusat-pusat kegiatan karena jalan alternative menuju pusat kegiatan belum terhubung;

- d. kapasitas jalan belum mampu mengikuti pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor (Kinerja jaringan jalan belum optimal sehingga masih menimbulkan banyak titik-titik kemacetan terutama pada jam jam sibuk);
- e. Kualitas jalan masih belum optimal (cukup banyak ruas jalan yang belum memenuhi persyaratan teknis fungsi jalan, dari sisi lebar maupun pengaturan aksesnya);
- f. Masih cukup banyak jaringan irigasi yang dalam kondisi rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan yaitu masih berkisar 50% dari keseluruhan jaringan irigasi yang ada. hal ini disebabkan karena umur jaringan irigasi yang sudah terlalu tua dan kerusakan akibat kejadian bencana alam;
- g. Berkurangnya kapasitas drainase primer yang menyebabkan kapasitas daya tampung sungai, situ dan sumber air lainnya menurun sehingga mengakibatkan pada daerah daerah tertentu masih terjadi kerawanan terhadap resiko banjir. Hal ini disebabkan karena terjadinya pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
- h. Belum terintegrasinya saluran drainase;
- i. Belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier disebabkan karena tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang belum sesuai dengan standar;
- j. Masih cukup tingginya potensi terjadinya bencana alam tanah longsor dan banjir karena bangunan infrastruktur yang ada di lokasi rawan bencana belum seluruhnya disiapkan dengan baik;
- k. Jaringan Infrastruktur permukiman belum seluruhnya terbangun sesuai dengan standar perumahan permukiman yang layak;
- l. Keterbatasan lahan dan kendala penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur;
- m. Penyediaan dan penataan jaringan utilitas yang belum memadai yang berpotensi menjadi masalah baru bagi tata ruang kota;
- n. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kota belum optimal.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Masih belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh sesuai dengan 7 indikator kumuh yang telah ditetapkan;
2. Masih cukup luas kawasan yang berpotensi menjadi kumuh apabila tidak dilakukan intervensi pencegahan;
3. Belum semua pelayanan PSU perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang memenuhi NSPM, sehingga berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman;
4. Belum semua pelayanan PSU perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berdampak pada dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas PSU menjadi sangat terbatas mengingat PSU tersebut belum menjadi aset pemerintah;
5. Persentase rumah tidak layak huni masih cukup tinggi mengingat ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya;
6. Pembangunan perumahan belum sejalan dengan rencana pembangunan perkotaan yang tercantum dalam RTRW/RDTR;
7. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
8. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) masih belum mengarah pada TPU Hijau;
9. Kebutuhan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) belum seluruhnya terpenuhi;
10. Pengelolaan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) belum sepenuhnya mengarah pada penyediaan infrastruktur yang ramah lingkungan;
11. Penataan perumahan swadaya;
12. Penanganan backlog perumahan belum optimal, sehingga perlu upaya penambahan melalui perumahan terstruktur, rumah susun, dan rumah swadaya.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi deteksi dini terhadap potensi terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masih belum optimal;
- b. Peningkatan potensi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan) terhadap stabilitas politik dan keamanan, hal ini menjadi krusial mengingat banyaknya ancaman ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, baik yang datang dari dalam dan luar negeri. Selain itu pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang semakin menurun dipengaruhi oleh globalisasi dan kebebasan pada masa demokrasi;
- c. Penanganan gangguan ketenteraman dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masih belum optimal;
- d. Belum semua peraturan daerah yang ditetapkan dapat ditegakkan secara konsisten;
- e. Pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman di bidang ke-pamong praja-an belum efektif;
- f. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda yang seharusnya dilakukan oleh PPNSD belum dilaksanakan secara efektif dan menimbulkan efek jera bagi pelanggar perda;
- g. Sumber daya manusia yang tersedia sebagai PPNSD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum memenuhi harapan yang diinginkan berdasarkan kepada integritas, kompetensi, obyektifitas, dan independensi serta kualitas maupun kuantitas yang memadai;
- h. Keterbatasan sarana & prasarana PPNSD di Satpol PP belum mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- i. Hubungan PPNSD dengan Satpol PP dan Penyidik Polri selaku pembina dan koordinator pengawas PPNSD dan Satpol PP belum konsisten;
- j. Fungsi pembinaan dan pemberdayagunaan masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban belum dilaksanakan secara efektif, sehingga hasilnya masih belum optimal;

- k. Kepatuhan warga dan pelaku usaha dalam penegakan Peraturan daerah dan peraturan terkait penanganan pandemi Covid-19 masih rendah.

2. Sub Urusan Kebakaran dan Kebencanaan

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Sub Urusan Kebakaran dan Kebencanaan adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Risiko Bencana di Kota Bogor berada pada level sedang, sehingga potensi terjadinya bencana harus terus diantisipasi;
- b. Program pencegahan dan mitigasi bencana belum sinergis lintas sektor;
- c. Tingkat kesiapsiagaan dan adaptasi masyarakat terhadap potensi terjadinya bencana (kebakaran dan bencana lainnya) masih belum optimal;
- d. Kecepatan waktu tanggap untuk penanganan bencana baik kebakaran maupun bencana lainnya masih perlu ditingkatkan dalam rangka meminimalisir kehilangan jiwa, mengurangi beban penderitaan korban bencana, meminimalisir kerusakan harta benda dan kehilangan sumber daya ekonomi;
- e. Sarana prasarana masyarakat untuk proteksi kebakaran belum merata;
- f. Belum sesuai jumlah pos pemadam kebakaran dengan besaran luas wilayah;
- g. Belum optimal pemahaman, dan pemberdayaan/ partisipasi masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
- h. belum optimalnya pemetaan dan kualitas data informasi Sistem peringatan dini kerawanan Bencana serta data informasi untuk dukungan pemulihan Pasca Bencana;
- i. Program rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana masih belum terkoordinasi, benturan kewenangan pusat dan daerah pada pelayanan di lokasi dampak bencana. Belum adanya percepatan penanganan oleh instansi terkait dengan optimal sehingga memakan waktu yang cukup lama;

3. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Permasalahan terkait bidang sosial adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan karena belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan, baik dalam hal pendataan dan implementasi program;

- b. Kemandirian dan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi anak balita terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak nakal, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), lanjut usia terlantar, lanjut usia tindak kekerasan, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang disabilitas bukan kusta, tuna susila, eks narapidana, pekerja migran bermasalah, dan korban NAPZA masih rendah;
- c. Jumlah kasus korban tindak kekerasan semakin meningkat;
- d. Aksesibilitas penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan social untuk mendapatkan pelayanan dasar masih belum terlayani secara optimal;
- e. Intervensi pemerintah untuk perlindungan sosial masih seringkali belum tepat sasaran karena kualitas data terpadu masih rendah;
- f. Masih adanya kerentanan terhadap konflik sosial di masyarakat;
- g. Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- h. Penanganan sosial terhadap korban bencana masih belum optimal;
- i. Diskriminasi terhadap kaum penyandang masalah kesejahteraan sosial masih sering terjadi;
- j. Meningkatnya jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dimasa pandemi Covid-19;
- k. Kurangnya pembinaan dan perhatian dari internal keluarga bagi PMKS.

4.1.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Permasalahan terkait bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih relatif rendah yaitu sebesar 61,13 persen di tahun 2017;

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih sangat tinggi yaitu sebesar 9,57 persen di tahun 2017, dan dimasa pandemic ini pengangguran makin meningkat dimana TPT menjadi 12,68%;
3. Produktivitas tenaga kerja masih belum optimal;
4. Perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja masih belum optimal;
5. Dimasa pandemi, selain terjadi peningkatan jumlah pengangguran, juga terjadi potensi potensi peingkatan tenaga kerja informal, karena terjadi pergeseran dari tenaga kerja formal ke tenaga kerja informal.

Berikut adalah gambaran kondisi angkatan kerja pada tahun 2017 berdasarkan data Kota Bogor Dalam Angka tahun 2018.

Tabel 4.22
Gambaran Kondisi Angkatan Kerja Kota Bogor Tahun 2017

RINCIAN	2017
Angkatan Kerja / Economically Active	
1. Bekerja / Working	448386
2. Pengangguran Terbuka / Unemployment	
a. Pernah Bekerja / Ever Work	18467
b. Tidak Pernah Bekerja / Never Worked	28971
c. Jumlah / Total	47438
Jumlah Angkatan Kerja / Total Economically Active	495824
Bukan Angkatan Kerja / Not Economically Active	
1. Sekolah / Attending School	82781
2. Mengurus Rumah Tangga / House Keeping	203150
3. Lainnya / Others	29363
4. Jumlah / Total	315294
Jumlah Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas / Total Of Poppulation Aged 15 Years And Over	811118
% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja / % Working To Economically Active	90,43
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) / Employment Rate (%)	9,57
% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja / % Economically Active to Working Age Population	61,13

Sumber : BPS Kota Bogor, 2018

Lebih lanjut dari hasil evaluasi diperoleh identifikasi akar masalah yang menyebabkan TPT Kota Bogor sangat tinggi yaitu :

- 1. Keterampilan, dan Kecakapan Tenaga Kerja Yang Kurang Sesuai Dengan Sektor Ekonomi Yang Membutuhkannya Menjadi Salah Satu Faktor Yang Memicu Meningkatnya Jumlah Pengangguran di kota Bogor Setiap Tahunnya.**

Pembangunan perekonomian kota Bogor bertumpu pada sektor-sektor non produksi, sektor jasa. Hal ini selaras dengan karakteristik kota Bogor yang tidak memiliki potensi besar pada sektor produksi dan lebih bertumpu pada karakteristik urban.

Pembangunan sektor jasa membutuhkan skill masyarakat yang cukup tinggi dan tingkat pendidikan yang memadai sebagai prasyarat keberhasilan. Namun demikian, apabila melihat data pada tahun 2017, peningkatan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja masih di dominasi dari sector industri pengolahan yaitu meningkat sebesar 22,93% sementara peningkatan penyerapan sector jasa lainnya hanya sebesar 15,97 %.

Berikut ini adalah data penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor lapangan kerja utama yang dipublikasi oleh BPS tahun 2018.

Tabel 4.23
Kondisi Penyerapan Tenaga Kerja Kota Bogor Menurut Sektor Lapangan Pekerjaan Tahun 2017

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	2015			2017		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	4138	843	4981	2674	545	3219
Industri Pengolahan	44330	14086	58416	53432	18393	71825
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	82701	38101	120802	93500	61206	154706
Jasa Kemasyarakatan	74649	44477	119126	57771	47610	105381
Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas & Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	87389	10269	97658	101471	11784	113255
Jumlah	293207	107776	400983	308848	139538	448386

Sumber : BPS Kota Bogor, 2018

Oleh karena itu, selain mendorong tingkat pendidikan masyarakat, maka keterampilan dan kecakapan para pencari kerja harus menjadi fokus untuk diintervensi dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang mampu berdaya saing di sektor unggulan yang ada di kota Bogor yaitu sektor jasa.

2. Tingginya Angka Pengangguran Lulusan SMA/SMK

Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain bahwa lulusan SMA/SMK pada umumnya belum memiliki ketrampilan khusus yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja, atau dengan kata lain lulusan SMA/SMK pada umumnya tidak memiliki keahlian untuk bersaing di dunia kerja. Pendidikan vokasi menjadi sangat penting ditingkatkan untuk menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi mencakup program pendidikan diploma I (D1),

diploma II (D2), diploma III (D3) dan diploma IV (D4). Selain itu program peningkatan pendidikan non formal menjadi sangat penting untuk dikembangkan dengan syarat harus mengikuti tren kebutuhan pasar tenaga kerja.

3. Jumlah Pekerja Yang Bekerja Tidak Penuh Masih Cukup Tinggi

Jumlah pekerja tidak penuh adalah mereka yang berstatus bekerja tetapi memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu). Kondisi ini sebenarnya memicu terjadinya kondisi pengangguran semu karena sebenarnya mereka berstatus sebagai pekerja, tetapi ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, sebagian dari mereka memiliki jam kerja rendah.

4. Adanya Kesenjangan Antara Jumlah Pencari Kerja dan Jumlah Lowongan Kerja

Berdasarkan data BPS tahun 2017, jumlah pencari kerja di Kota Bogor adalah sebesar 3.904 orang dimana sebanyak 57,27 % adalah laki laki dan 97,51 % berlatar belakang Pendidikan SMA ke atas. Sementara jumlah lowongan pekerjaan pada tahun 2017 hanya sebanyak 2.082 orang dimana lowongan terbanyak adalah dari sector perdagangan yaitu sebanyak 1269 orang dan dari sector jasa sebanyak 638 (sumber data : Kota Bogor Dalam Angka, 2018).

5. Produktivitas Tenaga Kerja Kota Bogor Masih Rendah

Hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan perusahaan yang membutuhkan produktivitas tenaga kerja yang sangat tinggi. Potensi yang ada di stakeholder belum dimanfaatkan secara maksimal. Penanganan masalah ketenagakerjaan perlu melibatkan stakeholder, dalam hal penyediaan berbagai peluang penyediaan lapangan kerja, peluang pelatihan dan pemanganan yang dapat disediakan oleh stakeholder baik industri, perusahaan UMKM, perguruan tinggi, dsb.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah;

2. Angka partisipasi sekolah perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan Laki-laki;
3. Masih adanya tren perkawinan usia dini (< 18 tahun);
4. Persentase perempuan lansia lebih tinggi dibandingkan laki laki (perbandingan laki-laki : perempuan = 40% : 60%);
5. Masih cukup tingginya kasus penyalahgunaan NAPZA pada perempuan (55,6% perempuan penghuni lapas terjerat hukum karena kasus NAPZA);
6. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam berpolitik dan terlibat dalam organisasi sosial dan politik;
7. Partisipasi perempuan dalam pembangunan belum optimal
8. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak;
9. Masih banyaknya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
10. Belum optimalnya pemenuhan hak anak pada masa Pandemi Covid-19;
11. Belum optimalnya perlindungan fisik dan mental anak di masa pandemi.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Faktor yang menentukan ketahanan pangan daerah salah satunya adalah ketersediaan bahan pangan. Penataan, penyediaan, dan distribusi bahan pangan di Kota Bogor belum terkelola dengan cukup baik. Dampak dari hal tersebut diatas, adalah masih terdapat kasus penduduk rawan pangan di Kota Bogor. Persentase Penduduk rawan Pangan di kota Bogor Tahun 2018 berkisar 18.3% yang tersebar di 17 kelurahan.

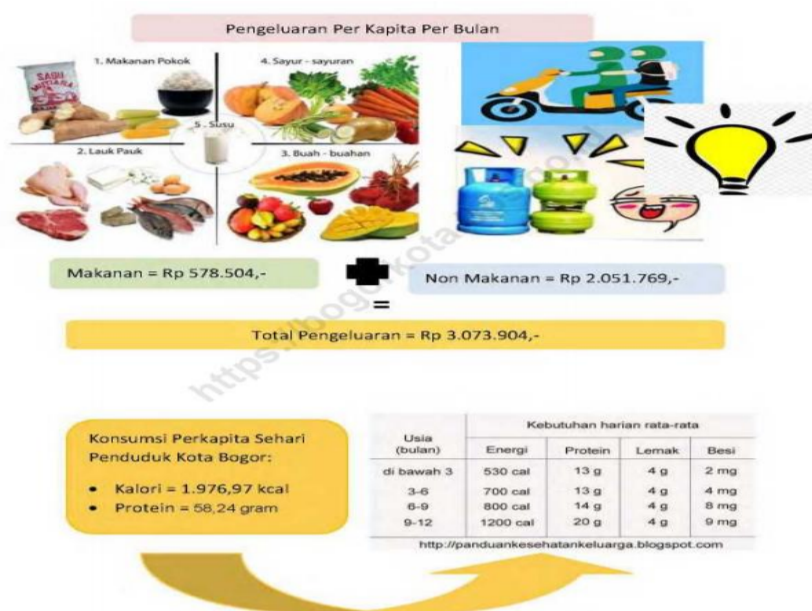
Permasalahan kerawanan pangan yang terjadi di kota Bogor antara lain adalah :

1. Cadangan pangan kota Bogor masih belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan.KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Sesuai perhitungan jumlah cadangan pangan yang tercantum dalam Permentan tersebut, Pemerintah kota Bogor dalam rangka penguatan cadangan pangan diharuskan menyediakan pangan ekuivalen beras minimal 80,72 ton setiap tahunnya;

2. Informasi distribusi bahan pangan (beras) belum merata atau diketahui oleh seluruh kalangan masyarakat;
3. Masih ada sekitar 8,47% produk pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang tidak aman dan layak konsumsi, dalam arti mengandung pengawet berbahaya (boraks dan formalin), pewarna buatan (Rhodamin B, Methil Yellow), Bahan Tambahan Pangan (Benzoat dan Nitrit) melebihi ambang batas aman, cemaran mikroba dan mengandung residu pestisida;
4. Konsumsi Kalori pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah di Kota Bogor adalah 1.681,89 Kkal, sedangkan konsumsi kalori untuk kelompok pengeluaran 40 persen tengah adalah 2.233,33 Kkal dan konsumsi kalori pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas adalah 2.559,20 Kkal. Ini berarti masih ada sekelompok orang yaitu di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang konsumsi kalornya dibawah standar 2.150 Kilo kalori/kapita/hari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, konsumsi protein perkapita kota Bogor pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah tersebut adalah 45,65 gr, sedangkan pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah adalah 64,64 gr dan pada kelompok 20 persen teratas adalah 80,83 gr. Ini berarti masih ada sekelompok orang yaitu di kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang konsumsi proteinnya dibawah standar 57 gram/kapita/hari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dilihat dari sisi pengeluaran baik untuk makanan maupun non makanan (data Susenas 2018 Kota Bogor), pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, persentase pengeluaran untuk makanan adalah 62,87% dari total pengeluaran. Kemudian pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah, persentase pengeluaran untuk makanan adalah 51,95% dari total pengeluaran dan kelompok pengeluaran 20 persen teratas persentase pengeluaran untuk makanan adalah 32,37% dari total pengeluaran. Dari data-data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok masyarakat dengan pengeluaran 40 persen terbawah belum dapat dikatakan sejahtera karena persentase pengeluaran untuk makanan masih lebih besar dibandingkan dengan persentase pengeluaran non makanan. Selain itu dengan pengeluaran untuk makanan yang lebih besar pun masih belum dapat memenuhi Angka Kecukupan Gizi. Hal ini di tunjukan pada gambar 4.2 bahwa konsumsi perkapita

sehari penduduk Kota Bogor sebesar : kalori 1.976,97 kkal dan protein 58,24 gram, yang mana pengeluaran untuk makanan sebesar 578.504,- per kapita perhari.

Gambar 4.2
Konsumsi Dan Pengeluaran



Berikut ini adalah data rata-rata konsumsi kalori per kapita pada tahun 2018.

Tabel 4.23a
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Dan Kelompok Pengeluaran Tahun 2018

KELOMPOK KOMODITAS		KELOMPOK PENGELUARAN		
		40 PERSEN TERBAWAH	40 PERSEN TENGAH	20 PERSEN TERATAS
1	Padi-padian	51767	69314	77937
2	Umbi-umbian	19709	6992	12335
3	Ikan/udang/cumi/kerang	17535	39983	86043
4	Daging	19709	38977	94567
5	Telur dan susu	25184	51199	75627
6	Sayur-sayuran	30622	46613	63830
7	Kacang-kacangan	7970	11831	17809
8	Buah-buahan	15721	33693	67969
9	Minyak dan kelapa	11085	13567	20331
10	Bahan minuman	14922	21341	28074
11	Bumbu-bumbuan	7697	12524	21030
12	Konsumsi lainnya	10385	16214	23589
13	Makanan dan minuman jadi	123929	262305	418289
14	Rokok dan tembakau	56344	93144	85344

KELOMPOK KOMODITAS		KELOMPOK PENGELUARAN		
		40 PERSEN TERBAWAH	40 PERSEN TENGAH	20 PERSEN TERATAS
	Jumlah Makanan	397014	717697	1092776
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	153276	378196	1089209
16	Aneka barang dan jasa	55340	175297	666629
17	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	12029	33349	72714
18	Barang tahan lama	3217	30420	255612
19	Pajak, pungutan, dan asuransi	9891	36025	158922
20	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	706	10408	40283
	Jumlah Bukan Makanan	234459	663695	2283369
	Jumlah	631473	1381392	3376144

Sumber : BPS, 2018

Tabel 4.23b
Rata-Rata Konsumsi Kalori Per Kapita Tahun 2018

KELOMPOK KOMODITAS MAKANAN	KELOMPOK PENGELUARAN		
	40 PERSEN TERBAWAH	40 PERSEN TENGAH	20 PERSEN TERATAS
1. Padi-padian	768,64	854,98	765,53
2. Umbi-umbian	27,23	30,94	39,23
3. Ikan/udang/cumi/kerang	25,30	42,99	61,26
4. Daging	48,66	84,87	151,97
5. Telur dan susu	62,05	96,76	129,94
6. Sayur-sayuran	20,86	30,33	36,46
7. Kacang-kacangan	40,69	46,98	67,18
8. Buah-buahan	21,75	43,00	71,22
9. Minyak dan kelapa	216,57	280,10	356,28
10. Bahan minuman	60,66	83,06	99,15
11. Bumbu-bumbuan	6,88	10,91	18,97
12. Konsumsi lainnya	58,39	82,81	109,90
13. Makanan dan minuman jadi	324,21	545,59	652,11
14. Rokok dan tembakau	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1681,89	2233,32	2559,20

Sumber : BPS, 2018

Tabel 4.24
Rata-Rata Konsumsi Protein Per Kapita, Tahun 2018

KELOMPOK KOMODITAS MAKANAN	KELOMPOK PENGELUARAN		
	40 PERSEN TERBAWAH	40 PERSEN TENGAH	20 PERSEN TERATAS
1. Padi-padian	18,07	20,13	18,12
2. Umbi-umbian	0,28	0,37	0,56
3. Ikan/udang/cumi/kerang	4,68	7,90	11,23
4. Daging	3,01	5,40	10,27
5. Telur dan susu	3,33	5,07	7,07
6. Sayur-sayuran	1,14	1,61	1,94
7. Kacang-kacangan	3,97	4,62	6,42
8. Buah-buahan	0,26	0,52	0,86
9. Minyak dan kelapa	0,02	0,08	0,16
10. Bahan minuman	0,40	0,53	0,70
11. Bumbu-bumbuan	0,26	0,43	0,73
12. Konsumsi lainnya	1,20	1,66	2,09
13. Makanan dan minuman jadi	9,03	16,32	20,68
14. Rokok dan tembakau	0,00	0,00	0,00
Jumlah	45,65	64,64	80,83

Sumber : BPS, 2018

5. Meningkatnya potensi rawan pangan bagi sebagian masyarakat sebagai akibat pandemi Covid-19
6. Masih rendahnya pemanfaatan potensi pemanfaatan pekarangan melalui *urban farming* sebagai upaya pemenuhan kemandirian dan ketahanan pangan

Akar permasalahan dalam urusan pangan antara lain:

1. Aspek ketersediaan pangan di daerah perkotaan diperoleh melalui impor dari daerah lain yang dijual di toko-toko bahan pangan. Ketersediaan pangan daerah perkotaan ditunjukkan dengan jumlah toko bahan pangan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah sangat tinggi karena produksi dalam Kota Bogor tidak memenuhi kebutuhan penduduknya. Sehingga rawan terjadi kelangkaan bahan pangan jika terjadi ketidakstabilan harga pangan;
2. Aspek akses pangan sangat penting bagi daerah perkotaan yang tidak memiliki ketersediaan pangan domestik. Masyarakat perkotaan dapat mengakses pangan dengan baik apabila memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli semua kebutuhannya. Pengangguran dan kemiskinan menjadi dua indikator penting dalam akses pangan. Pengeluaran per kapita penduduk miskin di kota Bogor terutama pada kelompok pengeluaran 40% terbawah yaitu Rp 631.473,00 per kapita per bulan. Dalam kondisi

pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan pasti akan menjadi pengeluaran utama di rumah tangga, sehingga kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan membelanjakan sebagian besar pendapatannya ditujukan untuk membeli makanan. Dampak selanjutnya dari rendahnya terhadap akses pangan adalah tingkat kematian bayi menjadi relatif tinggi;

3. Kualitas konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman). Konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh padi-padian serta kurangnya konsumsi umbi-umbian, sayur dan buah. Selain akibat kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pola konsumsi pangan B2SA, faktor lain yang erat kaitannya dengan konsumsi pangan penduduk adalah pendapatan, pengeluaran pangan, jumlah anggota keluarga dan pekerjaan kepala rumah tangga;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesehatan dan produktivitas rumah tangga.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Permasalahan pada bidang pertanahan, antara lain :

1. Masih cukup banyak terjadi sengketa kepemilikan lahan, dan sengketa peruntukan/penggunaan lahan;
2. Masih belum tuntasnya penyelesaian penetapan batas wilayah administratif baik batas wilayah administratif kabupaten kota maupun batas wilayah administratif kecamatan dan kelurahan.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi permasalahan pokok dalam urusan lingkungan hidup. Permasalahan-pemmasalahan yang mempengaruhi tingkat daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kualitas udara ambien;
2. Meningkatnya emisi gas rumah kaca;
3. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, dan pertambangan;
4. Menurunnya cadangan sumber air baku/air tanah;
5. Menurunnya kualitas DAS Ciliwung Cisadane;



6. Menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air;
7. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan;
8. Belum terpenuhinya ketersediaan ruang terbuka hijau publik sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota. Hal ini disebabkan karena pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah masih belum optimal sehingga reduksi sampah dari sumbernya masih sangat kecil;
10. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan belum berjalan secara sinergis sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan efisien.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Permasalahan pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kota Bogor, yaitu:

1. Arus migrasi masuk penduduk ke kota Bogor cukup tinggi menyebabkan kendala dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk asli kota Bogor dan penduduk non permanen di kota Bogor. Hal ini yang menyebabkan selalu terjadi perbedaan data jumlah penduduk antara data SIAK dengan data BPS;
2. Ketersediaan infrastruktur pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal;
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk urusan administrasi kependudukan;
4. Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan terutama dalam hal penyediaan kualitas dan kuantitas SDM;
5. Belum optimalnya penggunaan fasilitas teknologi informasi berbasis SIAK;

6. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi untuk keperluan intervensi program/kegiatan pembangunan daerah;
7. Belum optimalnya akurasi data dan ketepatan waktu penyediaan data kependudukan.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Permasalahan yang dihadapi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi:

1. Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan masyarakat desa
2. Program/kegiatan pembangunan daerah yang berlokasi di kelurahan masih belum terintegrasi lintas sektor.
3. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong
4. Kecenderungan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5. Masih belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
6. peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan masih rendah dalam mengatasi permasalahan kota dan mendukung program pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur.
7. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Permasalahan yang dihadapi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi;
2. Tingkat kelahiran pada usia remaja masih cukup tinggi, pada tahun 2017 angka kelahiran pada usia remaja berada dikisaran 11,82 per 1000 kelahiran, sementara pada tahun 2018 sudah menurun menjadi 11,62 per 1000 kelahiran;
3. Sulitnya mempertahankan kesertaan ber-KB;
4. Tingkat kesertaan Ber-KB dengan MKJP masih rendah yaitu sekitar 22% pada tahun 2018 sehingga berpotensi untuk terjadinya kehamilan yang tidak terencana;
5. Jumlah keluarga Pra Sejahtera masih cukup banyak;
6. Kualitas pelayanan KB di fasilitas kesehatan belum merata.

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Permasalahan yang dihadapi di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya integrasi simpul-simpul transportasi untuk pergerakan orang dan barang yang berdampak pada inefektivitas dan inefisiensi dalam sektor transportasi;
2. Belum optimalnya kinerja pelayanan angkutan umum masal baik dari sisi jenis moda transportasi (transportasi masal), integrasi antar moda (penyediaan fasilitas alih moda di simpul masih terbatas), sarana dan prasarana, waktu tempuh yang cukup lama, jumlah penumpang yang melebihi kapasitas angkut, tingkat kenyamanan yang rendah, sistem jaringan yang kurang memadai serta jangkauan aksesibilitas angkutan umum untuk daerah-daerah tertentu;
3. Gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas akibat pengaturan parkir dan hambatan samping yang belum dapat dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari cukup banyak titik parkir dan PKL di badan jalan yang mengurangi kapasitas jalan; *parking meter* belum optimal pemanfaatannya dan belum tersedianya fasilitas parkir *off street* yang memadai, berupa lahan parkir, bangunan parkir, dan atau *park and ride*;
4. Pola perjalanan masih cenderung memusat ke *Central Business District* (CBD);
5. Belum optimalnya sarana prasarana bagi pejalan kaki dan pengguna kendaraan tidak bermotor;
6. Masih belum optimal penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan;
7. Masih cukup tinggi persentase jumlah kendaraan yang tidak laik jalan;
8. Tingkat kedisiplinan pengguna jalan masih rendah.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Permasalahan yang dihadapi di Bidang Komunikasi dan Informatika adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan amanat peraturan perundangan belum dapat dilaksanakan secara efektif karena :

1. Kebijakan internal dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik baik dalam hal tata kelola SPBE maupun

dalam hal layanan SPBE sebagian besar masih dalam bentuk konsep dan belum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah;

2. Penerapan proses bisnis dan rencana induk SPBE belum dipantau dan dievaluasi secara berkala;
3. Masih banyak aplikasi berbasis web yang belum terintegrasi dengan suatu layanan SPBE lain;
4. Masih adanya keterbatasan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika;
5. Belum adanya standar keamanan informasi;
6. Belum adanya Standar Operasional Prosedur pada beberapa layanan TI;
7. Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI; dan
8. Belum optimalnya pengelolaan PPID.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam peningkatan perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara lain :

1. UMKM dan IKM belum berdaya saing tinggi

Di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sudah menjadi keniscayaan bahwa produk-produk yang dihasilkan dari UMKM dan IKM harus mampu berdaya saing dengan produk-produk dari luar negeri. Secara spesifik, beberapa hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah :

- a. Produktivitas UMKM masih belum optimal;
- b. Kualitas produk UMKM masih belum mampu berdaya saing dengan kualitas produk industri besar;
- c. Inovasi belum secara optimal tergali;
- d. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM adalah tingkat kesulitan mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama;
- e. Terbatasnya akses permodalan (*Access to Finance*);



- f. Terbatasnya kemampuan penetrasi pasar. Usaha kecil pada umumnya mempunyai permasalahan terkait lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, karena pada umumnya usaha kecil merupakan unit usaha keluarga, produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik;
- g. Terbatasnya Akses Informasi. Selain akses pembiayaan, UMKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UMKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UMKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UMKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.
- h. Terbatasnya sarana prasarana usaha. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMKM cenderung kurang cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya. Selain itu, tak jarang UMKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis;
- i. Penyediaan sarana prasarana pendukung media promosi, saluran distribusi, gerai produk dan pemasaran secara konvensional dan digital belum optimal;
- j. Manajemen UMKM belum dilaksanakan dengan baik, yang disebabkan kurangnya kemampuan, pengalaman, jaringan akses informasi, dan sosial budaya, perlu lebih dari sekedar pelatihan, tapi juga perlu pendampingan dan fasilitasi terhadap akses permodalan, dan pemasaran;
- k. Kesiapan dan kemampuan pelaku UMKM untuk berperan dalam ekonomi digital belum merata.

2. Produktivitas usaha ekonomi kreatif masih rendah

Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan



mengandalkan ide, pengetahuan, *skill* dan talenta, daripada sumber daya tenaga. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Sehingga diperlukan pengetahuan tentang potensi diri dan lingkungan budaya setempat, dari warga masyarakat masing-masing sebagai sumber hidup dan tempat tinggalnya.

Untuk mendorong produktivitas ekonomi kreatif di Kota Bogor, ada beberapa permasalahan yang perlu dibenahi yaitu :

- a. Belum sinergisnya peran pemerintah, pelaku usaha dan aktor intelektual dalam menumbuhkembangkan lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif;
- b. Manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih lemah;
- c. Terbatasnya akses permodalan;
- d. Terbatasnya akses pemasaran produk;
- e. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- f. Terbatasnya akses mendapatkan bahan baku;
- g. Terbatasnya akses terhadap infrastruktur dan
- h. Terbatasnya akses informasi dan teknologi.

3. Belum berkembangnya Inkubator Bisnis sebagai mitra dan fasilitator bagi *start up firm*

Untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM perlu adanya inkubator bisnis, yang berperan sebagai pembimbing, fasilitator bagi pelaku usaha dan baru/UMKM baru (*start up firm*)

4. Peran dan daya saing koperasi masih rendah dalam institusi perekonomian

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi di kota Bogor sangat berkaitan dengan daya saing koperasi yang masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena :

- a. Kualitas SDM Koperasi masih rendah;
- b. Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah;
- c. Manajemen koperasi belum profesional, terutama banyak terjadi di koperasi-koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah;
- d. Pengembangan kerjasama antar usaha koperasi masih belum optimal;
- e. Terbatasnya akses permodalan;

- f. Terbatasnya akses teknologi dan informasi;
- g. Terbatasnya akses pemasaran produk;
- h. Wawasan, kemampuan, jejaring dan *enterpreneurship* pengelola koperasi masih rendah.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Beberapa permasalahan pada bidang penanaman modal yaitu :

1. Realisasi investasi belum merata di setiap wilayah pelayanan (WP) sebagaimana yang telah direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031;
2. Realisasi investasi masih terpusat pada investasi konstruksi dan ada kecenderungan investasi di sektor bukan konstruksi/infrastruktur cenderung menurun;
3. Belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN;
4. Investasi Belum Mengacu pada Potensi dan Daya Saing Wilayah;
5. ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum, kebijakan investasi, dan ketersediaan SDM berkualitas masih menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan investasinya di kota Bogor;
6. Komitmen Pemerintah Daerah dalam membangun iklim investasi yang kondusif masih belum optimal; dan
7. Kecenderungan adanya penurunan Investasi dan iklim investasi yang belum kondusif hal ini terlihat dari nilai ICOR kota Bogor yang masih tinggi mencapai 6,3 pada tahun 2017. Dengan adanya covid 19 potensi realisasi investasi makin menurun.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Permasalahan bidang kepemudaan, yaitu:

1. Daya saing pemuda masih rendah karena tingkat pendidikan;
2. Keterlibatan pemuda dalam kegiatan kewirausahaan masih rendah;
3. Tingkat pengangguran pemuda masih cukup tinggi;
4. Angka kelahiran pada remaja masih cukup tinggi;
5. Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda masih belum optimal;
6. Masih terbatasnya kesempatan kerja dan kesempatan berpolitik bagi pemuda perempuan (gender);

7. Masih terbatasnya kesempatan bagi pemuda disabilitas untuk mendapatkan pelayanan dasar, kesempatan kerja dan kesempatan berpolitik;
8. Masih belum optimalnya kreativitas dan inovasi pemuda.
9. Masih belum optimal peran dan kapasitas kelembagaan kepemudaan.

Permasalahan bidang keolahragaan, yaitu:

1. Masih terbatasnya SDM Keolahragaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
2. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana olahraga masih belum memenuhi standar pelayanan;
3. Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga yang berpengaruh pada tingkat kebugaran masyarakat;
4. Belum optimalnya pola pembinaan dan pembibitan atlet dalam rangka mencetak prestasi atlet daerah di bidang olah raga.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Pada pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Statistik, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan data statistik sektoral;
2. Belum efektifnya pengelolaan data statistik dalam sistem portal satu data;
3. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penyelenggaraan statistik sektoral;
4. Belum adanya regulasi penyelenggaraan statistik sektoral;
5. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah spasial dan aspasial;
6. Masih lemahnya analisa data statistik sektoral sehingga pemanfaatan data tersebut menjadi kurang efektif dan berdaya guna;
7. Ketepatan waktu dalam penyediaan data statistik sektoral dari sumber data yang menyebabkan terhambatnya penyajian data statistik untuk pengguna;
8. Kesenambungan dan Ketersedian beberap data indikator makro tidak selalu ada setiap tahun;



9. Belum adanya data indikator makro di level-level kecamatan

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Belum efektifnya pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan sistem keamanan informasi (security awarness);
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi;
3. Belum adanya *Security Operating Centre* (SOC) yang dapat memonitor lalu lintas data/informasi;
4. Belum terbangunnya sistem pengamanan dokumen-dokumen penting dari pemalsuan.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Permasalahan pada urusan kebudayaan, diantaranya adalah:

1. Semakin kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya local yang berpotensi melunturkan warisan budaya yang ada terutama pada generasi muda sehingga berdampak pada semakin menurunnya karakter budaya anak bangsa;
2. pengembangan dan pelestarian budaya belum dilakukan secara terpadu;
3. Belum optimalnya peran pemerintah, tokoh budayawan, organisasi seni budaya, pelaku seni budaya dan tokoh tokoh masyarakat lainnya dalam mendorong pengembangan pelestarian budaya terutama budaya lokal;
4. Belum optimalnya perlindungan dan apresiasi terhadap budaya lokal;
5. Pemeliharaan dan pelestarian terhadap potensi cagar budaya belum optimal.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Pada pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat;

2. Keragaman buku baru koleksi perpustakaan belum mampu memenuhi permintaan pengunjung;
3. Ketersediaan sarana prasarana perpustakaan masih belum memenuhi standar;
4. Ketersediaan SDM pengelola perpustakaan (pustakawan) masih belum memenuhi standar;
5. Belum optimal penyediaan literasi digital, sebagai pendukung bagi pembelajaran jarak jauh di masa pandemic.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Pada pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kearsipan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Pengelolaan arsip perangkat daerah masih belum tertib sesuai dengan standar pengelolaan kearsipan;
2. Organisasi kearsipan belum berfungsi secara optimal;
3. Kuantitas dan kualitas SDM Kearsipan belum sebanding dengan jumlah kebutuhan perangkat daerah dan unit kerja sesuai standar;
4. Sarana prasarana pengelolaan kearsipan belum memenuhi standar baik secara kuantitas maupun kualitas.

4.1.3 URUSAN PILIHAN

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Permasalahan pada bidang kelautan dan perikanan, diantaranya adalah:

1. Terbatasnya lahan perikanan;
2. Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
3. Belum optimalnya penguasaan teknologi pengelolaan dan pengolahan perikanan;
4. Belum memadainya sumber daya manusia (SDM) perikanan;
5. Belum optimalnya sarana prasarana pengolahan hasil perikanan;
6. Pemasaran hasil perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir;
7. Masih rendahnya kegemaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dan hasil olahan ikan lainnya.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Permasalahan pada urusan bidang pariwisata, diantaranya adalah:

1. Belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif;
2. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan kepariwisataan belum terpadu/sinergis dari hulu ke hilir sehingga jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan performa yang sesuai dengan potensinya. Hal ini disebabkan karena :
3. Masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata;
4. Terbatasnya atraksi di destinasi wisata sehingga belum mampu mendorong peningkatan lama kunjung wisatawan;
5. Belum terinternalisasinya nilai-nilai *hospitality* di masyarakat;
6. Kualitas sarana dan prasarana di destinasi wisata masih sangat terbatas;
7. Kesiapan SDM sektor pariwisata dan dukungan dari masyarakat;
8. Teknologi informasi, komunikasi dan publikasi di sektor pariwisata masih belum optimal dikembangkan di kota Bogor;
9. Belum terstrukturnya data potensi pariwisata yang dapat mendorong masuknya Investasi;
10. Menurunnya peran pariwisata sebagai salah satu potensi ekonomi sebagai akibat adanya pandemi;
11. Penyedia jasa pariwisata dalam kreativitas dan diversifikasi produk pariwisata di masa pandemi belum optimal;
12. Pemasaran pariwisata belum optimal dan terintegrasi.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Permasalahan pada urusan pemerintahan bidang pertanian, diantaranya adalah :

1. Produksi pertanian mengalami tren perlambatan/penurunan karena semakin terbatasnya ketersediaan lahan pertanian yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan, dan belum optimalnya penggunaan dan penyediaan sarana prasarana pertanian, serta belum optimalnya penerapan teknologi budidaya pertanian;
2. Masih rendahnya upaya diversifikasi dan peningkatan daya saing produk pertanian yang dapat mengandalkan pada ketersediaan lahan yang terbatas;

3. Masih adanya potensi munculnya wabah penyakit yang bersumber dari hewan (*zoonosa*). Penyakit *zoonosa* merupakan penyakit atau infeksi pada binatang yang dapat ditularkan kepada manusia. Penyakit yang tergolong dalam *zoonosa*, misalnya: *antraks*, *rabies*, *brucellosis*, *avian influenza*, dan lain-lain;
4. Masih adanya potensi bahan pangan asal hewan yang belum memenuhi kriteria ASUH karena *hygiene* dan sanitasi belum sepenuhnya diterapkan pada unit-unit usaha pengolahan dan pemasaran bahan pangan asal hewan;
5. Fasilitasi pemasaran produk KWT belum optimal.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang perdagangan, diantaranya adalah:

1. Gejolak Inflasi yang cukup tinggi;
2. Belum optimalnya perumusan kebijakan di sektor perdagangan yang berorientasi pada penerapan Transaksi Perdagangan melalui sistem elektronik (TPMSE);
3. Masih lemahnya pengendalian perizinan usaha perdagangan
4. Masih belum optimalnya penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota Bogor;
5. Belum optimalnya pertumbuhan ekspor di kota Bogor;
6. Belum semua pelaku bisnis di kota Bogor siap menghadapi ekonomi digital.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang perindustrian, diantaranya adalah masih rendahnya daya saing industri kecil dan menengah yang disebabkan karena:

1. Masih rendahnya kapabilitas SDM pelaku IKM;
2. Masih lemahnya kemampuan dan inovasi pemanfaatan teknologi produksi oleh IKM;
3. Proses produksi yang inefisien karena faktor penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang menyebabkan lemahnya daya saing harga produk;
4. Masih terbatasnya model dan strategi bisnis yang dikembangkan oleh pelaku IKM;
5. Masih terbatasnya kemampuan pemasaran karena kekurangmampuan pelaku IKM membangun jejaring pemasaran;



6. Masih rendahnya produktivitas industri kecil dan menengah;
7. Masih rendahnya kualitas produksi industri kecil dan menengah;
8. Sinergitas industri kecil dengan industri besar belum optimal, dan keberadaan industri kecil belum dapat menjadi bagian dari rantai produksi industri besar;
9. Belum semua pelaku industri adaptif menghadapi perubahan di masa pandemi.

4.1.4 URUSAN FUNGSI PENUNJANG

A. URUSAN PERENCANAAN

Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan, diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah baik itu sinergitas antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah, sinergitas antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah (Renstra dan Renja PD) dan sinergitas antara perencanaan sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah/perencanaan perangkat daerah (RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja PD). Hal ini disebabkan antara lain karena:
 - a. Perencanaan 5 tahunan masih sangat tergantung dari *political will* kepala daerah terpilih sehingga ada kemungkinan belum optimal sinergitasnya dengan tahapan perencanaan 5 tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD);
 - b. Sistem perencanaan berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan manual yang ditetapkan;
 - c. pendekatan proses perencanaan (partisipatif, teknokratis, politis dan *top down-bottom up*) masih belum optimal dilaksanakan secara proporsional;
 - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah belum disusun dengan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely bound*);
 - e. Program dan kegiatan dalam Renstra/Renja perangkat daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran dan didukung oleh anggaran yang memadai;

- f. Target kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan hasil analisa dan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah;
 - g. Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya;
 - h. Masih lemahnya analisa untuk menilai keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah;
 - i. rencana sektoral belum seluruhnya mampu merinci indikasi program/kegiatannya , indikator keberhasilan, pagu indikatif, lokus serta tahapan waktu perencanaannya sehingga belum sepenuhnya dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan perangkat daerah;
 - j. Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi rencana sektoral masih rendah
 - k. Belum adanya kesinambungan dalam penyusunan dokumen rencana sektoral;
 - l. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja rencana sektoral.
2. Belum optimal sinergitas perencanaan RPJMD, RKPD dengan RTRW dan perencanaan sektoral jangka panjang.
 3. Belum optimalnya capaian kinerja RPJMD 2015-2019, yang disebabkan karena :
 - a. Target kinerja dalam dokumen perencanaan belum ditetapkan dengan baik berdasarkan data dan informasi yang akurat;
 - b. Kualitas evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab program/kegiatan belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasil program;
 - c. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum dimanfaatkan untuk kebijakan perencanaan penganggaran dan untuk pemberian *reward* dan *punishment* bagi perangkat daerah penanggung jawab program/kegiatan.
 4. Adanya perubahan peraturan terkait perencanaan penganggaran, serta penerapan SIPD menyeluruh menyebabkan daerah perlu menyesuaikan, bisnis proses dan nomenklatur kegiatan dalam setiap dokumen perencanaannya, sementara kesiapan SIPD dan

peraturan turunan terkait perencanaan dan penganggaran belum lengkap.

5. Kebutuhan ASN perencana sesuai dengan kualifikasi perencana dan analisa jabatan belum dapat dipenuhi.

B. URUSAN KEUANGAN

Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan, diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pendapatan daerah kota Bogor terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
2. Belum optimalnya pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
3. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
5. Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis kinerja;
6. Pengawasan terhadap penyimpangan keuangan daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
7. Belum efektif dan efisiennya perencanaan anggaran berbasis kinerja
8. Pengamanan terhadap aset dan BMD khususnya tanah belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

C. URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Permasalahan pada urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Belum tersusunnya standar kompetensi jabatan;
3. Pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan belum selesainya analisa beban kerja dan analisa jabatan yang merupakan kewenangan PD lain;
4. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum;
5. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa PD;
6. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu;

11. Belum terbangunnya kerangka kebijakan Pemda yang berorientasi menciptakan situasi yang kondusif untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi;
12. Belum terbangunnya infrastruktur inovasi daerah;
13. Adanya *gap* implementasi inovasi di daerah;
14. Belum berkembangnya *Innovation Hub* di kota Bogor dengan mengkolaborasikan antara sumberdaya manusia yang ada menjadi modal sosial;
15. Masih kurangnya hasil kelitbangan yang inovatif dan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia industri, dan Pemerintah kota, termasuk untuk penanganan dampak pandemi, percepatan dan pemulihan ekonomi, dan adaptasi kebiasaan baru dalam penguatan daya saing kota Bogor.

E. URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

Permasalahan urusan penunjang terkait tata kelola, diantaranya mencakup 1) fungsi pengawasan, dan 2) fungsi pendukung/Sekretariat Daerah. Permasalahan yang dihadapi urusan penunjang lainnya pada fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah; Hal ini disebabkan antara lain karena :
 - a. Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum seluruhnya mendapat penilaian baik;
 - b. belum ditindaklanjutinya semua rekomendasi laporan hasil reviu LKPD;
 - c. Penyelenggaraan pengawasan perangkat daerah belum efektif;
 - d. Rekomendasi temuan BPK, temuan Inspektorat Propinsi dan APIP belum secara optimal ditindaklanjuti oleh perangkat daerah;
 - e. Penerapan SPIP level 3 pada perangkat daerah masih rendah;
 - f. Prosentase PD yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK masih rendah;
 - g. Belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria pengawasan.
2. Belum optimalnya kapabilitas APIP
3. Belum meratanya kompetensi APIP.

4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis merupakan tantangan dan potensi dalam pembangunan ke depan.

Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Isu strategis dari penelaahan tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. Isu strategis nasional dan provinsi Jawa Barat;
3. Isu strategis dari penelaahan kebijakan pembangunan Kota Bogor yang antara lain terdiri dari RPJMD dan RTRW Kota Bogor;
4. Isu strategis dari penelaahan KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024;
5. Dinamika internasional, nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi pembangunan kota Bogor.
6. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan kota Bogor.

Berikut ini adalah hasil penelaahan terhadap ke enam unsur yang akan menentukan isu strategis pembangunan kota Bogor 5 (lima) tahun ke depan.

4.2.1 ISU STRATEGIS DARI PENELAAHAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Berdasarkan kesepakatan internasional terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan yang wajib diselesaikan sebagai bagian dari penyelesaian 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu : lingkungan, sosial dan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keseluruhan tujuan global tersebut adalah :

1. Tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

3. Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Pendidikan berkualitas, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Energi bersih dan terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
11. Kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem laut, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Ekosistem daratan, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk

pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Dari ke-17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, hampir semuanya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah kota Bogor untuk pencapaian tujuan dimaksud kecuali Tujuan ke - 14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dihimpun melalui masukan dari pemangku kepentingan melalui konsultasi publik untuk mengkaji capaian indikator TPB di Kota Bogor. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan melalui identifikasi dan analisis:

1. Kondisi umum daerah (DDDT, geografis, demografis, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan keuangan daerah)
2. Analisis capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan;
3. Analisis kontribusi Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun Isu Strategis yang dirumuskan berdasarkan telaahan terhadap hasil evaluasi tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Kesenjangan kesejahteraan masyarakat
2. Kemiskinan dan pengangguran
3. Konektivitas pembangunan infrastruktur
4. Aksesibilitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan

4.2.2 ISU STRATEGIS NASIONAL

A. PENELAAHAN TERHADAP RANCANGAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2020-2024



Tema Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 adalah: “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

- a. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:
 - Transformasi struktural berjalan
 - Produktifitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
- b. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
 - Kualitas hidup meningkat
 - Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
 - Indeks kebahagiaan meningkat
- c. Adil dapat diwujudkan dengan:
 - Ketimpangan menurun
 - Redistribusi berjalan baik
- d. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
 - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (*Low Carbon Development*)
 - Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, adalah:

- a. Pembangunan manusia
 - Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
- b. Pembangunan ekonomi
 - Pangan dan pertanian
 - Energi, mineral, dan pertambangan
 - Kelautan dan kemaritiman
 - Pariwisata
 - Ekonomi kreatif dan digital
 - Industri manufaktur
- c. Pembangunan infrastruktur
- d. Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan
- e. Pembangunan kewilayahan

Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Pembangunan Manusia:

- Pelayanan Dasar
 - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
- b. Pembangunan ekonomi:
- Pangan
 - Energi
 - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital
 - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
- c. Pembangunan kewilayahan:
- Sentra Pertumbuhan
 - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
- d. Pembangunan Infrastruktur:
- Transportasi
 - Telekomunikasi
 - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
- e. Pembangunan Polhukkamhan:
- Hukum dan Regulasi
 - Hankam
 - Politik

B. PENELAAHAN TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2020-2024.

Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka dalam perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2020 dilakukan penelaahan terhadap dokumen RPJMN Tahun 2020-2024, yang memuat visi, misi, arahan, dan agenda pembangunan Indonesia dalam kurun waktu 2020-2024.

1. Visi Misi Presiden 2020-2024

Visi dan misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Untuk mewujudkan Visi tersebut dijabarkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita kedua. Misi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

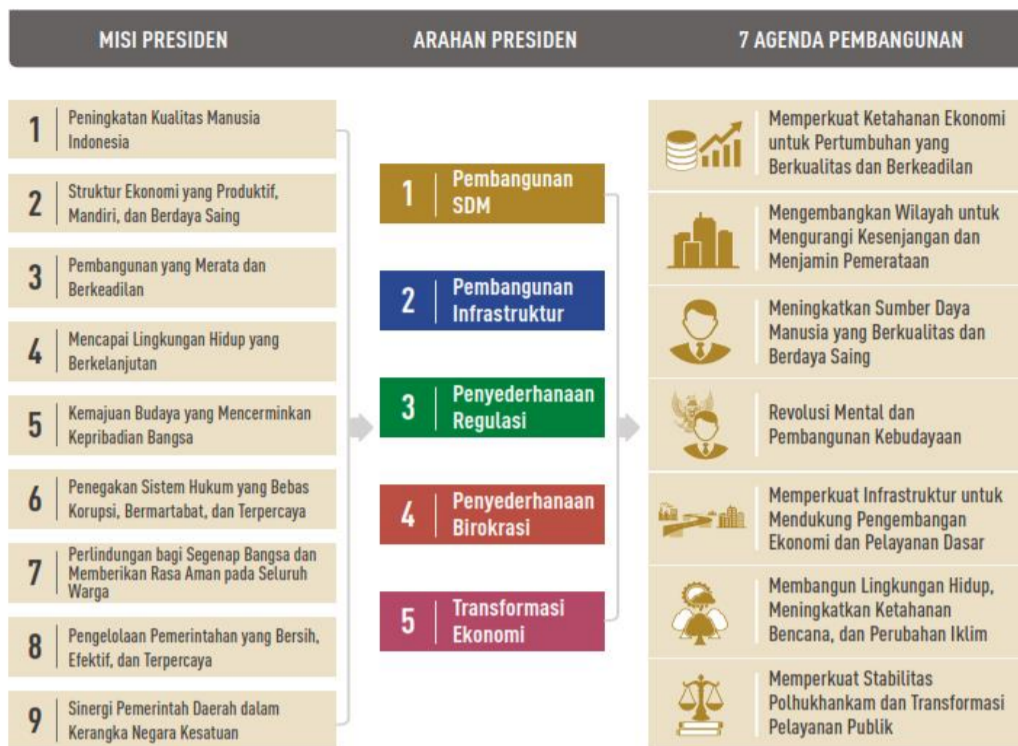
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selain terdapat 9 (sembilan) misi, terdapat 5 arahan presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Pembangunan infrastruktur.
- c. Penyederhanaan regulasi.
- d. Penyederhanaan birokrasi.
- e. Transformasi ekonomi.

Kelima arahan utama digunakan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran visi. Strategi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan. Hubungan antara misi, arahan, dan agenda pembangunan digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.3
Hubungan Misi, Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan



Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

2. Arahan Pembangunan

a. Arahan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Arahan yang pertama adalah pembangunan SDM. Pembangunan SDM dilakukan dalam rangka membangun SDM yang mampu berdaya saing, pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arahan pembangunan SDM tersebut terdapat 3 (tiga) aspek yaitu:

- 1) Layanan dasar dan perlindungan sosial.
- 2) Produktivitas.
- 3) Pembangunan karakter.

Aspek layanan dasar dan perlindungan sosial terdiri dari 6 (enam) strategi yaitu:

- 1) tata kelola kependudukan;
- 2) perlindungan sosial;
- 3) kesehatan; pendidikan;
- 4) pengentasan kemiskinan;
- 5) kualitas anak, perempuan dan pemuda.

Aspek produktivitas terdiri dari 4 (empat) strategi yaitu:

- 1) pendidikan dan pelatihan vokasi;

- 2) pendidikan tinggi;
- 3) iptek dan inovasi;
- 4) prestasi olahraga.

Aspek Pembangunan Karakter terdiri dari 4 (empat) strategi yaitu:

- 1) revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;
- 2) pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- 3) moderasi beragama;
- 4) budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

b. Arahan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan merupakan upaya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dapat menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Arahan pembangunan infrastruktur meliputi 5 (lima) aspek, yaitu:

- 1) Infrastruktur pelayanan dasar.
- 2) Infrastruktur ekonomi.
- 3) Infrastruktur perkotaan.
- 4) Energi dan ketenagalistrikan.
- 5) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.

Infrastruktur pelayanan dasar memiliki beberapa strategi, diantaranya,

- 1) Akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau;
- 2) Pengelolaan air tanah dan air baku aman berkelanjutan;
- 3) Akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
- 4) Keselamatan dan keamanan transportasi;
- 5) Ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
- 6) Strategi dalam pengelolaan waduk multiguna dan modernisasi irigasi.

Infrastruktur ekonomi memiliki dua strategi, yaitu:

- 1) Konektivitas yang meliputi jalur darat, jalur kereta api, jalur laut, dan jalur udara. Yang termasuk jalur darat antara lain: jalan tol, jalan baru, jalan trans pulau Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T), dan pelabuhan penyeberangan baru. Jalur kereta api meliputi KA kecepatan tinggi dan KA angkutan barang, untuk jalur laut,

berfokus pada jaringan pelabuhan utama terpadu, sedangkan untuk jalur udara meliputi bandara baru dan jembatan udara;

- 2) Sektor ekonomi, terbagi menjadi tiga yaitu, industri pengolahan, jasa dan pariwisata, pertanian perkebunan kawasan atau klaster kelautan-perikanan.

Infrastruktur perkotaan memiliki lima strategi yaitu:

- 1) Strategi dalam transportasi perkotaan;
- 2) Energi berkelanjutan perkotaan;
- 3) Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan;
- 4) Akses air minum perpipaan dan sanitasi perkotaan yang layak dan aman;
- 5) Akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan.

Energi dan ketenagalistrikan mempunyai tiga strategi yang meliputi:

- 1) Keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan,
- 2) Strategi dalam akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan,
- 3) Strategi kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan.

Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital, terdapat tiga strategi yang disusun yaitu:

- 1) Penuntasan infrastruktur TIK;
- 2) Pemanfaatan infrastruktur TIK; dan
- 3) Fasilitas pendukung transformasi digital.

c. Arahan Penyederhanaan Regulasi

Arahan penyederhanaan regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *omnibus law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Arahan ini memiliki dua pendekatan meliputi pendekatan *omnibus law* dan pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun. Penerapan dari pendekatan *omnibus law* itu sendiri dilakukan dengan penggabungan beberapa ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan membatalkan Undang-Undang sebelumnya. Terdapat tiga strategi yang dilakukan yaitu penyederhanaan, pencanbutan, dan penggabungan.

d. Arahan Penyederhanaan Birokrasi

Arahan poin ke empat yaitu penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dalam rangka memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Arahan penyederhanaan birokrasi memiliki 3 (tiga) aspek yaitu:

- 1) Penyederhanaan prosedur,
- 2) penyelenggaraan e-government,
- 3) Reformasi birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor, kepabeanan, dan kepelabuhanan.

e. Arahan Transformasi Ekonomi

Arahan kelima yaitu transformasi ekonomi. Arahan ini dilakukan dalam rangka melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Arahan transformasi ekonomi memiliki 3 (tiga) aspek yaitu:

- 1) Industrialisasi,
- 2) Pengembangan destinasi unggulan,
- 3) Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Pada aspek pertama yaitu industrialisasi memiliki strategi yaitu industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global. Pada aspek kedua yaitu pengembangan destinasi unggulan memiliki strategi yaitu dengan pengembangan destinasi unggulan melalui perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenities di destinasi pariwisata prioritas. Serta aspek ketiga yaitu penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital memiliki strategi yaitu dengan penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital pada sektor kuliner, fashion, kriya, aplikasi dan konten digital, games, film, dan musik.

3. Agenda Pembangunan

Untuk menjembatani dan mengimplementasikan arahan pembangunan, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- 1. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

4.2.3 ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT MELALUI PENELAAHAN TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2023

Ada 5 isu strategis yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yaitu: (1) Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia; (2) Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (3) Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; (4) Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) Reformasi birokrasi.

Secara umum dari 5 (lima) isu strategis diatas dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Jawa Barat mampu bersaing secara global. Isu strategis dalam peningkatan kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia di Jawa Barat meliputi:

- 1. peningkatan kualitas pendidikan;
- 2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; dan
- 3. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat.

Selain itu pengangguran juga merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan di Jawa Barat mengingat tingkat pengangguran di Jawa Barat masih jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Barat mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasan anak, perempuan dan *human trafficking*, belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial, masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan menjadi perhatian utama guna mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan di Jawa Barat. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi sampai dengan saat ini dikategorikan dalam kondisi cukup baik meskipun di beberapa tempat masih perlu penanganan yang maksimal. Penataan sistem transportasi perlu segera ditingkatkan terutama di wilayah perkotaan, dikarenakan pemenuhan sarana transportasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertumbuhan dan pergerakan orang, barang dan jasa. Revitalisasi jaringan kereta api, pembangunan jalan dan jembatan serta pelabuhan dan bandar udara, penyediaan listrik serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi fokus lima tahun kedepan. Komunikasi dan telekomunikasi menjadi daya dukung untuk pembangunan dan pemerataan pembangunan di Jawa Barat.

Saat ini, kualitas lingkungan hidup baik kualitas air, udara maupun tutupan lahan semakin menurun. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan perlu menjadi perhatian kedepan dan harus dilakukan secara seimbang dan holistik bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan harus dipastikan agar tidak mengakibatkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menimbulkan

kerusakan ekosistem dan pencemaran. Fokus utama lainnya adalah mengantisipasi dampak dari perubahan iklim dengan melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dampak perubahan iklim dapat meningkatkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi serta menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Pengolahan sampah terpadu antar lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama penyebaran dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan air limbah domestik harus dikelola secara tepat guna. Pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang, penanganan kebencanaan tetap menjadi perhatian utama untuk lima tahun kedepan.

4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif (35,97%), pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil. Terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan lama kunjung wisatawan, belum terinternalisasinya nilai-nilai *hospitality* di masyarakat, belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, *branding* dan aktivitas

promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal.

Pada bidang ketahanan pangan masih terdapat beberapa masalah yang ditandai oleh Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) Provinsi Jawa Barat masih di bawah rata-rata nasional, hal ini disebabkan oleh masyarakat miskin rawan pangan masih tinggi, ketersediaan pangan di Jawa Barat masih mengalami ketimpangan, keanekaragaman konsumsi pangan masih rendah, ketidakstabilan harga pangan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi.

Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Pada sektor industri terdapat beberapa permasalahan yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan sektor industri, hal tersebut disebabkan oleh produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi), sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat, infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik, peranan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

5. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM

aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Dengan adanya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 RPJMD Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan, dan kelima isu strategis tersebut tetap dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat, akan tetapi dalam penjabarannya sudah di arahkan pada penanganan pandemic Covid-19.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

- a. Jabar Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.
- b. Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.
- c. Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, yaitu:

- a. Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.
- b. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
- c. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah.
- d. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Program Unggulan dalam RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Program unggulan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat merupakan janji-janji kampanye gubernur dan strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2018 – 2023. Program unggulan ini salah satu pendukung terhadap pencapaian visi dan misi. Program unggulan 2018 - 2023, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:
 - a. Kelas pintar untuk semua.
 - b. Satu universitas di setiap kabupaten/kota.
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Layad rawat.
 - b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit.
 - c. Posyandu juara.
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
 - a. Ekonomi digital.
 - b. Inkubator bisnis.
 - c. *Creative/Start-up hub*.
 - d. Gudang tani dan ikan juara.
 - e. Kredit 0%.
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, meliputi:
 - a. Satu kabupaten/kota satu destinasi wisata unggul.
 - b. Infrastruktur pariwisata.
 - c. Pengembangan SDM pariwisata.
5. Pesantren juara, meliputi:

- a. Modernisasi dana umat.
 - b. Tunjangan santri dan ulama.
 - c. Modernisasi manajemen pesantren.
 - d. Satu pesantren satu produk (tren market).
6. Infrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
- a. 100% jalan mulus di Jawa Barat.
 - b. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta antar kota.
 - c. Pengembangan transportasi massal perkotaan.
 - d. Pembangunan pelabuhan dan transportasi sungai.
7. Gerakan bangun desa (Gerbang Desa), meliputi:
- a. Satu desa satu Bumdes (OVOP).
 - b. Tunjangan desa.
 - c. Irigasi pertanian desa.
 - d. Internet masuk desa.
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (Golekmah), meliputi:
- a. Rumah gratis.
 - b. Transportasi gratis.
 - c. Layanan kesehatan gratis.
 - d. Pendidikan gratis.
 - e. Sembako gratis.
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
- a. Provinsi pintar (*E-planning, E-budgeting, E-monev, E-remunerasi kinerja, dan lain-lain*).
 - b. Kota/desa pintar.
 - c. Pemekaran wilayah.

4.2.4 ISU STRATEGIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BOGOR

A. PENELAAHAN TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA BOGOR 2005-2025

Isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Bogor tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis pada potensi sumberdaya lokal
2. Penataan ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum



Visi RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 adalah:

“KOTA JASA YANG NYAMAN DENGAN MASYARAKAT MADANI DAN PEMERINTAHAN AMANAH” yang terdiri dari empat misi yaitu:

1. Berkembangnya perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada;
2. Terwujudnya kota yang bersih, indah, tertib dan aman (Beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera;
4. Terwujudnya pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Sasaran pokok RPJPD Kota Bogor merupakan penjabaran dari misi yang terdapat dalam RPJPD Kota Bogor. Terdapat 21 sasaran pokok dalam dokumen RPJPD Kota Bogor yang dapat dilihat pada Tabel 4.25.

Tabel 4.25
Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025

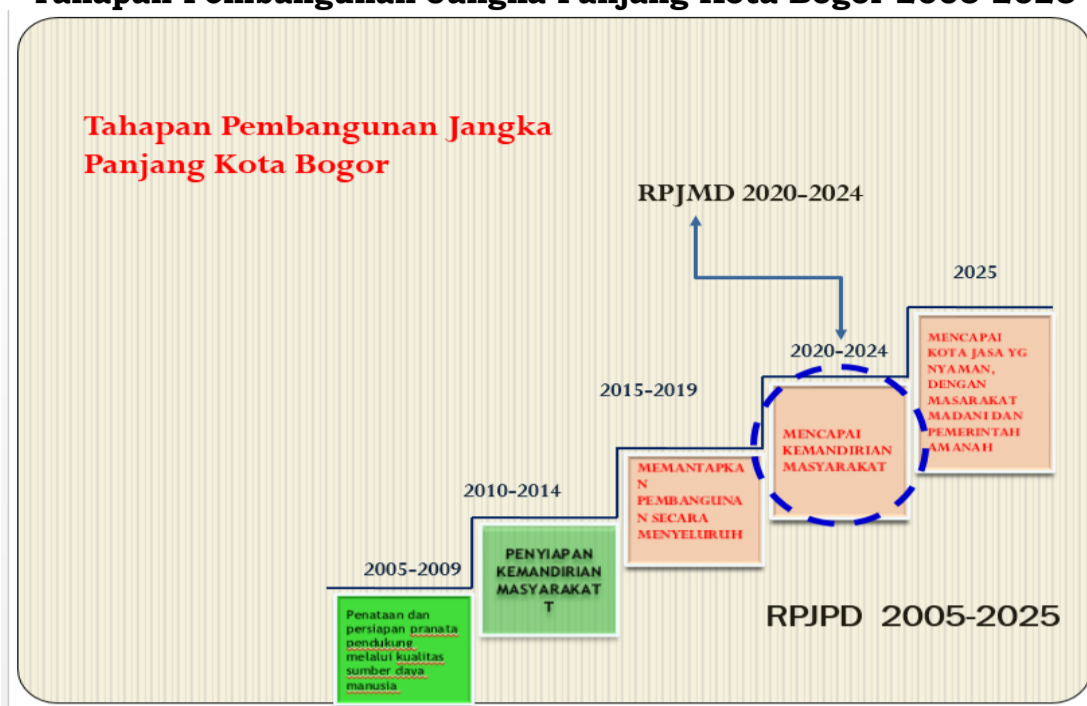
MISI RPJPD KOTA BOGOR	SASARAN POKOK RPJPD KOTA BOGOR
Misi 1. Berkembangnya Perekonomian Masyarakat Dengan Titik Berat Pada Jasa Yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Yang Ada	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pada seluruh sektor ekonomi terutama sektor jasa yang menjadi basis aktifitas ekonomi
	Meningkatnya kompetensi, produktifitas, penempatan, perlindungan dan pengawasan tenaga kerja
	Meningkatnya keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem yang produktif
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, investasi di daerah, nilai ekspor produk serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor
	Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal
	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai tingkat kesejahteraan pada tahun 2025
Misi 2. Terwujudnya kota yang bersih, indah, tertib dan aman (Beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat
	Terbangunnya konsep pembangunan yang nyaman dan berwawasan lingkungan
	Meningkatnya penataan ruang dan pertanahan
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan termasuk perlindungan masyarakat dari bencana
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kota
Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan	

MISI RPJPD KOTA BOGOR	SASARAN POKOK RPJPD KOTA BOGOR
	Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien dan bernilai tambah
Misi 3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera	Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki watak dan perilaku yang berbudi pekerti luhur, cerdas, toleran, gotong royong, dinamis dan berorientasi iptek
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM)
	Meningkatnya peran serta pemuda dalam semua sektor pembangunan dan IPTEK
	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender
Misi 4. Terwujudnya pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum	Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis serta meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan meningkatkan profesionalisme aparatur dan transparansi secara partisipatif, akuntabel di dalam pelaksanaan pemerintahan
	Terciptanya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur berdasarkan pemerintahan yang berlandaskan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil dan masyarakat politik
	Terciptanya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan yang didukung kondisi politik yang demokratis berbasis etika

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Tahapan pembangunan jangka panjang terbagi menjadi lima tahapan dan RPJMD tahun 2020-2024 merupakan RPJMD tahap keempat. Dalam tahapan ini ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial budaya dan bidang hukum, pemerintahan dan politik.

Gambar 4.4
Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor 2005-2025



Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025

Tabel 4.26
Arah Pembangunan Daerah Dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
1	Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian lokal agar berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan global.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memantapkan sektor tersier sebagai sektor unggulan. ➤ PDRB Rp.7.849.788,84 (juta) ➤ Indeks Daya Beli 74,12
2	Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terpeliharanya peningkatan jejaring antar wilayah sentra ekonomi, secara fisik, permodalan dan inovasi
3	Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dengan kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan non diskriminatif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen, meningkatkan daya saing, merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi, meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan dan pemanfaatan pusat bisnis ➤ Peningkatan promosi dan pemasaran pusat bisnis

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
	Menengah (KUMKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi daerah.	
4	Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui regulasi perizinan yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur sebagai penunjang investasi.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan regulasi bagi peningkatan investasi ➤ Mempertahankan iklim investasi yang kondusif ➤ Terciptanya dan tersedianya paket-paket insentif bersaing bagi investasi ➤ Peningkatan promosi investasi, agar Kota Bogor menjadi salah satu tujuan investor
5	Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penerapan pengelolaan tenaga kerja secara madani oleh pemberi kerja
6	Pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai investasi sumber daya manusia.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan ketrampilan, kewirausahaan dan peningkatan produktivitas ➤ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas dan nilai tambah tenaga kerja ➤ Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui standarisasi dan sertifikasi. ➤ Meningkatkan pembinaan lembaga pelatihan swasta dan pemerintah
7	Di sektor primer diarahkan kepada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk-produk pertanian melalui pelaksanaan pertanian yang baik berkenaan dengan penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjaga tingkat ketahanan pangan serta pemantapan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan
8	Di sektor sekunder diarahkan kepada peningkatan daya saing industri pengolahan dengan cara peningkatan kualitas.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberdayaan produk lokal dan pengembangan pasar dalam negeri ➤ Pengelolaan wilayah industri yang berwawasan lingkungan
9	Di sektor tersier diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Bogor terutama jasa perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa pendidikan serta jasa lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terpeliharanya keberlanjutan kawasan bisnis dan perdagangan
10	Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perluasan lapangan kerja dengan mengembangkan potensi wisata yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penciptaan dan pelestarian kesan dan citra Kota Bogor sebagai tempat yang nyaman untuk beraktivitas
11	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK dan berdaya saing, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memantapkan keterlibatan swasta melalui CSR untuk mendukung pengembangan ekonomi UMKM ➤ Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses pasar

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
	kontribusi yang nyata untuk memperkuat perekonomian lokal. Pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta peningkatan produktivitas yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil serta inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.	

Sumber: Hasil Analisa, 2020

Berikut arahan pembangunan dalam RPJPD Kota Bogor 2005 – 2025 untuk periode RPJMD 2020-2024.

MISI 1: MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN TITIK BERAT PADA JASA YANG MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG ADA.

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
1	Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian lokal agar berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan global.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memantapkan sektor tersier sebagai sektor unggulan. ➤ PDRB Rp. 7.849.788,84 (juta) ➤ Indeks Daya Beli 74,12
2	Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terpeliharanya peningkatan jejaring antar wilayah sentra ekonomi, secara fisik, permodalan dan inovasi
3	Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dengan kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif dan non diskriminatif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen, meningkatkandaya saing, merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi, meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi untuk memperkuat basis ekonomi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan dan pemanfaatan pusat bisnis ➤ Peningkatan promosi dan pemasaran pusat bisnis
4	Menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas melalui regulasi perizinan yang lebih efektif dan efisien, serta peningkatan infrastruktur sebagai penunjang investasi.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan regulasi bagi peningkatan investasi ➤ Mempertahankan iklim investasi yang kondusif ➤ Terciptanya dan tersedianya paket-paket insentif bersaing bagi investasi ➤ Peningkatan promosi investasi, agar Kota

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
		Bogor menjadi salah satu tujuan investor
5	Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal dan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penerapan pengelolaan tenaga kerja secara madani oleh pemberi kerja
6	Pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai investasi sumber daya manusia.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan ketrampilan, kewirausahaan dan peningkatan produktivitas ➤ Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas dan nilai tambah tenaga kerja ➤ Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui standarisasi dan sertifikasi. ➤ Meningkatkan Pembinaan lembaga pelatihan swasta dan pemerintah
7	Di sektor primer diarahkan kepada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk-produk pertanian melalui pelaksanaan pertanian yang baik berkenaan dengan penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjaga tingkat ketahanan pangan serta pemantapan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan
8	Di sektor sekunder diarahkan kepada peningkatan daya saing industri pengolahan dengan cara peningkatan kualitas.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberdayaan produk lokal dan pengembangan pasar dalam negeri ➤ Pengelolaan wilayah industri yang berwawasan lingkungan
9	Di sektor tersier diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Bogor terutama jasa perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa pendidikan serta jasa lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terpeliharanya keberlanjutan kawasan bisnis dan perdagangan
10	Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perluasan lapangan kerja dengan mengembangkan potensi wisata yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penciptaan dan pelestarian kesan dan citra kota Bogor sebagai tempat yang nyaman untuk beraktivitas
11	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang berbasis IPTEK dan berdaya saing, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk memperkuat perekonomian lokal. Pengembangan UMKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan serta peningkatan produktivitas yang berorientasi terhadap kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memantapkan keterlibatan swasta melalui CSR untuk mendukung pengembangan ekonomi UMKM ➤ Pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses pasar

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
	pasar, pemanfaatan hasil serta inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat.	

Sumber: Hasil Analisa, 2020

MISI 2: MEWUJUDKAN KOTA YANG BERSIH, INDAH, TERTIB DAN AMAN (BERIMAN) DENGAN SARANA PRASARANA PERKOTAAN YANG MEMADAI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
1	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan melalui penataan ruang dan pertanahan yang terintegrasi secara nasional, regional, maupun lokal menuju kota metropolitan yang nyaman	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengendalian tata ruang terutama untuk menjamin daya dukung dan daya tampung lingkungan
2	Mewujudkan penataan kota secara menyeluruh untuk membentuk wajah dan lingkungan kota yang beridentitas dan berbudaya yang mendukung kenyamanan dan daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan penataan kota yang beridentitas dan berbudaya
3	Mewujudkan sistem transportasi yang mendukung aksesibilitas kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui penyelenggaraan transportasi yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta bersinergi dengan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan angkutan umum ➤ Pemantapan rekayasa lalu lintas
4	Mewujudkan kelestarian sistem ekologi kota yang memperhatikan ruang terbuka hijau dan kawasan resapan serta pengamanan kota dari bencana melalui perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terintegrasi secara regional.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan ruang terbuka hijau ➤ Perlindungan kawasan resapan air ➤ Penataan bantaran sungai
5	Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh melalui pembangunan perumahan permukiman yang sehat dengan mengutamakan pembangunan secara vertikal dan memperhatikan daya dukung lahan, konservasi sumber daya air serta penyediaan sarana prasarana pendukung yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan jaringan masyarakat dalam pengelolaan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan permukiman ➤ Perwujudan lingkungan permukiman yang berkualitas ➤ Pengelolaan dan pengembangan rusun
6	Mewujudkan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, listrik, gas serta sarana informasi telekomunikasi modern untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kegiatan perkotaan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan. Integrasi jaringan utilitas kota dilakukan secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan layanan kualitas air minum ➤ keterpaduan jaringan utilitas kota
7	Meningkatkan sistem layanan persampahan melalui modernisasi pengolahan dan peningkatan partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantapan kinerja layanan persampahan ➤ Pemantapan pengembangan pengelolaan persampahan skala kawasan dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ➤ Perluasan jaringan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat ➤ Pemantapan pengelolaan TPA

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
8	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penegakan hukum dalam mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman.	➤ Pemantapan model partisipasi swasta dalam investasi dibidang infrastruktur dan sarana kota

Sumber: Hasil Analisa, 2020

MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN, BERKETERAMPILAN, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA.

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	➤ IPM Kota Bogor 86.85
2	Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.	➤ Jumlah Penduduk 1.500.000 jiwa ➤ LPP 2%
3	Terciptanya sistem administrasi kependudukan yang tertib guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bogor, serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.	➤ Pemantapan sistem administrasi kependudukan
4	Pembangunan pendidikan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya pendidikan untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berkualitas berketerampilan dan berdaya saing dengan biaya pendidikan yang murah dan terjangkau.	➤ Bebas buta huruf ➤ RLS 15,00 tahun ➤ Peningkatan kualitas lulusan pendidikan non formal
5	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus terhadap ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin	➤ AHH 79,5 tahun
6	Peningkatan sarana prasarana kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penilaian disertai peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat	➤ Terwujudnya peningkatan pembiayaan, pembinaan, pengawasan pengendalian dan penilaian dalam pelayanan kesehatan serta pemantapan kemandirian masyarakat
7	Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai agama yang terwujud dalam perilaku yang bermoral.	➤ Terwujudnya pemantapan, pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat
8	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial.	➤ Pelayanan sosial (34,86%)
9	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan	➤ Menurunnya jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan (0%)



NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
	kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan hak anak-anak yang dilaksanakan secara integral lintas sektor dan lintas wilayah.	
10	Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat.	➤ Penguatan kelembagaan perlindungan anak (40%)
11	Pembangunan daerah harus memperhatikan pengarusutamaan gender yaitu setiap kebijakan publik haruslah memperhatikan dampak, akses dan manfaat bagi kaum perempuan dan laki-laki.	➤ Pemantapan kebijakan publik yang memperhatikan dampak, akses dan manfaat bagi kaum perempuan dan laki-laki
12	Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan dan partisipasi pemuda di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, IPTEK dan politik serta memiliki wawasan kebangsaan.	➤ Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan (100%) ➤ Pengembangan nilai-nilai budaya lokal.
13	Pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan prestasi olahraga dan budaya olahraga di kalangan masyarakat.	➤ Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Sumber: Hasil Analisa, 2020

MISI 4: MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM.

NO	ARAH PEMBANGUNAN	2020-2024
1	Memantapkan dan mendukung proses demokrasi secara berkelanjutan pada berbagai aspek, yang berlandaskan hukum untuk mewujudkan pembangunan Kota Bogor	➤ Pemantapan dan penguatan pemahaman partisipasi politik masyarakat yang demokratis
2	Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang amanah pada semua tingkat pemerintahan serta mendekatkan pola pelayanan masyarakat yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima	➤ Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan prima kepada masyarakat
3	Terwujudnya kualitas masyarakat dan aparatur yang mempunyai kesadaran hukum dan menjunjung tinggi hukum serta memperkuat penegakan hukum tanpa diskriminatif dengan sanksi hukum yang tegas	➤ Pemantapan budaya hukum masyarakat dengan tersedianya produk hukum daerah yang responsif ➤ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penegakan hukum ➤ Peningkatan kompetensi aparatur
4	Memperkuat peran serta masyarakat melalui bentuk kelembagaan yang lebih efisien dan efektif	➤ Pemantapan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan
5	Terwujudnya sistem koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan.	➤ Pemantapan sistem koordinasi yang sinergis dalam penyelenggaraan pemerintahan
6	Memantapkan peran media massa yang profesional melalui peningkatan akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan bertanggungjawab dengan menjadikan media massa sebagai alat kontrol atas pemenuhan kepentingan publik	➤ Pemantapan peran media yang profesional dan bertanggungjawab sebagai alat kontrol
7	Terciptanya kesetaraan gender dalam segala aspek tatanan kehidupan	➤ Pemantapan program, anggaran, kerjasama yang berbasis gender

Sumber: Hasil Analisa, 2020

B. PENELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Kota Bogor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kota yang dibagi menjadi empat tahap waktu pelaksanaan dengan masing-masing tahap memiliki waktu lima tahun.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam lima tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Pada tahun 2016, Kota Bogor telah melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031. Proses evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor dilakukan secara menyeluruh termasuk evaluasi Perda No.8 Tahun 2011 sebagai produk hukum resmi RTRW Kota Bogor. Kegiatan evaluasi RTRW Kota Bogor dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhinya. Faktor eksternal ini dapat mempengaruhi kebijakan, strategi, rencana dan program yang ada atau akan memperkuat kebijakan, strategi, rencana dan program yang telah ada.

Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi evaluasi RTRW Kota Bogor diantaranya:

- a. Peraturan yang dikeluarkan di tingkat pusat atau propinsi terkait dengan substansi dalam rencana tata ruang, misalkan adanya UU, PP, Permen, Perda provinsi, Perda kota dan lain-lain.

- b. Kebijakan dan rencana regional dari kementerian/lembaga di pusat dan provinsi yang terkait dengan rencana tata ruang Kota Bogor, yang berakibat kepada adanya perubahan:
 - 1) Perubahan rencana struktur ruang, yaitu sistem pusat dan rencana infrastruktur.
 - 2) Perubahan rencana pola ruang.
- c. Rencana tata ruang wilayah tetangga (Kabupaten Bogor) dan rencana yang telah disepakati dengan wilayah tetangga (Kabupaten Bogor).

Di samping faktor eksternal, kegiatan evaluasi RTRW Kota Bogor dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor internal yang mempengaruhinya. Faktor internal ini sebagaimana faktor eksternal dapat mempengaruhi kebijakan, strategi, rencana dan program yang ada atau akan memperkuat kebijakan, strategi, rencana dan program yang telah ada. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi evaluasi RTRW Kota Bogor diantaranya:

a. Rencana Dan Kajian Sektor

Dalam perjalanan realisasi RTRW Kota Bogor, beberapa rencana dan kajian sektoral telah disusun setelah RTRW diperdakan. Hasil dari rencana dan kajian tersebut merupakan turunan dari rencana tata ruang dengan pendetailan sesuai kebutuhan sektor. Pendetailan tersebut guna menjabarkan rencana tata ruang serta menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan sektor pada masa mendatang. Maka dari itu dalam evaluasi RTRW ini, hasil rencana dan kajian sektor perlu dipertimbangkan guna mengevaluasi apakah rencana yang ada masih relevan untuk dilanjutkan atau terdapat rencana dan targetan sektor yang baru yang perlu diakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

b. Isu Strategis Penegasan Batas Kota

Batas kota yang saat ini digunakan oleh Kota Bogor, mulai tahun 2014 disempurnakan batas batasnya di lapangan. Hal ini menyebabkan adanya peta batas Kota Bogor yang telah disempurnakan pada tahun 2014 dan yang akan digunakan untuk segala keperluan administrasi batas kota termasuk dalam RTRW Kota Bogor. Kondisi ini akan menyebabkan perlunya

diperbaiki peta dasar maupun peta tematik yang ada dalam RTRW Kota Bogor, yaitu peta dengan batas yang paling aktual.

c. Isu Strategis Baru Transportasi

Aspek transportasi merupakan aspek penting sebagai pembentuk kota. Dalam mewujudkan rencana tata ruang Kota Bogor, dalam kurun 5 tahun terakhir ini terdapat beberapa isu strategis transportasi yang akan mempengaruhi transportasi Kota Bogor. Isu strategis ini akan turut menjadi dasar dalam mengevaluasi kebijakan, strategi, rencana dan program transportasi.

Beberapa isu strategis transportasi Kota Bogor:

- 1) Transportasi Massal
 - Rencana pengembangan transpakuan
 - Rencana pengembangan angkutan berbasis rel: LRT, Monorel
 - TOD Sukaresmi
- 2) Terminal Baranangsiang
 - Terminal tipe A
 - Stasiun LRT
- 3) Rencana Terminal Tanah Baru
 - Terminal tipe A
 - Stasiun LRT/monorel
 - Terminal barang
 - TOD/ *mixed use*
- 4) *Skywalk*
 - Baranangsiang – Suryakencana
 - Sukaresmi
 - Air Mancur – Sempur
- 5) Isu Strategis Perbedaan Pola Ruang Eksisting Dengan Rencana

Dari hasil evaluasi RTRW 2011-2031 yang dilaksanakan pada Tahun 2016 tersebut merekomendasikan untuk dilanjutkan dengan penyusunan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor 2011-2031.

Ada beberapa isu strategis yang berkaitan dengan penataan ruang Kota Bogor 2011-2031, yaitu:

1. Keterkaitan Kota Bogor Dengan Wilayah Sekitarnya

Kota Bogor secara geografis terletak di kawasan Jabodetabek di mana secara struktur Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam PKN Bodebek. Posisinya yang strategis sebagai bagian dari metropolitan Jakarta maka dalam perkembangan kotanya banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan tuntutan kegiatan dari sistem metropolitan

Jabodetabek. Perencanaan Kota Bogor tidak mungkin hanya melihat Bogor sebagai suatu kota tunggal namun harus diperhatikan pula posisinya dalam lingkup regional.

Sebagai bagian dari PKN Bodebek, Kota Bogor merupakan salah satu penyangga Jakarta yang bersama dengan Kota/Kab Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bogor harus dapat berbagi peran dalam pengembangan PKN ini. Keterkaitan Kota Bogor dengan kota/kab di sekitar Jakarta ini meliputi sistem jaringan jalan terutama menyangkut jalan tol dan arteri primer serta menyangkut sistem kota dan pola ruang. Sebagai penyangga Jakarta beberapa fungsi penunjang Jakarta dilimpahkan pula di kawasan penyangga tersebut termasuk di Kota Bogor.

Dalam hal kependudukan, diproyeksikan penduduk Kota Bogor akan mencapai 1 juta jiwa pada tahun 2011 maka secara klasifikasi kota Kota Bogor akan meningkat dari Kota Besar menjadi Metropolitan. Sebagai Kota Metropolitan maka konsentrasi penduduk akan berpusat pada kota tersebut. Di mana dengan berubahnya menjadi Kota Metropolitan maka kebutuhan pengembangan dan kegiatan yang harus diwadahi di Kota Bogor mengalami perubahan pula. Hal ini perlu diantisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang untuk masa 20 tahun ke depan ini.

Keterkaitan struktur dan ketergantungan Kota Bogor dalam lingkup regional meliputi:

Sistem kota, sebagai bagian dari PKN Bodebek maka Kota Bogor merupakan kota satelit Jakarta yang diarahkan pengembangannya menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan sektor perdagangan dan jasa. Beberapa fasilitas minimum dari PKN dapat disediakan oleh Kota Bogor, namun demikian perlu adanya koordinasi dengan kawasan Bodebek lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih fasilitas yang disediakan.

Jaringan jalan, dalam merencanakan sistem jaringan jalan Kota Bogor maka sistem regional perlu dipertimbangkan dan dijadikan masukan dalam rencana terutama dalam hal jaringan jalan Tol, arteri primer dan kolektor primer. Beberapa jaringan jalan yang perlu dipertimbangkan diantaranya Rencana Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR), Rencana Jalan Bogor Outer Ring Road (BORR), rencana Tol Ciawi-Sukabumi, dan Bogor Inner Ring Road.

Kereta api, merupakan salah satu moda yang digunakan oleh para komuter dalam menempuh perjalanannya ke Jakarta. Frekwensi

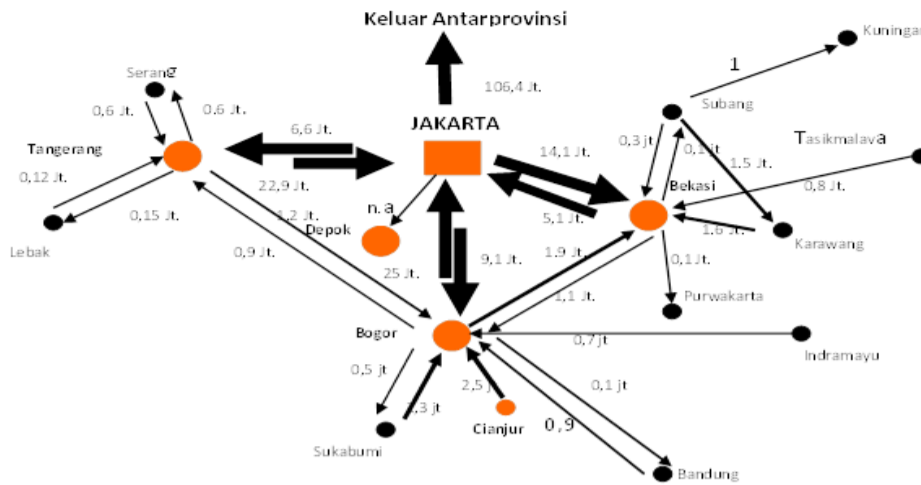
perjalanan kereta api dalam sehari sangat tinggi dengan jumlah penumpang harian rata-rata 30.000 penumpang. Kondisi saat ini perlintasan jaringan jalan kereta api dan jalan raya kebanyakan masih sebidang, hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan lalu lintas Kota Bogor pada beberapa titik perlintasan. Pengembangan moda kereta api menjadi penting guna menunjang pergerakan penduduk Kota Bogor dan kawasan sekitarnya menuju Jakarta namun perlu pula diperhatikan kondisi perlintasan yang ada. Di masa mendatang perlintasan kereta api dan jalan raya sebaiknya tidak sebidang.

Sebagai kota satelit Jakarta, maka perkembangan pola ruang Kota Bogor lebih banyak diarahkan kepada perumahan dan mulai pula berkembang kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang perumahan. Perumahan yang dibangun di Kota Bogor terutama yang berlokasi di bagian utara lebih untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi para pekerja di Jakarta. Saat ini perkembangan perumahan untuk pasar pekerja di Jakarta mulai merambah ke bagian timur dan selatan, hal ini perlu diantisipasi aspek transportasinya karena seringkali perumahan hanya merencanakan pembangunan di dalam areal perumahan tanpa memikirkan sistem transportasi penunjang keluar dari perumahan menuju tempat kerja (dalam hal ini ke arah Jakarta).

Dalam lingkup Bogor Raya, Kota Bogor akan tetap menjadi pusat pelayanan sosial ekonomi, pusat layanan transportasi dan pusat perdagangan khususnya terhadap wilayah-wilayah Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Kota Bogor. Mengingat hal tersebut maka dalam perencanaan fasilitas pelayanan terutama di kawasan pinggiran penduduk kawasan pinggiran perlu diperhatikan serta akses menuju fasilitas dari kawasan pinggiran.

Dalam hal utilitas, Kota Bogor memiliki ketergantungan kepada Kabupaten Bogor dalam hal penyediaan sumber air dan TPA. Agar kebutuhan akan sumber air serta lahan untuk TPA dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan penduduk Kota Bogor maka dalam merencanakan sistem utilitas kota, perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor.

Gambar 4.5 **Keterkaitan Antar Kota PKN Metropolitan Jabodetabek-Punjur** **(Eksisting)**



Sumber: RTRW Kota Bogor, 2011

2. Peran dan Fungsi Kota Bogor

Dalam konteks Jabodetabek Punjur, Kota Bogor dan Kota Depok sebagai kota satelit, pemanfaatannya diarahkan untuk perumahan hunian kepadatan tinggi dan sebagian rendah, pusat perdagangan dan jasa dengan skala nasional, industri ringan nonpolutan dan berorientasi pasar, pertanian/ladang, serta perkebunan terbatas, perikanan, peternakan, dan agroindustri, serta Taman Nasional (Bogor). Kabupaten Bogor yang berbatasan langsung dengan Kota Bogor sebagai kawasan perkotaan dan perdesaan diarahkan untuk perumahan hunian sedang/rendah, perdagangan dan jasa skala setempat, pertanian/ladang, pertanian lahan basah/kering dengan teknologi tepat guna, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, hutan produksi, kawasan lindung dan cagar alam.

Sebagai kawasan yang berada di bagian hulu, Bopunjur diarahkan sebagai kawasan lindung. Dengan peran Bopunjur yang demikian, Kota Bogor dalam pengembangannya perlu mempertimbangkan tersedianya daerah-daerah resapan air berupa waduk, ruang terbuka hijau dan lain-lain yang mampu menampung limbah air permukaan.

Peningkatan pemanfaatan jalur KA yang menghubungkan Kota Bogor dengan DKI Jakarta serta peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan Citayam Depok dengan jalan lingkar luar Jakarta (JORR) akan meningkatkan interaksi antara DKI Jakarta dengan Kota Bogor. Peningkatan aksesibilitas antara Jakarta dengan Bogor harus dimanfaatkan oleh Kota Bogor sebagai peluang membangun kesalingtergantungan dengan meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang sosial ekonomi.

Dalam sistem kota-kota di Jabodetabekpunjur, Jakarta diposisikan sebagai kota inti dan Bodetabek serta kota lainnya seperti BSD sebagai satelit. Hal ini tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki kota-kota tersebut. Berdasarkan potensi dan posisi geografis yang dimilikinya, kota-kota dalam lingkup Bodetabek selanjutnya dapat menjadi kota yang mandiri yang pada akhirnya menumbuhkan interaksi yang positif dan saling menguntungkan.

Potensi yang dimiliki Kota Bogor memungkinkan untuk tidak sepenuhnya menjadi satelit Jakarta karena apabila ini berlangsung terus justru akan saling merugikan. Yang perlu diciptakan adalah kesalingtergantungan sehingga di antara keduanya tercipta interaksi yang positif dan saling menguntungkan. Kota Bogor perlu menggunakan potensinya (dengan memperhatikan kaidah-kaidah ekologis) untuk menampung limpahan perkembangan Kota Jakarta sehingga kegiatan ekonominya lebih berkembang, tercipta lapangan kerja yang lebih banyak, dan terwujud kemandirian dari segi pembiayaan pembangunan.

Pemanfaatan ruang Kota Bogor dan Kota Depok sebagai kota satelit diarahkan untuk perumahan hunian kepadatan tinggi dan sebagian rendah, pusat perdagangan dan jasa dengan skala nasional, industri ringan nonpolutan dan berorientasi pasar, pertanian/ladang, serta perkebunan terbatas, perikanan, peternakan, dan agroindustri, serta Taman Nasional (Bogor). Kawasan permukiman kepadatan tinggi di Kota Bogor perlu dipertimbangkan hanya di kawasan-kawasan tertentu mengingat fungsinya sebagai kawasan resapan air dalam ekosistem Jabodetabek Punjur.

Pemanfaatan ruang Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur sebagai kawasan perkotaan dan perdesaan diarahkan untuk perumahan hunian sedang/rendah, perdagangan dan jasa skala setempat, pertanian/ladang, pertanian lahan basah/kering dengan teknologi tepat guna, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, hutan produksi, kawasan lindung dan cagar alam. Arah pemanfaatan ruang bagi kedua kabupaten ini memberi peluang bagi Kota Bogor untuk berperan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi. Kota Bogor dengan posisi geografis dan akses yang dimilikinya juga memungkinkan untuk berperan sebagai pusat perdagangan berskala regional.

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Ruang

Wilayah Kota Bogor merupakan wilayah yang secara topografi cukup datar dan sedikit bergelombang pada bagian selatan. Kondisi ini sangat cocok untuk pengembangan kegiatan perkotaan berupa permukiman dan prasarananya serta kegiatan ekonomis lainnya seperti industri, perdagangan dan jasa. Disamping itu wilayah Kota Bogor yang termasuk dalam konstelasi Kawasan Jabodetabek terhubung dengan kota inti yaitu DKI Jakarta melalui jejaring transportasi yang baik sehingga menyebabkan pergerakan penduduk antara kedua kota tersebut menjadi sangat mudah. Kondisi tersebut didukung dengan kebijakan perwilayahan yang memberikan peran pengembangan kegiatan perumahan dan sarana pendukungnya serta industri di Kota Bogor sebagai kota satelit dalam konstelasi Jabodetabek.

Di sisi lain kondisi fisik dasar lahan Kota Bogor relatif tidak mempunyai masalah untuk dikembangkan sepenuhnya untuk kegiatan perkotaan. Hanya beberapa daerah yang mempunyai hambatan berupa kondisi topografi lahan yang memiliki kelerengan yang curam sehingga sulit dibangun dan lahan kawasan resapan air potensial yang memerlukan pengaturan dan pengendalian dalam hal pemanfaatannya untuk kegiatan perkotaan.

Perkembangan teknologi dengan penggunaan lahan secara intensif dapat menjadi solusi untuk menampung pertambahan jumlah penduduk tersebut. Namun hal tersebut tidak mempertimbangkan kualitas lingkungan dan ketersediaan prasarana pendukung perkotaan. Oleh karena itu perlu dihitung kemampuan lahan Kota Bogor dalam menampung pertambahan jumlah penduduk dengan memperhitungkan kualitas lingkungan dan prasarananya sehingga penduduk yang tinggal di Kota Bogor memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam melakukan aktifitas di Kota Bogor. Analisis daya dukung lahan dilakukan dengan menggunakan kebutuhan data dan kriteria berdasarkan Peraturan Menteri PU No.20/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik Dan Lingkungan, Ekonomi Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Analisis Daya dukung lahan menitikberatkan pada analisis kondisi fisik wilayah mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dikembangkan pada wilayah tersebut ditinjau dari kondisi fisiknya. Hasil akhirnya berupa Wilayah Kesuaian yang dapat dijadikan acuan dasar untuk penataan Ruang.

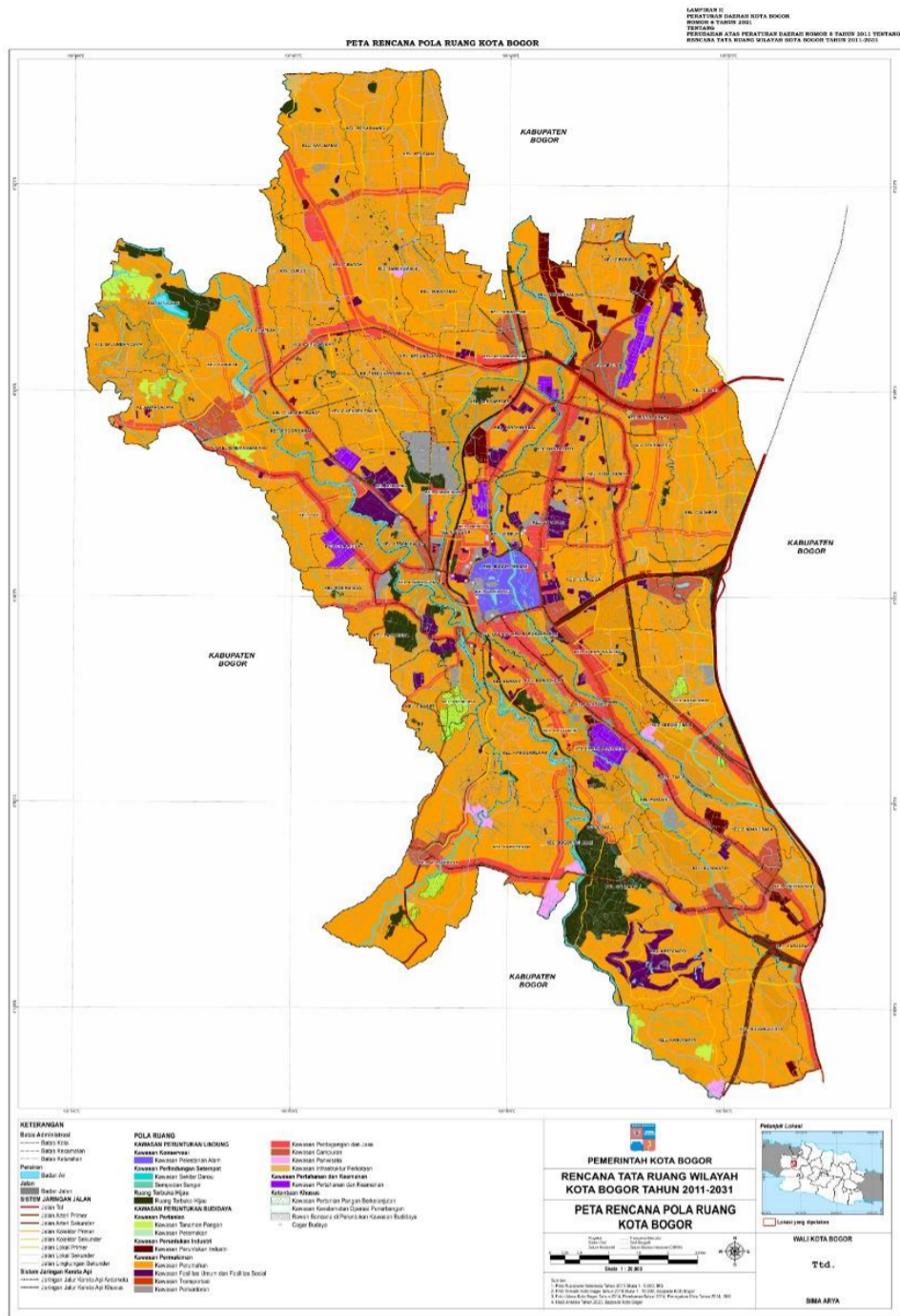
Sebelum mengetahui kemampuan dan kesesuaian lahan dilakukan analisis – analisis seperti analisis satuan kemampuan lahan morfologi, analisis satuan kemampuan lahan lereng, analisis satuan kemampuan lahan pondasi, analisis satuan kemampuan lahan ketersediaan air, analisis satuan kemampuan daerah resapan air, analisis satuan kemampuan lahan untuk drainase analisis satuan kemampuan lahan terhadap erosi, analisis satuan kemampuan lahan pembuangan limbah, dan analisis satuan kemampuan lahan bencana alam. Setelah dilakukan hasil analisis semua satuan kemampuan lahan kembali dianalisis menggunakan analisis superimpose untuk menunjukkan kemampuan lahan di wilayah atau kawasan perencanaan secara keseluruhan. Dari hasil analisis kemampuan lahan, wilayah Kota Bogor cenderung memiliki kemampuan lahan di kelas sedang jika akan dikembangkan sebagai kawasan perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan luasan yang paling besar di setiap WP (A, B, C, D, dan E) sebagaimana disajikan pada tabel 4.27a dan gambar 4.6.

Tabel 4.27a
Kemampuan Lahan Kota Bogor

WILAYAH PELAYANAN	KEMAMPUAN LAHAN					TOTAL
	Tidak Mampu	Kurang Mampu	Sedang	Cukup Mampu	Mampu	
A	310,171	53,571	705,624	501,635	86,699	1657,7
B	301,477	90,547	664,497	318,567	67,312	1442,4
C	280,101	178,419	1418,248	740,658	107,156	2724,58
D	123,493	252,157	1036,901	390,631	12,578	1815,76
E	363,585	223,134	1557,453	1200,540	157,038	3501,75
Total						11142,2

Sumber : Hasil Analisa, 2018

Gambar 4.6
Peta Kemampuan Lahan Kota Bogor



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011-2031

Jika dibandingkan dengan hasil kajian Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2021, secara berurutan dari kecamatan yang mempunyai nilai indeks daya tampung permukiman yang tertinggi sampai terendah adalah : Kec. Tanah Sareal, Kec. Bogor Utara, Kec. Bogor Barat, Kec. Bogor Tengah., Kec. Bogor selatan dan Kec. Bogor Timur, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.27b. Namun terdapat kecamatan yang sudah melampaui ambang batasnya, yaitu Kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Timur yang ditunjukkan dengan nilai indeks daya dukung/tampung permukiman (DDPm) kurang dari 1. Berdasarkan tabel tersebut ambang batas daya tampung penduduk di Kota Bogor sebesar 2.111.892 Jiwa. Hasil kajian tersebut juga menjelaskan

bahwa terdapat 5 kelas kawasan yaitu A dan B untuk kawasan pengembangan, C untuk kawasan penyangga dan D dan E untuk kawasan lindung. Sedangkan jika dilihat dari kemampuan lahan pada tabel 2.47a, WP A dan B pada tingkat sedang merupakan luasan terbesar, hal ini menunjukkan adanya relevansi antara data kemampuan lahan tahun 2018 dengan daya dukung dan daya tampung permukiman tahun 2020 pada tabel 4.27b. Jika dilihat hasil analisis proyeksi penduduk Kota Bogor selama dua puluh tahun kedepan maka Kota Bogor masih mampu menampung penduduk untuk tetap bermukim (DLH, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa arahan pengembangan permukiman perkotaan di Kota Bogor masih relevan untuk dilakukan.

Tabel 4.27b
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2020

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2020	PERMUKIMAN (POTENSIAL)	DDPM	DAYA TAMPUNG PERMUKIMAN	DAYA TAMPUNG (JIWA)
1	Bogor Barat	242.142	1.381	9,51	2,19	531.301
2	Bogor Selatan	205.604	523	4,24	0,98	201.043
3	Bogor Tengah	105.793	333	5,25	1,21	128.260
4	Bogor Timur	104.344	215	3,43	0,79	82.573
5	Bogor Utara	190.946	1.264	11,03	2,55	486.232
6	Tanah Sareal	215.869	1.774	13,7	3,16	682.482
Kota Bogor		1.064.698	5.491	8,6	1,98	2.111.892

Sumber : DLH, 2021

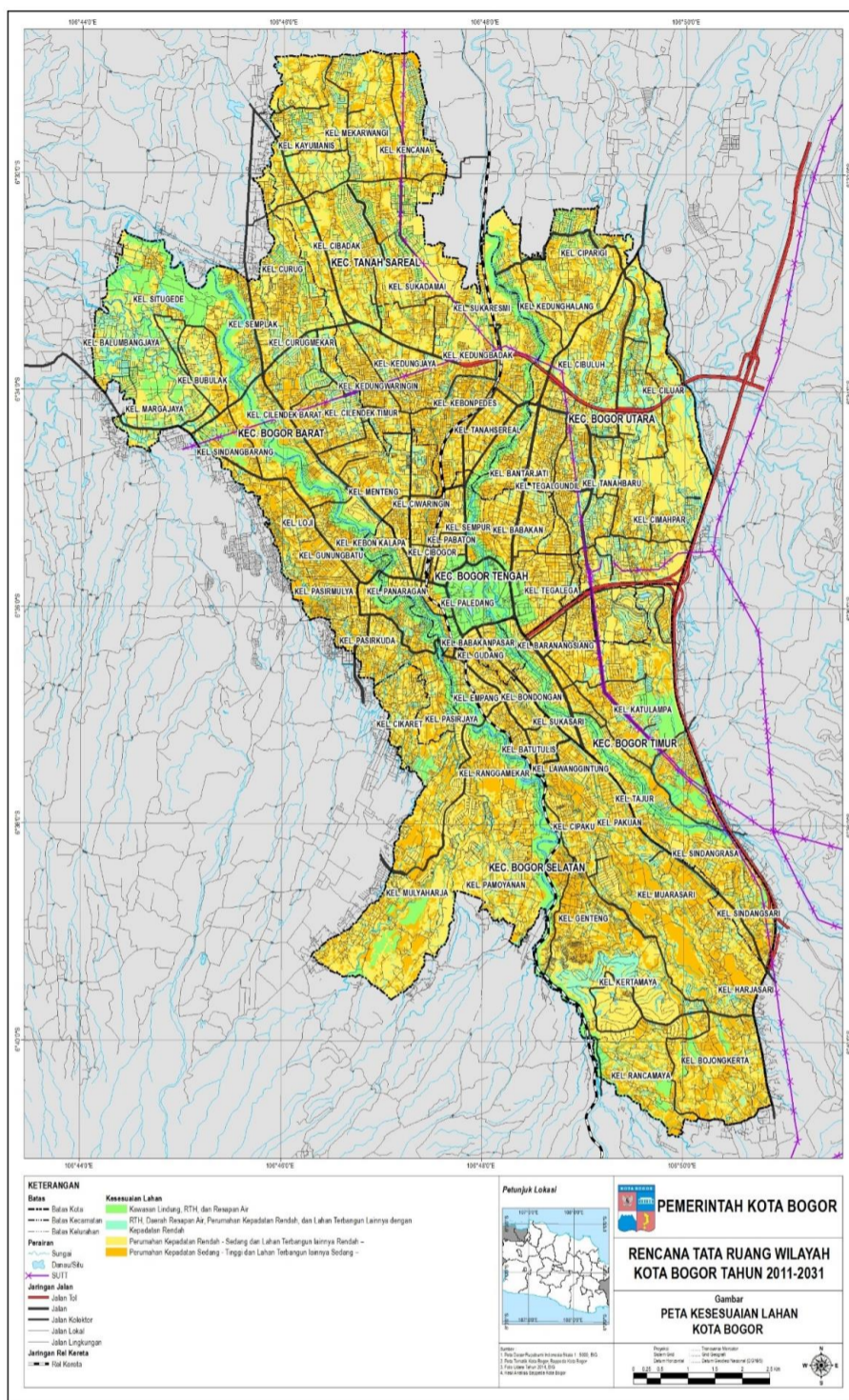
Setelah mendapatkan kemampuan lahan di Kota Bogor, kemudian dapat ditentukan potensi pengembangan wilayah yang memungkinkan untuk dikembangkan di Kota Bogor. Sebagai contoh, saat ini di wilayah pelayanan D dikembangkan sebagai permukiman dan setelah dilakukan analisis didapatkan bahwa wilayah pelayanan D cocok dikembangkan sebagai perumahan kepadatan rendah hingga sedang dan sebagai lahan terbangun lainnya dengan kepadatan rendah hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pelayanan B memiliki potensi kesesuaian lahan sebagai kawasan lindung, ruang terbuka hijau, dan resapan air paling besar diantara wilayah pelayanan lainnya dalam hal kawasan lindung, ruang terbuka hijau, dan resapan air, sebagaimana disajikan pada tabel 4.28a dan gambar 4.7.

Tabel 4.28a
Kesesuaian Lahan Kota Bogor

KESESUAIAN LAHAN	WILAYAH PELAYANAN					TOTAL
	A	B	C	D	E	
Kawasan Lindung, RTH, dan Resapan Air	310,171	301,477	280,101	123,493	363,585	1378,8
RTH, Daerah Resapan Air, Perumahan Kepadatan Rendah, dan Lahan Terbangun Lainnya dengan Kepadatan Rendah	53,571	90,547	178,419	252,157	223,134	797,8
Perumahan Kepadatan Rendah - Sedang dan Lahan Terbangun lainnya Rendah – Sedang	705,624	664,497	1418,25	1036,9	1557,45	5382,7
Perumahan Kepadatan Sedang - Tinggi dan Lahan Terbangun lainnya Sedang – Tinggi	588,335	385,879	847,814	403,209	1357,58	3582,8
Total						11142,2

Sumber : Hasil Analisa, 2018

Gambar 4.7
Peta Kesesuaian Lahan Kota Bogor



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011-2031

Berdasarkan pemetaan data luasan lahan dalam dokumen materi teknis perubahan RTRW tahun 2011, terlihat bahwa potensi penggunaan lahan pada tahun 2010 menunjukkan masih terdapat relevansi dengan hasil analisis kesesuaian penggunaan lahan, baik potensi keberuntukan maupun penggunaan lahan dominan masih untuk perumahan dan permukiman, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.28b

Luas Penggunaan Lahan Kota Bogor Tahun 2016

NO	URAIAN	RENCANA (HA)	PENGGUNAAN (HA)
1	Permukiman dan perumahan	5,400.00	5,023.75
2	Sarana olah raga	141.00	119.34
3	Pemerintahan	145.00	89.96
4	Kawasan militer	94.00	54.62
5	Perdagangan dan jasa	920.00	138.79
6	Industri	200.00	112.08
7	Hutan Kota	103.55	141.13
8	TPU	187.90	137.87
9	Lainnya	4,658.55	6,081.36
	Luas Total	11,850.00	11,898.90

Sumber : Hasil Analisa , 2021

4. Struktur Ruang Kota

Dengan proyeksi jumlah penduduk yang mencapai 1,7 juta jiwa pada tahun 2031 (berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031, maka struktur ruang yang ada saat ini (1 pusat kota yang berkembang secara linear ke pinggiran jalan-jalan utama) dinilai tidak akan mampu untuk menciptakan kota yang aman dan nyaman. Orientasi penduduk yang berjumlah mencapai 1,8 juta ke pusat kota akan menyebabkan permasalahan transportasi seperti kemacetan lalu lintas tidak terhindarkan pada ruas jalan-jalan utama kota yang menuju pusat kota.

Dengan demikian perlu adanya penyesuaian bentuk struktur ruang untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan kota agar terjadi keseimbangan pemanfaatan ruang. Penyesuaian struktur ruang dilakukan dengan mengubah sistem pusat yang dinilai tidak akomodatif lagi jika dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan dan perkembangan kota. Perubahan sistem pusat ini akan didasarkan atas hasil analisis mengenai perkembangan kota dalam 20 tahun serta kebutuhan ruang dan infrastruktur penduduknya.

Sebagai kota metropolitan perlu adanya redistribusi kegiatan dan fasilitas pelayanan ke setiap wilayah kota secara hirarkis serta pengurangan beban pusat kota. Hal ini tentunya perlu ditunjang dengan jaringan jalan yang merata ke seluruh wilayah kota serta penyesuaian hirarki fungsi jalan yang seharusnya. Perubahan sistem pusat tersebut tentunya harus diikuti dengan persiapan kelengkapan fasilitas untuk masing-masing pusat sesuai dengan arahan peran dan tema pengembangan pusat tersebut. Pada pusat-pusat yang direncanakan di wilayah perbatasan, pengadaan faslitasnya perlu memperhatikan keberadaan fasilitas-fasilitas yang ada dan direncanakan di wilayah perbatasan yang termasuk di wilayah

Kabupaten Bogor. Untuk itu diperlukan adanya kerjasama antarwilayah dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas terutama pada wilayah perbatasan.

5. Sistem Transportasi

Aksesibilitas pergerakan yang ada di Kota Bogor belum merata, hal ini disebabkan oleh belum meratanya jangkauan pelayanan dari jaringan jalan yang ada. Sistem jaringan yang ada saat ini masih bertumpu pada pusat kota. Berkumpulnya beban pada pusat kota ini yang kemudian menyebabkan berbagai masalah transportasi. Selain itu, untuk jangka waktu sampai akhir masa perencanaan, pengembangan jaringan transportasi perlu mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk dan kemungkinan kegiatan yang tumbuh di Kota Bogor.

Isu-isu lain adalah adanya pembangunan dan peningkatan jalan (arteri dan kolektor) pada wilayah baru dilakukan mendahului atau sejalan dengan pengembangan kawasan baru. Perlunya pengembangan terminal tipe A yang representatif dengan luas lahan yang memadai sebagai terminal tipe A, sesuai dengan perkembangan Kota Bogor saat ini dan masa datang. Kota Bogor juga dipandang sudah memerlukan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terintegrasi, nyaman dan terjangkau. Angkutan massal ini tidak hanya melayani internal Kota Bogor namun harus pula merupakan bagian dari sistem transportasi massal regional.

Isu yang tak kalah penting, namun sering diabaikan dalam rencana pengembangan transportasi adalah mengakomodasi pengguna jalan pejalan kaki. Dalam perencanaan 20 tahun mendatang, perencanaan yang dilakukan haruslah yang berpihak kepada masyarakat termasuk kepada pejalan kaki tidak hanya untuk mereka yang menggunakan kendaraan bermotor. Saat ini pedestrian di Kota Bogor belum semua ruas jalan dilengkapi dengan pedestrian yang memadai. Prioritas pengembangan pedestrian perlu diarahkan pada pusat-pusat kegiatan baik di pusat kota maupun pusat bagian kota lainnya dan sekitar Kebun Raya.

Isu lain adalah menyangkut moda kereta api. Tingginya frekuensi kereta api serta persimpangan yang masih sebidang antara jalan dan rel kereta api, menyebabkan sering terjadi kemacetan pada persimpangan tersebut. Perlintasan tidak sebidang dalam

perencanaan ke depan harus menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan jaringan kereta api.

6. Ketersediaan Infrastruktur

Isu-isu strategis terkait dengan infrastruktur adalah air minum, air limbah, drainase, persampahan, listrik, telekomunikasi dan gas. Dari beberapa infrastruktur yang disebutkan terdapat kesamaan pada isu mengenai upaya penyediaan infrastruktur yang dapat melayani jumlah penduduk sampai tahun 2029. Penyediaan infrastruktur yang dimaksud juga tidak terlepas dari penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan (*green infrastructure*). Infrastruktur yang berbasis lingkungan adalah infrastruktur yang sistem penyediaan dan pengoperasiannya yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Paradigma penyediaan infrastruktur yang identik dengan penyediaan oleh pemerintah juga harus diubah. Pemerintah daerah yang dalam ini adalah pemerintah kota dapat membuka peluang bagi masuknya pihak-pihak lain yang berminat dalam penyediaan infrastruktur. Ini dilakukan mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Untuk itu rancangan mengenai pola kemitraan penyediaan infrastruktur menjadi penting.

Isu spesifik per infrastruktur meliputi masih kurangnya prasarana air minum (saat ini tingkat pelayanan air bersih baru mencapai 47% dengan pelayanan belum optimal), perlunya optimalisasi dan pengembangan pelayanan IPAL, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui program 3R dan pengolahan sampah berbasis komunitas, pentingnya keterpaduan sistem drainase jalan dan lingkungan perumahan.

Isu mengenai penataan dan pemanfaatan tower bersama telekomunikasi menjadi salah satu isu penting pengembangan infrastruktur dalam konteks semakin berkembangnya telekomunikasi nirkabel. Isu lain adalah mengenai kebutuhan jaringan distribusi gas untuk mendukung program kendaraan berbahan bakar gas. Untuk menciptakan keserasian dalam pemenuhan infrastruktur kota, maka hal yang perlu direncanakan adalah pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan utilitas kota lainnya yaitu sistem terpadu jaringan bersama di bawah tanah (*ducting sistem*).

7. Pola Ruang Kota

Ruang kota yang terbatas tidak hanya menuntut adanya optimasi pemanfaatan lahan tetapi juga menuntut keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk keberlanjutan pengembangan kota dalam jangka panjang. Perkembangan pola ruang eksisting kota secara umum dilihat dari perkembangan pemanfaatan lahan komersial, perumahan, industri dan kawasan lindung. Pemanfaatan lahan komersial di Kota Bogor umumnya terjadi pada jalur-jalur utama kota yang semula memiliki fungsi sebagai perumahan golongan menengah ke atas dengan kapling besar menjadi kegiatan komersial yang tidak berskala pelayanan lingkungan atau lokal, tetapi berskala pelayanan kota atau regional. Contoh yang terjadi adalah di sepanjang Jl. Raya Pajajaran, Jl. Tajur, Jl. Bangbarung Raya dan Jl. Pandu Raya.

Kebijakan mengenai luas lahan minimum yang dapat dikembangkan menjadi lahan perumahan berakibat pada tumbuhnya praktek pemecahan luas lahan menjadi kavling yang siap dibangun. Akibatnya terjadinya pertumbuhan perumahan dengan luas kavling kecil yang minim atau bahkan tidak didukung dengan ketersediaan fasilitas umum dan sosial serta hanya dengan dukungan utilitas yang minim.

Isu-isu mengenai kegiatan industri meliputi perlunya untuk membatasi lokasi penambahan industri dan menata kawasan di sekitar lahan industri yang ada. Hal ini karena faktor kecocokan lahan terhadap prasyarat minimum prasarana pendukung industri seperti jalan yang dapat dilalui kendaraan besar.

Untuk kawasan lindung, terdapat beberapa hal seperti alih fungsi lahan sempadan dan pendangkalan sungai. Alih fungsi lahan sempadan terjadi akibat makin terbatasnya lahan yang ada di perkotaan. Sedangkan jika terdapat ketersediaan lahan dapat dipastikan memiliki nilai lahan yang tinggi. Pendangkalan sungai timbul dari adanya tingkat erosi yang tinggi sebagai akibat dari tidak berfungsinya kawasan Konservasi di wilayah Bogor Selatan. Lumpur dan tanah akibat erosi mengalir ke sungai Cisadane dan Ciliwung dan pada akhirnya sungai ini menjadi dangkal dan dapat menimbulkan banjir. Khusus berkaitan dengan kawasan lindung setempat muncul persoalan kurangnya ruang terbuka hijau, hutan kota, taman kota, taman bermain, ruang olahraga, dan lain-lain.

Optimasi penggunaan lahan dalam konteks Kota Bogor adalah dengan melakukan pembangunan yang berbasis pada peningkatan

manfaat lahan melalui konsep pengembangan vertikal. Pengembangan secara vertikal dilakukan terutama pada kawasan pusat kota dengan kondisi tingginya harga lahan dan terbatasnya luas sediaan lahan. Keseimbangan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya diwujudkan dalam pengembangan yang melindungi kawasan-kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan yang memiliki fungsi lindung, baik sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, kawasan lindung geologi maupun kawasan lindung lainnya, seperti kawasan perlindungan plasma nutfah.

8. Ruang Publik

Yang dimaksud dengan ruang publik dalam tata guna lahan atau pemanfaatan ruang wilayah/area perkotaan adalah ruang terbuka (*open space*) yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga kota secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan publik dari pemerintah kota yang bersangkutan demi keberlangsungan beberapa aktivitas sosial (rekreasi, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan) seluruh warganya. Sedangkan wujud dari ruang terbuka (*open space*) adalah berupa lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau dengan jarak bangunan yang saling berjauhan, ruang terbuka ini dapat berupa pertamanan, tempat olah raga, tempat bermain anak-anak, pekuburan dan daerah hijau pada umumnya. Daerah hijau pada umumnya meliputi median jalan, sempadan jalan, sungai, pantai, jalur Kereta Api atau area di bawah SUTET. Demi untuk menjamin kepentingan sosial bagi semua golongan/strata warga kotanya maka semestinya semua ruang publik tersebut adalah milik Pemerintah Kota.

4.2.5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKITAR MELALUI PENELAAHAN TERHADAP RPJMD DAERAH LAINNYA

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kabupaten Bogor adalah satu-satunya daerah perbatasan yang melingkupi wilayah Kota Bogor. Dalam Rancangan Akhir

RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, ada beberapa isu strategis yang ditetapkan dalam dokumen tersebut antara lain adalah:

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Peningkatan pelayanan pendidikan.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan.
4. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan daya saing dan produktivitas perekonomian daerah.
6. Peningkatan investasi daerah.
7. Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah.
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
9. Pengelolaan kebencanaan.
10. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
11. pengelolaan dan pelestarian budaya daerah.
12. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
13. Peningkatan pelayanan publik.

Kerjasama Kabupaten Bogor – Kota Bogor menjadi salah satu isu strategis yang dapat dipertimbangkan dalam RPJMD Kabupaten Bogor dan RPJMD Kota Bogor, sehingga perencanaan jangka menengah Kabupaten-Kota Bogor dapat secara sinergis dirumuskan dalam rangka penanganan permasalahan-permasalahan baik sosial, ekonomi maupun pengembangan infrastruktur wilayah terutama di wilayah-wilayah perbatasan.

4.2.6 PENELAAHAN TERHADAP ISU STRATEGIS KLHS RPJMD PERUBAHAN KOTA BOGOR 2019-2024

Perumusan terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Bogor merupakan salah satu tahapan penting dalam kajian KLHS. Perumusan tersebut dilakukan dengan cara menggali dan mengkaji data-data sekunder yang ada seperti dokumen KLHS RTRW, Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dan berdasarkan pada identifikasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta dokumen kajian-kajian lainnya. Selain itu dengan menggali informasi data primer yang dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi, lokakarya, dan FGD dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi terhadap kondisi Kota Bogor, baik atas nama individu maupun lembaga.

Rumusan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan merupakan hasil identifikasi dari capaian TPB dalam kelompok yang belum mencapai target (SB), memiliki data tetapi belum menjadi target dalam RPJMD (TT) dan yang belum memiliki data (NA). Selain ketiga kelompok hasil capaian TPB, isu strategis juga dikaitkan dengan kondisi dan perubahan 6 muatan lingkungan hidup dalam PP 46 Tahun 2016 tentang KLHS yang meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, risiko lingkungan hidup, sumber daya alam, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dan kemampuan penyediaan lingkungan hidup.

Secara umum hasil identifikasi terhadap capaian TPB Kota Bogor untuk masing-masing kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Indikator yang telah ada dalam RPJMD tetapi belum mencapai target adalah mendorong pencapaian indikator tersebut agar dapat mencapai target nasional.
2. Indikator yang memiliki data tetapi belum ada dalam target RPJMD dan belum mencapai target nasional.
3. Indikator yang belum memiliki data dan ada target yang ditetapkan secara nasional.

Sedangkan untuk indikator TPB yang telah ada dalam RPJMD dan telah mencapai target maka perlu untuk tetap dipertahankan kinerja agar tidak turun. Berdasarkan analisis terhadap masing-masing capaian TPB dan kondisi lingkungan hidup Kota Bogor, berikut adalah rumusan isu strategis berdasarkan capaian TPB yang dibagi dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan.

A. IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PILAR SOSIAL

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan; tujuan 2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; tujuan 4 menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat; dan tujuan 5 mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan

kaum perempuan. Dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup, maka yang termasuk dalam pilar ini antara lain kondisi daya dukung pangan yang terkait dengan lahan kawasan pertanian serta tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim.

Total indikator pilar sosial adalah 91. Persentase indikator pilar sosial yang telah mencapai target sebesar 65,93%, indikator yang belum mencapai target sebesar 21,98%, dan 12,09% indikator yang tidak ada data. Isu strategis dari indikator TPB yang belum mencapai target disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.29
Rumusan Isu PB Strategis Berdasarkan Pilar Sosial

TPB PILAR SOSIAL	ISU STRATEGIS DARI INDIKATOR TPB YANG BELUM MENCAPAI TARGET
Tujuan 1 mementaskan segala bentuk kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Prosentase Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tinggi 2) pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin melalui program JKN belum optimal; 3) Penanganan kawasan permukiman kumuh
Tujuan 2 menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan 2) Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
Tujuan 4 menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	<ol style="list-style-type: none"> 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);. 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat. 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.
Tujuan 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>) 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat.

Sumber: Hasil Analisa, 2020

B. IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PILAR EKONOMI

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan 8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif

dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; tujuan 9 membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi; tujuan 10 mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; dan tujuan 17 menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Total indikator pilar ekonomi adalah 51. Persentase indikator pilar ekonomi yang telah mencapai target sebesar 60,78%, indikator yang belum mencapai target sebesar 21,57%, dan 17,65% indikator yang tidak ada data. Isu strategis dari indikator TPB yang belum mencapai target disajikan pada tabel 4.30.

Tabel 4.30
Rumusan Isu Strategis TPB Pilar Ekonomi di Kota Bogor

TPB PILAR EKONOMI	ISU STRATEGIS DARI INDIKATOR TPB YANG BELUM MENCAPAI TARGET
Tujuan 8 mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua	Jumlah wisatawan mancanegara (jumlah kunjungan wisata)
Tujuan 9 membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur (industri Pengolahan) terhadap PDB dan perkapita
Tujuan 10 mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara	1) Indeks koefisien gini masih tinggi 2) Tingkat kemiskinan masih tinggi

Sumber: Hasil Analisa, 2020

C. IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PILAR LINGKUNGAN

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan 6 menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; tujuan 11 membangun kota dan permukiman yang inklusif aman, tangguh dan berkelanjutan; tujuan 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; tujuan 13 mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya dan tujuan 15 pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan.

Total indikator pilar lingkungan adalah 45. Persentase indikator pilar lingkungan yang telah mencapai target sebesar 71,11%, indikator yang belum mencapai target sebesar 15,56%, dan

13,33% indikator yang tidak ada data. Isu strategis dari indikator TPB yang belum mencapai target disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.31
Rumusan Isu PB Strategis Berdasarkan Pilar Lingkungan

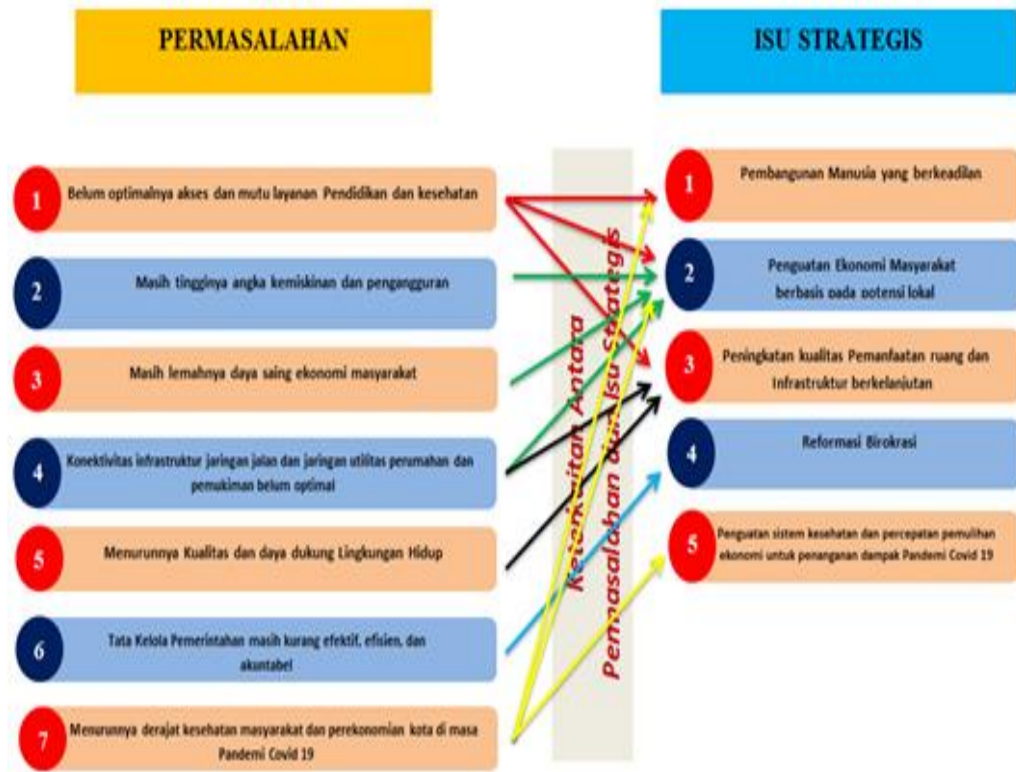
TPB PILAR LINGKUNGAN	ISU STRATEGIS DARI INDIKATOR TPB YANG BELUM MENCAPAI TARGET
Tujuan 6 menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 2) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
Tujuan 11 membangun kota dan permukiman yang inklusif aman, tangguh dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak. 2) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau 3) Persentase sampah perkotaan yang tertangani 4) Persentase pelayanan/persentase volume sampah terangkut ke TPA 5) Persentase volume sampah yang diolah di TPA (%)

Sumber: Hasil Analisa, 2020

4.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA BOGOR 2020-2024

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Identifikasi permasalahan dan isu strategis yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat 5 isu strategis jangka menengah Kota Bogor tahun 2019-2024 yang saling bersinergi, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.8. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya, yang mana skema keterkaitan antar isu tersebut dapat dilihat pada gambar 4.9. Karena itu upaya-upaya penanganan isu tersebut akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi.

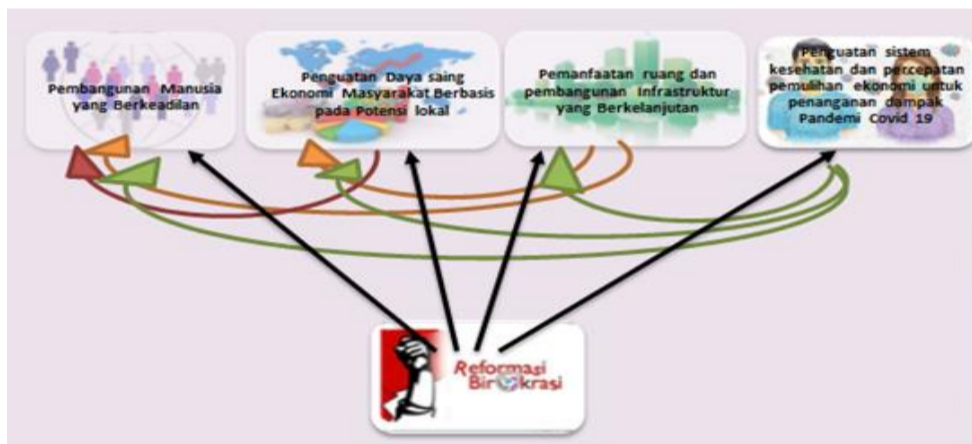
Gambar 4.8
Sinergitas Antara Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024



Sumber : Hasil Analisa, 2021

Isu-isu dalam skema keterkaitan, dapat dilihat pada diagram berikut ini.

Gambar 4.9
Keterkaitan Antar Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024

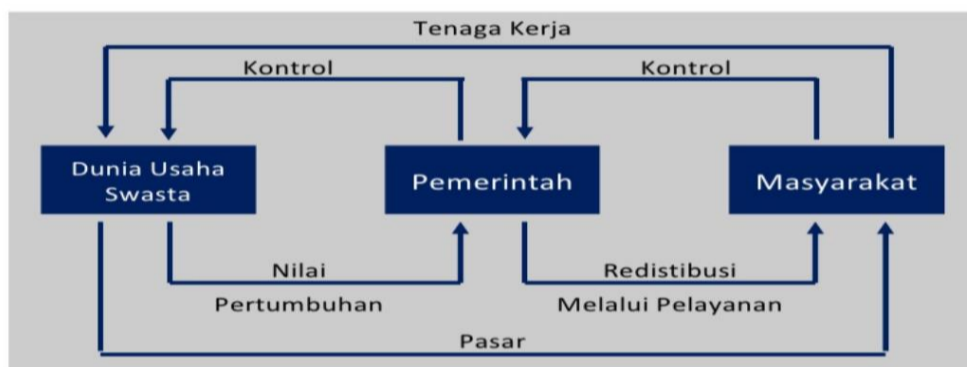


Sumber : Hasil Analisa, 2021

Lebih lanjut, pembangunan daerah dilaksanakan mengarah pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dimana hanya dapat dilakukan apabila ada keseimbangan peran dari 3 (tiga) pilar yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah berperan menjalankan dan menciptakan arah kebijakan dan regulasi yang mendorong berkembangnya unsur-unsur lainnya, sedangkan dunia usaha berperan menciptakan lapangan kerja dan peningkatan

pendapatan masyarakat. Sementara masyarakat sendiri mengambil peran dalam menciptakan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Melihat interaksi 3 (tiga) pilar tersebut diatas, oleh karenanya reformasi birokrasi menjadi isu strategis yang sangat fundamental untuk mendorong penyelesaian isu-isu strategis lainnya, sebagaimana disajikan pada gambar 4.10.

Gambar 4.10
Interaksi Pemerintah, Dunia Usaha, Dan Masyarakat dalam Pembangunan Kota Bogor



Sumber : Hasil Analisa, 2019

Secara umum dari 5 (lima) isu strategis sebagaimana dimaksud diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

A. ISU STRATEGIS 1: PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKEADILAN

Untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan, terdapat 7 aspek yang menjadi isu strategis kota Bogor yaitu:

- a. pemerataan akses dan kualitas pelayanan pendidikan;
- b. peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan;
- c. perluasan kesempatan kerja;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengarusutamaan gender;
- f. Perlindungan sosial masyarakat; dan
- g. Ketahanan Keluarga.

Pemenuhan standar dan mutu pelayanan dasar di bidang pendidikan sangat menentukan kualitas SDM suatu daerah. Modal utama dalam pembangunan adalah SDM. Oleh karena itu, kualitas dari SDM sendiri harus terus ditingkatkan agar mampu menciptakan daya saing yang tinggi, yang dapat diukur dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan agar seluruh masyarakat Kota Bogor memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas sehingga mempunyai peluang yang besar menuju pada akses pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Tantangan lainnya yaitu menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antar wilayah, dan antar gender.

Dengan adanya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, maka menambah tantangan di dunia pendidikan. Pendidikan tidak dapat diselenggarakan sebagai mana mestinya, mengingat adanya protokol kesehatan pendidikan dilaksanakan secara pembelajaran jarak jauh. Kondisi ini menyebabkan pemerataan sarana prasarana pembelajaran jarak jauh harus merata, dan perlu adanya reformulasi sistem pendidikan dimasa pandemi dan masa adaptasi kebiasaan baru, yang meliputi kurikulum dan bahan ajar, metode pembelajaran, kapasitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, serta aspek sosial dan budaya.

Pelayanan kesehatan diprioritaskan untuk menurunkan disparitas akses dan mutu layanan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta tenaga kesehatan dasar dan rujukan. Selain itu, tantangan utamanya adalah meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menyiapkan provider dan pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional. Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan. Apabila merujuk pada arah pembangunan sektor kesehatan tahun 2020-2024 yang tertuang dalam RPJPD Kota Bogor tahun 2020-2024, dalam kurun waktu tahun 2020-2024 diharapkan tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor dengan target pencapaian AHH 79,5 tahun. Kondisi tersebut dapat diupayakan melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus terhadap ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin.

Melihat kondisi tahun 2017, AHH Kota Bogor baru mencapai 73,01 tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun hanya berkisar 0,07 tahun, maka untuk mencapai target AHH tahun 2024 di angka 79,5 tahun memang diperlukan upaya-upaya yang lebih optimal melalui program-program di sektor kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Memasuki awal tahun 2020, kondisi kesehatan Kota Bogor mulai dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Pembangunan bidang kesehatan tidak bisa lagi dilakukan dengan pola pelayanan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, baik di aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Di keempat aspek tersebut perlu dilakukan penanganan pandemi Covid-19. Perlu redesign sistem kesehatan, mulai dari penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*), penguatan di pembiayaan kesehatan, kefarmasain, kesehatan rujukan dan sumberdaya kesehatan. Selaian itu status gizi masyarakat menjadi hal yang rawan dimasa pandemi, yang dikhawatirkan dengan kurangnya gizi pada bayi dan balita menimbulkan resiko peningkatan stunting di Kota Bogor.

Terbatasnya lapangan kerja, keterampilan, dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya merupakan beberapa faktor yang menyebabkan jumlah pengangguran terus meningkat di Kota Bogor. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil survey BPS yang telah dipublikasi per Agustus 2017, dilihat dari tingkat pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka dikelompokkan berdasarkan kelompok jenjang pendidikan. TPT untuk kelompok penduduk dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain dan diikuti dengan TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA sementara mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Hal ini dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan.

Berdasarkan hasil survey dan publikasi BPS dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, TPT Kota Bogor terbilang sangat tinggi dan melebihi TPT nasional dan TPT Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2017, TPT nasional adalah sebesar 5,5 sementara TPT Provinsi

Jawa Barat sebesar 8,22 persen sedangkan TPT Kota Bogor sebesar 9,57 yang berarti dari 100 angkatan kerja di Kota Bogor masih terdapat sekitar 9 hingga 10 orang pengangguran. Walaupun demikian, TPT Kota Bogor sudah dapat ditekan dari angka tahun sebelumnya pada tahun 2015 yaitu berkisar 11,08 menjadi 9,57. Namun demikian dengan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan di tahun 2020 TPT Kota Bogor naik sekitar 3,5% dari tahun 2019 sehingga menjadi 12,68%. Sehingga tantangan kedepan adalah menciptakan peluang penciptaan lapangan kerja dan penyaluran serta fasilitasi para pencari kerja.

Pola pertumbuhan inklusif harus diciptakan di Kota Bogor untuk memaksimalkan potensi ekonomi dengan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik dan ramah keluarga miskin akan dapat mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Upaya lain untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan pekerjaan baru menjadi salah satu sarana untuk menurunkan tingkat pengangguran di Kota Bogor, mengingat sangat terbatasnya kesempatan kerja di sektor-sektor industri pengolahan maupun sektor jasa lainnya. Salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor ekonomi kreatif untuk bisa memiliki daya saing yang kuat dan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Produktivitas tenaga kerja Kota Bogor yang masih rendah juga menjadi salah satu aspek yang berpotensi memicu peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bogor. Produktivitas tenaga kerja yang rendah menjadi salah satu pemicu terjadinya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan perusahaan yang membutuhkan produktivitas tenaga kerja yang sangat tinggi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. Sikap kerja, seperti kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (*shift work*), dapat menerima tambahan tugas, bekerja dalam suatu tim, kesediaan ditempatkan di luar kota tempat asal, dan sebagainya.
- b. Tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan latihan dalam manajemen *supervise* serta keterampilan dalam tehnik industri.

- c. Hubungan tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin dalam usaha bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan mutu (*Quality control circles*).
- d. Manajemen produktivitas, yaitu: manajemen yang efisien mengenai sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas.
- e. Efisiensi tenaga kerja, seperti: perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas.
- f. Kewiraswastaan, yang tercermin dalam pengambilan risiko, kreativitas dalam berusaha, dan berada dalam jalur yang benar dalam berusaha.

Perlindungan sosial terhadap pekerja informal juga harus ditingkatkan. Terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 berpotensi adanya pergeseran struktur tenaga kerja, potensi pergeseran tenaga kerja formal ke tenaga kerja informal sangat mungkin banyak terjadi, sehingga perhatian dan penanganan pada Pekerja non formal menjadi tantangan tersendiri. Disatu sisi tenaga non formal berpotensi membangkitkan ekonomi, namun bukan berarti tidak meninggalkan potensi permasalahan. Keberadaan tenaga kerja informal tetap diperlukan untuk menopang perekonomian Kota Bogor dan menjadi *safety valve* dalam membendung peningkatan jumlah pengangguran. Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan penduduk kondisi rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk seperti itu biasanya memiliki kesempatan yang sangat terbatas dalam sektor pekerjaan formal dan tidak memiliki sumber pekerjaan alternatif lain untuk menunjang ekonomi keluarga. Peluang kerja yang dapat diperoleh kelompok penduduk tersebut masih kurang memenuhi standar hidup yang layak dan berkesinambungan. Diperlukan keterpaduan berbagai instansi sosial untuk mendukung penduduk yang kurang mampu agar dapat mengelola berbagai resiko, pembukaan kesempatan dan lingkungan yang inklusif agar penduduk yang kurang mampu memperoleh penghidupan yang layak dan jaminan sosial yang memadai.

B. ISU STRATEGIS 2: PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PADA POTENSI LOKAL

Isu strategis berkaitan dengan Penguatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis pada potensi lokal mempunyai 3 aspek yakni:

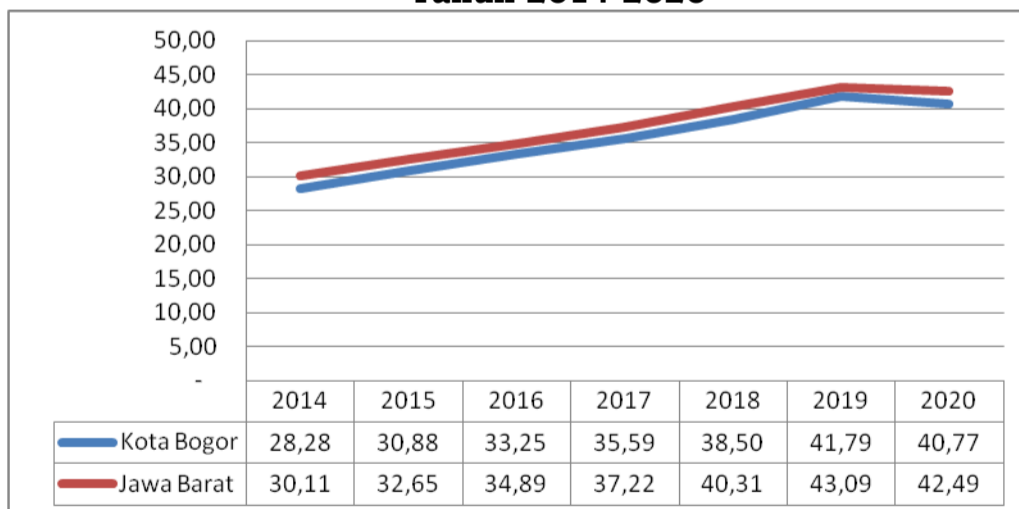
1. Pemerataan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari menurunnya ketimpangan sosial dan ekonomi (Indeks Gini Rasio).
2. Penurunan angka kemiskinan.
3. Penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, sektor ekonomi kreatif, industri dan perdagangan, serta pariwisata berbasis pada potensi lokal.

Adapun penjelasan dari 3 aspek di atas sebagai berikut.

1. Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Identik dengan Provinsi Jawa Barat, akibat adanya pandemi Covid-19, pada tahun 2020 PDRB per kapita penduduk mengalami penurunan, PDRB Kota Bogor per kapita tahun 2020 adalah 40,77 juta rupiah, atau turun sebesar 2,44 persen.

Grafik 4.5
PDRB Per Kapita Kota Bogor Dan Propinsi Jawa Barat
Tahun 2014-2020



Sumber: BPS, 2021

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB Per Kapita, tetapi harus dievaluasi juga apakah tingkat sejahteraan tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dari hasil evaluasi terhadap indikator makro ekonomi

Kota Bogor, ternyata kesenjangan sosial diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Bogor yang masih cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal, sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik.

Tabel 4.32
Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, 2020

KELOMPOK KOMODITAS MAKANAN	KELOMPOK PENGELUARAN		
	40 PERSEN TERBAWAH	40 PERSEN TENGAH	20 PERSEN TERATAS
1. Padi-padian	52.889	63.534	78.637
2. Umbi-umbian	3.668	7.405	15.646
3. Ikan/udang/cumi/kerang	24.562	48.190	85.368
4. Daging	24.073	43.097	101.257
5. Telur dan susu	29.938	53.740	78.388
6. Sayur-sayuran	32.522	54.370	78.388
7. Kacang-kacangan	8.941	14.609	25.448
8. Buah-buahan	14.459	33.097	95.572
9. Minyak dan kelapa	10.781	15.009	20.836
10. Bahan minuman	14.448	20.846	25.725
11. Bumbu-bumbuan	8.806	12.886	22.644
12. Konsumsi lainnya	10.003	17.671	20.253
13. Makanan dan minuman jadi	137.800	256.720	505.496
14. Rokok dan tembakau	62.347	113.288	76.774
Jumlah Makanan	435.237	754.467	1.241.866
15. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	161.367	406.541	1.255.556
16. Aneka barang dan jasa	69.741	185.002	959.150
17. Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	15.940	41.778	130.244
18. Barang tahan lama	5.902	57.111	316.013
19. Pajak, pungutan, dan asuransi	18.348	46.494	215.835
20. Keperluan pesta dan upacara/kenduri	1.478	16.432	63.986
Jumlah Bukan Makanan	272.776	753.357	2.940.783
Jumlah	708.012	1.507.825	4.182.649

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Sosial, 2020

Apabila dilihat dari tabel di atas, kesenjangan antara pengeluaran perkapita penduduk di kuintil 5 dengan penduduk di kuintil 1 dan 2 masih sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang cukup serius di Kota Bogor. Hal ini juga dapat dibuktikan dari indeks Gini Rasio Kota Bogor masih sangat sulit diturunkan, yaitu masih berkisar di angka 0,41.

Kondisi sebagaimana dijelaskan diatas sangat disebabkan karena ketidak berdayaan atau ketidakmampuan (*powerlessness*) masyarakat miskin dalam hal:

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*);
2. Melakukan kegiatan yang produktif (cenderung melakukan kegiatan *unproductiveness*);
3. Menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi (*inaccessability*);
4. Menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif;
5. Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin

Pada saat ini pemerataan kesejahteraan masih terus diupayakan, hal ini mengingat di Kota Bogor ketimpangan distribusi pendapatan masih tinggi, angka gini rasio masih cukup tinggi sekitar 0.41, hal ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 mulai awal tahun 2020 yang menyebabkan aktivitas ekonomi menurun, dampaknya daya beli dan pendapatan masyarakat menurun, sehingga semakin memperlebar ketimpangan pendapatan.

2. Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain:

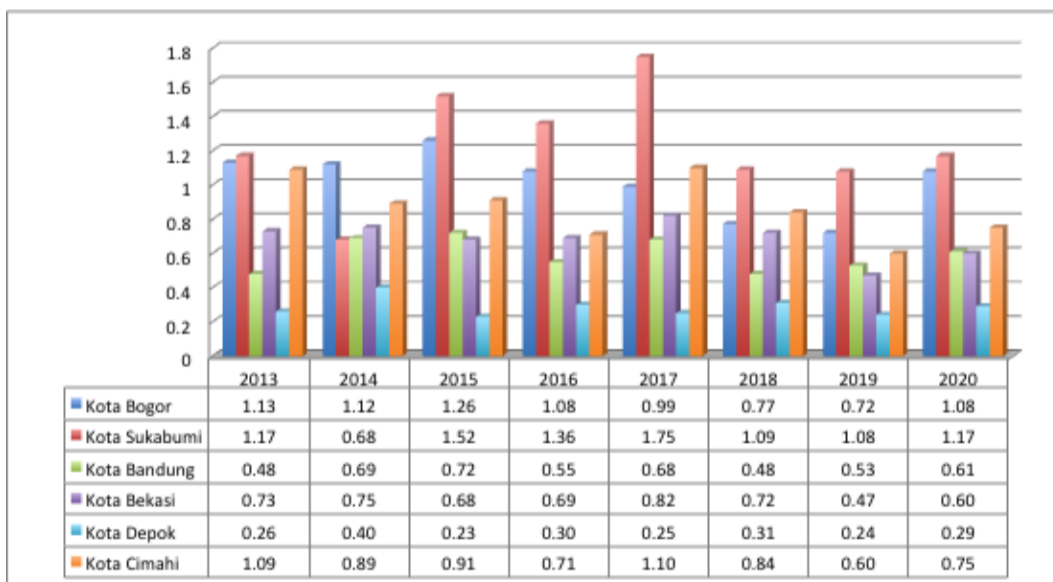
- a. Angka Kemiskinan
- b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks kedalaman kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari nilai agregat dari *poverty gap index* adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana

pengentasan kemiskinan bagi target sasaran bantuan dan program.

- c. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
- d. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Berdasarkan publikasi dari BPS, berikut adalah gambaran indikator-indikator kemiskinan yang ada di Kota Bogor dapat digambarkan dari grafik-grafik berikut ini:

Grafik 4.6
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota-Kota di Jawa Barat, 2013-2020

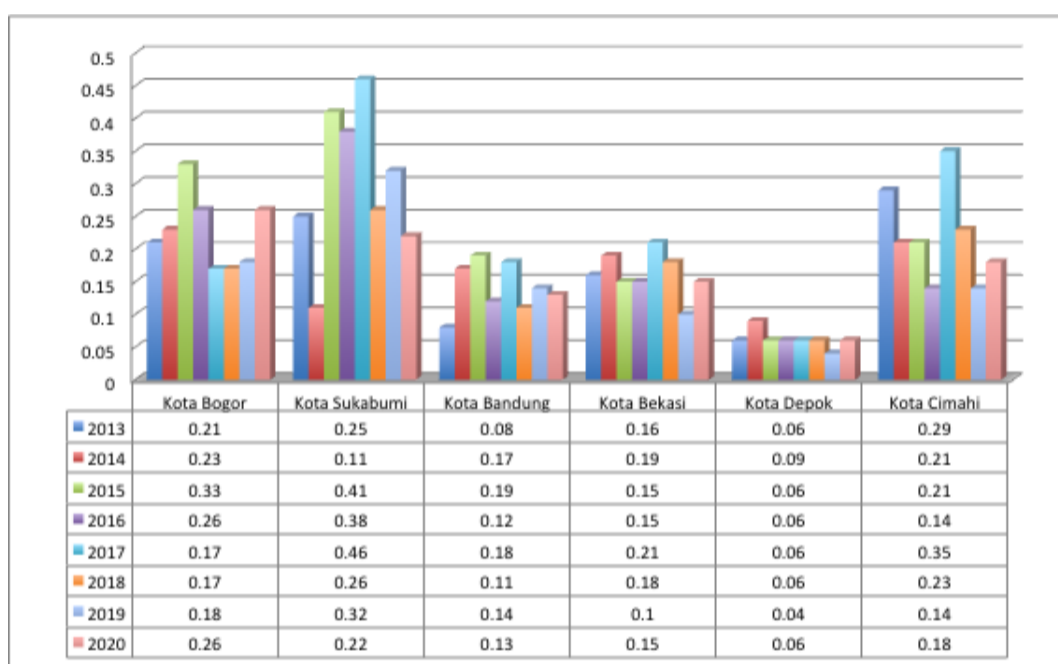


Sumber : BPS, 2020

Grafik diatas menggambarkan bahwa setiap tahunnya Kota Bogor telah berhasil menurunkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Mulai tahun 2017 angka kesenjangan tersebut sudah mencapai indeks dibawah satu yaitu di angka 0,99. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata

pengeluaran penduduk miskin Kota Bogor cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Hal ini berimplikasi pada besaran pembiayaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor. Lain halnya dengan kondisi kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin di Kota Depok, Kota Bandung dan Kota Bekasi, walaupun angka kesenjangan sudah berada dibawah 1 namun setiap tahun mengalami fluktuasi nilai indeks.

Grafik 4.7
Indeks Keparahan Kemiskinan Kota-Kota di Jawa Barat, 2013-2020



Sumber : BPS, 2020

Rata-Rata Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2013-2020 memang lebih tinggi dibandingkan Kota Bandung, Kota Depok dan Kota Bekasi. Namun demikian kecenderungannya sejak tahun 2016 sebagaimana disajikan pada grafik 4.7 cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap kemiskinan di Kota Bogor menurun.

Adanya pandemi Covid-19, menyebabkan aktivitas ekonomi keluarga dan pendapatan keluarga terganggu bahkan menurun dari kondisi biasanya, hal ini berpotensi bagi warga yang rentan miskin (berada sedikit diatas garis kemiskinan) akan menjadi miskin. Peningkatan kemiskinan ini dapat dilihat dari kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2020. Perlu penanganan di sisi pendapatan dengan berupaya mempertahankan pendapatan atau membuka peluang

usaha/peluang kerja, sementara disisi pengeluaran perlu dilakukan meminimalisir pengeluaran dengan cara adanya subsidi, perlindungan sosial, dan *conditional cash transfer*.

3. Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sudah menjadi keniscayaan bahwa produk-produk yang dihasilkan dari UMKM dan IKM harus mampu berdaya saing dengan produk-produk dari luar negeri. Secara spesifik, beberapa hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah:

a. Produktivitas

Produktivitas merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan suatu UMKM dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Tingkat produktivitas yang dicapai UMKM merupakan indikator seberapa efisien UMKM tersebut dalam mengkombinasikan sumber daya ekonominya saat ini. Anis et.al (2007) menyatakan bahwa “Usaha peningkatan produktivitas harus direncanakan secara baik dan sistematis sehingga berhasil apabila diaplikasikan kedalam suatu perusahaan. Tahap pengukuran, evaluasi, perencanaan dan perbaikan harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing perusahaan.” Selanjutnya menurut Anis et.al pada umumnya terdapat 5 strategi yang dapat digunakan dalam menyusun usaha perbaikan produktivitas UKM, yaitu:

1. Meningkatkan input dan output, dimana perubahan/peningkatan output lebih besar daripada input.
2. Menurunkan input dan output, dimana perubahan/penurunan input lebih besar daripada output.
3. Input tetap, output meningkat.
4. Input turun, output tetap.
5. Input turun, output meningkat.

Apabila usaha perbaikan produktivitas telah dilakukan, maka manfaat peningkatan produktivitas yang dapat diperoleh UKM yaitu:

1. Peningkatan keuntungan bagi UKM.
2. Peningkatan kualitas produk.
3. Peningkatan upah kepada buruh.
4. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan perbaikan tingkat pendidikan dan keahlian manajerial.

b. Inovasi

Tidak terhindarkan lagi bagi suatu daerah yang ingin maju dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing selalu bertumpu kepada iptek sebagai penggerak pembangunan, berarti kata “inovasi” selalu menjadi tema utama dalam setiap pengambilan kebijakan disektor ekonomi. Inovasi menjadi semakin menentukan dalam pembangunan menuju kemandirian daerah yang berdaya saing tinggi, terutama ketika menghadapi era keterbukaan dan kebebasan perdagangan dalam kawasan tanpa batas. Pada situasi ini, usaha kecil dituntut meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melakukan inovasi produk melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Untuk itu usaha kecil harus mengenal jauh lebih dekat konsumennya sehingga mereka betul betul dapat mengetahui kebutuhan pasar dan dapat menyediakan kebutuhan tersebut melalui inovasi dan keratifitasnya.

c. Iklim Usaha yang Kondusif

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah tingkat kesulitan mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal lainnya adalah seringkali kebijakan perekonomian pemerintah dinilai belum secara maksimal memihak kepentingan usaha kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

d. Akses permodalan (*Access to Finance*)

Masalah mendasar usaha kecil yang paling menonjol menyangkut menyediakan pembiayaan usaha alias modal usaha. Kebutuhan modal sangat terasa pada saat seseorang ingin memulai usaha baru. Alhasil, biasanya bila motivasinya kuat, seseorang akan tetap memulai usaha kecil tetapi dengan modal seadanya.

Pada usaha yang sudah berjalan, modal tetap menjadi kendala lanjutan untuk berkembang. Masalah yang menghadang usaha kecil menyangkut kemampuan akses pembiayaan, akses pasar dan pemasaran, tata kelola manajemen usaha kecil serta akses informasi. Kesulitan usaha kecil mengakses sumber-sumber modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut. Padahal pilihan sumber modal sangat banyak dan beragam.

Lembaga keuangan bank adalah sumber modal terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil. Namun untuk bermitra dengan bank, usaha kecil dituntut menyajikan proposal usaha yang feasible atau layak usaha dan menguntungkan. Disamping itu lembaga keuangan bank mensyaratkan usaha kecil harus *bankable* alias dapat memenuhi ketentuan bank. Permasalahan yang muncul akibat bank berlaku *prudent* atau hati-hati, maka makin mempersulit usaha kecil untuk mengakses sumber modal. Usaha kecil yang sulit mengakses bank akan mencari jalan pintas. Kemana lagi kalau bukan kepada para pelempar uang alias rentenir tetapi usaha kecil harus rela dengan biaya uang yang mencekik.

Ada anggapan keliru bahwa seolah-olah, usaha kecil tidak mempermasalahkan biaya bunga yang tinggi dari rentenir. Mereka terpaksa memakai uang rentenir karena terpaksa akibat sulit mengakses modal dari bank. Usaha kecil yang berhasil menembus kendala akses modal, pasar dan informasi. Kendala beralih pada yang lebih *advance*. Seperti pengembangan produk, pengembangan pasar, melakukan ekspor, hingga mempertahankan kualitas produk dan kuantitas produksi.

e. Kemampuan Penetrasi Pasar

Selanjutnya produktivitas UKM melalui pemberian kredit untuk investasi dan modal kerja akan menjadi sia-sia bila produk yang dihasilkan tidak dipasarkan dengan benar, meskipun produk tersebut memiliki nilai jual dan kualitas yang tinggi. Usaha kecil pada umumnya mempunyai permasalahan terkait lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, karena pada umumnya usaha kecil merupakan unit usaha keluarga, produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

Pemasaran (marketing) adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Ada empat komponen pemasaran yaitu:

4. *Product* (produk)
5. *Price* (harga)

6. *Place* (tempat, termasuk juga distribusi)
7. *Promotion* (promosi)

f. Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mempunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensi untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

g. Sarana Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

4. Produktivitas Usaha Ekonomi Kreatif Masih Rendah

Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide, pengetahuan skill dan talenta, daripada sumber daya tenaga. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Sehingga diperlukan pengetahuan tentang potensi diri dan lingkungan budaya setempat, dari warga masyarakat masing-masing sebagai sumber hidup dan tempat tinggalnya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.11 berikut ini.

Gambar 4.11
Pilar-Pilar Pendukung Produktivitas Ekonomi Kreatif



Sebagaimana ditunjukkan pada grafik 4.8 bahwa untuk mendorong produktivitas ekonomi kreatif di Kota Bogor, ada beberapa permasalahan yang perlu dibenahi yaitu :

1. Belum sinergisnya peran pemerintah, pelaku usaha dan aktor intelektual dalam menumbuhkembangkan lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif
2. Manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih lemah.
3. Permasalahan lainnya adalah permodalan dan pemasaran produk, Sumber Daya Manusia (SDM), bahan baku, infrastruktur dan teknologi.

Grafik 4.8
Permasalahan Utama Yang Mempengaruhi Daya Saing
Ekonomi Kreatif



Sumber : Bank dunia 2014

5. Potensi dan Daya Saing Wilayah

Investasi adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk itu maka sangat penting membangun iklim investasi yang ramah bagi investor (*business friendly*), karena dengan demikian akan mampu menarik investor-investor dalam dan luar negeri untuk masuk ke suatu daerah yang secara tidak langsung akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi lokal di setiap wilayah harus digali untuk menumbuhkan kembangkan potensi ekonomi masyarakat di setiap wilayah.

Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

Gambar 4.12
Faktor Penentu Daya Saing Ekonomi Daerah



Untuk mendorong dan menarik investasi ke daerah, diperlukan Profil Potensi Daerah (PPD) yang berisi tentang informasi peluang usaha yang layak bagi investor. Profil Potensi Daerah ini dimaksudkan agar investor dapat lebih cepat menangkap peluang investasi dan mengambil keputusan untuk berinvestasi. Dengan adanya Profil Potensi Daerah, UKM juga dapat mengidentifikasi peluang usaha yang ada.

Dengan Profil Potensi Daerah yang telah memenuhi kriteria, maka diharapkan daerah dapat mempunyai prospek usaha dengan pasar yang jelas serta sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah (Renstrada). Disamping itu profil proyek investasi di daerah juga dapat digunakan sebagai materi utama dalam berbagai kegiatan untuk mempromosikan potensi daerah.

6. Penguatan Daya Saing Industri dan Perdagangan

Sektor industri pengolahan di Kota Bogor memiliki kontribusi terbesar kedua setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan industri

pengolahan di Kota Bogor mengalami perkembangan yang baik, begitu juga potensinya untuk dikembangkan. Industri unggulan dan ekonomi kreatif sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Bogor, dengan mendorong industri kecil dan atau UMKM, serta industri kreatif. Namun permasalahan klasik yang sering dihadapi dalam pengembangan industri kecil menengah, UMKM maupun industri kreatif diantaranya adalah sulitnya akses permodalan, masih sulitnya pemasaran dikarenakan belum berkembangnya sentra-sentra produksi, sumberdaya pelaku IKM, UMKM, serta masih rendahnya jiwa kewirausahaan insan kreatif.

Kota Bogor memiliki potensi pengembangan industri pengolahan yang cukup besar, diantaranya adalah pabrik sepatu/sandal di Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan. Industri kreatif yang cukup menonjol di Kota Bogor diantaranya adalah *fashion*, kuliner, dan kerajinan/produk olahan dari bambu yang dibuat menjadi souvenir atau oleh-oleh. Potensi industri pengolahan IKM, UMKM dan industri kreatif sangat strategis untuk dikembangkan, dan tidak dapat dipungkiri merupakan akibat dari berkembangnya pariwisata di Kota Bogor. Begitu pula sebaliknya, perkembangan sektor industri dan industri kreatif mendukung pariwisata Kota Bogor.

Pengembangannya memiliki *multiplier effect* terhadap perkembangan sektor lain, artinya memberikan efek positif terhadap sektor lain, dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk menjawab tingginya angka pengangguran di Kota Bogor. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri unggulan dan ekonomi kreatif ini adalah persaingannya dengan daerah-daerah lain yang dekat secara geografis dan telah dikenal jauh-jauh hari sebelumnya sebagai pusat kreatifitas seperti Kota Bandung.

7. Penguatan Daya Saing Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu subsektor yang menggerakkan pertumbuhan sektor tersier di Kota Bogor. Perkembangan pariwisata Kota Bogor akan mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor tersier lainnya. Objek wisata yang terdapat di Kota Bogor cukup banyak, mulai dari wisata berbasis alam, berbasis ekonomi kreatif, berbasis sejarah, wisata kuliner, wisata berbasis pendidikan dan atau wisata ilmiah, serta wisata rekreasi. Potensi lain pariwisata Kota Bogor adalah

dikembangkannya pariwisata berbasis tematik potensi di setiap wilayah yang selama ini belum secara optimal dikembangkan di Kota Bogor.

Pengembangan pariwisata Kota Bogor ke depan perlu perencanaan yang komprehensif, dengan mengidentifikasi potensi, jenis-jenis pariwisata, dan daya dukung terhadap destinasi wisata, serta sesuai dengan karakter Kota Bogor. Pengembangan wisata yang merubah bentang alam (tidak berbasis sumberdaya alam) sebaiknya tidak dikembangkan di Kota Bogor. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata Kota Bogor perlu ditingkatkan seperti pusat informasi pariwisata, pengembangan destinasi wisata, termasuk sistem transportasi menuju lokasi objek wisata. Seperti yang diketahui bahwa masalah kemacetan merupakan permasalahan yang dihadapi Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir.

Permasalahan-permasalahan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan pariwisata Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Dukungan infrastruktur.
2. Kesiapan SDM sektor pariwisata dan dukungan dari masyarakat.
3. Teknologi Informasi, Komunikasi dan Publikasi.
4. Kebijakan dan Peraturan Daerah.
5. Investasi.

C. ISU STRATEGIS 3: PEMANFAATAN RUANG DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN

Pembangunan pada hakikatnya adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk maksud dan tujuan tertentu. Ketersediaan sumberdaya sangat terbatas sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang tepat bagi pelestarian lingkungan hidup agar kemampuan serasi dan seimbang untuk mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Memajukan kesejahteraan generasi sekarang melalui pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kebijakan terpadu dan menyeluruh tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Strategi pengelolaan yang dimaksud yaitu upaya sadar, terencana, dan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup. Kesadaran bahwa setiap kegiatan selalu berdampak terhadap lingkungan hidup merupakan pemikiran awal yang penting

untuk memaksa manusia berpikir lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana wujud dampak tersebut, sehingga sedini mungkin dilakukan langkah penanggulangan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Penataan ruang merupakan satu proses pembangunan yang perlu mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan. Dalam menyusun suatu rencana tata ruang yang baik, nilai-nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pembangunan berkelanjutan mengaitkan tiga aspek utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial budaya, ekosistem terpadu yang menopangnya harus terjaga dengan baik. Karena itu aspek lingkungan perlu diinternalisasikan ke dalam pembangunan ekonomi. Dengan terjadinya hal tersebut, maka pembangunan ekonomi tidak akan membuat kesenjangan dalam masyarakat sehingga terjadi pemerataan dan kestabilan.

Pembangunan tata ruang yang berkelanjutan dilakukan untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, serta mewujudkan tata ruang kota yang berkualitas. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan memacu kebutuhan ruang bagi permukiman dan segala utilitas serta infratrukturnya. Kota akan tumbuh dengan segala potensi dan tantangan yang dimilikinya. Keadaan tersebut harus dihadapi melalui penyiapan perencanaan tata ruang kabupaten/kota yang mempertimbangkan kondisi, potensi dan tantangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota tersebut. Pembangunan seringkali diiringi dengan inkonsistensi terhadap aturan tata ruang yang telah dibuat. Inkonsistensi yang terjadi menyebabkan kesemrawutan ruang dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Bila hal ini tidak dikendalikan secara terpadu maka dapat menyebabkan penurunan ketersediaan sumber daya alam dan mengganggu keberlanjutan kota.

Dalam aktivitas pemanfaatan ruang, isu strategis yang marak terjadi di Kota Bogor adalah alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun. Kebutuhan akan ruang untuk permukiman menjadi salah satu pemicu terbesarnya. Dengan semakin berkembangnya lahan permukiman dan tuntutan kebutuhan ruang bagi permukiman kedepannya, memunculkan kompleksitas permasalahan yang akan mempengaruhi proses pembangunan dan

perkembangan Kota Bogor kedepannya apabila tidak direncanakan strategi penanganannya sejak dini.

Inkonsistensi pemanfaatan ruang terhadap RTRW di Kota Bogor sebagian besar diakibatkan adanya alih fungsi Kawasan lindung menjadi Kawasan budidaya dan pemanfaatan ruang pada Kawasan budidaya yang tidak memenuhi kaidah teknis yang berlaku di Kawasan budidaya tersebut.

Dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, arus mobilitas penduduk, arus migrasi dan daya dukung wilayah, dan dengan memperhatikan pembangunan wilayah kabupaten/kota sekitarnya, dalam kurun waktu lima tahun ke depan perlu dipertimbangkan peluang kota Bogor untuk dapat melakukan perluasan wilayah. Selain itu juga, pemekaran wilayah administratif kecamatan juga perlu dikaji dan dipertimbangkan untuk dapat terwujud pada lima pembangunan tahun ke depan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan mempunyai makna dimana pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, melainkan juga untuk generasi mendatang. Pembangunan infrastruktur menyangkut pengembangan tata kelola infrastruktur yang baik, sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, aman, dan nyaman, serta peningkatan kualitas penyediaan pelayanan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga mengarah pada upaya pemertaan kesejahteraan sebagaimana isu strategis pertama, hal ini dilakukan melalui redistribusi pusat-pusat pertumbuhan / pusat-pusat aktivitas ekonomi di setiap wilayah pelayanan. Adanya redistribusi pusat pusat pertumbuhan ini merupakan koridor dalam pemulihan ekonomi yang sejak tahun 2020 tumbuh negatif (-2,23) karena dampak adanya pandemi Covid-19.

Peningkatan jumlah penduduk perkotaan memacu kebutuhan ruang bagi permukiman dan segala utilitas serta infrastrukturnya. Kota akan tumbuh dengan segala potensi dan tantangan yang dimilikinya. Keadaan tersebut harus dihadapi melalui penyiapan perencanaan penataan infrastruktur kabupaten/kota yang mempertimbangkan kondisi, potensi dan tantangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota tersebut.

Transportasi telah menjadi salah satu isu utama di kota Bogor yang hampir 10 tahun ini terus menjadi perhatian. Masalah transportasi yang menjadi sorotan adalah masih banyaknya titik-titik kemacetan yang ada di kota Bogor terutama pada jam sibuk, sarana prasarana lalu lintas yang tidak ramah pengguna, dicontohkan dengan kondisi trotoar yang tinggi dan naik turun, halte yang kotor, masih banyak jalan-jalan yang berlubang, dan tingginya angka commuter di Kota Bogor yang tidak didukung dengan transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang memadai. Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan dampak pada ketidaknyamanan para pengguna jalan.

Selanjutnya pengembangan transportasi berkelanjutan juga menjadi salah satu isu strategis yang diangkat menjadi isu kota Bogor sebagai bagian upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu sistem transportasi yang penggunaan bahan bakar, emisi kendaraan, tingkat keamanan, kemacetan, serta akses sosial dan ekonominya tidak akan menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diantisipasi oleh generasi yang akan datang (Richardson, 2000). Transportasi berkelanjutan (*sustainable transportation*) merupakan refleksi dari konsep pembangunan yang berkelanjutan dalam sektor transportasi.

Berpedoman pada definisi transportasi berkelanjutan di atas, pada dasarnya terdapat tiga aspek dalam transportasi berkelanjutan, yaitu keberlanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Transportasi berkelanjutan dalam aspek ekonomi adalah transportasi yang terjangkau, beroperasi secara efisien, mampu menyediakan berbagai alternatif pilihan moda transportasi, meningkatkan aksesibilitas dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi.

Dalam aspek sosial, transportasi berkelanjutan perkotaan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar individu atau masyarakat secara aman, dan menciptakan keadilan masyarakat saat ini dan masa datang (CST, 1999). Dikatakan pula, transportasi berkelanjutan merupakan transportasi yang dapat meminimalisasi tingkat kecelakaan, dapat meningkatkan keadilan sosial serta tingkat kesehatan dalam komunitas (transportasi yang dapat mendukung terwujudnya lingkungan sosial yang sehat, komunitas yang layak didiami, dan kaya akan modal sosial) (OECD dan NRTEE, 1996). Dengan demikian

dalam aspek sosial, transportasi berkelanjutan didefinisikan sebagai sistem transportasi yang mampu menciptakan kesetaraan secara horizontal maupun vertikal terhadap penggunaan transportasi, menciptakan transportasi dengan tingkat keselamatan tinggi, serta dapat sistem kelembagaan yang mampu mendukung terciptanya sistem transportasi berkelanjutan.

Keberlanjutan dalam aspek lingkungan dapat didefinisikan dalam hal membatasi emisi dan buangan agar tidak melampaui kemampuan *absorbs* bumi, meminimumkan penggunaan energi dari sumber yang tak terbarukan, menggunakan komponen terdaur ulang, meminimalisasi penggunaan lahan serta memproduksi polusi suara yang sekecil mungkin (CST,1999) atau transportasi yang tidak membahayakan kesehatan publik dan ekosistem serta menyediakan sarana mobilitas dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbaharui. Dengan kata lain, transportasi yang tidak menimbulkan polusi air, udara, dan tanah dan menghindari penggunaan sumberdaya yang berlebihan (OECD dan NRTEE, 1996). Beberapa hal yang akan dilihat lebih lanjut yang berkaitan dengan transportasi berkelanjutan dalam aspek lingkungan ini antara lain pencemaran udara, tingkat kebisingan, dan tingkat penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, seperti bahan bakar minyak dan juga lahan, bagi kegiatan pada sektor transportasi serta juga minimasi dampak kesehatan masyarakat terkait kegiatan transportasi.

Kriteria yang ditetapkan dalam konsep pengembangan transportasi berkelanjutan dalam 3 aspek dapat dijelaskan pada tabel 4.33 sebagai berikut.

Tabel 4.33

Konsep Pengembangan Transportasi Berkelanjutan

Aspek Dalam Transportasi Berkelanjutan	Deskripsi	Kriteria
Ekonomi	Transportasi berkelanjutan pada aspek ekonomi mengupayakan pelayanan sistem transportasi yang dapat menunjang aktivitas ekonomi khususnya perkotaan dengan mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah, menciptakan transportasi yang produktif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas wilayah yang baik • Transportasi yang produktif • Aktivitas transportasi yang efisien
Sosial	Transportasi berkelanjutan pada aspek sosial mengupayakan adanya kesetaraan antara masyarakat secara vertikal maupun horizontal dalam pelayanan transportasi dan terdapatnya kelembagaan-kelembagaan yang menunjang sistem transportasi berkelanjutan, melalui kebijakan/peraturan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Di samping itu juga, pada aspek sosial ini keamanan dan keselamatan transportasi juga mendapat perhatian khusus.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan transportasi yang setara/adil • Keselamatan transportasi yang baik • Terdapat sistem kelembagaan yang menunjang transportasi berkelanjutan
Lingkungan	Transportasi berkelanjutan pada aspek sosial mengupayakan penggunaan sumber daya yang tidak berlebih untuk kepentingan kini dan mendatang, dan juga menciptakan lingkungan yang nyaman tanpa eksternalitas negatif dari aktivitas transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan sumber daya pada kegiatan transportasi yang seimbang • Pencemaran lingkungan akibat dampak dari transportasi yang minim

Sumber: Hasil Analisis, 2009

Pencemaran yang banyak terjadi di Kota Bogor adalah yang terkait dengan air (baik air tanah, air permukaan, air sungai, maupun situ) dan udara (polusi udara karena emisi buangan kendaraan bermotor dan debu). Pencemaran air (baik air tanah maupun badan air seperti air sungai) banyak terjadi dikarenakan pengelolaan air limbah, baik limbah cair maupun limbah padat yang belum memadai. Hal ini diperparah lagi dengan kebiasaan masyarakat yang masing sering membuang sampah langsung ke sungai. Timbulan sampah juga merupakan permasalahan pelik yang dihadapi Kota Bogor. Pengelolaan sampah belum optimal, timbulan sampah kota yang cukup besar, serta sarana prasarana pengangkutan sampah yang belum memadai.

Pembuangan sampah secara rutin setiap hari ke TPA merupakan bentuk pengisian kembali (*recharge*), baik secara infiltrasi maupun perlokasi, merupakan penyebab pencemaran air tanah yang sangat besar terutama air tanah dangkal maupun air sumur gali, sehingga perlu penanganan serius. Pencemaran lingkungan karena polusi udara juga sudah dirasakan akibat semakin meningkatnya pemakaian sarana transportasi kendaraan bermotor di Kota Bogor. Pencemaran tersebut mengakibatkan menurunnya kenyamanan kota. Salah satu indikator kenyamanan kota adalah kondisi iklim mikro kota itu sendiri. Kota Bogor terkenal sebagai kota hujan yang menjadi tujuan wisata karena berhawa sejuk dan nyaman. Namun, perubahan iklim mikro berupa kenaikan suhu juga mulai terjadi di Kota Bogor. Iklim mikro berpengaruh kuat terhadap kenyamanan termal manusia. Elemen pembentuk iklim mikro yang mempengaruhi

kenyamanan kota adalah radiasi matahari, temperatur udara, kelembaban relatif, dan pergerakan udara (angin). Perubahan iklim mikro ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan penduduk kota.

Berdasarkan penelitian, suhu maksimal wilayah Bogor rata-rata sebesar 34,2°C, sedangkan suhu terendah sebesar 20°C. Pada siang hari, suhu permukaan membentuk pola UHI (*Urban Heat Island*) yang memusat di Kota Bogor dan menyebabkan hawa panas. Salah satu penyebabnya adalah mulai berkurangnya ruang terbuka hijau. Implikasi dari berkurangnya ruang terbuka hijau di perkotaan adalah peningkatan temperatur yang berpotensi menimbulkan fenomena tersebut.

D. ISU STRATEGIS 4: REFORMASI BIROKRASI

Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, menengah, maupun pendek. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah kota Bogor terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Perubahan yang disasar mengarah pada 8 (delapan) perubahan yaitu:

1. Mental aparatur
2. Pengawasan
3. Akuntabilitas
4. Kelembagaan
5. Tata Laksana
6. SDM Aparatur
7. Peraturan Perundangan
8. Pelayanan Publik

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015-2017 masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a. Rendahnya komitmen pimpinan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi meskipun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) membaik, tetapi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN peran aparat Pengawas Internal masih belum sepenuhnya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
 - c. Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan.
 - d. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah. Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - e. Manajemen pembangunan daerah belum berjalan secara optimal;
 - f. Penetapan indikator kinerja daerah dan kementerian/lembaga (K/L) belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap. Antara sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi. Manajemen pembangunan daerah masih belum menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif.
2. Birokrasi belum efektif dan efisien.
- Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:
- a. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan
Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha.
 - b. Lemahnya penegakan hukum



(remunerasi) masih terkendala dengan sistem pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh dengan APBN.

g. Inefisiensi penggunaan anggaran Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:

1) belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan

2) besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan

h. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi

Penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan kepemimpinan pegawai ASN belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasi birokrasi serta memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi kinerja organisasi.

3. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

a. Pelayanan perijinan masih belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien

Masih ada proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpecah di berbagai instansi, membuat pelayanan perijinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.

b. Praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perijinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi

c. Kejelasan biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, karena masih banyak biaya-biaya lain yang tidak resmi muncul dalam praktik pelayanan perijinan. Karena itu praktik pelayanan perijinan di Indonesia, tidak hanya memerlukan waktu yang lama tetapi juga biaya yang tinggi;

d. Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik berbagai aspek manajemen pelayanan publik

sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan. Masalah lainnya: rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan *e-services* sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata. Disamping itu, masih terdapat *fragmented* dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan.

Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang berorientasi pada kinerja yang tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat. Dampak yang terjadi apabila kualitas pelayanan publik semakin baik maka akan meningkatkan daya saing dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

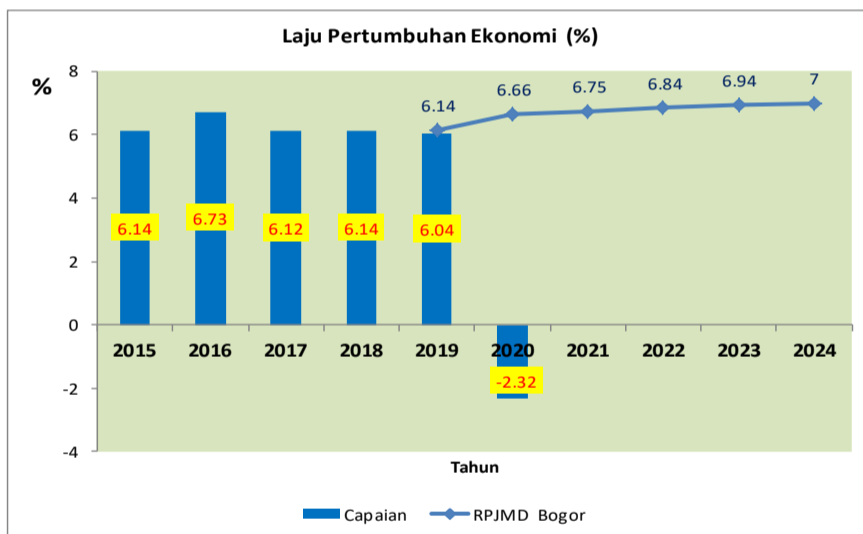
Birokrasi pemerintahan di Kota Bogor dibanyak sektor masih dirasakan kurang efisien. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntabel baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasinya. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif, dan akuntabel, serta pelayanan publik belum optimal.

Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan kinerja di Kota Bogor memang sudah meningkat. Hal tersebut terlihat dari Pemerintah Kota Bogor telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu 2 tahun berturut turut berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017 dan Tahun 2018. Namun, opini WTP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset milik daerah belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum, serta sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tantangan kedepan yang harus ditindaklanjuti diantaranya adalah peningkatkan kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan dan pengembangan sistem dan pemantapan pemeriksaan kinerja.

E. ISU STRATEGIS 5: Penguatan sistem kesehatan dan percepatan pemulihan ekonomi sebagai upaya penanganan Covid-19.

Adanya pandemi Covid-19 yang merupakan pandemi global yang terjadi tahun 2020. Pada tahap awal pandemi ini mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat kota Bogor, dan jumlah yang terkonfirmasi positif hingga Januari 2020 lebih dari 7.000 jiwa terkena Covid-19 dan yang meninggal 150 jiwa. Untuk menahan laju penyebaran pandemi Covid-19, pemerintah mengambil kebijakan pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Penerapan pembatasan aktivitas, dan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan berimplikasi pada menurunnya perekonomian Kota Bogor, dan memberuknya berbagai indikator makro ekonomi Kota Bogor, diantaranya LPE Kota Bogor di tahun 2020 berkontraksi menjadi -2,32%, sebagaimana ditunjukkan pada grafik 4.9 sebagai berikut.

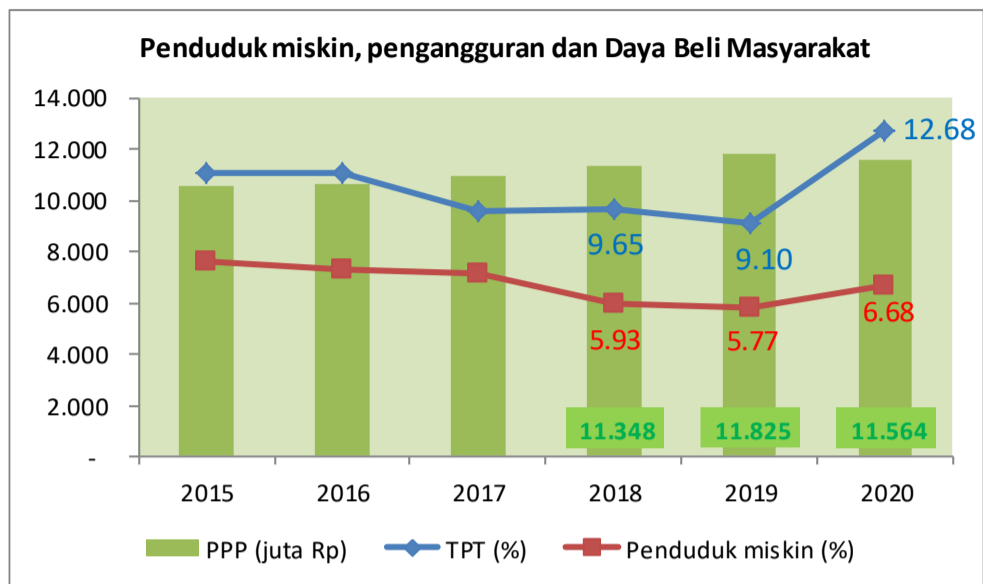
Grafik 4.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor



Sumber : BPS Kota Bogor , 2020

Disisi lain produksi barang jasa umumnya mengalami penurunan, pemutusan hubungan kerja atau pengurangan sementara pekerja meningkat, sehingga pengangguran meningkat dimana Tingkat Pengangguran Terbuka dari 9,10% meningkat menjadi 12,68%. Daya beli masyarakat menurun di tahun 2020 menjadi Rp. 11.564.000, dan jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 6,68%, sebagaimana terlihat grafik berikut:

Grafik 4.10
Penduduk Miskin, Pengangguran Dan Daya Beli
Masyarakat Kota Bogor



Sumber : BPS Kota Bogor, 2020

Melihat kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlanjut hingga tahun 2021 dan dampaknya terhadap berbagai aspek khususnya kondisi perekonomian kota Bogor yang turun drastis, maka diperlukan penataan dan penguatan sistem kesehatan di kota Bogor, serta percepatan pemulihan ekonomi di Kota Bogor.

4.4 Keterkaitan Antara Isu Strategis Pusat, Isu Strategis Provinsi Jawa Barat, Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Bogor 2019-2024 Dan Isu Strategis RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah serta antar pusat dan daerah, maka isu-isu strategis yang ditetapkan oleh pusat, provinsi, dan kota Bogor harus saling berkaitan dan saling mengisi datu dengan lainnya. Oleh karenanya, berikut ini digambarkan keterkaitan antara isu strategis pusat, Provinsi Jabar, isu strategis KLHS RPJMD Kota Bogor 2019-2024, dan isu strategis RPJMD Kota Bogor 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam tabel 4.38. Berikut merupakan matriks keterkaitan antara isu strategis nasional, provinsi, KLHS, dan kota.

Tabel 4.34
Sinergitas Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bogor

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bogor
1. Pembangunan manusia: - Pelayanan Dasar - SDM berkualitas dan berdaya saing 2. Pembangunan ekonomi: - Pangan - Energi - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan digital - Industri manufaktur kelautan dan kemaritiman 3. Pembangunan kewilayahan: - Sentra pertumbuhan - Komoditas unggulan daerah pertumbuhan perkotaan 4. Pembangunan infrastruktur: - Transportasi - Telekomunikasi - Sumber daya air, perumahan dan pemukiman 5. Pembangunan Polhukamhan : - Hukum dan regulasi - Hankam - Politik	1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial 3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 5. Reformasi birokrasi	1. Kemiskinan, kerawanan pangan dan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi 3. Daya saing pariwisata 4. Penanganan dan pencegahan kumuh 5. Akses universal terhadap air minum dan air limbah 6. Pengelolaan sampah mulai dari sumbernya 7. Pengendalian kualitas air dan udara 8. Transportasi berkelanjutan 9. Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Pembangunan manusia yang berkeadilan 2. Penguatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal 3. Pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan 4. Reformasi birokrasi 5. Menurunnya derajat kesehatan masyarakat dan perekonomian kota dimasa pandemi Covid-19

Sumber : Hasil Analisa, 2021

BAB V

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019- 2024 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut :

Kota Bogor, meliputi seluruh wilayah dan isinya, dalam arti Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Kota Bogor.

Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut:

1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, pendidikan, sosial masyarakat serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan

kesejahteraannya.

3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita-cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri dan anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga). Selain itu, keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan pengukuran tingkat ketahanan keluarga maka konsep keluarga yang digunakan akan diupayakan untuk merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Konteks mewujudkan **Kota Yang Ramah Keluarga**, salah satu hal yang penting diperhatikan adalah bagaimana suatu kota memiliki daya dukung terhadap kehidupan keluarga yang dapat diukur salah satunya dengan melihat seberapa besar ketahanan keluarga yang tinggal dalam lingkungan kota tersebut. ketahanan keluarga (*family strength* atau *family resilience*) merupakan kondisi

kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial (Frankenberger, 1998). Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, dan mental untuk hidup secara mandiri (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994). Ketahanan keluarga juga mengandung maksud sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera dan bahagia lahir dan batin. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan (Sunarti, 2001), kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga (Walsh, 1996).

Selanjutnya, dari sudut pandang yang lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu: (1) adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan; (2) adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik; (3) adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan; (4) adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang; dan (5) adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya. Dalam konteks yang lebih luas, ketahanan keluarga diidentikkan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial.

BPS mendefinisikan ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global. Dinamika sosial skala lokal dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu dinamika sistem sosial skala lokal (*small scale system*) itu sendiri dan karakteristik sistem



sosial skala lokal (*characteristics of the small scale system*) yang disebut sebagai faktor komunal (*Communal Factors*), dimana faktor komunal akan berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain:

1. Organisasi sosial reproduksi meliputi: formasi keluarga, sistem pernikahan dan pertalian darah, serta prinsip turunan, warisan, dan sukseksi;
2. Organisasi sosial produksi meliputi: stratifikasi dan pembagian kerja berdasarkan gender, usia, dan kelas sosial;
3. Organisasi sosial partisipasi politik meliputi: kepemimpinan lokal dan pola manajemen; dan
4. Organisasi sosial keagamaan meliputi: hukuman dan insentif yang memperkuat norma sosial yang berlaku. Sementara itu, dinamika sosial skala global merujuk pada dinamika sosial pada sistem sosial skala global (*large scale system*) yang disebut sebagai faktor sosial (*societal factors*).

Faktor sosial yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial antara lain: (1) derajat integrasi ke sistem ekonomi pasar global (misalnya prevalensi upah/gaji buruh, moneterisasi, mekanisasi, penggunaan teknologi, penanaman modal asing, orientasi dan ketergantungan ekspor, dan ketergantungan impor); (2) derasnya arus pengetahuan dan informasi global; (3) derajat integrasi ke dalam tata kehidupan perkotaan; dan (4) penerapan kebijakan skala internasional, nasional, non lokal berpengaruh terhadap wilayah (misal kebijakan terkait kependudukan, kesehatan dan pendidikan). Akhirnya, ketahanan sosial sebagai hasil dari dinamika sosial skala lokal dan global tersebut kemudian diidentifikasi oleh BPS sebagai:

1. Tingkat perlindungan yang diberikan kepada penduduk lanjut usia, anak-anak, perempuan, orang dengan disabilitas;
2. Tingkat dukungan yang diberikan kepada individu maupun keluarga/rumah tangga rentan seperti keluarga miskin, orang tua tunggal, anak-anak dan penduduk lanjut usia yang terlantar, orang dengan disabilitas yang terlantar;
3. Tingkat partisipasi individu, kelompok dan keluarga dalam kehidupan sosial dan politik;
4. Tingkat konservasi/keberlanjutan sumber daya lingkungan bagi penghidupan masyarakat lokal; dan
5. Tingkat kontrol sosial terhadap kekerasan (rumah tangga, komunitas, dan lintas budaya).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001). Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

5.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019- 2024 yaitu :

A. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

B. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola



sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahannya (*understanding*), dan mengatur/mengambil tindakan (*acting*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

C. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan sosial ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

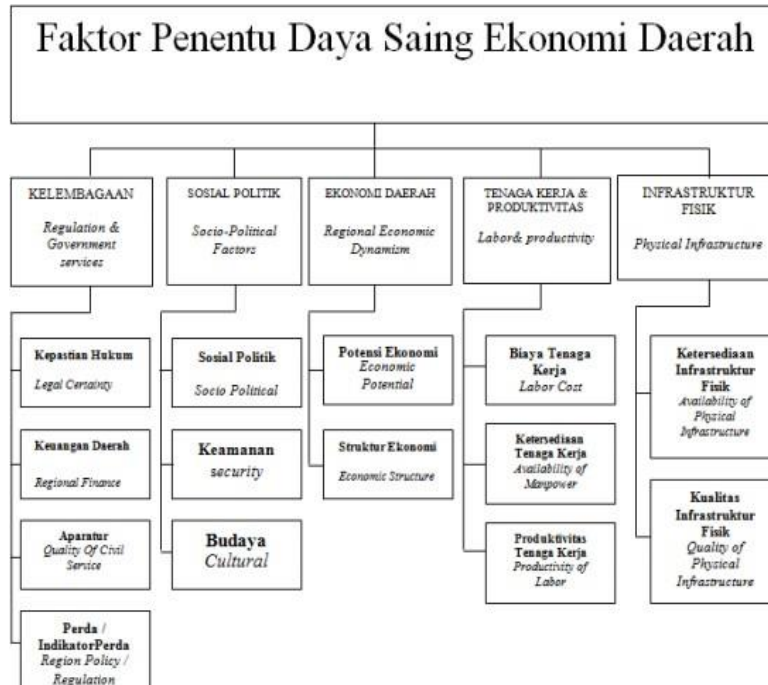
Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan

secara global.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong daya saing daerah adalah kelembagaan, sosio-politik, ekonomi daerah, tenaga kerja dan produktivitas, serta infrastruktur fisik, sebagaimana diuraikan dalam bagan berikut ini :

Gambar 5.1

Faktor Penentu Daya Saing Ekonomi Daerah



Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor, Tahun 2019

5.3 Keselarasan RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan RPJMD Kota Bogor 2019-2024

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan misi RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

MISI RPJPD 2005 – 2025	MISI RPJMD 2019 – 2024
---------------------------	---------------------------

MISI RPJPD 2005 – 2025	MISI RPJMD 2019 – 2024
Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Dengan Titik Berat Pada Jasa Yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Yang Ada.	Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera
Misi 2 : Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman) dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.	Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang cerdas Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera
Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera.	Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang cerdas Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera
Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum.	Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang cerdas

Sumber : Hasil Olahan Bappeda, 2019

5.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Bogor Tahun 2019– 2024, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

5.4.1 Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEHAT

Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT adalah terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas, yang dapat diukur dari Indeks Kesehatan dan Indeks kualitas Lingkungan Hidup.

Gambar 5.2
Penjabaran Misi 1, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024



B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Bogor adalah Angka Harapan Hidup (AHH).

2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS dan Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga.

3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase rumah tangga yang dilayani air minum yang aman, persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak, persentase luasan kawasan kumuh, dan persentase reduksi sampah.

4. Terkendalinya Sumber-sumber Pencemar Lingkungan dan / atau Kerusakan Lingkungan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar lingkungan adalah Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

5. Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan adalah persentase RTH Publik.

5.4.2 MISI 2 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG CERDAS

Dalam rangka pencapaian Misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

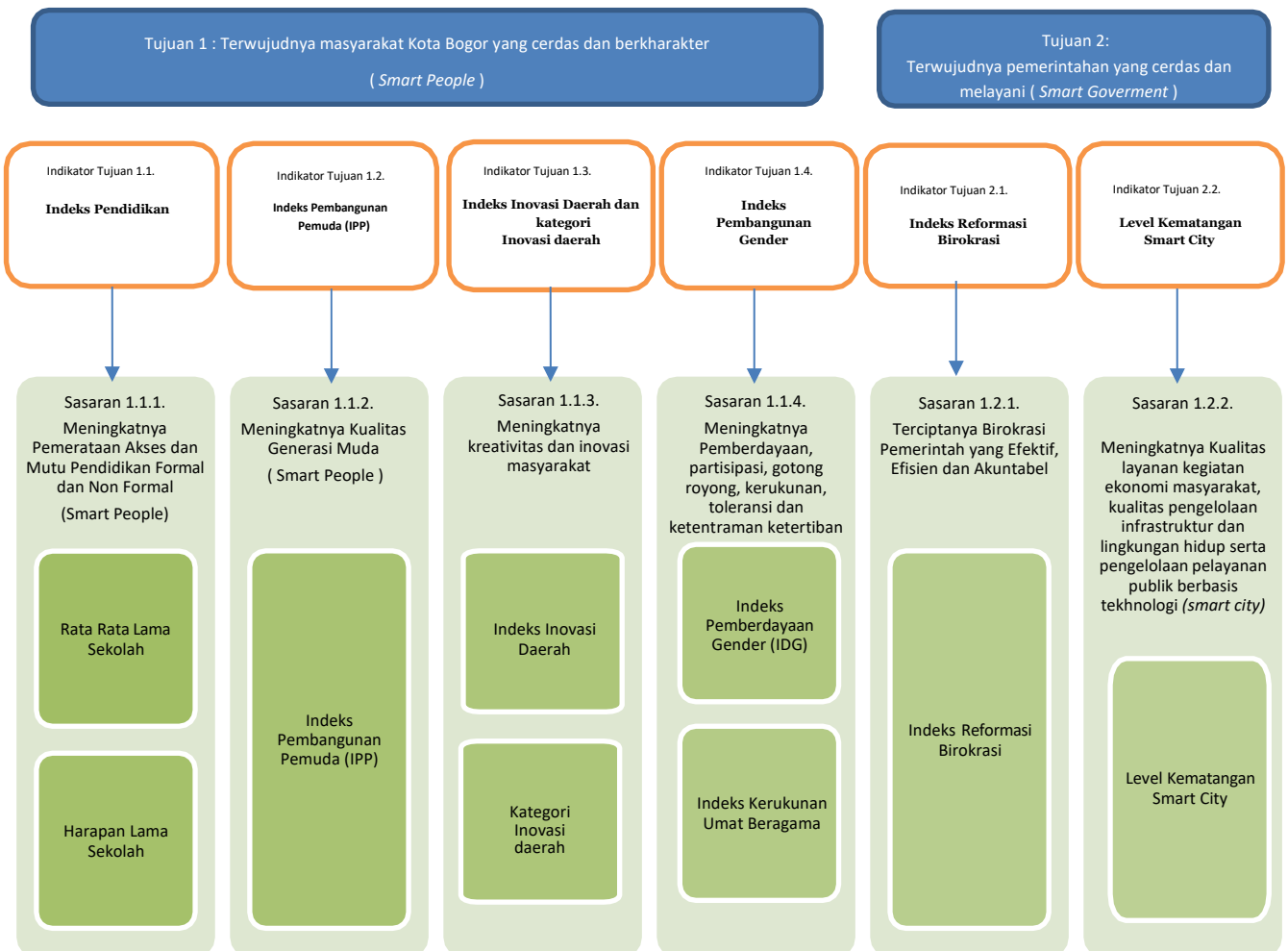
A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang CERDAS yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (*Smart People*), yang dapat diukur dari Indeks Pendidikan, Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Inovasi Daerah, Kategori Inovasi Daerah dan Indeks Pembangunan Gender (IDG)
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (*Smart Government*), yang dapat diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi dan level Kematangan *Smart City*.

Gambar 5.3
Penjabaran Misi 2, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

MISI 2 : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG CERDAS



B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 4 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal (*Smart People*);
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah.
2. Meningkatnya Kualitas Generasi Muda (*Smart People*);
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
3. Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Inovasi Daerah dan Kategori Inovasi Daerah.
4. Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan, Toleransi dan Ketertarikan Ketertiban.
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:

1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel;
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (*Smart City*).
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Level Kematangan *Smart City*.

5.4.3 Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA

Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEJAHTERA yaitu :

1. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari Indeks Gini Rasio/Indeks ketimpangan dan Indeks Kebahagiaan.
2. Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah, yang dapat diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi dan capaian nilai Indeks Daya Saing Daerah

Gambar 5.4
Penjabaran Misi 3, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024



B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas, maka ada 3 sasaran yaitu :

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka.

2. Menurunnya Tingkat Kemiskinan;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Angka Kemiskinan.

3. Meningkatnya Ketahanan Keluarga.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Ketahanan Keluarga.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas, maka ada 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah PDRB (Atas Dasar Harga Konstan), PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku), Pengeluaran Per Kapita dan Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit.

2. Meningkatnya Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah persentase realisasi rencana struktur ruang pada periode 4 rencana 2020-2024, dan persentase realisasi rencana pola ruang pada periode rencana 2020-2024.

3. Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah persentase jalan berkondisi mantap dan persentase cakupan pelayanan angkutan umum.

Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, sebagaimana dimaksud diatas, berikut dengan tolok ukur dan target kinerjanya dapat dijelaskan pada Tabel 5.2. berikut ini.

TABEL 5.2
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BESERTA INDIKATOR KINERJA
VISI : TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG RAMAH KELUARGA

NO	MISI	NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	Capaian		TARGET PERDA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD TAHUN 2019-2024					TARGET PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2019-2024				KONDISI AKHIR	
							2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1	Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat	Tujuan 1.1	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	Indeks Kesehatan	Tahun	81.86	82.17	82,48	73.69	73.96	74.25	74.57	74.91	82.8	83.29	83.72	83.95	83.95	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	NA	NA	55,45	49.67						54.53	52,35	53,44	54,53	54,53
		Sasaran 1.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	81.66	73.41	73,61	73.69	73.96	74.25	74.57	74.91	73,82	73,93	74.04	74,18	74,18	74,18
				Sasaran 1.1.2	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	% Rumah Tangga Ber-PHBS	%	66.00	65.80	68	68.00	69	70	71	72	69.00	70.00	71.00	72.00
		Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	%			45	45	39	0.39	0.47	0.49	0.51	0.53	47	49	51	53	53	
		Sasaran 1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang layak	%	NA	NA	NA	81.46	94.86	96.58	98.29	100	83.88	80,62	84,72	88,76	88,76	
				Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	%	91,44	92.58	81,46						68.49	64,28	67,3	70,42	70,42	
				Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak	%	NA	NA	67,10	67.1	70.42	72.06	72.62	73.03	69,91	70,93	72,01	73,1	73,1	
				Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	NA	NA	3,80						5,20	7,20	7,88	8,55	8,55	
				Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan kota	%	2,62	0.00	2,44	2,44	2,27	2,12	1,94	1,77	2,27	2,12	1,94	1,77	1,77	
				Persentase Reduksi Sampah	%	6.26	6.89	6,40	6.4	6.6	6.8	7	7.2	6.60	6.80	7.00	7.20	7.20	
		Sasaran 1.4	Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air	Point	49.60	51.67	56,33	56.33	49.7	49.8	49.9	50	49.70	49.80	49.90	50.00	50.00	
				Indeks Kualitas Udara	Point	85.86	81.76	80,09	80.9	86	86.1	86.2	86.3	86.00	86.10	86.20	86.30	86.30	
		Sasaran 1.1.5	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5.89	4.18	13,11	13.11	5.92	5.94	5.95	5.96	4.20	4.21	4.21	4.25	4.25	

NO	MISI	NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	Capaian		TARGET PERDA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD TAHUN 2019-2024					TARGET PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2019-2024				KONDISI AKHIR	
							2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
2	Mewujudkan kota Bogor yang Cerdas	Tujuan 2.1	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)	Indeks Pendidikan	Point	71.50	71.62	71,68							72.38	73.26	74.22	75,17	75.17
				Indeks Pembangunan Pemuda	Point	NA	NA	-	56.31	59.13	62.09	65.19	67.05	59.13	62.09	65.19	67.05	67.05	67.05
				Indeks Inovasi Daerah	Point	600	30.640	5,162	600-610	611-620	621-630	631-640	641-650	611-620	621-630	631-640	641-650	641-650	641-650
				Kategori Inovasi Daerah	Kategori										Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	
				Indeks Pembangunan Gender	Point	90.92	91.11	91,02	69.5	70.5	71.5	72.5	73.5	90.87	91.22	91.28	91.33	91.33	
		Sasaran 2.1.1	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal (<i>Smart People</i>);	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.30	10.32	10,33	10.63	10.97	11.31	11.65	12	10,53	10.62	10.74	10,87	10.87	
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.38	13.40	13,41	13.6	13.9	14.2	14.5	15	13,42	14	13.83	14.03	14.03	
		Sasaran 2.1.2	Meningkatnya kualitas generasi muda (<i>Smart People</i>);	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Point	NA	NA	NA	56.31	59.13	62.09	65.19	67.05	59.13	62.09	65.19	67.05	67.05	
		Sasaran 2.1.3	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	Indeks Inovasi Daerah	Point	600	300,64	5,162	600-610	611-620	621-630	631-640	641-650						
				Kategori Inovasi Daerah	Kategori										Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	
		Sasaran 2.1.4	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan ketentraman ketertiban masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	67.37	68.91	69,03	69.03	70.5	71.5	72.5	73.5	70.50	71.50	72.50	73.50	73.50	
				Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	NA	NA	68,51	70.5	71	71.5	72	72.5	71.00	71.50	72.00	72.50	72.50	
		Tujuan 2.2	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (<i>Smart government</i>),	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	BB	BB	BB	A	A	A	BB	A	A	A	A	
				Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Scattered	Integrative	Scattered	Integrative	Integrative	Smart	Smart	Integrative	Integrative	Integrative	Integrative	Integrative	
		Sasaran 2.2.1	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat	B	B (66.10)	BB	BB	BB	A	A	A	BB	A	A	A	A	
		Sasaran 2.2.2	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (<i>Smart City</i>)	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Scattered	Integrative	Scattered	Integrative	Integrative	Smart	Smart	Integrative	Integrative	Integrative	Integrative	Integrative	



NO	MISI	NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	Capaian		TARGET PERDA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG RPJMD TAHUN 2019-2024					TARGET PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2019-2024				KONDISI AKHIR	
							2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
3	Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera	Tujuan3.1	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini Rasio	Point	0.413	0,408	0,412	0.4	0.39	0.38	0.37	0.36	0.380	0.370	0,350	0,340	0,340	
				Indeks Kebahagiaan	Point	NA	NA	NA	70-71	71-72	72-73	73-74	74-75	71-72	72-73	73-74	74-75	74-75	
		Sasaran 3.3.1	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,65	9.10	12.68	8.47	8.22	7.97	7.8	7.6	11,79	11,32	10,84	10,37	10,37	
		Sasaran 3.3.2	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	5.93	5.77	6,68	5.8	5.78	5.53	5.28	5	7,24	6,90	6,56	6,21	6,21	
		Sasaran 3.1.3	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	NA	NA	85,20	73-74	74-75	75-76	76-77	76-77	74-76	75-77	76-78	76-78	76-78	
		Tujuan3.2	Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6.14	6.04	-0,53	6.66	6.75	6.84	6.94	7	3,57	5,37	5,53	6,04	6,04	
				Indeks Daya Saing Daerah	Kategori	NA	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Sasaran3.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	Trilyun Rp.	30.414	32.254	32,084							33.229	35.013	36.950	39.181	39.181
				PDRB Per Kapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	Trilyun Rp.	37.99	46,22	40,36	40.36	42.73	45.1	47.47	49.84	42.73	45.10	47.47	49.84	49.84	
				Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp.	10.940.00	11.825.00	11.564.00	11.124	11.219	11.314	11.409	11.504	11.413,00	11.534,00	11.657,00	11.825,00	11.825,00	
				Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	19.68	19.22	19,11	21	22	23	24	25	22.00	23.00	24.00	25.00	25.00	
		Sasaran3.2.2	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	0,00	20,00	20,00	20	40	60	80	100	40	60	80	100,00	100,00	
				Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	0,00	20,00	20,00	40	60	80	100	100	40	60	80	100,00	100,00	
		Sasaran3.2.3	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	Persentase Jalan Berkondisi Mantap	%	88.50	88,79	83,47	89	89,25	89,5	89,75	90	84.50	86.00	88.00	90.00	90.00	
Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	%			45,00	47.5	32,00	50	60	70	80	90	40.00	44.00	44.00	44.00	44.00			

Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bogor ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan setiap misi yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Lebih lanjut, sasaran pembangunan Kota Bogor tersebut juga harus sinergis mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020- 2024 dan pencapaian sasaran RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023. Dengan demikian, sinergi perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan.

Berikut ini adalah keterhubungan sasaran-sasaran RPJMD Kota Bogor dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Tabel 5.3.
Sandingan Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024		Sasaran RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	S3.2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
		S18	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	S3.2.2	Meningkatnya Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S19	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	S3.1.1	Menurunnya Tingkat Pengangguran
				S3.2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi



Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024		Sasaran RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024	
S3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.	S10	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S3.2.3	Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi
		S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri		
		S11	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa		
		S12	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan		
S4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	S3.1.3	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S2.2.1	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan Efektif, Efisien dan Akuntabel

Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024		Sasaran RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024	
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S3.1.2	Menurunnya Kemiskinan
				S3.1.1	Menurunnya Tingkat Pengangguran
				S3.1.3	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga
S6	Terpenuhinya layanan dasar	S3	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	S1.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
				S1.1.2	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				S1.1.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman
		S5	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	S2.1.1	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	S4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	S2.1.4	Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat
		S6	Meningkatnya Peran Pemuda dalam	S2.1.2	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda

Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024		Sasaran RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024	
			Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional		
S8	Terwujudnya pengentasan Kemiskinan	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S3.1.2	Menurunnya Kemiskinan
		S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri		
S9	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	S5	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	S2.1.1	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal
				S3.1.1	Menurunnya Tingkat Pengangguran
				S2.1.3	Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat
				S2.1.2	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda
S10	Menguatnya revolusi mental	S7	Meningkatnya pelestarian dan	S2.1.2	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda

Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024		Sasaran RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024	
	dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya		Pengembangan kebudayaan lokal	S2.1.4	Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam Pembangunan	S7	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	S2.1.2	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S2.1.4	Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S2.1.4	Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat



Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024		Sasaran RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024	
	sosial dalam kehidupan masyarakat				
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S3.1.3	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga
		S4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak		
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	S5	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	S2.1.3	Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat
				S2.1.1	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal
				S2.1.2	Meningkatnya Kualitas Generasi Muda
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S14	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan Domestik	S1.1.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim		

Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024		Sasaran RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024	
			untuk kesejahteraan masyarakat		
S17	Meningkatnya konektivitas wilayah	S10	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S3.2.3	Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi
				S3.2.2	Meningkatnya Kualitas Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
S18	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota Metropolitan	S10	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat Perekonomian	S3.2.3	Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi
S19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	S9	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi S20 dan akses listrik terhadap rumah tanS13gga hingga ke pelosok	S2.2.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
S20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan	S2.2.1	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel



Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024		Sasaran RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024	
	TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi		Akuntabel	S2.2.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
S21	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S1.1.4	Terkendalinya Sumber-Sumber Pencemar Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan
				S1.1.5	Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan
S22	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	S15	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	S1.1.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S2.2.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan

Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024		Sasaran RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024	
					Pelayanan Publik Berbasis Teknologi
				S1.1.4	Terkendalinya Sumber-Sumber Pencemar Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan
S23	Pembangunan Rendah Karbon	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S1.1.5	Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan
				S1.1.4	Terkendalinya Sumber-Sumber Pencemar Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan
				S2.2.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024		Sasaran RPJMD Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024	
S24	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	S8	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	S2.1.4	Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat
		S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan Akuntabel	S2.2.1	Terciptanya Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
		S21	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.		

5.5 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019 – 2024

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan jangka menengah kota Bogor Tahun 2019-2024 yang ditetapkan selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pada RPJPD kota Bogor Tahap ke IV, hasil evaluasi kinerja RPJMD periode 2015-2019 yang belum mencapai target serta permasalahan dan isu strategis pembangunan kota Bogor yang belum tertangani. Penetapan prioritas pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 juga memperhatikan rencana pembangunan pada level yang lebih tinggi yaitu RPJMN Tahun 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Proses penentuan prioritas dilakukan dengan pembobotan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dilakukan pembobotan terhadap prioritas pembangunan turunan dari sasaran yang merepresentasikan penyelenggaraan urusan dihitung skalanya dengan membandingkan terhadap 8 (delapan) indikator yang digunakan yaitu:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;



6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;
7. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan;
8. Pencapaian SDG's dan SPM.

Program Prioritas RPJMD kota Bogor Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 mencakup 3 (tiga) prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
3. Reformasi Birokrasi

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan menjadi bencana nasional non alam pada tahun 2020 dan masih terjadi hingga saat ini, maka 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah Kota Bogor yang telah ditetapkan tersebut tetap berlaku, dan selanjutnya lebih difokuskan untuk pengendalian pandemi dan percepatan pemulihan dampak pandemi dengan tetap mengacu pada 3 (tiga) prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu pada tahun 2019-2024. Adapun fokus pada masing masing prioritas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.**Prioritas dan Fokus Pembangunan Kota Bogor Tahun 2020-2024**

No.	Prioritas Pembangunan	Fokus Tahun 2020-2024
1.	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	a. Pendidikan di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru b. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah c. Penanganan Pengangguran dan Kemiskinan d. Percepatan Pemulihan Aktivitas Ekonomi Masyarakat
2.	Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal	a. Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Akses ke Simpul simpul Pergerakan Aktivitas Ekonomi Masyarakat b. Penataan Transportasi c. Penataan Ruang yang Mendukung Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal, dan Redistribusi Pusat Pusat Aktivitas/Bangkitan Ekonomi
3.	Reformasi Birokrasi	a. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan b. Penguatan Inovasi Daerah yang Mendukung Percepatan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19.

Sumber : Bappeda Kota Bogor, Tahun 2021

Perumusan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah, selain memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juga harus didukung dan berkorelasi dengan isu strategis yang telah ditetapkan. Berikut ini gambaran sinergitas isu strategis dengan perumusan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.5.

Sinergitas Isu Strategis Dengan Perumusan Tujuan, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Isu Strategis	Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan
1. Pembangunan Manusia yang Berkeadilan	1. Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang Sehat dan Lingkungan yang Berkualitas	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman 4. Terkendalinya Sumber-sumber Pencemar dan Kerusakan Lingkungan 5. Meningkatnya Kualitas Ruang 6. Terbuka Hijau Publik Perkotaan	1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
	2. Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)	1. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal; 2. Meningkatnya Kualitas Generasi Muda 3. Meningkatnya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat 4. Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat	

Isu Strategis	Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	
	3. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	1. Menurunnya Tingkat Pengangguran 2. Menurunnya Kemiskinan 3. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga		
2. Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	1. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah	1. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi	2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal	
3. Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan		2. Meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat		3. Penguatan Reformasi Birokrasi
		4. Reformasi Birokrasi		



Isu Strategis	Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan
Penguatan Sistem Kesehatan dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Sebagai Upaya Penanganan Covid 19.	1. Terwujudnya Masyarakat kota Bogor yang Sehat dan Lingkungan yang Berkualitas 2. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat 3. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah 4. Terwujudnya Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal 4. Menurunnya Kemiskinan 5. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat 2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal 3. Penguatan Reformasi Birokrasi

Sumber : Bappeda, 2021

Prioritas Pembangunan Kota Bogor selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 mencakup 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan Nasional, sedangkan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 mencakup 9 (Sembilan) agenda Prioritas Pembangunan Jabar, yang keduanya harus sinergis dengan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor tahun 2019-2024. Namun, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah terjadi Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 – 2023 menjadi 11 (Sebelas) Agenda Prioritas Pembangunan Jawa Barat. Berikut ini adalah hasil persandingan Prioritas Nasional (PN) tahun 2020- 2024, Prioritas Provinsi Jawa Barat (PP) Tahun 2018-2023, dan Prioritas Kota Bogor (PK) Tahun 2019-2024 dimana terlihat seluruh Prioritas Pembangunan Kota Bogor yang termuat dalam RPJMD Tahun 2019-2024 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan PN Tahun 2020-2024 dan PP Tahun 2018-2023. Berikut ini adalah matrik sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kota Bogor.

Tabel 5.6

Sandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Propinsi Jawa Barat dan Prioritas Pembangunan Kota Bogor

Prioritas Nasional Tahun 2020-2024		Prioritas Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Prioritas Kota Bogor Tahun 2019-2024	
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP2'	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		PP11'	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	PK2	Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP8'	Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa)	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		PP2'	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;	PK2	Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
		PP4'	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial		
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP5'	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		PP1'	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah		
		PP4'	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		PP2'	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;		
		PP3	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;		

Prioritas Nasional Tahun 2020-2024		Prioritas Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Prioritas Kota Bogor Tahun 2019-2024	
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP9'	Pendidikan Agama dan Tempat ibadah Juara	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		PP5'	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;		
PN5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP10'	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
					PK2
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PP10'	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PK1	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
			PP6'	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;	PK2
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7'	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	PK3	Reformasi Birokrasi

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, tahun 2021

Selanjutnya prioritas pembangunan kota Bogor Tahun 2019-2024 tersebut harus disinergikan dengan seluruh sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dan dijabarkan ke dalam program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah pemerintah Kota Bogor. Adapun penjabaran sasaran, prioritas pembangunan dan program pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024 serta penanggungjawab telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 5.7
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul program sesuai nomenklatur yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Perangkat Daerah
Peningkatan kualitas Hidup Masyarakat <i>yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) program</i>	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes / RSUD
		2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes / RSUD
		3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	DinkesDinas Kesehatan
		4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPPKB
		5	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
		6	Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP
		7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DKPP
	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dispora
	Meningkatnya kualitas	10	Program Pengelolaan dan	DPUPR

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul program sesuai nomenklatur yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Perangkat Daerah
	lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		11	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DLH
		12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
		13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
		14	Program Pengembangan Permukiman	DPUPR
		15	Program Pengembangan Perumahan	Disperumkim
		16	Program Kawasan Permukiman	Disperumkim
		17	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Disperumkim
		18	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	DPKP
		19	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Terkendalnya sumber-sumber pencemar dan kerukan lingkungan	20
21	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			DLH

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul program sesuai nomenklatur yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Perangkat Daerah
		22	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DLH
		23	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH
		24	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
		25	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
		26	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DLH
	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	27	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Disperumkim
	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;	28	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdik
		29	Program Pengembangan Kurikulum	Disdik
		30	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Disdik
		31	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Disdik

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul program sesuai nomenklatur yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Perangkat Daerah
		32	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Disdik
	Meningkatnya kualitas generasi muda	33	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPPPA
		34	Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPA
		35	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dispora
		36	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dispora
		37	Program Pembinaan Perpustakaan	Diarpus
	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	38	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi masyarakat	39	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		40	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP
		41	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPA
		42	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPPPA
		43	Program Perlindungan Perempuan	DPPPA

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul program sesuai nomenklatur yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Perangkat Daerah
		44	Program Pengembangan Kebudayaan	Disparbud
		45	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Disparbud
		46	Program Pembinaan Sejarah	Disparbud
		47	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Disparbud
		48	Program Pengelolaan Permuseuman	Disparbud
		49	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinsos
		50	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Bag. Kesra
		51	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Kecamatan
		52	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
		53	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
		54	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika	Bakesbangpol

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul program sesuai nomenklatur yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Perangkat Daerah
			Serta Budaya Politik	
		55	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol
		56	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Bakesbangpol
		57	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol
		58	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
	Menurunnya Tingkat Pengangguran	59	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
		60	Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker
		61	Program Hubungan Industrial	Disnaker
		62	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Disparbud
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	63	Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos
		64	Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos
		65	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos
		66	Program Penanganan Bencana	Dinsos
		67	Program Pemerintahan dan	Bag. Kesra

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul program sesuai nomenklatur yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Perangkat Daerah
			Kesejahteraan Rakyat	
		68	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinsos
		69	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga	70	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		71	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Disperumkim
		72	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPPPA
		73	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	DKPP
		74	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
		75	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP
Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Daya saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal <i>yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) program</i>	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	76	Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	DinKUKMDagin
		77	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	DinKUKMDagin
		78	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	DinKUKMDagin
		79	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	DinKUKMDagin
		80	Program Pemberdayaan dan	DinKUKMDagin

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul program sesuai nomenklatur yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Perangkat Daerah
			Perlindungan Koperasi	
		81	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DinKUKMDagin
		82	Program Pengembangan Umkm	DinKUKMDagin
		83	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		84	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
		85	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		86	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
		87	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
		88	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPP
		89	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPP
		90	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparbud
		91	Program Pemasaran Pariwisata	Disparbud
		92	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Disparbud
		93	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana	DKPP

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul program sesuai nomenklatur yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Perangkat Daerah
			Pertanian	
		94	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP
		95	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP
		96	Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
		97	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	DinKUKMDagin
		98	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DinKUKMDagin
		99	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DinKUKMDagin
		100	Program Pengembangan Ekspor	DinKUKMDagin
		101	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	DinKUKMDagin
		102	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DinKUKMDagin
		103	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DinKUKMDagin
		104	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	DinKUKMDagin
		105	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bag. Ekon
		106	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul program sesuai nomenklatur yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Perangkat Daerah	
	Meningkatnya Kualitas Ruang Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	107	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR	
		108	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	DPUPR	
		109	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR	
		110	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	DPUPR	
		111	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR	
		112	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Bag. Pem	
		113	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH	
	Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi	114	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub	
		115	Program Pengelolaan Perkerataapian	Dishub	
		116	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	PUPR	
	Penguatan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) program	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	117	Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
			118	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
			119	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
120			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapil	
121			Program Pengendalian Penduduk	DPPKB	
122			Program Pemberdayaan dan	DPPKB	

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul program sesuai nomenklatur yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Perangkat Daerah
			Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
		123	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Bag. Pem
		124	Program Penataan Desa	Bag. Pem
		125	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo
		126	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Diskominfo
		127	Program Pengelolaan Arsip	Diarpus
		128	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Diarpus
		129	Program Perijinan Penggunaan Arsip	Diarpus
		130	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda : Bag. kesra/ Bag. Huk. HAM / Bag. Pem
		131	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bag. Adbang
		132	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bag. Umum/Bag. Prokompim /Bag. Org/Itda/ seluruh perangkat daerah
		133	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Setwan
		134	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
		135	Program Koordinasi dan	Bappeda

Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Judul program sesuai nomenklatur yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020		Perangkat Daerah
			Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		136	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD
		137	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD
		138	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		139	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		140	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Itda
		141	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Itda
		142	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Itda
	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi teknologi	143	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		144	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
		145	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		146	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo

Sumber : Hasil olahan Bappeda, Tahun 2021

5.6 Penyeragaman Target Indikator Makro RPJMN dengan RPJMD

Dengan keluarnya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Bappenas Nomor : 050/3499/sj dan Nomor : 3 tahun 2021 tentang Penyeragaman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka daerah diwajibkan menyeragaman target 6 indikator makro pembangunan dengan target Provinsi dan target Nasional. Ke enam Indikator makro tersebut adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat kemiskinan (Po), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini, dan Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), Penyeragaman target tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.8
Penyeragaman Target Indikator Makro RPJMN Dengan RPJMD

No.	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					Indikator Pembangunan	RPJMD Provinsi					Indikator Pembangunan	RPJMD Kota Bogor				
		Capaian		Target				Capaian		Target				Capaian		Target		
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021 (Capaian)	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,1	N/A	N/A	N/A	6.2-6.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,44	3,74	3,92	4,35		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,53	3,57	5,37	5,53	6,04
2	Tingkat Kemiskinan (%)	9,8	N/A	N/A	N/A	6.0-7.0	Tingkat Kemiskinan (%)	8,43	8,40	7,67	7,54		Tingkat Kemiskinan (%)	6,68	7,24	6,90	6,56	6,21
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,1	N/A	N/A	N/A	3.6-4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,46	9,82	10,16	9,69		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	12,68	11,79	11,16	10,84	10,37
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,9	N/A	N/A	N/A	75,54	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,45	72,45	72,57	73,05		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,11	76,59	77,19	77,75	78,31
5	Rasio Gini	0,385	N/A	N/A	N/A	0.360-0.374	Rasio Gini	0,398	0,412	0,40	0,396		Rasio Gini	0,412	0,38	0,37	0,35	0,34
6	Penurunan Emisi GRK (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	27,3	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sektor energi (tCO ₂ e)	3,87	4,29	4,75	5,22		Persentase Perubahan Emisi CO ₂ / Emisi Gas Rumah Kaca	3,92	5,87	7,11	7,72	7,98

A. PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2019 – 2024

Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2019-2024 merupakan janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang strategis dan prioritas untuk dilaksanakan pada Tahun 2019-2024. Program unggulan ini salah satu arah kebijakan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan kota Bogor pada

Tahun 2019-2024. Program Unggulan 2019-2024, meliputi:

A. BOGOR LANCAR

1. Konversi Angkot
2. Pembangunan jalan protokol alternatif
3. Pembangunan *flyover* di Jalan RE Martadinata dan Kebon Pedes
4. Penataan kawasan stasiun kereta api
5. Pembangunan gedung parkir di pusat kota
6. Penuntasan sarana Terminal Baranangsiang dan Stasiun LRT

B. BOGOR MERENAH

1. Pembangunan jalur pedestrian yang terintegrasi di pusat kota
2. Pembangunan kampung wisata
3. Revitalisasi pasar tradisional
4. Kampungku bersih dan hijau
5. Pembangunan pusat kuliner di setiap kecamatan

C. BOGOR KASOHOR

1. Pembangunan museum
2. Revitalisasi perpustakaan kota
3. Pembangunan GOR di setiap kecamatan

D. BOGOR MOTEKAR

1. Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan dan profesional
2. Festival seni dan helaran budaya

E. BOGOR SAMAWA

1. Sekolah Ibu
2. 50 beasiswa tiap tahun bagi pelajar berprestasi
3. Merenovasi 20 ribu RTLH sampai Tahun 2023
4. Pemberian insentif bagi guru ngaji
5. Orang tua asuh

F. ABDI BOGOR

1. *Mall* pelayanan publik
2. Kunjungan dokter ke keluarga
3. Konseling dan *Call Center* 24 jam
4. Layanan malam kelurahan
5. RSUD unggul

Selanjutnya penjabaran program-program prioritas dan program-program unggulan sebagaimana dimaksud di atas akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam program pembangunan daerah dan kerangka pendanaannya yang akan disajikan pada Bab VI

RPJMD ini.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

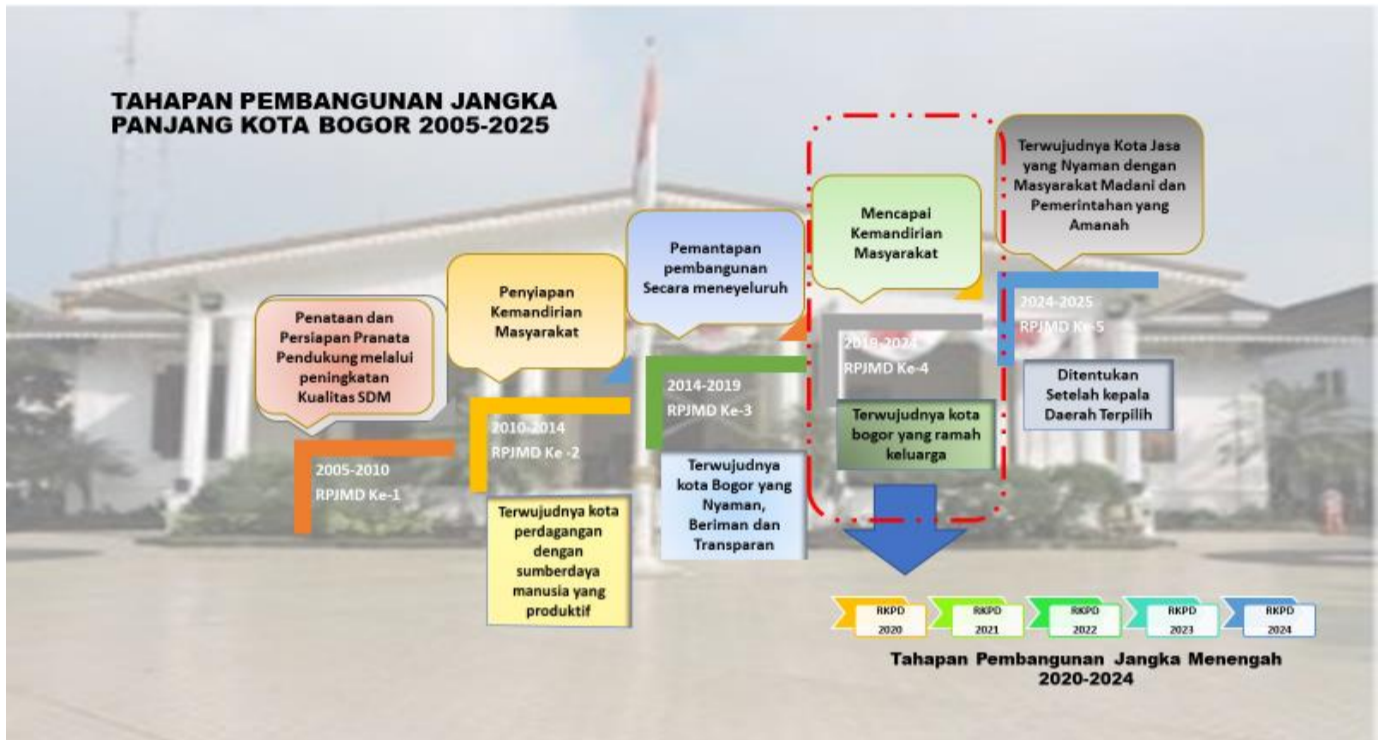
Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bogor periode 2019-2024 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025, Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2019-2024 adalah ditujukan untuk ***mencapai kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial budaya dan bidang hukum, pemerintahan dan politik.***

Selanjutnya tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. Tahapan

Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor Tahun 2005-2025 dan penjabarannya pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah disajikan pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1.
Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor Tahun 2005-2025



Sumber : Hasil Olahan, Tahun 2019

Selanjutnya pada tahapan pembangunan jangka menengah ke-4 sebagaimana dimaksud diatas, untuk menuju pada terwujudnya kemandirian masyarakat dan dengan memperhatikan tema visi kota Bogor pada tahun 2019-2024, maka disusunlah tahapan pembangunan jangka pendek yang akan menjadi fokus/tema pembangunan dalam RKPD pada periode 2019-2024. Fokus/Tema pembangunan jangka pendek telah ditetapkan dalam Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Gambar 6.2
Fokus/Tema Tahapan RKPD selama Periode RPJMD
Tahun 2019-2024

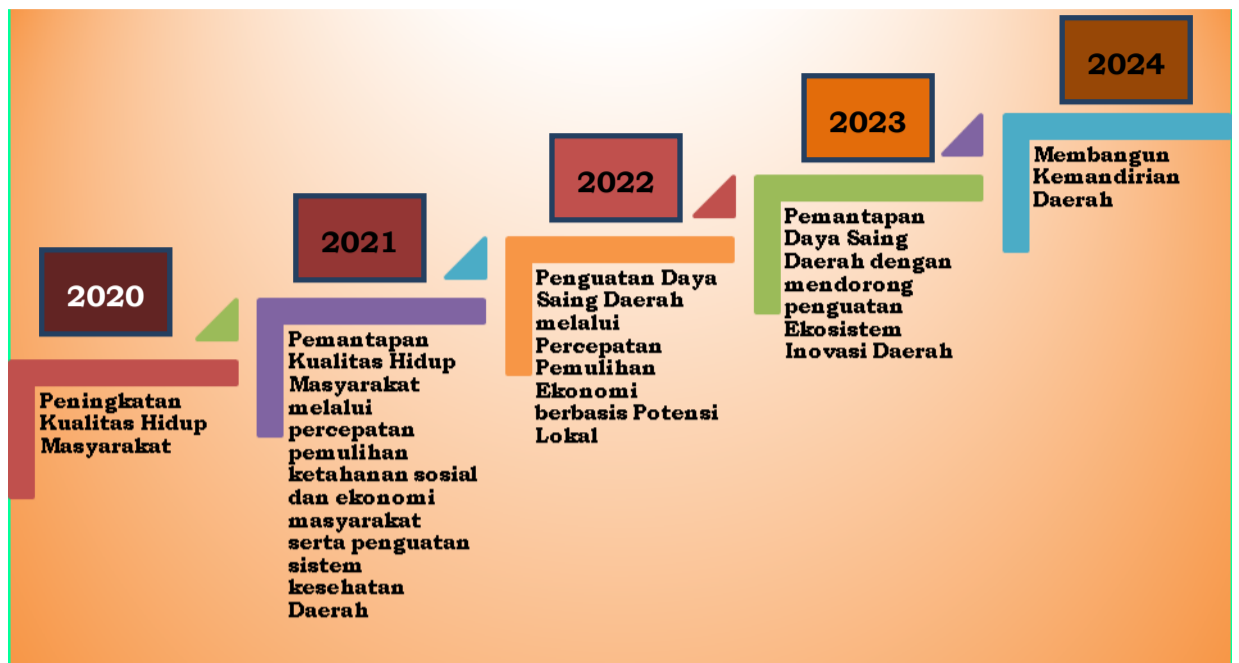


Sumber : Hasil Olahan, Tahun 2019

Dengan terjadinya perubahan-perubahan mendasar pada tahun 2020 yang disebabkan karena terjadinya bencana non alam yang ditetapkan secara nasional yaitu berkaitan pandemi Covid-19 yang berimplikasi dan berdampak pada terjadinya krisis ekonomi dan perubahan kondisi sosial budaya masyarakat serta dengan adanya beberapa perubahan kebijakan nasional termasuk perubahan tema dan fokus Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020-2021 dan RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2020-2021, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap tema/fokus tahapan RKPD Kota Bogor Tahun 2020-2024.

Adapun perubahan tema/fokus tahapan perencanaan tahunan (RKPD) Kota Bogor tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 ini adalah sebagai berikut :

Gambar 6.3
Perubahan Fokus/Tema Tahapan RKPD selama Periode RPJMD
Tahun 2019-2024



Sumber : Hasil Olahan, Tahun 2021

6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BOGOR TAHUN 2019-2024

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu metode SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kota Bogor. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah Kota Bogor harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

Berdasarkan perhitungan, yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *weakness – opportunity (WO)* yaitu Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. Hal ini dapat diartikan bahwa Kota Bogor menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di sisi lain menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Meskipun strategi WO merupakan alternatif strategi terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun belum tentu semua strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga perlu dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menemui kendala sumber daya (*resources constraints*). Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bogor disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kota Bogor Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
VISI : Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga				
Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat				
1. Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Mendorong upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, profesional dan bermutu; 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam Penanganan Covid-19	a. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan pada fasilitas Kesehatan dasar dan rujukan; b. Peningkatan upaya pencegahan, deteksi dini dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular c. Standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan d. Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan; e. Peningkatan ketersediaan sumberdaya kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai dengan standar;</p> <p>f. Kolaborasi pembiayaan kesehatan masyarakat.</p> <p>g. Penyediaan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi;</p> <p>h. Percepatan pemenuhan cakupan penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat Kota Bogor</p> <p>i. Peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan (<i>health security</i>)</p> <p>j. Peningkatan inovasi teknologi di bidang kesehatan masyarakat</p> <p>k. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan dalam penanganan Covid-19</p> <p>l. Menurunkan <i>fatality rate</i> Covid-19</p>	
		2 Menurunkan Angka Kelahiran	a. Penurunan angka kelahiran pada usia remaja	Peningkatan Kualitas Hidup

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			b. Peningkatan kepesertaan Ber-KB terutama untuk kepesertaan KB MKJP pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Masyarakat
		3 Menjamin kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	a. Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam b. Peningkatan kecukupan konsumsi energi dan protein pada asupan pangan masyarakat c. Pengendalian kontaminasi pada bahan pangan dan produk-produk olahan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat d. Menjamin kualitas konsumsi pangan dan Gizi Ibu Hamil, Bayi dan Balita	
	2. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif serta penyehatan lingkungan	a. Advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; b. Kemitraan dengan Kelompok Kesehatan Masyarakat; c. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat;	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>d. Mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan</p> <p>e. Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas dan penerapan prokes di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas dan penerapan prokes.</p>	
		<p>2. Meningkatkan kebugaran masyarakat melalui pembudayaan olahraga pada masyarakat</p>	<p>a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga</p> <p>b. Menjamin ketersediaan sarana prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terjangkau</p> <p>c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi secara berkelanjutan</p> <p>d. Mengembangkan sarana prasarana olah raga yang representatif dan memenuhi standar untuk mendukung pelaksanaan event-event olah raga tingkat nasional maupun internasional</p>	<p>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</p>
	<p>3. Meningkatnya kualitas lingkungan</p>	<p>1. Meningkatkan akses masyarakat</p>	<p>a. Menyediakan alternatif sumber air minum yang aman bagi masyarakat</p>	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
	sehat di kawasan perumahan dan permukiman	terhadap penyediaan pelayanan air minum yang aman	<p>di kawasan yang tidak terjangkau oleh pelayanan air minum perpipaan;</p> <p>b. Meningkatkan ketersediaan sumber air minum yang berkualitas;</p> <p>c. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan air minum yang aman bagi masyarakat.</p>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan sistem air limbah yang layak	<p>a. Menyediakan sistem air limbah yang layak dan aman bagi masyarakat secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat.</p> <p>b. Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah.</p> <p>c. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan layanan air limbah yang layak dan aman</p>	
		3. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	<p>a. Penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan;</p> <p>b. Pencegahan terhadap menurunnya</p>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh</p> <p>c. Standarisasi kualitas prasarana sarana perumahan dan permukiman</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat</p> <p>e. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana perumahan permukiman yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.</p> <p>f. Pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang berorientasi pada mitigasi resiko bencana</p> <p>g. Akselerasi pemulihan infrastruktur pasca bencana</p>	
		4. Reduksi timbulan sampah	<p>a. Pengurangan penggunaan plastik di toko <i>modern</i> dan pasar tradisional</p> <p>b. Penerapan dan Pengelolaan 3 R dan bank sampah berbasis pemberdayaan masyarakat</p> <p>c. Kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam</p>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>pengelolaan sampah</p> <p>d. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar.</p>	
	<p>4. Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan</p>	<p>1. Meningkatkan pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya air</p> <p>2. Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar air</p>	<p>a. Naturalisasi Sungai Ciliwung dan Cisadane</p> <p>b. Konservasi sumberdaya air secara berkelanjutan</p> <p>c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan konservasi SDA</p> <p>d. Kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan konservasi sumberdaya air</p> <p>a. Pengendalian dan pengawasan melekat pada setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air</p> <p>b. Penegakan sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air.</p> <p>c. Kemitraan dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam pengendalian pencemaran sumberdaya air.</p>	<p>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
		3. Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar udara	a. Pengembangan transportasi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi sumber pencemar udara b. Pengendalian dan pengawasan melekat pada setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar udara c. Kemitraan dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam pengendalian pencemaran udara	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		4. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	a. Penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, dan pengelolaan limbah domestik, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim b. Kemitraan dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	
	5. Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	1. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas	a. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas b. Pelestarian dan konservasi kawasan lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana serta kawasan yang	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>diteapkan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat rencana tata ruang wilayah.</p> <p>c. Pengelolaan area pemakaman umum yang berorientasi pada Tempat Pemakaman Umum Hijau.</p>	
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas				
<p>1 Terwujudnya masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)</p>	<p>1. Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal;</p>	<p>1. Mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dasar menuju 12 Tahun</p> <p>2. Penguatan sistem Pendidikan dalam masa Pandemi Covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru</p>	<p>a. Peningkatan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong penguatan muatan lokal sebagai salah satu wahana untuk pendidikan karakter dan <i>enterpreneurship</i>.</p> <p>b. Standarisasi dan pemerataan mutu pendidikan dasar</p> <p>c. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar</p> <p>d. Pengembangan sistem dan mekanisme rekrutmen dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata secara geografis, tepat jumlah, tepat kualifikasi/keahlian, dan gender dalam rangka pemerataan mutu pendidikan dasar 9 tahun.</p>	<p>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<ul style="list-style-type: none"> e. Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dasar, menjamin layanan akses bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, dan untuk menghilangkan diskriminasi di sekolah f. Penguatan karakter, kreatifitas, inovasi, dan prestasi siswa untuk menguatkan daya saing siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi g. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar menuju 12 tahun, melalui pembangunan sekolah negeri baru sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. h. Menjamin pendidikan inklusif yang berkualitas. i. Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa miskin dan mencanangkan program orang tua asuh untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih tinggi kepada siswa miskin. 	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<ul style="list-style-type: none"> j. Penyediaan sarana prasarana belajar mengajar yang mendukung penerapan protokol kesehatan di masa Adaptasi Kebiasaan Baru k. Penguatan penerapan teknologi informasi dan pengembangan inovasi lainnya yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar di masa AKB. 	
		<p>2. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan non formal</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan kerja sama dengan lembaga/organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi lain yang dapat menjangkau masyarakat, dalam rangka pemberantasan buta aksara b. Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan yang diarahkan untuk mendukung suksesnya Wajib Belajar 12 Tahun (setara SMA/SMK) c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang berorientasi pada pasar kerja d. Meningkatkan pembinaan kursus dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat di berbagai bidang keterampilan yang berorientasi pada 	<p>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan/ <i>enterpreneurship</i> dalam rangka percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka</p> <p>e. Penguatan kelembagaan PKBM melalui penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non formal secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas</p>	
	<p>2. Meningkatnya kualitas generasi muda (Smart People)</p>	<p>1. Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas dan Inovasi generasi muda</p>	<p>a. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak</p> <p>b. Penguatan daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang</p> <p>c. Aktualisasi Nilai Budaya Bangsa pada generasi muda</p> <p>d. Membangun wawasan kebangsaan pada generasi muda</p> <p>e. Mendorong pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor</p> <p>f. Memerangi penyalahgunaan narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras pada generasi muda</p>	<p>Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<ul style="list-style-type: none"> g. Melakukan pembinaan terhadap anak-anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (anak jalanan, WTS,dll) secara berkelanjutan sehingga menjadi lebih berdaya. h. Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan i. Pembinaan organisasi kepemudaan dan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif j. Pengembangan budaya dan minat baca pada generasi muda untuk mendorong/memacu kreatifitas dan inovasi generasi muda k. Revitalisasi Perpustakaan Kota dan pengembangan taman-taman bacaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. l. Memperkuat karakter generasi muda dengan pembekalan pendidikan agama dan budi pekerti. 	
	3. Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1. Menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi masyarakat	a. Menggali kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya sehingga berdaya guna dan bernilai ekonomis	Pembangunan infrastruktur dan penguatan daya saing ekonomi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<ul style="list-style-type: none"> b. Memperkuat jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreatifitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat c. Berupaya selalu menciptakan budaya kreatif dan inovatif dalam setiap pemecahan permasalahan pembangunan sehingga tidak terjebak pada rutinitas “<i>Bussiness As Usual</i>” d. Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong terciptanya kreatifitas dan inovasi (internet, pendidikan kreatif, peningkatan seni dan budaya, dll) 	daerah berbasis potensi lokal
	4. Meningkatkan pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan ketertiban masyarakat	1. Membangun dan memperkuat budaya partisipatif, gotong royong, kerukunan dan toleransi dalam setiap proses pembangunan daerah Mendorong	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses bisnis pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. b. Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penguatan/pengarusutamaan gender 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
		2. pemberdayaan masyarakat terutama yang berorientasi pada pemberdayaan gender	c. Menumbuhkembangkan kerukunan, toleransi dan perdamaian dalam keberagaman masyarakat	
2 Terwujudnya Pemerintahan yang cerdas dan melayani (<i>Smart government</i>)	1. Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i> dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparan (<i>open government</i>) b. Memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas c. Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah d. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja e. Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien f. Penguatan kapasitas aparatur 	Penguatan Reformasi Birokrasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur</p> <p>g. Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang profesional dan ‘smart’</p> <p>h. Memperkuat profesionalisme dan kinerja aparatur melalui pemenuhan formasi Jabatan fungsional, dan penguatan serta peningkatan peran jabatan fungsional</p> <p>i. Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai.</p> <p>j. Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)</p> <p>k. Penataan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih</p>	
	2. Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi	1. Melakukan akselerasi pembangunan	a. Mendorong percepatan pembangunan Kota Bogor yang Cerdas (Bogor <i>smart city</i>) melalui	Pembangunan Infrastruktur dan penguatan daya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
	masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi	<p>pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses bisnis pelayanan masyarakat</p> <p>b. Mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan</p>	saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera				
1. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	1. Menurunnya tingkat pengangguran	1. Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional	<p>a. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar</p> <p>b. Mengembangkan inkubator bisnis</p> <p>c. Memperkuat program magang serta program pelatihan dan kejuruan bagi pemuda yang mempunyai keterampilan rendah</p> <p>d. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja</p> <p>e. Kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja</p>	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			f. Memastikan adanya jaminan perlindungan tenaga kerja	
	2. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	1. Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin terdampak pandemi Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin adanya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terdampak pandemi Covid-19 b. Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin c. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat miskin 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
	3. Meningkatnya Ketahanan Keluarga	1. Meningkatkan landasan legalitas dan keutuhan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan layanan administrasi kependudukan yang menjamin seluruh warga masyarakat terlayani administrasi legalitas perkawinan dan legalitas kelahirannya b. Memastikan adanya kemitraan gender dalam kehidupan berkeluarga 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		2. Meningkatkan Ketahanan Fisik Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin kecukupan pangan dalam setiap keluarga b. Memastikan kecukupan gizi seluruh anggota keluarga mulai bayi, balita, 	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			remaja, ibu, dan lansia c. Peningkatan kualitas kesehatan keluarga d. Peningkatan kualitas rumah tinggal dan lingkungannya yang layak huni bagi keluarga	
		3. Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga	a. Peningkatan pendapatan per kapita keluarga melalui Pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar terjadi peningkatan pendapatan keluarga b. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi pembiayaan pendidikan anak sampai ke jenjang wajib belajar menuju 12 tahun c. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat berbasis keluarga d. Pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera e. Pengembangan program/kegiatan dalam upaya mengurangi kemiskinan bagi keluarga pra sejahtera dan	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga	
		4. Meningkatkan ketahanan Sosial Psikologis Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak b. Meningkatkan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak c. Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga d. Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
		5. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya dalam keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan partisipasi seluruh anggota keluarga dalam pembangunan daerah b. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan perlindungan keluarga agar tidak terpapar promosi dan 	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			perilaku sosial dan seksual menyimpang	
<p>Terwujudnya</p> <p>2 peningkatan daya saing ekonomi daerah</p>	<p>1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</p>	<p>1. Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah</p>	<p>a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi lokal</p> <p>b. penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreatifitas</p> <p>c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreatifitas, inovasi, dan penguasaan teknologi.</p> <p>d. Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industri terutama bagi industri kecil dan menengah</p> <p>e. Memperkuat sistem dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional</p> <p>f. Meningkatkan daya saing koperasi, UMKM, IKM dan pelaku ekraf melalui peningkatan kualitas</p>	<p>Pembangunan infrastruktur dan penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal</p>



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>kelembagaan, dukungan dan fasilitasi permodalan/ pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (<i>Off Taker & Promosi</i>)</p> <p>g. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang untuk mempertemukan <i>supply</i> dan <i>demand</i>, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen</p> <p>h. Revitalisasi pasar tradisional</p> <p>i. Mengembangkan potensi ekonomi <i>lokal</i> melalui pengembangan kampung kampung tematik sebagai salah satu destinasi wisata di setiap wilayah</p> <p>j. Pengembangan Pemasaran UMKM melalui pembangunan jejaring kemitraan dalam penyediaan <i>supply</i> produk UMKM/IKM/Ekraf, penyediaan <i>Chanel</i> distribusi produk UMKM/IKM/Ekraf, dan penyediaan <i>demand</i> terhadap produk UMKM/IKM/Ekraf.</p> <p>k. Mendorong pengembangan , profesionalisme dan profitabilitas BUMD yang bergerak di sektor pelayanan umum masyarakat</p>	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, pemasaran, kelayakan keuangan, dan aspek lainnya	
		2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing	a. Menyediakan layanan perijinan yang responsif, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik. b. Pengembangan <i>City Marketing</i>	Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi Lokal
	2. Meningkatnya Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi	1. Mewujudkan pusat pertumbuhan baru dan pengembangan koridor pusat yang terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan	a. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam kota dan Wilayah Kabupaten Bogor b. Pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan c. Pengembangan ruang kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan	
		2. Mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan	d. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan perijinan, penegakan sanksi dan penerapan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan amanat peraturan daerah tentang	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
			<p>Rencana Tata Ruang Wilayah dan aturan turunannya.</p> <p>e. Mengkaji kemungkinan dilakukan perluasan wilayah Kota Bogor dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, arus mobilitas penduduk, arus imigrasi dan daya dukung wilayah</p> <p>f. Pemekaran wilayah administratif kecamatan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan masyarakat</p>	
	<p>3. Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi</p>	<p>1. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memastikan interkonektivitasnya secara baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah</p>	<p>a. Pembangunan jalan-jalan alternatif/jalan tembus untuk mengurangi beban kapasitas jalan di pusat-pusat kota dan dalam rangka menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di wilayah pinggiran</p> <p>b. Pembangunan Persimpangan Tidak Sebidang (<i>Flyover/underpass</i>) untuk mengatasi kemacetan lalu lintas</p> <p>c. Memastikan tersedianya kondisi jalan yang mantap guna menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.</p>	<p>Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal</p>
		<p>2 Menyediakan jaringan</p>	<p>a. Mendorong percepatan tersedianya sistem jaringan transportasi massal</p>	<p>Pembangunan Infrastruktur dan</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	Prioritas Pembangunan
		transportasi yang berkualitas dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	<p>perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau</p> <p>b. Mengintegrasikan sistem jaringan transportasi perkotaan antar moda</p> <p>c. Melaksanakan percepatan penataan kawasan seputar Stasiun Kereta Api dan simpul-simpul transportasi lainnya dengan pengembangan system <i>Transit Oriented Development</i> (TOD).</p> <p>d. Membangun sarana prasarana simpul transportasi seperti penyediaan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas.</p> <p>e. Penuntasan sarana Terminal Baranangsiang dan Stasiun LRT</p>	Penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal

Tabel 6.2**Tahapan Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Tahun 2014-2019**

2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Peningkatan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat	Pemantapan Kualitas Hidup Masyarakat melalui penanganan pandemi covid dan percepatan pemulihan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat serta penguatan sistem kesehatan Daerah	Penguatan Daya Saing Daerah melalui peningkatan peranserta masyarakat, inovasi dan Percepatan Pemulihan Ekonomi berbasis Potensi Lokal	Pemantapan Daya Saing Daerah dengan mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, Sumberdaya manusia, dan infrastruktur serta Ekosistem Inovasi Daerah	Membangun Kemandirian Daerah untuk tercapainya kota ramah keluarga

6.2 PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019-2024

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah dan perumusan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PMDN Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, mendasari Perubahan nomenklatur Program Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Hasil pemetaan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, berimplikasi juga pada pemetaan indikator dan target kinerja setiap perubahan program pembangunan daerah. Lebih lanjut, dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada Maret 2020 hingga saat ini, dan perubahan perubahan mendasar yang berkaitan dengan kebijakan

untuk penanganan pandemi Covid-19 tersebut, maka perlu dilakukan *refocusing* program pembangunan daerah dan penyesuaian-penyesuaian terhadap indikator capaian kinerja program beserta target kinerjanya selama kurun waktu tahun 2020-2024.

Berikut ini adalah penjabaran perubahan program di setiap sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam PMDN nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tabel 6.4A
Penjabaran Prioritas Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)					
								Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)							
	1	Misi 1 :	Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat																			
	1.1	Tujuan 1 :	1	Indeks Kesehatan	Tahun	81,86	82,17	82,48	82,80		82,97		83,14		83,35		83,35					
			2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	NA	NA	55,45	54,53		52,35		53,44		54,53		54,53					
	1.1.1	Sasaran 1 :	1	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	81,86	73,41	73,61	73,82		73,93		74,04		74,18		74,18					
1	02	02	1	Program 1.1.1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	61,00	69,00	74,50	70,00	145.340,00	65,00	70.142,00	60,00	92.489,00	55,00	103.598,15	55,00	411.569,15	Dinkes
						2	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	2,99	2,67	3,15	3,10		3,00		2,90		2,80		2,80		
						3	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	3,35	2,50	3,36	3,30		3,20		3,10		3,00		3,00		
						4	Persentase Balita berstatus gizi normal	%	96,42	93,80	85,10	86,00		86,30		86,60		87,00		87,00		
						5	Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	%	81,22	83,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		
						6	Prevalensi Hipertensi	%	4,40	4,55	6,40	6,50		7,20		7,90		8,40		8,40		
						7	Case Fatality Rate Covid-19	%	N/A	N/A	2,40	1,30		1,20		1,10		1,00		1,00		
						8	Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	%	N/A	0,14	0,11	0,12		0,12		0,13		0,14		0,14		
						9	Akses sanitasi terhadap air bersih	%	N/A	N/A	99,00	99,20		99,40		99,60		100,00		100,00		
						10	Akses jamban sehat	%	72,70	74,21	79,00	80,00		82,00		84,00		86,00		86,00		
						11	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	%	95,85	94,02	91,1	92,00		93,00		94,00		95,00		95,00		
						12	Persentase pasien yang dilayani	%	100,00 (245.526 pasien)	100,00 (222.481 pasien)	100,00 (156.072 pasien)	100,00	259.280,00	100,00	200.259,00	100,00	241.216,00	100,00	270.510,00	100,00	1.236.781,00	RSUD

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target		Pagu Indikatif (Juta Rp)		
									Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)					
1 02 03	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	%	N/A	80	87,00	86,00	39.808,19	90,00	6.797,00	95,00	6.804,00	100,00	6.818,00	100,00	60.227,19	Dinkes		
			2	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	%	N/A	N/A	90,00	84,00		88,00		92,00		96,00		96,00				
			3	Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	%	N/A	N/A	N/A	73,00		81,00		90,00		95,00		95,00				
			4	Persentase Kepuasan Karyawan	%	72,50	68,25	78,15	≥ 80	21.120,00	≥ 80	6.000,00	≥ 80	-	≥ 80	-	≥ 80	46.320,00	RSUD		
1 02 04	3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	Persentase Produsen Perbekalan kesehatan Rumah tangga (PKRT) dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	%	N/A	N/A	N/A	82,00	643,00	85,00	90,00	86,00	134,00	90,00	242,00	90,00	1.109,00	Dinkes		
			2	Persentase Penggunaan Obat Rasional	%	N/A	72	75	77,00		79,00		82,00		83,00		83,00				
			3	Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	%	N/A	N/A	N/A	90,00		92,00		94,00		96,00		96,00				
2 14 03	4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1	Persentase Peserta KB Metode Kontasepsi jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)	%	22,36	22,45	20,27	20,30	898,12	20,35	1.448,91	20,40	1.450,00	20,45	1.600,00	20,45	7.307,10	DPPKB		
2 9 03	5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	poin	84,90	83,70	75,84	87,9	216,10	71,3	135,00	72,05	145,00	72,81	145,00	72,81	1.253,84	DKPP		
2 09 05	6	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1	Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi	%	91,53	93,96	90,81	93,50	88,16	94,00	45,00	94,50	60,00	95,00	60,00	95,00	403,68	DKPP		
3 27 05	7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN	1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	persen	N/A	N/A	N/A			-2,14	81,00	-2,19	90,00	-2,24	90,00	-2,24	261,00	DKPP		



Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target		Pagu Indikatif (Juta Rp)
									Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)			
			DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2 Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar	%	22,20	24,00	14,33	21,00	123,15	20,00	89,35	19,00	100,00	18,00	100,00	18,00	593,81	
	1.1.2	Sasaran 2 : Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 % Rumah Tangga Ber-PHBS	%	66	65,8	68	69			70		71		72		72		
			2 Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	%	45	45	39	47			49		51		53		53		
1	02	05	1 Program 1.1.2.1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	4	4	4	7	14.985,79	8,00	15.051,00	9,00	8.600,00	11,00	9.700,00	11,00	48.336,79	Dinkes
				2 Predikat Kota Sehat	Predikat	Swastisaba Wiwerda	Swastisaba Wistara	Tahun 2020 tidak ada penilaian	Swastisaba Wiwerda		Swastisaba Wiwerda		Swastisaba Wiwerda		Swastisaba Wiwerda		Swastisaba Wiwerda		
2	19	03	2 Program 1.1.2.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1 Persentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga (APMO)	%	45	45	39	47,00	18.824,00	49,00	80.301,00	51,00	82.521,00	53,00	85.241,00	53,00	270.557,00	Dispora
				2 Rasio ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan	Per jumlah Penduduk	33,34	33,34	33,34	0,00166 1 : 2,08		0,00173 4 : 2,08		0,00118 08 : 2,08		0,00188 7 : 2,08		0,00188 7 : 2,08		
				3 Persentase Kawasan GOR yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%)	%	16,66	16,66	16,66	16,66		49,98		66,64		100,00		100,00		
	1.1.3	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	1 Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang layak	%	NA	NA	NA	83,88			80,62		84,72		88,76		88,76		
			2 Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman (perpipaan)	%	91,44	92,58	81,46	68,49			64,28		67,38		70,42		70,42		
			3 Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak	%	NA	NA	67,10	69,91			70,93		72,01		73,10		73,10		
			4 Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	NA	NA	3,80	5,20			7,20		7,88		8,55		8,55		
			5 Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan Kota	%	2,62	0,00	2,44	2,27			2,12		1,94		1,77		1,77		
			6 Persentase Reduksi Sampah	%	6,26	6,89	6,40	6,60			6,80		7,00		7,20		7,20		

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target		Pagu Indikatif (Juta Rp)
									Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)			
1 03 03	1	Program 1.1.3.1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap ari minum melalui SPAM Jaringan perpipaan	%	91,44	92,58	70,90	68,49	3000,00	64,28	3300,00	67,38	3600,00	70,42	4000,00	70,42	15900,00	DPUPR
			2	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap ari minum melalui SPAM Bukan Jaringan perpipaan	%	0,54	0,25	0,71	56,60		59,30		62,00		67,40		67,40		
1 03 04	2	Program 1.1.3.2 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1	Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	%	NA	NA	NA	0,01	-	0,01	200,00	0,01	250,00	0,01	250,00	0,01	700,00	DLH
			2	Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	%	NA	NA	NA	0,02	-	0,02	250,00	0,02	275,00	0,02	300,00	0,02	825,00	
			3	Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	%	NA	NA	NA	100,00	9.460,30	100,00	10.000,00	100,00	16.000,00	100,00	17.000,00	100,00	68.857,20	
			4	Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi	%	NA	NA	NA	100,00	4.858,80	100,00	3.150,00	100,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	24.008,80	
1 03 05	3	Program 1.1.3.3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak (%)	%	67,21	64,14	67,47	69,91	9.500,00	70,93	227.000,00	72,01	260.000,00	73,10	237.600,00	73,10	746.150,00	DPUPR
			2	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman (%)	%	3,80	3,82	4,03	5,20		7,20		7,88		8,55		8,55		
1 03 07	4	Program 1.1.3.4 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1	Persentase Panjang Jalan lingkungan permukiman terstruktur yang berkondisi baik	%	44,64	48,72	52,92	60,6	98.400,00									DPUPR
			2	Persentase drainase lingkungan permukiman terstruktur berkondisi baik	%	20,31	21,21	23,53	29,18										
			3	Jumlah titik ecodrain pada jalan lingkungan perumahan	titik	NA	NA	0,00	60,00										
			4	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	Lokasi	745,00	844,00	863,00	985,00										



Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)		
								Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)				
1 04 02	5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	Persentase penyediaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota	%	70,00	-	75,00	80,00	2.516,20	85,00	3.258,20	90,00	2.580,00	95,00	34.640,00	95,00	42.994,40	Disperumkim
			2	Persentase tingkat hunian rumah susun	%	76,61	76,61	77,75	85,00	3.091,00	90,00	9.577,01	90,00	7.648,00	90,00	7.954,00	90,00	32.699,01	
			3	Jumlah rekomendasi teknis pendukung kebijakan yang dikeluarkan	dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	100,00	1,00	100,00	
1 04 03	6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	Luas Kawasan Kumuh yang belum tertangani	Ha	401,35	310,93	272,00	375,86	5.706,20	313,68	9.358,60	252,71	17.324,12	192,24	24.195,33	192,24	64.330,25	Disperumkim
1 04 05	7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	Persentase Perumahan dan permukiman dengan PSU yang berkondisi baik	%	68,44	74,50	76,29	81,65	48.040,70	84,33	52.524,95	87,01	35.514,00	89,69	121.850,00	89,69	367.399,65	Disperumkim
			2	Persentase Makam Umum per satuan Penduduk	%	11,71	12,25	12,00	11,38	2.188,00	11,40	7.149,00	11,41	4.993,00	11,38	7.983,00	11,38	25.996,00	
1 05 04	8	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1	Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran	%	1,47	1,47	1,47	2,94	287,00	4,41	300,00	5,88	325,00	7,35	350,00	7,35	1.542,00	DPKP
			2	Rata-Rata Respon time penanganan kebakaran	Menit	30 Menit	30 Menit	15,00	15,00	825,00	15,00	850,00	15,00	875,00	15,00	900,00	15,00	4.250,00	
2 11 11	9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1	Persentase Reduksi Sampah (%)	%	6,30	6,89	7,61	6,60	1.126,90	6,80	1.375,00	7,00	1.400,00	7,20	1.550,00	7,20	5.556,70	DLH
			2	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	%	76,00	77,04	77,20	74,50	10.655,40	77	16.700,00	77,5	17.500,00	78,00	17.500,00	78,00	72.412,60	
			3	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	%	195,900 m	48,80	48,80	48,80	4.785,50	48,80	5.150,00	48,80	6.000,00	48,80	7.000,00	48,80	25.186,10	
			4	Persentase peningkatan retribusi persampahan	%	9,50 Miliar	2,10	2,10	2,10	-	2,10	-	2,10	-	2,10	-	2,10	342,70	
1.1.4	Sasaran 4 :	Terkendalinya sumber-sumber pencemar dan /	1	Indeks Kualitas Air	Point	49,60	51,67	56,33	49,70		49,80		49,90		50,00		50,00		
			2	Indeks Kualitas Udara	Point	85,86	81,76	80,09	86,00		86,10		86,20		86,30		86,30		
1 03 02	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1	Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	%	90,00	91,01	91,04	91,69	21.700,00	92,54	23.870,00	93,38	26.257,00	94,23	26.257,00	95,16	117.684,00	DPUPR
			2	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	%	45,83	51,12	57,5	51,45	2.000,00	52,23	2.200,00	53,01	2.420,00	53,79	2.420,00	63,54	11.240,00	

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)					
								Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)							
			3	Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	Lokasi	6,00	6,00	6 LOKASI	1 LOKASI (TAMAN PERSADA)	1.600,00	1 LOKASI SITU ANGGALENA	3.000,00	1 LOKASI SITU PANJANG	3.000,00	1 LOKASI Kolam retensi	15.000,00	12 lokasi	24.700,00				
2	11	03	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Indeks Kualitas Air	Point	49,60	51,67	56,33	49,70	1.050,30	36,17	1.180,00	37,17	1.260,00	38,17	1.400,00	38,17	5.359,80	DLH	
						2	Indeks Kualitas Udara	Point	85,86	81,76	80,09		86,00		79,63		79,72		79,81			79,81
						3	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	NA	NA	3,92		5,87		177,00		7,11		250,00			7,72
2	11	05	3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	%	30,00	30,00	30,00	40,00	300,00	50,00	400,00	60,00	450,00	70,00	450,00	70,00	1.850,00	DLH	
2	11	06	4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	%	35,00	26,11	37,00	30,00	400,00	34,00	415,00	38,00	450,00	39,00	470,00	39,00	1.820,30	DLH	
2	11	08	5	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan pelaku usaha	%	11,00	11,00	11,00	20,00	316,70	30,00	550,00	40,00	650,00	50,00	750,00	50,00	2.769,00	DLH	
2	11	09	6	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan Hidup	%	3,00	3,97	5,29	6,62	533,80	7,94	700,00	9,26	850,00	10,59	1.000,00	10,59	3.553,80	DLH	
					2	Persentase sekolah adiwiyata (%)	%	30,00	30,00	30,00	33,00		35,00		36,00		38,00		38,00			

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target		Pagu Indikatif (Juta Rp)			
									Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (Juta Rp)						
2	11	10	7	Program 1.1.4.7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	275,00	DLH	
			1.1.5	Sasaran 5 :	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	1	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5,89	4,18	13,11	4,20		4,21		4,21		4,25		4,25		
2	11	04	1	Program 1.1.5.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)	Ha	437,21	465,87	465,93	1,70	1.442,58	1,00	12.670,87	0,80	15.000,00	0,80	16.000,00	470,22	48.341,45	Disperumkim
						2	Luas RTH Publik yang dikelola dengan baik (Ha)	Ha	41,13	41,87	43,44	43,49	7.285,47	45,29	14.569,79	46,29	8.329,80	47,29	11.749,80	47,29	38.924,00	Disperumkim
						3	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Ha	0,50	0,50	0,50	0,50	53,40	0,50	400,00	0,50	450,00	0,50	500,00	2,50	1.403,40	DLH

Tabel 6.4B

Penjabaran Prioritas Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah					
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)							
								Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)									
2		Misi 2 :	Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas																					
	2.1.	Tujuan 2.1 :	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter (<i>Smart People</i>)	1	Indeks Pendidikan	Point	71,50	71,62	71,68	72,28		73,26		74,22		75,21		75,21						
				2	Indeks Pembangunan Pemuda	Point	NA	NA	-	59,13		62,09		65,19		67,05		67,05						
				3	Indeks Inovasi Daerah	Point	600	30,640	5,162	611-620		621-630		631-640		641- 650		641- 650						
				4	Kategori Inovasi Daerah	Kategori						Inovatif		Inovatif		Inovatif		Inovatif						
	2.1.1	Sasaran 1 :	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal (<i>Smart People</i>) ;	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,30	10,32	10,33	10,53		10,62		10,74		10,87								
				2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,38	13,40	13,41	13,42		13,63		13,83		14,03		14,03						
1	01	02	1	Program 2.1.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	angka	49,04	58,98	44,8	50,55	1.180,00	51,00	1.823,00	51,50	1.850,00	52,00	1.875,00	52,00	7.901,00	Disdik				
						angka	112,40	108,63	107,27	113,05	16.000,00	113,08	48.000,00	114,00	50.000,00	114,30	52.000,00	114,30	210.829,00					
						angka	104,10	105,80	107,80	104,80	20.765,00	105,00	20.876,00	105,50	21.132,00	106,00	21.445,00	106,00	104.281,00					
1	01	03	2	Program 2.1.1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1	Persentase Kesiapan penyelenggaraan kurikulum sesuai dengan kebijakan nasional dan muatan lokal daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	Disdik		
						2	Persentase Kesiapan penyelenggaraan kurikulum Pendidikan Dasar sesuai dengan kebijakan nasional dan muatan lokal daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	0,00
						3	Persentase Kesiapan penyelenggaraan kurikulum PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan kebijakan nasional dan muatan lokal daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00	0,00
1	01	04	3	Program 2.1.1.3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	Persentase Pendidik PAUD dengan Kualifikasi minimal S1 (%)	%	67,00	42,82	69,90	68,90	7.130,00	69,00	7.150,00	69,30	7.200,00	69,80	7.250,00	69,80	35.850,00	Disdik		
						2	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	%	19,00	27,00	30,00	21,00	530,00	23,00	545,00	25,00	570,00	26,00	580,00	26,00	2.735,00			
						3	Persentase Tenaga Pendidik SD yang memiliki kompetensi (%)	%	53,00	49,97	54,30	55,00	9.150,00	56,00	9.200,00	57,00	9.250,00	58,00	9.270,00	58,00	45.970,00			
						4	Persentase Tenaga Pendidik SMP yang memiliki kompetensi (%)	%	53,00	46,50	57,06	55,00	3.250,00	56,00	3.300,00	57,00	3.350,00	58,00	3.400,00	58,00	16.500,00			

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah			
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)					
								Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)							
				5	Jumlah PTK Berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	orang	1,00	1,00	1,00	2,00	440,00	2,00	445,00	2,00	450,00	2,00	455,00	2,00	2.220,00			
1	01	05	4	Program 2.1.1.4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar oleh Masyarakat yang sesuai dengan Izin pendidikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	Disdik
						2	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan PAUD dan Non Formal oleh Masyarakat yang sesuai dengan Izin pendidikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
1	01	06	5	Program 2.1.1.5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1	Persentase Sekolah yang mengembangkan muatan lokal bahasa sunda dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	Disdik
			2.1.2	Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas generasi muda (<i>Smart People</i>)	1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Point	NA	NA	NA	59,13		62,09		65,19		67,05		67,05			
2	08	06	1	Program 2.1.2.1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Peringkat	Madya	Madya	Tidak ada Penilaian Kota Layak Anak	Nindya	70,00	Nindya	563,00	Nindya	897,00	Utama	930,00	Utama	930,00	DPPPA
2	08	07	2	Program 2.1.2.2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (%)	%	75,00	76,00	60,00	78,00	696,00	79,00	482,00	80,00	1.316,00	81,00	1.351,00	81,00	1.351,00	DPPPA
						2	Prevalensi kekerasan terhadap anak	angka	0,02	0,01	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01				
2	19	02	3	Program 2.1.2.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	%	20,00	20,00	20,00	0,00	1.825,62	0,00	4.834,00	20,00	5.300,00	20,00	4.851,00	60,00	19.560,00	Dispora
						2	Predikat Kota layak pemuda	Predikat	30,00	30,00	30,00	40,00		50,00		70,00		80,00		80,00		
2	19	04	4	Program 2.1.2.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	916,00	100,00	950,00	100,00	1.100,00	100,00	1.150,00	100,00	1.150,00	Dispora

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah				
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)					
								Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)							
2	23	02	5	Program 2.1.2.5	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota	%	61,98	100,00	40,00	100,00	9.180,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	16.600,00	Diarpus
				2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/ perpustakaan keliling/taman bacaan	%	102,10	31,98	NA	35,00	70,00	40,00	75,00	56,00	80,00	76,00	85,00	76,00	375,00			
			2.1.3	Sasaran 3	Meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat	1	Indeks Inovasi Daerah	Point	600	30,64	5,162	611-620										
						2	Kategori Inovasi Daerah	Kategori						Inovatif		Inovatif		Inovatif		Inovatif		
5	05	02	1	Program 2.1.3.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	%	NA	50	50	10,50	1.725,00	50,00	4.895,00	50,00	2.640,00	50,00	1.240,00	50,00	11.250,00	Bappeda
						2	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di implementasikan dan berkelanjutan	%	34,00	34,00	66,00	67,00		68,00		69,00		70,00		70,00		
						3	Prosentase inovasi masyarakat yang menunjang visi misi Kota Bogor	%	69,64	32,61	32,61	34,00		36,00		38,00		40,00		40,00		
			2.1.4	Sasaran 4 :	Meningkatnya pemberdayaan, partisipasi, gotong royong, kerukunan, toleransi dan	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	67,37	68,91	69,03	70,50		71,50		72,50		73,50		73,50		
						2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	angka	NA	NA	68,51	71,00		71,50		72,00		72,50		72,50		72,50
6	05	02	1	Program 2.1.4.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Persentase Penegakan Perda	%						90,00	255,00	90,00	275,00	90,00	300,00	90,00	830,00	Satpol PP
						2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%						90,00	1.800,00	90,00	2.000,00	90,00	2.200,00	90,00	2.200,00	
2	08	02	2	Program 2.1.4.2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1	Persentase perempuan berpolitik (%)	%	17	18,18	22,00	22,00	551,00	22,00	1.073,00	22,00	1.457,00	22,00	1.553,00	22,00	1.553,00	DPPPA
						2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	%	70,00	75,00	100,00	80,00		82,00		84,00		86,00		86,00		
2	08	05	3	Program 2.1.4.3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak	%	70,00	75,00	78,00	80,00	101,00	82,00	153,00	84,00	170,00	86,00	190,00	86,00	190,00	DPPPA
2	08	03	4	Program 2.1.4.4	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan (%)	%	75,00	76,00	52,45	78,00	336,00	79,00	189,00	80,00	264,00	81,00	357,00	81,00	357,00	DPPPA
						2	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,024	0,014	0,011	0,011		0,011		0,009		0,009		0,009		
2	22	02	5	Program 2.1.4.5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	13,00	15,00	15,00	15,00	2.675,24	17,00	486,00	19,00	1.790,00	21,00	2.050,00	21,00	9.354,00	Disparbud



Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah				
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)					
								Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)							
2	22	03	6	Program 2.1.4.6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	%	10,00	10,00	10,00	5,00	903,09	7,00	781,00	8,00	1.500,00	10,00	1.750,00	10,00	4.934,00	Disparbud
2	22	04	7	Program 2.1.4.7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1	Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	sarana	NA	NA	NA	0,00	0,00	6,00	0,00	7,00	400,00	7,00	450,00	7,00	850,00	Disparbud
						2	Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah	orang	NA	NA	NA	0,00	0,00	195,00	0,00	200,00	250,00	200,00	300,00	200,00	550,00	
2	22	05	8	Program 2.1.4.8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1	Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan	unit	18,00	18,00	18,00	18,00	1.000,34	25,00	5.365,00	25,00	180,00	25,00	180,00	25,00	6.725,00	Disparbud
2	22	6	9	Program 2.1.4.9	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	%	NA	NA	NA	NA	0,00	0,00	NA	25,00	1.000,00	25,00	1.000,00	50,00	2.000,00	Disparbud
1	06	7	10	Program 1.06.10	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.368	100,00	815,76	100,00	764,00	100,00	862,40	100,00	862,40	Dinsos
2	13	05	11	Program 2.1.4.11	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1	persentase lembaga kemasyarakatan yg aktif di kelurahan	persen	45,00	50,00	55,00	60,00	275,00	65,00	300,00	70,00	325,00	75,00	350,00	75,00	1500,00	Bag. Kesra
						2	persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, RT, RW) Tingkat kecamatan yang aktif	%										65,00	36,00	70,00	36,00	75,00
9	01	04	12	Program 2.1.4.12	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan	%														
8	01	02	13	Program 2.1.4.13	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk	rasio	3.950 orang	NA	0,06	12,75	200,00	13,00	299,00	13,25	200,00	13,50	200,00	13,50	1.000,00	Bakesbangpol
8	01	03	14	Program 2.1.4.14	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1	Persentase Partisipasi Partai Politik dalam Pemilu	%	pilwalkot = 75,35 Pilgub = 75,37 Pilpres = 83,87	Pilpres dan pileg = 84,5	0,00	0,00	650,00	0,00	750,00	0,00	850,00	100,00	950,00	100,00	3.750,00	Bakesbangpol
						2	Persentase Partisipasi Perempuan sebagai anggota legislatif	%	39,90	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah							
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)									
								Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)											
8	1	04	15	Program 2.1.4.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif dan berdaya	%	20,00	20,00	44,00	25,00	2.000,00	30,00	2.500,00	35,00	3.000,00	40,00	3.500,00	40,00	11.384,00	Bakesbangpol				
8	01	05	16	Program 2.1.4.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1	Penurunan jumlah Pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika persatuan penduduk melalui upaya deteksi dini	Angka	0,00015	NA	0,00012	0,00011	200,00	0,00090	250,00	0,00070	300,00	0,00050	350,00	0,00050	1.250,00	Bakesbangpol				
8	01	06	17	Program 2.1.4.17	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1	Persentase potensi Konflik Sara yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.500,00	100,00	4.000,00	100,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00	17.058,00	Bakesbangpol				
9	01	03	18	Program 2.1.4.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Pelayanan administrasi di tingkat kelurahan	%							100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan			
						2	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	%							100,00		100,00		100,00		100,00			100,00		231.352,00
						3	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	%							100,00	3.382,00	100,00	3.551,00	100,00	3.700,00	100,00	3.700,00		100,00	10.633,00	
			2.2	Tujuan 2.2 :	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government) ,	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	BB	BB			A		A		A		A					
						2	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Scattered	Integrative	Integrative			Integrative		Integrative		Integrative		Integrative					
			2.2.1	Sasaran 1 :	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	BB	BB			A		A		A		A					
2	13	4	1	Program 2.2.1.1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1	Persentase kelurahan yang melaksanakan pemutakhiran profil kelurahan	%	87,00	90,00	90,00	100,00	181,00	100,00	181,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	762,00	Bag. Pem		
2	13	2	2	Program 2.2.1.2	PROGRAM PENATAAN DESA	1	Penyelenggaraan penataan desa	persen	NA	NA	NA	80,00	50,00	85,00	99,00	90,00	124,00	90,00	125,00	90,00	798,00	Bag. Kesra				
2	20	02	3	Program	PROGRAM PENYELANGGARAAN	1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	NA	NA	76	76,00	143,00	79,00	400,00	82,00	1400,00	85,00	1550,00	85,00	3570,00	Diskominfo				



Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah					
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)							
								Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)									
2	20	02	0	2.2.1.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2	Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	%	NA	NA	NA	0,2	83,00	0,30	115,00	0,40	1.950,00	0,50	2.090,00	0,50	4365,00	Diskominfo		
2	21	02	4	2.2.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	NA	Level 1	Level 1	Level 1	1.100,00	Level 2	1.660,00	Level 2	1.810,00	Level 2	2.100,00	Level 2	8.370,00	Diskominfo		
2	24	02	5	2.2.1.5	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1	Persentase PD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib/baku	%	17,00	70,00	NA	38,00	250,00	58,00	255,00	79,00	260,00	100,00	265,00	100,00	1.278,00	Diarpus		
2	24	03	6	2.2.1.6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1	Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan	%	100,00	27,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00	100,00	150,00	100,00	175,00	500,00	625,00	Diarpus		
2	24	04	7	2.2.1.7	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	1	Persentase Perizinan penggunaan arsip yang dilaksanakan sesuai SOP	%	64,00	NA	75,00	85,00	0,00	95,00	0,00	100,00	50,00	100,00	75,00	100,00	75,00	Diarpus		
4	01	02	8	2.2.1.8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	Prosentase rekomendasi kebijakan bina mental yang ditindaklanjuti	%	80,00	83,40	78,00	80,00	8.342,00	85,00	8.677,00	85,00	9.621,00	90,00	10.431,00	90,00	43.123,00	Bag. Kesra		
						2	Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai dengan perjanjian kerjasama	%	70,00	70,00	70,00	75,00	1.035,00	80,00	1.075,00	85,00	1.115,00	90,00	1.145,00	90,00	4.985,00	Bag. Pem		
						3	Prosentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00			
						4	Presentasi indikator kinerja kunci yg mencapai target	Point	3,10	3,30	-	3,15	175,00	3,17	185,00	3,20	195,00	3,22	205,00	3,22	840,00			
						5	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	%	90	100,00	100,00	95,00	1.425,00	95,00	1.425,00	95,00	1.425,00	95,00	1.425,00	95,00	1.425,00	95,00	6.509,00	Bag. Huk. HAM
						6	Prosentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	%	100	100,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	4.515,00	
4	01	03	9	2.2.1.9	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1	Tingkat Pemanfaatan sistem informasi dalam pengadaan barang dan jasa	poin	NA	NA	0,00	20,00	919,58	24-26	1.004,66	25-27	1.150,00	26-28	1.250,00	26-28	40	5.224,24	Bag. PBJ	
						2	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	NA	NA	0,00	17,78		40,00		40		40		40				
						3	Tingkat Pemenuhan JF PPBJ di lingkungan UKPBJ	poin	NA	NA	0,00	5,38		5-6		6-7		7-8		7-8				
						4	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	%	84,51	87,91	89,13	90	697	91	1.010	92	1.460	93	1.665	93	5.529	Bag. Adbang		
						1	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	8.303,00	100,00	9.146,88	100,00	11.725,00	100,00	15.242,69	100,00	44.417,71	Bag. Umum		

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah	
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)			
								Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)					
x xx 01	10	Program 2.2.1.10 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2	Persentase Pelayanan keprotokolandan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.157,00	100,00	2.382,00	100,00	2.626,00	100,00	2.889,00	100,00	10.059,00	Bag. Prokompim	
			3	Nilai rata-rata indeks Kepuasan Masyarakat	Point	3,31	3,22	3,34	3,35	325,00	3,40	250,00	3,40	250,00	3,50	250,00	3,50	1.800,00	Bag. Org	
			4	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota	Point	B	BB	BB	BB	250,00	A	224,00	A	250,00	A	250,00	A	1.574,00		
			5	indeks kematangan organisasi	Point	3,84	44,9	45,41	45,55	525,00	45,69	250,00	46,11	300,00	46,52	300,00	46,52	2.325,00		
			6	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Point	3,31	3,22	3,34	3,35	10.548,10	3,40	12.971,10	3,40	13.284,16	3,50	13.284,08	3,50	60.861,24	Seluruh Perangkat Daerah	
			7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Point	B	BB	-	BB		A		A		A		A		A	Seluruh Perangkat Daerah
			8	Gap Analysis Kompetensi	%	NA	NA	NA	30,00	358,00	30,00	1.253,00	25,00	1.284,00	20,00	1.316,43	20,00	4.220,76	l t d a	
			4 02 02	11	Program 2.2.1.11 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu Sesuai Prolegda	%	80,00	50,00	40,00	80,00	64.844,00	85,00	64.844,00	85,00	64.844,00	90,00	64.844,00	90,00
2	Persentase Perda yang Disosialisasikan	%				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
3	Persentase Rapat dan Risalah Rapat yang Berkualitas	%				70,00	80,00	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00		85,00						
5 01 02	12	Program 2.2.1.12 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1	Persentase ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	%	75,00	61,11	64,82	67,00	1.830,00	69,00	1.835,00	71,00	1.840,00	73,00	1.945,00	73,00	9.275,00	Bappeda	
			2	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	21,00	22,90	22,90	23,00		24,00		25,00		26,00		26,00			
			3	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85,00	100,00	100,00	90,00		95,00		95,00		100,00		100,00			100,00
			4	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	5,00	5,00	11,00	7,00		20,00		23,00		25,00		25,00			
			5	Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	24,00	40,62	19,34	10,00		12,00		12,00		12,00		12,00			12,00



Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah							
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)									
								Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)											
5	01	03	13	Program 2.2.1.13	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah bidang Pembangunan Manusia dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	67,7	76,33	77,83	77,00	2.955,00	79,00	3.950,00	82,00	3.045,00	85,00	3.090,00	85,00	15.950,00	Bappeda				
						2	Persentase Keselarasan Rencana pembangunan Daerah bidang pemerintahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	67,7	76,33	77,83	77,00											79,00	82,00	85,00	85,00
						3	Persentase keselarasan rencana pembangunan Daerah bidang perekonomian dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	67,7	76,33	77,83	77,00											79,00	82,00	85,00	85,00
						4	Persentase Keselarasan Rencana pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Wilayah dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	67,7	76,33	77,83	67,00											79,00	82,00	85,00	85,00
						5	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang pembangunan manusia	%	75,00	76,33	77,83	67,00											69,00	71,00	73,00	73,00
						6	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang pemerintahan	%	75	76,33	77,83	67,00											69,00	71,00	73,00	73,00
						7	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang perekonomian dan SDA	%	75	76,33	77,83	67,00											69,00	71,00	73,00	73,00
						8	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Wilayah	%	75	76,33	77,83	NA											69,00	71,00	73,00	73,00
5	02	02	14	Program 2.2.1.14	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	31.250,00	100,00	31.350,00	100,00	31.350,00	100,00	31.350,00	100,00	31.350,00	BKAD				

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah									
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)										
								Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)												
5	02	03	15	Program 2.2.1.15	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	%	80,00	80,00	81,00	82,00	5.250,00	83,00	5.200,00	84,00	5.630,00	85,00	5.850,00	85,00	5.850,00	BKAD					
7	03	02	16	Program 2.2.1.16	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	Point						105,00			110,00			120,00		120,00	BKPSDM				
						2	Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan	Point	75,00	98.34	98.67	83,00															
						3	Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian	Point						44,00			44,00					49,00				49,00	
						4	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu	Point	100,00	100,00	100,00	100,00															
						5	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	Point						125,50			128,00			134,00		134,00					
5	03	03	17	Program 2.2.1.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Diklat	Point						25,50		30,50		33		33		BKPSDM					
6	1	2	18	Program 2.2.1.18	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1	Prosentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	75,68 (CC)	97,03 (CC)	73,34	70,27		75,00			78,00		80,00		80,00		l t d a				
						2	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00			100,00		100,00		100,00			100,00			
						3	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	%	83,77	76,25	69,33	80,00	114,58	90,00	615,32	90,00	751,70	90,00	920,67	90,00	90,00	2.822,27					
						4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	%	95,07	94,26	94,39	75,00		80,00			85,00		90,00		90,00						
						5	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	NA	75,68	75,68	80,00		85,00			90,00		95,00		95,00						
					PROGRAM PERUMAHAN	1	Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah	%	43,24	NA	85	80,00		82,00		85,00		90,00		90,00							



Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah			
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)					
								Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)							
6	1	3	19	Program 2.2.1.19	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	324,63	6,00	440,48	1,00	616,67	1,00	863,34	8,00	2.538,12	l t d a
				3	Persentase Capaian MCP KPK	%	69,00	87,00	87,00	76,31	76,45	76,56	77,00	77,00								
7	01	02	20	Program 2.2.1.20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Pelayanan administrasi di tingkat kecamatan	%						100,00	295,00	100,00	300,00	100,00	325,00	100,00	920,00	Kecamatan
				2	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan	%						100,00	360,00	100,00	360,00	100,00	360,00	100,00	1.080,00			
				Sasaran 2 :	Meningkatnya kualitas layanan kegiatan ekonomi masyarakat, kualitas pengelolaan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	1	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Scattered	Integrative	Integrative		Integrative		Integrative		Integrative		Integrative		
1	5	3	1	Program 2.2.2.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1	Pelayanan informasi Kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	%	100	100	100	100		100		100,00	550,00	100,00	600,00	100,00	1.150,00	BPBD
2	12	04	2	Program 2.2.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan yang telah terintegrasi	%	63,00	64,00	69,00	75,00	320,00	81,00	2.030,00	87,00	2.740,00	95,00	3.360,00	95,00	8.770,00	Disdukcapil
2	16	03	3	Program 2.2.2.3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1	Nilai Keterbukaan Informasi publik	level	NA	NA	Cukup Informatif	Cukup Informatif	7.860,00	Cukup Informatif	8.724,00	Cukup Informatif	12.013,00	Cukup Informatif	13.120,00	Cukup Informatif	44.634,00	Diskominfo
2	16	03	4	Program 2.2.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Index	NA	2,29	2,29	2,71	197,00	2,72	270,00	2,73	350,00	2,74	430,00	2,74	1.324,00	Diskominfo
						2	Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Index	NA	3,00	3,00	3,00	125,00	3,10	150,00	3,20	175,00	3,30	200,00	3,30	775,00	
						3	Nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi	index	NA	NA	NA	2,33	16.300,00	2,34	17.100,00	2,35	17.725,00	2,36	18.125,00	2,36	69.250,00	
						4	Nilai aspek penerapan manajemen SPBE	Index	NA	NA	NA	2,70	1.940,00	2,80	7.140,00	2,90	14,95	3,00	2.490,00	3,00	13.065,00	

Tabel 6.4C

Penjabaran Prioritas Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah					
						Capaian		2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)						
						2018	2019	2020	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target				Pagu Indikatif . (Juta Rp)				
	3	Misi 3 :	Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera																				
	3.1	Tujuan 1 :	1	Indeks Gini Rasio	Point	0,413	0,408	0,412	0,380		0,370		0,350		0,340		0,340						
			2	Indeks Kebahagiaan	Point	NA	NA	NA	71-72		72-73		73-74		74-75		74-75						
	3.1.1	Sasaran 1 :	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,65	9.10	12.68	11.79		11,32		10,84		10,37		10,37						
2	07	03	1	Program 3.1.1.1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1	Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat Kompetensi	%	NA	NA	NA	90,00	1189,00	90,00	983,00	100,00	1666,00	100,00	1843,00	100,00	5.682	Disnaker	
			2			2	persentase perusahaan yang memiliki produktivitas tenaga kerja tinggi	%	NA	NA	NA	5,00		6,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00			
2	7	4	2	Program 3.1.1.2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	NA	NA	NA	62.30	1.071,00	63.50	850,00	64.70	982,00	65.60	997,00	65.60	55,00	Disnaker	
2	7	5	3	Program 3.1.1.3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1	Persentase rekomendasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit yg ditindaklanjuti	%	NA	NA	NA	100,00	254,00	100,00	279,00	100,00	307,00	100,00	353,00	100,00	1.195,00	Disnaker	
			2			2	Penetapan Besaran UMK	Rupiah	3842785	4.169.806	4.169.806	4.330.249		4.350.249		4.370.249		4.390.249		4.390.249			
3	26	05	4	Program 3.1.1.4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1	persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	%	NA	NA	NA	NA	165,80	NA	478,68	0,16	600,00	0,83	1.050,00	0,83	2.294,00	Disparbud	
			2			2	jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	%	NA	245,00	15,00	30,00	152,04	30,00	466,08	30,00	800,00	30,00	1.000,00	30,00	2.418,12		
			3.1.2	Sasaran 2 :	Menurunnya tingkat kemiskinan	1	Angka Kemiskinan	%	5,93	5,77	6,68	7,24		6,90		6,56		6,21		6,21			
1	6	2	1	Program 3.1.2.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	%	23,47	27,85	77,05	100,00	617,13	100,00	748,20	100,00	889,66	100,00	978,63	100,00	978,63	978,63	Dinsos
						2	Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%)	%	23,47	28,85	77,05	81,05		84,00		85,00		85,00		85,00		85,00	
1	6	4	2	Program 3.1.2.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1	Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi	%	18,80	63,79	100,00	100,00	252,78	100,00	229,29	100,00	751,98	100,00	827,18	100,00	909,85		
						2	Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	%	79,00	22,72	100,00	100,00	18,00	100,00	317,67	100,00	50,00	100,00	110,00	100,00	110,00	110,00	Dinsos

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah		
						Capaian		2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)			
						2018	2019	2020	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target				Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
			3	Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	111,22	100,00	85,62	100,00	90,00	100,00	99,00	100,00	99,00		
			4	Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos	%	100,00	100,00	100,00	100,00	67,72	100,00	127,66	100,00	135,00	100,00	140,43	100,00	140,43		
			5	Jumlah lansia yang berdaya	Orang	150,00	100,00	46,00	100,00	227,70	100,00	150,00	100,00	126,97	100,00	139,67	500,00	139,67		
1	06	05	3	Program 3.1.2.3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																
			1	persentase jumlah PMKS yang tertangani	%	91,45	75,32	66,30	85,00	149,91	87,00	198,39	88,00	574,49	88,50	631,94	88,50	631,94	Dinsos	
			2	persentase KK miskin	%	1,45	75,32	66,30	20,70	601,82	19,57	450,33	19,26	266,97	18,46	293,66	18,46	293,66	Dinsos	
			3	Persentase penurunan anak terlantar	%	2,07	75,32	66,30	72,21	69,60	82,60	269,32	91,69	135,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinsos	
1	6	6	4	Program 3.1.2.4 PROGRAM PENANGANAN BENCANA																
			1	Prosentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	285,35	100,00	462,90	100,00	550,00	100,00	605,00	100,00	605,00	Dinsos	
4	01	02	5	Program 3.1.2.5 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																
			1	Prosentase rekomendasi kebijakan kesejahteraan yang ditindaklanjuti	%	73,00	74,00	75,00	80,00	21.918,00	85,00	33.595,00	85,00	56.078,00	90,00	56.240,00	90,00	168.888,00	Bag. Kesra	
2	05	03	6	Program 3.1.2.6 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																
			2	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan										100,00	140,00	100,00	140,00	100,00	281,00	BPBD
			3.1.3	Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan keluarga																
			1	Indeks Ketahanan Keluarga	angka	NA	NA	85,20	74-76					76-78		76-78		76-78		
1	05	03	1	Program 3.1.3.1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																
			1	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	%	16,17	23,53	23,53	29,41	275,00	32,35	300,00	41,18	600,00	50,00	600,00	50,00	2.025,00	BPBD	
			2	Persentase Sekolah aman bencana	%	2,15	3,05	3,41	3,76	175,00	4,12	200,00	5,20	250,00	6,27	275,00	6,27	1.050,00	BPBD	
1	04	04	2	Program 3.1.3.2 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH																
			1	Persentase Rumah Layak Huni	%	70,60	74,80	77,03	76,79	46.084,00	78,77	52.227,83	80,76	87.500,00	82,74	98.525,00	82,74	284.727,00	Disperumkim	
2	8	4	3	Program 3.1.3.3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																
			1	Indeks Ketahanan Keluarga	Point	NA	NA	85,20	74-75	1.768,00	75-76	1.713,00	76-77	1.940,00	76-77	1.751,00	76-77	1.751,00	DPPPA	

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah					
						2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target		Pagu Indikatif . (Juta Rp)				
									Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)							
2 09 3	4	Program 3.1.3.4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Daerah	%	N/A	N/A	NA								42,86	375,00	57,14	500,00	100,00	875,00	DKPP
2 09 03	5	Program 3.1.3.5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1	Ketersediaan energi	Kkal /Kapita/ Hari	2.512,80	2.592,90	2.375,00	2.400,00	217,58	2.247,00	209,49	2264,00	268,00	2.281,00	218,00	2.281,00	1.441,43	DKPP			
				2	Ketersediaan Protein	Gr/ Kapita/ Hari	89,40	110,30	68,00	63,00		64,30		65,00		65,70		65,70					
2 9 4	6	Program 3.1.3.6	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1	Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan	%	18,30	12,39	25,96	15,7	97,86	16,21	90,00	16,01	228,00	15,81	128,00	15,81	777,70	DKPP			
2 12 2	7	Program 3.1.3.7	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP	%	99,30	98,00	98,00	97,00	250,00	98,00	2.000,00	98,50	2.850,00	99,00	3.000,00	99,00	8.300,00	Disdukcapil			
				2	Persentase Penduduk yang memiliki KK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	2.000,00	100,00	2.250,00	100,00	2.850,00	100,00	7.450,00				
				3	Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	%	15,00	20,00	23,00	30,00	300,00	50,00	3.860,00	60,00	4.550,00	80,00	5.650,00	80,00	14.590,00				
2 12 3	8	Program 3.1.3.8	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1	Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran	%	94,07	94,07	95,00	96,00	550,00	97,00	3.000,00	98,00	4.000,00	99,00	4.500,00	99,00	10.200,00	Disdukcapil			
				2	Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	%	31,00	51,00	31,00	34,00	440,00	35,00	3.900,00	40,00	4.400,00	45,00	5.400,00	45,00	15.000,00				
2 12 05	9	Program 3.1.3.9	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	1	Jumlah dokumen profil kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	160,00	100,00	600,00	100,00	650,00	100,00	700,00	100,00	2.500,00	Disdukcapil			
2 14 2	10	Program 3.1.3.10	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1	Persentase Kebijakan dan Program kerja daerah untuk pengendalian jumlah penduduk yang terimplementasi sesuai dengan rencana	%	NA	NA	NA	75,00	58,88	75,00	994,76	75,00	850,00	75,00	1.000,00	75,00	3.053,99	DPPKB			
				2	Persentase PIK R Aktif	%	37,5	40,68	49,18	52,46		55,74		59,02		62,29		62,29					
2 14 04	11	Program 3.1.3.11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan) aktif	%	-	-	69,08	69,49	909,94	69,77	1.028,57	70,04	900,00	70,31	1.000,00	70,31	4.096,39	DPPKB			

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah		
						2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target		Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
									Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)				
	3.2	Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah	1 Laju Pertumbuhan ekonomi	%	6,14	6,04	-0,53	3,57		5,37		5,53		6,04		6,04				
			2 Indeks Daya Saing Daerah	Kategori	NA	Sedang	Tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi				
			1 PDRB (Atas Dasar Harga Konstan)	Trilyun Rp.	30,414	32,254	32,084	33,229		35,013		36,950		39,181		39,181				
			2 PDRB Perkapita (Atas Dasar Harga Berlaku)	Trilyun Rp.	37,99	46,22	40,36	42,73		45,10		47,47		49,84		49,84				
			3 Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp.	10.940,00	11.825,00	11.564.00	11.413,00		11.534,00		11.657,00		11.825,00		11.825,00				
			4 Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	19,68	19,22	19,11	22,00		23,00		24,00		25,00		25,00				
5	05	02	1	Program 3.2.1.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	Jumlah kampung tematik/ kampung wisata	Lokasi	NA	NA	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00	Bappeda	
2	17	2	2	Program 3.2.1.2	PROGRAM PELAYANAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM	1	persentase peningkatan koperasi berijin	%	N/A	N/A	N/A	20,00	90,79						DKUKM	
2	17	3	3	Program 3.2.1.3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1	persentase koperasi yg berkualitas	%	N/A	N/A	N/A	62,50	63,28						DKUKM	
3	18	4	4	Program 3.2.1.4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1	Persentase Koperasi yang sehat	%	N/A	N/A	N/A	62,50	83,65						DKUKM	
4	19	5	5	Program 3.2.1.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di	%	N/A	N/A	N/A	30,00	73,68						DKUKM	
2	17	6	6	Program 3.2.1.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1	Persentase Koperasi aktif	%	N/A	N/A	N/A	6,88	1.080,92						DKUKM	
2	17	7	7	Program 3.2.1.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1	Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	%	N/A	N/A	N/A	10,00	2.600,00						DKUKM	
2	17	8	8	Program 3.2.1.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1	persentase usaha mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	%	N/A	N/A	N/A	12,00	2.250,00						DKUMKM	
2	18	02	9	Program 3.2.1.9	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1	Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	300,00	100,00	400,00	100,00	500,00	DPMPSTP

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah				
								2021		2022		2023		2024								
						2018	2019	2020	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target		Pagu Indikatif . (Juta Rp)			
2	18	03	10	Program 3.2.1.10	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	Nilai Investasi	Trilyun Rp.	3,10	2,60	1,60	2,53	400,00	2,50	950,00	2,58	450,00	2,60	950,00	2,60	950,00	DPMPTSP
2	18	04	11	Program 3.2.1.11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1	Persentase Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	%	64,00	70,00	75,00	85,00	3.060,00	95,00	3.570,00	100,00	4.100,00	100,00	4.600,00	100,00	4.600,00	DPMPTSP
2	18	05	12	Program 3.2.1.12	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1	Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	350,00	100,00	600,00	100,00	750,00	100,00	900,00	100,00	900,00	DPMPTSP
2	18	06	13	Program 3.2.1.13	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00	750,00	DPMPTSP
3	25	04	14	Program 3.2.1.14	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1	Persentase peningkatan produksi perikanan	%														DKPP
3	25	07	15	Program 3.2.1.15	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	N/A	N/A	N/A			2,00	67,77	3,00	70,00	4,00	70,00	4,00	207,77	DKPP
3	26	2	16	Program 3.2.1.16	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1	Tingkat Hunian Akomodasi	%	NA	NA	NA	50,00	1.275,00	55,00	478,47	60,00	1.400,00	70,00	2.550,00	70,00	6.640,61	Disparbud
						2	Persentase kunjungan wisatawan	%	NA	NA	NA	5,00	1.275,00	10,00	478,50	10,00	1.400,00	10,00	2.550,00	35,00	5.703,00	
3	26	3	17	Program 3.2.1.17	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	7.965.987	9.160.885	3.457.722	3803494	351,64	4183843	459,00	4602227	1.350,00	5062449	1.630,00	5062449	3.791,00	Disparbud
3	26	4	18	Program 3.2.1.18	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Produk	70,00	70,00	40,00	40,00	-	40,00	153,17	40,00	800,00	40,00	1.200,00	40,00	2.630,00	Disparbud
29	04		19	Program 3.2.1.19	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1	Persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura	%	N/A	N/A	N/A			10,35	414,64	39,46	525,00	50,19	535,00	100,00	2.148,64	DKPP
						2	Persentase pemenuhan sarana peternakan	%	N/A	N/A	N/A			17,13	189,00	33,33	215,00	49,54	270,00	100,00		

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah				
								2021		2022		2023		2024								
								2018	2019	2020	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target				Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target
3	27	05	20	Program 3.2.1.20	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	Persentase pengelolaan kawasan LP2B	%	N/A	N/A	N/A			5,00	152,50	10,00	300,00	12,20	1.500,00	27.871,74	DKPP	
				2	Persentase pemeliharaan prasarana pertanian	%	N/A	N/A	N/A			80,00	574,99	85,00	11.126,75	90,00	14.217,50	90,00				
3	27	06	21	Program 3.2.1.21	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1	Persentase luas lahan sawah yang dikendalikan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	%	N/A	N/A	N/A			39,25	5,78	39,25	6,00	39,25	6,50	39,25	18,28	DKPP
3	27	7	22	Program 3.2.1.22	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1	Cakupan bina kelompok tani	%	68,96	69,35	75,08			75,87	149,31	76,25	142,31	76,62	147,31	76,62	438,94	DKPP
3	30	2	23	Program 3.2.1.23	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	11,17	7,21	21,06	21,50	4,60									Disperdagin
3	30	03	24	Program 3.2.1.24	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1	Persentase Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	%	0,26	0,52	1,03	1,53	199,00									Disperdagin
3	30	04	25	Program 3.2.1.25	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1	Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau	%	3,69	N/A	4,00	9,00	225,00									Disperdagin
3	30	05	26	Program 3.2.1.26	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1	Nilai Realisasi Ekspor	USD	85.581.555	99.283.771,63	95.674.216,07	71.710.150,65	270,00									Disperdagin
3	30	06	27	Program 3.2.1.27	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1	Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran	%	2,59	6,81	10,82	11,36	150,00									Disperdagin
3	30	07	28	Program 3.2.1.28	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1	Persentase Produk Pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya	%	N/A	N/A	19,00	20,32	670,00									Disperdagin
3	31	02	29	Program 3.2.1.29	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1	Persentase peningkatan IKM yang produktif	%	8,11	30,30	-2,99	2,00	1.100,00									Disperdagin
3	31	03	30	Program 3.2.1.30	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	1	Persentase Jumlah perusahaan yang berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%														DinKUKMDagin
4	01	03	31	Program	PROGRAM PEREKONOMIAN	1	Tingkat Inflasi Tahunan	%	3,69	3,02	2,18	2-4	350,00									Bag. Ekon

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024											Kondisi Akhir		Perangkat Daerah				
						Capaian				2021				2022			2023				2024		
						2018	2019	2020	2021	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target		Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	
		3.2.1.31	DAN PEMBANGUNAN	2	Presentase BUMD yang Sehat	%	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00	50,00	500,00	50,00	600,00	50,00	500,00	50,00	1.075,00	Bapenda			
5	02	04	32	Program 3.2.1.32	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						4,24		5,96		6,56		7,210,00		29.702,00	Bapenda			
				1	Nilai pajak daerah	dalam Juta Rp.	592.979	689.495	509.042	565.600		716.175		787.793		866.572		866.573					
				2	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	6,75	16,28	-26,17	28,55		26,62		10,00		10,00		10,00					
				3	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dalam Juta Rp.	718.549	1.013.756	840.415	966.463		1.042.635		1.133.107		1.226.673		1.226.673					
				4	Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah	%	-20,32	41,08	-17,10	30,33		7,88		8,68		8,26		8,26					
			3.2.2	Sasaran 2 :	Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi																		
				1	Persentase realisasi rencana struktur ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	0	20,00	20,00	40,00		60,00		80,00		100,00		100,00					
				2	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (periode rencana 2020-2024)	%	0	20,00	20,00	40,00		60,00		80,00		100,00		100,00					
1	3	8	1	Program 3.2.2.1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG															DPUPR			
				1	Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan	%	80,00	93,70	88,00	84,00	299,00	86,00	250,00	88,00	300,00	90,00	350,00	90,00	1.399,00				
				2	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%) terhadap IMB yang dikeluarkan	%	90,00	99,65	99,15	92,00	35.360,00	94,00	3.000,00	96,00	2.500,00	98,00	1.000,00	98,00	1.400,00				
				3	Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF	%						10,00	200,00	11,00	250,00	12,00	300,00	33,00	750,00				
1	3	9	2	Program 3.2.2.2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA															DPUPR			
				1	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RDTRK	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20,00	700,00	40,00	700,00	40,00	1.400,00				
1	3	11	3	Program 3.2.2.3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI															DPUPR			
				1	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	%	50,00	50,00	50,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	825,00	100,00	825,00	100,00	2.330,00				
1	3	12	4	Program 3.2.2.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG															DPUPR			
				1	Persentase (%) Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	%	N/A	N/A	N/A	40,00	3.050,00	60,00	5.600,00	80,00	5.900,00	100,00	4.700,00	100,00	21.500,00				

Kode Rekening	No.	Misi / Tujuan Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah				
								2021		2022		2023		2024								
						2018	2019	2020	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (Juta Rp)	Target		Pagu Indikatif . (Juta Rp)			
2	10	04	5	Program 3.2.2.5	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1	persentase Sengketa Tanah yang difasilitasi sesuai SOP	%	83,00	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	Bag. Pem	
2	11	2	6	Program 3.2.2.6	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	549,90	100,00	550,00	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00	2.676,90	DLH
			3.2.3	Sasaran 3:	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur dan transportasi	1	Persentase Jalan yang Berkondisi mantap	%	88,50	88,79	83,47	84,50		86,00		88,00		90,00		90,00		
						2	Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	%	45,00	47,5	32,00	40,00		44,00		44,00		44,00		44,00		
1	3	10	1	Program 3.2.3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1	Persentasae jalan yang terbangun	%	N/A	N/A	N/A	84,50	14.900,00	86,00	45.000,00	88,00	50.000,00	90,00	55.000,00	90,00	173.172,33	DPUPR
						2	Persentasae jalan yang ditingkatkan	%	N/A	N/A	N/A	84,50	17.000,00	86,00	17.500,00	88,00	18.000,00	90,00	18.500,00	90,00	88.000,00	
						3	Persentasae jalan yang dipelihara	%	N/A	N/A	N/A	71,00	23.000,00	72,00	23.500,00	73,00	24.000,00	74,00	24.500,00	74,00	118.000,00	
						4	Persentasae jembatan yang terbangun	%	N/A	N/A	N/A	34,00	596,00	60,00	2.800,00	62,00	80.000,00	64,00	100.000,00	64,00	183.396,00	
						5	Persentasae jembatan yang ditingkatkan	%	N/A	N/A	N/A	34,49	1.300,00	56,97	4.600,00	58,09	165.000,00	58,09	80.000,00	58,09	250.900,00	
						6	Persentase pembanguan/ peningkatan jalur pedestrian	%	N/A	N/A	N/A	38,00	40.000,00	50,00	60.000,00	62,00	60.000,00	66,00	20.000,00	6,00	180.000,00	
2	15	02	2	Program 3.2.3.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (L.L.A.)	1	Nilai V/C Ratio jalan kota	Rasio				0,61	1.027,07	0,61	1.667,53	0,60	4.050,00	0,60	3.850,00	0,60	3.850,00	Dishub
						2	Rasio Konektivitas angkutan jalan lingkup kota	Rasio				0,78	54.949,33	0,80	73.230,57	0,82	205.830,00	0,85	189.920,00	0,85	189.920,00	
2	15	5	3	Program 3.2.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERATAPIAN	1	Persentase penetapan kebijakan jaringan perkeretaapian kewenangan kota	%				30,77	295.185,00	7,69	248,42	23,08	496,83	38,46	546,51	38,46	546,51	Dishub
1	03	06	4	Program 3.2.3.4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1	Persentase Drainase Yang berkondisi baik	%	10,00	27,00	27,16	27,32	6.000,00	27,46	22.000,00	27,61	25.000,00	27,75	27.600,00	27,75	86.153,00	DPUPR
						2	Persentase dokumen Perencanaan Perencanaan SDA yang disusun	%	10,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	100,00	18.000,00	100,00	22.000,00	100,00	29.000,00	100,00	75.553,00	

Tabel 6.3A
Program Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020
PENJABARAN MISI 1 : MEWUJUDKAN KOTA SEHAT

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020		
						Target	Rp. (dlm Juta)	
1, Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT								
1.1.	Tujuan 1 :	Terwujudnya masyarakat kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73,21	73,69		
			Indeks Kualitas Air	Point	49,6	49,67		
			Indeks Kualitas Udara	Point	85,86	85,9		
1.1.1	Sasaran 1 :	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	Tahun	73,21	73,69		
1	Program 1.1.1.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	Point	0,32	0,50	80.046	Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	%	68	80%		
			Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	%	0	24%		
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	%	95,85	96%		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	4	8 % (2 pusks)		
2	Program 1.1.1.2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	60	55	6.300	
			Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	2,99	2,95		
			Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran hidup	3,35	3,35		
			Persentase Ibu Hamil Dengan KEK	%	4,9	3,99		
			Persentase Ibu Hamil Dengan Anemia	%	8,3	8,3		
			Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs	%	4,8	4,75		
			Persentase Balita Sangat Kurus dan Kurus (Wasting)	%	2,08	1,97		
			Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	%	4,53	4,42		
3	Program 1.1.1.3	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase kesembuhan TB Paru	%	81,22	86	7.500	Dinas Kesehatan
			Prevalensi HIV Aids	%	0,42	<0,5		
			Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	66	65		
			Prevalensi Hipertensi	%	9,67	9,3		
			Prevalensi Diabetes Militus	%	2,4	2,35		
			Angka Kesakitan ODGJ	%	≤ 0,13	≤ 0,13		
4	Program 1.1.1.4	Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	%	70	80%	47.130	
			Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	%	80	85%		
			Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	Per 30.000 penduduk	0,68	0,66		
			Persentase puskesmas yang menerapkan penggunaan obat secara rasional	%	72	75%		Dinas Kesehatan
			Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang memenuhi standar kesehatan	%	70,86	85		
5	Program 1.1.1.5	Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Institusi Pelayanan Kesehatan berbasis smart health	%	50%	65%	900	
6	Program 1.1.1.6	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan Pelayanan Informasi Publik	%	35%	50%	700	
7	Program 1.1.1.7	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan	%	73,5	84,25	91.631	RSUD



No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020		
						Target	Rp. (dlm Juta)	
8	Program 1.1.1.8	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase capaian SPM RSUD	%	93,45	93,75	180.492	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD	Point	3,66	3,66		
9	Program 1.1.1.9	Kesehatan Reproduksi Remaja	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	Per 1000 Remaja	14,42	14,41	200	DPPKB
			Persentase PIK R Aktif	%	PIKR Aktif = 24 PIKR = 59 Persentase PIK R Aktif = 40,68%	42,18		
10	Program 1.1.1.10	Kependudukan dan Keluarga Berencana	CPR (Contraceptive Prevalence Rate) Tingkat Peserta KB Aktif	%	Peserta Aktif (PA) = 120.210 PUS = 155.284 CPR = 77,41	77,41%	1.860	
			Persentase Peserta KB MKJP pada PUS	%	Peserta MKJP = 34.725 PUS = 155.284 Persentase MKJP = 22,36%	22,4		
11	Program 1.1.1.11	Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Point	84,9	86,9	1.700	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Konsumsi energi	Kkal/Kapita/Hari	1809	1920		
			Konsumsi protein	gr/kapita/Hari	50,8	53		
			Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi	%	91,53	93		
12	Program 1.1.1.12	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal	Jumlahmaksimal kasus penyakit zoonosis pertahun	Kasus	0	3	750	
			Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar	%	22,2	22		
13	Program 1.1.1.13	Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan	Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	27,28	29,37	300	
SASARAN 2 :	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	% Rumah Tangga Ber-PHBS	%	66	68			
		Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Point	0,45	0,45			
1	Program 1.1.2.1 :	Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS*(12 IKS)	%	66	68	10.125	Dinas Kesehatan
			Persentase Rumah sehat (%)	%	78,01	79		
2	Program 1.1.2.2	Kemitraan Lingkungan Hidup	Persentase sekolah adiwiyata (%)	%	30	31	3.000	Dinas LH
			Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan	%		10		
3	Program 1.1.2.3	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Presentase penegakan PERDA KTR	%	90	95	75	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Program 1.1.2.4	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Persentase Sekolah Sehat (%)	%	13	15	76	Dinas Pendidikan
5	Program 1.1.2.5	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD Sehat	%	31	32	80	
6	Program 1.1.2.6	Kepemudaan dan Keolahragaan	Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	Point	0,45	0,45	1.095	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Rasio ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan	Per 916,052	0.001511 : 2,08	0.001552 : 2,08		
			Persentase sarana prasarana olah raga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%)	%	33,34	33,34	21.623	
			Jumlah sarana prasarana olahraga tingkat nasional/lokal yang terbangun	Angka	1	0		

No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020		
					Target	Rp. (dlm Juta)	
	SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman Persentase Luasan Kawasan Kumuh kewenangan Kota Persentase Reduksi Sampah	% % % %	91,98 67,21 2,62 6,26	93,15 67,47 2,44 6,4		
1	Program 1.1.3.1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah yang aman	% %	91,98 67,21	93,15 67,47	189.288 12.050	Dinas PUPR
2	Program 1.1.3.2. Lingkungan Sehat Perumahan	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Kota Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Propinsi Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Pusat Persentase Jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	Ha Ha Ha %	310,93 54,49 146,42 50,73	289,86 44,82 112,09 63,21	12.889 19.791	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Persentase drainase di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di kawasan kumuh Persentase cakupan ketersediaan proteksi kebakaran di kawasan kumuh yang berkondisi baik Persentase cakupan air bersih/air minum di kawasan kumuh Persentase cakupan pelayanan air limbah di kawasan kumuh Persentase cakupan pelayanan persampahan di kawasan kumuh Luas pencegahan kawasan kumuh Kota Bogor	% % % % % % Ha	28,97 75,45 58,51 76,93 56,87 23,84 365,94	48,59 78,76 63,84 78,62 66,05 36,55 292,71		
3	Program 1.1.3.3 Peningkatan Utilitas Perkotaan	Prosentase pemenuhan kebutuhan PJU Persentase PJU yang terpelihara	% %	74,03 81,09	74,47% 77,09%	3.550 48.220	
4	Program 1.1.3.4 Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Panjang Jalan lingkungan permukiman terstruktur yang berkondisi baik Persentase drainase lingkungan permukiman terstruktur berkondisi baik Jumlah titik ecodrain pada jalan lingkungan perumahan Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	% Km titik Lokasi	44,64 20,31 0 745	52,60 24,75 30 865	98.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program 1.1.3.5 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Jumlah Sekolah Aman bencana	Kelurahan Sekolah	2018 = 11 2019 = 5 2018 = 12 2019 = 4	2 2	250 200	BPBD
6	Program 1.1.3.6 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	% sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik	%	2018 = 34 2019 = 40/26000	50	28.000	Satuan Polisi Pamong Praja
7	Program 1.1.3.7 Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana	% %	40 0	60 2	2000 2.175	Dinas PUPR Dinas Perumkim
8	Program 1.1.3.8 Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	jumlah lokasi rawan banjir yang tertangani	Lokasi	27	8	2.100	Dinas PUPR



No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2020			
						Target	Rp. (dlm Juta)		
9	Program 1.1.3.9	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	%	75,85	76	28.734	Dinas LH	
			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	%	195,900 m	48,8			
			Persentase peningkatan retribusi persampahan	%	9,5 Milyar	2,1			
10	Program 1.1.3.10	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Persentase Reduksi Sampah (%)	%	6,26	6,4	3.200		
			Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	%	4	4			
11	Program 1.1.3.11	Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	Prosentase volume sampah yang diolah di TPA	%	98,16	98,16	54.946		
			Kapasitas pengolahan sampah	Ton/hari	931	931			
	SASARAN 4 :	Terkendalinya sumber-sumber pencemar air	Indeks Kualitas Air	Point	49,6	49,67			
1	Program 1.1.4.1	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar air yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	%	35	36	1.100	Dinas LH	
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air/kerusakan sumber- sumber air yang ditindaklanjuti	%	Jumlah pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran air	100			120
			Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	%	30	40			300
			Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan	%	30	35			1.300
2	Program 1.1.4.2	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan debit air dari sumber mata air	%	10	10	1300		
3	Program 1.1.4.3	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase saluran Irigasi yang berkondisi baik (%)	%	45,83	58,75	2.200	Dinas PUPR	
			Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik (%)	%	90	91,03			19.600
	SASARAN 5 :	Terkendalinya sumber-sumber pencemar udara	Indeks Kualitas Udara	Point	85,86	85,9			
1	Program 1.1.5.1	Pengembangan Transportasi Berkelanjutan	Persentase sarana prasarana penunjang Pedestrian dan Jalur Sepeda berkondisi baik (%)	%	100	100	375	Dinas Perhubungan	
			Prosentase (%) kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif	%	40	40			0
			Prosentase (%) kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang	%	87,82	88			150
			Jumlah Koridor angkutan umum massal berbasis Bus yang beroperasi	Angka	1	2			2.557
2	Program 1.1.5.2	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	%	40	50	1.300	Dinas LH	
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran yang ditindaklanjuti	%	Jumlah pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran udara	100			
			Persentase pemenuhan kualitas udara dalam kondisi baik	%	12 titik berkondisi baik	50			
3	Program 1.1.5.3	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	emisi GRK = 2,8	3,92	700		
	SASARAN 6 :	Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau publik perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5,89	5,91			
1	Program 1.1.6.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)	Ha	Luas RTH Publik = 708,63 Ha	1,8	3.650	Dinas Perumahan dan Permukiman	



No.	Misi/Tujuan Sasaran/Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2020		
						Target	Rp. (dlm Juta)	
			Luas RTH Publik yang terkelola dengan baik (Ha)	Ha	Luas RTH yang terkelola dengan baik = 41,86 Ha	43,28	11.345	
2	Program 1.1.6.2	Pengelolaan Areal Pemakaman	Luas TPU Hijau yang terkelola dengan baik (Ha)	Ha	Luas TPU Hijau Terkelola = 46,2	46,27	4.044	Dinas Perumahan dan Permukiman
3	Program 1.1.6.3	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Ha	Luas Kawasan konservasi = 0,5	0,5	1300	Dinas LH

6.3 PROGRAM UNGGULAN DAN PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2019 – 2024

Program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019-2024 merupakan janji-janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota yang strategis dan prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2019-2024. Program unggulan ini salah satu arah kebijakan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan kota Bogor pada tahun 2019-2024. Program unggulan 2019-2024, meliputi:

A. BOGOR LANCAR

1. Konversi Angkot
2. Pembangunan jalan protokol alternatif
3. Pembangunan *flyover* di Jl. RE Martadinata & Kebon Pedes
4. Penataan kawasan stasiun kereta api
5. Pembangunan gedung parkir di pusat kota
6. Penuntasan sarana Terminal Baranangsiang & Stasiun LRT

B. BOGOR MERENAH

1. Pembangunan jalur pedestrian yang terintegrasi di pusat kota
2. Pembangunan kampung wisata
3. Revitalisasi pasar tradisional
4. Kampungku bersih dan hijau
5. Pembangunan pusat kuliner di setiap kecamatan

C. BOGOR KASO HOR

1. Pembangunan museum
2. Revitalisasi perpustakaan kota
3. Pembangunan GOR di setiap Kecamatan

D. BOGOR MOT EKAR

1. Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional
2. Festival seni & helaran budaya

E. BOGOR SAMAWA

1. Sekolah Ibu
2. 50 beasiswa tiap tahun bagi pelajar berprestasi
3. Merenovasi 20 ribu RTLH sampai tahun 2023
4. Pemberian insentif bagi guru ngaji
5. Orang tua asuh

F. ABDI BOGOR

1. Mall pelayanan Publik
2. Kunjungan dokter ke keluarga
3. Konseling & *Call Center* 24 Jam

4. Layanan malam kelurahan
5. RSUD unggul

6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pendekatan Spasial

Pendekatan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Bogor 2019-2024. Penerapan pendekatan ruang dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. Hal ini dimaksudkan agar terwujud keselarasan antara RTRW dan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

RTRW Kota Bogor disusun berasaskan pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan; asas kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dengan pendekatan sektoral, holistik, tematik, dan integratif, selanjutnya diselaraskan dengan rencana pemanfaatan ruang sebagai pendekatan spasial.

Berpegang pada prinsip bahwa rencana tata ruang adalah perwujudan ruang dari rencana pembangunan daerah maka tujuan penataan ruang Kota Bogor diturunkan dari visi pembangunan kota baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah maupun Rencana Jangka Menengah Daerah. Selain berpegang pada RPJPD dan RPJMD, perumusan tujuan penataan ruang juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti hasil analisis penataan ruang Kota Bogor mengenai kondisi internal dan kebijakan pengembangan kota sebelumnya, isu-isu strategis dan peran serta fungsi kota yang dikembangkan pada Kota Bogor untuk jangka waktu 20 tahun. Dengan mempertimbangkan komponen-komponen tersebut, maka tujuan penataan ruang pada RTRW Kota Bogor adalah:

“Terwujudnya ruang Kota Bogor sebagai kota jasa dan permukiman dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai kota pusaka yang berwawasan lingkungan.”

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kota Bogor sebagaimana dimaksud diatas, telah dirumuskan Arah kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota Bogor 2011-2031 yaitu :

6.4.1 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pada bagian berikut dibahas mengenai kebijakan dan strategi penataan ruang untuk kota Bogor. Kebijakan penataan ruang merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota, sedangkan strategi penataan ruang adalah penjabaran dari kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Melihat definisi dari kebijakan penataan ruang yang disebutkan sebelumnya maka kebijakan penataan ruang dirumuskan dengan kriteria:

1. Mengakomodasi kebijakan penataan ruang nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku untuk kota Bogor.
2. Arahannya jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan.
3. Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul pada masa yang akan datang.
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kriteria perumusan strategi penataan ruang adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang.
2. Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional dan provinsi.
3. Upayanya jelas, realistis dan dapat diimplementasikan sampai 2031 di kota Bogor secara efisien dan efektif.
4. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang kota Bogor.
5. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Dengan melihat pada kriteria yang telah disebutkan maka kebijakan dan strategi perencanaan ruang untuk kota Bogor meliputi :

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang.
2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.
3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Namun didalam Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, Kebijakan dan Strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis disatukan menjadi Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kota.

6.4.2 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kota

Secara umum kebijakan penataan ruang wilayah daerah kota meliputi:

1. Pemantapan peran Daerah Kota sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi;
2. Mengembangkan 4 (empat) Wilayah Pelayanan selain Pusat Kota, sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota;
3. Mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan;
4. Pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu;
5. Pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
6. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam Daerah Kota dan Wilayah Kabupaten Bogor;
7. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum;
8. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
9. Pelestarian kawasan cagar budaya;

10. Peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah Daerah Kota;
11. Pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan;
12. Pengembangan ruang Daerah Kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan;
13. Pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan;
14. Pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya;
15. Pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi.

Adapun strategi kebijakan penataan ruang wilayah daerah kota meliputi:

1. Strategi pemantapan peran Daerah Kota sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi meliputi:
 - a. Meningkatkan peran Daerah Kota sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan barang skala regional. pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya;
 - b. Menyediakan infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan sekitar;
 - c. Menetapkan dan memantapkan kawasan lindung; dan
 - d. Mengembangkan kegiatan budi daya secara terpadu serasi, dan selaras sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. Strategi mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan meliputi:
 - a. Mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan sekitar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor;
 - b. Merevitalisasi PPK dengan tetap memperhatikan fungsi, identitas dan karakter Daerah Kota sebagai Kota Pusaka;
3. Strategi pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu meliputi:
 - a. Mewujudkan pusat pertumbuhan baru sub PPK Pasima melalui pengembangan kawasan campuran;
 - b. Mewujudkan Sub PPK Utara sebagai kawasan perkotaan baru melalui pengembangan koridor pusat yang terpadu;



- c. Mewujudkan Sub PPK Purwa sebagai salah satu gerbang kota melalui pengembangan kawasan campuran;
 - d. Mewujudkan sub PPK Daksina sebagai pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan campuran;
4. Strategi pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan melalui mengembangkan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya;
 5. Strategi mengembangkan 4 (empat) WP sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota meliputi:
 - a. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta kawasan wisata pada WP Pasima sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang serta keberadaan Hutan Penelitian Dramaga dan kawasan lindung lainnya;
 - b. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Utara;
 - c. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Purwa;
 - d. Mengembangkan kegiatan agribisnis, perumahan, serta kegiatan jasa sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Daksina;
 6. Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam Daerah Kota dan Wilayah Kabupaten Bogor meliputi:
 - a. Sinergitas sistem jaringan jalan antara Daerah Kota dengan Kabupaten Bogor;
 - b. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar PPK, Sub PPK, dan PL;
 - c. Mengembangkan jalan lingkar dan jalan tembus;
 - d. Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya PPK, Sub PPK, dan PL;
 - e. Mengembangkan sistem transportasi massal berbasis rel dan berbasis jalan;
 - f. Mengembangkan sistem pengelolaan lalu lintas;
 - g. Mengembangkan sistem jaringan lintas barang dari dan keluar Daerah Kota;
 - h. Mengembangkan terminal penumpang dan angkutan barang;



- i. Mengembangkan konsep TOD pada titik pertemuan antar moda;
 - j. Mengembangkan sitem jaringan pejalan kaki dan sistem jaringan perkotaan lainnya;
7. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum lainnya meliputi:
- a. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - b. Melengkapi perumahan eksisting dengan prasarana dan sarana pendukung sesuai standar minimal yang ditetapkan;
 - c. Mengembangkan jaringan energi listrik dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. Mengembangkan jaringan gas;
 - e. Mengembangkan jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih belum terjangkau;
 - f. Mengembangkan jaringan sumber daya air;
 - g. Mengembangkan sistem jaringan air minum;
 - h. Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah;
 - i. Meningkatkan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - j. Meningkatkan sistem jaringan persampahan Daerah Kota;
 - k. Meningkatkan dan mengembangkan sistem drainase;
 - l. Mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana;
8. Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung meliputi:
- a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - b. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah;
 - c. Merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi;
 - d. Meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung;
9. Strategi pelestarian kawasan cagar budaya meliputi:
- a. Menetapkan kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya;
 - b. Meningkatkan nilai kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya;
 - c. Mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;
10. Strategi peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah Daerah Kota meliputi:



- a. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
 - b. Mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;
 - c. Meningkatkan ketersediaan RTH melalui bank tanah (*landbanking*);
 - d. Mengembangkan kemitraan atau kerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH;
11. Strategi pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
- a. Mengarahkan kawasan terbangun dengan intensitas kepadatan rendah, sedang, tinggi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. Mengendalikan pengembangan kawasan PPK;
 - c. Mengoptimalkan pengembangan Sub PPK;
 - d. Membatasi pengembangan kawasan industri;
12. Strategi pengembangan ruang Daerah Kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan meliputi:
- a. Menetapkan delineasi pengembangan kawasan dan/atau fungsi khusus, antara lain kawasan TOD, kawasan wisata ilmu pengetahuan, dan kawasan khusus lainnya;
 - b. Mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal pada sebagian PPK dan Sub PPK, kawasan atau bangunan fungsi campuran, superblok dan kawasan TOD;
 - c. Mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak, efisien, dan berkelanjutan;
13. Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan adalah:
- a. Mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan lingkungan;
 - b. Menata kawasan KSK dalam rangka perlindungan terhadap kelestarian lingkungan;
14. Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya adalah:
- a. Mempertahankan, melindungi, dan menata kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan sosial budaya;
 - b. Mempertahankan nilai sejarah kawasan;

- c. Menata kawasan dalam rangka perlindungan peninggalan budaya;
 - d. Mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata;
15. Strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi adalah:
- a. Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan ekonomi;
 - b. Menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong masuknya investasi;
 - c. Mengembangkan kawasan tematik;
 - d. Mengintegrasikan konsep guna campuran, superblok dan TOD dengan kegiatan ekonomi.

6.4.3 Arahannya Pemanfaatan Ruang Periode Rencana Jangka Menengah Tahun 2019-2024

Adapun arahan pemanfaatan ruang pada periode rencana jangka menengah tahun 2019-2024 dilaksanakan melalui rencana program pemanfaatan ruang sebagai berikut :



Tabel 6.4

Indikasi Program Pengembangan Wilayah Pelayanan

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.	WP Samida						I.	WP Samida									
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Samida (WP A) dan proses legalisasi	WP Samida (WP A)					1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Samida (WP A) dan proses legalisasi	WP Samida (WP A)								
2	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Samida (WP A)	Pusat Kota Bogor/ PPK Kota Bogor					2	Penyusunan Rencana Rinci/ Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan	Pusat Kota Bogor/ PPK Kota Bogor								
3	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Samida (WP A)	Sub WP Samida (WP A)					3										
4	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	TOD Stasiun Bogor					4&5	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	TOD Stasiun Bogor, TOD Baranagsiang								
5	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	TOD Baranagsiang															

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I.	WP Samida						I.	WP Samida									
6	Penataan kawasan TOD Kota Bogor	TOD Stasiun Bogor TOD Baranangsiang					6	Penataan kawasan TOD Kota Bogor	TOD Stasiun Bogor TOD Baranangsiang								
7	Pengembangan RTH skala kota	PPK WP Samida (WP A)					7	Pengembangan RTH skala kota	PPK WP Samida (WP A)								
8	Pengembangan RTNH skala kota	PPK WP Samida (WP A)					8	Pengembangan RTNH skala kota	PPK WP Samida (WP A)								
9	Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur	Kel Panaragan, Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur					9	Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur	Kel Panaragan, Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur								
10	Penataan fasilitas minimum pusat kota yang telah ada	WP Samida (WP A)					10	Penataan fasilitas minimum pusat kota yang telah ada	WP Samida (WP A)								
11	Penataan Pusat Lingkungan A1, A2	Kelurahan Kebon Kalapa, Sukasari					11	Penataan Pusat Lingkungan	Kelurahan Kebon Kalapa, Sukasari								
12	Penataan sekotor informal (PKL)	WP Samida (WP A)					12	Penataan sekotor informal (PKL)	WP Samida (WP A)								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II.	WP Pasima							II.	WP Pasima									
1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Pasima (WP B) dan proses legalisasi	WP Pasima (WP B)						1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Pasima (WP B) dan proses legalisasi	WP Pasima (WP B)								
2.	Penyusunan Rencana rinci Kawasan Pusat WP Pasima (WP B)	Sub PPK WP Pasima (WP B)						2.	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Pasima (WP B)	Sub PPK WP Pasima (WP B)								
3.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Pasima (WP B)	Sub Pusat WP Pasima (WP B)						3.	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Pasima (WP B)	Sub Pusat WP Pasima (WP B)								
4.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	Kawasan TOD Skala Kota						4.										
5.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota						5.	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota								

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II.	WP Pasima							II.	WP Pasima								
6.	Penyusunan Rencana Peluang Investasi dan kerjasama pembangunan Sub PPK WP Pasima (WP B)	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang						6.									
7.	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Pasima (WP B) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Pasima (WP B) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang						7.	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Pasima (WP B) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Pasima (WP B) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang							
8.	Pembangunan RTH skala WP	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang						8.	Pembangunan RTH skala WP	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang							
9.	Pembangunan Pusat Lingkungan B1 dan B2	Kelurahan Balungbang Jaya, Gunungbatu						9.	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Balungbang Jaya, Gunungbatu							
								10.	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Pasima (WP B)							

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
III.	WP Utara							III.	WP Utara									
1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Utara (WP C) dan proses legalisasi	WP Utara (WP C)						1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Utara (WP C) dan proses legalisasi	WP Utara (WP C)								
2.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Utara (WP C)	Yasmin – Pasar TU Kemang						2.	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Utara (WP C)	Yasmin – Pasar TU Kemang								
3.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Pasima (WP C)	Sub Pusat WP Utara (WP C)						3.	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Pasima (WP C)	Sub Pusat WP Utara (WP C)								
4.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	Kawasan TOD Skala Kota						4.										



RTRW LAMA								RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
III. WP Utara								III. WP Utara											
5	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota						5	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota									
6.	Penyusunan Rencana Peluang Investasi dan kerjasama pembangunan di Sub PPK C	Sub PPK Utara 9WP C) : Yasmin - Pasar TU Kemang						6											
7.	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Utara (WP C) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Utara (WP C) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Utara 9WP C) : Yasmin - Pasar TU Kemang						7	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Utara (WP C) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Utara (WP C) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Utara 9WP C) : Yasmin - Pasar TU Kemang									
8.	Pembangunan RTH skala WP	WP Utara (WP C)						8	Pembangunan RTH skala WP	WP Utara (WP C)									
9.	Pembangunan Pusat Lingkungan C1, C2, C3, C4	Kelurahan Mekarwangi, Sukadamai, Kebonpedes, Cilendek Barat						9	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Mekarwangi, Sukadamai, Kebonpedes, Cilendek Barat									
								10	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Utara (WP C)									

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IV.	WP Purwa							IV.	WP Purwa									
1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Purwa (WP D) dan proses legalisasi							1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Purwa (WP D) dan proses legalisasi									
2.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Purwa (WP D)	Sub PPK D, Warung Jambu – Jalan Adnawijaya						2.	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Purwa (WP D)	Sub PPK D, Warung Jambu – Jalan Adnawijaya								
3.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Purwa (WP D)	Sub Pusat WP Purwa (WP D)						3.	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Purwa (WP D)	Sub Pusat WP Purwa (WP D)								
4.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	Kawasan TOD Skala Kota																
5.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota						5.	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota								
6.	Penyusunan RTBL koridor Jalan Raya Bogor-Jakarta	Koridor Bogor-Jakarta						6.	Penyusunan RTBL / Panduan Rancang Kota (PRK) koridor Jalan Raya Bogor-Jakarta	Koridor Bogor-Jakarta								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IV.	WP Purwa							IV.	WP Purwa									
7.	Penataan kawasan Simpang Pomad-perbatasan kota	Simpang Pomad-Perbatasan kota							Penataan kawasan Simpang Pomad-perbatasan kota	Simpang Pomad-Perbatasan kota								
8.	Penyusunan rencana peluang investasi dan kerjasama pembangunan Sub PPK WP Purwa (WP D)	WP Purwa																
9.	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Purwa (WP D) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Purwa (WP D) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK D, Warung Jambu - Jalan Adnawijaya							Pengembangan kawasan Sub PPK WP Purwa (WP D) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Purwa	Sub PPK D, Warung Jambu - Jalan Adnawijaya								
10.	Pembangunan RTH skala WP	WP Purwa (WP D)						8	Pembangunan RTH skala WP	WP Purwa (WP D)								
11.	Pembangunan Pusat Lingkungan D1, D2, D3 dan D4	Kelurahan Kedunghalang, Ciluar, Cimahpar, Tegal Gundil						10	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Kedunghalang, Ciluar, Cimahpar, Tegal Gundil								
								11	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Purwa (WP D)								
								12	(WP D) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)									

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
V.	WP Daksina						V.	WP Daksina									
1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Daksina (WP E) dan proses legalisasi	WP Daksina (WP E)					1.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Daksina (WP E) dan proses legalisasi	WP Daksina (WP E)								
2.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat WP Daksina (WP E)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – Inner Ring Road					2.	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Daksina (WP E)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – Inner Ring Road								
3.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub WP Daksina (WP E)	Sub Pusat WP Dasina (WP E)					3.	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Daksina (WP E)	Sub Pusat WP Dasina (WP E)								
4.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	Kawasan TOD Skala Kota					4.										

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
V.	WP Daksina							V.	WP Daksina									
5.	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota						5.	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota								
6.	Penataan kawasan perbatasan Simpang Jalan Tajur - Jalan Raya Ciawi Sukabumi	Simpang Jalan Tajur - Jalan Raya Ciawi Sukabumi						6.	Penataan kawasan perbatasan Simpang Jalan Tajur - Jalan Raya Ciawi Sukabumi	Simpang Jalan Tajur - Jalan Raya Ciawi Sukabumi								
7.	Penyusunan RTBL Koridor Inner Ring Road	Koridor Inner Ring Road						7.	Penyusunan RTBL / Panduan Rancang Kota (PRK) Koridor Inner Ring Road	Koridor Inner Ring Road								
8.	Penyusunan rencana peluang investasi dan kerjasama pembangunan Sub PPK WP Daksina	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi - Sukabumi - Inner Ring Road						8.										

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
V.	WP Daksina							V.	WP Daksina								
9.	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Daksina (WP E) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Daksina (WP E) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi - Sukabumi - Inner Ring Road						9	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Daksina (WP E) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Daksina (WP E) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi - Sukabumi - Inner Ring Road							
10.	Pembangunan RTH skala WP	WP Daksina						10	Pembangunan RTH skala WP	WP Daksina							
11.	Pembangunan Pusat Lingkungan E1, E2, E3, E4	Kelurahan Katulampa, Cipaku, Kertamaya, Mulyaharja						11	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Katulampa, Cipaku, Kertamaya, Mulyaharja							
								12	Pembangunan Pusat Agro Eduwisata Organik	Kelurahan Mulyaharja							
								13	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Daksina (WP E)							



Tabel 6.5
Indikasi Program Trasportasi

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
I.	Studi dan Kajian							I.	Studi dan Kajian									
1	Kajian pola distribusi dan pola perjalanan	Kota Bogor						1	Kajian pola distribusi dan pola perjalanan	Kota Bogor								
2	Penyusunan data base jaringan jalan	Kota Bogor						2	Penyusunan data base jaringan jalan	Kota Bogor								
3	Penyusunan Masterplan Transportasi	Kota Bogor						3	Penyusunan Masterplan Transportasi	Kota Bogor								
4	Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian (RIP)	Kota Bogor						4	Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian (RIP)	Kota Bogor								
5	Sistem Informasi sarana dan prasarana angkutan umum	Kota Bogor						5	Sistem Informasi sarana dan prasarana angkutan umum	Kota Bogor								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan									
A	Penetapan fungsi jalan	Kota Bogor						A.	Penetapan fungsi jalan	Kota Bogor								
B	Peningkatan Jalan							B	Peningkatan Jalan									
								1	Jalan Arteri Primer	Jalan Pajajaran								
										Jalan Raya Kedung Halang/ Jalan KS								
1	Jalan kolektor sekunder	Jalan Pajajaran						2	Jalan kolektor sekunder	Jalan Bukit Cimanggu Villa – Kel Mekarwangi								
		Jalan KS Tubun;																
		Jalan Letjen Ibrahim Adjie;																
		Jalan Mayjen Ishak Djuarsa;																
		Jalan Pangeran Shogiri;								Jalan Pangeran Shogiri								
		Jalan Tumenggung Wiradiredja;								Jalan Tumenggung Wiradiredja;								



RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan								
B	Peningkatan Jalan							B	Peningkatan Jalan								
1	Jalan kolektor sekunder	Jalan Parung Banteng; Jalan Kayumanis-Cilebut; Jalan Cibeureum; Jalan Kapten Yusuf; Jalan Cipaku; Jalan Warung Nangka; Jalan Mandala Ciluar						2	Jalan kolektor sekunder	Jalan Parung Banteng Jalan Kayumanis-Cilebut Jalan Cibeureum Jalan Kapten Yusuf Jalan Cipaku Jalan Warung Nangka Jalan Mandala Ciluar							
2	Jalan Lokal	Tersebar di Kota Bogor						3	Jalan Lokal	Tersebar di Kota Bogor							

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan									
B	Peningkatan Jalan							B	Peningkatan Jalan									
3	Perbaikan geometrik simpang	Simpang Jalan Tentara Pelajar - Jalan Johar						4	Perbaikan geometrik simpang	Simpang Jalan Tentara Pelajar - Jalan Johar								
		Simpang Jalan Tentara Pelajar - Jalan Manunggal								Simpang Jalan Tentara Pelajar - Jalan Manunggal								
		Simpang Jalan R. Saleh Bustaman - Jalan Pahlawan								Simpang Jalan R. Saleh Bustaman - Jalan Pahlawan								
		Simpang Jalan Pomad - Jalan KS. Tubun								Simpang Jalan Pomad - Jalan KS. Tubun								
		Simpang Jalan Raya Pemda - Jalan KS Tubun (Talang)								Simpang Jalan Raya Pemda - Jalan KS Tubun (Talang)								
		Simpang Jalan Arteri Tol Lingkar Bogor - Jalan KS. Tubun								Simpang Jalan Arteri Tol Lingkar Bogor - Jalan KS. Tubun								

RTRW LAMA								RTRW BARU													
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-									
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031		
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan												
B	Peningkatan Jalan							B	Peningkatan Jalan												
3	Perbaikan geometrik simpang	Simpang Jalan Pajajaran – Jalan KS Tubun – Jalan Adnawijaya (Warung Jambu)						4	Perbaikan geometrik simpang	Simpang Jalan Pajajaran – Jalan KS Tubun – Jalan Adnawijaya (Warung Jambu)											
		Simpang Jalan Raya Pajajaran – Jalan Lodaya – Jalan Salak									Simpang Jalan Raya Pajajaran – Jalan Lodaya – Jalan Salak										
		Simpang Jalan Raya Pajajaran – Jalan Pangrango									Simpang Jalan Raya Pajajaran – Jalan Pangrango										
		Simpang Tol Lingkar Bogor – Jalan Pangeran Sogiri									Simpang Tol Lingkar Bogor – Jalan Pangeran Sogiri										
		Simpang Ahmad Syam – Cimahpar									Simpang Ahmad Syam – Cimahpar										
		Simpang Jalan Ahmad Syam – Jalan Tol Jagorawi (Kampung Sawah)									Simpang Jalan Ahmad Syam – Jalan Tol Jagorawi (Kampung Sawah)										

RTRW LAMA								RTRW BARU												
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan											
B	Peningkatan Jalan							B	Peningkatan Jalan											
4	Pembangunan persimpangan tidak sebidang	Persimpangan Jalan RE Martadinata						5	Pembangunan persimpangan tidak sebidang											
		Persimpangan Jalan MA Salmun									Persimpangan Jalan MA Salmun									
		Persimpangan Jalan Kebon Pedes									Persimpangan Jalan Kebon Pedes									
		Persimpangan Jalan Kapten Muslihat									Persimpangan Jalan Kapten Muslihat									
		Jalan arteri, kolektor dan lokal lainnya									Jalan arteri, kolektor dan lokal lainnya									
												Pembangunan akses tidak sebidang antara Terminal Barangsiang dan Jalan Tol Jagorawi								



RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan								
B	Peningkatan Jalan							B	Peningkatan Jalan								
5	Peningkatan Jembatan	Jembatan sungai Ciliwung di Jalan Ahmad Yani					6	Peningkatan Jembatan	Jembatan Satu Duit di Jalan Ahmad Yani								
		Jembatan sungai Ciliwung di Jalan KH Sholeh Iskandar							Jembatan sungai Ciliwung di Jalan KH Sholeh Iskandar								
		Jembatan sungai Ciliwung di Jalan Otto Iskandardinata							Jembatan sungai Ciliwung di Jalan Otto Iskandardinata								
		Jembatan sungai Ciliwung Jalan Jalak Harupat							Jembatan sungai Ciliwung Jalan Jalak Harupat								
		Jembatan ruas jalan lainnya							Jembatan ruas jalan lainnya								
									Jembatan jalan MA Salmun								
									Jembatan Jalan Veteran								
									Jembatan Batu Tulis - Pamoyanan								

RTRW LAMA								RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan										
C	Pembangunan jalan							c	Pembangunan jalan										
1	Pengembangan jalan tol							1	Pembangunan akses konektivitas ke jalan tol	Akses konektivitas dari jalan Parungbanteng (R3) ke Jalan Tol Jagorawi (KM 42,5)									
a	Pembangunan akses konektivitas ke jalan tol	Akses konektivitas ke Jalan Tol Lingkar Bogor (BORR)							Akses konektivitas ke Jalan Tol Lingkar Bogor (BoRR)										
		Akses konektivitas ke Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi)							Akses konektivitas dari jalan R3 (Kolonel Ahmad Syam) ke Jalan Jagorawi (Baranangsiang)										
									Akses konektivitas dari rencana jalan Bogor Inner Ring Road ke Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi)										

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan								
C	Pembangunan jalan							c	Pembangunan jalan								
2	Pembangunan jalan non tol							2	Pembangunan jalan non tol								
a	Pembangunan jalan arteri primer	Jalan Arteri paralel dengan jalan tol lingkar bogor ruas ciluar kedunghalang (Jalan R2)						a	Pembangunan jalan arteri primer	Jalan arteri paralel dengan jalan tol Bogor Ring Road / Frontage R2							
								b.	Pembangunan jalan kolektor primer	Jalan Lingkar Dalam (Bogor Inner Ring Road)							
	Pembangunan jalan arteri sekunder	Jalan R3 Parungbanteng - Wangun							Pembangunan jalan arteri sekunder	Jalan R3 segmen Parung Banteng – Wangun/ Tajur							
		Jalan Bogor Inner ring road															
b		Pembangunan jalan di sisi jalan tol Jagorawi di WP Daksina;						c.									
		Pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP Utara dan WP Purwa								Pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP Utara dan WP Purwa							
										Rencana ruas jalan Stasiun Sukaresmi - Jalan KH Sholeh Iskandar							

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan									
C	Pembangunan jalan							c	Pembangunan jalan									
d	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Rencana ruas jalan: Jalan KH Soleh Iskandar (dekat pertigaan Jalan Raya Semplak) – Kel Kencana – Jambu Dipa (Kab. Bogor)						d.	Pembangunan jalan kolektor sekunder									
		Rencana ruas jalan: Jalan Raya Semplak-Jalan KH Sholeh Iskandar – Kel Mekarwangi – Jalan Cilebut (Cilebut Barat, Kab Bogor)							Rencana ruas jalan: Pertigaan Salabenda- kel Kayumanis - Kel Mekarwangi – Jalan Cilebut (Cilebut Barat, Kab Bogor)									
		Rencana ruas jalan: Jalan KH Sholeh Iskandar – Bukit Cimanggu Villa – Jalan Cilebut Raya							Rencana ruas jalan: Jalan KH Sholeh Iskandar – Bukit Cimanggu Villa – Jalan Cilebut Raya									
		Rencana ruas jalan: Stasiun Sukaresmi – Jalan Raya Pemda																

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan									
C	Pembangunan jalan							c	Pembangunan jalan									
d	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Rencana ruas jalan Stasiun Sukaresmi -- Jalan Kemang - Kedung Halang (Sholeh Iskandar);						d.	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Rencana ruas jalan: Stasiun Sukaresmi - Jalan Raya Pemda (Kedung Halang)								
		Rencana ruas jalan: Jalan Bukit Cimanggu Villa - Kel Mekarwangi																
		Rencana ruas jalan: Jalan Perdana Raya - kel Kencana																
		Rencana ruas jalan: Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar) - Perum Pondok Aren - Jalan Tanah Baru								Rencana ruas jalan: Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar) - Perum Pondok Aren - Jalan P Aoghiri								
		Rencana ruas jalan: Jalan Adnawijaya - Jalan P Asogiri - Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar);								Rencana ruas jalan: Jalan Adnawijaya - Jalan P Asogiri - Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar);								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan									
C	Pembangunan jalan							c	Pembangunan jalan									
d	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Rencana ruas jalan: Jalan Ahmad Sobana – Jalan P Shogiri – samping jalan Toll Jagorawi						d.	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Rencana ruas jalan: Jalan Ahmad Sobana – Jalan P Shogiri – samping jalan Toll Jagorawi								
		Rencana ruas jalan: Jalan R3 – Kampung Cokondang – samping jalan Toll Jagorawi – Jalan Katulampa								Rencana ruas jalan: Jalan R3 – Kampung Cokondang – samping jalan Toll Jagorawi – Jalan Parung Banteng								
		Rencana ruas jalan tembus Menteng Asri – Jl. Tentara Pelajar								Rencana ruas jalan tembus Menteng Asri – Jl. Tentara Pelajar								
		Rencana ruas jalan akses Bogor Inner Ring Road ke Lingkar Luar Bogor;																
		Rencana ruas jalan akses Bogor Inner Ring Road ke Tol Bocimi																

RTRW LAMA								RTRW BARU												
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan											
C	Pembangunan jalan							c	Pembangunan jalan											
d	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Rencana ruas jalan alternatif Situ Gede						d	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Rencana ruas jalan alternatif Situ Gede										
		Rencana ruas jalan dibawah jalur listrik tegangan tinggi								Rencana ruas jalan dibawah jalur listrik tegangan tinggi										
										Rencana ruas jalan frontage										
										Pembangunan jalan di sisi jalan tol Jagorawi di WP Daksina;										
										Jalan tembus Ahmad Sobana - Ahmad Yani										
										Bogor Inner Ring Road ke Lingkar Luar Bogor (kelurahan mulyaharja)										

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan								
C	Pembangunan jalan							c	Pembangunan jalan								
e	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersebar di Kota Bogor						3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersebar di Kota Bogor							
3	Optimalisasi fungsi bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja)	Semua WP						4	Optimalisasi fungsi bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja)	Semua WP							
4	Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan)	Semua WP						5	Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan)	Semua WP							

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan									
C	Pembangunan jalan							c	Pembangunan jalan									
5	Pengembangan prasarana dan sarana kendaraan tidak bermotor (jalan pejalan kaki dan jalur khusus sepeda)																	
a	Pembangunan sarana dan prasarana kendaraan tidak bermotor	Jalan Mayor Oking																
		Jalan MA Salmun																
		Jalan Merdeka																
		Jalan RE Martadinata																
		Jalan Paledang																
		Jalan Kapten Muslihat																
		Jalan KS Tubun																
		Jalan KH Sholeh Iskandar																
		Jalan KH Abdullah Bin Nuh																

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan									
C	Pembangunan jalan							c	Pembangunan jalan									
		Jalan Brigjen Saptaji																
		Jalan Dr. Sumeru																
		Jalan Mawar																
		Jalan Sempak																
		Jalan Ir. H. Djuanda																
		Jalan Jenderal Sudirman																
		Jalan Jenderal Ahmad Yani																
		Jalan Dadali																
		Jalan Jalak Harupat																
		Jalan Pemuda																
		Jalan Suryakencana																

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan									
C	Pembangunan jalan							c	Pembangunan jalan									
		Jalan Siliwangi																
		Jalan Pajajaran																
		Jalan Otto Iskandardinata																
		Jalan Adnawijaya																
		Jalan Ahmad Sobana																
		Jalan Ahmad Syam																
		Jalan lokal kawasan komersial dan kepadatan tinggi																
		Stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, lokasi menuju angkutan umum																

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
I	Jaringan Jalan							II	Jaringan Jalan									
C	Pembangunan jalan							c	Pembangunan jalan									
b	Pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk pejalan kaki dan sepeda																	
a	Jembatan penyeberangan orang	Jalan arteri dan kolektor																
b	Underpass penyeberangan orang	Sekitar Kebun Raya Bogor, TOD																
c	Skywalk	Air Mancur – Jl. Pajajaran																
		Jl. Suryakencana – Terminal Baranangsiang																
		Kawasan TOD																

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II	Terminal						II	Terminal									
1	Revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang sebagai terminal penumpang Tipe A	Terminal Baranangsiang					1	Revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang sebagai terminal penumpang Tipe A	Terminal Baranangsiang								
2.	Pembangunan akses tidak sebidang antara Terminal Barangsiang dan Jalan Tol Jagorawi	Terminal Baranangsiang/Tol Jagorawi					2										
3	Pembangunan terminal di Kelurahan Tanah Baru yang terintegrasi dengan Stasiun kereta ringan	Kelurahan Tanah Baru					3	Pembangunan terminal di Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, Kertamaya yang terintegrasi dengan Stasiun kereta ringan	Tanah Baru Bubulak Mulyaharja Kertamaya								
4	Pembangunan terminal di Kelurahan Bubulak sebagai transfer point yang terintegrasi dengan stasiun kereta ringan	Kelurahan Bubulak															

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II	Terminal							II	Terminal									
5	Pembangunan terminal di Kelurahan Sukaresmi yang terintegrasi dengan Stasiun kereta api dan stasiun kereta ringan	Kelurahan Sukaresmi						4	Pembangunan terminal di Kelurahan Sukaresmi yang terintegrasi dengan Stasiun kereta api dan stasiun kereta ringan	Kelurahan Sukaresmi								
6	Pembangunan fasilitas integrasi antar moda di Kawasan TOD	Kawasan TOD						5	Pembangunan fasilitas integrasi antar moda di Kawasan TOD	Kawasan TOD								
7	Penyediaan terminal perbatasan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Wilayah Perbatasan						6	Penyediaan terminal di kawasan perbatasan perbatasan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Wilayah Perbatasan								

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II	Terminal						II	Terminal									
8	Peningkatan sarana pendukung terminal	Seluruh Terminal					7	Peningkatan sarana pendukung terminal	Seluruh Terminal								
9	Revitalisasi terminal agribisnis	Kelurahan Rancamaya					8										
10	Pembangunan terminal barang	Kelurahan Tanah Baru					9	Pembangunan terminal barang	Kelurahan Tanah Baru								
							10	Revitalisasi terminal penumpang Merdeka sebagai terminal penumpang Tipe C	Terminal Merdeka								

RTRW LAMA								RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
III	Parkir							III	Parkir										
1	Pembangunan gedung parkir dan atau pelataran parkir	Pusat-pusat kegiatan						1	Pembangunan gedung parkir dan atau pelataran parkir	Pusat-pusat kegiatan									
		PPK								PPK									
		Sub PPK								Sub PPK									
		Kawasan pengembangan TOD								Kawasan pengembangan TOD									
		Terminal Penumpang								Terminal Penumpang									
		Stasiun KA								Stasiun KA									
		Kawasan Istana Bogor/Kebun Raya Bogor								Kawasan Istana Bogor/Kebun Raya Bogor									
		Kawasan pasar Bogor								Kawasan pasar Bogor									
		Kawasan perbatasan/pintu masuk kota								Kawasan perbatasan/pintu masuk kota									

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
III	Parkir							III	Parkir									
2	Pembangunan prasarana "park and ride"	Kawasan pengembangan TOD						2	Pembangunan prasarana "park and ride"	Kawasan pengembangan TOD								
		Kawasan Suryakencana									Kawasan Suryakencana							
		Kawasan perbatasan/pintu masuk kota									Kawasan perbatasan/pintu masuk kota							
3	Pembatasan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan	Seluruh jalan						3	Pembatasan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan	Seluruh jalan								
4	Perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak memadai baik perluasan secara vertikal maupun horizontal	Pusat-pusat kegiatan dan fasilitas umum lainnya						4	Perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak memadai baik perluasan secara vertikal maupun horizontal	Pusat-pusat kegiatan dan fasilitas umum lainnya								
		Pool bis wisata Baranangsiang									Pool bis wisata Baranangsiang							
5	Penetapan ketentuan penyediaan parkir serta rasio ruas parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan kegiatan	Kota Bogor						5	Penetapan ketentuan penyediaan parkir serta rasio ruas parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan kegiatan	Kota Bogor								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IV	Angkutan Umum Massal							IV	Angkutan Umum Massal									
1	Pengembangan angkutan umum massal dalam kota	Koridor angkutan umum massal						1	Pengembangan angkutan umum massal dalam kota	Koridor angkutan umum massal								
2	Pelngembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan wilayah Kabupaten Bogor	Koridor angkutan umum massal						2	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan wilayah Kabupaten Bogor	Koridor angkutan umum massal								
3	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan DKI Jakarta	Bogor – Jabodetabek dan Bandara Soekarno Hatta						3	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan DKI Jakarta	Bogor – Jabodetabek dan Bandara Soekarno Hatta								
4	Program pengaturan kembali (re-routing) angkutan umum	Route angkutan perkotaan						4	Program pengaturan kembali (re-routing) angkutan umum	Route angkutan perkotaan								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
IV	Angkutan Umum Massal							IV	Angkutan Umum Massal									
5	Peningkatan manajemen operasional dan kinerja pelayanan angkutan	Kota Bogor						5	Peningkatan manajemen operasional dan kinerja pelayanan angkutan	Kota Bogor								
6	Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan	Kota Bogor						6	Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan	Kota Bogor								
7	Penggunaan angkutan umum berbahan bakar gas	Kota Bogor						7	Penggunaan angkutan umum berbahan bakar gas	Kota Bogor								
8	Penggunaan angkutan umum tenaga listrik	Kota Bogor						8	Penggunaan angkutan umum tenaga listrik	Kota Bogor								

RTRW LAMA								RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
V	Jaringan Lintas							V	Jaringan Lintas										
1	Penetapan rute jaringan lintas	Kota Bogor						1	Penetapan rute jaringan lintas	Kota Bogor									
2	Peningkatan kualitas jaringan lintas	Kota Bogor						2	Peningkatan kualitas jaringan lintas	Kota Bogor									
3	Pembatasan beban sumbu maksimal	Kota Bogor						3	Pembatasan beban sumbu maksimal	Kota Bogor									
VI	Pelayanan Angkutan Wisata dalam Kota							VI	Pelayanan Angkutan Wisata dalam Kota										
1	Penetapan rute angkutan wisata	Kota Bogor						1	Penetapan rute angkutan wisata	Kota Bogor									
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan wisata dalam kota sebagai bagian pelayanan penunjang promosi pariwisata yang menghubungkan lokasi wisata dan kawasan pusaka	Kota Bogor						2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan wisata dalam kota sebagai bagian pelayanan penunjang promosi pariwisata yang menghubungkan lokasi wisata dan kawasan pusaka	Kota Bogor									
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transit angkutan wisata	Kota Bogor						3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transit angkutan wisata	Kota Bogor									



RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VII	Pelayanan Angkutan Sekolah Dalam Kota							VII	Pelayanan Angkutan Sekolah Dalam Kota									
1	Penetapan rute angkutan sekolah	Kota Bogor						1	Penetapan rute angkutan sekolah	Kota Bogor								
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan sekolah sebagai bagian penerapan rute aman selamat sekolah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa dari/ke sekolah	Kota Bogor						2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan sekolah sebagai bagian penerapan rute aman selamat sekolah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa dari/ke sekolah	Kota Bogor								
3	Penataan koridor/rute pelayanan secara efektif yang mengintegrasikan sekolah-sekolah yang berdampak kemacetan	Kota Bogor						3	Penataan koridor/rute pelayanan secara efektif yang mengintegrasikan sekolah-sekolah yang berdampak kemacetan	Kota Bogor								

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Pedestrian/ Jalur pejalan kaki																
1	Kajian pengembangan prasarana pejalan kaki	Kota Bogor															
2	Kajian pengembangan jalur khusus sepeda	Kota Bogor															
3	Pembuatan DED prasarana pejalan kaki	Tersebar di Kota Bogor															
4	Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan bagi pejalan kaki dan pesepeda																
a	Pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki	Jalan-jalan arteri dan kolektor															
		Jalan-jalan lokal di kawasan komersial dan kawasan perumahan kepadatan tinggi															
		Stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, dan sarana ibadah															
		Lokasi menuju dan dari halte angkutan umum															



RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Pedestrian/ Jalur pejalan kaki																
b	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki yang ada	Menyebar di Kota Bogor															
c	Pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk pejalan kaki dan sepeda	Menyebar di Kota Bogor															
d	Pembangunan prasarana dan sarana jaringan	Menyebar di Kota Bogor															
5	Menyediakan prasarana dan sarana bagi pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas	Menyebar di Kota Bogor															
6	Penataan pedestrian	PPK															
7	Pembangunan pedestrian	Sub PPK pusat-pusat kegiatan															
8	Penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor / sepeda	Menyebar di Kota Bogor															

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
VIII	Jaringan Kereta Api							VIII	Jaringan Kereta Api									
1	Peningkatan jalur kereta api commuter line Bogor - Jakarta	Jalur KA Bogor - Jakarta						1	Peningkatan jalur kereta api commuter line Bogor - Jakarta	Jalur KA Bogor - Jakarta								
a	Peningkatan jalur kereta api Bogor Sukabumi	Jalan KA Bogor - Sukabumi						2	Peningkatan jalur kereta api Bogor Sukabumi	Jalan KA Bogor - Sukabumi								
b	Pembangunan jalur kereta ringan dalam kota	Tanah Baru - Sukaresmi - Bubulak - Stasiun Bogor - Mulyaharja - Kertamaya - Wangun - Baranangsia ng - Tanah Baru																
2	Pembangunan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan kereta ringan dalam kota yang terintegrasi dengan LRT Cawang - Bogor	Sepanjang jalur kereta ringan Kota Bogor						3	Pembangunan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan angkutan umum berbasis rel yang terintegrasi dengan angkutan umum massal berbasis rel Cawang - Bogor	Sepanjang jalur kereta ringan Kota Bogor								



RTRW LAMA								RTRW BARU												
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-									
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031		
VIII	Jaringan Kereta Api							VIII	Jaringan Kereta Api											
3	Pengembangan simpul/stasiun kereta ringan	Tanah Baru						4	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala sub kota	Tanah Baru										
		Sukaresmi																		
		Bubulak																		
		Kertamaya																		
		Mulyaharja Baranangsiang																		
		Wangun																		
4	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor dan sekitarnya sebagai kawasan TOD	Stasiun Bogor dan Sekitarnya																		
5	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor dan Paledang dan sekitarnya	Paledang					5	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor Paledang dan sekitarnya	Paledang											
6	Revitalisasi Stasiun Kereta Api Batutulis	Batutulis																		
7	Pembangunan Stasiun Kereta Api Genteng	Genteng																		

Tabel 6.6

Indikasi Program Perwujudan Jaringan Prasarana Kota

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								B.2	SISTEM JARINGAN ENERGI								
I	Pengembangan Sistem Jaringan Energi Listrik						I	Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrika									
1.	Pengembangan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan jaringan dan gardu listrik	Seluruh kota					1	Pengembangan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan jaringan dan gardu listrik	Seluruh kota								
2.	Peningkatan pelayanan jaringan listrik ke seluruh wilayah kota						2	Peningkatan pelayanan jaringan listrik ke seluruh wilayah kota									
a	Peningkatan kapasitas listrik di daerah yang sudah terlayani	Seluruh kota					a	Peningkatan kapasitas listrik di daerah yang sudah terlayani	Seluruh kota								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								B.2	SISTEM JARINGAN ENERGI									
I	Pengembangan Sistem Jaringan Energi Listrik							I	Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrika									
b	Peningkatan jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah baru yang belum terlayani.	Seluruh kota						b	Peningkatan jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah baru yang belum terlayani.	Seluruh kota								
3.	Peningkatan instalasi jaringan listrik	Seluruh kota						3	Peningkatan instalasi jaringan listrik	Seluruh kota								
4.	Pengembangan sistem pengamanan untuk mengurangi jumlah kehilangan energi listrik	Seluruh kota						4	Pengembangan sistem pengamanan untuk mengurangi jumlah kehilangan energi listrik	Seluruh kota								

RTRW LAMA							RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
							B.2	SISTEM JARINGAN ENERGI										
I	Pengembangan Sistem Jaringan Energi Listrik						I	Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrika										
5.	Pengembangan sistem jaringan/transmisi tenaga listrik bawah tanah	Kawasan pembangunan baru yang tersebar di seluruh kota					5	Pengembangan sistem jaringan/transmisi tenaga listrik bawah tanah	Kawasan pembangunan baru yang tersebar di seluruh kota									
6.	Peningkatan jumlah cadangan penyediaan energi listrik	Seluruh kota					6	Peningkatan jumlah cadangan penyediaan energi listrik	Seluruh kota									
7.	Pengembangan energi alternatif yang berasal dari hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, biogas, maupun sumber energi terbarukan lainnya untuk mengantisipasi kendala pasokan energi listrik	Seluruh kota					7	Pengembangan energi alternatif yang berasal dari hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, biogas, maupun sumber energi terbarukan lainnya untuk mengantisipasi kendala pasokan energi listrik	Seluruh kota									

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								B.2	SISTEM JARINGAN ENERGI								
II	Pengembangan Sistem Jaringan Gas							II	Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Gas								
1.	Peningkatan pelayanan sambungan rumah tangga maupun sambungan untuk kawasan fungsional kota lainnya	Seluruh kota						1	Peningkatan pelayanan sambungan rumah tangga maupun sambungan untuk kawasan fungsional kota lainnya	Seluruh kota							
2.	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas untuk kendaraan bermotor	Seluruh kota						2	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas untuk kendaraan bermotor	Seluruh kota							
3.	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji	Seluruh kota						3	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji	Seluruh kota							
4.	Pengembangan sistem keamanan jaringan gas	Seluruh kota						4	Pengembangan sistem keamanan jaringan gas	Seluruh kota							



RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
III	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi							B.3	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI									
1.	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sistem kabel dan sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor						1	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sistem kabel dan sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor								
2	Pengembangan dan perluasan jaringan internet	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor						2	Pengembangan dan perluasan jaringan internet	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor								
3	Pengembangan jaringan teknologi informasi bagi lembaga-lembaga pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor						3	Pengembangan jaringan teknologi informasi bagi lembaga-lembaga pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor								
4	Penetapan dan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama oleh para operator layanan telekomunikasi untuk sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor						4	Penetapan dan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama oleh para operator layanan telekomunikasi untuk sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor								

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
III	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi							B.3	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI								
5	Peningkatan sistem teknologi telekomunikasi pada kawasan budidaya	kawasan peruntukan perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran						5									
6	Pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi	bagian wilayah Kota Bogor						6	Pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor							
7	Membangun tower bersama	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor						7	Membangun tower bersama	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor							
8	WIFI Publik	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor						8	WIFI Publik	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor							
9	Pengembangan micro cell	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor						9	Pengembangan micro cell	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor							
10	Pengembangan jaringan internet pemerintah daerah	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor						10	Pengembangan jaringan internet pemerintah daerah	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor							



RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
IV	Sumber Daya Air							B.4	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR									
1	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air Lintas Provinsi	Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane						1	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air Lintas Provinsi	Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane								
2	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air lintas kabupaten/kota	Sungai Cipakancilan						2	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air lintas kabupaten/kota	Sungai Cipakancilan								
		Sungai Cibalok								Sungai Cibalok								
		Sungai Ciangke								Sungai Ciangke								
		Sungai Ciomas								Sungai Ciomas								
		Sungai Cigede								Sungai Cigede								
											Sungai Cisindangbarang							
							Sungai Ciapus											
							Sungai Cibalok											
3	Peningkatan pengelolaan wilayah sungai di wilayah kota	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane						3	Peningkatan pengelolaan wilayah sungai di wilayah kota	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane								
4	Pemeliharaan jaringan irigasi	WP Pasima, WP Purwa, WP Daksina						4	Pemeliharaan jaringan irigasi	WP Pasima, WP Purwa, WP Daksina								

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	Normalisasi sungai	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane						5	Normalisasi sungai	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane							
6	Pembangunan sumur resapan di perumahan	Sesuai hasil kajian						6	Pembangunan sumur resapan di perumahan	Sesuai hasil kajian							
7	Pembangunan kolam retensi pada lokasi yang memiliki potensi genangan	Sesuai hasil kajian						7	Pembangunan kolam retensi pada lokasi yang memiliki potensi genangan	Sesuai hasil kajian							
8	Perlindungan/pelestarian sumber air baku (sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air)	Kota Bogor						8	Perlindungan/pelestarian sumber air baku (sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air)	Kota Bogor							
9	Peningkatan kualitas air	Kota Bogor						9	Peningkatan kualitas air	Kota Bogor							
10	Pencegahan pencemaran air	Kota Bogor						10	Pencegahan pencemaran air	Kota Bogor							

RTRW LAMA								RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
								B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN										
V	Sistem Jaringan Air Minum							I.	Sistem Jaringan Air Minum										
A.	Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Perpipaan								Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Perpipaan										
1	Penyediaan jaringan air baku untuk air minum																		
a.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan unit sambungan rumah tambahan	Zona 1						1	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan SPAM Zona 1 : a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air □ Pembangunan District Metering Area (DMA) 	Zona 1									

RTRW LAMA								RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan unit sambungan rumah tambahan	Zona 2						2	Pengembangan SPAM Zona 2 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air <input type="checkbox"/> Pembangunan District Metering Area (DMA)	Zona 2									

RTRW LAMA								RTRW BARU												
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-									
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031		
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan unit sambungan rumah tambahan	Zona 3						3	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan SPAM Zona 3 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air □ Pembangunan <i>District Metering Area (DMA)</i> 	Zona 3										

RTRW LAMA								RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan unit sambungan rumah tambahan	Zona 4						4	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan SPAM Zona 4 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air □ Pembangunan <i>District Metering Area (DMA)</i> 	Zona 4									

RTRW LAMA								RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan unit sambungan rumah tambahan	Zona 5						5	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan SPAM Zona 5 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air □ Pembangunan District Metering Area (DMA) 	Zona 5									

RTRW LAMA								RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan unit sambungan rumah tambahan	Zona 6						6	Pengembangan SPAM Zona 6 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air □ Pembangunan District Metering Area (DMA)	Zona 6									

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								7	Pengembangan SPAM Zona 7 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air <input type="checkbox"/> Pembangunan District Metering Area (DMA)	Zona 7								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								8	Pengembangan SPAM Zona baru a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air <input type="checkbox"/> Pembangunan District Metering Area (DMA)	Kota Bogor								

RTRW LAMA								RTRW BARU													
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-										
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031			
b.	Peningkatan target pelanggan																				
	a. 12.000 SR oer tahun	Kota Bogor																			
	b. 15.000 SR per tahun	Kota Bogor																			
c.	Peningkatan distribusi air bersih	Dari IPA Dekeng ke Reservoir Pajajaran																			
		Dari IPA Cipaku ke Reservoir Cipaku																			

RTRW LAMA							RTRW BARU												
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-								
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031	
d.	Pembangunan dan peningkatan jaringan transmisi air bersih	Dari Mata Air Tangkil ke Reservoir Rancamaya																	
		Dari Mata Air Bantar Kambing ke Reservoir Cipaku																	
		Dari Mata Air dan IPA Palasari ke Reservoir Palasari																	
		Dari Mata Air Kota Batu ke Reservoir Kota Batu																	
		intake Ciherang Pondok ke instalasi pengolahan Dekeng																	

RTRW LAMA							RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
2.	Peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat																	
a.	Pembangunan SPAM	SPAM Katulampa																
		Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur																
		SPAM Palasari																
		Desa Palasari, Kabupaten Bogor																
		SPAM Cikereteg (kapasitas 240 L/dt)																
		Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan																

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
b.	Pembangunan IPA Cikereteg	Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan																
c.	Optimalisasi Dekeng I dan uprating Dekeng II	Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan																
d.	Pengoperasian dan uprating intake Cipaku	Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan																
e.	Pengadaan dan pemasangan pipa by pass resv Cipaku	Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan																

RTRW LAMA								RTRW BARU												
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-									
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031		
3.	Pembangunan reservoir	Reservoir Bantarkambi ng																		
		Kapasitas 2000 M3																		
		Reservoir Jabaru																		
		Kapasitas 3000 M3																		
		Reservoir Merdeka																		
		Kapasitas 5000 M3																		
		Reservoir Cikereteg																		
		Kapasitas 3000 M3																		
a.	Penggantian jaringan perpipaan yang sudah lama/usang	Kota Bogor																		

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
4.	Pengembangan dan perluasan jaringan distribusi dan retikulasi untuk meningkatkan daerah pelayanan air bersih dan air minum																	
b.	Pengembangan Jaringan Retikulasi	Kota Bogor																
c.	PB MBR	Kota Bogor																
5.	Penurunan tingkat kehilangan air dari produksi dan dari distribusi																	
a.	Perbaikan sistem distribusi	Kota Bogor																
b.	Pembangunan DMA	Kota Bogor																
c.	Penggantian Meter Induk	Kota Bogor																
d.	Tera Meter Air	Kota Bogor																

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
6	Peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas; dan keterjangkauan untuk masyarakat																	
a.	Pemeliharaan Instalasi Produksi, Bangunan Instalasi dan ME (Biaya)	Kabupaten dan Kota Bogor																
b.	Pengadaan dan Pemasangan Scada System	Kelurahan Genteng dan Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan																

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
B.	Penyediaan Air Minum Sistem Non Perpipaan								Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Bukan Perpipaan									
1	Pemanfaatan mata air dengan debit kecil, sumur dalam dan sumur dangkal kolektif pada daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM Tirta Pakuan	Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor Barat						1	Pemanfaatan mata air dengan debit kecil, sumur dalam dan sumur dangkal kolektif pada daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM Tirta Pakuan	Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor Barat								
2	Perluasan pelayanan sistem non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air minum	Kota Bogor						2	Perluasan pelayanan sistem jaringan bukan perpipaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air minum	Kota Bogor								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
B.	Penyediaan Air Minum Sistem Non Perpipaan								Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Bukan Perpipaan									
3	Pengembangan fasilitas penampungan air skala lingkungan	Kota Bogor						3	Pengembangan fasilitas penampungan air skala lingkungan	Kota Bogor								
4.	Membangun SPAM berbasis masyarakat di daerah yang memiliki potensi air tanah	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak mendapatkan layanan PDAM. Prioritas Daerah Pelayanan Non PDAM						4	Membangun SPAM bukan jaringan pipa di daerah yang memiliki potensi air tanah dan tidak terlayani jaringan perpipaan	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak mendapatkan layanan jaringan perpipaan. Prioritas Daerah Pelayanan bukan jaringan pipa								

RTRW LAMA							RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
C.	Konservasi dan pengembangan area sumber air baku secara berkelanjutan	Kota Bogor						5	Konservasi dan pengembangan area sumber air baku secara berkelanjutan	Kota Bogor								
D.	Pembukaan peluang bagi pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan air minum kota	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan kayanan PDAM																
E.	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada sumber-sumber mata air yang berada di dalam perumahan	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan kayanan PDAM						6	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada sumber-sumber mata air	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan Layanan PDAM								



RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VI	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							II.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) komunal pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan	Di kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan						1	Optimalisasi dan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik komunal beserta jaringannya pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan	Di kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan							
3	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kelurahan Kayumanis						2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Kota dan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Kota	Kelurahan Kayumanis							

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VI	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							II.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
4	Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara dan kawasan permukiman															
5	Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat (SPALD-S)	Kawasan dengan kepadatan < 200 jiwa/ha, diarahkan ke WP Daksina															
6	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Setempat (SPALD-S) dan sarana prasarananya	Kawasan dengan kepadatan >200 jiwa/Ha, diarahkan ke WP Samida dan WP Purwa					3	Optimalisasi dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Permukiman menjadi Skala Kota dan IPLT	Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara								



RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
VI	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							II.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
7	Pengembangan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Kota Bogor						4	Pengembangan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Kota Bogor								
8.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran	Seluruh Kota Bogor						5	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran	Seluruh Kota Bogor								
9.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah	Seluruh Kota Bogor																

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VI	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							II.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
10.	Pembuatan Rencana Induk Sanitasi yang dilengkapi dengan rencana detilasinya (DED)	Seluruh kota Bogor						6	Pembuatan Rencana Induk Air Limbah Domestik yang dilengkapi dengan rencana detil (DED)	Seluruh kota Bogor								
11.	Penetapan sanksi bagi pencemar badan air	Seluruh Kota Bogor																
								7	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan/ WP Daksina								
								8	Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)	Seluruh Kota Bogor								
								9	Penyusunan regulasi terkait air limbah domestik	Seluruh Kota Bogor								

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VII	Persampahan							III	Persampahan								
1.	membentuk sekretariat bersama pengelolaan sampah regional	Kota Bogor dan Kabupaten Bogor															
2.	Optimalisasi dan pemeliharaan fungsi TPA	TPA Galuga						1	Optimalisasi dan pemeliharaan fungsi TPA	TPA Galuga							
3.	Pemanfaatan TPA Regional Nambo sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu	TPA Regional Luna (Lulut dan Nambo)						2	Pemanfaatan TPA Regional Nambo sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu	TPA Regional Nambo							
4.	Peningkatan kualitas pengelolaan serta sarana dan prasarana TPA	Persiapan dukungan pada TPA Luna (Lulut dan Nambo)						3	Peningkatan kualitas pengelolaan serta sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan TPA Regional Nambo	Kota Bogor							
5.	Pembangunan dan optimalisasi SPA pada kawasan sarana prasarana umum terpadu Ciluar	Ciluar						4	Pembangunan dan optimalisasi SPA pada kawasan sarana prasarana umum terpadu Ciluar	Ciluar							

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VII	Persampahan							III	Persampahan								
6.	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode 3R (Reuse, Reduce, Recycle)	Kota Bogor						5	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode 3R (Reuse, Reduce, Recycle) melalui pembangunan TPS 3R	Kota Bogor							
7.	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode bank sampah	Kota Bogor						6	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode bank sampah	Kota Bogor							
8.	Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan	Diutamakan disetiap kawasan perumahan baru						7	Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan	Diutamakan disetiap kawasan perumahan baru							
9.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan kota	Kota Bogor						8	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan kota	Kota Bogor							

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VII	Persampahan						III	Persampahan									
10.	Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga) dan terintegrasi dengan sistem pengangkutannya	Masing-masing kelurahan					9	Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga) dan terintegrasi dengan sistem pengangkutannya	Masing-masing kelurahan								
11.	Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	Kota Bogor					10	Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	Kota Bogor								
12.	Membangun ITF (Intermediate Treatment Facilities)	Kota Bogor															

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VIII	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase						IV	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase									
1	Penanganan drainase primer	S. Cisindangbarang, S. Carampulang, S. Ciomas dan anak sungainya, S. Cidepit, S. Cipinangding, S. Cibeureum, S. Cinangka, S. Cisadane Hulu, Jl. Cipaku, S. Ciawi, S. Cipaku, S. Ciliwung, S. Ciseuseupan, S. Ciluar, S. Cibeuleut, S. Cimahpar, S. Cikerti, S. Cibuluh, S. Ciparigi, S. Ciliwung, Jl.					1	Penanganan drainase primer	S. Cisindangbarang, S. Carampulang, S. Ciomas dan anak sungainya, S. Cidepit, S. Cipinangding, S. Cibeureum, S. Cinangka, S. Cisadane Hulu, Jl. Cipaku, S. Ciawi, S. Cipaku, S. Ciliwung, S. Ciseuseupan, S. Ciluar, S. Cibeuleut, S. Cimahpar, S. Cikerti, S. Cibuluh, S. Ciparigi, S. Ciliwung, Jl.								

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VIII	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase							IV	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase								
2	Penanganan drainase sekunder	Anak sungai cisindangbarang, Jalan Jakarta - Bogor, Jalan lingkaran luar, JL,raya Bogor Jakarta, S.Cikaret, Jl.Dr.Semeru, Cikubang, Jl.Cibeureum, Rancamaya, Jl. Durian raya, Jl.Rd.Hanafiah, Jl.Rd.Konyong, Jl.Tanah Baru, Jl.Pangeran Sugiri, Jl. Sudirman, Jl.Sawojajar, Jl.Surya Somantri						2	Penanganan drainase sekunder	Anak sungai cisindangbarang, Jalan Jakarta - Bogor, Jalan lingkaran luar, JL,raya Bogor Jakarta, S.Cikaret, Jl.Dr.Semeru, Cikubang, Jl.Cibeureum, Rancamaya, Jl. Durian raya, Jl.Rd.Hanafiah, Jl.Rd.Konyong, Jl.Tanah Baru, Jl.Pangeran Sugiri, Jl. Sudirman, Jl.Sawojajar, Jl.Surya Somantri							

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
VIII	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase							IV	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase									
3	Penanganan drainase tersier	Kel. Balumbang, Semplak, Situ Gede, Kel.Loji, Jl.Gunung Batu, Jel.Menteng, Cilendek, Pabuaran, Ranggamekar, Rancamaya, Cipaku, Bojongkerta, Katulampa, Desa Cibuluh, Tanah Baru, Bantarsari, Jl. roda, Tegal gundil, baranangsiang, sukaresmi, Kedung Badak, Parung						3	Penanganan drainase tersier	Kel. Balumbang, Semplak, Situ Gede, Kel.Loji, Jl.Gunung Batu, Jel.Menteng, Cilendek, Pabuaran, Ranggamekar, Rancamaya, Cipaku, Bojongkerta, Katulampa, Desa Cibuluh, Tanah Baru, Bantarsari, Jl. roda, Tegal gundil, baranangsiang, sukaresmi, Kedung Badak, Parung, drainase lokal.								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
VIII	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase							IV	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase									
4	Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase makro dari kegiatan pembangunan	Kawasan sempadan sungai						4	Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase makro dari kegiatan pembangunan	Kawasan sempadan sungai								
5.	Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah menjadi saluran drainase	Saluran induk Ciliwung Katulampa, Saluran Cibalok, Saluran Bantarjati (Cibagolo), Saluran induk Cisadane Empang, Saluran sekunder Cibuluh, Saluran sekunder Cidepit, Saluran sekunder Ciereng.						5	Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah menjadi saluran drainase	Kota Bogor								

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VIII	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase							IV	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase								
6.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase	Seluruh Kota Bogor						6	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase	Kota Bogor							
7.	Normalisasi sungai dan saluran	Kali Kayang						7	Normalisasi sungai dan saluran	Kota Bogor							
8.	Revitalisasi sempadan sungai sesuai dengan fungsinya	Kawasan Sempadan Sungai						8	Revitalisasi sempadan sungai sesuai dengan fungsinya	Kawasan Sempadan Sungai							
9.	Optimalisasi/rehabilitasi saluran drainase primer.	Saluran induk Ciliwung Katulampa, Saluran Cibalok, Saluran Bantarjati (Cibagolo), Saluran induk Cisadane Empang,															

RTRW LAMA							RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
VIII	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase							IV	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase									
10.	Sertifikasi kepemilikan danau dan situ-situ kecil, misalnya dengan sertifikat BPN.	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor																
11	Mengamankan embung - embung dan situ yang telah ada dari pendangkalan dan pembangunan fisik	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor						9	Mengamankan embung - embung dan situ yang telah ada dari pendangkalan dan pembangunan fisik	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor								
12.	Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir	Kecamatan Bogor Utara; dan Kecamatan Tanah Sareal						10	Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir	Kecamatan Bogor Utara; dan Kecamatan Tanah Sareal								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
VIII	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase							IV	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase									
10	Perumahan baru diarahkan untuk membuat sumur resapan, kolam retensi dan/atau detensi dengan konsep zero run off, eco drainage, dan Low impact development	Kota Bogor																
								11	Pembangunan sumur resapan, kolam retensi dan/atau detensi dengan konsep zero run off, eco drainage, dan Low impact development	Kota Bogor								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								V	Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana									
								1	Identifikasi lokasi rawan bencana, potensi ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor								
								2	Pendataan dan pemetaan ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor								
								3	Penyusunan rencana induk proteksi kebakaran	Kota Bogor								
								4	Penetapan dan peningkatan standar fasilitas minimum kelaikan bangunan dan kelengkapan peralatan	Kota Bogor								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								5	Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh	Kota Bogor								
									kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi									
								6	Penyediaan prasarana sarana penunjang proses evakuasi bencana	Kota Bogor								
								7	Sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor								
								8	Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana secara rinci	Kota Bogor								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
								9	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana	Kota Bogor								
								10	Penanganan kawasan rawan bencana banjir	Kawasan Pacilong Kelurahan Kebon Pedes, Kampung Situ Asem Kelurahan Mekarwangi, Kampung Kramat Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Katulampa, Kelurahan Cibadak, Kelurahan Cibuluh								
								11	Penanganan kawasan rawan bencana longsor	Di sepanjang sungai Cisadane, sungai Ciomas, saluran Cisadane Empang, saluran Cidepit, saluran Cibalok, sepanjang sungai Ciliwung, dan lokasi-lokasi yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) terutama di Kecamatan Bogor Selatan								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								12	Penanganan kawasan rawan bencana kebakaran	Perumahan tidak teratur berkepadatan tinggi di Kecamatan Bogor Tengah.								
								13	Sosialisasi program mitigasi bencana	Kota Bogor								
								14	Peningkatan kesiagaan terhadap bencana	Kota Bogor								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
								VI	Pedestrian/ Jalur pejalan kaki									
								1	Kajian pengembangan prasarana pejalan kaki	Kota Bogor		■	■					
								2	Kajian pengembangan jalur khusus sepeda	Kota Bogor		■	■					
								3	Pembuatan DED prasarana pejalan kaki	Tersebar di Kota Bogor		■	■	■	■			
								4	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki yang ada	Menyebar di Kota Bogor	■	■	■	■	■	■	■	
								5	Pembangunan sarana dan prasarana kendaraan tidak bermotor	Jalan Mayor Oking		■	■	■				
							Jalan MA Salmun				■	■	■					
							Jalan Merdeka				■	■	■					
							Jalan RE Martadinata				■	■	■					
							Jalan Paledang				■	■	■					

RTRW LAMA								RTRW BARU													
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-										
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031			
								VI	Pedestrian/ Jalur pejalan kaki												
								5	Pembangunan sarana dan prasarana kendaraan tidak bermotor	Jalan Kapten Muslihat											
										Jalan KS Tubun											
										Jalan KH Sholeh Iskandar											
										Jalan KH Abdullah Bin Nuh											
										Jalan Brigjen											
										Jalan Dr. Sumeru											
										Jalan Mawar											
										Jalan Sempak											
										Jalan Ir. H. Djuanda											
										Jalan Jenderal Sudirman											
										Jalan Jenderal Ahmad Yani											
										Jalan Dadali											
										Jalan Jalak Harupat											
										Jalan Pemuda											

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								VI	Pedestrian/ Jalur pejalan kaki									
								5	Pembangunan sarana dan prasarana kendaraan tidak bermotor	Jalan Suryakencana								
										Jalan Siliwangi								
										Jalan Pajajaran								
										Jalan Otto Iskandardinata								
										Jalan Adnawijaya								
										Jalan Ahmad Sobana								
										Jalan Ahmad Syam								
										Jalan-jalan lainnya								
										Stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, lokasi menuju angkutan umum								
										Lokasi menuju dan dari halte angkutan umum								

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								VI	Pedestrian/ Jalur pejalan kaki									
								6	Pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk pejalan kaki									
									Jembatan penyeberangan orang	Jalan arteri dan kolektor								
									Underpass penyeberangan orang	Sekitar Kebun Raya Bogor, TOD								
									Fasilitas integrasi yang menghubungkan TOD	Jl. Suryakacancana – TOD Baranangsiang								
										Kawasan TOD								
IX	Jaringan Prasarana Kota Terpadu							VII	Jaringan Prasarana Kota Terpadu									
1	Menyusun rencana pengembangan jaringan prasarana kota terpadu							1	Menyusun rencana pengembangan jaringan prasarana kota terpadu	Kota Bogor								
2	Mengembangkan jaringan prasarana bawah tanah terpadu							2	Mengembangkan jaringan prasarana bawah tanah terpadu	Kota Bogor								



Tabel 6.7

Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung

RTRW LAMA							RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
A	Kawasan Lindung							A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG									
I	Kawasan Perlindungan Setempat							I	Kawasan Perlindungan Setempat									
1	Penataan sempadan sungai	Menyebar di kota Bogor						1	Penataan kawasan sempadan sungai	Menyebar di kota Bogor								
2	Penataan sempadan danau/situ	Menyebar di kota Bogor						2	Penataan kawasan sempadan	Menyebar di kota Bogor								
3	Penataan sempadan kawasan sekitar mata air	Menyebar di kota Bogor						3	Penataan sempadan kawasan sekitar mata air	Menyebar di kota Bogor								
4	Pembebasan lahan publik di sempadan sungai, danau dan mata air	Menyebar di kota Bogor						4	Pembebasan lahan di sempadan sungai, danau dan mata air	Menyebar di kota Bogor								
5	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang ada disempadan sungai, danau/situ dan mata air	Menyebar di kota Bogor						5	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang ada disempadan sungai, danau/situ dan mata air	Menyebar di kota Bogor								

RTRW LAMA							RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
A	Kawasan Lindung						A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG										
I	Kawasan Perlindungan Setempat						I	Kawasan Perlindungan Setempat										
6	Rehabilitasi kawasan perlindungan setempat yang mengalami penurunan fungsi lindung	Menyebar di kota Bogor					6	Rehabilitasi kawasan perlindungan setempat yang mengalami penurunan fungsi lindung	Menyebar di kota Bogor									
7	Perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai dan situ	Menyebar di kota Bogor					7	Perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai dan situ	Menyebar di kota Bogor									
8	Penghijauan sempadan sungai dan situ	Menyebar di kota Bogor					8											
9	Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Pasima	Kelurahan Balumbangjaya, Kelurahan Situgede, Kelurahan Margajaya					9	Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Pasima	Kelurahan Balumbangjaya, Kelurahan Situgede, Kelurahan Margajaya									

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
A	Kawasan Lindung							A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG									
I	Kawasan Perlindungan Setempat							I	Kawasan Perlindungan Setempat									
10	Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Daksina	Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Bojong Kerta, Kelurahan Harjasari Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Genteng						10	Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Daksina	Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Bojong Kerta, Kelurahan Harjasari Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Genteng								
11	Pengembangan program peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan perlindungan setempat	Kota Bogor						11										

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
A	Kawasan Lindung							A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG									
I	Kawasan Perlindungan Setempat							I	Kawasan Perlindungan Setempat									
								12	Naturalisasi sempadan sungai dan situ	Menyebar di kota Bogor								
								13	Pembangunan Taman-taman resapan dengan konsep water harvesting untuk konservasi air dan mengoptimalkan konsep zero run off	Tersebar di Kota Bogor								
								14	Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan perlindungan setempat									

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Kawasan Lindung							A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG									
II	Kawasan pelestarian alam, perlindungan plasma nutfah eks situ							II	Kawasan konservasi									
1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan pelestarian alam dan perlindungan plasma nutfah eks situ	Hutan Penelitian Dramaga Kebun Raya Bogor						1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan konservasi	Kebun Raya Bogor								
2	Pengembangan hutan kota baru	WP Pasima (WP B) WP Utara (WP C), WP Purba (WP D) WP Daksina (WP E)						2										
3	Penataan kawasan di sekitar Kebun Raya Bogor	Kawasan Sekitar Kebun Raya						3	Penataan kawasan di sekitar Kebun Raya Bogor	Kawasan Sekitar Kebun Raya								

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Kawasan Lindung							A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG								
III	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan																
1	Mengidentifikasi bangunan dan kawasan cagar budaya dan melegalisasikan	Menyebar di kota Bogor															
2	Menyusun panduan arsitektur dan rancang kota untuk penanganan kawasan tersebut dan dilegalisasikan	Kota Bogor															
3	Penyusunan kajian pemanfaatan ruang dan kegiatan serta bentuk insentif-disinsentif terhadap bangunan dan kawasan cagar	Kota Bogor															
4	Sosialisasi lokasi dan aturan pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya	Kota Bogor															

RTRW LAMA							RTRW BARU											
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
A	Kawasan Lindung							A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG									
III	Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan																	
5	Melakukan upaya penyelamatan dengan memelihara dan menjaga bangunan dan kawasan cagar budaya yang masih asli serta pemberian insentif	Kota Bogor																
6	Restorasi dan meremajakan bangunan dan kawasan cagar budaya yang telah berubah bentuk aslinya dan mengalami alih fungsi yang tidak sesuai dengan ketentuan	Kota Bogor																
7	Melakukan perlindungan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya	Kota Bogor																
8	Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kota Bogor																

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
A	Kawasan Lindung							A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG									
IV	Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana																	
1	Identifikasi lokasi rawan bencana, potensi ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor																
2	Pendataan dan pemetaan ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor																
3	Penyusunan rencana induk proteksi kebakaran	Kota Bogor																
4	Penetapan dan peningkatan standar fasilitas minimum kelaikan bangunan dan kelengkapan peralatan	Kota Bogor																
5	Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi	Kota Bogor																

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Kawasan Lindung							A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG								
IV	Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana																
6	Penyediaan prasarana sarana penunjang proses evakuasi bencana	Kota Bogor															
7	Sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor															
8	Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana secara rinci	Kota Bogor															
9	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana	Kota Bogor															
10	Penanganan kawasan rawan bencana banjir	Kawasan Pacilong Kelurahan Kebon Pedes, Kampung Situ Asem Kelurahan Mekarwangi, Kampung Kramat Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Kayumanis, dan Kelurahan Katulampa															

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
A	Kawasan Lindung							A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG									
IV	Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana																	
11	Penanganan kawasan rawan bencana longsor	Di sepanjang sungai Cisadane, sungai Ciomas, saluran Cisadane Empang, saluran Cidepit, sepanjang sungai Ciliwung, dan lokasi-lokasi yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) terutama di Kecamatan Bogor Selatan																
12	Penanganan kawasan rawan bencana kebakaran	Perumahan tidak teratur berkepadatan tinggi di Kecamatan Bogor Tengah.																
13	Sosialisasi program mitigasi bencana	Kota Bogor																
14	Peningkatan kesiagaan terhadap bencana	Kota Bogor																

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Kawasan Lindung							A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG								
V	Ruang Terbuka Hijau							III	Ruang Terbuka Hijau								
1	Identifikasi potensi RTH Publik	Kota Bogor						1	Pendataan RTH Publik (profil RTH, pemanfaatan ruang, perubahan fungsi, sistem informasi)	Kota Bogor							
2	Penyusunan Buku Neraca RTH Tahunan (profil RTH, pemanfaatan ruang, perubahan fungsi)	Kota Bogor															
3	Penyusunan Masterplan RTH Kota	Kota Bogor						2	Penyusunan Masterplan RTH Kota	Kota Bogor							
4	Penyusunan sistem informasi geografis RTH potensial dan aktual	Kota Bogor						3	Penyusunan dokumen pendukung pengadaan lahan dan pembangunan RTH	Setiap WP							
5	Pendataan aset Pemda untuk dijadikan RTH Publik																
6	Pengadaan lahan untuk RTH melalui program land banking	Setiap WP						4	Pengadaan tanah untuk RTH melalui program land banking	Setiap WP							

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Kawasan Lindung							A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG								
V	Ruang Terbuka Hijau							III	Ruang Terbuka Hijau								
7	Peningkatan kualitas RTH							5	Peningkatan kualitas RTH	Kota Bogor							
8	Revitalisasi taman topi dan sekitarnya	Taman Topi						6	Perencanaan dan pembangunan Alun-alun Kota	Taman Topi dan sekitarnya							
9	Perencanaan dan pembangunan hutan kota	WP Pasima (WP B)						7	Perencanaan dan pembangunan hutan kota, taman Kehati (keanekaragaman hayati)	WP Pasima (WP B)							
		WP Utara (WP C),															
		WP Purba (WP D)															
		WP Daksina (WP E)															
10	Perencanaan dan pembangunan taman kota	Di pusat kota dan di setiap Sub PPK						8	Perencanaan dan pembangunan taman kota	Di pusat kota dan di setiap Sub PPK							
11	Perencanaan dan pembangunan taman WP dan lingkungan	Menyebar di seluruh Kota Bogor						9	Perencanaan dan pembangunan taman WP dan lingkungan	Menyebar di seluruh Kota Bogor Permukiman padat penduduk (kawasan kumuh)							



RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Kawasan Lindung							A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG								
V	Ruang Terbuka Hijau							III	Ruang Terbuka Hijau								
12	Perencanaan dan pembangunan taman tematik	Menyebar di seluruh Kota Bogor						10	Perencanaan dan pembangunan taman tematik	Menyebar di seluruh Kota Bogor							
13	Pembangunan RTH infrastruktur baru terutama jalur hijau jalan pada rencana jalan-jalan arteri dan kolektor	Rencana jalan-jalan arteri dan kolektor															
14	Revitalisasi RTH infrastruktur yang mengalami penurunan fungsi	Kota Bogor						11	Revitalisasi sempadan jalan, sempadan rel kereta api, sempadan SUTT yang mengalami penurunan fungsi	Kota Bogor							
15	Membangun dan memanfaatkan RTH di daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi	Daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi						12	Membangun dan memanfaatkan RTH di daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi	Daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi							

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Kawasan Lindung							A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG								
V	Ruang Terbuka Hijau							III	Ruang Terbuka Hijau								
16	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak swasta dan masyarakat dalam perwujudan RTH publik	Kota Bogor															
17	Penyusunan Buku Neraca TPU Tahunan (profil TPU)	Kota Bogor						13	Pendataan TPU	Kota Bogor							
18	Penyusunan Masterplan TPU Kota Bogor	Kota Bogor						14	Penyusunan Perencanaan TPU	Kota Bogor							
19	Penetapan lokasi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	Kelurahan Empang (TPU Dreded) untuk WP Samida						15	Penataan dan pengembangan TPU pemerintah	Kelurahan Empang (TPU Dreded) untuk WP Samida							
		Kelurahan Situ Gede (TPU Situ Gede) untuk WP Pasima								Kelurahan Situ Gede (TPU Situ Gede) untuk WP Pasima							



RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Kawasan Lindung							A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG								
V	Ruang Terbuka Hijau							III	Ruang Terbuka Hijau								
19	Penetapan lokasi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah	Kelurahan Kebon Pedes (TPU Blender) dan Kelurahan Kayumanis (TPU Kayumanis) untuk WP Utara						15	Penataan dan pengembangan TPU pemerintah	Kelurahan Kebon Pedes (TPU Blender) dan Kelurahan Kayumanis (TPU Kayumanis) untuk WP Utara							
		Kelurahan Cimahpar (TPU Cimahpar) untuk WP Purwa									Kelurahan Cimahpar (TPU Cimahpar) untuk WP Purwa						
		Kelurahan Mulyaharja (TPU Mulyaharja), Kelurahan Genteng (TPU Gunung Gadung), Kelurahan Cipaku (TPU Cipaku), dan Kelurahan Katulampa (TPU Katulampa) untuk WP Daksina										Kelurahan Mulyaharja (TPU Mulyaharja), Kelurahan Genteng (TPU Gunung Gadung), Kelurahan Cipaku (TPU Cipaku), dan Kelurahan Katulampa (TPU Katulampa) untuk WP Daksina					

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Kawasan Lindung							A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG								
V	Ruang Terbuka Hijau							III	Ruang Terbuka Hijau								
20	Penataan TPU yang telah ada	Tersebar di kota Bogor															
21	Pengembangan TPU baru	Tersebar di kota Bogor															
								16	Pembangunan sempadan jalan / Jalur hijau jalan	Menyebar di seluruh Kota Bogor							
								17	Pendataan kondisi pohon pelindung dan pemeliharaan pohon pelindung di RTH publik wilayah Kota Bogor	Jalur protokol tersebar di Kota Bogor, jalur hijau kawasan perumahan yang terdapat pohon pelindung berusia tua/rawan tumbang							



Tabel 6.8

Program Perwujudan Pola Ruang Kawasan Budaya

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budaya						B	Kawasan Peruntukan Budaya									
I	Perumahan						I	Perumahan									
1	Penyusunan Buku Neraca Perumahan Tahunan Kota Bogor dan Kecamatan (profil perumahan eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor, setiap Kecamatan					1	Pendataan perumahan Kota Bogor dan Kecamatan (profil perumahan dan prasarana sarana utilitas perumahan eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor, setiap Kecamatan								
2	Penyusunan Rencana Induk Sektor Perumahan (neraca perumahan, sarana dan prasarana perumahan)	Kota Bogor					2	Penyusunan Review Rencana Induk Perumahan Permukiman	Kota Bogor								
3	Pengembangan perumahan kepadatan rendah	Sebagian WP Daksina dan sebagian WP Pasima															
4	Pengembangan perumahan kepadatan sedang	Sebagian WP Samida, (WP B), WP Utara (WP C), WP Purba (WP D) dan WP Daksina (WP E)															
5	Pengembangan perumahan kepadatan tinggi	Sebagian WP Samida, (WP B), dan WP Utara (WP C),															

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya									
I	Perumahan							I	Perumahan									
A.	WP Samida (WP A)																	
1	Penataan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perumahan	WP Samida (WP A)																
2	Revitalisasi kawasan padat penduduk/ kumuh melalui perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal	kel. Panaragan, Kel Paledang, Kel Kebon Kalapan, Kel Kebonpaya, Kel Bondongan, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur																
3	Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	kel. Panaragan, Kel Paledang, Kel Kebon Kalapan, Kel Kebonpaya, Kel Bondongan, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Sempur																

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
I	Perumahan							I	Perumahan								
A.	WP Samida (WP A)																
4	Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	kel. Panaragan, Kel Paledang, Kel Kebon Kalapan, Kel Kebonpaya, Kel Bondongan, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur															
5	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	WP Samida															

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
I	Perumahan							I	Perumahan								
B	WP Pasima (WP B)																
1	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan	WP Pasima (WP B)															
2	Pembangunan taman lingkungan di kawasan perumahan	WP Pasima (WP B)															
3	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	WP Pasima (WP B)															
4	Penataan dan pengendalian perumahan kepadatan rendah	Kel Situgede, Kel Balumbangjaya															
5	Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal	Kel Gunung Batu, Kel Pasirjaya															

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
I	Perumahan							I	Perumahan								
B	WP Pasima (WP B)																
6	Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kel Gunung Batu, Kel Pasirjaya, Kel Loji, Kel Sindangbarang, Kel Bubulak															
7	Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kel Gunung Batu, Kel Pasirjaya, Kel Loji, Kel Sindangbarang, Kel Bubulak															
								3	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	Kota Bogor							

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
I	Perumahan							I	Perumahan								
B	WP Pasima (WP B)																
								4	Penataan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perumahan	Kota Bogor							
								5	Revitalisasi kawasan permukiman kumuh melalui perbaikan kampung dan pembangunan rumah susunl	Berdasarkan pemutakhiran data kawasan permukiman kumuh Kota Bogor							
								6	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	Kota Bogor							
								7	Pembangunan rumah susun umum	Kawasan yang terakses dengan angkutan umum Tersebar di Kota Bogor							
								8	Pembangunan prasarana dan sarana utilitas perumahan permukiman	Tersebar di Kota Bogor							



RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
I	Perumahan							I	Perumahan								
C	WP Utara (WP C)																
1	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas	WP Utara (WP C)															
2	Pembangunan taman lingkungan di kawasan perumahan	WP Utara (WP C)															
3	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	SWP Utara 3 dan SWP Utara 4															
4	Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya antar perumahan (join planning dan join development)	SWP Utara 1 dan SWP Utara 2															

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
I	Perumahan							I	Perumahan								
C	WP Utara (WP C)																
5	Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal	Kel Kebon Pedes, Kel Kedung Waringin dan Kel Kedungjaya															
6	Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kel Kebon Pedes, Kel Kedung Waringin dan Kel Kedungjaya															
7	Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencan di permukiman padat	Kel Kebon Pedes, Kel Kedung Waringin dan Kel Kedungjaya															

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
I	Perumahan							I	Perumahan								
D	WP Purwa (WP D)																
1	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan	WP Purwa (WP D)															
2	Pembangunan taman lingkungan di kawasan perumahan	WP Purwa (WP D)															
3	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	SWP Purwa 1, Purwa 4 dan sebagian Purwa 2															

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya						B	Kawasan Peruntukan Budidaya									
I	Perumahan						I	Perumahan									
D	WP Purwa (WP D)																
4	Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya antar perumahan (join planning dan join development)	SWP Purwa 2 dan SWP Purwa 3															
5	Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal	Kel Bantarjati, Kel Kedunghalang, Kel Ciparigi, Kel Cibuluh, Kel Ciluar, Kel Tegal Gundil															
6	Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kel Bantarjati, Kel Kedunghalang, Kel Ciparigi, Kel Cibuluh, Kel Ciluar, Kel Tegal Gundil															
7	Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kel Bantarjati, Kel Kedunghalang, Kel Ciparigi, Kel Cibuluh, Kel Ciluar, Kel Tegal Gundil															

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
I	Perumahan							I	Perumahan								
E	WP Daksina (WP E)																
1	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan	WP Daksina (WP E)															
2	Pembangunan taman lingkungan di kawasan perumahan	WP Daksina (WP E)															
3	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	SWP Daksina 1 dan Daksina 2															
4	Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya antar perumahan (join planning dan join development)	SWP Daksina 1, Daksina 2, Daksina 3, Daksina 4															

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya						B	Kawasan Peruntukan Budidaya									
I	Perumahan						I	Perumahan									
E	WP Daksina (WP E)																
5	Penataan dan pengendalian perumahan kepadatan rendah	Kel Mulyaharja, Kel Pamoyanan, Kel Genteng, Kel Kertamaya, Kel Rancamaya, Kel Bojongkerta															
6	Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal	Kel Lawanggitun g, Kel Sukasari, Kel Tajur, Kel Sindangrasa															
7	Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kel Lawanggitun g, Kel Sukasari, Kel Tajur, Kel Sindangrasa															
8	Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kel Lawanggitun g, Kel Sukasari, Kel Tajur, Kel Sindangrasa															

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
II	Perdagangan Jasa							II	Perdagangan Jasa								
1	Penyusunan Buku Neraca Perdagangan Jasa Tahunan (profil perdagangan jasa eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor						1	Pendataan Kawasan Perdagangan Jasa Tahunan (profil perdagangan jasa eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor							
A.	WP Samida (WP A)																
1	Penataan dan peremajaan kawasan perdagangan jasa yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan dan bangunan	Pasar Bogor dsk Pasar Kebon Kembang dsk Pasar Sukasari dsk Pertokoan di kawasan jalan Merdeka – Jembatan Merah						2	Penataan dan peremajaan kawasan perdagangan jasa yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan dan bangunan	Pasar Bogor dsk Pasar Kebon Kembang dsk Pasar Sukasari dsk Pertokoan di kawasan jalan Merdeka – Jembatan Merah							

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
II	Perdagangan Jasa							II	Perdagangan Jasa								
A.	WP Samida (WP A)																
2	Pengendalian dan pembatasan kegiatan perdagangan jasa pada daerah tertentu	WP Samida di sepanjang koridor jalan utama : Jalan Raya Pajajaran, Jalan Ir.H.Juanda, Jalan Suryakencana, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Merdeka, Jalan MA Salmun, Jalan Dewi Sartika.															

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
II	Perdagangan Jasa							II	Perdagangan Jasa								
A.	WP Samida (WP A)																
3	Revitalisasi Plaza Bogor	Plaza Bogor						3	Revitalisasi Plaza Bogor	Plaza Bogor							
4	Revitalisasi Pasar Sukasari	Pasar Sukasari						4	Revitalisasi Pasar Sukasari	Pasar Sukasari							
5	Revitalisasi Pasar Bogor	Pasar Bogor						5	Revitalisasi Pasar Bogor	Pasar Bogor							
6	Relokasi Pasar Bogor dan Plaza Bogor	Pasar Bogor dan Plaza Bogor						6	Relokasi Pasar Bogor dan Plaza Bogor	Pasar Bogor dan Plaza Bogor							
								7	Revitalisasi pasar rakyat	Tersebar di kota Bogor							

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
II	Perdagangan Jasa							II	Perdagangan Jasa								
B	WP Pasima (WP B)																
1	Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	WP Pasima, (WP B) di sepanjang Jalan Mayjen Ishak Djuarsa, Jalan Letjen Ibrahim Adjie, Jalan RE Abdullah, Jalan Aria Surialaga, Jalan Ciomas Raya dan Jalan Abdullah Bin Muhamad Nuh, Jalan Balungbang Jaya, serta rencana jalan inner ring road.															

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
II	Perdagangan Jasa							II	Perdagangan Jasa								
B	WP Pasima (WP B)																
2	Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP	WP Pasima (WP B)						8	Penataan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP	WP Pasima (WP B) WP Utara (WP C) WP Purwa (WP D) WP Daksina (WP E)							
3	Pengembangan pasar rakyat yang dikelola secara mandiri dan modern di setiap WP	WP Pasima (WP B)						9	Pengembangan pasar rakyat	WP Pasima (WP B) WP Utara (WP C) WP Purwa (WP D) WP Daksina (WP E)							

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
II	Perdagangan Jasa						II	Perdagangan Jasa									
C	WP Utara (WP C)																
1	Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	WP Utara (WP C) di sepanjang Jalan Sholeh Iskandar dan Jalan Abdullah Bin M. Nuh															
2	Mengembangkan Pasar Teknik Umum menjadi pasar skala regional (Pasar Induk)	WP Utara (WP C)					10	Pengembangan Pasar Teknik Umum menjadi Pasar Induk	WP Utara (WP C)								
3	Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP	WP Utara (WP C)						Penataan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP	WP Pasima (WP B) WP Utara (WP C) WP Purwa (WP D) WP Daksina (WP E)								
4	Pengembangan pasar rakyat yang dikelola secara mandiri dan modern di setiap WP	WP Utara (WP C)						Pengembangan pasar rakyat	WP Pasima (WP B) WP Utara (WP C) WP Purwa (WP D) WP Daksina (WP E)								



RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
II	Perdagangan Jasa							II	Perdagangan Jasa								
D	WP Purwa (WP D)																
1	Pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional	WP Purwa (WP D) di sepanjang Jalan Raya Pajajaran, Jalan KS. Tubun, Jalan Adnawijaya, Jalan Achmad Sobana, Jalan Raya Pemda, Jalan Pangeran Sogiri serta rencana jalan-jalan kolektor baru															
2	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional berupa kawasan terpadu serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas skala kota dan WP	WP Purwa di sepanjang jalan arteri/fronta ge Jalan Tol Lingkar Luar Bogor dan pusat WP															

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
II	Perdagangan Jasa							II	Perdagangan Jasa								
D	WP Purwa (WP D)																
3	Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP	WP Purwa						12	Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala kota/ regional berupa kawasan terpadu serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas skala kota dan WP	WP Purwa di sepanjang jalan arteri/frontage Jalan Tol Lingkar Luar Bogor dan pusat WP							
5	Revitalisasi Pasar Jambu Dua	WP Purwa						11	Revitalisasi Pasar Jambu Dua	WP Purwa							
6	Pengembangan pasar rakyat yang dikelola secara mandiri dan modern di setiap WP	WP Purwa							Pengembangan pasar rakyat	WP Pasima (WP B) WP Utara (WP C) WP Purwa (WP D) WP Daksina (WP E)							



RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
II	Perdagangan Jasa							II	Perdagangan Jasa								
E	WP Daksina (WP E)																
1	Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional berupa kawasan terpadu serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas skala kota dan WP	WP Daksina (WP E) di sepanjang Jalan Raya Tajur, Rencana jalan R3, Rencana jalan inner ring road, Jalan Katulampa, dan Jalan Cikaret															
2	Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP	WP Daksina							Penataan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP	WP Pasima (WP B) WP Utara (WP C) WP Purwa (WP D) WP Daksina (WP E)							
3	Penataan kegiatan perdagangan dan jasa di koridor Inner Ring Road	koridor Inner Ring Road						12	Penataan kawasan perdagangan dan jasa di koridor Inner Ring Road	koridor Inner Ring Road							
4	Pengembangan pasar rakyat yang dikelola secara mandiri dan modern di setiap WP	WP Daksina							Pengembangan pasar rakyat	WP Pasima (WP B) WP Utara (WP C) WP Purwa (WP D) WP Daksina (WP E)							

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
III	Industri							III	Industri								
1	Penyusunan Buku Neraca Industri Tahunan (profil industri eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor						1	Pendataan kawasan peruntukan Industri Tahunan (profil industri eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor							
2	Pemantauan pemanfaatan ruang kegiatan industri dan limbah yang dihasilkan	Kota Bogor						2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kegiatan industri dan limbah yang dihasilkan	Kota Bogor							
3	Pengendalian dan penataan kegiatan industri kecil dan menengah di kawasan perumahan	Kota Bogor						3	Monitoring dan evaluasi kegiatan industri kecil dan menengah di kawasan perumahan	Kota Bogor							
4	Pembinaan kegiatan industri kecil dan menengah	Kota Bogor						4	Pengembangan promosi hasil industri kecil dan menengah	Kota Bogor							
5	Pengembangan promosi hasil industri kecil dan menengah Kota Bogor	Kota Bogor						5	Pengembangan sentra pemasaran hasil industri kecil dan menengah	Kota Bogor							
6	Pengembangan sentra pemasaran hasil industri kecil dan menengah Kota Bogor	Kota Bogor						6	Fasilitasi pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Kota Bogor							



RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
IV	Militer																
1	Pemantauan pemanfaatan ruang militer	Kota Bogor															
V	Fasilitas Umum dan Sosial																
1	Kajian kriteria dan standar perencanaan dan pembangunan fasilitas umum dan sosial Kota Bogor	Kota Bogor															
A	Fasilitas pendidikan							IV	Kawasan pendidikan								
1	Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Pendidikan Tahunan (profil fasilitas pendidikan)	Kota Bogor						1	Pendataan Fasilitas Pendidikan Tahunan (profil fasilitas pendidikan)	Kota Bogor							
2	Penyusunan Rencana Penambahan Fasilitas Pendidikan dan Rencana Alokasi Lokasi di Kota Bogor	Kota Bogor						2	Penyusunan Rencana Penambahan Fasilitas Pendidikan dan Rencana Alokasi Lokasi di Kota Bogor	Kota Bogor							

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
A	Fasilitas pendidikan							IV	Kawasan pendidikan								
3	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK	Setiap WP						3	Revitalisasi prasarana dan sarana fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK	Setiap WP							
4	Penambahan TK negeri	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)						4	Penambahan TK negeri	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)							
5	Penambahan SD	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)						5	Penambahan SD negeri	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)							
6	Penambahan SMP	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)						6	Penambahan SMP negeri	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)							
7	Penambahan SMA/ SMK	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)						7	Penambahan SMA/ SMK negeri	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)							



RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
A	Fasilitas pendidikan						IV	Kawasan pendidikan									
8	Pengembangan pendidikan tinggi	WP Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina diutamakan pada jalan-jalan arteri dan kolektor					8	Pengembangan pendidikan tinggi	WP Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina diutamakan pada jalan-jalan arteri dan kolektor								
9	Pemantauan dan evaluasi lokasi dan kinerja pendidikan tinggi	Kota Bogor					9	Monitoring dan evaluasi lokasi dan kinerja pendidikan tinggi	Kota Bogor								
10	Penertiban fasilitas pendidikan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas parkir yang memadai dan sesuai dengan ketentuan berlaku	Kota Bogor															
11	Relokasi fasilitas pendidikan dasar dan menengah negeri (jika lokasi sudah tidak sesuai untuk kegiatan ajar mengajar)	Tersebar di Kota Bogor															

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
B	Fasilitas kesehatan							V	Kawasan kesehatan								
1	Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor						1	Pendataan Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor							
2	Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhirarki di setiap unit pengembangan	Kota Bogor						2	Revitalisasi pelayanan fasilitas kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhirarki di setiap unit pengembangan	Kota Bogor							
3	Pengendalian dan pengawasan rumah sakit yang telah ada agar dilengkapi dengan prasarana, sarana pengolahan limbah dan fasilitas parkir sesuai standar yang berlaku	Kota Bogor						3	Pembangunan RSUD	Kota Bogor							



RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
B	Fasilitas kesehatan							V	Kawasan kesehatan								
4	Penambahan Puskesmas Pembantu	WP Pasima dan WP Utara						4	Penambahan Puskesmas dan atau Puskesmas Pembantu	WP Pasima, WP Utara, WP Purwa, WP Daksina							
5	Pengembangan klinik dan sarana kesehatan lainnya	WP Pasima, WP Utara, WP Purwa, WP Daksina															
6	Pemantauan dan evaluasi lokasi dan kinerja fasilitas kesehatan	Kota Bogor						5	Monitoring dan evaluasi lokasi dan kinerja fasilitas kesehatan	Kota Bogor							
7	Penertiban fasilitas kesehatan yang tidak dilengkapi dengan standar minimal infrastruktur penunjang	Kota Bogor															

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
C	Fasilitas peribadatan							VI	Kawasan peribadatan								
1	Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Peribadatan Tahunan (profil fasilitas peribadatan)	Kota Bogor						1	Pendataan Fasilitas Peribadatan Tahunan (profil fasilitas peribadatan)	Kota Bogor							
2	Pemantauan pemanfaat ruang fasilitas peribadatan	Kota Bogor						2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang fasilitas peribadatan	Kota Bogor							
3	Penertiban fasilitas peribadatan yang ada yang tidak dilengkapi standar minimal infrastruktur penunjang	Kota Bogor						3	Revitalisasi fasilitas peribadatan	Kota Bogor							
								4	Pembangunan fasilitas peribadatan	Kota Bogor							

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
D	Fasilitas Olahraga dan Rekreasi							VII	Kawasan Olahraga								
1	Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Olahraga dan Rekreasi Tahunan (profil Fasilitas Olahraga dan Rekreasi)	Kota Bogor						1	Pendataan Fasilitas Olahraga dan Rekreasi Tahunan	Kota Bogor							
2	Penataan dan revitalisasi GOR Pajajaran	GOR Pajajaran						2	Penataan dan revitalisasi GOR Pajajaran	GOR Pajajaran							
3	Penataan fasilitas olahraga yang ada	Tersebar di kota Bogor						3	Penataan fasilitas olahraga yang ada	Tersebar di kota Bogor							
4	FS penambahan prasarana dan sarana olahraga terpadu skala kota atau skala regional	Kota Bogor						4	FS penambahan prasarana dan sarana olahraga terpadu skala kota atau skala regional	Kota Bogor							

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
D	Fasilitas Olahraga dan Rekreasi							VII	Kawasan Olahraga								
5	Penambahan prasarana dan sarana olahraga terpadu skala kota atau skala nasional	WP Utara, WP Daksina						5	Pembangunan fasilitas olahraga terpadu skala kota atau skala nasional	WP Utara, WP Daksina							
6	Pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana olah raga skala WP dan lingkungan	Di setiap WP						6	Pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana olah raga skala WP dan lingkungan	Di setiap kecamatan							
7	Penertiban fasilitas olahraga dan rekreasi yang tidak sesuai dengan standar minimal infrastruktur penunjang	Di setiap WP															
								7	Pembangunan fasilitas olahraga	Di setiap kecamatan							

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
E	Fasilitas Sosial																
1	Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Sosial Tahunan (profil Fasilitas Sosial)	Kota Bogor															
2	Penataan fasilitas sosial yang ada	Tersebar di kota Bogor															
3	Pengembangan fasilitas sosial	Sub PPK/ Pusat WP Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina															
4	Pengembangan untuk rumah - rumah panti jompo, panti asuhan, dan ramah anak	Tersebar di Kota Bogor															

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
VI	Perkantoran							VII	Kawasan Perkantoran								
1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan perkantoran pemerintahan eksisting							1	Pemeliharaan dan revitalisasi kawasan perkantoran pemerintahan eksisting								
a	Kantor Pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kota	Kota Bogor						a	Kantor Pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kota	Kota Bogor							
b	Kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi dan kota	Kota Bogor						b	Kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi dan kota	Kota Bogor							
2	Penataan kawasan perkantoran	PPK						2	Penataan kawasan perkantoran	PPK							
3	Penambahan kawasan perkantoran pemerintahan baru skala kota	WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D) dan WP Daksina (WP E)						3	Penambahan kawasan perkantoran pemerintahan baru skala kota	WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D) dan WP Daksina (WP E)							

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
VI	Perkantoran							VII	Kawasan Perkantoran								
4	Pemantauan pemanfaatan ruang pemerintahan	Kota Bogor						4	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang pemerintahan	Kota Bogor							
5	Rehabilitasi/ peremajaan bangunan pemerintah	Kota Bogor						5	Rehabilitasi/ peremajaan bangunan pemerintah	Kota Bogor							
								6	Pengembangan fasilitas sosial	Sub PPK/ Pusat WP Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina							
								7	Pengembangan untuk panti jompo, panti asuhan, dan rumah singgah	Tersebar di Kota Bogor							

RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya									
VI	Kawasan Pariwisata							IX	Kawasan Pariwisata									
1	Penyusunan RIPDA Kota Bogor	Kota Bogor						1	Penyusunan RIPDA Kota Bogor	Kota Bogor								
2	Pengembangan kluster- kluster wisata Kota Bogor	Kota Bogor						2	Pengembangan kluster-kluster wisata Kota Bogor	Kota Bogor								
3	Sosialisasi kawasan dan obyek wisata Kota Bogor	Kota Bogor						3	Sosialisasi kawasan dan obyek wisata Kota Bogor	Kota Bogor								
4	Pengembangan wisata ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan wisata budaya	Kota Bogor						4	Pengembangan wisata ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan wisata budaya	Kota Bogor								
5	Pengembangan wisata agro, pariwisata MICE dan rekreasi alam	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP						5	Pengembangan wisata agro, pariwisata MICE dan rekreasi alam	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Daksina (WP E)								
6	Pengembangan gedung kesenian	WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D)						6	Pembangunan gedung kesenian	WP Pasima (WP B)								



RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya						B	Kawasan Peruntukan Budidaya									
VI	Kawasan Pariwisata						IX	Kawasan Pariwisata									
7	Pengembangan wisata perkemahan	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Daksina (WP E)					7	Pengembangan wisata perkemahan	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Daksina (WP E)								
8	Penataan wisata kuliner dan belanja	Di PPK (kawasan Bogor lama), WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)					8	Penataan wisata kuliner dan belanja	Di PPK (kawasan Bogor lama), WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)								
9	Penataan kawasan wisata sejarah Batu Tulis	Kawasan Batu Tulis					9	Penataan wisata sejarah	Kawasan Pusaka								
10	Penertiban kawasan pariwisata yang tidak dilengkapi dengan standar minimal infrastruktur penunjang	Kota Bogor															
							10	Pembangunan kampong Sunda	WP Purwa (WP D)								

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya						B	Kawasan Peruntukan Budidaya									
VII	Pertanian Kota						X	Kawasan pertanian									
1	Penyusunan profil Lahan Pertanian Kota Bogor	Kota Bogor					1	Pengembangan sistem pertanian tanaman pangan perkotaan	Kota Bogor								
2	Penyusunan profil Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kota Bogor					2	Pendataan kawasan pertanian, LP2B	Kota Bogor								
3	Menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas lahan pertanian kota sebagai RTH Kota	Kota Bogor															
4	Sosialisasi sistem pertanian perkotaan, meliputi pemanfaatan lahan	Kota Bogor															
5	Pengembangan Terminal Agribisnis di Rancamaya	WP Daksina (WP E)															
6	Optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai RPH regional	WP Pasima (WP B)					3	Optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai RPH regional	WP Pasima (WP B)								

RTRW LAMA							RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya						B	Kawasan Peruntukan Budidaya									
VII	Pertanian Kota						X	Kawasan pertanian									
7	Berkerjasama dengan pengelola lahan pertanian dalam bentuk kebun penelitian dan percobaan dalam menjaga dan memelihara kebun penelitian sebagai bagian dari RTH	Kota Bogor					4	Berkerjasama dengan pengelola lahan pertanian dalam bentuk kebun penelitian dan percobaan dalam menjaga dan memelihara kebun penelitian sebagai bagian dari RTH	Kota Bogor								
8	Pengembangan kegiatan wisata outbound (wisata ruang luar) pada areal pertanian kota untuk memberikan nilai tambah kawasan tersebut	Kota Bogor					5	Pengembangan kegiatan agrowisata	Kota Bogor								
							6	Kegiatan dukungan keberlanjutan kawasan pertanian dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);	Kota Bogor								
							7	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan pertanian	Kota Bogor								
							8	Sosialisasi sistem pertanian perkotaan, meliputi pemanfaatan lahan pekarangan, hidroponik	Kota Bogor								

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
VIII	Ruang Terbuka Non Hijau																
1	Identifikasi kondisi dan potensi ruang terbuka non hijau Kota Bogor	Kota Bogor															
2	Pengadaan lahan untuk ruang terbuka non hijau	Tersebar di Kota Bogor															
3	Penataan kembali ruang terbuka non hijau yang telah mengalami degradasi secara fungsi maupun kualitas	Tersebar di Kota Bogor															
4	Pemanfaatan RTNH untuk kegiatan sosialisasi masyarakat	Kota Bogor															
5	Perencanaan dan pembangunan ruang terbuka non hijau di lokasi-lokasi strategis dengan standar penyediaan luasan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.	Di setiap WP															

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
								XI	Kawasan transportasi								
								1	Revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang sebagai terminal penumpang Tipe A	Terminal Baranangsiang							
								2	Pembangunan terminal di Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, Kertamaya yang terintegrasi dengan Stasiun kereta ringan	Tanah Baru Bubulak Mulyaharja Kertamaya							
								3	Pembangunan terminal di Kelurahan Sukaresmi yang terintegrasi dengan Stasiun kereta api dan stasiun kereta ringan	Kelurahan Sukaresmi							
								4	Pembangunan fasilitas integrasi antar moda di Kawasan TOD	Kawasan TOD							
								5	Penyediaan terminal di kawasan perbatasan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Wilayah Perbatasan							

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
								XI	Kawasan transportasi								
								6	Peningkatan sarana pendukung terminal	Seluruh Terminal							
								7	Pembangunan terminal barang	Kelurahan Tanah Baru							
								8	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor	Stasiun Bogor							
								9	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor Paledang dan sekitarnya	Paledang							
								10	Pembangunan Stasiun Kereta Api penunjang jalur kereta api Bogor Sukabumi	Berdasarkan hasil kajian lebih lanjut							
								11	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala kota/regional	Stasiun Bogor Terminal Baranangsiang							
								12	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala sub kota	Sukaesmi Tanah Baru Bubulak Mulyaharja Kertamaya							
								13	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala lingkungan	Menyebar di Kota Bogor (sesuai hasil kajian lebih lanjut)							

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
								XII	Kawasan Infrastruktur Perkotaan								
								1	Pengembangan Gardu Induk Listrik	Kota Bogor							
								2	Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum	Kota Bogor							
								3	Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Kota Bogor							
								4	Pengembangan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Terpadu	Kota Bogor							
								5	Pengembangan kolam retensi	Kota Bogor							
								6	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan infrastruktur	Kota Bogor							

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	Kawasan Budidaya							B	Kawasan Peruntukan Budidaya								
								XIII	Kawasan Campuran								
								1	Penataan kawasan campuran	Kota Bogor							
								2	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan campuran	Kota Bogor							
								XIV	Kawasan Pertahanan Keamanan								
								1	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang militer	Kota Bogor							

RTRW LAMA								RTRW BARU														
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-											
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031				
								TABEL INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS														
								A.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi													
								I.	Kawasan Pasar Kebon Kembang dan sekitarnya													
								1	Penataan kawasan	Kawasan Pasar Kebon Kembang, kawasan perdagangan di Jalan MA Salmun, Jalan Mayor Oking, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kapten Muslihat, dan Jalan Merdeka												
								2	Penataan sektor informal	Di sekitar Kawasan Pasar Kebon Kembang dan Kawasan Stasiun Kereta api Bogor												

RTRW LAMA								RTRW BARU														
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-										
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031			
								TABEL INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS														
								A.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi													
								II.	Kawasan Perdagangan Lama di Pasar Bogor, Pecinan di Suryakencana dan Kampung Arab di Empang													
								1	Penataan kawasan	Jalan Suryakencana, Kawasan Pecinan dan Kampung Arab (Empang)												
								2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan	Jalan Suryakencana, Kawasan Pecinan dan Kampung Arab (Empang)												

RTRW LAMA								RTRW BARU													
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-									
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031		
									TABEL INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS												
								A.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi												
								III.	Kawasan TOD dan Kawasan Sub PPK												
								1	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan sub PPK	Pusat WP Pasima, Utara, Purwa dan Daksina											
								2	Pembangunan infrastruktur penunjang pusat	Pusat WP Pasima											
										Pusat WP Utara											
										Pusat WP Purwa											
										Pusat WP Daksina											
								3	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan TOD	TOD skala kota TOD skalal sub kota											
								4	Penataan kawasan TOD	Kawasan TOD											

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								TABEL INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS									
								B.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya								
								I.	Kawasan Pusaka Bogor								
								1	Penataan KSK Kawasan Pusaka Bogor	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana							
								2	Penataan jalur pedestrian, sektor informal (PKL) dan <i>street furniture</i>	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana							
								3	Penyusunan panduan rancang kota (UDGL)	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana							

RTRW LAMA								RTRW BARU														
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-										
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031			
								TABEL INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS														
								B.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya													
								I.	Kawasan Pusaka Bogor													
								4	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan pusaka	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan suryakencana												
								5	Identifikasi dan pemetaan bangunan dan kawasan cagar budaya	Menyebar di kota Bogor												
								6	Penyusunan kajian pemanfaatan ruang dan kegiatan serta bentuk insentif-disinsentif terhadap bangunan dan kawasan cagar budaya	Kota Bogor												

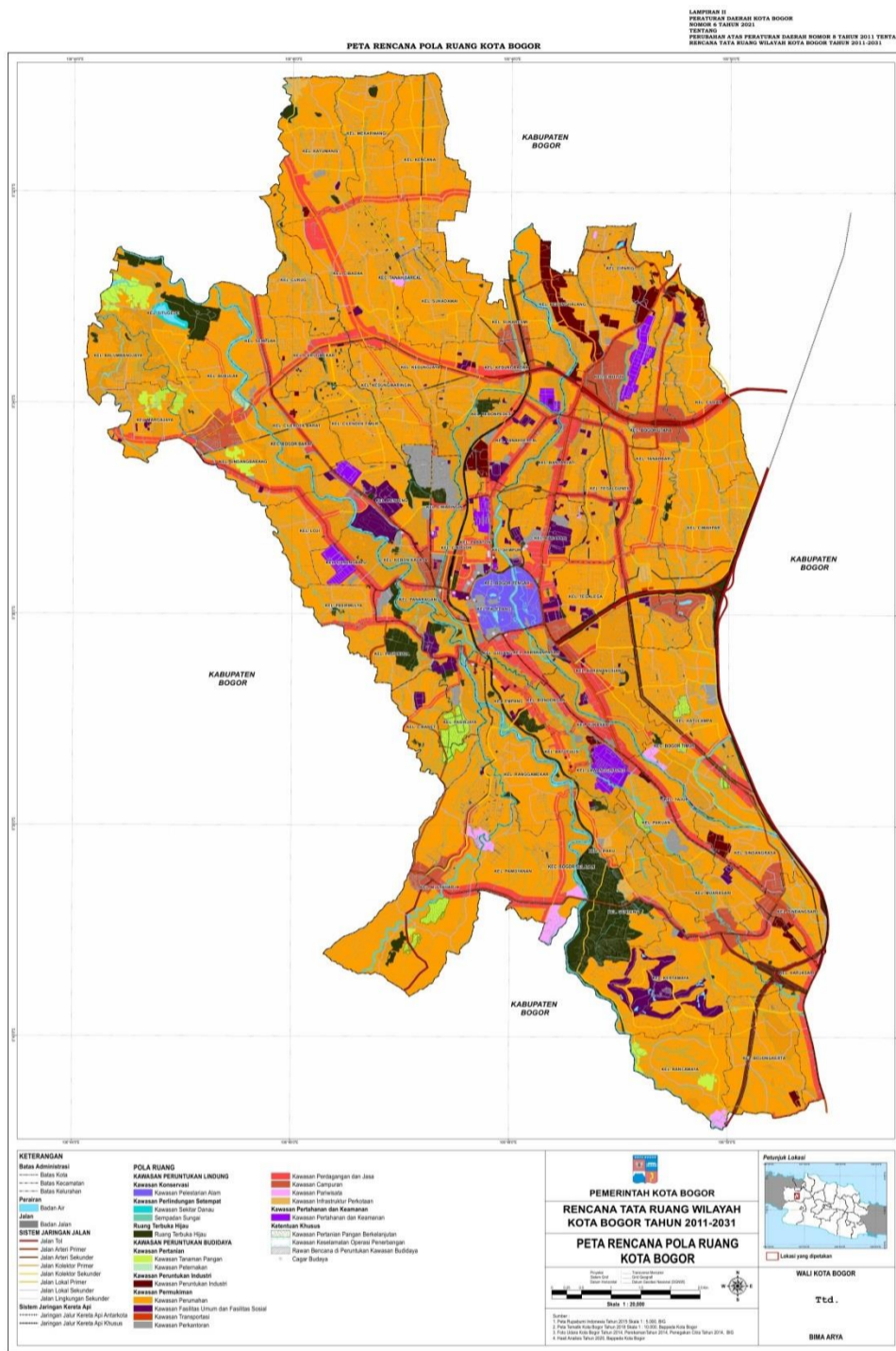
RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
								TABEL INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS										
								B.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya									
								I.	Kawasan Pusaka Bogor									
								7	Sosialisasi lokasi dan aturan pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya	Kota Bogor								
								8	Restorasi dan meremajakan bangunan dan kawasan cagar budaya yang telah berubah bentuk aslinya dan mengalami alih fungsi yang tidak sesuai dengan ketentuan	Kota Bogor								
								9	Pemanfaatan bangunan cagar budaya	Kota Bogor								
								10	Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kota Bogor								

RTRW LAMA								RTRW BARU													
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-									
			2020	2021	2022	2023	2024					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031		
								TABEL INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS													
								C.	Kawasan Strategis dari Sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup												
								I.	Kawasan Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor												
								1	Pengembangan paket wisata terpadu	Kawasan Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor											
								2	Penataan kawasan hijau Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor beserta zona penyangganya	Kawasan Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor											

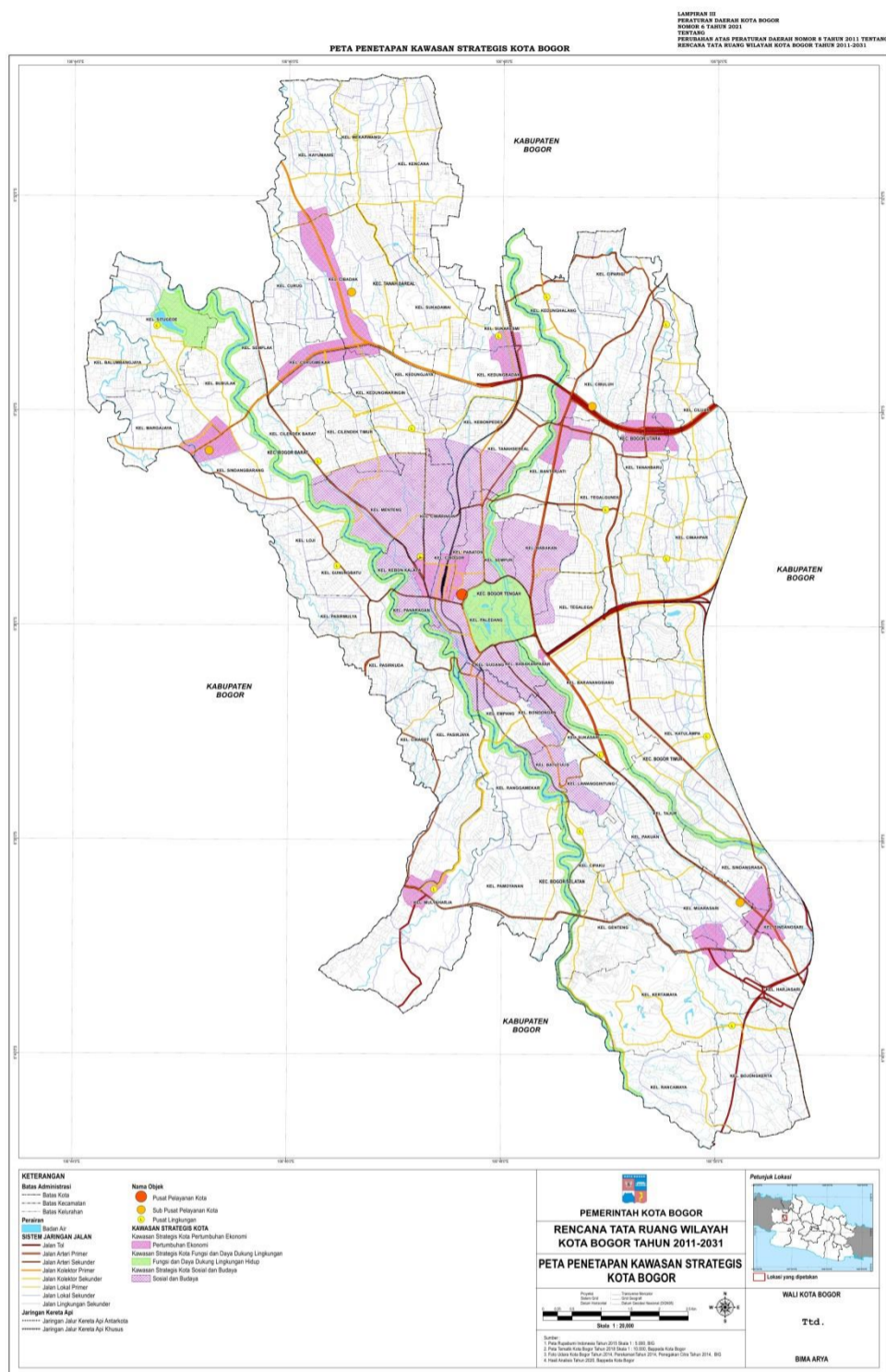
RTRW LAMA								RTRW BARU										
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-							
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2031
								TABEL INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS										
								C.	Kawasan Strategis dari Sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup									
								II.	Kawasan Situgede dan Hutan Penelitian Dramaga									
								1	Penataan koridor jalan terminal Bubulak – Hutan Penelitian Dramaga - Situgede	Dramaga - Situgedekoridor jalan terminal Bubulak – Hutan Penelitian								
								2	Penataan kawasan ekowisata Situgede	Kawasan danau Situgede								
								3	Pengemangan Hutan Penelitian Dramaga	Hutan Penelitian Dramaga – Kel Situgede								

RTRW LAMA								RTRW BARU									
No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-					No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun ke-						
			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TABEL INDIKASI PROGRAM PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS																	
								C.	Kawasan Strategis dari Sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup								
								III.	Sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane								
								1	Identifikasi Pemetaan Kondisi Eksisting Sempadan Sungai Ciliwung-Cisadane (pemanfaatan, potensi pengembangan, permasalahan)	Sempdan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane							
								2	Penyusunan rencana rinci tata ruang penanganan kawasan sempadan sungai	Sempdan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane							
								3	Penataan kawasan sempadan sungai	Spot kawasan sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane terpilih							
								4	Pengadaan tanah publik (sempadan sungai) untuk penataan kawasan	Sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane							
								5	Perencanaan dan pembangunan taman dan jalan sepanjang sempadan	Spot kawasan sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane terpilih							

Gambar 6.5
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bogor



Gambar 6.6
Peta penetapan strategis kota bogor



6.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal maka rencana dan tagrget kinerja untuk penerapan SPM pada 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel 6.9

Rencana Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kota Bogor Tahun 2019-2024

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan anak usia dini (PAUD)	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk peserta didik PAUD	Peserta didik PAUD usia 5- 6 TAHUN	Terpenuhinya kecukupan pelayanan dasar pada jenjang Paud yaitu Pengadaan perlengkapan dasar SPM Jenjang Paud	100%	Setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pendidikan dasar	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk peserta didik SD dan SMP	Peserta didik SD usia 7 - 12 (SD)	Terpenuhinya kecukupan pelayanan dasar pada jenjang SD/MI yaitu Pengadaan perlengkapan dasar SPM Jenjang SD dan SMP	100%	Setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
			Peserta didik usia 13 - 15 (SMP)	Terpenuhinya kecukupan pelayanan dasar pada jenjang SMP/MTs yaitu Pengadaan perlengkapan dasar SPM Jenjang SD dan SMP	100%	Setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa untuk warga belajar PKBM	Warga belajar kesetaraan 7 - 18 Tahun	Terpenuhinya kecukupan pelayanan dasar pada jenjang kesetaraan yaitu Pengadaan perlengkapan dasar SPM Kesetaraan	100%	Setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar	Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan K4	ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100
2	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar	pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter dan atau dokter spesialis kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki surat tanda register (str) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.	ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Adalah Pelayanan Yang Diberikan Pada Bayi Usia 0-28 Hari Dan Mengacu Kepada Pelayanan Neonatal Esensial Sesuai Yang Tercantum Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak, Dilakukan Oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak Yang Memiliki Surat Tanda Register (STR)	Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100
4	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Adalah Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan Kepada Anak Berusia 0-59 Bulan dan Dilakukan Oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan	balita	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
		atau Dokter Spesialis Anak Yang Memiliki Surat Tanda Register (STR) dan Diberikan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Maupun Swasta, dan UKBM									
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1.Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Adalah Penjaringan Kesehatan Yang Diberikan Kepada Anak Usia Pendidikan Dasar, Minimal Satu Kali Pada Kelas 1 dan Kelas 7 Yang Dilakukan Oleh Puskesmas.	usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pelayanan Skrining Kesehatan Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Sesuai Standar	usia lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
7	Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar	Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta	orang dengan tuberkulosis	Jumlah pasien TB BTA positif yang sembuh dibagi jumlah pasien baru TB BTA positif yang diobati kali seratus persen	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100
8	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelkes yang diberikan kpD ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan LP, dilakukan oleh NAKES sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik	orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
		pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.									
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar	usia produktif	Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100
10	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
11	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.	penderita diabetes melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Penduduk ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar	orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	Satu Tahun	100	100	100	100	100

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Sesuai dengan standar air minum	Setiap warga negara	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun	93,15	94,86	96,85	98,29	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Sesuai dengan standar air limbah domestic	Setiap warga negara	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun	67.47	70.42	72.06	72.62	73.03

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Sesuai dengan standar rumah layak huni	Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Sesuai dengan standar rumah layak huni	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Standar dan jumlah kualitas barang/jasa, kualitas SDM,tata cara pemenuhan standar yang diterima oleh disabilitas terlantar di luar panti	Penyandang disabilitas terlantar	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase (%) penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Setiap Tahun	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Standar dan jumlah kualitas barang/jasa, kualitas SDM,tata cara pemenuhan standar yang diterima oleh anak terlantar di luar panti	Anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Setiap Tahun	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Standar dan jumlah kualitas barang/jasa, kualitas SDM,tata cara pemenuhan standar yang diterima oleh lanjut usia terlantar di luar panti	Lanjut usia terlantar	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Setiap Tahun	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Standar dan jumlah kualitas barang/jasa, kualitas SDM,tata cara pemenuhan standar yang diterima oleh tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Gelandangan dan pengemis	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti dapat diketahui dari prosentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Setiap Tahun	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota	Standar dan jumlah kualitas barang/jasa, kualitas SDM, tata cara pemenuhan standar yang diterima oleh korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Korban bencana kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dapat diketahui dari prosentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kab/kota	100%	Setiap Tahun	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Urusan Wajib pelayanan dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan informasi rawan bencana	a. Prosedur operasional penanggulangan bencana; b. Sarana prasarana penanggulangan bencana; c. Peningkatan kapasitas personil/ sumber daya manusia; dan d. Pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.	Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%	setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur operasional Penegakan PERDA b. Sarana prasarana Penegakan PERDA c. Peningkatan kapasitas personil/sumbe 	Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
		r daya manusia; dan d. Pelayanan Warga Negara yang terkena dampak dari penegakan PERDA dan PERKADA	kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota								
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	a. Prosedur operasional Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran b. Sarana prasarana Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran c. Peningkatan kapasitas personil/sumbu r daya manusia; dan d. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Capaian				
							2020	2021	2022	2023	2024
		Warga Negara yang terkena bencana Kebakaran									

6.6. Beberapa Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor

Sebagaimana telah direncanakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat, ada beberapa rencana strategis Provinsi Jawa Barat Yang akan dilaksanakan di kota Bogor pada tahun 2019-2023. Beberapa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 6.10
Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat Yang akan dilaksanakan di Kota Bogor pada tahun 2019-2023

No	Kegiatan Strategis	Tahun Rencana				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Penataan Alun-Alun					
2.	Penataan Pasar Rakyat : Ps. Jambu Dua					
3.	Pembangunan Gedung <i>Creative Centre</i>					
4.	Penataan Destinasi Wisata					
5.	Pembangunan Pusat Budaya					
6.	<i>Double Track</i> Bogor-Sukabumi					
7.	<i>Double Track</i> Jakarta					
8.	Kereta Api Jakarta-Surabaya					
9.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi					

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.
5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Berdasarkan Perda Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, Rencana program perangkat daerah kota Bogor untuk periode Tahun 2019 berjumlah 141 program, sementara untuk periode Tahun 2020 sampai dengan 2024 berjumlah 146 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan kota Bogor, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 7.2 sampai dengan Tabel 7.43 pada Bab 7 lampiran Perda Nomor 14 Tahun 2019.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka telah dilakukan pemetaan terhadap 123 Program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, dan diperoleh 137 Program Pembangunan Daerah hasil pemetaan, sebagaimana dijelaskan pada table 7.2-7.39 pada Bab ini.

Untuk mendukung pelaksanaan program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III Perubahan RPJMD ini. Adapun anggaran dimaksud disajikan pada Tabel 7.1.



Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI	PAGU	PROYEKSI		
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN DAERAH	2,384,016,653,140	2,482,148,757,721	2,843,824,901,597	3,123,565,656,721	3,293,257,779,767
11	PENDAPATAN ASLI DAERAH	771,531,123,201	914,550,650,320	1,110,709,515,951	1,143,389,984,528	1,238,358,735,761
111	Pajak Daerah	470,000,000,000	565,600,000,000	774,175,900,000	787,793,490,000	866,572,839,000
112	Retribusi Daerah	36,691,027,400	31,609,433,495	36,394,007,000	36,183,192,843	38,705,356,619
113	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	33,520,905,570	32,420,552,150	30,503,342,185	32,009,612,993	33,911,252,770
114	Lain lain PAD yang Sah	231,319,190,231	284,920,664,675	269,636,266,766	287,403,688,692	299,169,287,372
12	PENDAPATAN TRANSFER	1,444,534,029,939	1,461,272,579,401	1,581,998,665,646	1,650,827,476,781	1,721,986,219,086
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,109,545,098,295	1,117,385,616,482	1,252,270,116,000	1,263,205,375,301	1,326,611,675,577
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	334,988,931,644	343,886,962,919	329,728,549,646	387,622,101,480	395,374,543,509
14	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	167,951,500,000	106,325,528,000	151,116,720,000	329,348,195,412	332,912,824,920
141	Hibah	396,000,000	276,000,000	0	178,231,475,412	181,796,104,920
142	Lainlain pendapatan sesuai dengan ketentuan peratauran	167,555,500,000	106,049,528,000	151,116,720,000	151,116,720,000	151,116,720,000

NO	URAIAN	REALISASI	PAGU	PROYEKSI		
		2020*	2021	2022	2023	2024
2	BELANJA DAERAH	2,633,220,414,393	2,841,609,070,361	2,885,557,643,997	3,140,238,529,483	3,295,079,677,268
21	BELANJA OPERASI	2,164,587,236,102	2,331,894,995,723	2,386,551,373,350	2,784,563,863,552	2,936,065,264,678
211	Belanja Pegawai	1,134,564,423,225	1,114,317,702,705	1,153,277,820,871	1,256,708,922,083	1,269,276,011,304
212	Belanja Barang dan Jasa	848,754,091,690	1,081,139,499,721	1,102,146,100,461	1,411,274,733,507	1,545,355,035,014
213	Belanja Bunga	8,010,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000
214	Belanja Hibah	128,766,006,687	72,728,643,297	71,879,728,018	47,080,207,962	49,434,218,360
215	Belanja Bantuan Sosial	44,492,714,500	56,709,150,000	52,247,724,000	62,500,000,000	65,000,000,000
22	BELANJA MODAL	307,168,807,801	477,902,795,330	459,506,270,647	333,974,665,931	337,314,412,590
23	BELANJA TIDAK TERDUGA	160,329,839,490	30,111,279,308	37,800,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

NO	URAIAN	REALISASI	PAGU	PROYEKSI		
		2020*	2021	2022	2023	2024
24	BELANJA TRANSFER	1,134,531,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000
	SURPLUS/DEFISIT	(249,203,761,253)	(359,460,312,640)	(41,732,742,400)	(16,672,872,762)	(1,821,897,501)
3	PEMBIAYAAN					
31	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	358,159,958,113	364,957,344,900	205,497,032,260	188,628,847,523	175,179,511,037
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	277,662,925,853	327,501,176,240	200,000,000,000	183,131,815,263	169,682,478,777
	Penerimaan Pinjaman Daerah	75,000,000,000	31,959,136,400	0	0	0
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5,497,032,260	5,497,032,260	5,497,032,260	5,497,032,260	5,497,032,260
	Piutang Daerah					
32	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	108,956,196,860	5,497,032,260	12,527,569,860	10,556,156,662	10,556,156,662
	Penyertaan Modal Daerah	28,459,164,600	0	7,030,537,600	5,000,000,000	5,000,000,000
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	80,497,032,260	5,497,032,260	5,497,032,260	5,556,156,662	5,556,156,662
	Pembiayaan Netto	249,203,761,253	359,460,312,640	192,969,462,400	178,072,690,861	164,623,354,375
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun	-	-	151,236,720,000	161,399,818,099	162,801,456,874
	TOTAL APBD	2,742,176,611,253	2,847,106,102,621	2,898,085,213,857	3,150,794,686,145	3,305,635,833,930

Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor Tahun 2020

Selanjutnya berdasarkan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud di atas, penjabaran program perangkat daerah berdasarkan urusan/fungsi penunjang dapat dijelaskan pada Tabel 7.2 sampai dengan Tabel 7.43 tentang Penjabaran Program Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan/Fungsi Penunjang Tahun 2019-2024. Tabel 7.2 dan Tabel 7.3 merupakan indikasi rencana program prioritas disertai pendanaanya yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2019 dan 2020 dimana nomenklatur program mengacu pada PMDN Nomor 13 tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tabel 7.4 merupakan indikasi rencana program prioritas disertai pendanaanya yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2021 dimana nomenklatur program merupakan hasil pemetaan dari PMDN Nomor 13 tahun 2016 ke PMDN Nomor 90 tahun 2016.

Tabel 7.5 s/d Tabel 7.43 adalah indikasi Program Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan/Fungsi Penunjang Tahun 2021-2024 sebagaimana hasil Pemetaan terhadap kodefikasi dan nomenklatur Program yang diamanatkan dalam PMDN Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Daerah dan telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708/2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bogor Tahun 2019

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
	Pendidikan	PENDIDIKAN			
	Dinas Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	-
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.648.221.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			524.400.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			897.296.000
		Pengelolaan Informasi Publik			226.525.000
		Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APK PAUD	59	168.000.000
		DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD			168.000.000
			Persentase Akreditasi satuan pendidikan PAUD		
			- PAUD Formal (%)	79	
			- PAUD Non Formal (%)	23	
		Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	114	
		BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD/MI Negeri dan SMP/Mts Negeri			39.379.000.000
		Mentoring Penanganan Penyimpangan Prilaku			126.597.500
		Pendataan dan Profil Pendidikan berbasis Web			139.305.000
		Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN			2.380.000.000
		Beasiswa Mahasiswa Berprestasi (miskin)			518.488.000
		Peningkatan Manajemen PAUD			353.921.900
		Peningkatan Manajemen Lembaga PKBM			45.370.000
		Peningkatan Manajemen Lembaga Kursus			144.265.000
		Peningkatan Manajemen SD			36.027.000
		Peningkatan Manajemen SMP			132.354.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana TK. Negeri			-
		Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 PAUD			73.670.000
		Peningkatan Kompetensi Siswa SD			272.434.000
		Peningkatan Kompetensi Siswa SMP			1.122.768.200
		Pengelolaan BOS APBN			107.774.000
		Pengelolaan BOS Kota			124.690.000
			Persentase Guru Berprestasi disemua jenjang (%)	3	
			Siswa berprestasi		
			- tingkat provinsi	60	
			- tingkat nasional	16	
			- tingkat internasional	19	
			Satuan pendidikan/ lembaga yang berprestasi		
			Tingkat provinsi	5	
			Tingkat nasional	2	
			Pendidik/tutor berprestasi	2	
			Jumlah lembaga kursus yang terakreditasi	30	
			Jumlah siswa yang menerima bantuan BOS Kota	114,171	
			Terpenuhinya dokumen evaluasi belajar siswa di satuan pendidikan	2	
			Penurunan jumlah tawuran pelajar	5	
		Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	52	3.867.793.000
		Peningkatan Kompetensi PTK PAUD			356.930.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Peningkatan Kompetensi PTK DIKMAS			32.210.000
		Peningkatan Kompetensi PTK SD			65.500.000
		Peningkatan Kompetensi PTK SMP			135.300.000
		Peningkatan Kualifikasi PAUD			366.050.000
		Harlindung PTK			2.746.713.000
		Peningkatan Prestasi PTK SD			48.250.000
		Peningkatan Prestasi PTK SMP			116.840.000
			Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	59	
			Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	67	
		Pendidikan Non Formal	Persentase Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan (%)	100	985.786.600
		Peningkatan Kompetensi Warga Belajar DIKMAS			589.619.600
		Apresiasi PAUD			51.312.000
		Apresiasi Kursus			97.480.000
		Apresiasi Kesetaraan			103.675.000
		DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Negeri			143.700.000
			Persentase satuan pendidikan non formal yang sudah terakreditasi(%)	21	
			Persentase kelulusan Paket A(%)	100	
			Persentase kelulusan Paket B(%)	93	
			Persentase kelulusan Paket C(%)	95	
		JUMLAH			
	Kesehatan	KESEHATAN			
	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	9.801.622.637
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			9.801.622.637
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	2.423.400.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			1.500.000.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			600.000.000
		Revitalisasi Gedung Dinas Kesehatan Kota Bogor			323.400.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	117.182.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			12.044.000
		Workshop Perencanaan Kesehatan			105.138.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	30	6.001.694.200
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			6.001.694.200
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur	85	
		Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang memiliki JKN	100	120.024.961.010
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM			7.171.060.000
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas			16.050.000
		Jaminan Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI)			36.421.291.000
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Selatan			3.680.155.170
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cipaku			2.997.683.670

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bondongan			3.511.324.470
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lawang Gintung			1.957.170.150
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Timur			3.582.424.070
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pulo Armyn			2.091.439.490
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Tengah			1.590.376.270
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sempur			1.389.045.700
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Aut			1.121.551.980
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Belong			555.120.815
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Merdeka			1.870.660.840
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Semplak			2.795.481.330
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pancasan			1.932.831.515
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasir Mulya			2.273.500.330
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gang Kelor			2.896.523.370
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sindang Barang			3.722.594.560
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bogor Utara			3.072.575.700
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tegal Gundil			2.127.783.190
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Warung Jambu			2.944.723.530
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tanah Sareal			2.082.016.500
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pondok Rumput			1.006.499.200
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kedung Badak			2.901.706.050
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kayu Manis			2.645.936.540
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mekarwangi			2.198.734.660
		Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyaharja			1.804.700.910
		Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di luar kuota Jamkesmas Kota Bogor (Banprov 2019)			17.664.000.000
			Prosentase cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin	100	
			Persentase kunjungan dokter pada keluarga pra sejahtera (Home visite)	85	
		Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			727.583.000
		Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi			727.583.000
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Prosentase anak balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (kunjungan Balita)(%)	95	216.977.000
		Pelayanan Kesehatan Anak Balita			216.977.000
		Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	97.5	1.991.474.000
		Pelayanan Kesehatan Khusus			262.250.000
		Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular			463.805.000
		Pelayanan Kesehatan Remaja			365.419.000
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2019)			900.000.000
			Persentase kunjungan rawat jalan gigi dalam wilayah puskesmas yang tertangani(%)	100	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Persentase pemeriksaan laboratorium di Puskesmas(%)	20	
			Persentase calon jemaah haji yang memenuhi syarat kesehatan (%)	100	
			Persentase kelompok olahraga yang dibina(%)	83	
			Persentase kasus KTA yang ditangani(%)	23	
			Persentase penjarangan gangguan refraksi pada anak sekolah(%)	80	
			Persentase keluarga mandiri(%)	92	
			Persentase Pengobat tradisional yang memenuhi syarat (%)	75	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase posbindu yang dibina(%)	93	160.351.000
		Pelayanan Kesehatan Lansia			160.351.000
			Pelayanan kesehatan pada pada usia lanjut	100	
			Persentase pelayanan kesehatan lansia yang sesuai standar	100	
			Persentase puskesmas ramah lansia(%)	60	
		Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	0.15	1.625.559.750
		Peningkatan Gizi Masyarakat			1.525.559.750
		Pencegahan dan Intervensi Stunting (BANKEU JABAR TA. 2019)			100.000.000
			Persentase Balita Gizi Kurang	6	
			Persentase Balita pendek (%)	2	
			Persentase cakupan ASI Eksklusif(%)	90	
			Persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat pelayanan kesehatan	100	
			Persentase Balita mendapat kapsul Vitamin A(%)	95	
			Persentase Balita yang ditimbang(%)	100	
			Persentase Remaja Putri Mendapat Fe(%)	35	
			Persentase Ibu hamil KEK (%)	4	
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase angka kesembuhan TBC (cure rate)(%)	86	1.881.908.205
		Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD			477.900.000
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular			916.581.605
		Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV			487.426.600
			Menurunnya angka kesakitan (IR) akibat DBD (per 100.000 penduduk)	45	
			Persentase lokasi bebas jentik nyamuk DBD(%)	95,4	
			Prosentase penderita DBD yang ditangani (%)	100	
			Prosentase pelayanan kesehatan dengan orang TBC	100	
			Presentase penemuan kasus baru BTA positif TBC (CDR)(%)	92	
			Persentase Angka konversi TBC(%)	87	
			Prosentase keberhasilan pengobatan TBC (success rate)	90	
			Prevalensi HIV/Aids	3	
			Persentase penemuan diare balita(%)	95	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Persentase penemuan kasus pneumonia Balita(%)	100	
			Prosentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	85	
			Prosentase desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	100	
			Persentase pengetahuan Komprehensif HIV AIDS Usia 15-24 tahun(%)	95	
			Persentase konseling tes HIV (VCT/PITC)(%)	30	
			Persentase ODHA yang mendapat ART(%)	85	
		Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio puskesmas per 30.000 penduduk	1: 30.000	26.748.946.000
					867.130.000
					257.890.000
					2.420.165.000
					11.500.000.000
					40.935.000
					20.000.000
					3.000.000.000
					2.500.000.000
					23.645.000
					6.119.181.000
			Prosentase puskesmas/pustu terbangun	100	
			Prosentase puskesmas dengan perawatan	100	
			Prosentase puskesmas dengan SIMPUS/SIR	100	
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Prosentase Sarana Kesehatan Dasar milik pemerintah yang terakreditasi nasional	100	3.244.046.000
		Akreditasi Puskesmas			146.100.000
		Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah			664.192.000
		Pembinaan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Pemerintah dan Swasta			210.330.000
		Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2019 Bidang Pelayanan Dasar - Akreditasi Puskesmas (Biaya Umum)			15.650.000
		Pelaksanaan DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas			2.207.774.000
			Jumlah Puskesmas dengan sistem pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD)	12	
			Prosentase sarana kesehatan swasta yang terakreditasi	90	
		Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase jenis obat dengan tingkat ketersediaan minimal 18 bulan(%)	100	4.971.069.645
		Pengendalian Obat dan Makanan			143.760.000
		Pengadaan Obat-Obatan			316.292.645
		DAK Fisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Kefarmasian (DAK 2019)			39.600.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan			4.471.417.000
			Prosentase produk makanan dan farmasi yang diuji memenuhi syarat kesehatan (%)	100	
			Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang di bina dan memenuhi syarat kesehatan(%)	95	
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Institusi yang Menerapkan 100% KTR(%)	75	20.879.245.000
		Peningkatan Promosi Kesehatan			249.298.000
		Penerapan Kawasan Tanpa Rokok			304.589.000
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat			296.258.000
		Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat)			5.950.100.000
		Pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan			14.079.000.000
			Persentase Rumah Tangga berPHBS(%)	72	
			Persentase RW Siaga (%)	45	
			Persentase Posyandu Purnama Mandiri (%)	75	
		Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase akses jamban keluarga(%)	82,5	2.313.233.000
		Pembangunan IPAL Limbah B3			1.799.130.000
		Peningkatan Kesehatan Lingkungan			514.103.000
			Persentase akses SPAL yang memenuhi syarat (%)	31,5	
			Persentase Rumah sehat (%)	82,5	
			Persentase akses pengelolaan sampah (%)	70,5	
			Persentase kelurahan STBM (%)	90	
			Persentase air minum yang memenuhi syarat(%)	93	
			Persentase akses minum (%)	100	
			Persentase POS upaya kesehatan kerja (UKK) yang dibina	100	
			Persentase TTU yang memenuhi syarat	64	
			Persentase TPM yang memenuhi syarat	68	
		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Prevalensi Hipertensi	23,38	9.420.958.000
		Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB - Pengendalian Penyakit			7.920.958.000
		Penyediaan Fasilitas Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2019)			1.500.000.000
			Prevalensi Diabetes Militus	4,4	
			Prosentase puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular Terintegrasi	100	
			Persentase Posbindu yang melaksanakan pelayanan penyakit tidak menular terintegrasi	55	
			Prosentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	
		KEUANGAN			
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	15.000.000



No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial			15.000.000
		JUMLAH			212.565.210.447
	RSUD	KESEHATAN			
		Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Prosentase pemakaian tempat tidur (BOR di RSUD) (%)	85	121.433.099.000
		Revitalisasi Gedung RSUD Kota Bogor Lanjutan			103.037.000.000
		Pengadaan Alat Kesehatan dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kesehatan			3.221.500.000
		Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Rujukan			13.174.599.000
		Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kota Bogor (DBHCHT 2019)			2.000.000.000
			Persentase sarana prasarana (fisik dan alkes) sesuai standar RS kelas B dan IPTEK	75	
		Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Prosentase capaian standar pelayanan minimal RSUD Kota Bogor	75	176.550.359.608
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bogor			170.000.000.000
		Pengadaan Obat dan BHP Medis			6.550.359.608
		JUMLAH			297.983.458.608
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	4.978.091.724
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			4.978.091.724
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	7.039.375.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			5.190.875.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			1.848.500.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	14.956.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			14.956.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah panjang ruas jalan utama (Arteri, Kolektor & Lokal) terbangun sesuai arahan RTRW 2011 – 2031 (km)	272.018	27.047.736.000
		Pembangunan Jalan, dan Jembatan Wilayah II			1.558.150.000
		Pembangunan Jalan, dan Jembatan Wilayah III			5.000.000
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase			420.030.000
		Pembebasan Tanah Jalan R3 (2014)			15.021.500.000
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase Wilayah II (SILPA APBD TA.2018)			43.056.000
		Perencanaan Pembebasan Lahan Jembatan Otista			100.000.000
		Persiapan Pembebasan Lahan Jembatan Otista			300.000.000
		Pelaksanaan Pembebasan Lahan Jembatan Otista			9.500.000.000
		Serah Terima Pembebasan Lahan Jembatan Otista			100.000.000
			Jumlah simpang yang meningkat kapasitasnya	4	
			Jumlah panjang ruas jalan yang dilebarkan/ditingkatkan kapasitasnya (km)	5,74	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah panjang ruas jalan yang ditingkatkan strukturnya/kelas nya (km)	58.857	88.201.265.000
		Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah I			12.428.730.000
		Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah II			14.525.150.000
		Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah III			19.291.705.000
		Preservasi Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah I			6.928.350.000
		Preservasi Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah II			6.928.350.000
		Preservasi Rutin Jalan, drainase, dan Jembatan Wilayah III			6.928.350.000
		Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah I			8.887.650.000
		Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah II			5.621.350.000
		Preservasi Jalan, Trotoar, Drainase dan Jembatan Wilayah III			6.241.600.000
		Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoar dan Drainase			420.030.000
			Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) (%)	88,5	
		Pembangunan Prasarana Pedestrian dan Pesepeda	Panjang prasarana pedestrian yang meningkat kapasitasnya (pelebaran prasarana pedestrian) (km)	24,813	9.972.000.000
		Peningkatan Trotoar Wilayah I			3.205.400.000
		Peningkatan Trotoar Wilayah III			6.766.600.000
			Panjang prasarana pedestrian jalan utama terbangun (km)	271,062	
			Jalur sepeda yang dikembangkan (koridor)	3	
		Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Penurunan jumlah lokasi rawan genangan	4	7.431.560.000
		Pembangunan/Perbaikan Drainase Wilayah III			7.431.560.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rasio sarana dan prasarana terhadap beban layan (%)	90	2.006.880.000
		Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan			28.230.000
		Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional			1.978.650.000
		Updating Analisa Harga Satuan Bidang Bina Marga 2019			-
		Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang sungai berkondisi baik (km)	184,5 4	33.497.250.000
		Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 1			3.528.000.000
		Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 2			3.754.000.000
		Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah I			8.940.500.000
		Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ Wilayah Wilayah 2			5.870.010.000
		Perencanaan Teknis SDA			411.390.000
		Updating Analisa Harga Satuan Bidang SDA, Air Minum dan Air Limbah			-
		Normalisasi dan pengendalian banjir wilayah 1			993.350.000
		Pembangunan Kolam Retensi (Bankeu DKI 2018)			10.000.000.000
			Panjang sungai yang ditingkatkan kapasitasnya (km)	5	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Jumlah situ/danau/kolam retensi berkondisi baik	7	
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang saluran irigasi berkondisi baik (km)	11	2.029.898.000
		Pembangunan / Peningkatan sarana dan prasarana Saluran Irigasi Wilayah 1			875.000.000
		Pembangunan / Peningkatan sarana dan prasarana Saluran Irigasi Wilayah 2			915.198.000
		Penyusunan Sistem Informasi Data Base Infrastruktur Drainase Permukiman			239.700.000
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase cakupan penduduk yang memiliki akses/terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota	67,58	73.322.615.755
		Pengelolaan IPAL dan IPLT			1.387.248.755
		Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang IPAL dan IPLT			1.956.800.000
		Hibah Septik Tank Individu			779.600.000
		Pembangunan Infrastruktur Sanitasi			939.800.000
		Optimalisasi Infrastruktur Air Minum Non PDAM			677.500.000
		Optimalisasi Infrastruktur Sanitasi			471.700.000
		Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat Untuk Kegiatan Sanitasi			8.000.000
		Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat untuk kegiatan Air Minum/Air Bersih			5.250.000
		Dana Pendamping kegiatan lainnya bidang sanitasi			167.500.000
		Pembangunan District Metering Area (DMA) (BANKEU JABAR TA. 2019)			51.700.000.000
		SPAM Perkotaan - Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi (BANKEU JABAR TA. 2019)			14.000.000.000
		Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Air Minum			1.229.217.000
			Prosentase cakupan layanan air bersih non PDAM (%)	1,65	
			Jumlah penduduk berakses air minum bersih (non PDAM) *intervensi per tahun) (SR	4,179	
			Prosentase rumah tangga berakses air minum bersih (PDAM)	97,3	
		Perencanaan Tata Ruang	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	100	714.500.000
		Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)			214.500.000
		Persetujuan Substansi Raperda RDTR dan PZ Kota Bogor			500.000.000
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase kesesuaian antara IMB dengan bangunan di lapangan (%)	98	80.115.500
		Bimbingan Teknik Pengawasan dan Pengendalian Bangunan			57.715.500
		Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung			22.400.000
			Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%)	80	
			Tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang (%)	100	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	Rasio Keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	1:6000	411.307.000
		Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung			196.807.000
		Sosialisasi Peraturan Bidang Tata Ruang			214.500.000
		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Lingkungan Sehat Perumahan	Pengurangan kawasan kumuh dari kumuh sedang ke kumuh ringan dalam hal infrastruktur	17	68.825.694.000
		Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Wilayah I			19.949.600.000
		Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Wilayah II			28.936.444.000
		Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Wilayah III			19.939.650.000
			Prosentase peningkatan jumlah hunian Rusunawa/Rusun ami (%)	98	
			Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah di Kota B	85,5	
		Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung	Prosentase pelayanan penyelenggaraan bangunan gedung pada tahun tersebut	90	18.496.700.920
		Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung			2.007.768.620
		Pelayanan Tim Ahli Bangunan Gedung			350.784.560
		Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor			15.979.665.500
		Penyusunan Analisa Harga Satuan Bangunan			63.928.620
		Penomoran Bangunan Gedung			94.553.620
		Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Jasa Konstruksi	Prosentase penyedia jasa konstruksi yang mendapat pembinaan teknis	90	360.800.000
		Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Jasa Konstruksi			106.300.000
		Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang			254.500.000
		JUMLAH			344.430.744.899
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Dinas Perumahan dan Permukiman	Perencanaan Tata Ruang	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang	100	191.500.000
		Pemutakhiran PSU Perumahan di Kota Bogor			191.500.000
		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	11.612.100.139
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			11.612.100.139
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	3.444.013.900
		Pengadaan Inventaris Kantor			2.146.230.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			1.297.783.900
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	16.950.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			16.950.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Lingkungan Sehat Perumahan	Pengurangan kawasan kumuh dari kumuh sedang ke kumuh ringan dalam hal infrastruktur	17	42.875.418.950
		Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, Lomba Kelurahan, Lomba Kinerja Kecamatan dan Lomba POSYANDU			958.000.000
		Penunjang Kota Tanpa Kumuh			200.000.000
		Penunjang Kegiatan RUTILAHU			150.000.000
		Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman Pada Kawasan Permukiman Padat Kumuh			1.409.440.000
		Pengelolaan Rusunawa			1.293.647.600
		Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa			1.285.603.000
		Pengembangan Rusunawa Cibuluh Tanah Baru			1.027.212.600
		Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan/Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Kumuh			886.300.000
		Pembangunan/ Perbaikan Sarana dan Prasarana Perumahan Tidak Tertata			35.665.215.750
			Prosentase peningkatan jumlah hunian Rusunawa/Rusun ami (%)	98	
			Prosentase cakupan ketersediaan rumah layak huni Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah di Kota B	85,5	
		Peningkatan Utilitas Perkotaan	Prosentase luas kawasan permukiman yang sudah dilayani PJU	74	76.767.474.736
		Pemasangan PJU Jalan Potokol dan Penghubung di Kota Bogor			1.138.000.000
		Pemasangan Lampu PJU lingkungan permukiman di Kota Bogor			32.529.922.500
		Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor			642.320.000
		Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH			188.750.000
		Pemasangan Lampu Dekorasi Kota			390.500.000
		Penyusunan, Penelitian Pengkajian dan Perencanaan PJU Dan Dekorasi Kota			102.320.000
		Pembayaran Rekening PJU			36.173.824.236
		Pemeliharaan Lampu Taman Dan Lampu Hias			493.000.000
		Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU			755.300.000
		Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU Dan Lampu Highmast			4.353.538.000
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Luas TPU yang dikelola dengan baik (Ha)	46,25	3.677.241.900
		Penataan Infrastruktur TPU			2.200.336.900
		Peningkatan Pelayanan Pemakaman			1.476.905.000
			Prosentase pelayanan penguburan dan ambulance (%)	100	
		LINGKUNGAN HIDUP			
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau kota lainnya yang dibangun (Ha)	0,93	13.650.300.000
		Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau			5.383.672.000
		Revitalisasi Rutin Ruang Terbuka Hijau			2.350.050.000
		Kegiatan Pemangkasan dan Penebangan Pohon Rawan Tumbang			308.920.000
		Pengadaan Peralatan, Perlengkapan dan Sarana Prasarana			1.204.430.000
		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			3.698.524.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)	
		Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			545.920.000	
		Interoptabilitas aplikasi dan updating data RTH			158.784.000	
			Luas taman, jalur hijau, dan furniture hijau kota lainnya yang dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya (Ha)	42,08		
		JUMLAH				152.234.999.625
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Sat Pol PP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	4.257.952.095	
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			2.764.330.705	
		Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja			1.493.621.390	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	3.175.169.000	
		Pengadaan Inventaris Kantor			489.569.000	
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			2.685.600.000	
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	41.380.000	
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			41.380.000	
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	30	35.990.000	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			35.990.000	
			Persentase peningkatan kompetensi	85		
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Presentase penegakan Perda KTR	80	1.966.185.200	
		Penertiban PKL			632.080.000	
		Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban			20.400.800	
		Pengamanan Obyek Vital, Deteksi Dini dan Operasi Intelijen			4.460.000	
		Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Tipiring			51.312.600	
		Pembongkaran Bangunan			94.500.000	
		Penyelidikan dan Penyidikan			6.820.000	
		Pembinaan dan Pelatihan Perlindungan Masyarakat (Linmas)			33.010.800	
		Pengamanan Hari Besar Nasional, Pengamanan Hari Raya, Pelaksanaan HUT SATPOL PP dan HUT LINMAS			42.770.000	
		Pengawalan VVIP dan VIP			28.222.000	
		Kemitraan dan Pemberdayaan PPNS			4.020.000	
		Pembinaan dan Penyuluhan Ketertiban Umum			1.589.000	
		Pengamanan Wilayah Pemilu 2019			150.000.000	
		Pengamanan Wilayah dalam rangka Pileg dan Pilpres 2019 (Banprov Jawa Barat 2019)			750.000.000	
	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas			147.000.000		
		Presentase bangunan melanggar yang ditertibkan	98			
		Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/ kelurahan)	50			

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Tingkat penegakan Perda ketertiban umum	100	
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Response time)	95	250.676.000
		Latihan Kebakaran dan Skill Kompetensi			8.461.000
		Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan hydrant			15.652.000
		Sistem Keamanan Kebakaran Lingkungan			137.658.000
		Pengamanan Kunjungan Kenegaraan dan Hari Besar Lainnya			9.126.000
		Penyuluhan Bahaya Kebakaran			11.050.000
		Pelaksanaan HUT Damkar			68.729.000
		JUMLAH			9.727.352.295
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	BPBD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.923.162.500
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			1.923.162.500
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.805.400.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			1.421.600.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			383.800.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	1.875.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			1.875.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Program Tanggap Darurat Bencana Daerah	Tingkat penanganan kejadian bencana	100	806.100.000
		Pelayanan Penanggulangan Bencana			606.100.000
		Pengadaan Logistik (sandang dan pangan) Bagi Korban Bencana			100.000.000
		Penyediaan Hunian Sementara Bagi Korban Bencana			100.000.000
		Program Pemulihan Pasca Bencana	Prosentase pelaksanaan kegiatan non fisik yang mendukung pemulihan pasca bencana	100	76.834.000
		Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana			34.600.000
		Pembuatan aplikasi sistem penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana			42.234.000
		Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah kelurahan tangguh bencana	2	593.220.000
		Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana			49.870.000
		Sosialisasi Sekolah Aman Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana			97.900.000
		Pemeliharaan Website dan Pembangunan Sistem Informasi BPBD Kota Bogor			48.600.000
		Pengadaan Rambu Kebencanaan			148.950.000
		Sosialisasi Perda Penyelenggaraan PB dan Pembuatan turunan Perda Penyelenggaraan PB			48.750.000
		Jambore Pengurangan Resiko Bencana			101.500.000
		Pembuatan Film Kebencanaan			48.600.000
		Pembuatan Aplikasi dan Informasi Manajemen Rambu Kebencanaan			49.050.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Jumlah kelompok masyarakat (stakeholders kebencanaan) yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan kebencanaan	5	
		Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Tingkat penguatan kelembagaan	100	52.600.000
		Penyusunan Rencana Kontijensi			52.600.000
		JUMLAH			5.259.191.500
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Kesbangpol	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	819.784.599
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			819.784.599
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	154.600.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			75.000.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			79.600.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	3.600.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			3.600.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Frekuensi Dialog Lintas Agama (minimal 1x sebulan)	≥12	325.915.600
		Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar			24.947.000
		Pembinaan FKUB, FPK, dan penguatan Kelembagaan Forum Bela Negara			58.618.600
		Peningkatan Wawasan Kebangsaan			1.950.000
		Peningkatan Kapasitas Ormas			240.400.000
			Prosentase deteksi permasalahan intoleransi yang tertangani	100	
			Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah	0	
			Prosentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat	0,5	
			Jumlah pelanggaran norma agama	0	
			Jumlah konflik SARA	0	
			Prosentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	10	
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi dalam Pemilu Kota (%)		184.680.000
		Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik			2.000.000
		Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2019			32.680.000
		Pemantauan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 (Banprov Jawa Barat 2019)			150.000.000
			Tingkat partisipasi dalam Pemilu Provinsi (%)	70	
			Tingkat partisipasi dalam Pemilu Nasional (%)	78	
		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Angka kriminalitas	<0,146	19.080.000
		Kegiatan Pembinaan Bagi Aparatur Wilayah Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum			17.100.000
		Monitoring dan penertiban Spanduk dalam rangka ketertiban umum			900.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Monitoring Pengawasan Kegiatan Pengumpulan Massa			1.080.000
		JUMLAH			1.507.660.199
	Sosial	SOSIAL			
	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	2.184.695.994
					2.184.695.994
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	710.433.510
		Pengadaan Inventaris Kantor			358.851.500
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			351.582.010
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	10.695.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			10.695.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	63	1.112.052.500
		Penyelenggaraan Perlindungan Sosial			113.675.000
		Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)			17.700.000
		Pemberdayaan Lanjut Usia			26.950.000
		Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)			46.608.500
		Pemutakhiran Data PMKS			572.046.000
		Verifikasi dan Validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)			44.868.000
		Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial			116.605.000
		Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)			143.385.000
		Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai			30.215.000
			Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya	75	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	
		Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Presentase panti asuhan / yayasan yang terbina (%)	100	5.700.000
		Pembinaan Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial			5.700.000
		Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Presentase jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina (%)	67	107.510.000
		Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Rumah Singgah			107.510.000
		Pembinaan Anak Terlantar	Prosentase Jumlah Anak Terlantar / Anak Jalanan yang dibina	41	3.200.000
		Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi Anak Terlantar			3.200.000
		Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Prosentase penyandang Cacat Trauma yang dibina	12	38.200.000
		Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas			38.200.000
		Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial sosial yang dibina	100	186.489.500
		Pemeliharaan TMP Dreded			36.050.500
		Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat			12.990.000
		Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat			110.330.000
		Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial			27.119.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Jumlah makam pahlawan yang terpelihara/ terawat	1060	
			Jumlah PSKS yang terbina	267	
			Jumlah PSKS yang menerima bantuan	18	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)	40	3.050.000
		Penyediaan Informasi Publik sesuai Undang Undang KIP			3.050.000
			Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD (%)	20,39	
			Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	100	
			Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/PD)	2	
			Prosentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik (persandian)	100	
		KEUANGAN			
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	4.891.000
		Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial			4.891.000
		JUMLAH			4.366.917.504
	Ketenagakerjaan	KETENAGAKERJAAN			
	Dinas Tenaga Kerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	2.011.693.500
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			2.011.693.500
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	489.601.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			171.250.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			318.351.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	9.250.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			5.160.000
		Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos			4.090.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)	67,22	613.122.000
		Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Penganggur (Enterpreunership)			195.590.000
		Uji Kompetensi			76.500.000
		Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat (KK Miskin)			122.140.000
		Pelatihan Melalui Pemagangan			44.725.000
		Pembinaan Lembaga Latihan Swasta (LLS)			45.382.000
		Pelatihan Produktivitas			28.785.000
		Pelatihan Ketrampilan Berbasis Penempatan (BANKEU JABAR TA. 2019)			100.000.000
		Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja anak	100	80.051.000
		Pengkajian dan Perumusan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bogor			33.690.000
		Pemberdayaan LKS Tripartit			14.756.000
		Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			2.650.000
		Pencegahan Penanganan Kasus Mogok Kerja dan Unjuk Rasa Pekerja/Buruh			15.800.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Pembinaan penyuluhan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja			4.155.000
		Peringatan Hari Buruh Sedunia (Mayday)			9.000.000
			Jumlah Angka Kecelakaan Kerja	289	
		Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah penyerapan tenaga kerja	1514	488.209.800
		Bursa Kerja Expo			86.949.900
		Pemberian Kerja Sementara (PKS)			169.590.000
		Penyuluh Bimbingan Jabatan dan pembinaan bursa kerja Khusus (BKK)			12.455.400
		Wira Usaha Baru			10.940.000
		Pengadaan Barang dan Jasa Petugas Pelayanan Bursa Kerja Online ISO 9001 : 2015			150.030.000
		Informasi pasar kerja			52.814.500
		Perluasan Kesempatan Kerja (tenaga kerja Mandiri)			5.430.000
			Presentase pencari kerja terserap dipasar kerja (%)	14,63	
			Jumlah wirausaha baru	164	
			Prosentase pencari kerja yang dilatih di BLK yang terserap di pasar kerja	29	
		TRANSMIGRASI			
		Program Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi	Jumlah KK calon transmigrasi yang mengikuti transmigrasi	2	32.688.000
		Sosialisasi dan Rekrutmrn serta Pembekalan Calon Transmigran			7.080.000
		Monitoring dan pelaporan Bantuan Pengembangan Ekonomi Transmigran			25.608.000
		JUMLAH			3.724.615.300
	Pangan	PANGAN			
	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	939.932.700
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			939.932.700
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	317.925.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			75.400.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			242.525.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	1.515.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			1.210.000
		Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)			305.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Peningkatan Ketahanan Pangan	ketersediaan energi per kapita (AKE= 2.200 kkal/hr)	2.220	1.007.967.600
		Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan			22.700.000
		Fasilitasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)			77.395.000
		Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat Kota Bogor			32.732.200
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan			59.710.000
		Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)			85.450.000
		Fasilitasi dan Pengembangan Ketersediaan Pangan			15.171.000
		Pengelolaan dan Pengembangan cadangan pangan			124.917.800
		Optimalisasi Informasi Harga Pangan Pokok Masyarakat Kota Bogor			64.157.000
		Penguatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pokok			71.490.000
		Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan			22.282.800

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Pembinaan dan Pengawasan Kantin Sekolah Sehat			37.075.000
		Penanganan daerah rawan pangan			168.516.000
		Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)			10.900.000
		Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Desa Mandiri Pangan (Demapan)			58.200.000
		Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Peningkatan Gizi Keluarga			46.154.000
		Peningkatan kerja sama dan penyebarluasan informasi keamanan pangan			111.116.800
			ketersediaan protein per kapita (AKP= 57 gr/kap/hari)	57	
			Prosentase tertanganinya penduduk rawan pangan	22,29	
			Ketersediaan data informasi pasokan dan harga pangan daerah (beras, kacang, daging, minyak goreng, tepung, gula, ubi, cabe, dan jagung)	12	
			Penguatan cadangan pangan CPP kab/kota 100 ton	91,19	
			konsumsi energi per kapita (AKE= 2.000 kkal/hr)	1966	
			Prosentase konsumsi protein per kapita (AKP= 52 gr/kap/hr)	52	
			Prosentase tingkat kemanaan pangan	95	
			Skor PPH konsumsi*	97,1	
		JUMLAH			2.267.340.300
	Lingkungan Hidup	LINGKUNGAN HIDUP			
	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	46.550.148.740
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			8.517.348.740
		Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat dengan Pola Padat Karya			38.032.800.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	7.576.490.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			635.500.000
		Peningkatan Pelayanan Perbengkelan			5.927.000.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			1.013.990.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	20.000.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			20.000.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase volume sampah terangkut (%)	75,37	18.904.830.250
		Pelayanan Persampahan			12.104.651.250
		Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana			2.206.200.000
		Pembangunan revitalisasi dan Pemeliharaan Landasan Container dan TPS			887.100.000
		Pelombaan Kebersihan			851.500.000
		Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah			240.000.000
		Peningkatan PAD Retribusi Persampahan			245.379.000
		Prasarana Persampahan untuk persiapan Pengangkutan Sampah ke TPS Nambo (BANKEU JABAR TA. 2019)			2.370.000.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Program Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	98,16	25.001.804.770
		Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan			9.105.610.000
		Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPA Galuga			148.810.500
		Pengelolaan Sampah di TPA			3.582.171.570
		Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga			3.339.300.000
		Pembangunan Pagar Tembok Pembatas			998.800.200
		Peningkatan Jalan di TPA Galuga			498.800.000
		Pengadaan Alat Berat			4.000.000.000
		Peningkatan Sarana Pengolahan Lindi TPA Galuga			3.328.312.500
		Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Reduksi Sampah (%)	4,7	4.953.520.000
		Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R Berbasis Masyarakat			165.170.000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah			37.250.000
		Pengelolaan Sampah dengan 3R			750.000.000
		Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah			731.100.000
		Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pengurang Sampah 3R (BANKEU JABAR TA. 2019)			1.120.000.000
		Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pengurang Sampah 3R (BANKEU JABAR TA. 2019)			2.150.000.000
			Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)	18	
			Jumlah Bank Sampah (lokasi)	0	
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tingkat indeks kualitas air (%)	55	1.663.448.000
		Pengujian dan Analisa Pengujian Kualitas Air (Air Sungai, Situ dan Sumur dan air limbah)			411.129.000
		Pengujian dan Analisa Kualitas Udara			250.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)			98.500.000
		Pengujian dan Analisa Kualitas Tanah			150.000.000
		Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3			33.264.000
		Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3			187.400.000
		Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL			243.818.000
		Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I			33.979.000
		Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II			33.979.000
		Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III			33.979.000
		Inventarisasi dan Identifikasi sumber pencemar			187.400.000
			Tingkat indeks kualitas udara (%)	80	
			Prosentase ketersediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	100	
			Prosentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	100	



No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan	120	
			Prosentase usaha dan/atau kegiatan yang telah menyediakan tempat sampah terpilah (khusus untuk kegiatan usaha yang memiliki ijin lingkungan)	100	
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air	Jumlah pengendalian pemanfaatan air tanah di Kota Bogor (kegiatan usaha)	200	714.500.000
		Pembangunan Bangunan Konservasi Air			235.000.000
		Perlindungan, Pelestarian dan Pengembangan Biodiversity			179.500.000
		Perlindungan Sumber Mata Air			200.000.000
		Pengelolaan Sumur Pantau			100.000.000
			Prosentase peningkatan rata-rata debit air dari sumber mata air (%)	10	
			Jumlah bangunan konservasi air tanah (unit)	100	
			Jumlah kawasan perlindungan, pelestarian dan pengembangan keanekaragaman hayati (lokasi)	7	
			Persentase Sekolah yang menjadi sekolah Keanekaragaman hayati	1,42	
			Persentase kelurahan yang menjadi kelurahan keanekaragaman hayati	37,76	
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen informasi kualitas lingkungan	2	413.306.000
		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah			140.000.000
		Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan			50.000.000
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bogor			223.306.000
		Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah inventarisasi dan identifikasi GRK (dokumen)	1	284.332.000
		Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim			94.832.000
		Inventarisasi Gas Rumah Kaca			189.500.000
			Jumlah kampung iklim	1	
			Jumlah biodiesel yang dihasilkan (liter)	-	
			Jenis energi terbarukan yang dikembangkan (jenis)	-	
		Program Kemitraan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang difasilitasi dan dibina teknis Program Adiwiyata dan sekolah berbudaya lingkungan	100	695.984.000
		Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata			300.000.000
		Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup			155.545.000
		Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup			240.439.000
			Jumlah sosialisasi lingkungan hidup (tema)	3	
			Jumlah kampanye lingkungan hidup	1	
		JUMLAH			106.778.363.760
	Administrasi Kependudukan dan Capil	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL			

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	4.194.050.306
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			4.194.050.306
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.609.946.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			481.925.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			576.385.000
		Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan sipil			551.636.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	11.216.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			11.216.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	30	6.700.000
		Pembinaan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan			3.165.000
		Bimtek Operator Wilayah			3.535.000
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur	85	
		Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki KK	85,4	1.710.042.400
		Pelayanan dasar Administrasi kependudukan			4.056.000
		Pengendalian Penduduk melalui Administrasi Kependudukan			7.199.000
		Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di bidang Perkawinan			9.931.400
		Pendataan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran)			45.454.000
		Penataan Dokumen dan Registrasi Kependudukan			59.016.000
		Penyusunan Profil Penduduk			30.253.000
		Pelayanan Perubahan status anak, kewarganegaraan dan Akta kematian			9.497.000
		Print Out Buku Induk Kependudukan			25.240.000
		Pelaksanaan DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan			1.519.396.000
			Prosentase penduduk yang memiliki E-KTP	73,1	
			Prosentase anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	26,2	
			Prosentase pelayanan E-KTP- el kurang dari 2 jam	90	
			Prosentase penduduk yang pindah datang	0,45	
			Prosentase penduduk yang pindah keluar	0,45	
			Prosentase penduduk yang pindah antar kelurahan dan kecamatan	0,8	
			Prosentase penduduk yang ber-akta kelahiran	88	
			Prosentase penduduk yang ber-akta kematian	66	
			Prosentase penduduk ber-akta perkawinan	63,15	
		Prosentase penduduk ber-akta perceraian	44,02		
		Prosentase bayi lahir pulang bawa akta	95		
		Prosentase database kependudukan yang valid dan update	91		

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Prosentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	64,5	
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)	40	434.524.000
		Pemeliharaan aplikasi dan hardware siak dan blue room			71.584.000
		Sitanduk Wilayah			150.000.000
		Advokasi publikasi Adminduk			212.940.000
			Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD (%)	20,39	
			Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	100	
			Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/PD)	2	
			Prosentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik (persandian)	100	
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Haki	30	54.528.000
		Indeks kepuasan masyarakat			54.528.000
			Halal	100	
		JUMLAH			8.021.006.706
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	5.082.554.431
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			5.082.554.431
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	357.449.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			168.200.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			189.249.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	613.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			613.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	Jumlah pelaku usaha yang mampu menggunakan teknologi tepat guna (orang)	540	280.233.500
		Pemberdayaan usaha ekonomi bagi KK miskin			115.687.500
		Pembinaan POK-SUS UP2K - PKK Kelurahan dan penilaian UP2K terbaik tingkat kota dan provinsi			65.396.000
		Pemberdayaan ekonomi syariah			31.750.000
		Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)			9.200.000
		Peningkatan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)			58.200.000
			Persentase KK miskin yang meningkat pendapatannya (%)	90	
			Jumlah Pengurus UEK SP yang mendapat pelatihan	204	
			Jumlah penerima KUBE Gakin	2887	
			Jumlah santri yang mendapat pelatihan usaha ekonomi syariah	900	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	0,76	572.597.800
		Peningkatan kemandirian lembaga kemasyarakatan			110.774.000
		TNI Manunggal Satata Sariksa (TMSS)			42.725.000
		Bulan bhakti gotong royong masyarakat			20.232.000
		Monev partisipasi masyarakat			6.809.000
		Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Pos Daya			41.432.000
		Pembinaan PKK			172.493.800
		Penguatan LPM RT RW			53.132.000
		Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kota Bogor Tahun 2019 (BANKEU JABAR TA. 2019)			125.000.000
			Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang)	650	
			Persentase partisipasi masyarakat	90	
			Persentase pemutakhiran data profil kelurahan	90	
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			129.592.500
		Evaluasi Perkembangan Kelurahan			129.592.500
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
		Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan (%)	75	188.440.000
		Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di P2T2A			188.440.000
		Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Jumlah instansi terkait yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	20	1.427.958.000
		Pemberdayaan perempuan kepala keluarga			960.298.000
		Peningkatan peran wanita keluarga sehat sejahtera			83.090.000
		Penguatan kelembagaan pokjanal posyandu dan pengelolaan sistim informasi posyandu			84.570.000
		Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANKEU JABAR TA. 2019)			300.000.000
			Persentase perempuan berpolitik (%)	15	
			Jumlah aparatur pimpinan wilayah yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	74	
			Jumlah orang tua yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	238	
		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah instansi terkait yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	20	252.883.000
		Optimalisasi PUG (Pengarusutamaan Gender)			15.800.000
		Penguatan Kelembagaan Perempuan			102.365.000
		Pengembangan menuju kota layak anak			66.960.000
		Penguatan Forum Anak Kota Bogor			7.240.000
		Pemenuhan Kesejahteraan Anak			25.098.000
		Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak			35.420.000
			Persentase perempuan berpolitik (%)	15	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Jumlah aparatur pimpinan wilayah yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	74	
			Jumlah orang tua yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	238	
			Jumlah anak yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	272	
			Jumlah satuan pendidikan yang memahami perlindungan dan hak-hak anak	36	
			Jumlah Peserta pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)	30	
		PERENCANAAN			
		Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Prosentase dokumen perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik	97	109.680.400
		Updating Profil Kelurahan			35.313.000
		Penyusunan profil anak Kota Bogor			36.596.200
		Penyusunan Profil Gender			37.771.200
			telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi manajemen Data	9266	
		KEUANGAN			
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Target PAD	754.439.728.200	1.269.000
		Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial			1.269.000
			Target pendapatan pajak daerah	550.000.000.000	
			Piutang pajak daerah menurun (%)	3	
			WP yang diklarifikasi/diperiksa	70 WP	
			Presentase WP yang membayar pajak daerah secara online (%)	100	
			WP pajak daerah lainnya bertambah	10	
			Presentase WP pajak daerah bertambah(%)	2	
		JUMLAH			8.403.270.631
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.054.302.338
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			1.054.302.338
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	368.065.882
		Pengadaan Inventaris Kantor			208.565.882
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			159.500.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	6.947.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			6.947.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Keluarga Berencana	Tingkat Penurunan TFR	2	2.160.687.400
		Pelayanan KB			453.111.000
		Advokasi dan KIE Program KKBPK			100.409.400
		Pemutakhiran Basis data keluarga Indonesia			211.665.000
		Kemitraan dan Penguatan Kesertaan KB			22.400.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Peningkatan Kampung KB			156.200.000
		Pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB			1.216.902.000
			Kesertaan ber-KB (akseptor)	9000	
		Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Kelompok kegiatan (Poktan)	24	255.129.000
		Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Sejahtera			71.500.000
		Pembinaan Ketahanan Keluarga			82.654.000
		Partisipasi Remaja dalam pengetahuan tentang reproduksi sehat			100.975.000
		JUMLAH			3.845.131.620
	Perhubungan	PERHUBUNGAN			
	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	11.769.840.000
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			11.769.840.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	2.599.250.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			2.599.250.000
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	811.800.000
		Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung Lalu Lintas	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	811.800.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.225.140.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			1.225.140.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	12.885.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			12.885.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi	Jumlah jalan utama yang menerapkan off street parking	2 lokasi	3.863.225.000
		Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang			140.400.000
		Penyusunan Regulasi (Peraturan &/ Keputusan Walikota sebagai tindaklanjut PERDA 3/2013 ttg LLAJ,SPM,SOP)			50.675.000
		Pengadaan Fasilitas Parkir pada Badan Jalan			190.600.000
		Pemeliharaan Pos GATUR			49.700.000
		Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)			41.400.000
		Evaluasi Kinerja Angkutan tidak dalam trayek			41.475.000
		pemeliharaan shelter Non BTS Transpakuan			183.800.000
		Evaluasi Kinerja Angkutan Barang			42.500.000
		Survey OD Angkutan Barang			139.800.000
		Dukungan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran			276.675.000
		Dukungan Operasional Pengawasan-Pengendalian-Penjagaan-Pengaturan (WASDAL - GATUR) Lokasi Rawan kemacetan			531.410.000
		Operasional Penertiban			376.100.000
		Operasional Forum LLAJ			89.560.000
		Kajian Subsidi Angkutan Umum			37.150.000
		Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha			64.780.000
		Pemeliharaan Terminal Bubulak			1.178.900.000
		DED Gedung Parkir Terminal Bubulak			100.000.000
		Pemagaran Seputaran Stasiun KA Sukaresmi			225.000.000
		Kajian Manajemen dan Rekayasa Kawasan			103.300.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Peningkatan kecepatan rata-rata jalan arteri dan kolektor yang dilalui oleh Angkutan Umum	35,15	
			Prosentase ketersediaan Prasarana & Sarana Perhubungan berkondisi baik	90	
		Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Terpasang	7	6.393.360.000
		Pengadaan-Pemasangan Rambu-rambu:			535.900.000
		Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan			730.200.000
		Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)			1.226.200.000
		Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali & Pengaman Pemakai Jalan			1.397.700.000
		Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			1.022.700.000
		Pemeliharaan CCTV lain			187.400.000
		Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)			233.600.000
		Pengadaan CCTV Lalin			284.000.000
		Operasional Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor			309.360.000
		Pemeliharaan Data Base Sistem Informasi Pemeriksaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan SMS Gateway (SMS Center)			246.900.000
		Pemasangan Fasilitas Keselamatan Perlintasan sebidang dengan Kereta Api			219.400.000
			Persentase fasilitas lalu lintas terpasang dalam kondisi baik	100	
			Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	90	
		Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	Persentase kelompok masyarakat/ pelaku transportasi yang dibina	75	393.606.000
		Sosialisasi/ Penyuluhan DARTIBLANTAS & Kampanye Keselamatan			89.800.000
		Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan			180.500.000
		Penyelenggaraan Safety Riding			44.300.000
		Pembinaan (Sosialisasi) dan Fasilitasi (Pelatihan) Badan Usaha ber Badan Hukum bagi Penyelenggara Angkutan Umum			19.303.000
		Pembinaan Angkutan Tidak Dalam Trayek			59.703.000
		Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	Operasional (Jumlah) Koridor BTS Trans Pakuan	7	5.241.136.000
		Restrukturisasi/ Re-Routing Angkutan Kota & AKDP			426.366.000
		Rasionalisasi Supply-Demand / Reduksi Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)			373.150.000
		Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak Dalam Trayek			18.050.000
		Operasional Pelayanan Angkutan/Bus Sekolah			394.227.000
		Operasional Pelayanan Angkutan Wisata			544.050.000
		Operasional Pengawasan Pelayanan Angkutan Umum Massal			-
		Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek			37.350.000
		Operasional UPTD Terminal dan Angkutan			1.077.828.000
		Pengadaan Angkutan Bus Wisata			2.370.115.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Audit / Verifikasi Operasional Angkutan Massal			-
			Jumlah Trayek Feeder	30	
			Jumlah becak laik jalan	331	
			Jumlah koridor bus sekolah	3	
			Angkutan wisata dalam kota (paket	2	
		Pengembangan Transportasi Yang Ramah Lingkungan	Persentase kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang	99	133.000.000
		Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum			133.000.000
			Persentase Angkutan Umum berbahan bakar ramah lingkungan	55	
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	400.269.000
		Pengadaan Media (Sarana) Sosialisasi/Penyuluhan			271.494.000
		Kerjasama Media Massa (Media Massa Cetak dan Elektronik)			128.775.000
		JUMLAH			32.843.511.000
	Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
	Diskominfo Standi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.013.502.579
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			1.013.502.579
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	409.303.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			335.950.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			73.353.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	14.000.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			14.000.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase pelayanan publik yang berbasis sistem informasi	60	8.350.605.010
		Pengadaan BANDWIDTH.			2.500.000.000
		Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE) Kota Bogor			669.936.800
		Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota			772.327.400
		Pemeliharaan Wifi Ruang Publik			74.349.750
		Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD dan Kelurahan			74.425.000
		Pengembangan dan Pengelolaan e-Government			605.650.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bogor			48.493.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room			297.144.000
		Digitalisasi Profil			29.551.350
		Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan			95.717.000
		Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TV Sipatahunan			153.617.000
		Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis elektronik			11.660.000
		Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja sama Smartcity			38.600.000
		Pengadaan Infrastruktur Data Center			295.782.000
		Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center			381.170.450
		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota (SIMATA)			50.540.000
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Teleconference Pemerintah			69.995.000
		Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat			1.322.800.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik			47.200.000
		Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi			35.450.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian			136.608.000
		Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP)			1.429.550
		Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan Multimedia Kota Bogor			353.273.510
		Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik			63.417.000
		Pembangunan Wifi ruang publik			59.262.000
		Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat			88.200.000
		Penilaian Index E-Government Indonesia			33.588.200
		Pengembangan dan Pembuatan Datawarehouse			36.040.000
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral			4.378.000
			Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/OPD)	2	
		Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			21.229.000
		Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD			8.829.000
		Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat			12.400.000
		JUMLAH			9.808.639.589
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	Dinas Koperasi dan UMKM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	2.913.487.675
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			2.913.487.675
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	3.148.000.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			2.253.000.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			895.000.000
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	30	51.435.825
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			51.435.825
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur	85	
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	2.000.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			2.000.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Presentase UMKM yang produktif	30	662.709.500
		Pelatihan Produktivitas bagi UMKM			412.075.000
		Educasi, Sosialisasi Pembiayaan bagi UMKM			15.600.000
		Pelatihan bagi Wirausaha Baru			17.200.000
		Pelatihan Start Up Digitalisasi			78.544.500
		Sosialisasi Tata Cara Penerbitan IUMK			139.290.000
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87	
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	85	1.334.365.000
		Pendampingan Manajemen Usaha Koperasi			13.630.000
		Peringatan HUT koperasi			118.360.000
		Rapat Kerja Koperasi			10.175.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Sosialisasi Regulasi dan Pengawasan Perkoperasian (Kepatuhan Hukum dan penerapan sanksi)			22.500.000
		Penilaian Kesehatan KSP (Koperasi Simpan pinjam) dan USP (Unit Simpan Pinjam)			17.075.000
		Temu Business Koperasi			53.250.000
		Pelatihan Business Korporasi pada Koperasi			51.620.000
		Legalitas LKM dan Coaching Clinic Koperasi			93.295.000
		Pengembangan Busines Network Koperasi dan pengembangan Usaha Koperasi berbasis IT			27.460.000
		Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Pengurus, Pengawas Koperasi			500.000.000
		Pengawasan Perkoperasian			127.000.000
		Konsorsium Koperasi			300.000.000
			Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang menjadi Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum	28	
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah promosi yang dilakukan	5	1.013.878.000
		Fasilitasi Kemitraan bagi UMKM			34.950.000
		Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM			283.850.000
		Pengembangan dan Penguatan UMKM Milaneal			264.813.000
		Bimbingan Akses Pembiayaan UMKM			200.000.000
		Penataan Pusat Kuliner Jl. Bina Marga			100.000.000
		Gebyar UMKM			130.265.000
			Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM	13	
		Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Persentase PKL yang terelokasikan berdasarkan zona	100	616.084.000
		Sosialisasi Regulasi PKL			5.712.000
		Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL			315.098.000
		Pemberdayaan PKL			17.250.000
		Pemeliharaan zona PKL			98.834.000
		Penataan dan Pemberdayaan PKL			179.190.000
			Penetapan jalan utama sebagai zona bebas PKL (lokasi)	2	
			Persentase penataan zona PKL sehingga tidak mengganggu ketertiban umum	100	
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Prosentase pelayanan publik yang berbasis sistem informasi	60	78.788.000
		Pemeliharaan Data Base			78.788.000
			Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/OPD)	2	
		JUMLAH			9.820.748.000
	Penanaman Modal	PENANAMAN MODAL			
	DPMPSTSP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.887.300.880
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			1.887.300.880
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.535.135.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			762.350.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			772.785.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	6.100.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			6.100.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	1,9	7.292.535.000
		Promosi Investasi			186.760.000
		Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Bogor			51.040.000
		Pemeliharaan dan Pengembangan Perizinan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) (Database Perizinan)			751.125.000
		Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal			358.820.000
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)			49.550.000
		Sinergitas Perencanaan Penanaman Modal dan Perizinan Penanaman modal			15.300.000
		Surveillance ISO/ IEC 27001			70.000.000
		Renewal/Resertifikasi ISO 9001:2015			100.450.000
		Perizinan Dalam Angka			91.390.000
		Pembentukan Mall Pelayanan Publik			5.618.100.000
			Jumlah promosi penanaman modal	4	
			Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	100	
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100	
			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan (%)	98	
			JUMLAH		10.721.070.880
	Kepemudaan dan Olah Raga	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	2.566.780.443
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			2.566.780.443
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	291.150.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			196.000.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			95.150.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	15.000.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			15.000.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan diklat PASKIBRAKA	300	216.818.500
		Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Pemuda			9.842.000
		Diklat dan Seleksi Paskibra			136.842.000
		Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAP/PPAN)			4.971.000
		Pemilihan Pemuda Pelopor			6.887.500
		Jambore Pemuda			9.165.000
		Sosialisasi Bahaya Narkoba HIV/AIDS untuk Pemuda			9.250.000
		Jambore Komunitas			6.851.000
		Gebyar Sumpah Pemuda			33.010.000
			Jumlah pemuda yang mengikuti PPAN dan BPAP	80	
			Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor	40	
			Jumlah pemuda Kota Bogor yang mengetahui cara berwirausaha	60	
			Jumlah Organisasi Pemuda (OKP) yang mengikuti kegiatan	60	
			Jumlah pemuda yang mengetahui bahaya HIV/AIDS	100	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)	
			Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Jambore Komunitas	100		
		Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPWIL	127	606.035.700	
		Walikota Cup			100.691.200	
		Pengembangan Olahraga Rekreasi/Olahraga Masyarakat (Pekan Olahraga Rekreasi dan Tradisional)			159.910.000	
		Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah			20.906.000	
		Pengembangan mitra dengan insan olahraga melalui workshop pola pembinaan			65.754.000	
		Pembinaan olahraga tingkat pendidikan dasar dan menengah			90.885.000	
		Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)			167.889.500	
			Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam POPDA	-		
			Jumlah Atlet dengan cabang olahraga yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA)			
			Jumlah Atlet yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah tingkat Wilayah (POSPEDAWIL)	0		
			Jumlah Atlet yang diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah tingkat Nasional (POSPEDANAS)	2		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Lapangan Olahraga yang di renovasi	5	1.047.700.000	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga			683.800.000	
		Pembuatan Sarana Kreatifitas Pemuda			85.000.000	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			278.900.000	
			Presentase sarana prasarana olahraga yang digunakan untuk kegiatan Olahraga (%)	5		
			Jumlah sarana kreativitas didukung ruang publik			
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang terlayani administrasi, data, dan informasi kepegawaian (%)	100	131.774.000	
		POR PEMDA			131.774.000	
			Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%)	85		
		JUMLAH				4.875.258.643
	Kebudayaan	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Dinas Pariwisata dan Budaya	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Presentase UMKM yang produktif	30	111.745.000	
		Pameran Ekonomi Kreatif			68.845.000	
		Pembuatan Film produk Ekonomi Kreatif			42.900.000	
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87		
		Program Pengembangan Kreativitas Masyarakat	Jumlah kampung kreatif	1	-	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Penyusunan Rencana Pembentukan Kampung Kreatif			-
		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	2	391.315.000
		Fasilitasi HAKI untuk Pelaku Ekonomi Kreatif			-
		Penyusunan Buku Data Ekonomi Kreatif			78.300.000
		Peningkatan Website Penunjang Kepariwisata			44.460.000
		Pengembangan dan Peningkatan Kreatifitas Pelaku Ekonomi Kreatif			194.805.000
		Review DED Gedung Ekonomi Kreatif			-
		Pelatihan Ekonomi Kreatif			6.800.000
		Pembuatan Desain Interior Gedung kreatif Center			66.950.000
		KEBUDAYAAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.599.693.970
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			1.599.693.970
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	845.238.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			447.200.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			398.038.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	14.784.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			14.784.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Peningkatan jumlah Pelaku Seni Budaya (Komunitas dan sanggar) yang aktif	10	2.270.161.000
		Pagelaran dan Festival Seni			1.318.625.000
		Malam Anugrah Bagi Seniman dan Budayawan Kota Bogor			38.000.000
		Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kesenian			100.000.000
		Pelestarian Seni Tradisi			399.870.000
		Sosialisasi Sastra, Bahasa dan Aksara Sunda			32.095.000
		Bantuan alat kesenian			-
		Optimalisasi Situs dan BCB menjadi Objek dan Daya Tarik Wisata			142.500.000
		Pameran Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)			35.000.000
		Pelestarian Budaya			152.246.000
		DED Penataan Situs Cagar Budaya			51.825.000
		PARIWISATA			
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (%)	10	783.042.450
		Promosi Pariwisata			146.500.000
		Bahan Promosi Pariwisata			224.955.000
		Pengembangan Pemasaran Pariwisata Penunjang Pariwisata Daerah			102.125.000
		Event Pariwisata			216.525.000
		Pembinaan SDM Usaha Jasa Pariwisata			13.000.000
		Pemutakhiran Data Potensi Pariwisata			70.897.450

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Kemitraan Kompepar			9.040.000
			Prosentase peningkatan PAD dari sektor pariwisata	10	
		JUMLAH			6.015.979.420
	Kearsipan	KEARSIPAN			
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	911.811.585
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			911.811.585
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	869.826.004
		Pengadaan Inventaris Kantor			680.025.004
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			189.801.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	2.956.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			2.956.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib (%)	100	22.729.250
		Perbaikan Sistem Kearsipan Dinamis In-Aktif			10.950.000
		Pengelolaan dan Workshop Aplikasi Kearsipan			3.085.000
		Pembinaan dan Evaluasi Sistem Administrasi Kearsipan			8.694.250
			Prosentase arsip daerah yang dikelola dalam sistem informasi manajemen arsip daerah (%)	90	
			Jumlah arsip yang ditertibkan	1932	
		Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Prosentase arsip daerah yang diselamatkan atau dilestarikan (%)	50	49.438.625
		Penelusuran Arsip Autentik Pemerintah Kota Bogor			44.538.625
		Akuisisi Dokumen/Arsip Daerah			4.900.000
			Jumlah penambahan arsip dinamis in aktif	460	
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan keliling (orang)	97000	167.500.000
		Pelayanan Perpustakaan umum dan Keliling Kota Bogor			42.350.000
		Pembinaan Perpustakaan bagi Kelurahan, TBM dan Sekolah			22.050.000
		Pengembangan Minat Baca			69.900.000
		Wisata Pustakaloka			33.200.000
			Jumlah koleksi dan judul buku	60820	
			Peningkatan fungsi perpustakaan	100	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Pemenuhan sarana dan prasarana (Sarpras) perpustakaan sesuai standard	100	767.882.900
		Peningkatan Sarana & Prasarana Perpustakaan Umum Daerah			653.450.000
		Penyediaan Bahan Pustaka			100.082.900
		Pengembangan Sistem Aplikasi Perpustakaan			14.350.000
		KEUANGAN			
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretaria	100	5.000.000
		Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial			5.000.000
		JUMLAH			2.797.144.364
	Pertanian	PERTANIAN			
	Dinas Pertanian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	931.727.100
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			931.727.100

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	994.236.200
		Pengadaan Inventaris Kantor			209.838.200
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			784.398.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	5.200.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			5.200.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Prosentase rata-rata peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan per tahun (%)	3	1.525.338.700
		Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura			154.280.000
		Optimalisasi Sumber Daya Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)			104.748.000
		Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)			594.287.000
		Peningkatan Pelayanan Produksi Peternakan			108.568.000
		Pengembangan Sumberdaya Perikanan			72.586.000
		Optimalisasi Sarana Prasarana Perikanan			232.131.800
		Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian			76.500.000
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian			30.100.000
		Pengembangan SDM Pertanian			62.137.900
		Bantuan Operasional Penyuluh (BANKEU JABAR TA. 2019)			90.000.000
			Peningkatan status kelompok tani (kelompok)	10	
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Peningkatan jumlah produk olahan yang dibina (produk)	13	173.701.400
		Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran TPH			91.048.400
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan			27.235.000
		Peningkatan daya saing Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			55.418.000
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Jumlah kasus penyakit zoonosis pertahun	10	217.529.000
		Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis			133.598.000
		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner Terhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan (PAH)			83.931.000
			Presentase penurunan cemaran pada sampel pangan hewani (%)	25	
		JUMLAH			3.847.732.400
	Perindustrian	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	Disperindag	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah promosi yang dilakukan	5	288.128.030
		Fasilitasi Peningkatan Kinerja Dekranasda			288.128.030
			Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM	13	
		PERINDUSTRIAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	2.450.472.250
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			2.450.472.250
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	993.357.035
		Pengadaan Inventaris Kantor			383.000.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			610.357.035
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	16.920.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			15.920.000
		Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)			1.000.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang produktif	1,075	299.318.250
		Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)			8.308.000
		Peningkatan daya saing produk IKM			85.270.250
		Pemberdayaan Rumah Kemas			139.140.000
		Pemetaan Perkembangan Sektor Industri di Kota Bogor (berbentuk WEB)			66.600.000
		Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang menerapkan Teknologi	5	27.500.000
		Penerapan dan pengembangan teknologi			27.500.000
		PERDAGANGAN			
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n	≤ Proyeksi RPKD	2.029.600.000
		Peningkatan Pemahaman Metrologi Legal			31.250.000
		Sosialisasi Tertib Niaga dibidang perdagangan			22.220.000
		Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP			39.530.000
		Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium dan Pemeliharaan			231.000.000
		Penyusunan DED Gedung Tangki Ukur Mobil (TUM) dan Kebutuhan Alat dan Perleengkapannya			111.000.000
		Pendataan dan Ukur Ulang SPBU dan Gas LPG			47.300.000
		Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Pasar			47.300.000
		Pengawasan Rokok Yang Menggunakan Cukai Ilegal/Pita Cukai Palsu (DBHCHT 2019)			1.500.000.000
			Tingkat pemantauan dan pengendalian inflasi daerah	100	
		Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	25	1.996.022.000
		Peningkatan Produk Dalam Negeri (P2DN)			116.400.000
		Penyusunan data base jasa bidang perdagangan			66.600.000
		Pembinaan Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan			18.182.000
		Fasilitas kemitraan perdagangan antara pelaku usaha mikro dan kecil dengan pelaku usaha besar dan menengah			8.235.000
		Identifikasi Pelaku Usaha TPMSE/E-Commerce di Kota Bogor			25.355.000
		Kajian Toko Swalayan di Kota Bogor			60.000.000
		Penyusunan Rencana Penataan Pasar Rakyat			-
		Pelatihan Manajemen Logistik, Gudang dan Distribusi			26.250.000
		Pemantauan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat, Barang Strategis Lainnya dan Operasi Pasar			125.000.000



No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Buku Klasifikasi IKM Kuliner Kota Bogor Berdasarkan Orientasi Pasar			50.000.000
		Revitalisasi/Pembangunan Showroom Bogor Craft Center			1.500.000.000
			Rata-rata persentase kenaikan harga	12	
		Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah produk berkualitas ekspor (komoditi)	29	320.180.000
		Forum Bisnis eksportir, calon eksportir dengan stakeholder			25.560.000
		Promosi Produk Berorientasi Ekspor			200.000.000
		Pengembangan Produk dan Merk Dagang (Rebranding) bagi Produk Orientasi Ekspor			70.800.000
		Fasilitas Informasi dan Akses Pasar Ekspor			23.820.000
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Haki	30	116.837.500
		Sistem Jaminan Halal bagi IKM			61.887.500
		Penerapan HKI Bagi IKM			54.950.000
			Halal	100	
	Administrasi Pemerintahan	JUMLAH			8.538.335.065
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Frekuensi Dialog Lintas Agama (minimal 1x sebulan)	≥12	396.382.856
		Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Peringatan Hari Besar Daerah (PHBD)			396.382.856
			Prosentase deteksi permasalahan intoleransi yang tertangani	100%	
			Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah	0	
			Prosentase pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat	0,5	
			Jumlah pelanggaran norma agama	0	
			Jumlah konflik SARA	0	
			Prosentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	100	
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah ruang publik yang disediakan, infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi (lokasi)	40	515.377.000
		Pengelolaan Media Publikasi			451.077.000
		Pengelolaan Data Kehumasan			64.300.000
			Prosentase SIM yang telah terintegrasi lintas PD (%)	20,39	
		Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			676.728.650
		Peningkatan Kualitas Pelayanan PPID			100.675.000
		Penguatan Hubungan Kelembagaan Kehumasan			576.053.650
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	3.812.937.400
		Penyebarluasan Informasi Publik			3.812.937.400
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	365.100.331
		Peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan			365.100.331
		JUMLAH			5.766.526.237

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Prosentrase penerbitan Perda dan Perwali	95	800.587.600
		Penyusunan Produk Hukum Daerah			435.370.200
		Evaluasi Produk Hukum Daerah			31.200.000
		Pengolahan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum, Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta Sosialisasi			334.017.400
			Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	100	
		Penegakan Hukum dan Penerapan HAM	Prosentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	100	715.115.375
		Penanganan Perkara Perdata dan TUN serta Bantuan Hukum			612.615.375
		Penyuluhan Hukum dan RANHAM			102.500.000
		JUMLAH			1.515.702.975
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN ORGANISASI	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Haki	30	400.175.000
		Pembinaan Pelayanan Publik			400.175.000
			Halal	100	
		Penataan Tata Laksana	Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh OPD yang memberikan pelayanan publik		70.762.500
		Penyusunan Standarisasi Kerja			70.762.500
			Persentase PD yang menetapkan SOP pelayanan publik (%)	100	
		Penataan dan Penguatan Organisasi	Organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)		209.764.250
		Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah			209.764.250
		Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	A	264.737.500
		Penyusunan Laporan dan penguatan akuntabilitas kinerja			264.737.500
			Prosentase OPD yang mendapat nilai B pada penilaian AKIP	90	
		Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Prosentase pemerinkatan jabatan untuk setiap jabatan pada PD (%)	100	174.937.000
		Evaluasi Anjab, ABK, Evjab			174.937.000
		Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks RB		50.000.000
		Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi			50.000.000
		JUMLAH			1.170.376.250
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	385.263.800
		Penyusunan LPPD, EPPD dan ILPPD Kota Bogor Tahun 2017			87.082.000
		Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2017			100.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah			193.681.800

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos			4.500.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	95	372.328.345
		Pembinaan dan Evaluasi terhadap Perangkat Kecamatan dan Kelurahan			205.766.845
		PERDA Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan			49.719.000
		Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan (PSPLK)			116.842.500
			Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	3	
		Kerjasama Pembangunan	Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan	100	257.976.250
		Keikutsertaan dalam APEKSI			257.976.250
		Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Prosentase rekomendasi hasil Rakerda yang ditindaklanjuti	100	100.000.000
		Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah			50.000.000
		Penyusunan Administrasi Pimpinan Daerah dan Pejabat Negara			50.000.000
		Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan			263.300.000
		Penanganan Permasalahan Pertanahan dan Sosialisasi Peraturan Pertanahan			105.500.000
		Penataan Wilayah Kota Bogor dan Pemeliharaan Pilar Batas			157.800.000
		JUMLAH			1.378.868.395
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah promosi yang dilakukan	5	132.670.000
		Monitoring dan Evaluasi Sarana Perekonomian			28.670.000
		Optimalisasi Pengembangan Sarana Perekonomian Kota Bogor			104.000.000
			Jumlah kemitraan dan kerjasama UMKM	13	
		PERDAGANGAN			
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase jumlah kasus konsumen yang terselesaikan	35	484.335.000
		Pelaksanaan Aksi Bogor Kota Halal			186.710.000
		Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor			297.625.000
			Persentase pelaku usaha yang tertib niaga	11	
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	585.916.000
		Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor			240.096.000
		Pemeliharaan dan Pengembangan SIM BUMD			52.940.000
		Kajian Penanaman Modal BUMD			216.250.000
		Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah			76.630.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Kerjasama Pembangunan	Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan	100	756.422.045
		Optimalisasi Kerjasama Non Pemerintah			127.643.400
		Optimalisasi Kerjasama Pemerintah			564.528.645
		Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama			64.250.000
		JUMLAH			1.959.343.045
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Frekuensi Dialog Lintas Agama (minimal 1x sebulan)	≥12	716.290.000
		Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bogor			716.290.000
			Prosentase deteksi permasalahan intoleransi yang tertangani	100%	
			Prosentase tingkat kemudahan mendirikan tempat ibadah	0	
			Prosentase pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat	0,5	
			Jumlah pelanggaran norma agama	0	
			Jumlah konflik SARA	0	
			Prosentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	10	
		SOSIAL			
		Pemberdayaan Lembaga Sosial	Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		5.926.145.400
		Peningkatan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Balaikota Bogor			300.000.000
		Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang tidak Memiliki Pekerjaan Tetap dan Marbot Masjid			3.187.000.000
		Peningkatan Peran Serta Lembaga Sosial, Kemasyarakatan dan Keagamaan			349.355.000
		Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tk. Kota			1.055.075.000
		Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Jawa Barat			276.205.400
		Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji			567.930.000
		Pesta Paduan Suara Gerejawi Anak Se-Kota Bogor			96.040.000
		Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda Gereja			94.540.000
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh SKPD yang memberikan pelayanan publik	3,25	948.250.000
		Penyelenggaraan verifikasi dan distribusi proposal hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2018			695.600.000
		Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial			54.400.000
		Pemutakhiran Data Sistem Informasi Manajemen Kemasyarakatan (APLIKASI SAHABAT)			64.000.000
		Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/Bansos terhadap Lembaga Kemasyarakatan dan juga Unsur Pemerintahan			134.250.000
		JUMLAH			7.590.685.400
	Administrasi Pemerintahan				

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	18.925.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			18.925.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengendalian Pembangunan	Tingkat tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan (%)	>97	469.725.272
		Pembinaan Administrasi Pembangunan			110.158.500
		Evaluasi Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan			163.987.772
		Penyusunan Standar Biaya			195.579.000
		JUMLAH			488.650.272
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN UMUM	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	20.313.965.562
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			20.313.965.562
		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat			116.400.000
		Piket Rumah Tangga			50.714.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			153.000.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	20.325.161.600
		Pengadaan Inventaris Kantor			7.345.300.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			6.222.061.600
		Pengadaan Inventaris Rumah Dinas KDH/WKDH			1.477.800.000
		Pembangunan Lift Gedung Sekretariat Daerah (lanjutan)			5.280.000.000
		Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Prosentase rekomendasi hasil Rakerda yang ditindaklanjuti	100	4.000.000.000
		Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2.000.000.000
		Penunjang Kedinasan Sekretariat Daerah Kota Bogor			2.000.000.000
		KEUANGAN			
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	-
		Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah			-
		JUMLAH			44.639.127.162
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DAERAH				
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Pengendalian Pembangunan			1.470.287.792
		Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan			943.252.800
		Penyelenggaraan e-Procurement			358.028.265
		Resertifikasi ISO 9001:2015			169.006.727
		JUMLAH			1.470.287.792
	Administrasi Pemerintahan				
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	65.702.826.000
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			64.197.431.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan			1.136.395.000
		Pelayanan Administratif Sekretariat DPRD			369.000.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	24.613.775.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			5.800.000.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			8.773.775.000
		Kajian Pembebasan Lahan Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor			40.000.000
		Pembebasan Lahan			10.000.000.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	51.900.000
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran			25.600.000
		Penyusunan Pelaporan			26.300.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Prosentase pelayanan publik yang berbasis sistem informasi	60	1.218.500.000
		Pelayanan kehumasan			1.218.500.000
			Ketersediaan SDM yang mempunyai kompetensi di bidang TIK (orang/OPD)	2	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	30	1.978.200.000
		Pelayanan Administratif DPRD			1.978.200.000
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur	85	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase rancangan Perda yang disetujui menjadi Perda (%)	80	6.116.099.000
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			735.975.000
		Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan			528.450.000
		Rapat-Rapat Paripurna			122.680.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			54.999.000
		Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah dan Dalam Daerah			27.740.000
		Peningkatan SDM dan Profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD			3.347.200.000
		Pengadaan Pakaian Dinas DPRD			855.560.000
		Pendokumentasian produk DPRD dan Sekretariat DPRD			46.740.000
		Rapat-Rapat Pembahasan Anggaran dan LKPJ			268.300.000
		Fasilitasi Rapat- rapat Badan Kehormatan			78.400.000
		Rapat- rapat Badan Pembentukan Perda			50.055.000
		JUMLAH			99.681.300.000
	Administrasi Pemerintahan				
	KECAMATAN BOGOR UTARA	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.461.966.549
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			1.461.966.549
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	7.354.862.231
		Pengadaan Inventaris Kantor			847.500.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			407.362.231

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Rehabilitasi Kantor Kecamatan			5.900.000.000
		DED Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Kecamatan Bogor Utara (Tahap II) Tahun 2019			100.000.000
		DED Pembangunan Pusat Kuliner Kecamatan Bogor Utara Tahun 2019			100.000.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	12.110.200
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			5.310.200
		Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)			6.800.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	95	3.577.759.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			12.900.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegal Gundil			522.410.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bantarjati			412.054.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibuluh			291.252.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Halang			411.378.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciluar			321.102.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Baru			387.396.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cimahpar			376.535.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciparigi			392.732.000
		Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Ciparigi			250.000.000
		Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Cibuluh			200.000.000
			Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	3	
		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Lingkungan Sehat Perumahan	Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2)	100000	1.375.240.000
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan			7.240.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Gundil			171.350.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bantarjati			171.850.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibuluh			171.850.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Halang			172.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciparigi			171.850.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciluar			166.750.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Baru			172.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cimahpar			170.350.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2)	20000	
			Jumlah jembatan jalan lingkungan) yang terbangun (unit)	6	
			Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	120	
		SOSIAL			
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			9.150.000
		Penanggulangan/penanganan darurat bencana			9.150.000
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	63	8.081.000
		Penanganan Mayat Terlantar			8.081.000
			Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya	75	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	
		Pemberdayaan Lembaga Sosial	Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		87.000.000
		Seleksi Tilawatil Quran			87.000.000
		LINGKUNGAN HIDUP			
		Program Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	Reduksi Sampah (%)	4,7	1.430.000
		Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah			1.430.000
			Jumlah TPS 3R di daerah yang belum terlayani oleh angkutan (lokasi)	18	
			Jumlah Bank Sampah (lokasi)	0	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			260.214.000
		Pemberdayaan Perempuan Tk. Kecamatan dan Kelurahan			202.914.000
		Penilaian Lomba-lomba tingkat Kelurahan dan Kecamatan			57.300.000
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	16.950.000
		Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat			16.950.000
		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Presentase UMKM yang produktif	30	26.890.000
		Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah			26.890.000
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87	
		PENANAMAN MODAL			
		Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	1,9	6.410.000
		Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)			6.410.000
			Jumlah promosi penanaman modal	4	
			Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	100	
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100	
			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%)	98	
		PERENCANAAN			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RRJMD	100	17.760.000
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan			17.760.000



No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	90	
			Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat / propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat / propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	
			JUMLAH		14.215.822.980
	Administrasi Pemerintahan				
	KECAMATAN BOGOR SELATAN	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Lingkungan Sehat Perumahan	Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2)	100000	2.726.600.000
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan			3.500.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Batutulis			162.850.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bojongkerta			171.400.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bondongan			170.350.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cikaret			170.830.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cipaku			171.370.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Empang			169.900.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Genteng			171.250.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Harjasari			170.350.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kertamaya			171.400.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Lawanggintung			169.750.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Muarasari			170.350.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mulyaharja			170.350.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pakuan			170.350.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pamoyanan			170.350.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Rancamaya			171.450.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ranggamekar			170.800.000
			Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2)	20000	
			Jumlah jembatan jalan lingkungan yang terbangun (unit)	6	
			Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	120	
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan)	136	14.200.000
		Penertiban PKL			9.600.000
		Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban			4.600.000
		SOSIAL			
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			15.000.000
		Penanggulangan/penanganan darurat bencana			15.000.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	63	10.000.000
		Penanganan Mayat Terlantar			10.000.000
			Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya	75	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	
		Pemberdayaan Lembaga Sosial	Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		150.000.000
		Seleksi Tilawatil Quran			150.000.000
		LINGKUNGAN HIDUP			
		Pembinaan Pengelolaan Persampahan			4.000.000
		Pembinaan Pengelolaan Persampahan			4.000.000
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	0,76	170.000.000
		Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)			170.000.000
			Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang)	650	
			Persentase partisipasi masyarakat	90	
			Persentase pemutakhiran data profil kelurahan	90	
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	14.400.000
		Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan			14.400.000
		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Presentase UMKM yang produktif	30	16.600.000
		Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah			16.600.000
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87	
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif	85	11.600.000
		Pendataan dan Pembinaan Koperasi			11.600.000
			Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang menjadi Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum	28	
		PENANAMAN MODAL			
		Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	1,9	16.600.000
		Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)			16.600.000
			Jumlah promosi penanaman modal	4	
			Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	100	
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100	
			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%)	98	
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.613.752.500
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			1.613.752.500
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.849.650.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			936.750.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			912.900.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	33.200.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			33.200.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	95	6.163.198.500
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			200.000.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Batutulis			299.650.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bojong Kerta			264.942.500
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bondongan			450.600.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cikaret			389.600.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipaku			427.000.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Empang			657.720.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Genteng			287.000.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Harjasari			339.150.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kertamaya			229.400.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Lawang Gintung			284.250.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Muara Sari			263.850.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mulyaharja			386.300.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pakuan			210.286.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pamoyanan			377.500.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Rancamaya			280.050.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ranggungkar			365.900.000
		Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Lawang Gintung			250.000.000
		Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Kertamaya			200.000.000
			Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	3	
		PERENCANAAN			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	100	18.600.000
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan			18.600.000
			Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	90	
			Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/ propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		KEUANGAN			
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	13.600.000
		Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial			13.600.000
		JUMLAH			12.841.001.000
	Administrasi Pemerintahan				
	KECAMATAN BOGOR TIMUR	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Lingkungan Sehat Perumahan	Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2)	100000	461.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan			11.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Baranangsiang			75.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindangrasa			75.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindangsari			75.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukasari			75.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tajur			75.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Katulampa			75.000.000
			Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2)	20000	
			Jumlah jembatan jalan lingkungan) yang terbangun (unit)	6	
			Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	120	
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan)	136	9.300.000
		Penataan PKL di Jalan Lingkungan			3.500.000
		Pembinaan dan Penataan Sistem Keamanan Masyarakat			5.800.000
		SOSIAL			
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			54.000.000
		Penanggulangan/ penanganan darurat bencana			54.000.000
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	63	21.000.000
		Penanganan Mayat Terlantar			21.000.000
			Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya	75	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	
		Pemberdayaan Lembaga Sosial	Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		135.264.000
		Seleksi Tilawatil Quran			135.264.000
		LINGKUNGAN HIDUP			
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase volume sampah terangkut (%)	75,35	15.000.000
		Pembinaan Pengelolaan Persampahan			15.000.000
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	0,76	230.000.000
		Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)			230.000.000
			Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang)	650	
			Persentase partisipasi masyarakat	90	
			Persentase pemutakhiran data profil kelurahan	90	
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			5.000.000
		Penilaian Lomba-lomba tingkat Kelurahan dan Kecamatan			5.000.000
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	30.000.000
		Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan			30.000.000
		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UMKM yang produktif	30	74.250.000
		Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah			74.250.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87	
		PENANAMAN MODAL			
		Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	1,9	19.490.000
		Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)			19.490.000
			Jumlah promosi penanaman modal	4	
			Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	100	
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100	
			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%)	98	
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.148.845.500
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			1.148.845.500
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.096.580.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			335.580.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			761.000.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	5.500.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			5.500.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	95	2.804.365.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			200.000.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang			482.320.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangrasa			341.250.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangsari			225.400.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukasari			249.075.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur			187.690.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Katulampa			668.630.000
		Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Sukasari			250.000.000
		Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Sindangrasa			200.000.000
			Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	3	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Haki	30	9.000.000
		Survei Kepuasan Masyarakat			9.000.000
			Halal	100	
		PERENCANAAN			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	100	9.000.000
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan			9.000.000
			Persentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	90	
			Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/provinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat / propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	
		KEUANGAN			
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	16.400.000
		Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial			16.400.000
		JUMLAH			6.143.994.500
	Administrasi Pemerintahan				
	KECAMATAN BOGOR BARAT	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Lingkungan Sehat Perumahan	Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2)	100000	2.719.780.000
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan			7.950.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Balumbang Jaya			168.850.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Bubulak			169.500.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Barat			169.150.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cilendek Timur			169.850.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug			169.600.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Curug Mekar			169.450.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gunung Batu			169.450.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Loji			168.310.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Margajaya			169.450.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Menteng			171.400.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Jaya			169.580.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Kuda			168.850.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasir Mulya			170.700.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Semplak			169.450.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sindang Barang			169.390.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Situ Gede			168.850.000
			Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2)	20000	
			Jumlah jembatan jalan lingkungan yang terbangun (unit)	6	
			Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	120	
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan)	136	26.040.000
		Penataan PKL di Jalan Lingkungan			13.020.000
		Pemutakhiran Gangguan Kantrantibmas			13.020.000
		SOSIAL			
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			114.320.000
		Penanggulangan/ penanganan darurat bencana			114.320.000
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	63	46.200.000
		Penanganan Mayat Terlantar			46.200.000
			Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya	75	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	
		Pemberdayaan Lembaga Sosial	Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		244.750.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Seleksi Tilawatil Quran			244.750.000
		LINGKUNGAN HIDUP			
		Pembinaan Pengelolaan Persampahan			19.900.000
		Pembinaan Pengelolaan Persampahan			19.900.000
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase volume sampah terangkut (%)	75,35	43.240.000
		Pelombaan Kebersihan			43.240.000
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	0,76	435.000.000
		Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)			435.000.000
			Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang)	650	
			Persentase partisipasi masyarakat	90	
			Persentase pemutakhiran data profil kelurahan	90	
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			194.000.000
		Penilaian Lomba-lomba tingkat Kelurahan dan Kecamatan			194.000.000
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	47.300.000
		Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan			47.300.000
		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Presentase UMKM yang produktif	30	18.289.000
		Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah			18.289.000
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87	
		PENANAMAN MODAL			
		Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	1,9	38.340.000
		Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)			38.340.000
			Jumlah promosi penanaman modal	4	
			Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	100	
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100	
			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%)	98	
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.765.098.000
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			1.765.098.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.676.600.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			996.550.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			444.000.000
		Rehabilitasi Kantor Kelurahan			236.050.000
		Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan Loji			-
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	19.850.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			19.850.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	95	7.652.876.200
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			466.625.200
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Balumbang Jaya			363.185.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bubulak			382.440.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Barat			483.485.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Timur			418.486.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug			421.305.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug Mekar			404.160.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Batu			447.924.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Loji			388.540.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Marga Jaya			262.440.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Menteng			512.135.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Jaya			453.875.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Kuda			422.146.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Mulya			273.556.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Semplak			325.410.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindang Barang			366.324.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Situ Gede			310.840.000
		Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kecamatan Bogor Barat			250.000.000
		Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Gunung Batu			500.000.000
		Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Pasir Jaya			200.000.000
			Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	3	
		PERENCANAAN			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	100	18.165.000
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan			18.165.000
			Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	90	
			Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	
		KEUANGAN			
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	9.260.000
		Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial			9.260.000
		JUMLAH			15.089.008.200
	Administrasi Pemerintahan				
	KECAMATAN BOGOR TENGAH	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Lingkungan Sehat Perumahan	Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2)	100000	736.950.000
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan			2.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibogor			67.100.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Ciwaringin			64.800.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Gudang			67.200.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Kalapa			67.300.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pabaton			67.800.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Paedang			68.200.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Panaragan			67.200.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sempur			67.200.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tegal Lega			67.300.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan Pasar			65.800.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Babakan			65.050.000
			Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2)	20000	
			Jumlah jembatan jalan lingkungan yang terbangun (unit)	6	
			Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	120	
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan)	136	16.000.000
		Monitoring dan Penertiban Penyakit Masyarakat			15.000.000
		Pembinaan dan Penataan PKL di jalan Lingkungan			1.000.000
		SOSIAL			
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			40.000.000
		Penanggulangan/ penanganan darurat bencana			40.000.000
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Presentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	63	16.800.000
		Penanganan Mayat Terlantar			16.800.000
			Prosentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya	75	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	
		Pemberdayaan Lembaga Sosial	Prosentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		100.000.000
		Seleksi Tilawatil Quran			100.000.000
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan			243.850.000
		Pemberdayaan Perempuan Tk. Kecamatan dan Kelurahan			236.850.000
		Penilaian Lomba-lomba tingkat Kelurahan dan Kecamatan			7.000.000
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	9.300.000
		Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan			9.300.000
		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Presentase UMKM yang produktif	30	2.600.000
		Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah			2.600.000
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87	
		PENANAMAN MODAL			
		Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	1,9	3.600.000
		Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)			3.600.000
			Jumlah promosi penanaman modal	4	
			Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	100	
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100	
			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%)	98	
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.122.341.000
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			1.122.341.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	4.080.355.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			849.805.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			736.800.000
		Rehabilitasi Kantor Kelurahan			2.493.750.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	6.600.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			6.600.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	95	4.206.231.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			44.605.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan Pasar			299.599.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan			282.239.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibogor			227.149.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciwaringin			335.609.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gudang			356.599.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Kalapa			303.919.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pabaton			174.899.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Paledang			376.819.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Panaragan			265.269.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sempur			259.789.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegal Lega			329.751.000
		Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kecamatan Bogor Tengah			499.985.000
		Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Pabaton			250.000.000
		Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Babakan Pasar			200.000.000
			Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	3	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Haki	30	7.000.303
		Survei Kepuasan Masyarakat			7.000.303
			Halal	100	
		PERENCANAAN			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	100	5.000.000
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan			5.000.000
			Persentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	90	
			Persentase Anggaran dalam RKPDP/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	
		KEUANGAN			



No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	4.550.000
		Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial			4.550.000
		JUMLAH			10.601.177.303
	Administrasi Pemerintahan				
	KECAMATAN TANAH SAREAL	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
		Lingkungan Sehat Perumahan	Panjang jalan Lingkungan berkondisi baik (m2)	100000	1.376.930.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Tanah Sareal			125.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kebon Pedes			125.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Badak			125.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Jaya			125.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kedung Waringin			125.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukadamai			125.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sukaresmi			125.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibadak			125.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Mekarwangi			125.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kencana			125.000.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Kayumanis			126.930.000
			Panjang saluran pembuangan air hujan perumahan berkondisi baik (m2)	20000	
			Jumlah jembatan jalan lingkungan yang terbangun (unit)	6	
			Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	120	
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah kawasan rawan PKL yang berhasil ditertibkan (2 lokasi/kelurahan)	136	13.200.000
		Pembinaan, Pengendalian dan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			13.200.000
		SOSIAL			
		Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			50.000.000
		Penanggulangan/ penanganan darurat bencana			50.000.000
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	Persentase jumlah fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang direhab dan berdaya	63	25.000.000
		Penanganan Mayat Terlantar			25.000.000
			Persentase jumlah anjal, Gepeng dan PSK yang berdaya	75	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan non fisik	100	
		Pemberdayaan Lembaga Sosial	Persentase lembaga sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan		112.500.000
		Seleksi Tilawatil Quran			112.500.000
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	0,76	248.250.000
		Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (PKK)			248.250.000
			Masyarakat dan Kelompok Binaan yang mengikuti Lomba Kelurahan (orang)	650	
			Persentase partisipasi masyarakat	90	
			Persentase pemutakhiran data profil kelurahan	90	
		KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN			
		Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Persentase tingkat pencapaian penyampaian informasi publik (%)	100	51.600.000
		Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan			51.600.000
		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UMKM yang produktif	30	20.300.000
		Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah			20.300.000

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan permodalan	87	
		PENANAMAN MODAL			
		Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi (dalam triliun rupiah)	1,9	15.050.000
		Pelayanan Perijinan IMB Tingkat Kecamatan			15.050.000
			Jumlah promosi penanaman modal	4	
			Tingkat pelayanan promosi dan investasi berbasis internet (%)	100	
			Persentase perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani sesuai dengan SOP (%)	100	
			Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perijinan (%)	98	
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	788.216.103
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			788.216.103
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.137.500.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			400.000.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			394.000.000
		Pembangunan dan Pemeliharaan Bidang Prasarana Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan			343.500.000
		Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	95	4.762.980.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			100.950.000
		Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Tanah Sareal			250.000.000
		Lomba Kinerja Aparatur			48.310.000
		Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melalui penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2017 Kelurahan Kebon Pedes			200.000.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Sareal			275.480.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Pedes			416.850.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Badak			512.850.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Jaya			277.200.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Waringin			416.600.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukadamai			345.800.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukaesmi			260.800.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibadak			442.050.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mekarwangi			425.110.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kencana			427.160.000
		Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kayumanis			363.820.000
			Jumlah kelurahan berprestasi tingkat kota, provinsi, dan nasional	3	
		PERENCANAAN			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	100	15.500.000
		Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan			15.500.000
			Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPd	100	
			Persentase Keselarasan RKPd dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPd	90	
			Persentase Anggaran dalam RKPd/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	
		KEUANGAN			
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	20.200.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			11.600.000
		Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)			8.600.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		JUMLAH			8.637.226.103
	Pengawasan				
	INSPEKTORAT	PENGAWASAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.274.557.459
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			1.274.557.459
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.068.350.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			586.350.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			238.000.000
		Penyusunan DED Pembangunan Gedung Inspektorat			244.000.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	38.984.500
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			25.684.500
		Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)			13.300.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Level maturitas penerapan SPIP	3	419.100.000
		Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)			203.000.000
		Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP)			47.460.000
		Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			5.650.000
		Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan			12.225.000
		Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			131.625.000
		Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor dan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			19.140.000
			Peningkatan level kapabilitas APIP	3	
			Penetapan PD berpredikat WBK	3	
			Tingkat kesesuaian laporan aksi PPK dengan data dukung (%)	100	
			Opini BPK atas LKPD Kota Bogor	WTP	
			Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (Inspektorat Kota Bogor) (%)	100	
			Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (Inspektorat Provinsi Jawa Barat)	74	
			Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan eksternal (BPK) (%)	89	
			Tidak adanya auditor yang dibebaskan sementara karena kekurangan angka kredit	0	
		JUMLAH			2.800.991.959
	Perencanaan				
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase ketercapaian indikator kinerja program penataan ruang	90	757.255.000
		Sosialisasi Tata Ruang			757.255.000
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			



No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Kerjasama Pembangunan	Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP	4 Milyar	60.450.000
		Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) Perusahaan di Kota Bogor			60.450.000
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	10	
		Pengendalian Pembangunan	Konsistensi antara rencana kegiatan PD dan implementasinya	100	187.300.000
		Upgrading Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Kota			187.300.000
		PERENCANAAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	3.257.319.100
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			3.257.319.100
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.764.250.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			698.000.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			1.066.250.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	25.127.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			25.127.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	100	1.537.746.200
		Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor			82.290.000
		Penyusunan RPJMD 2020-2025			681.156.200
		Perencanaan Umum			229.600.000
		Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan			544.700.000
			Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD	90	
			Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD	97	1.037.905.600
		Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			475.955.600
		Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi di Kota Bogor			561.950.000
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	97	
		Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD	97	505.300.000
		Perencanaan Pembangunan Subid Pemberdayaan			129.300.000
		Penguatan Lembaga TKPK (BANKEU JABAR TA. 2019)			100.000.000
		Perencanaan Pembangunan Subid Sosial Budaya			276.000.000
		Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD	97	722.689.000
		Penyelenggaraan Perencanaan Perumahan dan Permukiman			185.400.000



No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Perencanaan Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM Kota Bogor			489.000
		Review Masterplan Transportasi			536.800.000
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA	97	
		Penelitian Pengembangan	Jumlah Inovasi Masyarakat yang telah diinventarisir	60	236.250.000
		Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2019			236.250.000
			Persentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang Visi Misi Kota	30	
			Jumlah Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas inovasi masyarakat	3	
		JUMLAH			10.091.591.900
	Keuangan				
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PERENCANAAN			
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD	100	155.000.000
		Penyusunan perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah			155.000.000
			Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPd	100	
			Persentase Keselarasan RKPd dengan RPJMD	100	
			Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPd	90	
			Persentase Anggaran dalam RKPd/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP	90	
			Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang terakomodir dalam APBD/APBDP	15	
			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari pemerintah pusat /propinsi	10	
			Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev	80	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	90	
			Rasio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang	01:10,0	
			Persentase keterwakilan gender dalam kegiatan musrenbang	30	
		KEUANGAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	4.318.098.040
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			4.318.098.040
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	170.500.000
		Penyusunan Standar Harga			170.500.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.022.850.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			591.450.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			431.400.000
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Target PAD	754.439.728.200	670.616.000
		Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD			145.750.000
		Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD			152.000.000
		Penelitian DPA OPD			123.125.000
		Penelitian DPPA OPD			101.016.000
		Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD			32.850.000
		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			71.100.000
		Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD			44.775.000
		FGD Pengelolaan Keuangan Daerah			-
			Target pendapatan pajak daerah	550.000.000.000	
			Piutang pajak daerah menurun (%)	3	
			WP yang diklarifikasi/diperiksa	70 WP	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
			Presentase WP yang membayar pajak daerah secara online (%)	100	
			WP pajak daerah lainnya bertambah	10	
			Presentase WP pajak daerah bertambah(%)	2	
		Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Pelaporan, inventarisasi, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah	100	3.189.430.000
		Evaluasi Penggunaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah			517.135.000
		Pemetaan BMD			176.915.000
		Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor			285.600.000
		Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor			950.731.000
		Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang Milik Daerah			658.875.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam Penguasaan Pengelola Barang Milik Daerah			188.950.000
		Penatausahaan Barang Milik Daerah			74.875.000
		Penilaian Barang Milik Daerah			75.300.000
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah			197.015.000
		Pembinaan Kepada Pengelolaan Barang Milik Daerah pada OPD			5.384.000
		Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			58.650.000
			Tingkat tertib pengelolaan aset daerah	100	
			JUMLAH		9.526.494.040
	Keuangan				
	BADAN PENDAPATAN DAERAH	KEUANGAN			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	5.468.336.052
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			5.468.336.052
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	1.680.845.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			999.745.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			681.100.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	52.000.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			52.000.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup sekretariat daerah	100	8.494.577.400
		Penertiban Pajak Daerah			207.194.000
		Analisa dan Evaluasi Pajak Daerah			171.158.000
		Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah			360.551.000
		Rekonsiliasi Pajak Daerah			23.850.000
		Pendataan Wajib Pajak Daerah			82.700.000
		Pemeliharaan Basis Data PBB			860.440.000
		Penyusunan Zona Nilai Tanah			250.935.000
		Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah			1.482.150.000
		Penagihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB			486.290.000
Dst		Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			1.244.016.000
		Penataan Panggung Reklame			36.338.000
		Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah			1.040.200.000
		Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah			33.891.000
		Uji Potensi Pajak Daerah			300.000.000
		Analisa dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah			10.897.200
		Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya			65.456.000
		Surveilance dan penyesuaian Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Pelayanan PBB			100.163.000
		Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah			616.253.200
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi Pajak Daerah			833.100.000
		Pembentukan Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Berbasis Sistem			288.995.000
			JUMLAH		15.695.758.452
	Kepegawaian				
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	KEUANGAN			

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	90	1.510.000.000
		Pengelolaan Rumah Tangga OPD			1.510.000.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	90	641.525.000
		Pengadaan Inventaris Kantor			365.725.000
		Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor			275.800.000
		Program Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	84	87.100.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD			87.100.000
			Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	

No.	URUSAN / PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2019	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	30	6.187.880.000
		Bantuan Penelitian Studi dan Beasiswa Pendidikan PNS			387.640.000
		Pengembangan SDM			312.800.000
		Diklat Teknis			1.576.850.000
		Diklat Prajabatan			2.302.060.000
		Diklat Kepemimpinan			1.037.530.000
		Diklat Fungsional			400.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pimpemdagri			171.000.000
			Persentase peningkatan kompetensi aparatur	85	
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Level maturitas penerapan SPIP	3	11.350.000
		Fasilitasi Pelaporan LHKPN			11.350.000
			Peningkatan level kapabilitas APIP	3	
			Penetapan PD berpredikat WBK	3	
			Tingkat kesesuaian laporan aksi PPK dengan data dukung (%)	100	
			Opini BPK atas LKPD Kota Bogor	WTP	
			Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (Inspektorat Kota Bogor) (%)	100	
			Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (Inspektorat Provinsi Jawa Barat)	74	
			Tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan eksternal (BPK) (%)	89	
			Tidak adanya auditor yang dibebaskan sementara karena kekurangan angka kredit	0	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase aparatur yang terlayani administrasi, data, dan informasi kepegawaian (%)	100	10.068.687.000
		Pengelolaan Data dan Informasi			351.500.000
		Pembinaan Disiplin dan Kinerja			274.890.000
		Pengembangan Karir Jabatan			414.714.000
		Pengembangan Karir Jabatan Fungsional tertentu			82.062.000
		Kepangkatan dan Pensiun			290.200.000
		Penerimaan CPNS Kota Bogor dari Pelamar Umum TA.2019			477.940.000
		Penerimaan K2 yang Tidak Lulus Seleksi			180.200.000
		Penatausahaan dan Pelayanan Kesejahteraan Pegawai serta Pelepasan Purnabakti			140.816.000
		Penyebarluasan dan Publikasi BKPSDA			158.600.000
		Penyusunan Formasi dan Alih Tugas PNS			96.700.000
		Peringatan HUT KORPRI			339.250.000
		Evaluasi Perencanaan Capaian di Bidang Kepegawaian			109.565.000
		Pengelolaan Kepegawaian Umum			7.124.600.000
		Penataan Arsip Kepegawaian			27.650.000
			Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan (%)	85	

Tabel 7.3. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bogor Tahun 2020

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		Perangkat Daerah	
			Target	Rp. (dlm Juta)		
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan						
1	Program Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	1	Persentase PAUD Sehat	32	80	Dinas Pendidikan
		2	APK PAUD	50	1.173	
		3	Terpenuhinya Cakupan Dasar Anak Usia Dini	100		
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	1	APK SD	113	44.829	81,22
		2	APK SMP	104,3		
		3	Persentase Sarana Prasarana Sekolah SD berkondisi baik	94,5	90.786	
		4	Persentase Sarana Prasarana Sekolah SMP berkondisi baik	94,8	18.979	
		5	Nilai Rata-Rata USBN SD	76,02	806	
3	Program Pendidikan non formal	1	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi			
		2	Persentase PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang terakreditasi	34	45.370	
		3	Persentase LKP (Lembaga Kursus Pendidikan) yang terakreditasi	51	470	
		4	Persentase Kelulusan Paket A, B, dan C	100	45	
		5	Persentase Ketersediaan PKBM di setiap kelurahan	51		
		6	Cakupan Layanan Dasar pada Kesetaraan	100		
		7	Jumlah PTK Berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	2	430	
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	17.000	
7	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	575	
8	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	35	
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
9	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85	175	
		2	Persentase Keterbukaan Informasi publik	100		
10	Program Pengembangan Data dan Informasi	1	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55	285	
		2	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	55		

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		Perangkat Daerah	
			Target	Rp. (d/m Juta)		
		3	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90		
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						
1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1	Indeks Keluarga Sehat	0,50	80.046	Dinas Kesehatan
		2	Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	80%		
		3	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	24%		
		4	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	96%		
		5	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	8 % (2 puskesmas)		
		6	Cakupan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin	100	5.000	
2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	1	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	55	6.300	
		2	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	2,95		
		3	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	3,35		
		4	Persentase Ibu Hamil Dengan KEK	3,99		
		5	Persentase Ibu Hamil Dengan Anemia	8,3		
		6	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs	4,75		
		7	Persentase Balita Sangat Kurus dan Kurus (Wasting)	1,97		
		8	Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	4,42		
3	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Persentase kesembuhan TB Paru	86	7.500	Dinas Kesehatan
		2	Prevalensi HIV Aids	<0,5		
		3	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)	65		
		4	Prevalensi Hipertensi	9,3		
		5	Prevalensi Diabetes Militus	2,35		
		6	Angka Kesakitan ODGJ	≤ 0,13		
4	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	1	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	80%	47.130	
		2	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	85%		
		3	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	0,66		
		4	Persentase puskesmas yang menerapkan penggunaan obat secara rasional	75%		
		5	Persentase industri rumah tangga di sektor pangan yang memenuhi standar kesehatan	85		
		5	Program Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan	1	Persentase Rumah Tangga BerPHBS*(12 IKS)	68
		2	Persentase Rumah sehat (%)	79		

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		Perangkat Daerah	
			Target	Rp. (dlm Juta)		
6	Program Pengembangan Data dan Informasi	1	Persentase Institusi Pelayanan Kesehatan berbasis smart health	65%	900	
7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Persentase Puskesmas dan Labkesda dengan Pelayanan Informasi Publik	50%	700	
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	2.500	
9	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	5.000	
10	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	1.575	
		2	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	BB		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
11	Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	1	Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan	84,25	91.631	RSUD
12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1	Persentase capaian SPM RSUD	93,75	180.492	
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD	3,66		
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang						
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman	93,15	189.288	Dinas PUPR
		2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah yang aman	67,47	12.050	
2	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Irigasi, Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	1	jumlah lokasi rawan banjir yang tertangani	8	2.100	
		2	Persentase saluran Irigasi yang berkondisi baik (%)	58,75	2.200	
		3	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik (%)	91,03	19.600	
3	Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan, Drainase dan Pedestrian	1	Panjang Jalan baru yang terbangun (km) sesuai rencana tata ruang (mendukung konektivitas antar wilayah)	268,336	277.658	
		2	Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (Km)	7		
		3	Panjang jalan yang mempunyai sistem utilitas terpadu (Km)	0		
		4	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	3		
		5	Jumlah simpang yang dibangun/ditingkatkan	0		
		6	Persentase drainase perkotaan berkondisi baik (%)	21,8		
		7	Panjang Pedestrian yang dibangun/ditingkatkan	0,3		
		8	Jumlah Jalur Sepeda yang dibangun/ditingkatkan (%)	0		
4	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1	Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) (%)	89	57.600	
5	Program Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	1	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	60	1800	
6	Program Perencanaan Tata Ruang	1	Persentase ketersediaan instrumen RTR sesuai NSPM	20	1.550	Dinas PUPR
		2	Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	100	150	Bappeda

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Program		Tahun 2020		Perangkat Daerah
					Target	Rp. (dlm Juta)	
7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		1	Prosentase (%) realisasi rencana struktur ruang sesuai RTRW /RDTR (%) Periode rencana Tahun 2020-2024	20	250	Dinas PUPR
			2	Prosentase (%) pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR (%) Periode Rencana Tahun 2020-2024	20		Dinas PUPR
			3	Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak	82	2100	
			4	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)	90		
8	Program Penataan dan Pengaturan Bangunan Gedung		1	Persentase Bangunan Gedung khusus/tertentu yang memiliki rekomendasi laik fungsi	75	1200	
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100		
10	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80		
11	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90		
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
12	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		1	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85		
			2	Persentase Keterbukaan Informasi publik	100		
13	Program Pengembangan Data dan Informasi		1	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55		
			2	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	55		
			3	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90		
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Program Lingkungan Sehat Perumahan		1	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Kota	289,86	12.889	Dinas Perumahan dan Permukiman
			2	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Propinsi	44,82	19.791	
			3	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Pusat	112,09		
			4	Persentase Jalan lingkungan di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	63,21		
			5	Persentase drainase di kawasan permukiman kumuh yang berkondisi baik	48,59		
			6	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni di kawasan kumuh	78,76		
			7	Persentase cakupan ketersediaan proteksi kebakaran di kawasan kumuh yang berkondisi baik	63,84		

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Program		Tahun 2020		Perangkat Daerah
					Target	Rp. (dlm Juta)	
			8	Persentase cakupan air bersih/air minum di kawasan kumuh	78,62		
			9	Persentase cakupan pelayanan air limbah di kawasan kumuh	66,05		
			10	Persentase cakupan pelayanan persampahan di kawasan kumuh	36,55		
			11	Luas pencegahan kawasan kumuh Kota Bogor	292,71		
			12	Persentase Panjang Jalan lingkungan permukiman terstruktur yang berkondisi baik	52,60	98.400	Dinas PUPR
			13	Persentase drainase lingkungan permukiman terstruktur berkondisi baik	24,75		
			14	Jumlah titik ecodrain pada jalan lingkungan perumahan	30		
			15	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	865		
			16	Persentase RTLH	25,20%	600	Dinas Perumahan dan Permukiman
			17	Persentase Rumah Layak Huni	74,80%	400	
2	Program Peningkatan Utilitas Perkotaan		1	Prosentase pemenuhan kebutuhan PJU	74,47%	3.550	
			2	Persentase PJU yang terpelihara	77,09%	48.220	
3	Program Pemulihan Pasca Bencana		1	Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana	60	2000	Dinas PUPR
			2	Persentase Pemulihan Infrastruktur Pasca bencana	2	2.175	Dinas Perumahan dan Permukiman
4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		1	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)	1,8	3.650	
			2	Luas RTH Publik yang terkelola dengan baik (Ha)	43.28	11.345	
5	Program Pengelolaan Areal Pemakaman		1	Luas TPU Hijau yang terkelola dengan baik (Ha)	46,27	4.044	
6	Program Penataan Sarana Prasarana Umum Perumahan		1	Persentase peningkatan jumlah hunian rusunawa	80%	4.300	
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	11.600	
8	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	7.265	
9	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	125	
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		1	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85	400	
			2	Persentase Keterbukaan Informasi publik	100		
				Jumlah layanan publik yang telah terintegrasi melalui sistem informasi	1		
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		1	Presentase penegakan PERDA KTR	95	75	Satuan Polisi Pamong Praja
			2	penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal	148	140	

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Program		Tahun 2020		Perangkat Daerah
					Target	Rp. (dlm Juta)	
			3	Persentase pelanggaran perda yang diterbitkan	90		
			4	Persentase Pelanggaran Bangunan Gedung dan Tata Ruang yang diberikan sanksi polisional sesuai dengan ketentuan perundangan	90	290	
			5	Jumlah Lokasi/Kawasan bebas PKL yang berhasil diterbitkan sesuai Rencana Tata Ruang	2		
2	Program	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1	Respon time penanganan kebakaran	15	400	
			2	% sarana prasarana proteksi bahaya kebakaran yang tersedia dan berkondisi baik	50	28.000	
3	Program	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	2	250	BPBD
			2	Jumlah Sekolah Aman bencana	2	200	
4	Program	Pengembangan layanan Informasi Kebencanaan	1	Persentase informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	100	100	
5	Program	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Rata-Rata Respon time penanganan bencana	< 24 Jam	800	
6	Program	Pemulihan Pasca Bencana	1	PersentaseKetersediaan data dan informasi dampak serta kebutuhan pasca bencana	100	100	
7	Program	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	Jumlah Konflik SARA	0		Badan Kesbangpol
			2	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk	12,5	2.900	
			3	Persentase Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional	100	375	Humas dan Protokol
8	Program	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1	Penurunan jumlah Pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika persatuan penduduk melalui upaya deteksi dini	0,00013	150	Badan Kesbangpol
9	Program	Pendidikan Politik Masyarakat	1	Persentase Partisipasi Pemilu	0		550
			2	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu	0		
10	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	7.200	SatpolPP
11	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	9.850	
12	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	75	
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
10	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	300	BPBD
11	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	400	
12	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	50	
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Program		Tahun 2020		Perangkat Daerah
					Target	Rp. (dlm Juta)	
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
10	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	300	Badan Kesbangpol
11	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	400	
12	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	50	
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial							
1	Program	Pembinaan Anak Terlantar	1	Persentase penurunan anak terlantar	19,48	225	Dinas Sosial
2	Program	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1	Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi	21,41	600	
			2	Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	8		
3	Program	Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	1	Persentase panti asuhan / yayasan yang dibina (%)	100	150	
			2	Persentase Panti Asuhan/Yayasan/Orsos yang terakreditasi	12,04		
4	Program	Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	1	Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	29,58	325	
			2	Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos	100		
5	Program	Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	1	Jumlah lansia yang berdaya	100	300	
			2	persentase jumlah fakir miskin	5,8	5.980	
			3	persentase jumlah PMKS yang tertangani	92%		
6	Program	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100	2.475	
			2	Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%)	27,85		
7	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	2.250	
8	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	1.250	
9	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	70	
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
10	Program	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85	150	
			2	Persentase Keterbukaan Informasi publik	100		
11	Program	Pengembangan Data dan Informasi	1	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55	500	

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		Perangkat Daerah	
				Target	Rp. (dlm Juta)		
			2	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	55		
			3	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan							
1	Program	Perluasan Kesempatan Kerja	1	Tingkat Kesempatan kerja (%)	91,53	2.806	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			2	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	2.500		
			3	Jumlah KK miskin yang dilatih dan terserap pasar kerja	25		
			4	Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	120.358	172	
			5	Penetapan besaran UMK	#####		
			6	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	100		
3	Program	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	65,78	72	
4	Program	Pembinaan dan penempatan transmigrasi	1	Jumlah transmigran yang di fasilitasi penempatan pada pemukiman transmigrasi	2	301	
4	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	2.886	
5	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	1.817	
6	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	28	
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Transmigrasi							
1	Program	Pembinaan dan penempatan transmigrasi	1	Jumlah transmigran yang di fasilitasi penempatan pada pemukiman transmigrasi	2	301	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Program	Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dan TPPO	1	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (%)	77	1.200	DPMPPA
			2	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,0133		
2	Program	Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Nindya	1.950	
3	Program	Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan	1	Persentase perempuan berpolitik (%)	17	1.550	
			2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	78		
4	Program	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan (%)	77	5.250	
			2	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,0107		
			3	Persentase Perempuan yang meningkat kualitas wawasan/pengetahuannya	1,5		
			4	Persentase Perempuan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang meningkat kualitas pengetahuan	0,9		

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Program		Tahun 2020		Perangkat Daerah
					Target	Rp. (dlm Juta)	
			5	Persentase perempuan yang Aktif dalam Organisasi di Kelurahan	0,0126		
5	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	1.100	
6	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	1.500	
7	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	70	
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
9	Program	Pengembangan Data dan Informasi	1	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55	200	
			2	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	55		
			3	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1	Program	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	1	Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif	55	700	DPMPPA
			2	Rasio Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 : 50	7.715	
2	Program	Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat	1	Persentase Pelaku Usaha yang mampu memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	13,5	400	
			2	Persentase RTS yang mempunyai usaha ekonomi	2,51	1.500	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan							
1	Program	Peningkatan Ketahanan Pangan	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,9	1.700	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			2	Konsumsi energi	1920		
			3	Konsumsi protein	53		
			4	Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi	93		
			5	Persentase Jumlah penduduk Rawan Pangan	16,6	1.600	
			6	Ketersediaan energi	2400		
			7	Ketersediaan Protein	63		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan							
1	Program	Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintah Daerah	1	Prosentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan	100	250	Bagian Administrasi Pemerintahan
			2	presentase masalah pertanahan yang termediasi	100	250	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup							
1	Program	Kemitraan Lingkungan Hidup	1	Persentase sekolah adiwiyata (%)	31	3.000	Dinas Lingkungan Hidup
			2	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan	10		
2	Program	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	76	28.734	
			2	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48,8		

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Program		Tahun 2020		Perangkat Daerah	
					Target	Rp. (dlm Juta)		
			3	Persentase peningkatan retribusi persampahan	2,1			
3	Program	Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	1	Persentase Reduksi Sampah (%)	6,4	3.200		
			2	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	4			
4	Program	Perbaikan, Optimalisasi, Operasional dan Pemeliharaan Fungsi TPA	1	Prosentase volume sampah yang diolah di TPA	98,16	54.946		
			2	Kapasitas pengolahan sampah	931			
5	Program	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar air yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	36	1.100		
			2	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran air/kerusakan sumber-sumber air yang ditindaklanjuti	100			120
			3	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	40			300
			4	Persentase pemenuhan kualitas air permukaan dalam kondisi baik dan/atau tercemar ringan	35			1.300
			5	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar udara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	50			1.300
			6	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran yang ditindaklanjuti	100			
			7	Persentase pemenuhan kualitas udara dalam kondisi baik	50			
6	Program	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1	Persentase Penurunan Emisi GRK	3,92	700		
7	Program	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1	Jumlah layanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang terintegrasi sistem informasi	1	750		
8	Program	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Perlindungan dan Konservasi Air)	1	Persentase Peningkatan debit air dari sumber mata air	10	1300	Dinas Lingkungan Hidup	
			2	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0,5	1300		
9	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	49.937		
10	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	7.934		
11	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	25		
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B			
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80			
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil								

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		Perangkat Daerah	
			Target	Rp. (dlm Juta)		
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1	Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran	95%	500	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2	Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	33%	500	
		3	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP	99,50%	500	
		4	Persentase Penduduk yang memiliki KK	100%	250	
		5	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	30%	500	
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.0	250	
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	5.500	
4	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	8.500	
5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Presentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	75	
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85	3.100	
		2	Persentase Keterbukaan Informasi publik	100		
7	Program Pengembangan Data dan Informasi	1	Presentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55	250	
		2	Presentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	55		
		3	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana						
1	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	14,41	200	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2	Persentase PIK R Aktif	42,18		
2	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	1	CPR (<i>Contraceptive Prevalence Rate</i>) Tingkat Peserta KB Aktif	77,41%	1.860	
		2	Persentase Peserta KB MKJP pada PUS	22,4		
3	Program Pembangunan Keluarga	1	Persentase Keluarga Sejahtera	93,00	713	
		2	Persentase Anggota bina keluarga balita aktif	78,74%		
		3	Persentase Anggota bina keluarga remaja aktif	74,25%		

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Program		Tahun 2020		Perangkat Daerah
					Target	Rp. (dlm Juta)	
			4	Persentase Anggota bina keluarga lansia aktif	73,80%		
			5	Jumlah Kelompok UPPKS aktif	23		
4	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	2.051	
5	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	1.175	
6	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Presentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	20	
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan							
1	Program	Pengembangan Transportasi Berkelanjutan	1	Persentase sarana prasarana penunjang Pedestrian dan Jalur Sepeda berkondisi baik (%)	100	375	Dinas Perhubungan
			2	Presentase (%) kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif	40	0	
			3	Presentase (%) kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang	88	150	
			4	Jumlah Koridor angkutan umum massal berbasis Bus yang beroperasi	2	2.557	
2	Program	Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	1	Persentase Fasilitas Lalu Lintas terpasang dalam kondisi baik	75	9.700	
3	Program	Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	Persentase cakupan wilayah pelayanan angkutan umum (%)	50	42.050	
			2	Load Factor Angkutan Umum	45	650	
4	Program	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi	1	Konektivitas transportasi multimoda	2	526.871	
5	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	15.500	
6	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	8.300	
7	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Presentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	100	
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
8	Program	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85	4.815	
			2	Persentase Keterbukaan Informasi publik	100		
9	Program	Pengembangan Data dan Informasi	1	Presentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55	200	
			2	Presentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	55		
			3	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika							
1	Program	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Hasil Penilaian SPBE	2,92	23.740	Dinas Kominfostandi

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		Perangkat Daerah	
				Target	Rp. (dlm Juta)		
			2	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	14	9.500	
			3	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85	1.560	
			4	Persentase Keterbukaan Informasi publik	100		
2	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	1.280	
3	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	1.343	
4	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Presentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	30	
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	BB		
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik							
1	Program	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	70	3.800	Dinas kominfostandi
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian							
1	program	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 1	1.900	Dinas Kominfostandi
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah							
1	Program	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1	persentase UMKM yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	10	600	Dinas Koperasi dan UMKM
		Presentase Rekomendasi Pengembangan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	2	Presentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	75	325	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kerjasama
2	Program	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1	Jumlah Kesempatan kerja baru pada UMKM	360	2.800	
			2	Jumlah UMKM (wirausaha) baru	180	6.200	
			3	Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun	68 M		
3	Program	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1	Jumlah Kesempatan kerja baru pada Koperasi	250	2.750	
			2	Jumlah Koperasi Aktif	558	9.100	
			3	Jumlah Koperasi berkualitas	64		
4	Program	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	1	Jumlah PKL yang direlokasi	500	3.295	
			2	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	150		

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		Perangkat Daerah	
			Target	Rp. (dlm Juta)		
5	Program Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif	1	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	2	300	Dinas pariwisata dan Kebudayaan
		2	jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	30	950	
		3	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	75	400	
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	5.104	Dinas Koperasi dan UMKM
7	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	875	
8	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	10	
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
3		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
9	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85	110	
		2	Persentase Keterbukaan Informasi publik	100		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal						
1	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	1	Nilai Investasi	2,50	10.150	DPMPSTP
		2	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	75		
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	2.200	
3	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	1.100	
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	50	
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.0		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga						
1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	1	Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	0,45	1.095	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		2	Rasio ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan	0.001552 : 2.08		
		3	Persentase sarana prasarana olah raga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%)	33,34	21.623	
		4	Jumlah sarana prasarana olahraga tingkat nasional/lokal yang terbangun	0		
		5	Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras	0	2.250	
		6	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	20		
		7	Predikat Kota layak pemuda (Permenpora No 11 Tahun 2017)	30 % Menuju KLP		
		8	jumlah wirausahawan muda pemula	100	150	
2	Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	1	Jumlah perolehan medali Tk. Internasional	4	3.670	

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Program		Tahun 2020		Perangkat Daerah
					Target	Rp. (dlm Juta)	
			2	Jumlah perolehan medali Tk. Nasional	66		
			3	Jumlah perolehan medali Tk. Propinsi Jabar	64		
3	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	1.920	
4	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	650	
5	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Presentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	20	
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan							
1	Program	Pengelolaan Keragaman Budaya	1	Persentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni atau budaya	10	950	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			2	jumlah keragaman jenis Event/Festival/Pasanggiri /Lomba/Sayembara Karyaseni	15	2557	
			3	Jumlah pelaku ekonomi pariwisata, badan publik, swasta, pengguna bahasa, sastra dan aksara sunda	150	400	
			4	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	2	1380	
Urusan Pilihan Bidang Pariwisata							
1	Program	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan	7.004.033	3.050	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	2.500	
3	Program	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	2.000	
4	Program	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Presentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	20	
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan							
1	Program	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/perpustakaan keliling/taman bacaan	10	65	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Program	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota	40	6.820	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan							
1	Program	Peningkatan Sadar Tertib Arsip	1	PersentasePD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib/baku (%)	17	248	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Program	Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	1	Jumlah Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan	100	75	

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		Perangkat Daerah	
			Target	Rp. (dlm Juta)		
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	1.500	
4	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	3.020	
5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	10	
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
Urusan Pilihan Bidang Pertanian						
1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Zoonosis dan Penyediaan Pangan Hewani sesuai dengan Kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal	1	Jumlahmaksimal kasus penyakit zoonosis pertahun	3	750	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2	Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar	22		
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian	1	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	4	3.948	
		2	Persentase peningkatan produksi peternakan	2		
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	2.500	
4	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	3.000	
5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	20	
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
Urusan Pilihan Bidang Perikanan dan Kelautan						
1	Program Peningkatan Produksi Perikanan	1	Persentase peningkatan produksi perikanan	3	750	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		Perangkat Daerah	
			Target	Rp. (dlm Juta)		
2	Program Peningkatan Konsumsi Produk Perikanan	1 Tingkat konsumsi ikan	29,37	300		
Urusan Pilihan Bidang Perdagangan						
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1	Prosentase pemanfaatan E Commerce oleh IKM	5,4	695	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	5,59	5.903	
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor	1,1	1650	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kerjasama
3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1	Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran	95	2885	
		2	Laju Inflasi Tahunan (Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n)	2-4 %	360	
Urusan Pilihan Bidang Perindustrian						
1	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri untuk pengembangan usaha ekonominya	2,5	900	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1	Jumlah kesempatan kerja baru pada IKM	600	200	
		2	Persentase peningkatan IKM yang produktif	2	2970	
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	2.500	45
4	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	1.500	
5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90		
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
Urusan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan						
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	20 : 100	750	Bappeda
		2	Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang	1 : 100		
		3	Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	6		
		4	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10		
		5	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22	300	
2	Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya	1	Persentase keselarasan rencana pembangunan	73	1267	
3	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	1	Persentase Keselarasan Rencana Program	73	587	

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		Perangkat Daerah	
			Target	Rp. (dlm Juta)		
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor	73	175	
5	Program Kerjasama Pembangunan	1	Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	10	110	
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	3.110	
7	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	2.000	
8	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Persentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	75	
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
9	Program Pengembangan Data dan Informasi	1	Persentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55	100	
		2	Persentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	55		
		3	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90		
Urusan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan						
1	Program Penelitian dan Pengembangan	1	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	2	1700	Bappeda
		2	Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	5,2		
			Jumlah Hasil Kelitbangan	10		
		3	Jumlah Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat.	7		
Urusan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan						
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	100	3700	BPKAD
2	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	1	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	81	17000	
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	1	Nilai Pajak Daerah	733.072	11.850	Bapenda



No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		Perangkat Daerah	
			Target	Rp. (dlm Juta)		
		2	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	18,06		
		3	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	#####		
		4	Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah	15,49		
4	Program Peningkatan kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,32		
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	4.000	BPKAD
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	1.500	
7	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	50	
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	5.000	Bapenda
6	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	2.000	
7	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	400	
		2	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85	1.800	
		2	Persentase Keterbukaan Informasi publik	100		
		3	Jumlah layanan publik yang telah terintegrasi melalui sistem informasi	1		
Urusan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan						
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Persentase ketaatan pejabat yang wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu (%)	100	11,35	BKPSDA
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Persentase Pemenuhan Formasi ASN	60	2.740	
		2	Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan	80		

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Program		Tahun 2020		Perangkat Daerah
					Target	Rp. (dlm Juta)	
			3	Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat	90		
			4	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu	100		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1	Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	35	5.761	
			2	Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	75		
			3	Persentase aparatur jabatan fungsional yang mengikuti diklat fungsional	77		
			4	Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	87		
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	8.585	
5	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	1.241	
6	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	143	BKPSDA
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
7	Program Pengembangan Data dan Informasi		1	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55	200	
			2	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	55		
			3	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90	87	

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		Perangkat Daerah	
			Target	Rp. (d/m Juta)		
8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85	132	
		2	Persentase Keterbukaan Informasi publik	100		
Urusan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan						
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	Opini BPK	WTP	125	Inspektorat
		2	Persentase Perangkat daerah Yang dilakukan Pengawasan	100	220	
		3	Persentase Penangan Pengaduan Masyarakat	100		
		4	Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	100		
		5	Level Maturitas SPIP	2	200	
		6	Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah	45,95		
		7	Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun/diupdate	3	350	
		8	Jumlah diklat, bimtek, sosialisasi. PPSDAM	8		
		9	Jumlah PD berpredikat WBK	1	84	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	1.750	
3	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	12.400	
4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	53	
		2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
5	Program Pengembangan Data dan Informasi	1	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55	125	
		2	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	55		
		3	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90		
Urusan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan						
1	Program Pemberdayaan lembaga Sosial	1	Persentase Lembaga Sosial yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	50	6.898	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
2	Program Penerapan Reformasi Birokrasi	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,32	1.150	Bagian Organisasi
		2	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota	BB		
		3	Nilai IRB Aspek Area Perubahan Penguatan Organisasi	4		
		4	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil evaluasi SAKIP minimal "BB"	67,56	53	Inspektorat
3	Program Pengendalian pembangunan	1	Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana	80	688	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Indikator Kinerja Program		Tahun 2020		Perangkat Daerah
					Target	Rp. (dlm Juta)	
			2	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah	80	450	Bappeda
4	Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1	Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	3,12	165	Bagian Administrasi Pemerintahan
			2	Presentase BUMD yang Sehat	50	475	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
5	Program Kerjasama Pembangunan		1	Presentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan	70	615	Bagian Perekonomian dan Kerjasama
6	Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan		1	Presentase kecamatan dan kelurahan berkinerja baik (%)	70	400	Bagian Administrasi Pemerintahan
7	Program Penataan Perundang-undangan		1	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	95	809	Bagian Hukum dan HAM
8	Program Penegakkan Hukum dan Penerapan HAM		1	Presentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	100	515	
9	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat daerah		1	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu Sesuai Prolegda	80	10.297	Setwan
			2	Persentase Perda yang Disosialisasikan	100		
			3	Persentase Rapat dan Risalah Rapat yang Berkualitas	80		
10	Program Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa		1	Persentase Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan jasa	10	1.250	Bagian Pengadaan Barang/jasa
11	Program Kerjasama Informasi dengan Media massa		1	Persentase Keterbukaan Informasi publik	100	3.881	Bagian Humas dan Protokol
12	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah		1	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100	4.845	Bagian Humas dan Protokol : dan Bagian Umum
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	17.451	Sekretariat Daerah
14	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	16.651	
15	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1	Presentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	61.441	
			2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
			3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100	1.600	

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		Perangkat Daerah	
			Target	Rp. (dlm Juta)		
17	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	1.400	Kecamatan Tanah Sareal
18	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	60	
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
19	Program Peningkatan Pelayanan PATEN	1	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	82	14.032	
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	3,1		
20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	1.968	Kecamatan Bogor Utara
21	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	1.432	
22	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	46	
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
23	Program Peningkatan Pelayanan PATEN	1	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	82	11.138	
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	3,1		
24	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	1.869	Kecamatan Bogor Selatan
25	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	12.107	
26	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	70	
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
27	Program Peningkatan Pelayanan PATEN	1	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	82	17.815	
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	3,1		
28	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100		Kecamatan Bogor Barat
29	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	236	

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		Perangkat Daerah	
			Target	Rp. (dlm Juta)		
30	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Presentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	20	Kecamatan Bogor Barat
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
31	Program Pengembangan Data dan Informasi	1	Presentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55		
32	Program Peningkatan Pelayanan PATEN	1	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	82	14.032	
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	3,1		
33	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	2.000	Kecamatan Bogor Timur
34	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	2.200	
35	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Presentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90		
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		
36	Program Peningkatan Pelayanan PATEN	1	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	82	9.116	
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	3,1		
37	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	1.450	Kecamatan Bogor Tengah
38	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	950	
39	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Presentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	25	
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B		
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80		Kecamatan Bogor Tengah
40	Program Peningkatan Pelayanan PATEN	1	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	82	21.867	
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	3,1		
41	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	70.000	Sekretariat DPRD
42	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	10.500	

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	Indikator Kinerja Program	Tahun 2020		Perangkat Daerah
			Target	Rp. (dlm Juta)	
43	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	90	100
		2	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B	
		3	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan	80	
44	Program Pengembangan Data dan Informasi	1	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55	
		2	Prosentase data dan informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	55	
		3	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90	
45	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	85	2.000
		2	Persentase Keterbukaan Informasi publik	100	

Tabel 7.4. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bogor Tahun 2021

No	Urusan	Program	Indikator Program	Tahun 2021		Perangkat Daerah			
				Target	Pagu				
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	APK PAUD	50,55	1.180,00	Dinas Pendidikan		
			2	APK SD	113,05	16.000,00	Dinas Pendidikan		
			3	APK SMP	104,8		Dinas Pendidikan		
			4	Cakupan Layanan Dasar pada Kesetaraan	100		Dinas Pendidikan		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1	Persentase Kesiapan penyelenggaraan kurikulum sesuai dengan kebijakan nasional dan muatan lokal daerah	100		Dinas Pendidikan
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1	Persentase Pendidik PAUD dengan Kualifikasi minimal S1 (%)	68,9	7.130,00	Dinas Pendidikan
					2	Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	21	530,00	Dinas Pendidikan
					3	Persentase Tenaga Pendidik SD yang memiliki kompetensi (%)	55	9.150,00	Dinas Pendidikan
					4	Persentase Tenaga Pendidik SMP yang memiliki kompetensi (%)	55	3.250,00	Dinas Pendidikan
					5	Jumlah PTK Berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	2	440,00	Dinas Pendidikan
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar oleh Masyarakat yang sesuai dengan Izin pendidikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100		Dinas Pendidikan
					2	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan PAUD dan Non Formal oleh Masyarakat yang sesuai dengan Izin pendidikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100		Dinas Pendidikan
				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1	Persentase Sekolah yang mengembangkan muatan lokal bahasa sunda dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler	100		Dinas Pendidikan
		2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Indeks Keluarga Sehat	0,57	85.407,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1			Persentase ketersediaan SDM Kesehatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan				Dinas Kesehatan	
	2			Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	0,9			Dinas Kesehatan	
	3			Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	0,84	74.409,00		Dinas Kesehatan	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1			Persentase Produsen Farmasi yang memenuhi standar kesehatan				Dinas Kesehatan	
	2			Persentase Produsen Alat Kesehatan yang memenuhi standar kesehatan				Dinas Kesehatan	
	3			Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan				Dinas Kesehatan	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1	Predikat Kota Sehat	swastisaba		Dinas Kesehatan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang layak	94,86		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Persentase Rumah Tangga Yang dilayani air minum yang aman		94,86		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak	70,42		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			2	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	70,42		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1	Rata-Rata Lama Genangan di titik titik rawan banjir	10		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			2	Rata-Rata tinggi genangan di titik titik rawan banjir	10		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1	Persentase Panjang Jalan lingkungan permukiman terstruktur yang berkondisi baik	60,6	98.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			2	Persentase drainase lingkungan permukiman terstruktur berkondisi baik	29,18			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan	Program	Indikator Program	Tahun 2021		Perangkat Daerah			
				Target	Pagu				
			3	Jumlah titik ecodrain pada jalan lingkungan perumahan	60		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			4	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya (lokasi)	985		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik (%)	92,06356589	21.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			2	Persentase saluran Irigasi yang berkondisi baik (%)	60	2.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1	Persentase Bangunan Gedung khusus/tertentu yang memiliki rekomendasi laik fungsi	78	1.300,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			2	Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%)	84	700,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			3	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)	92		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1	Persentase Bangunan Gedung khusus/tertentu yang memiliki rekomendasi laik fungsi	78	1.300,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1	Persentase ketersediaan instrumen RTR sesuai NSPM	40	4.100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			2	Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	100	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			3	Prosentase (%) realisasi rencana struktur ruang sesuai RTRW /RDTR (%) Periode Tahun 2020-2024	40	300,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			4	Prosentase (%) pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang sesuai RTRW/RDTR (%) Periode Rencana 2020-2024	40		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	1	Luas Ijin Lokasi Yang diberikan dalam 1 (satu) tahun			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1	Panjang Jalan baru yang terbangun (km) sesuai rencana tata ruang (mendukung konektivitas antar wilayah)	270,336	273.850,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			2	Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (Km)	7		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			3	Panjang jalan yang mempunyai sistem utilitas terpadu (Km)	2		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			4	Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	3		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			5	Jumlah simpang yang dibangun/ditingkatkan	1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			6	Persentase drainase perkotaan berkondisi baik (%)	32,6		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			7	Panjang Pedestrian yang dibangun/ditingkatkan	3		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			8	Jumlah Jalur Sepeda yang dibangun/ditingkatkan (%)	1		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			9	Persentase panjang jalan berkondisi mantap (baik & sedang) (%)	89,25	63.160,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	70	1.700,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	Persentase penyediaan Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota	80		Dinas Perumahan dan Permukiman
					2	Persentase peningkatan jumlah hunian rusunawa	0,85	4.730,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1	Luas Kawasan Kumuh Yang menjadi Kewenangan Kota	269,51	9.450,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
					2	Luas pencegahan kawasan kumuh Kota Bogor	221,55		Dinas Perumahan dan Permukiman
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	Persentase PSU Kawasan Perumahan Perumahan yang berkondisi baik			Dinas Perumahan dan Permukiman
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)	1,1	6.550,00	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Urusan	Program	Indikator Program		Tahun 2021		Perangkat Daerah
					Target	Pagu	
			2	Luas RTH Publik yang dikelola dengan baik (Ha)	45,08	13.046,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
			3	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0,5	900,00	Dinas Lingkungan Hidup
			1	Persentase Rumah Layak Huni	0,767875216	440,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	29,41176471	275,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2	Persentase informasi kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	100	150,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1	Persentase Kelurahan Tangguh Kebakaran	4,41		Satuan Polisi Pamong Praja
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal	118	145,00
		2		Persentase pelanggar perda yang ditertibkan	90		Satuan Polisi Pamong Praja
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1	Jumlah Kelurahan tangguh bencana	2	275,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2	Jumlah sekolah aman bencana	2	250,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			3	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	1		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Persentase pelanggar perda yang ditertibkan	90		Satuan Polisi Pamong Praja
			2	penurunan jumlah tempat usaha yang menjual minuman keras ilegal	118	145,00	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1	Rata-Rata Respon time penanganan bencana	< 24 Jam	825,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	Jumlah lokasi Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	100	2.318,00	Dinas Sosial
			2	Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%)	32,22416813		Dinas Sosial
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1	Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi	23,92	675,00	Dinas Sosial
			2	Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	8		Dinas Sosial
			3	Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	37,32	420,00	Dinas Sosial
			4	Persentase Kasus Kekerasan dan traficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos	100		Dinas Sosial
			5	Jumlah lansia yang berdaya	100	100,00	Dinas Sosial
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	persentase jumlah PMKS yang tertangani	0,93		Dinas Sosial
			2	persentase KK miskin	5,78	5.180,00	Dinas Sosial
			3	Persentase penurunan anak terlantar	38,96	225,00	Dinas Sosial
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1	Persentase Perencanaan Program Bidang Tenaga Kerja yang mencapai target			Dinas Tenaga Kerja
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1	produktivitas tenaga kerja	68,58611005	76,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		1	Tingkat Kesempatan kerja (%)	91,87175342	3.546,00
			2	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	2500		Dinas Tenaga Kerja
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1	Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	132393	737,00	Dinas Tenaga Kerja
			2	Penetapan besaran UMK	4481780		Dinas Tenaga Kerja
3	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	100		Dinas Tenaga Kerja			
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Nindya	2.100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Urusan	Program	Indikator Program		Tahun 2021		Perangkat Daerah		
					Target	Pagu			
	PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (%)	78	1.300,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			2	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,0128		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1	Persentase perempuan berpolitik (%)	18	1.650,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	80		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DN ANAK	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak	80		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			2	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan (%)	75		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1	Indeks Ketahanan Keluarga	74-75		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
		10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87,9	1.905,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					2	Ketersediaan energi	2400		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Ketersediaan Protein				63		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1			Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi	93,5		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1			Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Daerah			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1			Persentase Jumlah penduduk Rawan Pangan	15,7	1.625,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1	Persentase peningkatan produksi perikanan	4,5	755,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1	Tingkat konsumsi ikan	29,76	350,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
			2	Persentase Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan skala mikro dan kecil yang memiliki mutu dan keamanan produk yang terjamin dan terawasi			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1	Jumlahmaksimal kasus penyakit zoonosis pertahun	3	820,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
			2	Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar	21		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	4.415,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
			2	Persentase peningkatan produksi peternakan	4		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	4.415,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
			2	Persentase peningkatan produksi peternakan	4		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		

No	Urusan	Program	Indikator Program		Tahun 2021		Perangkat Daerah
					Target	Pagu	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	4.415,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			2	Persentase peningkatan produksi peternakan	4		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1	Prosentase volume sampah Kota Bogor yang diolah di TPA	98,16	83.324,00	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1	Persentase Reduksi Sampah (%)	6,6	3.780,00	Dinas Lingkungan Hidup
			2	Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	76,5	38.506,00	Dinas Lingkungan Hidup
			3	Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48,8		Dinas Lingkungan Hidup
			4	Persentase peningkatan retribusi persampahan	2,1		Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Indeks Kualitas Air	49,7		Dinas Lingkungan Hidup
			2	Indeks Kualitas Udara	86		Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	45	425,00	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1	Persentase kegiatan/usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungannya	37	650,00	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	Jumlah pokmas peduli lingkungan yang aktif	12		Dinas Lingkungan Hidup
			2	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan	20		Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1	Persentase Kelurahan Peduli Lingkungan Hidup			Dinas Lingkungan Hidup
			2	Persentase sekolah adiwiyata (%)	33	3.020,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	100	150,00	Dinas Lingkungan Hidup		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	1		Dinas Lingkungan Hidup		
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1	Jumlah Data kependudukan yang dikelola dan terintegrasi dalam sistem informasi			Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
			2	Jumlah Data Kependudukan yang terintegrasi dalam satu data pembangunan daerah			Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP	0,998	500,00	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
			2	Persentase Penduduk yang memiliki KK	1	300,00	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1	Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran	0,96	500,00	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
			2	Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	0,34	400,00	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
			3	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	0,4	500,00	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	1	Ketersediaan Profil Kependudukan sesuai dengan Kebutuhan data dan Informasi Kependudukan daerah			Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan

No	Urusan	Program	Indikator Program	Tahun 2021		Perangkat Daerah			
				Target	Pagu				
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1	CPR (Contraceptive Prevalence Rate) Tingkat Peserta KB Aktif	0,7742	2.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
			2	Persentase Peserta KB MKJP pada PUS	22,44		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1	Persentase Kebijakan dan Program kerja daerah untuk pengendalian jumlah penduduk yang terimplementasi sesuai dengan rencana			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1	Persentase Keluarga Sejahtera	93,5	1.350,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
			2	Jumlah Kelompok UPPKS aktif	24		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
			3	Persentase Anggota bina keluarga balita aktif	0,7894		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
			4	Persentase Anggota bina keluarga remaja aktif	0,7445		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
			5	Persentase Anggota bina keluarga lansia aktif	0,74		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	70	1.700,00	Dinas Perhubungan
					2	Persentase Fasilitas Lalu Lintas terpasang dalam kondisi baik	80	7.900,00	Dinas Perhubungan
3	Persentase cakupan wilayah pelayanan angkutan umum (%)				60	55.350,00	Dinas Perhubungan		
4	Load Factor Angkutan Umum				50	500,00	Dinas Perhubungan		
5	Konektivitas transportasi multimoda				3	384.948,00	Dinas Perhubungan		
6	Persentase sarana prasarana penunjang Pedestrian dan Jalur Sepeda berkondisi baik (%)				100	375,00	Dinas Perhubungan		
7	Prosentase (%) kendaraan angkutan umum berbahan bakar alternatif				40	50,00	Dinas Perhubungan		
8	Prosentase (%) kendaraan bermotor yang lulus uji emisi gas buang				89	150,00	Dinas Perhubungan		
9	Jumlah Koridor angkutan umum massal berbasis Bus yang beroperasi				3	1.500,00	Dinas Perhubungan		
PROGRAM PENGELOLAAN PERKOTAAN	1			Konektivitas transportasi multimoda	3	384.948,00	Dinas Perhubungan		
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		1	Hasil Penilaian SPBE	2,92	14.240,00	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian		
			2	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD sesuai SOP	90	12.365,00	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian		
			3	Persentase Keterbukaan Informasi publik	100		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian		
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	21	4.030,00	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian		

No	Urusan	Program	Indikator Program	Tahun 2021		Perangkat Daerah	
				Target	Pagu		
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	73	4.200,00	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level 1	1.100,00	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1	Jumlah Koperasi berkualitas	84		Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1	Jumlah Koperasi Sehat			Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1	Persentase Koperasi yang telah mendapatkan program pendidikan dan pelatihan perkoperasian			Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1	Jumlah Koperasi Aktif	588	8.850,00	Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1	Jumlah UMKM yang melakukan kemitraan dalam pengembangan usahanya			Dinas Koperasi dan UMKM
			2	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi perijinan dan kemitraan			Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1	Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun	81 M		Dinas Koperasi dan UMKM
			2	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	150		Dinas Koperasi dan UMKM
3	persentase UMKM yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya		10	100,00	Dinas Koperasi dan UMKM		
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1	Persentase Jumlah Kebijakan dan program kerja pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasi			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1	Nilai Investasi	2,525	11.560,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1	Persentase Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	85		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1	Persentase laporan pengendalian penanaman modal yang tersedia tepat waktu			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1	Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga	0,47	1.515,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
			2	Rasio ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan	0.001661 : 2.08		Dinas Pemuda dan Olahraga
			3	Persentase sarana prasarana olah raga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%)	50,01	167.598,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
			4	Jumlah sarana prasarana olahraga tingkat nasional/lokal yang terbangun	1		Dinas Pemuda dan Olahraga
			5	Jumlah perolehan medali Tk. Internasional	3	3.195,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
			6	Jumlah perolehan medali Tk. Nasional	16		Dinas Pemuda dan Olahraga
			7	Jumlah perolehan medali Tk. Propinsi Jabar	32		Dinas Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	40		Dinas Pemuda dan Olahraga
			2	Predikat Kota layak pemuda (Permenpora No 11 Tahun 2017)	40 % Menuju KLP		Dinas Pemuda dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	100		Dinas Pemuda dan Olahraga



No	Urusan	Program	Indikator Program		Tahun 2021		Perangkat Daerah
					Target	Pagu	
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota	100	9.180,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
			2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/perpustakaan keliling/taman bacaan	35	70,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1	Persentase PD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib/baku (%)	38	250,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1	Jumlah Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan	100	100,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	1	Persentase Perizinan penggunaan arsip yang dilaksanakan sesuai SOP	85		Dinas Arsip dan Perpustakaan
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1	Jumlah pelaku ekonomi pariwisata, badan publik, swasta, pengguna bahasa, sastra dan aksara sunda	150	500,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			2	jumlah keragaman jenis Event/Festival/Pasangiri /Lomba/Sayembara Karyaseni	17	2.729,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	10	1.065,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	1	Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			2	Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1	Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1	Jumlah Museum yang dikelola dengan baik			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	1	Jumlah Koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1	jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	40	950,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1	Jumlah kunjungan wisatawan	7.704.436	3.650,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1	Jumlah kunjungan wisatawan	7.704.436	3.650,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	80	450,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	5,6	15.495,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1	Laju Inflasi Tahunan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n)	2-4 %	600,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Ekspor	1,35	1.900,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1	Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran	95,01	755,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	5,6	15.495,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1	Prosentase pemanfaatan E Commerce oleh IKM	5,94
2	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri untuk pengembangan usaha ekonominya				3	900,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1			Persentase Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	85		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1			Persentase peningkatan IKM yang produktif	2,1	2.970,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	1			Persentase Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	85		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
29	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	Prosentase rekomendasi kebijakan kesejahteraan yang ditindaklanjuti	80	325,00	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
			2	Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai kesepakatan	75	1.035,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan

No	Urusan	Program	Indikator Program	Tahun 2021		Perangkat Daerah			
				Target	Pagu				
			3	Prosentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan	100	1.600,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan		
			4	Nilai Hasil Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	3,15	175,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1	Persentase Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan jasa	10	2.550,00	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
			2	Persentase kegiatan PD yang terealisasi sesuai rencana	83	750,00	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan		
			2	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota	BB		Sekretariat Daerah Bagian Organisasi		
			3	Nilai IRB Aspek Area Perubahan Penguatan Organisasi	4,25		Sekretariat Daerah Bagian Organisasi		
			4	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil evaluasi SAKIP minimal "BB"	70,27	18,00	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi		
			5	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100	4.100,00	Sekretariat Daerah Bagian Umum		
			6	Laju Inflasi Tahunan (Kesesuaian antara kondisi riil inflasi daerah terhadap proyeksi inflasi tahun ke-n)	2-4 %	600,00	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian		
			7	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	80	325,00	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian		
		8	Presentase BUMD yang Sehat	50	600,00	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian			
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1				Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan		
		30	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah	85	300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					2	Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	23	800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1			Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan manusia dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPDP	78	590,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	2			Persentase Keselarasan Rencana Program pemerintahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPDP	78	590,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	3			Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor perekonomian dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPDP	79	195,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	4			Persentase keselarasan rencana pembangunan infrastruktur dan kewilayahan dengan RPJPD, RPJMD dan RKPDP	77	1.350,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5			Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah sektor pembangunan manusia	85	300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	6			Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah sektor pemerintahan	85	300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	7			Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah sektor perekonomian	85	300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	8			Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah sektor iperekonomian dan SDA	85	300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	9			Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah sektor infrastruktur dan kewilayahan	85	300,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
31	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	Jumlah inovasi Hasil Kelitbangan	10		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					2	Jumlah inovasi kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat.	7		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Urusan	Program	Indikator Program		Tahun 2021		Perangkat Daerah			
					Target	Pagu				
			3	Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	10,5		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			4	Jumlah kampung tematik/kampung wisata	2	1.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
32	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	100	3.700,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah			
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	82	5.475,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1	Nilai pajak daerah	791000	11.983,00	Badan Pendapatan Daerah			
			2	Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	7,9		Badan Pendapatan Daerah			
			3	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1127767,17		Badan Pendapatan Daerah			
			4	Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah	3,4		Badan Pendapatan Daerah			
		33	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1	Persentase Pemenuhan Formasi ASN	63	3.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2	Persentase Penempatan Aparatur yang sesuai dengan syarat jabatan				83		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
3	Persentase Penyelesaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat				91		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
4	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu				100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1			Persentase proyek perubahan yang diimplementasikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja (%)	40	5.761,53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	2			Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	77,5		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	3			Persentase aparatur jabatan fungsional yang mengikuti diklat fungsional	79		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	4			Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi	89		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	34			INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1	Opini BPK	WTP	150,00	Inspektorat
						2	Persentase Perangkat daerah Yang dilakukan Pengawasan	100	225,00	Inspektorat
3		Persentase Penangan Pengaduan Masyarakat	100				Inspektorat			
4		Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	100				Inspektorat			
5		Level Maturitas SPIP	3			250,00	Inspektorat			
6		Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah	48,65				Inspektorat			
7		Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun/diupdate	3			350,00	Inspektorat			

No	Urusan	Program	Indikator Program	Tahun 2021		Perangkat Daerah	
				Target	Pagu		
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	8	Jumlah diklat, bimtek, sosialisasi. PPSDAM	8		Inspektorat
			9	Jumlah PD berpredikat WBK	1	120,00	Inspektorat
			1	Jumlah Kebijakan Teknis yang ditetapkan di bidang pengawasan dan Fasilitasi pengawasan			Inspektorat
			2	Persentase program kerja pembangunan daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi			Inspektorat
35	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk	12,75		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1	Persentase Partisipasi Pemilu	0	650,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1	Penurunan jumlah Pengguna Narkotika dan Prekursor Narkotika persatuan penduduk melalui upaya deteksi dini	0,00011	200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1	Persentase potensi Konflik Sara yang tertangani	100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
36	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Persentase pelayanan PATEN di Kecamatan yang terimplementasi sesuai ketentuan	85	75.085,00	Kecamatan
			2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Paten di kecamatan	3,2		Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif	60	725,00	Kecamatan
			2	Rasio Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	1 : 45	10.123,00	Kecamatan

**Tabel 7.5. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pendidikan**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)			
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)					
1.01.02	Program 2.1.1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD/ RA	angka	49,04	58,98	44,80	50,55	1.180,00	51,00	1.823,00	51,50	1.850,00	52,00	1.875,00	52,00	7.901,00	Dinas Pendidikan	
			APK SD / MI/ Paket A	angka	112,40	108,63	107,27	113,05	16.000,00	113,08	48.000,00	114,00	50.000,00	114,30	52.000,00	114,30	210.829,00	Dinas Pendidikan	
			APK SMP/ MTs/ Paket B	angka	104,10	105,80	107,80	104,80	20.765,00	105,00	20.876,00	105,50	21.132,00	106,00	21.445,00	106,00	104.281,00	Dinas Pendidikan	
1.01.03	Program 2.1.1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kesiapan penyelenggaraan kurikulum sesuai dengan kebijakan nasional dan muatan lokal daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	Dinas Pendidikan
			Persentase Kesiapan penyelenggaraan kurikulum Pendidikan Dasar sesuai dengan kebijakan nasional dan muatan lokal daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	Dinas Pendidikan
			Persentase Kesiapan penyelenggaraan kurikulum PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan kebijakan nasional dan muatan lokal daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	Dinas Pendidikan
1.01.04	Program 2.1.1.3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik PAUD dengan Kualifikasi minimal S1 (%)	%	67,00	42,82	69,90	68,90	7.130,00	69,00	7.150,00	69,30	7.200,00	69,80	7.250,00	69,80	35.850,00	Dinas Pendidikan	
			Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikasi kompetensi (%)	%	19,00	27,00	30,00	21,00	530,00	23,00	545,00	25,00	570,00	26,00	580,00	26,00	2.735,00	Dinas Pendidikan	
			Persentase Tenaga Pendidik SD yang memiliki kompetensi (%)	%	53,00	49,97	54,30	55,00	9.150,00	56,00	9.200,00	57,00	9.250,00	58,00	9.270,00	58,00	45.970,00	Dinas Pendidikan	
			Persentase Tenaga Pendidik SMP yang memiliki kompetensi (%)	%	53,00	46,50	57,06	55,00	3.250,00	56,00	3.300,00	57,00	3.350,00	58,00	3.400,00	58,00	16.500,00	Dinas Pendidikan	
			Jumlah PTK Berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	orang	1,00	1,00	1,00	2,00	440,00	2,00	445,00	2,00	450,00	2,00	455,00	2,00	2.220,00	Dinas Pendidikan	

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar oleh Masyarakat yang sesuai dengan Izin pendidikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	Dinas Pendidikan	
		Persentase Penyelenggaraan Pendidikan PAUD dan Non Formal oleh Masyarakat yang sesuai dengan Izin pendidikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	Dinas Pendidikan	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASRA	Persentase Sekolah yang mengembangkan muatan lokal bahasa sunda dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikulernya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	Dinas Pendidikan	

Tabel 7.6. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Kesehatan

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
1.02.02	Program 1.1.1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	61,00	69,00	74,50	70,00	145.340,00	65,00	70.142,00	60,00	92.489,00	55,00	103.598,15	55,00	411.569,15	Dinas Kesehatan
			Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	2,99	2,67	3,15	3,10		3,00		2,90		2,80	2,80	Dinas Kesehatan		
			Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	3,35	2,50	3,36	3,30		3,20		3,10		3,00	3,00	Dinas Kesehatan		
			Persentase Balita berstatus gizi normal	%	96,42	93,80	85,10	86,00		86,30		86,60		87,00	87,00	Dinas Kesehatan		
			Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus	%	81,22	83,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00	90,00	Dinas Kesehatan		
			Prevalensi Hipertensi	%	4,40	4,55	6,40	6,50		7,20		7,90		8,40	8,40	Dinas Kesehatan		
			Case Fatality Rate Covid-19	%	N/A	N/A	2,40	1,30		1,20		1,10		1,00	1,00	Dinas Kesehatan		
			Prevalensi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	%	N/A	0,14	0,11	0,12		0,12		0,13		0,14	0,14	Dinas Kesehatan		
			Akses sanitasi terhadap air bersih	%	N/A	N/A	99,00	99,20		99,40		99,60		100,00	100,00	Dinas Kesehatan		
			Akses jamban sehat	%	72,70	74,21	79,00	80,00		82,00		84,00		86,00	86,00	Dinas Kesehatan		
			Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	%	95,85	94,02	91,1	92,00		93,00		94,00		95,00	95,00	Dinas Kesehatan		
			Persentase pasien yang dilayani	%	100,00 (245.526 pasien)	100,00 (222.481 pasien)	100,00 (156.072 pasien)	100,00	259.280,00	100,00	200.259,00	100,00	241.216,00	100,00	270.510,00	100,00	1.236.781,00	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.03	Program 1.1.1.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	%	N/A	N/A	87,00	86,00	39.808,19	90,00	6.797,00	95,00	6.804,00	100,00	6.818,00	100,00	60.227,19	Dinas Kesehatan
			Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi	%	N/A	N/A	90,00	84,00		88,00		92,00		96,00	96,00	Dinas Kesehatan		

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)						
		Persentase Ketersediaan SDM Kesehatan yang Sesuai dengan Kualifikasi dan Kompetensi yang Dibutuhkan	%	N/A	N/A	N/A	73,00		81,00		90,00		95,00		95,00		Dinas Kesehatan			
		Persentase Kepuasan Karyawan	%	72,50	68,25	78,15	≥ 80	21.120,00	≥ 80	6.000,00	≥ 80	-	≥ 80	-	≥ 80	46.320,00	Rumah Sakit Umum Daerah			
1	02	04	Program 1.1.1.3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produsen Perbekalan kesehatan Rumah tangga (PKRT) dan alat kesehatan kls 1 tertentu yg memenuhi standar kesehatan	%	N/A	N/A	N/A	82,00	643,00	85,00	90,00	86,00	134,00	90,00	242,00	90,00	1.109,00	Dinas Kesehatan
					Persentase Penggunaan Obat Rasional	%	N/A	72	75	77,00		79,00		82,00		83,00		83,00		Dinas Kesehatan
					Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	%	N/A	N/A	N/A	90,00		92,00		94,00		96,00		96,00		Dinas Kesehatan
1	02	05	Program 1.1.2.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	4	4	4	7	14.985,79	8,00	15.051,00	9,00	8.600,00	11,00	9.700,00	11,00	48.336,79	Dinas Kesehatan
					Predikat Kota Sehat	Predikat	Swastisaba Wiberda	Swastisaba Wistara	Tahun 2020 tidak ada penilaian	Swastisaba Wiberda		Swastisaba Wiberda		Swastisaba Wiberda		Swastisaba Wiberda		Swastisaba Wiberda		Dinas Kesehatan

Tabel 7.7. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
 Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)			
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)					
1 03 03	Program 1.1.3.1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap ari minum melalui SPAM Jaringan perpipaan	%	91,44	92,58	70,90	68,49	3000,00	64,28	3300,00	67,38	3600,00	70,42	4000,00	70,42	15900,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses terhadap ari minum melalui SPAM Bukan Jaringan perpipaan	%	0,54	0,25	0,71	56,60	59,30	62,00	67,40	67,40	67,40	67,40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1 03 05	Program 1.1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang layak (%)	%	67,21	64,14	67,47	69,91	9.500,00	70,93	227.000,00	72,01	260.000,00	73,10	237.600,00	73,10	746.150,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman (%)	%	3,80	3,82	4,03	5,20	7,20	7,88	8,55	8,55	8,55	8,55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1 03 07	Program 1.1.3.4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Panjang Jalan lingkungan permukiman terstruktur yang berkondisi baik	%	44,64	48,72	52,92	60,6	98.400,00									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase drainase lingkungan permukiman terstruktur berkondisi baik	%	20,31	21,21	23,53	29,18										Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Jumlah titik ecodrain pada jalan lingkungan perumahan	titik	NA	NA	0,00	60,00											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	Lokasi	745,00	844,00	863,00	985,00											Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
1 03 02	Program 1.1.4.1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sungai yang ber kondisi baik (%)	%	90,00	91,01	91,04	91,69	21.700,00	92,54	23.870,00	93,38	26.257,00	94,23	26.257,00	95,16	117.684,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Irigasi yang ber kondisi baik (%)	%	45,83	51,12	57,5	51,45	2.000,00	52,23	2.200,00	53,01	2.420,00	53,79	2.420,00	63,54	11.240,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	Lokasi	6,00	6,00	6 LOKASI	1 LOKASI (TAMAN PERSADA)	1.600,00	1 LOKASI SITU ANGGALENA	3.000,00	1 LOKASI SITU PANJANG	3.000,00	1 LOKASI Kolam retensi	15.000,00	12 lokasi	24.700,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 8	Program 3.2.2.1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan	%	80,00	93,70	88,00	84,00	299,00	86,00	250,00	88,00	300,00	90,00	350,00	90,00	1.399,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%) terhadap IMB yang dikeluarkan	%	90,00	99,65	99,15	92,00	35.360,00	94,00	3.000,00	96,00	2.500,00	98,00	1.000,00	98,00	1.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF	%							10,00	200,00	11,00	250,00	12,00	300,00	33,00	750,00
1 3 9	Program 3.2.2.2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RDTRK	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20,00	700,00	40,00	700,00	40,00	1.400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 3 11	Program 3.2.2.3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang ber kondite baik	%	50,00	50,00	50,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	825,00	100,00	825,00	100,00	2.330,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
1 03 12	Program 3.2.2.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	%	N/A	N/A	N/A	40,00	3.050,00	60,00	5.600,00	80,00	5.900,00	100,00	4.700,00	100,00	21.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 3 10	Program 3.2.2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentasae jalan yang terbangun	%	N/A	N/A	N/A	84,50	14.900,00	86,00	45.000,00	88,00	50.000,00	90,00	55.000,00	90,00	173.172,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentasae jalan yang ditingkatkan	%	N/A	N/A	N/A	84,50	17.000,00	86,00	17.500,00	88,00	18.000,00	90,00	18.500,00	90,00	88.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentasae jalan yang dipelihara	%	N/A	N/A	N/A	71,00	23.000,00	72,00	23.500,00	73,00	24.000,00	74,00	24.500,00	74,00	118.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentasae jembatan yang terbangun	%	N/A	N/A	N/A	34,00	596,00	60,00	2.800,00	62,00	80.000	64,00	100.000	64,00	183.396,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentasae jembatan yang ditingkatkan	%	N/A	N/A	N/A	34,49	1.300,00	56,97	4.600,00	58,09	165.000	58,09	80.000	58,09	250.900,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase pambangunan/ peningkatan jalur pedestrian	%	N/A	N/A	N/A	38,00	40.000,00	50,00	60.000,00	62,00	60.000,00	66,00	20.000,00	6,00	180.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06	Program 1.1.3.4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	%	10,00	27,00	27,16	27,32	6.000,00	27,46	22.000,00	27,61	25.000,00	27,75	27.600,00	27,75	86.153,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)			
		Persentase dokumen Perencanaan Perencanaan SDA yang disusun	%	10,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	100,00	18.000,00	100,00	22.000,00	100,00	29.000,00	100,00	75.553,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 7.8. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
 Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Perumahan dan Permukiman

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2020		2021		2022		2023		2024					
							2018	2019	2020	Target	Pagu Indikatif . (djm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (djm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (djm Juta Rp)	Target			Pagu Indikatif . (djm Juta Rp)	Target
1 04 02	Program 1.1.3.5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	%	70,00	-	75,00	75,00	-	80,00	2.516,20	85,00	3.258,20	90,00	2.580,00	95,00	34.640,00	95,00	42.994,40	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Persentase tingkat hunian rumah susun	%	76,61	76,61	77,75	77,75	4.429,00	85,00	3.091,00	90,00	9.577,01	90,00	7.648,00	90,00	7.954,00	90,00	32.699,01	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Jumlah rekomendasi teknis pendukung kebijakan yang	dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	100,00	1,00	100,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 03	Program 1.1.3.6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Kumuh yang belum tertangani	Ha	401,35	310,93	272,00	428,91	7.746,00	375,86	5.706,20	313,68	9.358,60	252,71	17.324,12	192,24	24.195,33	192,24	64.330,25	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 05	Program 1.1.3.7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN LITIHITAS	Persentase Perumahan dan permukiman dengan PSU yang berkategori	%	68,44	74,50	76,29	78,97	109.470,00	81,65	48.040,70	84,33	52.524,95	87,01	35.514,00	89,69	121.850,00	89,69	367.399,65	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Persentase Makam Umum per satuan Penduduk	%	11,71	12,25	12,00	12,00	3.683,00	11,38	2.188,00	11,40	7.149,00	11,41	4.993,00	11,38	7.983,00	11,38	25.996,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
2 11 04	Program	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang terbangun (Ha)	Ha	437,21	465,87	465,93	0,05	3.228,00	1,70	1.442,58	1,00	12.670,87	0,80	15.000,00	0,80	16.000,00	470,22	48.341,45	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Luas RTH Publik yang terkelola dengan baik (Ha)	Ha	41,13	41,87	43,44	43,44	8.843,00	43,49	7.285,47	45,29	14.569,79	46,29	8.329,80	47,29	11.749,80	47,29	38.924,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 04	Program 3.1.3.2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	%	70,60	74,80	77,03	75,39	390,00	76,79	46.084,00	78,77	52.227,83	80,76	87.500,00	82,74	98.525,00	82,74	284.727,00	Dinas Perumahan dan Permukiman

Tabel 7.9. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
1 05 04	Program 1.1.3.8	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran	%	1,47	1,47	1,47	2,94	287,00	4,41	300,00	5,88	325,00	7,35	350,00	7,35	1.542,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Rata-Rata Respon time penanganan kebakaran	Menit	30 Menit	30 Menit	15,00	15,00	825,00	15,00	850,00	15,00	875,00	15,00	900,00	15,00	4.250,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
6 05 02	Program 2.1.4.1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	%						90,00	255,00	90,00	275,00	90,00	300,00	90,00	830,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%							90,00	1.800,00	90,00	2.000,00	90,00	2.200,00	90,00	6.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 03	Program 2.2.2.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan informasi Kebencanaan yang tersampaikan ke masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00	550,00	100,00	600,00	100,00	1.150,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2 05 03	Program 3.1.2.7		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan penanganan	%								100,00	140,00	100,00	140,00	100,00	281,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	Program 3.1.3.1		Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	%	16,17	23,53	23,53	29,41	275,00	32,35	300,00	41,18	600,00	50,00	600,00	50,00	2.025,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Persentase Sekolah aman bencana	%	2,15	3,05	3,41	3,76	175,00	4,12	200,00	5,20	250,00	6,27	275,00	6,27	1.050,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Tabel 7.10. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Sosial**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
1 06 7	Program 1.06.10	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	1.368	100,00	815,76	100,00	764,00	100,00	862,40	100,00	862,40	Dinas Sosial	
1 6 2	Program 3.1.2.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	%	23,47	27,85	77,05	100,00	617,13	100,00	748,20	100,00	889,66	100,00	978,63	100,00	978,63	Dinas Sosial	
		Persentase partisipasi Relawan Penyuluh Sosial yang aktif (%)	%	23,47	28,85	77,05	81,05		84,00		85,00		85,00		85,00		85,00	Dinas Sosial
1 6 4	Program 3.1.2.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	%	18,80	63,79	100,00	100,00	252,78	100,00	229,29	100,00	751,98	100,00	827,18	100,00	909,85	Dinas Sosial	
		Prosentase anjal, Gepeng dan WTS yang direhabilitasi	%	18,80	63,79	100,00	100,00	252,78	100,00	229,29	100,00	751,98	100,00	827,18	100,00	909,85	Dinas Sosial	
		Prosentase penurunan eks penyakit sosial (Eks Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Minuman keras, eks narapidana, dan penyakit sosial lainnya)	%	79,00	22,72	100,00	100,00	18,00	100,00	317,67	100,00	50,00	100,00	110,00	100,00	110,00	Dinas Sosial	
		Prosentase penyandang Disabilitas dan Trauma yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	111,22	100,00	85,62	100,00	90,00	100,00	99,00	100,00	99,00	Dinas Sosial	
		Persentase Kasus Kekerasan dan trafficking (trauma) yang diintervensi sesuai dengan kewenangan dinsos	%	100,00	100,00	100,00	100,00	67,72	100,00	127,66	100,00	135,00	100,00	140,43	100,00	140,43	Dinas Sosial	
		Jumlah lansia yang berdaya	Orang	150,00	100,00	46,00	100,00	227,70	100,00	150,00	100,00	126,97	100,00	139,67	500,00	139,67	Dinas Sosial	
1 06 05	Program 3.1.2.3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	%	91,45	75,32	66,30	85,00	149,91	87,00	198,39	88,00	574,49	88,50	631,94	88,50	631,94	Dinas Sosial	
		persentase jumlah PMKS yang tertangani	%	91,45	75,32	66,30	85,00	149,91	87,00	198,39	88,00	574,49	88,50	631,94	88,50	631,94	Dinas Sosial	
		persentase KK miskin	%	1,45	75,32	66,30	20,70	601,82	19,57	450,33	19,26	266,97	18,46	293,66	18,46	293,66	Dinas Sosial	
		Persentase penurunan anak terlantar	%	2,07	75,32	66,30	72,21	69,60	82,60	269,32	91,69	135,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial	
1 6 6	Program 3.1.2.4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	285,35	100,00	462,90	100,00	550,00	100,00	605,00	100,00	605,00	Dinas Sosial	
		Prosentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	285,35	100,00	462,90	100,00	550,00	100,00	605,00	100,00	605,00	Dinas Sosial	

**Tabel 7.11. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Tenaga Kerja**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif (dml Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dml Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dml Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dml Juta Rp)				
2 07 03	Program 3.1.1.1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat Kompetensi	%	NA	NA	NA	90,00	1189,00	90,00	983,00	100,00	1666,00	100,00	1843,00	100,00	5.682	Dinas Tenaga Kerja
		persentase perusahaan yang memiliki produktivitas tenaga kerja tinggi	%	NA	NA	NA	5,00		6,00		7,00		8,00		8,00		8,00	Dinas Tenaga Kerja
2 7 4	Program 3.1.1.2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	%	NA	NA	NA	62.30	1.071,00	63.50	850,00	64.70	982,00	65.60	997,00	65.60	55,00	Dinas Tenaga Kerja
2 7 5	Program 3.1.1.3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase rekomendasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit yg ditindaklanjuti	%	NA	NA	NA	100,00	254,00	100,00	279,00	100,00	307,00	100,00	353,00	100,00	1.195,00	Dinas Tenaga Kerja
		Penetapan Besaran UMK	Rupiah	3.842.785	4.169.806	4.169.806	4.330.249		4.350.249		4.370.249		4.390.249		4.390.249		4.390.249	Dinas Tenaga Kerja

**Tabel 7.12. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
2 08 06	Program 2.1.2.1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peringkat	Madya	Madya	Tidak ada Penilaian Kota Layak Anak	Nindya	70,00	Nindya	563,00	Nindya	897,00	Utama	930,00	Utama	930,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 07	Program 2.1.2.2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	%	75,00	76,00	60,00	78,00	696,00	79,00	482,00	80,00	1316,00	81,00	1351,00	81,00	1351,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Prevalensi kekerasan terhadap anak	angka	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 02	Program 2.1.4.2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	%	17	18,18	22,00	22,00	551,00	22,00	1.073,00	22,00	1.457,00	22,00	1.553,00	22,00	1.553,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	%	70,00	75,00	100,00	80,00	82,00	84,00	86,00	86,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2 08 05	Program 2.1.4.3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	%	70,00	75,00	78,00	80,00	101,00	82,00	153,00	84,00	170,00	86,00	190,00	86,00	190,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 03	Program 2.1.4.4	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	%	75,00	76,00	52,45	78,00	336,00	79,00	189,00	80,00	264,00	81,00	357,00	81,00	357,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)						
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)								
2	8	4			Program 3.1.3.3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	Point	NA	NA	85,20	74-75	1.768,00	75-76	1.713,00	76-77	1.940,00	76-77	1.751,00	76-77	1.751,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Tabel 7.13. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pangan**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif (d/m Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (d/m Juta Rp)				
2 9 03	Program 1.1.1.5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	poin	84,90	83,70	75,84	86,9	612,74	87,90	216,10	71,3	135,00	72,05	145,00	72,81	145,00	72,81	1.253,84	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 05	Program 1.1.1.6	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase pangan segar dan pangan olahan non kemasan yang aman dikonsumsi	%	91,53	93,96	90,81	93,00	150,52	93,50	88,16	94,00	45,00	94,50	60,00	95,00	60,00	95,00	403,68	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 3	Program 3.1.3.4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Daerah	%	NA	NA	NA							42,86	375,00	57,14	500,00	100,00	875,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2 09 03	Program 3.1.3.5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan energi	Kkal / Kapita/ Hari	2.512,80	2.592,90	2.375,00	2.400,00	528,37	2.400,00	217,58	2.247,00	209,49	2264,00	268,00	2.281,00	218,00	2.281,00	1.441,43	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Ketersediaan Protein	Gr/ Kapita/ Hari	89,40	110,30	68,00	63,00		63,00		64,30		65,00		65,70		65,70		
2 9 4	Program 3.1.3.6	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan	%	18,30	12,39	25,96	16,60	233,83	15,70	97,86	16,21	90,00	16,01	228,00	15,81	128,00	15,81	777,70	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

**Tabel 7.14. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Ururan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pertanahan**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
21004	Program 3.2.2.5	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase Sengketa Tanah yang difasilitasi sesuai SOP	%	83,00	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan

**Tabel 7.15. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Lingkungan Hidup**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
1.03.04	Program 1.1.3.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	%	NA	NA	NA	0,01	-	0,01	200,00	0,01	250,00	0,01	250,00	0,01	700,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	%	NA	NA	NA	0,02	-	0,02	250,00	0,02	275,00	0,02	300,00	0,02	825,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	%	NA	NA	NA	100,00	9.460,30	100,00	10.000,00	100,00	16.000,00	100,00	17.000,00	100,00	68.857,20	Dinas Lingkungan Hidup
			Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi	%	NA	NA	NA	100,00	4.858,80	100,00	3.150,00	100,00	8.000,00	100,00	8.000,00	100,00	24.008,80	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program 1.1.3.9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Reduksi Sampah (%)	%	6,30	6,89	7,61	6,60	1.126,90	6,80	1.375,00	7,00	1.400,00	7,20	1.550,00	7,20	5.556,70	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	%	76,00	77,04	77,20	74,50	10.655,40	77	16.700,00	77,5	17.500,00	78,00	17.500,00	78,00	72.412,60	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	%	195,900 m	48,80	48,80	48,80	4.785,50	48,80	5.150,00	48,80	6.000,00	48,80	7.000,00	48,80	25.186,10	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase peningkatan retribusi persampahan	%	9,50 Milyar	2,10	2,10	2,10	-	2,10	-	2,10	-	2,10	-	2,10	-	342,70

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
2 11 03	Program 1.1.4.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	Point	49,60	51,67	56,33	49,70	1.050,30	36,17	1.180,00	37,17	1.260,00	38,17	1.400,00	38,17	5.359,80	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara	Point	85,86	81,76	80,09	86,00	79,626	79,72	79,81	79,81	79,81	79,81	79,81	79,81	79,81	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	NA	NA	3,92	5,87	177,00	7,11	250,00	7,72	300,00	7,98	350,00	7,98	1.087,30	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 05	Program 1.1.4.3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	%	30,00	30,00	30,00	40,00	300,00	50,00	400,00	60,00	450,00	70,00	450,00	70,00	1.850,00	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06	Program 1.1.4.4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	%	35,00	26,11	37,00	30,00	400,00	34,00	415,00	38,00	450,00	39,00	470,00	39,00	1.820,30	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 08	Program 1.1.4.5	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan pelaku usaha	%	11,00	11,00	11,00	20,00	316,70	30,00	550,00	40,00	650,00	50,00	750,00	50,00	2.769,00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)				
2 11 09	Program 1.1.4.6	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan Hidup	%	3,00	3,97	5,29	6,62	533,80	7,94	700,00	9,26	850,00	10,59	1.000,00	10,59	3.553,80	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase sekolah adiwiyata	%	30,00	30	30	33		35		36		38		38		
2 11 10	Program 1.1.4.7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	275,00	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 2	Program 3.2.2.6	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	%	100,00	100,00	100,00	100,00	549,90	100,00	550,00	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00	2.676,90	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Ha	0,5	0,5	0,5	0,5	53,4	0,5	400	0,5	450	0,5	500	2,5	1403,4	Dinas Lingkungan Hidup

**Tabel 7.16. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
21204	Program 2.2.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan yang telah terintegrasi	%	63,00	64,00	69,00	75,00	320,00	81,00	2.030,00	87,00	2.740,00	95,00	3.360,00	95,00	8.770,00	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
2122	Program 3.1.3.7	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP	%	99,30	98,00	98,00	97,00	250,00	98,00	2.000,00	98,50	2.850,00	99,00	3.000,00	99,00	8.300,00	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
			Persentase Penduduk yang memiliki KK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	2.000,00	100,00	2.250,00	100,00	2.850,00	100,00	7.450,00	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
			Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	%	15,00	20,00	23,00	30,00	300,00	50,00	3.860,00	60,00	4.550,00	80,00	5.650,00	80,00	14.590,00	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
2123	Program 3.1.3.8	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran	%	94,07	94,07	95,00	96,00	550,00	97,00	3.000,00	98,00	4.000,00	99,00	4.500,00	99,00	10.200,00	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
			Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan	%	31,00	51,00	31,00	34,00	440,00	35,00	3.900,00	40,00	4.400,00	45,00	5.400,00	45,00	15.000,00	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan
21205	Program 3.1.3.9	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen profil kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	160,00	100,00	600,00	100,00	650,00	100,00	700,00	100,00	2.500,00	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan

**Tabel 7.17. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
21305	Program 2.1.4.11 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase lembaga kemasyarakatan yg aktif di kelurahan	persen	45,00	50,00	55,00	60,00	275,00	65,00	300,00	70,00	325,00	75,00	350,00	75,00	1500,00	Sekretariat Daerah Bagian kesejahteraan Rakyat	
		persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, RT, RW) Tingkat kecamatan yang aktif	%						65,00	36,00	70,00	36,00	75,00	36,00	108,00	953,00	Kecamatan	
2134	Program 2.2.1.1 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang melaksanakan pemutakhiran profil kelurahan	%	87,00	90,00	90,00	100,00	181,00	100,00	181,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	762,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	
2132	Program 2.2.1.2 PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan penataan desa	persen	NA	NA	NA	80,00	50,00	85,00	99,00	90,00	124,00	90,00	125,00	90,00	798,00	Sekretariat Daerah Bagian kesejahteraan Rakyat	

**Tabel 7.18. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)					
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)							
2	14	03		Program 1.1.1.4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Metode Kontasepsi jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)	%	22,36	22,45	20,27	20,30	898,12	20,35	1.448,91	20,40	1.450,00	20,45	1.600,00	20,45	7.307,10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2		Program 3.1.3.10	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kebijakan dan Program kerja daerah untuk pengendalian jumlah penduduk yang terimplementasi sesuai dengan rencana	%	NA	NA	NA	75,00	58,88	75,00	994,76	75,00	850,00	75,00	1.000,00	75,00	3.053,99	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Persentase PIK R Aktif	%	37,5	40,68	49,18	52,46		55,74		59,02		62,29		62,29		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04		Program 3.1.3.11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan) aktif	%	-	-	69,08	69,49	909,94	69,77	1.028,57	70,04	900,00	70,31	1.000,00	70,31	4.096,39	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Tabel 7.19. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Perhubungan**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	
							Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)			
21502	Program 3.2.3.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Nilai V/C Ratio jalan kota	Rasio				0,61	1.027,07	0,61	1.667,53	0,60	4.050,00	0,60	3.850,00	0,60	3.850,00	Dinas Perhubungan
		Rasio Konektivitas angkutan jalan lingkup kota	Rasio				0,78	54.949,33	0,80	73.230,57	0,82	205.830,00	0,85	189.920,00	0,85	189.920,00	Dinas Perhubungan
21505	Program 3.2.3.3 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase penetapan kebijakan jaringan perkeretaapian kewenangan kota	%				30,77	295.185,00	7,69	248,42	23,08	496,83	38,46	546,51	38,46	546,51	Dinas Perhubungan

**Tabel 7.20. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Komunikasi dan Informatika**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2018	2019	2020	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	
								Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)			
2 16 03	Program 2.2.2.3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	level	NA	NA	Cukup Informatif	Cukup Informatif	2.917,00	Cukup Informatif	7.860,00	Cukup Informatif	8.724,00	Cukup Informatif	12.013,00	Cukup Informatif	13.120,00	Cukup Informatif	44.634,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 03	Program 2.2.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Index	NA	2,29	2,29	2,29	77,00	2,71	197,00	2,72	270,00	2,73	350,00	2,74	430,00	2,74	1.324,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE	Index	NA	3,00	3,00	3,00	125,00	3,00	125,00	3,10	150,00	3,20	175,00	3,30	200,00	3,30	775,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi	index	NA	NA	NA	NA	NA	2,33	16.300,00	2,34	17.100,00	2,35	17.725,00	2,36	18.125,00	2,36	69.250,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Nilai aspek penerapan manajemen SPBE	Index	NA	NA	NA	NA	NA	2,70	1.940,00	2,80	7.140,00	2,90	14,95	3,00	2.490,00	3,00	13.065,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Tabel 7.21. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Koperasi dan UMKM**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
2 17 2	Program 3.2.1.2 PROGRAM PELAYANAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM	persentase peningkatan koperasi berijin	%	N/A	N/A	N/A	20,00	90,79										Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
									40,00	776,25	60,00	825,00	80,00	850,00	80,00	2.632,82	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2 17 3	Program 3.2.1.3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase koperasi yg berkualitas	%	N/A	N/A	N/A	62,50	63,28										Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
									8,00	700,00	9,00	850,00	10,00	900,00	10,00	2.576,56	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3 18 4	Program 3.2.1.4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang sehat	%	N/A	N/A	N/A	62,50	83,65										Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
									5,00	1.000,00	8,57	1.300,00	10,71	1.500,00	10,71	3.967,29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
4 19 5	Program 3.2.1.5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil	%	N/A	N/A	N/A	30,00	73,68										Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
									30,00	2.850,00	30,00	3.300,00	30,00	3.450,00	30,00	9.747,36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2 17 6	Program 3.2.1.6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN BERKINERJA	Persentase Koperasi aktif	%	N/A	N/A	N/A	6,88	1.080,92										Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)				
		PERLINDUNGAN KOPERASI	%						10,33	2.790,00	13,77	3.646,00	17,21	3.750,00	17,21	12.347,84	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2	17	7	Program 3.2.1.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan rata2 Omzet Usaha Mikro per orang per tahun	%	N/A	N/A	N/A	10,00	2.600,00							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
										15,00	3.800,00	20,00	3.800,00	25,00	4.000,00	25,00	16.800,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
2	17	8	Program 3.2.1.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase Usaha Mikro yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	%	N/A	N/A	N/A	12,00	2.250,00							Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
										13,00	13.000,00	14,00	13.000,00	15,00	13.000,00	15,00	43.250,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

**Tabel 7.22. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Penanaman Modal**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)				
2 18 02	Program 3.2.1.7	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	300,00	100,00	400,00	100,00	500,00	100,00	500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 03	Program 3.2.1.10	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Trilyun Rp.	3,10	2,60	1,60	2,53	400,00	2,50	950,00	2,58	450,00	2,60	950,00	2,60	950,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 04	Program 3.2.1.11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	%	64,00	70,00	75,00	85,00	3.060,00	95,00	3.570,00	100,00	4.100,00	100,00	4.600,00	100,00	4.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 05	Program 3.2.1.12	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	350,00	100,00	600,00	100,00	750,00	100,00	900,00	100,00	900,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 06	Program 3.2.1.13	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	%	100,00	100,00	100,00	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00	750,00	100,00	750,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

**Tabel 7.23. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
21903	Program 1.1.2.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga (APMO)	%	45,00	45,00	39,00	47,00	18.824,00	49,00	80.301,00	51,00	82.521,00	53,00	85.241,00	53,00	270.557,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Rasio ketersediaan SDM Tenaga Keolahragaan	Per jumlah penduduk	33,34	33,34	33,34	0,00166 1 : 2,08		0,00173 4 : 2,08		0,00118 08 : 2,08		0,00188 7 : 2,08		0,00188 7 : 2,08		Dinas Pemuda dan Olahraga
			Persentase Kawasan GOR yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal (%)	%	16,66	16,66	16,66	16,66		49,98		66,64		100,00		100,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
21902	Program 2.1.2.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	%	20,00	20,00	20,00	0,00	1.825,62	0,00	4.834,00	20,00	5.300,00	20,00	4.851,00	60,00	19.560,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Predikat Kota layak pemuda	Predikat	30,00	30,00	30,00	40,00		50,00		70,00		80,00		80,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
21904	Program 2.1.2.5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	916,00	100,00	950,00	100,00	1.100,00	100,00	1.150,00	100,00	1.150,00	Dinas Pemuda dan Olahraga

**Tabel 7.24. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Statistik**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian		Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)			
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)					
2	20	02																	
	Program 2.2.1.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																	
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	NA	NA	76,00	76,00	143,00	79,00	400,00	82,00	1400,00	85,00	1550,00	85,00	3.570		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Metadata Statistik Sektoral yang tersedia	%	NA	NA	NA	0,20	83,00	0,30	115,00	0,40	1.950,00	0,50	2.090,00	0,50	4.365		Dinas Komunikasi dan Informatika	

**Tabel 7.25. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Persandian**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)						
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)								
2	21	02			Program 2.2.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Level	NA	Level 1	Level 1	Level 1	1.100,00	Level 2	1.660,00	Level 2	1.810,00	Level 2	2.100,00	Level 2	8.370,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Tabel 7.26. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Kebudayaan**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
2 22 02	Program 2.1.4.5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	13,00	15,00	15,00	15,00	2.675,24	17,00	486,00	19,00	1.790,00	21,00	2.050,00	21,00	9.354,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 03	Program 2.1.4.6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	%	10,00	10,00	10,00	5,00	903,09	7,00	781,00	8,00	1.500,00	10,00	1.750,00	10,00	4.934,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 04	Program 2.1.4.7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	sarana	NA	NA	NA	0,00	0,00	6,00	0,00	7,00	400,00	7,00	450,00	7,00	850,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Jumlah Ketersediaan SDM pembinaan sejarah	orang	NA	NA	NA	0,00	0,00	195,00	0,00	200,00	250,00	200,00	300,00	200,00	550,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 05	Program 2.1.4.8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan	unit	18,00	18,00	18,00	18,00	1.000,34	25,00	5.365,00	25,00	180,00	25,00	180,00	25,00	6.725,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2 22 6	Program 2.1.4.9	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	%	NA	NA	NA	NA	0,00	0,00	NA	25,00	1.000,00	25,00	1.000,00	50,00	2.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

**Tabel 7.27. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Perpustakaan**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)			
							Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)					
2	23	02																	
	Program 2.1.2.5	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																	
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan Tingkat Kota	%	61,98	100,00	40,00	100,00	9.180,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	16.600,00			Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Persentase peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan/ perpustakaan keliling/taman bacaan	%	102,10	31,98	NA	35,00	70,00	40,00	75,00	56,00	80,00	76,00	85,00	76,00	375,00			Dinas Arsip dan Perpustakaan

**Tabel 7.28. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar bidang Arsip**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2018	2019	2020	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)					
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)							
2	24	02		Program 2.2.1.5	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase PD yang menyelenggarakan kearsipan secara tertib/baku	%	17,00	70,00	NA	17,00	248,00	38,00	250,00	58,00	255,00	79,00	260,00	100,00	265,00	100,00	1.278,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	03		Program 2.2.1.6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan	%	100,00	27,00	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	125,00	100,00	150,00	100,00	175,00	500,00	625,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2	24	04		Program 2.2.1.7	PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan penggunaan arsip yang dilaksanakan sesuai SOP	%	64,00	NA	75,00	75,00	0,00	85,00	0,00	95,00	0,00	100,00	50,00	100,00	75,00	100,00	75,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan

**Tabel 7.30. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Pilihan bidang Pariwisata**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
3 26 05	Program 3.1.1.4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	%	NA	NA	NA	NA	165,80	NA	478,68	0,16	600,00	0,83	1.050,00	0,83	2.294,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	%	NA	245,00	15,00	30,00	152,04	30,00	466,08	30,00	800,00	30,00	1.000,00	30,00	2.418,12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 2	Program 3.2.1.16	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Tingkat Hunian Akomodasi	%	NA	NA	NA	50,00	1.275,00	55,00	478,47	60,00	1.400,00	70,00	2.550,00	70,00	6.640,61	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				Persentase kunjungan wisatawan	%	NA	NA	NA	5,00	1.275,00	10,00	478,50	10,00	1.400,00	10,00	2.550,00	35,00	5.703,00
3 26 3	Program 3.2.1.17	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	7.965.987	9.160.885	3.457.722	3803494	351,64	4183843	459,00		1.350,00	5062449	1.630,00	5.062.449	3.791,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 4	Program 3.2.1.18	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Produk	70,00	70,00	40,00	40,00	-	40,00	153,17	40,00	800,00	40,00	1.200,00	40,00	2.630,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

**Tabel 7.31. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Pilihan bidang Pertanian**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	N/A	N/A	N/A			-2,14	81,00	-2,19	90,00	-2,24	90,00	-2,24	261,00	Dinas Ketahanan Pangan dan	
		Persentase jumlah sampel produk bahan pangan asal hewan yang tercemar	%	22,20	24,00	14,33	21,00	123,15	20,00	89,35	19,00	100,00	18,00	100,00	18,00	593,81	Dinas Ketahanan Pangan dan	
29 04	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura	%	N/A	N/A	N/A			10,35	414,64	39,46	525,00	50,19	535,00	100,00	2.148,64	Dinas Ketahanan Pangan dan	
		Persentase pemenuhan sarana peternakan	%	N/A	N/A	N/A			17,13	189,00	33,33	215,00	49,54	270,00	100,00		Dinas Ketahanan Pangan dan	
3 27 05	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pengelolaan kawasan LP2B	%	N/A	N/A	N/A			5,00	152,50	10,00	300,00	12,20	1.500,00	12,20	27.871,74	Dinas Ketahanan Pangan dan	
		Persentase pemeliharaan prasarana pertanian	%	N/A	N/A	N/A			80,00	574,99	85,00	11.126,75	90,00	14.217,50	90,00		Dinas Ketahanan Pangan dan	
3 27 06	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan sawah yang dikendalikan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	%	N/A	N/A	N/A			39,25	5,78	39,25	6,00	39,25	6,50	39,25	18,28	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	%	68,96	69,35	75,08			75,87	149,31	76,25	142,31	76,62	147,31	76,62	438,94	Dinas Ketahanan Pangan dan	

Tabel 7.32. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Pilihan bidang Perdagangan

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
3 30 03	Program 3.2.1.24	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan	%	0,26	0,52	1,03	1,53	199,00									Dinas Perdagangan
				%						1,60	406,00	1,70	445,00	1,80	470,00	1,80	1.520,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3 30 04	Program 3.2.1.25	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Laju Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil dan terjangkau	%	3,69	N/A	4,00	9,00	225,00									Dinas Perdagangan
				%						< 9,00	423,00	< 9,00	720,00	< 9,00	515,00	< 9,00	1.883,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3 30 05	Program 3.2.1.26	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Realisasi Ekspor	USD	85.581.555	99.283.772	95.674.216	71.710.150,65	270,00									Dinas Perdagangan
				USD						72.857.513,06	280,00	74.205.377,05	930,00	75.763.689,97	1.005,00	75.763.689,97	2.485,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3 30 06	Program 3.2.1.27	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase kesesuaian data dan akurasi ukuran	%	2,59	6,81	10,82	11,36	150,00									Dinas Perdagangan
				%						11,92	400,00	12,52	650,00	13,15	950,00	13,15	2.150,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

3	30	07		Program 3.2.1.28	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya	%	N/A	N/A	19,00	20,32	670,00								Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
							%						21,64	4.020,00	22,96	4.270,00	24,27	3.575,00	24,27	12.535,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

**Tabel 7.33. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Pilihan bidang Perindustrian**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024										Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif (dlm Juta Rp)			
							Pagu Indikatif (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif (dlm Juta Rp)					
3 30 2	Program 3.2.1.23 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	11,17	7,21	21,06	NA	21,50	4,60										Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 31 02	Program 3.2.1.29 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan IKM yang produktif	%	8,11	30,30	-2,99	2.970,00	2,00	1.100,00										Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3 31 03	Program 3.2.1.30 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah perusahaan yang berizin dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%																Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

**Tabel 7.34. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
4 01 02	Program 2.2.1.8 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase rekomendasi kebijakan bina mental yang ditindaklanjuti	%	80,00	83,40	78,00	80,00	8.342,00	85,00	8.677,00	85,00	9.621,00	90,00	10.431,00	90,00	43.123,00	Sekretariat Daerah Bagian kesejahteraan Rakyat	
		Prosentase rekomendasi kebijakan kesejahteraan yang ditindaklanjuti	%	73,00	74,00	75,00	80,00	21.918,00	85,00	33.595,00	85,00	56.078,00	90,00	56.240,00	90,00	168.888,00	Sekretariat Daerah Bagian kesejahteraan Rakyat	
		Prosentase kerjasama yang diimplementasikan sesuai dengan perjanjian kerjasama	%	70,00	70,00	70,00	75,00	1.035,00	80,00	1.075,00	85,00	1.115,00	90,00	1.145,00	90,00	4.985,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	
		Prosentase pelaksanaan pengadministrasian batas wilayah sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	
		Presentasi indikator kinerja kunci yg mencapai target	Point	3,10	3,30	-	3,15	175,00	3,17	185,00	3,20	195,00	3,22	205,00	3,22	840,00	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	
		Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai SOP (%)	%	90	100,00	100,00	95,00	1.425,00	95,00	1.425,00	95,00	1.425,00	95,00	1.425,00	95,00	6.509,00	Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan HAM	
		Prosentase penyelesaian perkara hukum (TUN dan Perdata)	%	100	100,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	4.515,00	Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan HAM	
		4 01 03	Program 2.2.1.9 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Pemanfaatan sistem informasi dalam pengadaan barang dan jasa	poin	NA	NA	0,00	20,00		24-26		25-27		26-28		26-28	

**Tabel 7.36. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)			
							Target	Pagu Indikatif . (dmln Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dmln Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dmln Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dmln Juta Rp)					
5 01 02	Program 2.2.1.12	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																	
		Persentase ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	%	75,00	61,11	64,82	67,00	1.830,00	69,00	1.835,00	71,00	1.840,00	73,00	1.945,00	73,00	9.275,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	21,00	22,90	22,90	23,00		24,00		25,00		26,00		26,00				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	85,00	100,00	100,00	90,00		95,00		95,00		3,00		100,00				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	5,00	5,00	11,00	7,00		20,00		23,00		25,00		25,00				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	24,00	40,62	19,34	10,00		12,00		12,00		12,00		12,00				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03	Program 2.2.1.13	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																	
		Persentase Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah bidang Pembangunan Manusia dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	67,70	76,33	77,83	77,00	2.955,00	79,00	3.950,00	82,00	3.045,00	85,00	3.090,00	85,00	15.950,00			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Keselarasan Rencana pembangunan Daerah bidang pemerintahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	67,70	76,33	77,83	77,00		79,00		82,00		85,00		85,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase keselarasan rencana pembangunan Daerah bidang perekonomian dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	67,70	76,33	77,83	77,00		79,00		82,00		85,00		85,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Keselarasan Rencana pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	67,70	76,33	77,83	77,00		79,00		82,00		85,00		85,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang pembangunan manusia	%	75,00	76,33	77,83	67,00		69,00		71,00		73,00		73,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang pemerintahan	%	75,00	76,33	77,83	67,00		69,00		71,00		73,00		73,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah Bidang perekonomian dan SDA	%	75,00	76,33	77,83	67,00		69,00		71,00		73,00		73,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	75,00	76,33	77,83	67,00		69,00		71,00		73,00		73,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Tabel 7.37. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)				
							Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)						
5	05	02																		
			Program 2.1.3.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	%	NA	50,00	50,00	50,00	1.725,00	50,00	4.895,00	50,00	2.640,00	50,00	1.240,00	50,00	11.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang di implementasikan dan berkelanjutan	%	34,00	34,00	66,00	67,00		68,00		69,00		70,00		70,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Prosentase inovasi masyarakat yang menunjang visi misi Kota Bogor	%	69,64	32,61	32,61	34,00		36,00		38,00		40,00		40,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Lokasi	NA	NA	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Tabel 7.8. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
7.03.02	Program 2.2.1.16 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	Point						105,00		110,00		120,00		120,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian	Point						44,00		44,00		49,00		49,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan	Point						125,50		128,00		134,00		134,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5.03.03	Program 2.2.1.17 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Evaluasi dan Penyelenggaraan Diklat	Point					25,50		30,50		33,00		33,00		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		

**Tabel 7.39. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah		Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)							
								Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)									
5 02 02			Program 2.2.1.14	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	31.250,00	100,00	31.350,00	100,00	31.350,00	100,00	31.350,00	100,00	31.350,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
5 02 03			Program 2.2.1.15	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	%	80,00	80,00	81,00	82,00	5.250,00	83,00	5.200,00	84,00	5.630,00	85,00	5.850,00	85,00	5.850,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
5 02 04			Program 3.2.1.32	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai pajak daerah	dalam Juta Rp.	592.979,00	689.495,00	509.042,00	565.600,00	4,24	716.175,00	5,96	787.793,00	6,56	866.572,00	7.210,00	866.573,00	29.702,00	Badan Pendapatan Daerah				
					Persentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah	%	6,75	16,28	-26,17	28,55		26,62		10,00		10,00		10,00		10,00		Badan Pendapatan Daerah		
					Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dalam Juta Rp.	718.549	1.013.756	840.415	966.463		1.042.635		1.133.107		1.226.673		1.226.673		1.226.673		1.226.673		Badan Pendapatan Daerah
					Persentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah	%	-20,32	41,08	-17,10	30,33		7,88		8,68		8,26		8,26		8,26		8,26		Badan Pendapatan Daerah

**Tabel 7.40. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)			
							Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)					
6.1.2.	Program 2.2.1.18	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	75,68 (CC)	97,03 (CC)	73,34	70,27	114,58	75,00	615,32	78,00	751,70	80,00	920,67	80,00	2.822,27	Inspektorat	
			Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Inspektorat
			Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	%	83,77	76,25	69,33	80,00		90,00		90,00		90,00		90,00			Inspektorat
			Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	%	95,07	94,26	94,39	75,00		80,00		85,00		90,00		90,00			Inspektorat
			Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	NA	75,68	75,68	80,00		85,00		90,00		95,00		95,00			Inspektorat
6.1.3.	Program 2.2.1.19	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penerapan SPIP pada perangkat daerah	%	43,24	NA	85,00	80,00	324,63	82,00	440,48	85,00	616,67	90,00	863,34	90,00	2.538,12	Inspektorat	
			Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00		6,00		1,00		1,00		8,00		Inspektorat	
			Persentase Capaian MCP KPK	%	69,00	87,00	87,00	76,31		76,45		76,56		77,00		77,00			Inspektorat

**Tabel 7.41. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Unsur Bidang Kewilayahan**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dln Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dln Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dln Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dln Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dln Juta Rp)				
9 01 04	Program 2.1.4.12	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%						86,00	658	88,00	690	90,00	725	85,00		Kecamatan	
9 01 03	Program 2.1.4.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%						100,00	70.000,00	100,00	80.676,00	100,00	80.676,00	100,00	231.352,00	Kecamatan	
		Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan	%						100,00		100,00		100,00		100,00		Kecamatan	
		Optimalisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	%						100,00	3.382,00	100,00	3.551,00	100,00	3.700,00	100,00	10.633,00	Kecamatan	
7 01 02	Program 2.2.1.20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%						100,00	295,00	100,00	300,00	100,00	325,00	100,00	920,00	Kecamatan	
		Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan	%						100,00	360,00	100,00	360,00	100,00	360,00	100,00	1.080,00	Kecamatan	

**Tabel 7.42. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (d/m Juta Rp)				
8 01 02	Program 2.1.4.13	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	rasio	3.950 orang	NA	0,06	12,75	200,00	13,00	299,00	13,25	200,00	13,50	200,00	13,50	1.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 03	Program 2.1.4.14	PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	%	pilwalkot = 75,35 Pilgub = 75,37 Pilpres = 83,87	Pilpres dan pileg = 84,5	0,00	0,00	650,00	0,00	750,00	0,00	850,00	100,00	950,00	100,00	3.750,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Persentase Partisipasi Perempuan sebagai anggota legislatif	%	39,90	22,00	22,00	22,00		22,00		22,00		22,00		22,00	22,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 1 04	Program 2.1.4.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	%	20,00	20,00	44,00	25,00	2.000,00	30,00	2.500,00	35,00	3.000,00	40,00	3.500,00	40,00	11.384,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8 01 05	Program 2.1.4.16	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Angka	0,00015	NA	0,00012	0,00011	200,00	0,00090	250,00	0,00070	300,00	0,00050	350,00	0,00050	1.250,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

8	01	06		Program 2.1.4.17	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi Konflik Sara yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	3.500,00	100,00	4.000,00	100,00	4.500,00	100,00	4.500,00	100,00	17.058,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
---	----	----	--	---------------------	--	--	---	--------	--------	--------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	-----------	--

**Tabel 7.43. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Urusan Penunjang**

Kode Rekening	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Capaian			Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2019-2024								Kondisi Akhir		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023		2024		Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)		
							Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)	Target	Pagu Indikatif . (dlm Juta Rp)				
x	xx	01																
	Program 2.2.1.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
		Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	8.303,00	100,00	9.146,88	100,00	11.725,00	100,00	15.242,69	100,00	44.417,71	Sekretariat Daerah Bagian Umum	
		Persentase Pelayanan keprotokolandan Komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	2.157,00	100,00	2.382,00	100,00	2.626,00	100,00	2.889,00	100,00	10.059,00	Sekretariat Daerah Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan	
		Nilai rata -rata indeks Kepuasan Masyarakat	Point	3,31	3,22	3,34	3,35	325,00	3,40	250,00	3,40	250,00	3,50	250,00	3,50	1.800,00	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
		Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota	Point	B	BB	BB	BB	250,00	A	224,00	A	250,00	A	250,00	A	1.574,00	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
		indeks kematangan organisasi	Point	3,84	44,90	45,41	45,55	525,00	45,69	250,00	46,11	300,00	46,52	300,00	46,52	2.325,00	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	
		Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Point	3,31	3,22	3,34	3,35	10.548,10	3,40	12.971,10	3,40	13.284,16	3,50	13.284,08	3,50	60.861,24	Seluruh Perangkat Daerah	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Point	B	BB	-	BB		A		A		A		A		Seluruh Perangkat Daerah	
		Gap Analysis Kompetensi	%	NA	NA	NA	30,00	358,00	30,00	1.253,00	25,00	1.284,00	20,00	1.316,43	20,00	4.220,76	Inspektorat	

BAB VIII

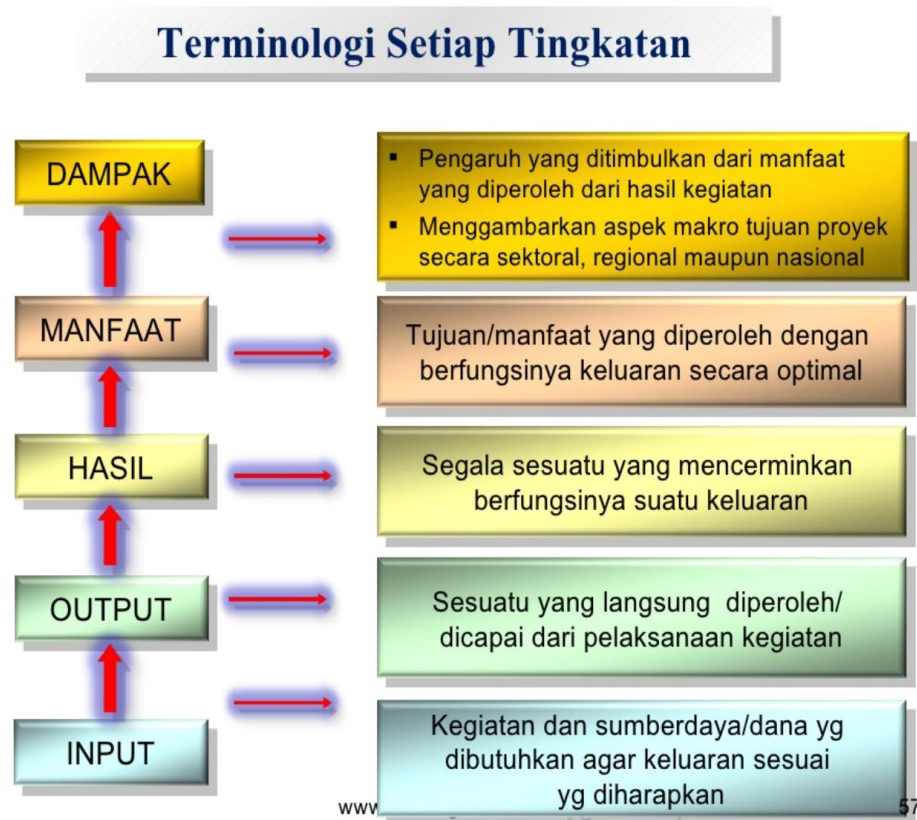
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Untuk pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah, diperlukan tahapan pencapaiannya, dan dari setiap tahapan tersebut perlu ditetapkan tolok ukur/indikator tingkat keberhasilannya. Berikut ini adalah terminologi tahapan pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Gambar 8.1
Terminologi tahapan pencapaian Visi Pembangunan Daerah



Sumber : Hasil Olahan Bappeda Kota Bogor Tahun 2019

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD diformulasikan menjadi 2 kategori yaitu :

1. Indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

- Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah.

8.1 PROYEKSI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KOTA BOGOR 2019-2024

Indikator Makro pembangunan Kota Bogor menjadi salah satu tolok ukur kunci keberhasilan rencana pembangunan Kota Bogor selama 5 tahun (Tahun 2019-2024). Berikut ini adalah Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel Berikut ini :

Tabel 8.1
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor 2020-2024

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET TAHUN 2020-2024									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Awal	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,66	76,67	76,11	77,22	76,59	77,78	77,194	78,33	77,754	78,89	78,314
2	Jumlah Penduduk	Dalam Ribu Jiwa	1,096	1,131	1,043	1,148	1,148	1,166	1,166	1,183	1,183	1,200	1,200
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,53	1,51	1,33	1,47	1,47	1,46	1,46	1,44	1,44	1,44	1,44
4	Angka Kemiskinan	%	5,93	5,8	6,68	5,78	7,24	5,53	6,90	5,28	6,56	5,00	6,21
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,65	8,47	12,68	8,22	11,79	7,97	11,32	7,80	10,84	7,60	10,37
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,14	6,66	-0,53	6,75	3,57	6,84	5,37	6,94	5,53	7,00	6,04
7	Indeks Gini Rasio	Angka	0,41	0,4	0,412	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,35	0,36	0,34
8	Tingkat Inflasi	%	3,69	2-4	2,18	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
9	PDRB per Kapita (AdhB)	Trilyun Rupiah	37,99	40,36	44,1	42,73	42,73	45,1	45,1	47,47	47,47	49,84	49,84

Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor, 2020

8.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Bogor yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bogor Tahun 2019-2024

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategik RPJMD	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Capaian		2021		2022		2023		2024	
				2019	2020	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,21	73,41	73,61	73,96	73,82	74,25	73,93	74,57	74,04	74,91	74,18
2	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	66,00	65,80	68,00	69,00	69,00	70,00	70,00	71,00	71,00	72,00	72,00
3	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Point	0,45	NA	0,39	0,47	0,47	0,49	0,49	0,51	0,51	0,53	0,53
4	Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum	%	91,44	92,58	93,15	94,86	56,6	96,85	59,3	98,29	62	67,4	67,4
5	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang aman	%	NA	NA	3,80	70,42	6,52	72,06	7,20	72,62	7,88	73,03	8,55
6	Persentase Luasan kawasan kumuh kewenangan kota	%	2,62	0	2,3	2,27	2,27	2,12	2,12	1,94	1,94	1,77	1,77
7	Persentase Reduksi Sampah	%	6,26	6,89	6,40	6,60	6,60	6,80	6,80	7,00	7,00	7,20	7,20
8	Indeks Kualitas Air	point	49,6	51,67	56,33	49,67	49,70	49,80	36,17	49,90	37,17	50,00	38,17
9	Indeks Kualitas Udara	point	85,86	81,67	80,09	86,00	86,00	86,10	79,626	86,20	79,72	86,30	79,814
10	Prosentase Ruang Terbuka Hijau Publik	%	5,89	4,18	13,11	5,92	4,20	5,94	4,21	5,95	4,21	5,96	4,25
11	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,30	10,32	10,33	10,97	10,53	11,31	10,62	11,65	10,74	12,00	10,87
12	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,38	13,40	13,41	13,90	13,42	14,20	13,63	14,50	13,83	15,00	14,03
13	Nilai rata-rata Ujian Nasional Tingkat SD	Angka	68,12	73,95	Tidak ada Ujian	68,18	Tidak ada Ujian	68,20	Tidak ada Ujian	68,23	Tidak ada Ujian	68,25	Tidak ada Ujian
14	Nilai rata-rata Ujian Nasional Tingkat SMP	Angka	58,27	61,07	Tidak ada Ujian	58,32	Tidak ada Ujian	58,36	Tidak ada Ujian	58,40	Tidak ada Ujian	58,42	Tidak ada Ujian
15	Indeks Pembangunan Pemuda	Point	NA	NA	NA	59,13	59,13	62,09	62,09	65,19	65,19	67,05	67,05
16	Indeks Inovasi Daerah	Point	600	30,46	5,162	611-620	611-620	621-630		631-640		641-650	
		Kategori							Inovatif		Inovatif		Inovatif
17	Indeks Pemberdayaan Gender	Point	67,37	68,91	69,03	70,50	70,50	71,50	71,50	72,50	72,50	73,50	73,50
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	NA	NA	68,51	71,00	71,00	71,50	71,50	72,00	72,00	72,50	72,50
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	A
20	Level Kematangan Smart City	Level	Scattered	Scattered	integrative	Integrative	integrative	Integrative	integrative	Smart	integrative	Smart	integrative
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,28	9,10	12,68	8,22	11,79	7,97	11,32	7,8	10,84	7,60	10,37
22	Angka Kemiskinan	%	5,93	5,77	6,68	5,78	7,24	5,53	6,90	5,28	6,56	5,00	6,21
23	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	NA	NA	85,20	74-75	74-76	75-76	75-77	76-77	76-78	76-77	76-78
24	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,14	6,04	-0,53	6,75	3,57	6,84	5,37	6,94	5,53	7,00	6,04
25	PDRB Per Kapita (Adh Berlaku)	Trilyun Rp	37,99	46,22	40,36	42,73	42,73	45,10	45,10	47,47	47,47	49,84	49,84
26	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	10,940	11,825	11,564	11,219	11,413	11,314	11,534	11,409	11,657	11,504	11,825
27	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	19,68	19,22	19,11	22,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00	25,00	25,00
28	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Rencana 2020-2024)	%	NA	20	20	40	40	60	60	80	80	100	100
29	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	NA	20	20	40	40	60	60	80	80	100	100
30	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%	88,5	88,79	83,47								
	Persentase jalan yang berkondisi mantap	%				89,25	84,50	89,50	86,00	89,75	88,00	90,00	90,00
31	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%	45	47,5	32	60	40	70	44	80	44	90	44

Sumber : Hasil Analisa Bappeda Kota Bogor, 2020

8.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicator* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan.

Indikator kinerja kunci yang dijadikan target dalam RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024, adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 8.3. berikut.

Tabel 8.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bogor 2019-2024

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
1	Laju Inflasi	%	3,69	2-4%	2,18%	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%	2-4%
2	PDRB per kapita	Trilyun Rp	37,99	40,36	40,36	42,73	42,73	45,10	45,10	47,47	47,47	49,84	49,84	49,84
3	Indeks gini	Point	0,413	0,41	0,412	0,39	0,380	0,38	0,370	0,37	0,350	0,36	0,340	0,340
4	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	%	94,07	94,2	93,32	94,22	92,76	94,47	93,1	94,72	93,44	95	93,79	93,79
5	indeks pembangunan manusia (IPM)	Point	76,23	76,67	76,11	77,22	76,59	77,78	77,19	78,33	77,75	78,89	78,31	78,31
6	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.096.828	1.131.890	1.126.927	1.148.968	1.148.968	1.166.046	1.166.046	1.183.124	1.183.124	1.200.202	1.200.202	1.200.202
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,39	1,51	1,33	1,47	1,47	1,46	1,46	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,14	6,66	-0,53	6,75	3,57	6,84	5,37	6,94	5,53	7,00	6,04	6,04
9	angka melek huruf	Persen	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
10	rata rata lama sekolah	Tahun	10,32	10,33	10,33	10,53	10,53	11,31	10,62	11,65	10,74	12,00	10,87	10,87
11	harapan lama sekolah	Tahun	13,38	13,41	13,41	13,9	13,42	14,2	13,63	14,50	13,83	15,00	14,03	14,03
12	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73,41	73,69	73,61	73,96	73,82	74,25	73,93	74,57	74,04	74,91	74,18	74,18
13	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs	Persen	4,8	4,75	10,66	4,7	10,20	4,65	10,10	4,60	10,00	4,55	9,90	9,90
14	Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	Persen	4,53	4,31	3,74	4,2	4,42	4,09	4,09	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
15	cakupan desa siaga aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	62,27	64,30	62,27	65,55	65,55	66,79	66,79	68,04	68,04	69,28	69,28	69,28
17	tingkat pengangguran terbuka	Persen	9,65	8,47	12,68	8,22	11,79	7,97	11,32	7,80	10,84	7,60	10,37	10,37
18	rasio penduduk yang berkerja	Persen	57,1	59,46	57,1	61,01	61,01	62,56	62,56	64,1	64,1	65,65	65,65	65,65
19	rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	Persen	90,35	90,62	90,35	90,80	90,80	90,85	90,85	90,90	90,90	90,91	90,91	90,91
20	keluarga pra sejahtera	Persen	7,38	7,00	7	6,50	6,50	6,00	6,00	5,50	5,50	5,00	5,00	5,00
21	indeks kepuasan masyarakat	point	3,31	3,32	3,34	3,43	3,35	3,45	3,40	3,48	3,40	3,50	3,50	3,50
22	persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	42,83	43,00	35,92	43,50	43,50	44,00	44,00	44,50	44,50	45,00	45,00	45,00
23	opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	84,90	86,90	75,84	87,90	87,90	88,90	71,3	89,90	72,05	90,90	72,81	72,81
25	penguatan cadangan pangan	Ton	5,40	30,00	8,18	26,72	26,72	26,66	10	26,59	10	25,52	10	56,72



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
26	Persentasi ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	persen	0,01	NA	0,00728	NA	NA	NA	0,0007	NA	0,0073	NA	0,072	0,072
27	kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	0,730	0,696	0,690	0,681	0,681	0,666	0,666	0,651	0,651	0,636	0,636	0,636
28	kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Konstan	persen	0,81	0,75	2,25	0,76	0,73	0,71	0,71	0,68	0,68	0,66	0,66	0,66
29	produksi Pertanian (Padi)	ton	5,439	5,548	4186	5,602	5,602	5,657	3367	5,711	3429	5,765	3767	3767
30	kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	18,34	18,22	18,04	18,18	18,18	18,13	18,13	18,08	18,08	18,03	18,03	18,03
31	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	21,21	21,07	NA	21,00	21,00	20,95	20,95	20,9	20,9	20,85	20,85	20,85
32	kontribusi sektor industri terhadap PDRB Konstan	persen	18,35	18,28	18,56	18,26	18,26	18,23	18,23	18,21	18,21	18,19	18,19	18,19

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
33	kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	0,212	0,211	19,52	0,21	21,00	0,209	20,90	0,209	20,90	0,208	20,80	20,80
34	kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar konstan	persen	0,22	0,218	19,39	0,217	21,70	0,216	21,60	0,215	21,50	0,214	21,40	21,40
35	kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	12,04	12,31	12,55	12,42	12,42	12,53	12,53	12,64	12,64	12,75	12,75	12,75
36	kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar konstan	Persen	22	21,76	12,04	21,66	21,66	21,56	21,56	21,46	21,46	21,36	21,36	21,36
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH													
1	Pengeluaran konsumsi perkapita	Ribu Rp.	10.940	11.124	11.124	11.219	11.413	11.314	11.534	11.409	11.657	11.504	11.825	11.825
2	Angka kriminalitas	Angka	0,00048	0,00047	0,00047	0,00046	0,00046	0,00045	0,00045	0,00044	0,00044	0,00043	0,00043	0,00043
3	Rasio ketergantungan	Persen	42,28	41,54	41,54	41,17	41,17	40,8	40,8	40,44	40,44	40,07	40,07	40,07
4	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	67,37	69,50	69,03	70,50	70,50	71,50	71,50	72,50	72,50	73,50	73,50	73,50
5	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	62,27	64,30	60,81	65,55	65,55	66,79	66,79	68,04	68,04	69,28	69,28	69,28



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
1	PENDIDIKAN													
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	49,06	50,00	49,06	50,55	50,55	51,00	51,00	51,50	51,50	52,00	52,00	52,00
2	Angka partisipasi sekolah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Murni													
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	108,05	108,05	98,06	108,07	98,10	108,08	98,30	108,09	98,50	108,1	98,80	98,80
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	94,14	94,15	88,01	94,20	76,00	94,25	77,00	94,30	78,00	94,35	78,00	78,00
5	Angka Partisipasi Kasar													
	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	112,60	113,00	107,27	113,05	109,50	113,08	110,00	114,00	110,50	114,30	111,00	111,00
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	104,10	104,30	107,80	104,80	100,50	105,00	101,00	105,50	101,50	106,00	102,00	102,00
6	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	Persen	115,27	115,28	99,91	115,29	100,00	115,30	100,00	115,31	100,00	115,32	100,00	100,00
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	Persen	30,93	30,94	95,32	30,95	96,00	30,96	97,00	30,97	98,00	30,99	99,00	99,00

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
1	PENDIDIKAN													
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0	0,06	0	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0	0,06	0	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
8	Angka kelulusan													
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Angka Melanjutkan (AM):													
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	111	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Fasilitas Pendidikan : Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	93,70	94,50	94,50	94,80	94,80	95,00	95,00	95,50	95,50	96,00	96,00	96,00
	Sekolah pendidikan SMP/MTs	Persen	94,70	94,80	94,50	95,00	95,00	95,20	95,20	95,40	95,40	95,60	95,60	95,60
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	33,14	33,15	39,00	33,16	33,16	33,17	33,17	33,18	33,18	33,19	33,19	33,19
12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	31,26	31,25	20,25	31,22	31,22	30,55	30,55	30,25	30,25	30,00	30,00	30,00



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
1	PENDIDIKAN													
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	01:33	01:33	01:45	01:33	01:33	01:33	01:33	01:32	01:32	01:32	01:32	01:32
14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP	Rasio	01:23	01:23	01:17	01:23	01:23	01:23	01:23	01:24	01:24	01:24	01:24	01:24
15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	99,73	100,73	102,02	101,05	101,05	101,37	101,37	101,69	101,69	102,00	102,00	102,00
16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,98	99,98	NA	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
17	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (Tidak buta aksara)	Persen	99,98	98,15	NA	97,80	97,80	97,46	97,46	97,11	97,11	96,77	96,77	96,77
18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	87,87	88,00	86,90	88,10	88,10	88,20	88,20	88,30	88,30	88,40	88,40	88,40
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Angka	49,00	50,00	48,50	50,55	49,00	51,00	49,50	51,50	50,00	52,00	50,50	50,50
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Angka	109,80	108,60	107,50	108,70	107,60	108,80	107,70	108,09	107,80	108,10	107,90	107,90

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
1	PENDIDIKAN													
21	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Angka	86,02	94,15	86,80	94,20	90,00	94,25	90,20	94,30	90,40	94,35	90,60	90,60
22	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam	Angka	1,42	1,43	1,43	1,44	1,44	1,45	1,45	1,46	1,46	1,47	1,47	1,47
2	KESEHATAN													
1	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka/Per 100.000 Kelahiran Hidup	61,00	55	74,50	50	70,00	45	65,00	40	60,00	30	55,00	55,00
2	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka/Per 100.000 Kelahiran Hidup	2,99	2,9	3,15	2,94	3,10	2,92	3,00	2,91	2,90	2,90	2,80	2,80
3	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Angka/Per 100.000 Kelahiran Hidup	3,35	3,35	3,36	3,34	3,30	3,33	3,20	3,32	3,10	3,00	3,00	3,00
4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,74	0,80	1,33	0,84	0,84	0,88	0,88	0,92	0,92	0,96	0,96	0,96

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
2	KESEHATAN													
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	96,10	97,00	93,10	98,00	98,00	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	Persen	80	85	87,00	90	86	95	90	100	95	100	100	100
8	Rasio Puskesmas Per 30.000 penduduk	Per 30.000 penduduk	0,68	0,66	0,67	0,67	0,67	0,70	0,70	0,70	0,70	0,72	0,72	0,72
9	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	98,50	99,00	63,20	99,5	90	100	92	100	95	100	100	100
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	96,50	97,00	7,90	97,50	97,50	98,00	98,00	98,50	98,50	99,00	99,00	100,00
12	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	non polio AFP rate	7 Kasus Negatif	0	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif	7 Kasus Negatif
13	Cakupan pneumonia balita yang ditangani	Persen	100	100	24,25	100	60	100	70	100	80	100	100	100
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100	100	58,88	100	70	100	80	100	90	100	100	100
15	Prevalensi Hipertensi	%	9,67	9,30	6,40	9,00	6,50	8,80	7,20	8,60	7,90	8,40	8,40	8,40

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
2	KESEHATAN													
16	Prevalensi Diabetes Militus	%	2,40	2,35	2,08	2,30	2	2,25	2	2	2	2	2	2
17	Persentase kesembuhan TB Paru	Persen	81,22	86	60,84	86,5	81,22	87	84,5	87,2	86,5	87,5	87,5	87,5
18	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	66/100.000 Penduduk	65,00	19,78	62,50	62,50	62,00	62,00	61,50	61,50	60,00	60,00	60,00
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Angka bebas jentik nyamuk DBD	Persen	95,00	95,30	50,03	95,40	95,40	95,60	95,60	95,70	95,70	96,00	96,00	96,00
21	Persentase penemuan penderita diare pada balita	Persen	100	100	21	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Persentase desa/kelurahan yang berpotensi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	0,42	<0,5	0,42	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	97,2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	%	68	80	72	85	85	90	90	95	95	100	100	100



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
2	KESEHATAN													
26	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	%	0	24	97,83	31	31	38	38	44	44	51	51	51
27	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	%	95,85	96	91,1	97	92	98	93	99	94	99,5	95	95
28	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	4	8% (2 puskesmas)	100	16% (4 puskesmas)	100	20% (5 puskesmas)	100	24% (6 puskesmas)	100	28% (7 puskesmas)	100	100 (25 puskesmas)
29	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar *(SPM)*IKU	Persen	97,60	100	93,61	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU	Persen	98	100	93,14	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
2	KESEHATAN													
31	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM)	Persen	90,10	100	96,63	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM)	Persen	98	100	78,84	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33	Persentase Komplikasi Kebidanan yang dideteksi dan ditangani	Persen	75	75	74,30	76	76	77	77	78	78	80	80	80
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100
36	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
2	KESEHATAN													
38	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
39	Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk	persen	2,40	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
40	Persentase Rumah sakit Rujukan tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi	persen	85,71	90	85,71	95	95	100	100	100	100	100	100	100
41	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	persen	100,30	100	93,61	100	100	100	100	100	100	100	100	100
42	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin	persen	99,10	100	93,14	100	100	100	100	100	100	100	100	100
43	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	persen	103,50	100	96,63	100	100	100	100	100	100	100	100	100
44	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100	100	78,84	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	51,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
2	KESEHATAN													
46	Persentase orang usia 15-29 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	78,67	100	18,78	100	100	100	100	100	100	100	100	100
47	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100	100	60,20	100	100	100	100	100	100	100	100	100
48	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	69,80	100	68,80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
49	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	102,91	100	88,50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	89,20	100	88,40	100	100	100	100	100	100	100	100	100
51	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	110,80	100	104,10	100	100	100	100	100	100	100	100	100
52	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	86,38	100	95,70	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	PEKERJAAN UMUM													
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	88,59	89	84	89,25	84,5	89,5	86	89,75	89,75	90	90	90
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	0,0660997	0,0642509	0,576	0,0634	0,7	0,0625	0,0625	0,0617	0,0617	0,0609	0,745	0,0609
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	Persen	88,59	89,00	84,00	89,25	84,50	89,50	86,00	89,75	88,00	90,00	90,00	90,00
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter)	Meter	66,44	67,00	66,70	67,50	69,55	68,00	71,55	68,50	73,55	69,00	75,55	75,55
5	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	67,21	67,47	3,72	70,42	3,80	72,06	7,20	72,62	7,88	73,03	8,55	8,55
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	11,01	27,16	11,17	32,60	27,32	43,40	27,46	54,20	27,61	65,00	27,75	27,75
7	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Persen	71,57	75	0,014	77,5	77,5	80	80	82,5	82,5	85	85	85
8	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	Lokasi	745	865	863	985	904	1,105	944	1,225	984	1,345	1024	1024
9	persentase irigasi kota dalam kondisi baik	Persen	45,83	58,75	57,50	60	51,45	61,25	52,23	62,5	53,01	63,75	53,79	53,79

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	PEKERJAAN UMUM													
10	Rasio jaringan irigasi	Point	0,2578	0,3304	0,2600	0,3374	0,3374	0,3445	0,3445	0,3515	0,3515	0,3574	0,3574	0,3574
11	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik	Persen	90	91,03	91,04	92,06	91,69	93,1	92,54	94,13	93,38	95,16	94,23	94,23
12	persentase penduduk berakses air minum	Persen	91,98	93,15	81,46	94,86	98,80	96,85	99,20	98,29	99,60	100	100	100
13	proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	persen	91,98	93,15	81,46	94,86	98,80	96,85	92,32	98,29	94,40	100	100	100
14	persentase areal kawasan kumuh kewenangan kota	Persen	2,62	2,44	2,44	2,27	2,27	2,12	2,12	1,94	1,94	1,77	1,77	1,77
15	tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	10,00	12,50	13,90	15,00	15,00	17,50	17,50	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00
16	rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	11,71	12,00	12,00	12,50	11,38	13,00	11,40	13,50	11,41	14,00	11,38	11,38
17	rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,0190	1,03	0,0200	1,03	0,0250	1,03	0,0300	1,03	0,0350	1,03	0,0350



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	PENATAAN RUANG													
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	persen	20	20	4,18 * (Rth Publik)	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	NA	37	0,0046	39	0,005	41	0,0055	43	0,0067	45	0,0073	0,0073
3	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	persen	80	82	82	84	84	86	86	88	88	90	90	90
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1	rasio rumah layak huni	persen	17,28	16,17	18,37	16,36	16,36	16,54	16,54	16,73	16,73	16,91	16,91	16,91
2	rasio pemukiman layak huni	persen	95,14	95,47	95,51	95,80	95,80	96,13	96,13	96,46	96,46	96,78	96,78	96,78
3	cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	70,59	74,80	75,00	76,79	76,79	78,77	78,77	80,76	80,76	82,74	82,74	82,74
4	persentase lingkungan pemukiman kumuh kewenangan kota	persen	2,62	2,44	3,99	2,27	2,27	2,12	2,12	1,94	1,94	1,77	1,77	1,77
5	persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (kewenangan kota, provinsi, pusat)	persen	4,31	3,77	3,85	3,32	3,37	2,79	2,82	2,28	2,27	1,77	1,73	1,73

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
6	proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	persen	1,09	1,07	0.64	1,05	1,05	1,03	1,03	1,01	1,01	0,99	0,99	0,99
7	cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	77,33	80,67	98.72	84,00	84,00	87,33	87,33	90,67	90,67	94,00	94,00	94,00
8	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Persen	NA	100	100	100	80	100	85	100	90	100	95	95
9	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten / Kota	Persen	NA	NA	NA	100	80	100	85	100	90	100	95	95
10	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang ditangani	Persen	100	93,22	94,01	86,68	86,68	80,77	80,77	74,17	74,17	67,57	67,57	67,57
11	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)	Persen	26,80	25,20	24,61	23,22	23,22	21,23	21,23	19,25	19,25	17,26	17,26	17,26
12	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Persen	8,16	11,53	11,53	15,11	10,72	3,57	11,91	7,14	13,10	10,72	14,29	14,29



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT													
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	rasio (RT/linmas)	3739	3739	3739	3739	3739	3739	3739	3739	3739	3739	3739	3739
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	90			90		90	90	90	90	90	90	90
3	Persentase Penegakan PERDA	persen	90			90		90	90	90	90	90	90	90
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	persen	68	70	100	72,50	72,50	75	75	77,50	77,50	80	80	80
5	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana	persen	75	77,50	77,50	80	80	82,50	82,50	85	85	85	85	85
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	≤15	≤15	15.1	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa	114.412	492.202	315.572	492.202	492.202	492.202	492.202	492.202	492.202	492.202	492.202	492.202

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT													
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa	52,099	492.202	241.188	492.202	492.202	492.202	492.202	492.202	492.202	492.202	492.202	492.202
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	12.889	3.000	2.727	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	persen	71,70	100	91,70	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	persen	75	75	87,10	87	90	90	90	91	91	93	100	100



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
6	SOSIAL													
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	Persen	91,45	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	96
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	91,45	92	66,30	93	85,00	94	87,00	95	88,00	96	88,50	88,50
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	91,45	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	96
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	Persen	8,90	12,80	32,00	15,50	15,50	17,90	35,00	20,50	40,00	23,07	43,07	43,07
5	Persentase pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	NA	3	3	50	16	66,60	86	83	100	100	100	100
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
6	SOSIAL													
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	24,32	26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	Persen	24,32	26	100	27	100	28	100	29	100	30	100	100
9	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	persen	$(534/1915 \times 100\%) = 27,88\%$	18,60	100	21,53	100	25,01	100	28,87	100	34,11	100	100
10	Persentase korban bencana alam dan sosial yg kebutuhan dasarnya terpenuhi pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota	persen	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
1	TENAGA KERJA													
1	Tingkat Kesempatan kerja (%)	%	90,38	91,53	87,74	91,87	91,87	92,20	92,20	92,51	92,51	92,81	92,81	92,81
2	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	Orang	2189	2500	965	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	12.500
3	Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	Orang	109.416	120.358	279.361	132.393	293.329	145.633	307.995	160.196	323.395	176.216	339.564	339.564
4	Penetapan besaran UMK	Rupiah	3.557.146	4.149.797	4.169.806	4.481.780	4.330.249,00	4.840.322	4.350.249,00	5.227.547	4.370.249,00	5.645.750	4.390.249,00	4.390.249,00
5	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Tenaga kerja	50	75	40	100	100	125	125	150	150	150	150	565
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Tenaga kerja	26	25	20	30	30	30	30	50	50	50	50	211
8	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	64,71	68,75	68,75	68,75	50	68,75	53,57	68,75	60,71	68,75	64,28	64,28
9	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	NA	NA	NA	19,88	90,00	22,28	90,00	24,68	100,00	27,08	100,00	100,00

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
1	TENAGA KERJA													
10	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	66,24	65,78	64,70	68.59	64.89	71.52	65.54	74.57	66,2	77.76	66.86	66.86
11	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	Persen	100	100	79,96	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/ Kota	Persen	58,75	21,10	21,10	22,40	22,40	23,70	23,70	25,00	25,00	26,30	26,30	26,30
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
1	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2,2	2,30	1,87	2,40	2,40	2,50	2,50	2,60	2,60	2,70	2,70	2,70
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bogor	Persen	18,18	18,18	22	18,18	22	18,18	22	18,18	22	19	22	22
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	11,72	12,22	7,39	12,72	12,72	13,22	13,22	13,72	13,72	14,22	14,22	14,22
4	Rasio KDRT	Persen	0,05	0,1	0,00019	0,15	0,0002	0,2	0,00021	0,25	0,00022	0,3	0,00023	0,00023
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	26,88	26,95	50,77	27,08	27,08	27,18	27,18	27,28	27,28	27,38	27,38	27,38



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	8,9	7,1	9	5,3	5,3	3,5	3,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	1,70	3,50	3,50	5,30	5,30	7,10	7,10	8,90	8,90	10,70	10,70	10,70
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	47,16	56,60	55,31	66,03	66,03	75,47	75,47	84,90	84,90	94,33	94,33	94,33
13	rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	99,93	99,94	93,92	99,95	99,95	99,96	99,96	99,97	99,97	99,98	99,98	99,98
14	rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	92,48	92,58	100,68	92,73	92,73	92,82	92,82	92,97	92,97	93	93	93
15	rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	97,49	97,58	100,72	97,63	97,63	97,77	97,77	97,81	97,81	98	98,01	98
16	rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persen	PUSAT											
17	Persentase ARG pada Belanja langsung APBD	poin	31,0	NA	25,0	NA	25,0	NA	25,0	NA	25,0	NA	25,0	25,0
18	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/kota	poin	0,0149	NA	0,0119	NA	0,0112	NA	0,0107	NA	0,0102	NA	0,0098	0,0098
19	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	poin	0,0104	NA	0,0155	NA	0,0090	NA	0,0088	NA	0,0087	NA	0,0086	0,0086



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
3	PANGAN													
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap/tahun	230,61	246,61	231,20	254,87	254,87	263,40	151,84	272,21	154,87	281,32	157,97	157,97
2	Ketersediaan energi perkapita	kcal/kap/hr	2512,80	2400	2.375	2400	2.400	2.400	2247	2.400	2264	2.400	2281	2281
3	Ketersediaan protein perkapita	gram/kap/hr	89,40	63	68	63	63	63	64,3	63	65	63	65,7	65,7
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	91,53	93,00	90,81	93,5	93,50	94,00	94	94,5	94,5	95	95	95
4	PERTANAHAN													
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	100	100	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	persen	77	70	73	75	75	80	80	85	85	85	90	90

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
5	LINGKUNGAN HIDUP													
1	Tersusunnya RPPLH kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terseleenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	49,60	40,36	56.33	40,47	49,70	40,58	36,17	40,69	37,17	40,80	38,17	38,17
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	85,86	80,10	80.09	80,21	86,00	80,32	79,63	80,34	79,72	80,54	79,81	79,81
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	50	50	26	46	30	55	34	64	38	72	39	39
7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	pelatihan	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
5	LINGKUNGAN HIDUP													
8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti.	Persen	50	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100
10	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	75,37	76,00	77,20	76,50	74,50	77,00	77,00	77,50	77,50	78,00	78,00	78,00
11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	6,26	6,40	6,40	6,60	6,60	6,80	6,80	7,00	7,00	7,20	7,20	7,20
12	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	81,47	80,10	80,40	81,50	81,10	82,20	81,80	82,90	82,20	83,80	82,70	82,70
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota	Poin	NA	NA	55,45	51,37	51,37	52,35	52,35	53,44	53,44	54,53	54,53	54,53
14	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten / Kota	Poin	77,04	76	77,20	76,50	74,50	77	77,00	77,50	77,50	78,00	78,00	78,00
15	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Persen	26,11	26	37,00	46	30	55	34	64	38	72	39	39

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	01:01	01:01	01:01	01:01	1 : 1	01:01	1 : 1	01:01	1 : 1	01:01	1 : 1	1 : 1
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	01:01	01:01	01:01	01:01	1 : 1	01:01	1 : 1	01:01	1 : 1	01:01	1 : 1	1 : 1
3	Rasio pasangan berakte menikah	Rasio	01:01	01:01	01:01	01:01	1 : 1	01:01	1 : 1	01:01	1 : 1	01:01	1 : 1	1 : 1
4	Ketersediaan database kependudukan skala Kota	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	sudah	sudah	Sudah	sudah	Sudah	sudah	Sudah	sudah	Sudah	sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	75	80	80	85	85	90	90	95	95	100	100	100
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	75	76	76	80	80	82	82	85	85	90	90	90
8	Kepemilikan KTP	Persen	98	99,50	99,30	99,80	97	100	98	100	98,50	100	99	99
9	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	94,07	95	95	96	96	97	97	98	98	100	100	100
10	Cakupan pasangan non muslim berakte kawin	Persen	51	25	33	30	34	35	35	40	40	45	45	45



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	LPM	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB													
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,39	1,51	1,33	1,47	1,47	1,46	1,46	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,15	2,15	2,135	2,15	2,135	2,15	2,135	2,15	2,135	2,15	2,135	2,135
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB	Persen	37,83	37,83	37,83	37,83	37,83	37,83	37,83	37,83	37,83	40,54	40,54	40,54
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	NA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB													
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan	Jumlah	NA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Ratio Akseptor KB	Persen	77,41	77,42	77,42	77,42	77,5	77,42	77,51	77,43	77,52	77,43	77,53	77,53
9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persen	77,41	77,42	77,42	77,42	77,5	77,42	85,67	77,43	86,17	77,43	86,67	86,67
10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persen	14,42	14,41	16,23	14,40	16,00	14,39	15,75	14,38	15,00	14,37	14,50	14,50
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,13	0,4	0,12	0,4	0,4
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	11,43	11,42	13,30	11,41	11,41	11,40	11,40	11,39	11,39	11,38	11,38	11,38
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	22,36	22,40	20,27	22,44	20,30	22,48	20,35	22,52	20,40	22,56	20,45	20,45
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	77,41	77,41	77,42	77,42	27,18	77,42	26,68	77,43	26,18	77,43	25,68	25,68



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB													
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	66	66,05	66,05	66,06	66,06	66,07	66,07	66,08	66,08	66,09	66,09	66,09
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	52,73	52,74	52,74	52,75	52,75	52,76	52,76	52,77	52,77	52,78	52,78	52,78
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	25,75	25,76	25,76	25,77	25,77	25,78	25,78	25,79	25,79	25,80	25,80	25,80
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	-	-	-	-	-	-	1	-	0	-	0	1
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	40,68	42,18	42,18	43,48	43,48	44,59	44,59	45,56	45,56	46,42	46,42	46,42
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	persen	39,94	39,94	39,94	39,94	39,94	39,95	39,95	39,95	39,95	39,96	39,96	39,96

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB													
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	94,9	94,9	94,9	94,9	96,6	96,6	96,6
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	70	77	77	79	79	81	81	83	83	85	85	85

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB													
27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	persen	35,13	35,30	35,30	35,47	35,47	35,64	35,64	35,81	35,81	36,00	36,00	36,00
28	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
29	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	Persen	77,41	77,41	77,42	77,42	77,5	77,42	77,51	77,43	77,52	77,43	77,53	77,53
30	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	11,43	11,42	13,30	11,41	11,41	11,4	11,4	11,39	11,39	11,38	11,38	11,38
9	PERHUBUNGAN													
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	24.060.642	22.442.108	16.662.600	23.140.448	23.140.448	23.890.192	23.890.192	24.696.261	24.696.261	25.564.066	25.564.066	113953567
2	Rasio ijin trayek	rasio (/Jml Pddk)	0,000381	0,0021	0,000336	0,0024	0,000309	0,0025	0,000435	0,0025	0,000309	0,0027	0,000189	0,000189
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	5,851	4504	5542	5,094	5526	5,307	5586	5,247	5620	5,593	5662	5662
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit terminal bis	3	3	2	3	2	4	2	4	2	5	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat	persen	1,11	1,36	1,36	1,22	1,22	1,11	1,11	1,02	1,02	0,94	0,94	0,94

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
9	PERHUBUNGAN													
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	100	100	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Pemasangan rambu-rambu	persen	25,64	14,91	86,92	15,07	90	15,08	95	15,17	100	15,11	100	100
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	1,31	1,25	1,25	1,19	1,19	1,13	1,13	1,08	1,08	1,03	1,03	1,03
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	penumpang	24.261.237	16.466.814	16.662.600	21.457.800	21.457.800	25.297.272	25.297.272	27.597.024	27.597.024	33.580.638	33.580.638	33.580.638
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga /bandara/terminal	penumpang	4.335.315	4.890.991	96.010	5.380.090	5.380.090	5.918.099	5.918.099	6.509.909	6.509.909	7.160.900	7.160.900	7.160.900
11	Rasio konektivitas Kabupaten / Kota	rasio	0,82	0,77	0,77	0,83	0,83	0,90	0,9	0,97	0,7	1,00	1	1
12	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	rasio	0,62	0,76	0,62	0,74	0,61	0,72	0,62	0,70	0,62	0,68	0,63	1
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	57	66	59	74	74	81	81	88	88	100	100	100
2	Hasil Penilaian SPBE	Indeks	2,91	2,92	2,97	2,92	2,97	2,93	2,98	2,93	2,98	2,94	2,99	2,99
3	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	persen	7	14	14	21	21	28	28	34	34	41	41	41
4	Persentase Keterbukaan Informasi public	persen	100	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
5	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	persen	71,81	71,81	72,69	73,57	73,57	74,45	74,45	75,33	75,33	76,21	75,33	75,33
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH													
1	Persentase Koperasi Aktif	persen	NA	65	NA	500	6,88	500	10,33	500	13,77	500	17,21	17,21
2	Persentase Koperasi berkualitas	persen	NA	8,7	NA	9,20	62,50	9,80	8,00	10,20	9,00	10,90	10,00	10,00
3	Jumlah UMKM (wirausaha) baru	UMKM	NA	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
4	Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun	Milyar Rupiah	2,3 T	68	68	81		95		109		329		
		%					10		15		20		25	25
5	Jumlah PKL yang direlokasi	PKL	418	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH													
6	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	PKL	418	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
7	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Produk	75	75	75	80	80	85	85	85	85	90	90	90
8	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	%	75	75	75	80	80	85	80	85	85	90	90	90
9	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Angka	44	64	64	84	84	104	104	124	124	144	144	144
10	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Angka	108	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
12	PENANAMAN MODAL													
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	trilyun rupiah	3,1	2,5	1,63	2,53	2,53	2,55	2,55	2,58	2,58	2,6	2,6	2,6
2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen	0	1,2	0,6	0,79	0,79	1,2	1,2	1,2	1,2	0,78	0,78	0,78
3	Persentasi peningkatan investasi di Kabupaten / Kota	persen	100	100	46	100	85	100	90	100	95	100	100	100



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA													
1	Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras	Persen	NA	NA	NA	5	0	5	5	5	5	5	5	15
2	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	Persen	20,00	20	20	40	0	60	0	80	20,00	100	20,00	60,00
3	Wirusaha muda	orang	25	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	175
4	Persentase sarana prasarana Olahraga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal	Persen	33,34	33,34	33,34	50,01	33,34	66,67	50,01	83,33	66,67	100	83,33	83,33
5	Rasio ketersediaan SDM Tenaga keolahragaan	Per 916.052 Penduduk	33,34	0,001552 : 2,08	0,00155 : 2 : 2,08	0,001661 : 2,08	0,001661 : 2,08	0,001734 : 2,08	0,001734 : 2,08	0,0011808 : 2,08	0,0011808 : 2,08	0,001887 : 2,08	0,001887 : 2,08	0,001887 : 2,08
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	0,27	0,01	0,014	0,004	0,0148	0,006	0,0148	0,004	0,0148	0,002	0,0148	0,0148
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	24	25	4,33	25	4,55	25	5,01	25	5,51	25	6,06	6,06
8	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	18	NA	NA	68	0	200	13	64	12	27	15	40

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
14	STATISTIK													
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	Ada	N/A	ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	ada	ada
2	Data basis pembangunan daerah	ada/tidak	Ada	N/A	Ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	ada	ada
3	Buku "Kota Bogor Dalam Angka"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	ada	ada
4	Buku "PDRB"	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	ada	ada
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	PERSANDIAN													
1	Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah	persen	NA	20	20	30	30	60	60	70	70	80	80	80
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	79	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	83



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
16	KEBUDAYAAN													
1	Presentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian pelaku seni/budaya	Persen	10	10	NA	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	18	18	18	NA	18	NA	25	NA	25	NA	25	25
3	jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasangiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni	buah	15	15	19	17	15	19	17	21	19	23	21	21
4	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	Persen	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	10
17	PERPUSTAKAAN													
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	pemustaka	25.421	35.000	28.530	42.000	42.000	60.000	60.000	76.000	76.000	100.000	100.000	100.000
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	67,999	77,37	77,684	79,87	79,87	82,37	82,37	84,87	84,87	87,37	87,37	87,37
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	perpustakaan	6,60	7,50	8,40	7,70	7,70	8,00	8,00	8,20	8,20	8,40	8,40	8,40
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	pemustaka	25.421	35.000	28.530	42.000	42.000	60.000	60.000	76.000	76.000	100.000	100.000	100.000
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	37,017	39,517	38,255	42,017	42,017	44,517	44,517	47,017	47,017	49,517	49,517	49,517
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	4	7	6	9	9	11	11	13	13	15	15	15

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
18	KEARSIPAN													
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	NA	25	67	45	45	70	70	95	95	120	120	120
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	NA	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN													
1	PARIWISATA													
1	Kunjungan wisata	Orang	7.965.987	7.004.033	3.457.722,00	7.704.436	3.803.494	8.474.879	4.183.843	9.322.366	4.602.227	10.254.602	5.062.449	5.062.449
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	1-2 hari	1-2 hari		1-2 hari	1-2 hari	2-3 hari	2-3 hari	2-3 hari	2-3 hari	2-3 hari	2-3 hari	2-3 hari
3	PAD sektor pariwisata	Milyar Rupiah	239,35	130	157,86				279		284		312	
2	PERTANIAN													
1	Produktivitas padi per hektar	ton/ha	7	7,14	7,18	7,21	7,21	7,28	7,2	7,35	7,25	7,47	7,3	7,3
2	Cakupan bina kelompok petani	persen	68,97	70,25	75,08	71,43	71,43	72,52	75,87	73,35	76,25	74,47	76,62	76,62
3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	NA	NA	NA	NA		NA	-2,14	NA	-2,19	NA	-2,24	-2,24
4	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	13,14		13,40	NA	NA	NA	13,67	NA	13,81	NA	13,94	13,94



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
C	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN													
3	PERDAGANGAN													
1	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor	persen	99.283.771,63 USD	1,10	-25,86	1,35	1,35	1,60	1,60	1,85	1,85	2,10	2,10	2,10
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan (IUUP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko/ swalayan)	persen	11,17	10,00	21,06	13	21,50	15	22,00	20	22,50	25	23,00	23,00
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	16,10	20	87,44	22	22	23	23	23	23	24	24	24
4	Persentase alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Bertanda terasah yang berlaku	persen	6,81	13,80	10,81	22,87	11,36	24,01	11,92	25,21	12,52	26,47	13,15	13,15
4	PERINDUSTRIAN													
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	75	77,5	77,5	80	80	82,5	82,5	85	85	85	85	85
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	persen	130,30	8,21	7,06	9,00	7,06	10	7,06	11	7,20	12	7,50	7,50
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	persen	0	-2,17	30	1,83	0	4,0	0	5,0	0	5,0	0	0

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
C	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN													
4	PERINDUSTRIAN													
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi	persen	28,41	30	29,41	32	29,41	34	29,41	36	29,41	38	29,41	29,41
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi	persen	100%	100%	100	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	0
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten / Kota	persen	100	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	0
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	persen	0	8	7,14	18	7,3	30	7,5	44	7,7	50	7,9	7,9



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
C	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN													
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN													
1	Produksi Ikan Konsumsi	ton	5.063,14	5.129,00	5.150,99	5.179,00	5.179,00	5229	5.204,10	5279	5.229,00	5329	5.253,90	5.253,90
2	Jumlah Konsumsi Ikan	kg	28.599.839	30.939.680	28.899.474	31.553.524	30.519.765	32.158.194	31.130.160	32.836.697	31.749.711	33.208.759	32.378.540	32.378.540
3	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) wilayah kabupaten/kota (sumber	Ton	5063,14	5.129	5150,99	5.179,00	5.179,00	5229	5.204,10	5279	5.229,00	5329	5.253,90	5.253,90
D	FOKUS PENUNJANG URUSAN													
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN													
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
D	FOKUS PENUNJANG URUSAN													
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN													
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
D	FOKUS PENUNJANG URUSAN													
2	KEUANGAN													
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	persen	10,88	10	11,9	9,5	9,5	9	9	8,5	8,5	8	8	8
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	10,88	10	11,90	9,5	9,5	9	9	8,5	8,5	8	8	8
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	persen	23,49	≥20	21,15	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	persen	16,54	≥10	21,7	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
8	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	persen	0,05	0,15	0,21	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
D	FOKUS PENUNJANG URUSAN													
2	KEUANGAN													
9	Opini Laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Devisiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	12	11	12	11	11	10	10	10	10	10	10	10
11	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD setahun sebelumnya	persen	10	11	25	11	11	10	10	10	10	10	10	10
12	Devisiasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Manajemen Aset : Adanya Daftar Aset Tetap	predikat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Penyusunan Manual daftar aset tetap	predikat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
15	Adanya proses inventarisasi aset tahunan	predikat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
16	Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	predikat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
D	FOKUS PENUNJANG URUSAN													
3	KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT													
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	91,84	92	94,12	92,50	92,50	93	93	93,50	93,50	94	94	94
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	persen	68	75	52,72	77,50	77,50	80	52	82,50	55	85	57	57
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34	34	35	34	34	34	35	34	35	34	35	35
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	150	150	157	150	150	150	150	150	150	150	150	150
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3690	3700	3651	3710	3710	3720	3720	3730	3730	3740	3740	3740
7	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	101,53%	NA	104%	NA	105%	NA	105%	NA	110%	NA	115%	115%

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
D	FOKUS PENUNJANG URUSAN													
3	KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT													
8	Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	9,52	NA	10%	NA	12%	NA	24%	NA	25%	NA	26%	26%
9	Rasio pegawai fungsional bersertifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	100	NA	100	NA	100	NA	100	NA	100	NA	100	100
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	persen	100	100	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Penerapan SIDA : Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	persen	73,68	75	100	77,50	100	80	100	82,5	100	85	100	63,89
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Target	Capaian	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM													
D	FOKUS PENUNJANG URUSAN													
5	PENGAWASAN													
1	Persentase pelanggaran pegawai	persen	1,3	0,400	0,380	0,05	0,35	0,025	0,320	0,012	0,300	0	0,290	0,290
2	Persentase tindak lanjut temuan internal	persen	100	100	55,46	100	80	100	90	100	90	100	90	90
3	Persentase tindak lanjut temuan eksternal	persen	100	90	94,39	100	75	100	80	100	85	100	90	90
4	Maturitas SPIP	predikat	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5	Peningkatan kapabilitas APIP	predikat	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
6	SEKRETARIAT DPRD													
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bogor, RPJPD Propinsi Jawa Barat dan RPJMN.

Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 sudah mencakup kebijakan- kebijakan dan strategi untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19 pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan sektor lainnya. Disamping itu dalam Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 telah menyesuaikan dan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Dokumen Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2024.

9.1. Kaidah Pelaksanaan Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024

RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi pemerintah Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor tahun 2022-2024, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat

daerah tahun 2019-2024. Dalam Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 telah memuat capaian realisasi program hingga tahun 2020. Agar pelaksanaan program pembangunan Kota Bogor hingga tahun 2024 selaras dengan yang diamanatkan pada Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

9.2. Pedoman Transisi Dalam Rangka Menjaga Kestinambungan Pembangunan

Pada masa transisi dimana Dokumen Perubahan RPJMD Kota Bogor 2019-2024 telah habis masa berlakunya dan belum ditetapkannya RPJMD 2024-2030, maka diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Sebagaimana diketahui, Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kota Bogor. Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada RPJPD Kota Bogor 2005-2025. Selanjutnya RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Bogor Tahun 2025. Pemerintah Kota Bogor akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2024, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya.

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA